

Optimizing **Strengths** Into **Excellence**, Enhancing Capacity for **Growth**

2017
Laporan Tahunan
Annual Report

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

TENTANG LAPORAN TAHUNAN 2017

Penyusunan Laporan Tahunan 2017 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), merujuk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai penyajian keterbukaan informasi yang harus disampaikan dalam Laporan Tahunan. Laporan Tahunan 2017 mengambil tema "*Optimizing Strengths Into Excellence. Enhancing Capacity for Growth*". Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis serta kajian yang komprehensif terhadap fakta dan perkembangan bisnis Perseroan pada 2017. Selain itu, tema tersebut juga dipilih dengan mempertimbangkan proyeksi keberlanjutan bisnis Perseroan.

Laporan Tahunan 2017 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) disusun sebagai sumber dokumentasi yang memuat berbagai informasi terkait kinerja Perseroan selama 2017, mencakup kondisi keuangan, hasil kegiatan operasional, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perseroan. Laporan Tahunan ini juga memuat informasi lengkap yang memaparkan profil Perseroan, kinerja pemasaran, operasional dan keuangan, serta informasi terkait tugas, peran, dan fungsi struktural organisasi Perseroan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, baik peraturan internal maupun eksternal Perseroan, serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Penyusunan Laporan Tahunan ini bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi, baik dalam lingkup internal maupun untuk lingkup eksternal termasuk otoritas terkait. Melalui keterbukaan informasi pada Laporan Tahunan ini, para pemegang saham serta seluruh *stakeholders* dapat memperoleh informasi yang memadai terkait berbagai kegiatan yang telah dan akan dilakukan, serta berbagai informasi terkait capaian kinerja Perseroan di tahun buku 2017.

Laporan Tahunan yang telah disusun diharapkan dapat membangun pemahaman dan kepercayaan atas Perseroan melalui penyediaan informasi yang tepat, berimbang dan relevan.

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

Pernyataan-pernyataan dalam Laporan Tahunan ini memiliki prospek risiko dan ketidakpastian serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual yang berbeda secara material dari yang dilaporkan.

Berbagai pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan bisnis dimana Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Perseroan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan ini memuat kata "PT PPA" atau "Perseroan" yang didefinisikan sebagai PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang menjalankan kegiatan usaha meliputi pengelolaan aset negara eks BPPN, restrukturisasi dan/atau revitalisasi (R/R) BUMN, kegiatan investasi, dan pengelolaan aset BUMN. Adakalanya kata "kami" juga digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) secara umum.

Optimizing Strengths into Excellence, Enhancing Capacity for Growth



Perseroan telah mengembangkan kekuatan dengan memperluas, memperkuat, mempertajam dan lebih memfokuskan bisnis pada 4 segmen bisnis yang diamanatkan pemegang saham. Dalam perjalanannya, Perseroan telah berhasil mengubah kelemahan menjadi sesuatu kekuatan yang membawa Perseroan mencapai kinerja yang optimal.

Meskipun demikian, Perseroan tidak boleh merasa puas dengan pencapaian dan posisi yang sekarang. Sebaliknya harus tetap mengoptimalkan kekuatan-kekuatan yang di miliki dengan memanfaatkan peluang-peluang yang menarik di Indonesia untuk meraih pertumbuhan yang optimal dan sempurna. Upaya tersebut berhasil memacu kinerja usaha Perseroan di tahun 2017, sekaligus meletakkan dasar bagi percepatan pertumbuhan di tahun-tahun mendatang.

DAFTAR ISI



01 KILAS KINERJA

7



02 LAPORAN MANAJEMEN

25



03 PROFIL PERUSAHAAN

45



04 TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

77



05 ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

97



06 TATA KELOLA PERUSAHAAN

163



07 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

261

TENTANG LAPORAN TAHUNAN 2017	2	KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM DAN EFEK LAINNYA	70	KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG	220
DAFTAR ISI	4	ENTITAS ANAK	71	SEKRETARIS PERUSAHAAN	230
01 KILAS KINERJA	7	KERJA SAMA OPERASI (JOINT VENTURE)	71	AUDIT INTERNAL	235
PENCAPAIAN 2017	8	STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN	72	AUDITOR EKSTERNAL	239
IKHTISAR KEUANGAN	10	LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL	73	MANAJEMEN RISIKO	242
IKHTISAR SAHAM	13	INFORMASI PADA SITUS PERSEROAN	74	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL	248
IKHTISAR OBLIGASI/ SUKUK/OBLIGASI KONVERSI	13	NAMA DAN ALAMAT ENTITAS ANAK	75	PERKARA HUKUM	250
PERISTIWA PENTING 2017	14	04 TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS	77	AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN	252
PENGHARGAAN	23	SUMBER DAYA MANUSIA	78	KODE ETIK	254
02 LAPORAN MANAJEMEN	25	TEKNOLOGI INFORMASI	85	SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN	257
LAPORAN DEWAN KOMISARIS	26	05 ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	97	07 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	261
LAPORAN DIREKSI	34	TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA	98	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	262
03 PROFIL PERUSAHAAN	45	KINERJA KEUANGAN	116	TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP	265
IDENTITAS PERUSAHAAN	46	06 TATA KELOLA PERUSAHAAN	163	ASPEK PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	267
SEJARAH SINGKAT PERSEROAN	48	TATA KELOLA PERUSAHAAN	164	ASPEK KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	270
PERUBAHAN NAMA PERSEROAN	49	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	170	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN	273
JEJAK LANGKAH	50	DEWAN KOMISARIS	176		
BIDANG USAHA	52	DIREKSI	194		
STRUKTUR ORGANISASI	55	PENGUNGKAPAN PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	205		
VISI, MISI DAN NILAI PERUSAHAAN	56	ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS	208		
PROFIL DEWAN KOMISARIS	60				
PROFIL DIREKSI	64				
SENIOR MANAJEMEN	68				
KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM	70				





01

KILAS KINERJA
2017

PENCAPAIAN 2017



Pendapatan usaha mengalami pertumbuhan sebesar Rp1,36 triliun atau 27,11% dari Rp5,00 triliun di tahun 2016 menjadi Rp6,36 triliun di tahun 2017

27,11%



Laba bersih mencapai Rp326,49 miliar, tumbuh sebesar Rp45,22 miliar atau 16,08% dari Rp281,27 miliar di tahun 2016

16,08%

88,04

dengan kualifikasi
"Sangat Baik"

**Skor Penilaian Penerapan
Tata Kelola Perusahaan
Tahun 2017**

**94**

"Sehat"
dengan klasifikasi
kesehatan
"AA"

**Skor Tingkat Kesehatan
Perseroan dan
Klasifikasi Kesehatan
Tahun 2017**



IKHTISAR KEUANGAN

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	2017	2016	2015	2014	2013
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF					
Hasil Pengelolaan Aset	27.080	65.275	57.999	117.665	202.223
Setoran ke Pemerintah	50.627	4.741	89.798	102.053	102.192
Pendapatan Usaha	6.355.757	5.000.360	3.969.614	2.151.805	1.995.195
Laba Usaha	572.843	414.169	360.947	150.979	120.760
Laba Bersih	326.485	281.266	170.962	116.893	103.517
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik Entitas Induk	324.045	279.466	170.274	116.444	103.100
Kepentingan Non Pengendali	2.440	1.800	688	449	417
Laba Komprehensif	577.453	297.016	130.001	217.167	87.748
Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik Entitas Induk	572.411	295.242	129.337	216.502	87.331
Kepentingan Non Pengendali	5.042	1.774	664	665	417
Modal Kerja Bersih	2.323.401	2.195.097	2.407.200	1.119.719	755.689
Jumlah Kewajiban	4.770.677	3.738.501	3.435.716	2.469.464	2.039.311
Jumlah Ekuitas	4.709.691	4.151.328	3.864.528	2.747.807	2.540.951
Laba (Rugi) per saham (Angka Penuh)	108.134	93.258	85.280	58.318	51.635
BEBAN USAHA					
Beban Bunga Bank	89.149	60.456	54.978	25.177	12.733
Pegawai	240.992	247.346	196.575	174.514	183.518
Penyisihan (Pemulihan) Penurunan Nilai Piutang	(19.652)	(23.373)	19.122	26.589	(4.997)
Beban Proyek	5.203.415	4.145.503	3.217.813	1.724.742	1.590.449
Sewa dan Asuransi	35.418	32.640	30.865	24.354	22.837
Perjalanan Dinas	18.442	15.971	14.798	2.034	3.302
Investasi	8.043	24.364	8.568	1.881	1.993
Pemasaran dan Penjualan	12.285	11.846	8.318	-	-
Imbalan Pasca Kerja - Bersih	5.673	5.903	13.358	2.443	2.500
Keperluan Kantor	36.287	42.909	3.885	6.772	39.320
Penyusutan	26.096	9.994	10.840	5.090	4.791

dalam jutaan Rupiah					
Keterangan	2017	2016	2015	2014	2013
Jasa Konsultan	6.297	12.070	1.699	865	8.198
Lain-lain	62.308	562	27.848	6.365	9.791
Total Beban	5.782.914	4.586.191	3.608.667	2.000.826	1.874.435
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	332.930	283.400	185.888	121.835	158.950
Beban Pajak Penghasilan	6.445	2.134	14.926	4.942	55.433
Laba Tahun Berjalan	326.485	281.266	170.962	116.893	103.517
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	577.453	297.016	130.001	217.167	87.748

LAPORAN POSISI KEUANGAN					
Aset	9.480.368	7.889.829	7.300.244	5.217.271	4.580.262
Kas dan Setara Kas	1.694.156	1.534.252	2.346.889	935.152	953.043
Liabilitas	4.770.677	3.738.501	3.435.716	2.469.464	2.039.311
Investasi pada Entitas Asosiasi	972	789	592	500	500
Investasi Jangka Panjang Lainnya	41.818	42.535	592	500	500
Investasi pada Ventura Bersama	348.689	340.884	276.005	455.821	391.700
Produktivitas Tenaga Kerja (induk)	1.765	1.589	1.012	356	575
Ekuitas	4.709.691	4.151.328	3.864.528	2.747.807	2.540.951
Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	716.622	386.165	424.591	370.793	403.177
Aset Tidak Lancar Lainnya	336.091	25.276	27.558	30.815	34.775

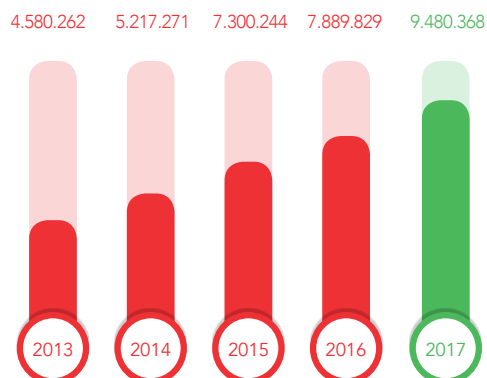
RASIO KEUANGAN (%)					
Rasio Laba Bersih terhadap Aset	3	4	2	2	2
Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas	7	7	4	4	4
Rasio Laba Bersih terhadap Pendapatan	5	6	4	5	5
Rasio Aset Lancar terhadap Kewajiban Lancar	163	171	189	157	141
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	101	90	89	90	80
Rasio Liabilitas terhadap Aset	50	47	47	47	45

RASIO INDUSTRI (%)					
Penugasan Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN	100%	100%	100%	100%	100%
Indikator Kinerja	102,35	97,9	105,6	98,8	80
Tingkat Kesehatan	94	92,5	92	90	76



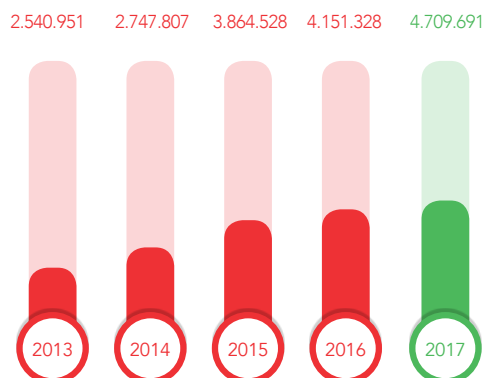
ASET

dalam jutaan Rupiah



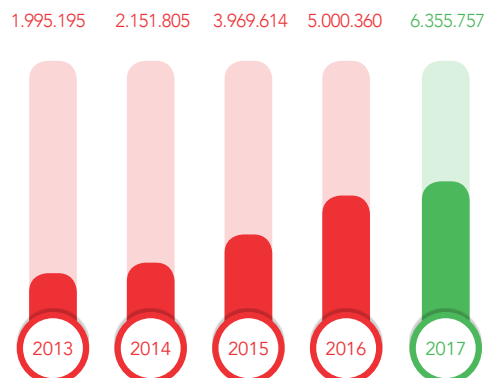
EKUITAS

dalam jutaan Rupiah



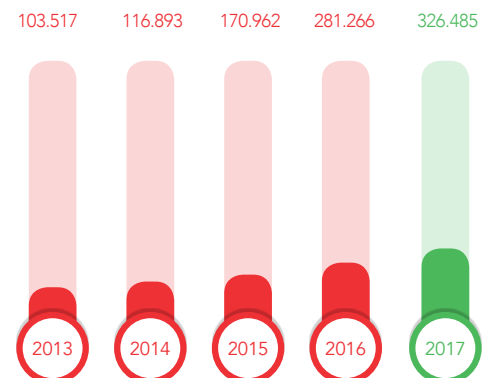
PENDAPATAN USAHA

dalam jutaan Rupiah

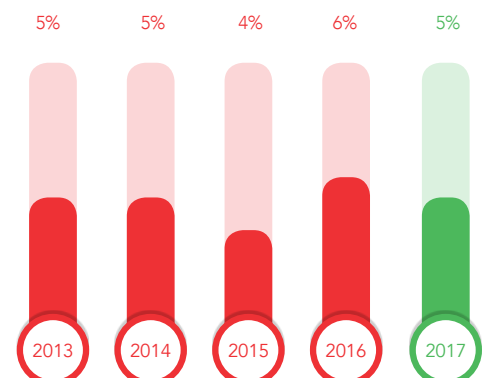


LABA BERSIH

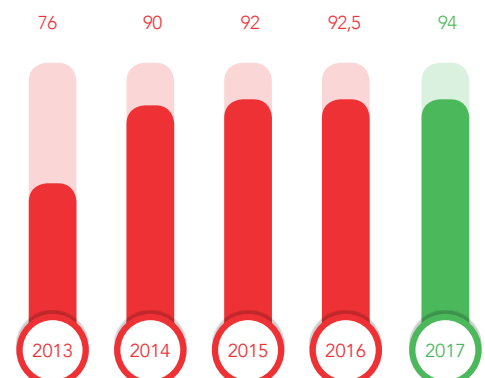
dalam jutaan Rupiah



RASIO LABA BERSIH TERHADAP PENDAPATAN



TINGKAT KESEHATAN



IKHTISAR SAHAM

Sampai dengan 31 Desember 2017, Perseroan merupakan BUMN *non-listed* atau belum mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia sehingga tidak terdapat jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan, serta volume perdagangan.

IKHTISAR OBLIGASI/SUKUK/ OBLIGASI KONVERSI

Sampai dengan 31 Desember 2017, Perseroan tidak menerbitkan obligasi, sukuk, maupun obligasi konversi sehingga tidak terdapat jumlah obligasi, sukuk, maupun obligasi konversi yang beredar (*outstanding*), tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

PERISTIWA PENTING 2017

JANUARI



13

Penandatanganan
Perjanjian Pemberian
Modal Kerja PT Prabu
Wahana International



13

Town Hall Meeting,
Arahan Direktur Utama PT
PPA untuk tahun 2017



17

Courtesy Visit Sultan
Kasepuhan Cirebon



20

Rapat Umum Pemegang
Saham tentang
Pengesahan Rencana Kerja
Anggaran Perusahaan PT
PPA

FEBRUARI



2

Penandatanganan
Perjanjian Induk Kerja
Sama antara Keraton
Kasepuhan Cirebon
dan PT PPA



9

Penandatanganan
Perjanjian Pemberian
Pinjaman Jangka Pendek
kepada PT SIG Asia



10

Rapat Kerja Tahun 2017
Direktorat Konsultasi Bisnis
dan Aset Manajemen



16

Focus Group Discussion "Kerjasama Pendayagunaan Aset-Aset BUMN"



16

Penandatanganan Perjanjian antara PT PPA dan PT Perkebunan Nusantara VIII



21

Aksi Donor Darah PT PPA

MARET



1

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT PPA dan PT Energy Management Indonesia (Persero)



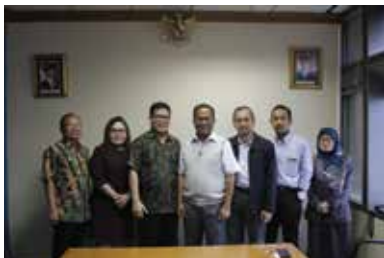
13

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Investasi antara PT PPA dan PT Berdikari (Persero)



14

Penandatanganan Kerjasama Penyaluran Program Kemitraan antara PT PPA, PT Bahana Artha Ventura, dan Perusahaan Modal Ventura Daerah



23

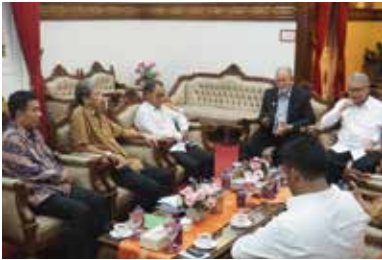
Penandatanganan Perjanjian Penerbitan Secured Promissory Notes PT PPA kepada PT Istaka Karya (Persero)



29

Penandatanganan Perjanjian Kredit Swadana antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan PT PPA

APRIL



6

Audiensi antara Gubernur Aceh dengan Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Direktur Utama PT PPA dan Direktur Utama PT KKA (Persero)



21

HUT Bersama BUMN Periode bulan Februari Maret April

MEI



18

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT PPA tahun 2016



29

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemberian Pinjaman Modal Kerja



26

Rapat Umum Pemegang Saham tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT Nindya Karya (Persero) tahun 2016



29

Penandatanganan Perjanjian Pemberian Pinjaman Jangka Pendek kepada PT Polowijo Gosari

JUNI



2 PT PPA Berbagi Berkah Ramadhan



5 Pergantian Anggota Dewan Komisaris PT PPA



19 Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Investasi Antara PT PPA dan PT Wisarada Sarana Aviast



21 Penandatanganan Perjanjian Kredit Modal Kerja antara PT PPA dengan PT Bank Pembangunan Daerah Banten



21 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PPA Finance Tahun Buku 2016



21 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PPA Kapital Tahun 2016

JULI



4 Penandatanganan Kerja Sama Investasi antara PT SIG Asia dan PT PPA



6 Penandatanganan Perjanjian Konsorsium Lelang Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik Sumatera



7 Pemberian Bantuan Program Bina Lingkungan pada Acara "1 Benih Summer Camp" di Bogor



12 Penandatanganan Nota Kesepahaman PT PPA dengan Balitbang ESDM



14

Kunjungan kerja ke pabrik PT Primsima (Persero) di Yogyakarta dalam rangka mendorong kerja sama penyediaan bahan baku benang oleh PT Industri Sandang Nusantara (Persero) bersama Deputi Kementerian BUMN



14

"Meet and Greet" Bapak Sonny Loho



26

Lepas Sambut Dewan Komisaris PT PPA

AGUSTUS



3

Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Survei Udara Panas (Persero)



7

Pengangkatan Direktur PT Kertas Kraft Aceh (Persero)



13

PT PPA berpartisipasi dalam Jalan Sehat bertema "Langkah Untuk Negeri", yang menjadi salah satu dari rangkaian kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri 2017



15

Aksi Donor Darah PT PPA



23

Penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Aset 2017 antara Kementerian Keuangan dan PT PPA



31

Penandatanganan Perjanjian Pemberian Modal Kerja kepada PT Polyrama Propindo

SEPTEMBER



18

Penghargaan untuk PT PPA Finance dalam 13th Multifinance Award 2017



20

Town Hall Meeting, Arahan Direktur Utama PT PPA untuk tahun 2017



20

Partisipasi PT PPA di IBD Expo 2017



26

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Investasi Jual Beli Pupuk Majemuk antara PT PPA dan PT Polowijo Gosari



28

Penandatanganan Perjanjian Kredit antara PT PPA dan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk



29

Partisipasi PT PPA dalam Forum Transformasi Kementerian dan BUMN



29

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemberian Pinjaman Modal Kerja antara PT PPA dan PT Energy Management Indonesia (Persero)

OKTOBER



5

Kementerian BUMN bersama PT PPA mengadakan Sarasehan Penyelesaian Kewajiban bagi eks Karyawan PT Kertas Leces (Persero)



11

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT PPA dengan Perum Perhutani, Inhutani IV dan PT KKA



12

Penghargaan PT PPA dalam Infobank 8th BUMN Awards 2017



12

Direktur Utama PT PPA sebagai Narasumber FGD Peningkatan Sinergi BUMN dalam Pemanfaatan Peluang Investasi



27

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara PT PPA Finance dengan PT Asuransi Sinar Mas



28

PT PPA Bersinergi dengan Kementerian BUMN dalam BUMN Hadir di Kampus Universitas Nusa Cendana



31

Penghargaan PT PPA Finance dalam Indonesia Multifinance Consumer Choice Award 2017 Warta Ekonomi

NOVEMBER



1

Penandatanganan
Nota Kesepahaman
Pengembangan dan
Investasi Sumber Daya
 Alam di Wilayah Papua
 Barat



1

Penandatanganan
Perjanjian Kerjasama
Pembangunan dan
Pengembangan Pabrik
 Pupuk Berbasis Dolomit



6

Penghargaan PT PPA
 dalam BUMN Performance
 Excellence Award 2017



9

Penandatanganan
Perjanjian Pinjaman
 Investasi dan Jual Beli
 Surat Utang antara PT
 PPA dan PT Gali Terus
 Sejahtera



10

Penandatanganan
Perjanjian Pinjaman Modal
 Kerja antara PT PPA dan
 PT Dutacipta Pakarperkasa



16

Media Workshop PT PPA
 bersama wartawan media
 cetak dan online yang
 tergabung dalam Forum
 Wartawan Kementerian
 BUMN



21

Penandatanganan
Perjanjian Pemberian
 Pinjaman Jangka Pendek
 kepada PT National Utility
 Helicopters



21

Perubahan Susunan
Direksi PT PPA



29

Penandatanganan
Perjanjian Kredit antara PT
 PPA Finance dan PT Bank
 Mandiri (Persero) Tbk

DESEMBER



5

PT PPA Kapital Menggelar Seminar "Economic & Market Outlook 2018"



8

Rapat Kerja PT PPA Tahun 2017



12

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Investasi antara PT PPA dengan PT Pratama Persada Airborne



13

Town Hall Meeting Arahan Direktur Utama PT PPA untuk tahun 2017



18

Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Nindya Beton



20

Penandatanganan Perjanjian Kerja antara PT PPA dan PT Bakrie Swasakti Utama



20

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Konsultansi Bisnis Pengelolaan Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan PT PPA



22

Lepas Sambut Direktur Utama PT PPA



22

Penandatanganan Jual Beli Saham PT Pratama Persada Airborne dan Penandatanganan Perjanjian Restrukturisasi Hutang PT Survai Udara Penas (Persero)



27

Penandatanganan Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Kerja antara PT PPA dengan PT Bank Shinhan Indonesia

PENGHARGAAN



Peringkat 38 "56 BUMN Terbaik"

PT PPA Menerima penghargaan
dari
Majalah Infobank
Edisi September 2017 Vol. XXXIX



"50 Best BUMN 2017"

PT PPA Menerima penghargaan
dari
Majalah Investor
Edisi Oktober 2017 XIX/291



BUMN Berpredikat "Sangat Bagus"

PT PPA Menerima penghargaan
dari
Majalah Infobank pada acara
Infobank 8th BUMN AWARDS 2017
Tanggal 12 Oktober 2017



Good Performance

"BUMN Performance Excellence Award 2017"

PT PPA Menerima penghargaan
dari
Forum Ekselen BUMN
Tanggal 6 November 2017





02

LAPORAN MANAJEMEN

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi dan seluruh karyawan Perseroan yang telah berupaya keras untuk mencapai hasil yang maksimal melalui pencapaian Laba Bersih sebesar Rp326.485 juta atau 109% dari target RKAP tahun 2017 sebesar Rp300.043 juta. Perseroan juga mampu mempertahankan level kesehatan yaitu "AA" sebagai fondasi yang kuat untuk pengembangan bisnis dan peningkatan daya saing secara berkelanjutan.

Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi atas berbagai inisiatif yang telah dikembangkan untuk menciptakan nilai peningkatan kinerja, pengembangan usaha, keunggulan daya saing secara berkelanjutan serta peningkatan citra dan reputasi perusahaan.

EDY PUTRA IRAWADY

Komisaris Utama



Assalamu'alaikum, wr.wb. Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkenalkan kami melaporkan hasil pengawasan yang kami lakukan sepanjang tahun 2017. Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi, kerja keras seluruh jajaran manajemen dan karyawan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atas torehan prestasi yang telah dihasilkan pada tahun 2017.

Kondisi perekonomian nasional pada tahun 2017 mengalami perbaikan bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2016. Pada tahun 2017, Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2016 yaitu sebesar 5,0%. Tingkat inflasi pada tahun 2017 sebesar 3,5%, mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2016 sebesar 3,0%. Sementara itu, cadangan devisa mengalami peningkatan dari USD 116,4 miliar pada tahun 2017, lebih tinggi dari cadangan devisa tahun 2016 yaitu sebesar USD 105,9 miliar.

Hal lain yang juga cukup fenomenal bagi tumbuhnya atmosfir lingkungan usaha serta kepercayaan investor adalah dengan diperolehnya status *investment grade* dari 3 lembaga pemeringkat internasional pada tahun 2017 yaitu Moody's, Fitch dan Standard & Poor's. Selain itu, peningkatan status *investment grade* juga berdampak positif bagi pasar modal sebagai sarana pendanaan usaha selain perbankan. Pada tahun 2017, Indeks Harga Saham Gabungan ditutup pada level 6.355,654 atau tumbuh mendekati 20,00% dari level 5.296,711 pada akhir tahun 2016.

Perbaikan kondisi makro ekonomi nasional secara umum berdampak positif bagi perekonomian nasional dan turut menyumbang cukup signifikan bagi kinerja industri jasa keuangan termasuk Perseroan. Dewan Komisaris mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama meningkatkan kinerja di segala lini untuk menjawab perbaikan makro ekonomi nasional melalui kerja keras dan inovasi di berbagai lini bisnis sehingga akan membawa perbaikan di masa yang akan datang.

Kami meyakini bahwa berbagai inisiatif dan insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah, secara perlahan tapi pasti akan membawa perbaikan pada berbagai indikator makro ekonomi yang pada gilirannya akan mendorong laju konsumsi, laju pertumbuhan sektor riil serta pada akhirnya akan berdampak pada kinerja perusahaan dan pelaku usaha termasuk Perseroan. Keyakinan kami tersebut di atas kiranya juga menjadi keyakinan dan motivasi manajemen dalam menjalankan pengurusan Perseroan dalam upaya mencapai visi, misi, dan strategi yang telah dikembangkan. Alhamdulillah di tengah berbagai tantangan dan dinamika ekonomi, pada tahun 2017 Perseroan berhasil menorehkan kinerja yang baik. Kami meyakini pula, pencapaian kinerja pada tahun 2017 akan menjadi fondasi bagi manajemen dan seluruh insan Perseroan dalam upaya meraih kinerja yang lebih baik serta keunggulan daya saing berkelanjutan.

Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2017

Sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris dalam tugas pengawasan dan pemberian nasihat selalu fokus pada kegiatan strategis yang dihadapi perusahaan serta berorientasi pada peningkatan nilai tambah sesuai dengan aspirasi pemegang saham. Kami menilai Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik, yaitu dalam menjalankan usaha sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang sudah ditetapkan pada awal tahun 2017. Penilaian ini didasarkan pada pencapaian atas target-target yang telah ditetapkan dalam RKAP khususnya indikator keuangan konsolidasian. Beberapa indikator keuangan yang kami nilai relevan untuk menilai kinerja antara lain: pendapatan usaha, laba bersih, hasil pengelolaan aset (HPA), aset, liabilitas, dan ekuitas.

Perseroan memperoleh Pendapatan Usaha pada tahun 2017 sebesar Rp6,36 triliun atau 101% dari target RKAP tahun 2017 sebesar Rp6,31 triliun. Jika dibandingkan dengan capaian Pendapatan Usaha pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp5,00 triliun, terdapat peningkatan sebesar 27,11%.

Perseroan memperoleh Laba Bersih pada tahun 2017 sebesar Rp326.485 juta atau 109% dari target RKAP tahun 2017 sebesar Rp300.043 juta. Jika dibandingkan dengan capaian Laba Bersih pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp281.266 juta, terdapat peningkatan sebesar 16,07%.

Realisasi Jumlah Aset Perseroan tahun 2017 sebesar Rp9,48 triliun atau 106% dari target RKAP tahun 2017 sebesar Rp8,91 triliun. Jika dibandingkan dengan jumlah Aset tahun 2016 sebesar Rp7,89 triliun, terdapat peningkatan sebesar 20%.

Realisasi jumlah Liabilitas Perseroan tahun 2017 sebesar Rp4,77 triliun atau 105% dari target RKAP tahun 2017 sebesar Rp4,55 triliun. Jika dibandingkan dengan jumlah Liabilitas tahun 2016 sebesar Rp3,74 triliun, terdapat peningkatan sebesar 28%.

Realisasi Jumlah Ekuitas Perseroan tahun 2017 sebesar Rp4,71 triliun atau 108% dari target RKAP tahun 2017 sebesar Rp4,37 triliun. Jika dibandingkan dengan jumlah Ekuitas tahun 2016 sebesar Rp4,15 triliun terdapat peningkatan sebesar 13%.

Kinerja Perseroan merupakan konsolidasian atas kinerja beberapa Perusahaan Anak yaitu:

- (1) PT PPA Finance (PT PPAF),
- (2) PT PPA Kapital (PT PPAK), dan
- (3) PT Nindya Karya (PT NK).

Secara keseluruhan Direksi Perseroan telah menunjukkan komitmen dalam upaya meraih pencapaian terbaik yang tercermin dari tingkat kesehatan perusahaan. Adapun 3 aspek yang mendasari penilaian kesehatan perusahaan adalah aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi. Dalam hal ini Perseroan berhasil mencapai skor sebesar 94 dan tergolong sebagai BUMN "Sehat" dengan klasifikasi kesehatan "AA". Selain itu, pencapaian kinerja Perseroan pada tahun 2017 juga dapat dilihat dari indikator KPKU (Kriteria Penilaian Kinerja Unggul) dimana Perseroan mampu memperoleh skor 507,5.

Sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan Perseroan, kami juga mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan Direksi khususnya berkaitan dengan pelaksanaan R/R dan Jasa Advisory. Pada tahun 2017, Perseroan telah melaksanakan implementasi R/R/Penugasan Khusus terhadap BUMN yang dikelola antara lain: PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Survei Udara Penas (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero) serta PT PANN (Persero).

Ke depan, Dewan Komisaris berharap Direksi dapat lebih meningkatkan kinerja Perseroan, baik dari aspek operasional, bisnis, dan keuangan, termasuk juga berbagai aspek yang akan mendorong peningkatan keunggulan daya saing berkelanjutan antara lain pengendalian internal, manajemen risiko secara terpadu, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG), pengelolaan hubungan induk dan anak perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pandangan atas Prospek Usaha

Prospek usaha Perseroan ke depan tergambar dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2018, yang merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2015 – 2019. Proses penyusunan RKAP tahun 2018 telah melalui masukan dan diskusi dengan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan masukan/aspirasi Pemegang Saham. RKAP Perseroan telah mendapat persetujuan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 24 Januari 2018.

Dewan Komisaris menilai bahwa RKAP tahun 2018 telah mencerminkan prospek usaha Perseroan sejalan dengan dinamika dan perkembangan bisnis dan bidang usaha yang dijalankan Perseroan. Beberapa indikator yang mencerminkan prospek usaha ke depan antara lain: Pendapatan usaha diproyeksikan mencapai Rp7,73 triliun dan meningkat 23% dengan prognosa konsolidasi tahun 2017 sebesar Rp6,36 triliun dan menargetkan laba bersih Rp410 miliar atau meningkat 33% dibandingkan dengan prognosa tahun 2017 sebesar Rp308 miliar.

Untuk mencapai target pendapatan dan laba tersebut di atas, Perseroan termasuk anak perusahaan akan fokus dengan beberapa kegiatan usaha yaitu antara lain:

- A. Kegiatan Investasi, yang terdiri:
 - 1) Investasi Properti
 - 2) Investasi Non Properti
- B. Kegiatan Pengelolaan Aset, yang terdiri:
 - 1) Kegiatan pengelolaan aset eks BPPN
 - 2) Kegiatan pengelolaan aset selain eks BPPN
- C. Kegiatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN, yaitu: PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Survai Udara Penas (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero) dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero) serta PT PANN (Persero).
- D. Kegiatan Jasa Konsultansi (*advisory*), seperti: *financial due diligence*, divestasi aset, pencarian calon investor, *deal structure*, dan lain-lain.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Perseroan berbeda dengan BUMN lain, dimana diberikan amanat untuk melakukan berbagai kegiatan R/R BUMN serta melakukan serangkaian kegiatan pengelolaan aset dan investasi serta pengembangan usaha Perusahaan Anak yang membutuhkan tata kelola terintegrasi dari Perusahaan Induk, Perusahaan Anak, Perusahaan Kelolaan dan afiliasi terkait.

Dalam upaya mewujudkan visi Perseroan “Menjadi grup perusahaan investasi dan operasi terkemuka (*To be a leading investment and operating group of companies*)” tidak dapat dilepaskan dari upaya Perusahaan untuk selalu memberikan kinerja terbaik melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan bisnis beretika dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional Perseroan hingga Anak Perusahaan. Kami sepenuhnya menyadari, penerapan GCG tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen dan dedikasi Perseroan untuk memberikan nilai tambah dan membuktikan kepercayaan dari seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Perwujudan prinsip GCG dalam arah gerak Perusahaan selama tahun 2017 dilaksanakan dengan mengedepankan praktik usaha sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Dewan Komisaris senantiasa mendorong seluruh jajaran Direksi, Manajemen dan Karyawan untuk melakukan praktik usaha yang menjunjung tinggi etika, moral serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas penerapan prinsip GCG, telah dilakukan asesmen GCG untuk tahun buku 2017 yaitu berupa evaluasi internal yang merupakan kelanjutan untuk perbaikan atas rekomendasi dari asesmen oleh pihak independen pada tahun sebelumnya. Berdasarkan asesmen GCG untuk tahun buku 2015, 2016, dan 2017, skor GCG Perseroan berada pada level “SANGAT BAIK”. Pencapaian ini diharapkan akan mendorong manajemen untuk terus meningkatkan kelengkapan

infrastruktur GCG dan pembentukan kultur perusahaan berbasis prinsip-prinsip GCG dan bisnis beretika.

Penerapan WBS

Whistleblowing System (WBS) adalah infrastruktur penerapan GCG yang memfasilitasi berbagai laporan pihak luar perusahaan dan pihak internal atas berbagai dugaan pelanggaran. WBS yang efektif akan mendorong terbentuknya kultur perusahaan berbasis prinsip-prinsip GCG dan penerapan bisnis beretika. Sistem ini memfasilitasi semua pihak baik pimpinan, karyawan, maupun pihak luar yang terkait dengan Perseroan untuk melakukan pelaporan dugaan pelanggaran.

Pelapor menyampaikan laporan dalam bentuk surat dengan disertai dokumen pendukung yang diperlukan. Laporan ini ditujukan kepada Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran dan disampaikan melalui salah satu diantara cara berikut yaitu *email*: whistleblowing@ptppa.com.

Mengingat pentingnya keberadaan sistem ini, Dewan Komisaris terus mendorong manajemen agar sistem dan mekanisme WBS dijalankan secara efektif, *fair*, dan secara proaktif melakukan tindak lanjut atas berbagai laporan yang masuk ke sistem WBS.

Dewan Komisaris terus mendorong agar sistem WBS disosialisasikan secara intensif khususnya untuk kalangan internal dan mendorong manajemen untuk melakukan peningkatan fungsi dan kapasitas WBS Perseroan, karena kami meyakini bahwa salah satu tujuan GCG adalah membangun *internal confidence* sebagai perusahaan yang *well-managed* dan *well-governed*.

Komposisi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2017 terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris Perseroan yang mengacu kepada Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS nomor: SK-104/MBU/06/2017 tanggal 5 Juni 2017 mengenai pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dengan hormat Sdri. Hendrika Nora Oslo Sinaga (yang diangkat sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN

selaku RUPS nomor: SK-244/MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014) dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Sdr. Tirta Hidayat.

Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Edy Putra Irawady
- Komisaris : Taufik Sukasah
- Komisaris : Dedi Rudaedi
- Komisaris : Tirta Hidayat

Penilaian Komite Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat bagi Direksi, Dewan Komisaris didukung oleh organ Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dan GCG (PRGCG). Komite Audit dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas efektivitas pengendalian internal perusahaan dan penelaahan laporan keuangan, sementara itu Komite PRGCG dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas penerapan GCG dan manajemen risiko perusahaan.

Sepanjang tahun 2017, Komite Audit telah menjalankan peran dan fungsi organ pendukung secara optimal. Secara periodik komite audit telah melakukan penelaahan pengendalian internal termasuk pembahasan bersama divisi Internal Audit. Komite Audit juga aktif melakukan pemantauan kinerja Audit Eksternal sejak penunjukan KAP, rapat koordinasi pencapaian proses audit, hingga melakukan peninjauan lapangan proses audit dan *exit meeting* bersama tim KAP. Komite Audit juga secara komprehensif melakukan penelaahan atas pengendalian kinerja khususnya keuangan bagi Perusahaan Anak dan Perusahaan Kelolaan.

Sepanjang tahun 2017, Komite PRGCG telah menjalankan peran dan fungsi organ pendukung secara optimal. Secara periodik komite PRGCG telah melakukan penelaahan atas efektivitas penerapan GCG dan manajemen risiko Perseroan. Beberapa kegiatan utama yang dilakukan antara lain pelaksanaan

Asesmen GCG oleh pihak internal sesuai dengan ketentuan SK-16/S.MBU/2012. Selain itu, Komite PRGCG juga mengusulkan perbaikan *website* perusahaan sesuai dengan *ASEAN Corporate Governance Scorecard* serta peningkatan penerapan *Enterprise Risk Management* khususnya dalam laporan manajemen.

Dewan Komisaris menilai bahwa kontribusi dan dedikasi Komite Audit dan PRGCG telah sesuai dengan ekspektasi Dewan Komisaris. Aktivitas program kerja komite telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dan disepakati di awal tahun. Kami menilai bahwa Komite Audit dan Komite PRGCG telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan yang tercantum dalam program kerja komite, penugasan-penugasan khusus dan sesuai dengan arahan Dewan Komisaris.

Apresiasi

Sebagai penutup, izinkanlah kami atas nama Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan atas keberhasilan Manajemen dalam membawa Perseroan tetap tumbuh dan berkembang serta siap menghadapi peningkatan kinerja lebih jauh pada tahun 2018. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan kontribusi seluruh jajaran pegawai baik Perusahaan Induk maupun Anak Perusahaan bagi kemajuan Perseroan. Semoga keberhasilan yang telah diraih bersama ini baik kinerja keuangan maupun berbagai penghargaan dari masyarakat menjadi bekal bagi kita semua dalam memelihara keberlanjutan usaha sekaligus menjadikan Perseroan sebagai perusahaan pengelola aset dan agen restrukturisasi/revitalisasi BUMN yang mampu memberikan nilai yang berkesinambungan bagi seluruh pemangku kepentingan.

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
Jakarta, April 2018

Atas nama Dewan Komisaris



Edy Putra Irawady
Komisaris Utama





1

Edy Putra Irawady

Komisaris Utama

2

Tirta Hidayat

Komisaris

3

Dedi Rudaedi

Komisaris

4

Taufik Soekasah

Komisaris

LAPORAN DIREKSI

Direksi memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh karyawan Perseroan yang telah berupaya keras untuk mencapai hasil yang maksimal melalui pencapaian pendapatan usaha tahun 2017 sebesar Rp6,36 triliun atau 101% dari target RKAP tahun 2017 sebesar Rp6,31 triliun, dan tumbuh 27,11% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5,00 triliun. Sementara itu laba sebelum pajak tercapai 106,22% dari target RKAP tahun 2017 sebesar Rp313,44 miliar, meningkat sebesar 17,47% dari Rp283,40 miliar di tahun 2016 menjadi Rp332,93 miliar di tahun 2017,

Dengan berbagai upaya optimalisasi, laba bersih tahun 2017 tercatat sebesar Rp326,48 miliar, nilai ini mencapai 109% terhadap RKAP tahun 2017 sebesar Rp300,04 miliar dan mengalami pertumbuhan sebesar 16,07% dari tahun sebelumnya sebesar Rp281,27 miliar.

HENRY SIHOTANG

Direktur Utama



Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Suatu kehormatan bagi Direksi dapat menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 beserta Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dan mendapat predikat 'wajar tanpa pengecualian' dalam posisi keuangan, laba komprehensif, arus kas, serta seluruh informasi material untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Sepanjang tahun 2017, Perseroan telah menjalankan berbagai program kerja sesuai dengan arahan dari Dewan Komisaris untuk senantiasa meningkatkan kinerja Perseroan.

Kebijakan Strategis Tahun 2017

Populasi penduduk Indonesia yang sangat besar menjadikan Indonesia sebagai pasar yang sangat potensial bagi para pelaku industri. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai prospek investasi yang menjanjikan bagi para pelaku ekonomi. Dengan kondisi seperti ini, perekonomian Indonesia diprediksi akan terus mengalami pertumbuhan. Sejalan dengan itu, bisnis Perseroan juga diharapkan mengalami perkembangan yang baik sesuai dengan rencana jangka panjang Perseroan.

Menjawab tantangan yang ada dan dengan adanya rencana pengembangan bisnis Perseroan yang ditunjang dengan mitigasi risiko yang baik, Direksi melaksanakan berbagai inisiatif-inisiatif strategis, baik dibidang pengelolaan aset eks BPPN, restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN, investasi, kegiatan jasa konsultasi, dan pengelolaan anak perusahaan.

Untuk bidang pengelolaan aset eks BPPN, pada tahun 2017 Perseroan antara lain melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan nilai aset dan melakukan penagihan piutang. Untuk perusahaan yang dikelola, Perseroan melakukan kajian-kajian terkait tindakan korporasi perusahaan. Untuk aset selain eks BPPN, dengan mempertimbangkan sumber daya yang telah dimiliki oleh Perseroan saat ini, Perseroan melakukan pengembangan pemasaran jasa, sehingga potensi kerjasama dengan berbagai entitas usaha dapat dijalankan.

Dalam bidang restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN, selain koordinasi yang intensif dengan Kementerian BUMN serta peningkatan kapasitas BUMN yang dalam proses restrukturisasi dan/atau revitalisasi, penting juga bagi Perseroan untuk dapat mengambil peran dengan menugaskan sumber daya yang ada di Perseroan menjadi bagian pengurus BUMN tersebut.

Dalam bidang investasi, beberapa inisiatif strategis yang di usung Perseroan adalah dengan melakukan investasi jangka pendek yang dapat secara cepat memberikan tingkat pengembalian yang optimal. Selain itu, Perseroan juga melakukan investasi jangka panjang guna mendukung keberlanjutan Perseroan, serta memperkuat strategi inisiasi dengan memperluas area kerjasama dengan sesama BUMN, pihak swasta maupun BUMD.

Inisiatif strategis untuk kegiatan jasa konsultasi, Perseroan melakukan komunikasi intensif dalam rangka memasarkan jasa konsultasi, melakukan riset atas kebutuhan jasa konsultasi, pengembangan pemasaran, serta memperluas area jasa konsultasi selain BUMN yaitu pemerintah daerah, BUMD, swasta, dan pihak lainnya.

Untuk pengembangan entitas anak, pada tahun 2017 beberapa inisiatif strategis Perseroan ditujukan dalam aspek pengawasan jalannya entitas anak, pengawasan implementasi GCG, manajemen risiko, serta menempatkan wakil Perseroan sebagai pengurus maupun komisaris.

Penyelesaian berbagai program strategis tersebut membuat daya saing Perseroan meningkat, mampu mengatasi naiknya intensitas persaingan di masa mendatang dan memastikan pencapaian visi Perseroan "Menjadi grup perusahaan investasi dan operasi terkemuka".

Tantangan yang Dihadapi Perseroan

Dalam menjalankan strategi tersebut, Perseroan juga tidak terlepas dari berbagai tantangan yang menghadang di sepanjang tahun 2017. Dengan berbagai lini bisnis yang dikelola Perseroan, kendala yang dihadapi Perseroan juga tersebar pada berbagai lini bisnis tersebut.

Berikut ini adalah tantangan yang dihadapi dan upaya Perseroan untuk mengatasi tantangan di tahun 2017:

1. Bidang pengelolaan aset eks BPPN, jumlah dan nilai aset yang diserahkan ke Perseroan semakin menurun seiring dengan telah diselesaikannya sebagian aset kelolaan dengan baik oleh Perseroan.
2. Pada bidang R/R BUMN, beberapa BUMN yang akan disehatkan telah berhenti beroperasi, pada umumnya BUMN yang akan disehatkan dalam kondisi *non-bankable*, adanya keterbatasan pendanaan Perseroan untuk menjembatani program R/R (dana talangan) dan beberapa BUMN yang akan disehatkan masuk dalam koridor kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta munculnya beberapa isu perburuan.
3. Pada bidang investasi, sumber pendanaan menjadi salah satu faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan sebuah investasi. Oleh karenanya Perseroan akan terus memaksimalkan kapasitas keuangan yang ada untuk dapat mengembangkan bisnis Perseroan serta mencari solusi alternatif pendanaan lainnya.
4. Untuk bidang jasa konsultasi, persaingan yang ketat terutama dengan perusahaan jasa konsultasi yang telah lebih dahulu berdiri merupakan tantangan bagi Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan terus mempersiapkan diri agar dapat melakukan ekspansi dengan mengembangkan kompetensi dan sumber daya manusia sehingga sesuai dengan standar kebutuhan pasar.

Kinerja 2017

Selama tahun 2017 kinerja Perseroan menunjukkan perkembangan positif sebagaimana terlihat dari adanya pertumbuhan dibandingkan tahun 2016 maupun pencapaian dari target yang telah dicanangkan sebelumnya.

Pendapatan usaha tahun 2017 mencapai Rp6,36 triliun atau 101% dari target RKAP tahun 2017 sebesar Rp6,31 triliun, dan tumbuh 27,11% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5,00 triliun. Sementara itu laba sebelum pajak meningkat sebesar 17,47% dari Rp283,40 miliar di tahun 2016 menjadi Rp332,93 miliar di tahun 2017, tercapai 106,22% dari target RKAP tahun 2017 sebesar Rp313,44 miliar.

Dengan berbagai upaya optimalisasi, laba bersih tahun 2017 tercatat sebesar Rp326,48 miliar, tumbuh 16,07% dari tahun sebelumnya sebesar Rp281,27 miliar. Nilai ini mencapai 109% terhadap RKAP 2017 sebesar Rp300,04 miliar.

Sementara untuk posisi keuangan, realisasi total Aset Perseroan tahun 2017 sebesar Rp9,48 triliun atau 106% dari target RKAP tahun 2017 sebesar Rp8,92 triliun. Jika dibandingkan dengan total Aset Perseroan tahun 2016 sebesar Rp7,89 triliun, terdapat peningkatan sebesar 20%.

Prospek Usaha Kedepan

Perekonomian global pada tahun 2018 akan memperlihatkan kecenderungan pertumbuhan yang lebih baik. Demikian pula dengan perekonomian Indonesia yang diproyeksikan memasuki masa ekspansi dalam beberapa tahun mendatang. Dengan kondisi pertumbuhan yang cukup terjaga ini, Perseroan memperkirakan kondisi Perseroan tahun 2018 mengalami pertumbuhan yang lebih baik dari tahun 2017.

Sesuai proyeksi dari lembaga ekonomi nasional dan internasional, Perseroan memprediksikan perekonomian Indonesia di tahun 2018 akan tumbuh pada kisaran 5,4% dari 5,02% di tahun 2017. Konsumsi domestik dan kegiatan investasi masih tetap menjadi kontributor utama dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tekanan inflasi yang diperkirakan 3.5% dan stabilitas nilai tukar mulai memperlihatkan titik terang yang membuat suku bunga rujukan menjadi 5.3%, kemudian kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur diharapkan semakin memberi dampak terhadap perbaikan ekonomi.

Selain itu, Perseroan kini berada pada kondisi yang lebih siap untuk memenuhi permintaan pasar. Berbagai upaya peningkatan kapasitas diharapkan membuat daya saing Perseroan meningkat, sehingga memberikan Perseroan kesempatan untuk memenangkan persaingan dan mengisi peluang pertumbuhan pada berbagai lini bisnis Perseroan.

Di tahun 2018 juga terdapat peluang yang besar bagi Perseroan untuk melakukan perluasan segmen pasar dengan melakukan investasi di sektor properti, konstruksi, *manufacturing*, petrokimia, dan energi, baik secara organik ataupun an-organik melalui akuisisi.

Pangsa pasar Perseroan yang masih terbatas di industri nasional semakin memacu Perseroan untuk terus tumbuh dan berkembang. Namun dengan fundamental yang kuat, Direksi meyakini Perseroan telah siap untuk melakukan berbagai pengembangan usaha guna mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pangsa pasar. Hal ini dilakukan melalui beberapa upaya diantaranya optimalisasi program kerja untuk fokus pada pengembangan serta penjajakan segmen bisnis baru. Di samping itu, Pemerintah melalui pemegang saham juga sangat mendukung Perseroan untuk mengembangkan potensi bisnis baru. Dengan demikian, Direksi menilai bahwa prospek usaha Perseroan di masa yang akan datang masih terbuka luas untuk dapat dicapai dengan kemampuan Perseroan.

Sumber Daya Manusia

Perseroan sangat menyadari bahwa keberhasilan Perseroan untuk menghadapi seluruh tantangan usaha sangat bergantung pada kualitas dan kapasitas SDM yang dimiliki Perseroan. Perseroan menempatkan SDM sebagai aset yang sangat berharga, oleh karena itu Perseroan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM.

Pada tahun 2017, Perseroan telah melakukan investasi yang cukup besar untuk meningkatkan kualitas SDM melalui serangkaian kegiatan pelatihan dan pendidikan, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal. Investasi di bidang pelatihan dan pendidikan yang secara konsisten diharapkan akan terus meningkatkan produktivitas SDM Perseroan.

Tata Kelola Perusahaan

Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) merupakan pedoman bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha. Perseroan memiliki keyakinan yang kuat bahwa dengan penerapan prinsip GCG akan meningkatkan kinerja Perseroan, bukan hanya untuk saat ini, tapi juga di masa mendatang. Perseroan juga memiliki keyakinan bahwa dengan mengimplementasikan prinsip GCG dalam semua kegiatan usaha akan memperkuat kepercayaan serta meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Penerapan prinsip GCG di Perseroan dilakukan secara terintegrasi dengan pengelolaan kepatuhan, manajemen risiko dan pengendalian internal. Penerapan prinsip GCG dalam organisasi Perseroan berlandaskan pada komitmen untuk menciptakan perusahaan yang transparan dan terpercaya melalui manajemen bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari waktu ke waktu, Perseroan juga terus berupaya untuk menyempurnakan mekanisme, struktur dan organ GCG yang dimiliki Perseroan. Hal itu adalah untuk memastikan bahwa penerapan prinsip GCG telah sampai pada semua lini yang ada di Perseroan. Selain itu, untuk memastikan bahwa prinsip GCG telah diterapkan dengan baik di setiap lini, Perseroan secara berkala melakukan pengukuran (*assessment*) terhadap penerapan prinsip GCG di Perseroan. Berdasarkan hasil *assessment* atas penerapan prinsip GCG di Perseroan untuk tahun 2017 yang dilakukan oleh penilai independen, Perseroan berhasil meraih skor 88,04 atau dengan predikat "Sangat Baik". Penerapan prinsip GCG Perseroan mengalami peningkatan sebesar 0,57 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari perolehan *assessment* GCG untuk tahun 2016 yang dilakukan secara mandiri oleh Divisi Internal Audit dengan perolehan skor sebesar 87,47.

Dengan konsep GCG yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, maka Perseroan mendapatkan hasil yang positif sekaligus menjamin pertumbuhan Perseroan yang berkesinambungan dalam jangka panjang. Penguatan GCG dalam hal ini dimaksudkan agar penerapan prinsip GCG senantiasa melekat dan selaras dengan tuntutan bisnis saat ini.

Upaya Perseroan untuk menerapkan prinsip GCG di seluruh elemen perusahaan dilakukan melalui sosialisasi yang berkesinambungan kepada seluruh karyawan hingga evaluasi serta pemantauan. Hal ini menunjukkan kesungguhan jajaran Direksi untuk fokus dalam penerapan prinsip GCG di Perseroan. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh pihak independen maupun secara mandiri, implementasi GCG Perseroan selalu menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun. Ini membuktikan bahwa GCG telah menyatu dalam budaya kerja Perseroan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Sebagai *good corporate citizen*, Perseroan menyadari bahwa keberhasilan Perseroan juga harus dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Perseroan meyakini bahwa bisnis Perseroan akan berkelanjutan apabila memberikan perhatian yang seimbang pada aspek *People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership*. Tanggung jawab tersebut diterjemahkan Perseroan melalui aktivitas *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang secara berkesinambungan dilakukan Perseroan.

Kegiatan CSR tahun 2017 dilakukan dengan tetap mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017.

Program Kemitraan

Pada tahun 2017, Perseroan bekerja sama dengan entitas anak PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yaitu PT Bahana Artha Ventura (PT BAV) yang mana PT BAV berperan membantu Perseroan untuk menyalurkan dana kepada mitra binaan di daerah-daerah melalui Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD). Kerja sama ini dilakukan dalam rangka penyaluran secara langsung dana pinjaman Program Kemitraan. Melalui kerja sama tersebut, hingga akhir tahun 2017 Perseroan telah menyalurkan dana pinjaman Program Kemitraan sebesar Rp14,96 miliar kepada mitra binaan baru yang tersebar di 8 provinsi di Indonesia.

Program Bina Lingkungan

Penyaluran dana kegiatan Bina Lingkungan yang dilakukan Perseroan meliputi bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pelestarian alam, bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan sosial kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan, dan pembinaan program kemitraan. Pada tahun 2017, penyaluran bantuan Bina Lingkungan disalurkan ke berbagai provinsi di Indonesia diantaranya Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku dan Maluku Utara dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp3,16 miliar.

Perubahan Komposisi Direksi

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan Nomor 252/MBU/11/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Pemberhentian dan Pengalihan tugas Anggota – Anggota Direksi Perusahaan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset, sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT PPA No. 08 tanggal 4 Desember 2017 dibuat oleh Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Henry Sihotang	Direktur Utama
Andi Saddawero	Direktur
Ajar Setiadi	Direktur

Apresiasi

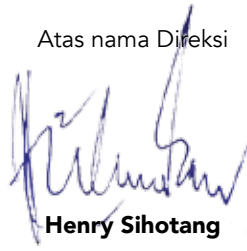
Dengan semangat kerja yang tinggi disertai kebersamaan yang erat, Direksi optimis kinerja dan budaya yang telah dibangun Perseroan akan terus membaik di masa yang akan datang. Tak lupa Direksi menyampaikan terima kasih kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, pelanggan, mitra usaha dan pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan. Selain itu, Direksi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras dan kontribusi positif seluruh karyawan.

Secara khusus Direksi ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Sdr. Saiful H. Manan yang menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan hingga November 2017 dan telah berhasil membangun landasan yang kokoh bagi Perseroan serta mengantarkan pada pencapaian yang membanggakan selama periode jabatannya.

Pencapaian ini tentunya bukan sesuatu yang mudah, namun berkat kerja keras semua pihak menjadikan hal tersebut dapat tercapai dengan baik. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita semua dan memberikan kemudahan bagi kita semua untuk terus tumbuh dan berkembang.

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
Jakarta, April 2018

Atas nama Direksi



Henry Sihotang
Direktur Utama

**Ajar Setiadi**

Direktur Keuangan dan
Dukungan Kerja

Andi Saddawero

Direktur Investasi

Saiful H. Manan

Direktur Utama

Henry Sihotang

Direktur Konsultasi Bisnis
dan Aset Manajemen

Direksi yang menjabat untuk periode sampai dengan November 2017





1

Henry Sihotang*

Direktur Utama

2

Andi Saddawero*Direktur Konsultasi
Bisnis dan Aset
Manajemen

3

Ajar Setiadi*Direktur Keuangan
dan Dukungan Kerja

4

Nasrizal Nazir**

Direktur Investasi

*) Anggota Direksi yang menjabat sejak November 2017

**) Anggota Direksi yang menjabat sejak Januari 2018





03

PROFIL PERUSAHAAN

IDENTITAS PERUSAHAAN



Nama Perusahaan	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
Bidang Usaha	Pengelolaan Aset Eks BPPN Restrukturisasi/Revitalisasi ("R/R") BUMN Investasi Pengelolaan Aset BUMN
Tanggal Pendirian	27 Februari 2004
Dasar Hukum Pendirian	1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset, tanggal 27 Februari 2004. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset, tanggal 4 September 2008.
Modal Dasar	Rp5.000.000.000.000
Tujuan Pembentukan	Pengelolaan aset eks BPPN, restrukturisasi dan/atau revitalisasi (R/R) BUMN, kegiatan investasi, serta kegiatan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Rp2.996.688.000.000

Alamat Kantor Pusat	Sampoerna Strategic Square North Tower 9 th – 12 th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930 Telepon: +62 21 251 2222 Faksimili: +62 21 577 2443 Sekretaris Perusahaan : Edi Winanto Surel: edi@ptppa.com	
Alamat Surat Elektronik	corpsec@ptppa.com	
Situs	www.ptppa.com	
Jumlah Karyawan	183 orang	
Tanggal Pencatatan Saham	Belum tercatat sebagai perusahaan publik	
Entitas Anak	PT PPA Finance Sampoerna Strategic Square North Tower 9 th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 45-46 Jakarta 12930 Telepon : +62 21 5795 1419 Faksimili : +62 21 5795 1420 Surel : customerservice.ppafinance@ptppa.com	PT PPA Kapital Sampoerna Strategic Square North Tower 9 th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 45-46 Jakarta 12930 Telepon : +62 21 251 2222 Faksimili : +62 21 5798 2555
	PT Nindya Karya Jl. Letjen MT Haryono Kav 22 Cawang, Jakarta 13630 Telepon : +62 21 8093276 Faksimili : +62 21 8093105 Surel : nindyakarya@nindyakarya.co.id Situs : www.nindyakarya.co.id	PT Nindya Beton* Kaliangsana, Kalijati, Subang Regency. Jawa Barat 41271 Telepon : +62 260 462626.460794 Faksimili : +62 260 462625.460794 Situs : www.nindyabeton.co.id
	PT Pratama Persada Airborne** Sampoerna Strategic Square North Tower 10 th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 45-46 Jakarta 12930 Telepon : +62 21 5798 2266 Faksimili : +62 21 5798 2266 Surel : nugraha.ppairborne@ptppa.com	PT Duta Mentari Raya** Sampoerna Strategic Square North Tower 9 th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 45-46 Jakarta 12930 Telepon : +62 21 251 2222 Faksimili : +62 21 5798 2266 Surel : rawuh.kuswito.dmr@ptppa.com
Sektor	Jasa Pengelola Aset, Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN	
Kantor Cabang/Kantor Perwakilan	Tidak memiliki Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan	
Status Perusahaan	Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	
Kepemilikan	100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia	
Total Aset	Rp9.480.368 juta	

*) Kepemilikan tidak langsung melalui PT Nindya Karya (Persero)

**) Kepemilikan tidak langsung melalui PT PPA Kapital

SEJARAH SINGKAT PERSEROAN

Dengan tujuan melaksanakan pengelolaan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang tidak berperkara hukum, Perseroan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) pada tanggal 27 Februari 2004. Perseroan berdiri untuk jangka waktu selama lima tahun, dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sesuai Akta Pendirian Perseroan dengan No. 7 tanggal 27 Februari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-05780 HT.01.01.TH.2004 tanggal 9 Maret 2004. Tugas pengelolaan aset yang diembankan pada Perseroan dituangkan melalui Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004 antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Perseroan.

Melihat perkembangan Perseroan dan industri di Indonesia, serta status Perseroan yang bertujuan untuk melakukan penyehatan berbagai aset eks BPPN yang tidak berperkara hukum, menjadi pertimbangan bagi Pemegang Saham Perseroan untuk meninjau kembali strategi dan merumuskan ulang maksud dan tujuan Perseroan untuk dapat memberikan yang terbaik bagi setiap *stakeholders*, khususnya kepada Pemegang Saham. Oleh sebab itu, Pemerintah mengembangkan maksud dan tujuan Perseroan dengan menambah ruang lingkup tugas Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset pada tanggal 4 September 2008 menjadi sebagai berikut:

1. Pengelolaan aset Negara eks BPPN.
2. Restrukturisasi dan/atau revitalisasi (R/R) BUMN.
3. Kegiatan investasi, serta
4. Kegiatan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemegang Saham Perseroan menerbitkan keputusan Pemegang Saham (di luar RUPS) No. KEP-164/MBU/2008 dan dituangkan dalam Akta No. 2 tanggal 10 September 2008 yang dibuat dihadapan Lindawati Wiranata, S.H. tanggal 5 September 2008. Keputusan tersebut kemudian mengubah masa tugas Perseroan dari lima tahun menjadi waktu yang tidak terbatas (*going concern*).

Pada tahun 2014, melalui kajian yang mendalam, dan untuk mendukung pengembangan rencana bisnis dan usaha Perseroan, Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan menetapkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada 12 Februari 2014 melalui Surat No. S-68/MBU/2014 perihal Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang dituangkan dalam Akta No. 62 tanggal 21 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Jakarta Perubahan tersebut memperluas maksud dan tujuan Perseroan, dengan ikut melaksanakan dan memberi dukungan terhadap kebijaksanaan serta program Pemerintah di bidang ekonomi, khususnya pada bidang pengelolaan aset Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setelah pengakhiran tugas institusi tersebut. Pelaksanaan serta pemberian dukungan yang dilakukan Perseroan meliputi berbagai hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan aset negara eks BPPN untuk dan atas nama Menteri Keuangan,
2. R/R BUMN,
3. Melakukan kegiatan investasi, serta
4. Kegiatan pengelolaan aset BUMN.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan yaitu melalui:

1. Jasa Konsultansi berupa jasa konsultansi:
 - a. Bisnis dan manajemen;
 - b. Penjualan dan/atau pengembangan aset;
2. Pengelolaan aset milik: Negara selain aset Negara yang berasal dari BPPN; Pemerintah Daerah; badan hukum yang dimiliki dan/atau didirikan oleh Negara selain Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta, termasuk anak perusahaan BUMN, perusahaan patungan, meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Melakukan penjualan aset termasuk saham dan piutang;
 - b. Melakukan penyewaan aset;
 - c. Melakukan restrukturisasi piutang termasuk penagihan piutang;
 - d. Melakukan restrukturisasi perusahaan; dan
 - e. Pengembangan dan pendayagunaan aset termasuk melalui kerja sama dengan pihak lain.

Seiring dengan perkembangan tersebut, daya saing Perseroan terus diperkuat baik dari sisi keuangan, operasional hingga pada aspek sumber daya manusia dengan pembentukan budaya Perseroan yang kuat.

PERUBAHAN NAMA PERSEROAN

Sampai dengan tahun 2017, tidak terdapat perubahan nama Perseroan.

JEJAK LANGKAH

2004

Perseroan didirikan dengan nama PT Perusahaan Pengelola Aset berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 pada tanggal 27 Februari 2004. Dengan tujuan melakukan pengelolaan aset eks BPPN untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

2008

- Perluasan maksud dan tujuan Perseroan menjadi:
 1. Pengelolaan Aset eks BPPN untuk dan atas nama Menteri Keuangan
 2. Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN
 3. Investasi
 4. Pengelolaan Aset BUMN
- Perubahan jangka waktu berdirinya Perseroan dari lima tahun menjadi tidak terbatas.

2012

- Sejak 13 Agustus 2012, PT Nindya Karya menjadi entitas anak Perseroan melalui Program Restrukturisasi/Revitalisasi dengan skema penyertaan modal.
- Pelepasan PT Waskita Karya sebagai entitas anak Perseroan.

2014

Pengembangan kegiatan bisnis investasi untuk memperkuat tugas pokok dalam rangka pengelolaan aset eks BPPN dan Program Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN.

2015

Perseroan mulai melakukan penetrasi ke pasar investasi sesuai dengan rencana jangka panjang perusahaan.

2009

Pembentukan entitas anak,
PT PPA Finance.

2010

Sejak 20 Juli 2010, PT Waskita Karya menjadi entitas anak Perseroan melalui Program Restrukturisasi/Revitalisasi dengan skema penyertaan modal.

2011

Pembentukan entitas anak,
PT PPA Kapital.

2016

- Pelaksanaan kegiatan investasi yang diimplementasikan melalui sejumlah penandatanganan kerja sama.
- Melakukan pengelolaan aset dengan menciptakan nilai investasi guna mendukung Perseroan dalam *creating value*.
- Perseroan menjalankan model bisnis secara konsisten sesuai visi dan misi.

2017

- Perseroan menginisiasi pengembangan segmen bisnis baru pada industri keuangan, manufaktur dan pupuk.

BIDANG USAHA



Kegiatan Usaha Sesuai Anggaran Dasar Terakhir

Berdasarkan Akta Perseroan No. 62 tanggal 21 Februari 2014 dibuat dihadapan Notaris Desman, S.H., M.Hum.,M.M, di Jakarta sebagaimana tertuang dalam BNRI No. 47 tanggal 13 Juni 2014, khususnya pada Pasal 3 tentang maksud dan tujuan Perseroan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan program pembangunan nasional pada umumnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melakukan kegiatan usaha yang meliputi:

1. Pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setelah pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, untuk dan atas nama Menteri Keuangan;
2. R/R Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
3. Kegiatan investasi; dan
4. Kegiatan pengelolaan aset BUMN.

Selain itu Perseroan juga melaksanakan kegiatan:

1. Investasi langsung maupun tidak langsung berupa:
 - a. Pemberian pinjaman untuk membiayai proyek dan/atau kegiatan usaha lainnya.
 - b. Penempatan dana pada suatu proyek dan/atau kegiatan usaha lainnya.
 - c. Pembelian, pengembangan, dan/atau penjualan/penyewaan aset.
 - d. Melakukan penyertaan (dalam rangka pendirian, pembelian saham yang telah dikeluarkan atau saham dalam simpanan) pada perusahaan yang bersifat sementara dalam rangka peningkatan nilai untuk dijual kembali.
2. Investasi pada instrumen Surat Berharga berupa:
 - a. Pembelian Surat Utang termasuk kuasi ekuitas yang tercatat di Bursa Efek atau yang tidak tercatat di Bursa Efek.
 - b. Pembelian saham, *warrant* dan produk derivatif lainnya melalui Bursa Efek.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan yaitu melalui:

1. Jasa Konsultansi, berupa jasa konsultansi:
 - a. Bisnis dan manajemen;
 - b. Penjualan dan/atau pengembangan aset;
2. Pengelolaan aset milik: Negara selain aset Negara yang berasal dari BPPN; Pemerintah Daerah; badan hukum yang dimiliki dan/atau didirikan oleh Negara selain Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta, termasuk anak perusahaan BUMN, perusahaan patungan, meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Melakukan penjualan aset termasuk saham dan piutang;
 - b. Melakukan penyewaan aset;
 - c. Melakukan restrukturisasi piutang termasuk penagihan piutang;
 - d. Melakukan restrukturisasi perusahaan; dan
 - e. Pengembangan dan pendayagunaan aset termasuk melalui kerja sama dengan pihak lain.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Perseroan senantiasa mengimplementasikan kebijakan strategis guna memanfaatkan usaha yang tepat, antara lain dengan memanfaatkan peluang bisnis yang ada dengan menerapkan praktik usaha berlandaskan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan secara konsisten. Untuk mendapatkan kinerja yang optimal, Perseroan mengedepankan kerja sama dengan berbagai pihak dan mitra kerja strategis dengan tujuan untuk meningkatkan nilai Perseroan.

Secara garis besar, bidang usaha Perseroan saat ini adalah :

PENGELOLAAN ASET	R/R BUMN	INVESTASI	JASA KONSULTANSI
• Melakukan penjualan aset termasuk saham dan piutang • Melakukan penyewaan aset • Melakukan restrukturisasi piutang termasuk penagihan piutang • Melakukan restrukturisasi perusahaan • Pengembangan dan pendayagunaan aset termasuk melalui kerja sama dengan pihak lain.	• Meningkatkan kinerja dan nilai BUMN secara <i>sustainable</i>/jangka panjang dengan memperhatikan aspek komersial dan kesinambungan • BUMN yang direstrukturisasi dan revitalisasi ditetapkan oleh Menteri BUMN setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan	• Investasi langsung maupun tidak langsung • Investasi dalam bentuk instrumen surat berharga termasuk kuasi ekuitas	• Bisnis dan manajemen • Penjualan dan/atau pengembangan aset

Produk atau Jasa yang Dihasilkan

Finance

Secara garis besar, jasa pembiayaan Perseroan bersifat efisien dan fleksibel dengan memperhatikan kebutuhan klien. Sebagian besar pembiayaan tersebut disalurkan kepada BUMN yang bergerak di bidang konstruksi, manufaktur, dan bidang potensial lainnya baik untuk mendukung penyelesaian proyek maupun kegiatan investasi. Jasa pembiayaan juga dilakukan melalui entitas anak.

Hingga saat ini, Perseroan menyediakan jasa pembiayaan dengan cakupan kegiatan usaha antara lain: *factoring, consumer financing, leasing, working capital financing, project financing, bridge financing, dan buy out financing*.

Advisory

Perseroan memberikan jasa konsultasi bisnis melalui perancangan langkah-langkah strategis agar klien dapat memperluas dan mencapai target bisnis. Konsultasi yang disediakan seputar *due diligence, business valuation & financial modelling, business plan, merger & acquisition, dan sustainability service*.

Setiap tahun permintaan terhadap jasa *advisory* terus meningkat, hal ini turut mempengaruhi ragam jenis layanan yang diberikan oleh Perseroan, yang meliputi:

1. Tahapan program restrukturisasi hingga eksekusi suatu perusahaan;
2. *Business Review and Financial Project Development*;
3. Program pendampingan dalam rangka pendayagunaan tanah/aset tetap suatu perusahaan; dan
4. Kajian bisnis terkait penataan dan penyehatan suatu perusahaan.

Investasi

Dengan kemampuan mengakses pasar yang luas serta hubungan kelembagaan yang kuat, Perseroan memberikan peningkatan nilai ekonomi – baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang – melalui pengelolaan dan pengembangan investasi klien/mitra strategis. Upaya ini diwujudkan dalam bentuk penempatan dana pada suatu aset/proyek, pembelian aset, serta instrumen investasi lainnya.

Jenis jasa yang diberikan Perseroan terkait investasi antara lain dalam bentuk pembiayaan dan saham/surat berharga sebagai investasi jangka pendek, kerja sama operasi sebagai investasi jangka menengah, serta investasi dalam bentuk penyertaan dan investasi properti sebagai investasi jangka panjang.

Pada tahun 2017, Perseroan juga terus mencari peluang untuk berinvestasi pada bidang/industri yang sesuai dengan kriteria investasi Perseroan, selain tetap melanjutkan investasi yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Perseroan juga bersinergi dengan BUMN untuk membuka peluang investasi.

Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi (R/R)

Secara garis besar, Perseroan menyediakan jasa restrukturisasi dan/atau revitalisasi dalam rangka mendukung suatu perusahaan mencapai pertumbuhan dan perkembangan bisnis yang berkesinambungan. Dalam hal ini, fokus jasa yang diberikan Perseroan meliputi *Corporate Restructuring* dan *Debt Restructuring*.

Hingga saat ini, Perseroan melaksanakan kegiatan R/R untuk sejumlah BUMN berdasarkan penugasan dari Menteri BUMN serta Perusahaan non BUMN. Kegiatan tersebut mencakup:

1. Penyelesaian terhadap masalah ketenagakerjaan.
2. Pengembangan potensi BUMN.
3. Pencairan investasi untuk mengoperasikan kembali/meningkatkan kinerja BUMN.
4. Pemantauan kinerja BUMN.
5. Pendampingan klien untuk menyusun proposal R/R Pinjaman dan Korporasi kepada para krediturnya/perbankan.

STRUKTUR ORGANISASI

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan per 31 Desember 2017. Struktur ini disahkan melalui Surat Keputusan No. SK-28/PPA/0415 tentang Struktur Organisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) tanggal 27 April 2015.



VISI, MISI DAN NILAI PERUSAHAAN

VISI

Menjadi grup perusahaan investasi dan operasi terkemuka

Persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi atas Visi, Misi, Budaya Kerja, dan Nilai Perusahaan

Seluruh hal yang tercantum dalam visi, misi, dan nilai budaya atau filosofi Perseroan telah disepakati dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta dituangkan dalam RJPP tahun 2015-2019.

MISI

Meningkatkan nilai dan pertumbuhan usaha dengan mengkapitalisasi jaringan akses ke pasar, mitra strategis, dan kapital melalui perbaikan (*turn around*) korporasi/aset dan investasi

Peninjauan atas Visi, Misi, Budaya Kerja, dan Nilai Perusahaan dalam Lima Tahun Terakhir

Segala sesuatu yang tercantum di dalam visi, misi, dan budaya atau filosofi Perseroan telah disetujui dan dituangkan ke dalam RJPP Tahun 2015-2019, dan telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Strategi Pencapaian Visi dan Misi

Dalam rangka mencapai visi dan misi di atas, Perseroan menetapkan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis untuk setiap segmen bisnis perseroan yaitu :

1. Kegiatan Investasi

Strategi usaha yang ditetapkan Perseroan dalam bidang investasi meliputi: investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, pengembangan kegiatan usaha entitas anak, peluang pengembangan usaha baru, dan penguatan strategi inisiasi guna membuka peluang investasi baru dengan mitra strategis.

2. Kegiatan Pengelolaan Aset

Strategi usaha yang ditetapkan Perseroan dalam bidang pengelolaan aset dibagi menjadi dua, yaitu pengelolaan aset eks BPPN dan selain eks BPPN. Strategi ini meliputi:

a. Untuk aset eks BPPN

Melalui penjualan, pemanfaatan, penyewaan, restrukturisasi dan/atau revitalisasi, pemeliharaan, pengamanan, penatausahaan, pelaporan dan pengadaan jasa, restrukturisasi aset kredit, serta pemantauan dan pengkajian atas kinerja perusahaan dan tindakan korporasi terhadap perusahaan yang dikelola.

b. Untuk aset selain eks BPPN

Melalui komunikasi intensif dan sosialisasi kepada target market, riset awal oleh tim *Research & Development*, rencana pengembangan dan pemasaran jasa/produk pengelolaan aset, pelaksanaan program penjualan dan penatausahaan aset, serta kerja sama dengan mitra strategis.

3. Kegiatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi (R/R) BUMN

Strategi usaha yang ditetapkan Perseroan dalam bidang R/R meliputi: restrukturisasi dan/atau revitalisasi secara menyeluruh, persetujuan penyelesaian utang-piutang R/R dan investasi, pengurangan *impairment*, koordinasi dengan Kementerian BUMN, dan penempatan perwakilan Perseroan pada perusahaan yang dikelola.

4. Kegiatan Jasa Konsultansi

Strategi usaha yang ditetapkan Perseroan dalam bidang konsultansi meliputi: komunikasi intensif dengan seluruh mitra strategis, riset dan pemetaan awal, pengembangan dan pemasaran jasa/produk, dan penyediaan jasa konsultansi.

5. Anak Perusahaan

Strategi usaha yang ditetapkan Perseroan kepada anak perusahaan meliputi: pengarahan dan persetujuan penyusunan RKAP, monitoring berkala terhadap pencapaian kinerja dan penerapan *good corporate governance*, penerapan sistem deteksi dini, penindaklanjutan atas hasil monitoring, dan penempatan wakil Perseroan di anak perusahaan.

6. Kegiatan Dukungan Kerja

Strategi usaha yang ditetapkan Perseroan terkait dukungan kerja meliputi: penguatan *brand* dan jalinan kemitraan dengan pemangku kepentingan, pengadaan pendanaan jangka pendek dan panjang, penerapan *cost control*, pengembangan *private cloud*, ekspansi *shared service* kepada anak perusahaan, pemenuhan posisi strategis di unit bisnis, pembentukan *talent pool*, penetapan struktur remunerasi yang bersaing, pelaksanaan pengembangan kompetensi karyawan sesuai pertumbuhan bisnis, kajian berkala terhadap pengelolaan risiko, dan evaluasi terhadap hasil penilaian *good corporate governance*.



BUDAYA PERUSAHAAN

Agar mencapai Visi dan Misi Perseroan, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki Budaya Kerja yang baik. Agar terbentuk budaya kerja yang baik, Perseroan secara berkelanjutan dan terstruktur menanamkan nilai-nilai (*Core Values*) Perusahaan yaitu SEEIT (*Stewardship, Entrepreneurship, Excellent, Integrity & Teamwork*). Agar SEEIT menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari seluruh insan Perseroan, maka telah dilaksanakan program internalisasi *Core Values*, sebagai berikut:

1. Sosialisasi *Core Values*.
2. Penyusunan *gesture Core Values*.
3. Implementasi melakukan *gesture Core Values* pada saat dimulainya acara-acara pelatihan, *morning briefing* tiap Satuan kerja serta acara-acara kebersamaan karyawan.
4. Pembentukan Tim *Core Values* yang bertugas menyusun program kerja internalisasi nilai-nilai perusahaan kepada seluruh insan Perseroan.

NILAI PERUSAHAAN

Nilai-nilai Perusahaan merupakan fondasi dan panduan dari setiap insan Perseroan dalam melakukan pekerjaan untuk mendorong tercapainya tujuan Perseroan. Nilai-nilai Perseroan harus dapat memotivasi insan Perseroan guna mencapai tujuan sebagaimana tercermin dalam Visi dan Misi perusahaan.

Nilai-nilai perusahaan sangat berkaitan dengan tujuan Perseroan. Untuk itu, setiap individu dalam Perseroan harus memahami tujuan Perseroan dengan baik. Adanya pemahaman yang sama diantara manajemen dan karyawan, akan terbentuk budaya kerja perusahaan yang kondusif dan inovatif. Sehingga, pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan dedikasi dan semangat yang tinggi serta berorientasi pada hasil (*result oriented*). Adapun nilai-nilai Perusahaan adalah sebagai berikut:



Stewardship

Melaksanakan amanah para *stakeholder* dan meninggalkan *legacy*.



Entrepreneurship

Selalu mencari peluang untuk mengembangkan bisnis.



Excellence

Memberikan hasil yang terbaik dalam setiap tugas.



Integrity

Selalu menerapkan standar etika yang tinggi dan memenuhi komitmen setiap tugas.



Teamwork

Komitmen untuk selalu bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama.

PROFIL DEWAN KOMISARIS



Edy Putra Irawady

Komisaris Utama (2016-2021)

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Kualatungkal, 5 Oktober 1957 dan saat ini berusia 60 tahun.

Dasar Hukum Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2012 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-430/MBU/2012 tanggal 3 Desember 2012 dan telah diangkat kembali berdasarkan Keputusan RUPS Nomor SK-78/MBU/04/2016 tanggal 14 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset untuk jangka waktu 5 tahun atau sampai dengan 2021.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata-1 bidang Hukum dari Universitas Indonesia (1981), dan gelar Master of Arts in International Graduate Transaction (M.A.I.T) dari George Mason University, Virginia, Amerika Serikat.

Riwayat Pekerjaan

Sebelum menjadi Komisaris Utama, beliau telah menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2011 berdasarkan Keputusan RUPS KEP-92/MBU/2011 tanggal 14 April 2011. Beliau juga menjabat sebagai

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (November 2017 - sekarang), sebelumnya menjabat sebagai Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri (2012 - 2017); Deputy Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan (2005 - 2012); Plt. Asisten Deputy III Menko Perekonomian, Urusan Pemanfaatan SDA Pertanian dan Peternakan (2002 - 2004); Asisten Deputy Menko Perekonomian Urusan Kelautan dan Perikanan (2001-2005); Pelaksana Harian Asisten Deputy Menko Perekonomian Urusan Pemanfaatan SDA Pertanian dan Peternakan (2002-2004); dan Asisten Deputy Menko Ekuin Urusan Industri Olahan (2000-2001).

Informasi Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki jabatan lain di internal selain menjadi Komisaris Utama Perseroan. Sedangkan di luar Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Dengan demikian rangkap jabatan beliau tidak bertentangan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi lainnya dan pemegang saham Perseroan.


Taufik Sukasah
Komisaris (2013-2018)

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Yogyakarta, 29 Agustus 1958 dan saat ini berusia 59 tahun.

Dasar Hukum Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-219/MBU/2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset untuk jangka waktu 5 tahun atau sampai dengan 2018.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata-1 bidang Sosial Politik Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran (1984) dan S2 Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia (2005).

Riwayat Pekerjaan

Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Deputy Kepala Sekretariat Presiden Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana (2017); sebelumnya menjabat sebagai Deputy Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana (2015-2017); Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (2011-

2015); Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara RI (2013-2014); dan Kepala Biro Umum, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara RI (2011-2013).

Informasi Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki jabatan lain di internal selain menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan. Sedangkan di luar Perseroan, beliau menjabat sebagai Deputy Kepala Sekretariat Presiden Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana.

Dengan demikian rangkap jabatan beliau tidak bertentangan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi lainnya dan pemegang saham Perseroan.


Dedi Rudaedi
Komisaris (2013-2018)

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Tasikmalaya, 23 September 1953 dan saat ini berusia 64 tahun.

Dasar Hukum Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-357/MBU/2013 tanggal 19 September 2013 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset untuk jangka waktu 5 tahun atau sampai dengan 2018.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan Diploma IV, jurusan Akuntansi dari STAN Jakarta (1982) dan Master of Science in Professional Accounting dari University Hartford, Amerika Serikat (1986).

Riwayat Pekerjaan

Pernah menjabat sebagai Sekretaris pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak (2012-2013) dan Direktur pada Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (2011-2012).

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan, beliau menjabat sebagai Ketua Komite Audit di internal Perseroan untuk periode 2013-2018. Sedangkan di luar Perseroan, beliau masih aktif mengajar pada program Diploma IV Jurusan Politeknik Keuangan Negara STAN.

Dengan demikian rangkap jabatan beliau tidak bertentangan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi lainnya dan pemegang saham Perseroan.


Tirta Hidayat
Komisaris (2014-2022)

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Banda Aceh, 9 Maret 1959 dan saat ini berusia 58 tahun.

Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-104/MBU/06/2017 tertanggal 5 Juni 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset untuk jangka waktu 5 tahun atau sampai dengan 2022.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan Sarjana S1 di bidang Ekonomi dari Universitas Indonesia (1985), lalu meraih gelar Master of Science dari Regional Science, Cornell University, New York, USA. Pada tahun 1991 menyelesaikan gelar Doctor of Philosophy (PhD), dari Regional Science, Cornell University, New York, USA.

Riwayat Pekerjaan

Menjabat Asisten Koordinator untuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Deputi Ekonomi, Infrastruktur, dan Kelautan (2007-2017),

Kepala Penelitian dan Pengembangan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (2000-2002); serta menjabat di Bappenas (1993-2000) sebagai Kepala Biro.

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan, beliau menjabat sebagai Deputi Ekonomi, Infrastruktur dan Kelautan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dengan demikian rangkap jabatan beliau tidak bertentangan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan pemegang saham Perseroan.

PROFIL DIREKSI



Henry Sihotang

Direktur Utama (2017-2019)

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Samosir, 19 April 1961 dan saat ini berusia 56 tahun.

Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-252/MBU/11/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Pemberhentian dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset untuk jangka waktu meneruskan sisa masa jabatan atau sampai dengan 2019.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata-1 di bidang Manajemen Keuangan dari Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana, Jakarta (1985). Meraih gelar Magister Manajemen bidang Keuangan dari Universitas Satyagama, Jakarta (1988).

Riwayat Pekerjaan

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen Perseroan (2014-2017), Executive Vice President Bank Mandiri, Corporate Risk II Group (2010-2014); Non-Executive Director of Bank Mandiri European Ltd, London (2010-2012); Komisaris PT Pengelola Investama Mandiri (2009-2014); Senior Vice President, Credit Recovery II Group (2008-2010).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan pemegang saham Perseroan.


Andi Saddawero
**Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset
Manajemen (2018-2019)**

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Ujungpandang, 8 Oktober 1969 dan saat ini berusia 48 tahun.

Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen sejak 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-14/MBU/01/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Perubahan Nomenklatur, Pengalihan Tugas Dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset untuk jangka waktu meneruskan sisa masa jabatan atau sampai dengan 2019.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata-1 di bidang Teknik Mesin dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Makassar (1993). Meraih gelar Magister Management bidang Manajemen Akuntansi dari Universitas Indonesia (1995).

Riwayat Pekerjaan

Beliau berkarier di Perseroan sejak awal berdiri pada 2004. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Investasi Perseroan (2014-2017), Plt Direktur Utama Perseroan (2013-2014); Direktur Perseroan (2009-2013); Direktur Utama PT Karabha Digdaya (2008-2009); Kepala Bagian Aset Saham Non-Bank Perseroan, (2005-2008); General Manager Special Asset Management PT Bank Permata Tbk (2005); Kepala Bagian Aset Saham Bank Perseroan (2004-2005); dan Kepala Grup Unit Restrukturisasi Bank BPPN (2002-2004).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan pemegang saham Perseroan.



Ajar Setiadi

**Direktur Keuangan dan Dukungan
Kerja (2014-2019)**

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Yogyakarta, 25 November 1967 dan saat ini berusia 50 tahun.

Dasar Hukum Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja Perseroan sejak 2014 berdasarkan Keputusan RUPS Nomor SK-112/MBU/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, atau sampai dengan 2019.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata-1 di bidang Fisika Nuklir dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1992). Meraih gelar Master of Economic Development dari Universitas Gadjah Mada (2013).

Riwayat Pekerjaan

Beliau berkarier di Perseroan sejak awal berdiri pada 2004. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai HR dan General Affair Division Head Perseroan (2010-2014); General Affairs Group Head Perseroan (2004-2010); Building Maintenance Group Head Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1999-2004); Manager of General Affairs Group BPPN (1999-2000); HRD dan General Affairs Senior Manager PT KIA Timor Motor (1998-1999); Personal dan General Affairs Head PT Astra Daihatsu Motor-Engine Plant (1995-1998).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan pemegang utama.


Nasrizal Nazir
Direktur Investasi (2018-2023)

Warga Negara Indonesia, Berdomisili di Jakarta, Lahir di Padang, 12 September 1964 dan saat ini berusia 50 tahun.

Dasar Hukum Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Investasi sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset Nomor SK-14/MBU/01/2018 tertanggal 16 Januari 2018 tentang Perubahan Nomenklatur, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai dengan 2023.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan Sarjana S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1989) lalu menempuh pendidikan Master of Business Administration di University of Wisconsin, Milwaukee, USA (1996).

Riwayat Pekerjaan

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Chief Financial Officer di PT Polytama Propindo (2016-2017); Direktur Pembiayaan, Risk Management/Finance di PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (2013-2016); Associate Director Corporate Planning/Finance PT Wintermar Offshore Marine Tbk (2011-2013); Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005-2011); Assistant Vice President Corporate Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1999-2005); Kepala Tim Pembiayaan Proyek di Bank Pembangunan Indonesia Cabang Makassar, Sulawesi Selatan (1996-1999).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan pemegang saham utama.

SENIOR MANAJEMEN



Ardian Pratama

Boedi Djatmiko

Fransisca Ekawati

Dikdik Permadi

Dicky Henria
Nugraha

Edi Winanto



F. Hasiholan
Tamba

Isa Muhammad
Nur

Qadrisna

Sarda Yunus

Made Sumadi Arta

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Pemegang Saham Perseroan 100% adalah Negara Republik Indonesia sehingga Negara Republik Indonesia menjadi Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kelompok Pemegang Saham Masyarakat dengan Kepemilikan Saham Masing-Masing Kurang dari 5%

Sampai dengan 31 Desember 2017 Perseroan merupakan BUMN *non-listed* atau belum mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia sehingga tidak terdapat kelompok/kumpulan masyarakat yang memiliki jumlah saham Perseroan dengan kepemilikan di bawah 5%.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Hingga 31 Desember 2017, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak memiliki saham langsung dan saham tidak langsung Perseroan.

Komposisi Pemegang Saham Publik

Sampai dengan 31 Desember 2017 Perseroan merupakan BUMN *non-listed* atau belum mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia sehingga tidak terdapat komposisi Pemegang Saham Publik dikarenakan Perseroan merupakan BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM DAN EFEK LAINNYA

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) merupakan Perseroan yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan belum mengeluarkan obligasi. Seluruh saham Perseroan dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

ENTITAS ANAK

Perseroan memiliki 6 (enam) Entitas Anak yang keseluruhannya beroperasi sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Tahun Pendirian /Akuisisi	Persentase Saham Perseroan	Total Aset Dalam Jutaan	Status
1	PT PPA Finance	- Sewa guna usaha - Anjak piutang - Pembiayaan konsumen	2009	98,999%	863.712	Beroperasi
2	PT PPA Kapital	- Jasa pengelolaan investasi - Jasa di bidang pengelolaan aset	2011	99,996%	146.962	Beroperasi
3	PT Nindya Karya (Persero)	- General contractor - Civil engineering - Realty	2012	99%	4.549.648	Beroperasi
4	PT Nindya Beton*	Produksi Beton Precast	2013	49%	126.265	Beroperasi
5	PT Duta Mentari Raya**	Pabrikasi	2014	98,150%	128.333	Beroperasi
6	PT Pratama Persada Airborne**	Survei Udara dan Pemetaan	2016	99,990%	49.005	Beroperasi

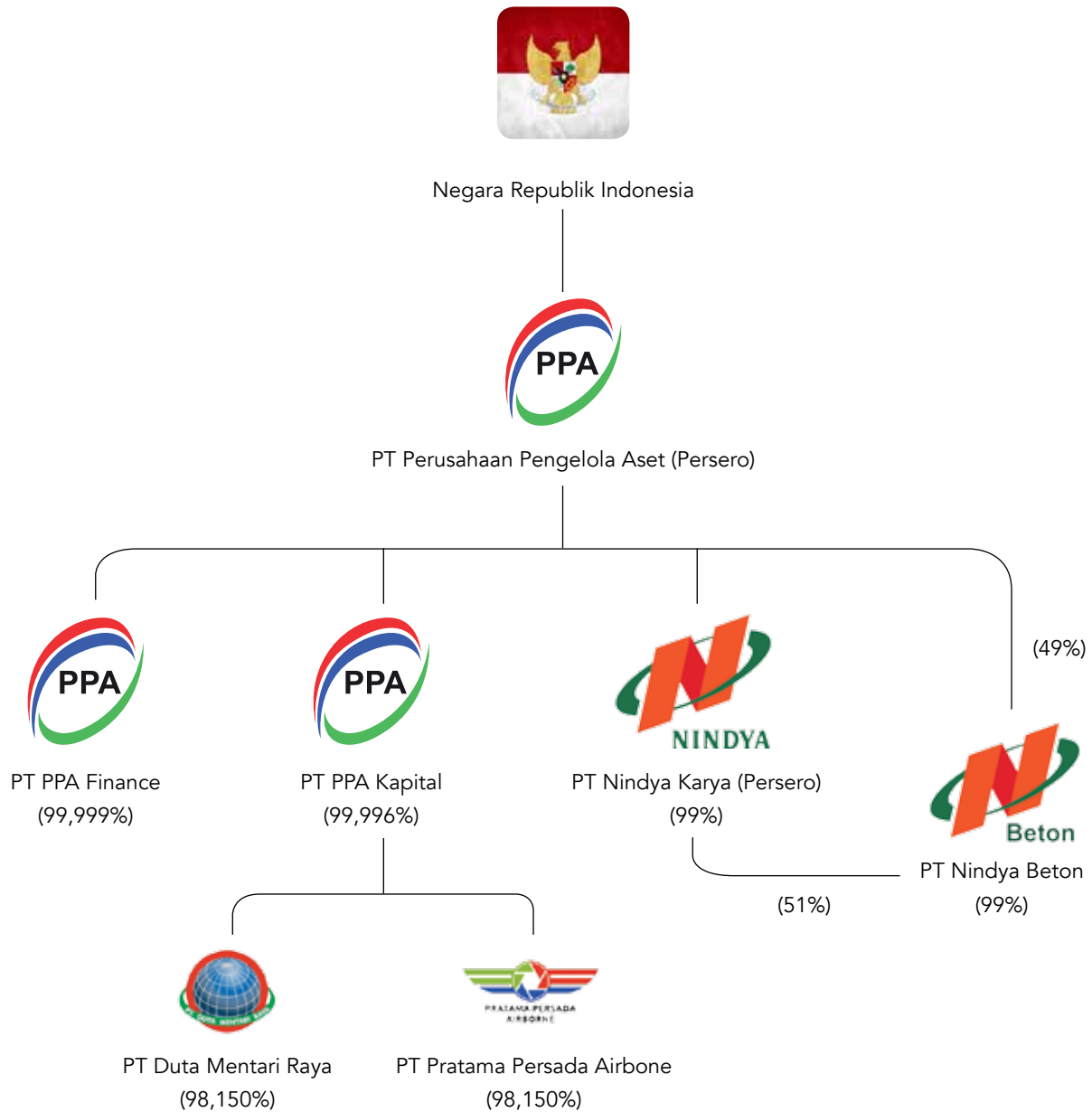
*) Kepemilikan tidak langsung melalui PT Nindya Karya (Persero)

**) Kepemilikan tidak langsung melalui PT PPA Kapital

KERJA SAMA OPERASI (JOINT VENTURE)

Pada 2017, Perseroan dan entitas anak melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) bersama pihak lain dengan total sebanyak 29 perusahaan yang jumlah investasinya tercatat sebesar Rp340.884 juta.

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN



LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi	Nama	Alamat dan Nomor Telepon	Jasa yang Diberikan	Biaya	Periode
Biro Administrasi Efek dan Pemeringkat Efek	Perseroan tidak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sehingga tidak menggunakan jasa biro administrasi efek dan pemeringkat efek.				
Kantor Akuntan Publik Dalam penyajian laporan keuangan Perseroan kepada Pemegang Saham, Perseroan menggunakan jasa Auditor Eksternal yang independen. Penunjukan auditor eksternal dilakukan dalam RUPS dengan memberikan kuasa dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik.	RSM AAJ Associates	Plaza Asia Jl. Jend Sudirman Kav. 59 Level 10 Jakarta 12910 Telp. +62 21 51401340	Pemeriksaan Audit Laporan Keuangan	Rp522.500.000	Tahun ke-7
Notaris Perseroan menggunakan jasa Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh Perseroan dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta memberikan grosee, salinan dan kutipan akta.	Desman, S.H. M.Hum.,M.M	Jl. Muara Karang Raya Nomor 10 Jakarta 14450 Telp. +62 21 6630328	Kenotariatan	Rp1.750.000	Tahun ke-9

INFORMASI PADA SITUS PERSEROAN

Dalam menerapkan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan, Perseroan menerapkan peraturan-peraturan terkait yang ada. Peraturan yang diterapkan terkait keterbukaan dalam penyampaian informasi perusahaan adalah Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset No. SK-33/PPA/0516 tanggal 25 Mei 2016 tentang Kebijakan Keterbukaan Informasi Perusahaan.

Perseroan memiliki *website* dengan alamat <https://www.ptppa.com>. Perseroan selalu berupaya menyempurnakan *website* tersebut secara berkala agar menjadi semakin informatif dan mudah untuk diakses oleh para *stakeholders*. *Website* Perseroan memiliki dua versi bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Website Perseroan juga memuat informasi mengenai praktik GCG yang telah diterapkan oleh Perseroan antara lain Struktur Organisasi dan Tim Manajemen (memuat susunan terbaru dari Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Pemegang Saham Perseroan, *Core Values* serta *Governance Structure* (memuat dokumen-dokumen GCG seperti Pedoman GCG, *Code of Conduct*, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Kebijakan *Whistleblowing System*, dan dokumen kebijakan lainnya).

Website Perseroan secara garis besar terdiri dari:

Informasi	Keterangan
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu	Ditampilkan dalam menu "Perusahaan" dilanjutkan pada sub menu "Kinerja" dan "Annual Report".
Informasi mengenai menu Tata Kelola yang memuat ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perseroan.	Ditampilkan dalam menu "Perusahaan" dilanjutkan pada sub menu "Kinerja", "Tata Kelola GCG" dan "Pedoman Tata Kelola".
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan;	Ditampilkan dalam menu "Perusahaan" dilanjutkan pada sub menu "Kinerja" dan "Annual Report".
Laporan tahunan terpisah (5 tahun terakhir)	Ditampilkan dalam menu "Perusahaan" dilanjutkan pada sub menu "Kinerja" dan "Annual Report".
Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir)	Ditampilkan dalam menu "Perusahaan" dilanjutkan pada sub menu "Kinerja" dan "Annual Report".
Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan	Ditampilkan dalam menu "Perusahaan" dilanjutkan pada sub menu "Manajemen PPA".
Informasi mengenai <i>Board Manual</i>	Ditampilkan dalam menu "Perusahaan" dilanjutkan pada sub menu "Kinerja", "Tata Kelola GCG" kemudian menu "Board Manual" dan menu "Pedoman Tata Kelola" kemudian menu "Board Manual".

NAMA DAN ALAMAT ENTITAS ANAK

PT PPA Finance

Bidang Usaha

1. Sewa (*Leasing*)
2. Anjak Piutang (*Factoring*)
3. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Financing*)

Alamat

Sampoerna Strategic Square
North Tower Lantai 9th
Jl. Jend. Sudirman kav. 45-46
Jakarta - 12930
Indonesia
No. Telp : +6221-57951419
Faksimili : +6221-57951420
Surel : customerservice.ppafinance@ptppa.com

PT PPA Kapital

Bidang Usaha

1. Jasa pengelolaan investasi dalam bentuk pembelian dan penjualan efek (tidak dalam fungsi sebagai Manajer Investasi).
2. Jasa konsultasi manajemen.
3. Jasa konsultasi keuangan.
4. Jasa konsultasi pengelolaan aset.

Alamat

Sampoerna Strategic Square
North Tower Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman kav. 45-46
Jakarta - 12930
Indonesia
No. Telp : +6221-2512222
Faksimili : +6221-57982555

PT Nindya Karya (Persero)

Bidang Usaha

1. Konstruksi
2. EPC (Engineering, Procurement, dan Construction)
3. Investasi

Alamat

Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 22 Jakarta 13630, Indonesia
No. Telp : +6221-8093276
Faksimili : +6221-8093105

Surel : nindyakarya@nindyakarya.co.id

Situs : www.nindyakarya.co.id

PT Nindya Beton*

Bidang Usaha

Produksi Beton Precast

Alamat

Kaliangsana, Kalijati, Subang Regency, Jawa Barat 41271
No. Telp : +62260 462626, 460794
Faksimili : +62260 462625, 460794
Situs : www.nindyabeton.co.id

PT Pratama Persada Airborne**

Bidang Usaha

Survei Udara dan Pemetaan

Alamat

Sampoerna Strategic Square
North Tower 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 45-46
Jakarta 12930
Telepon : +62 21 5798 2266
Faksimili : +62 21 5798 2266
Surel : nugraha.ppairborne@ptppa.com

PT Duta Mentari Raya**

Bidang Usaha

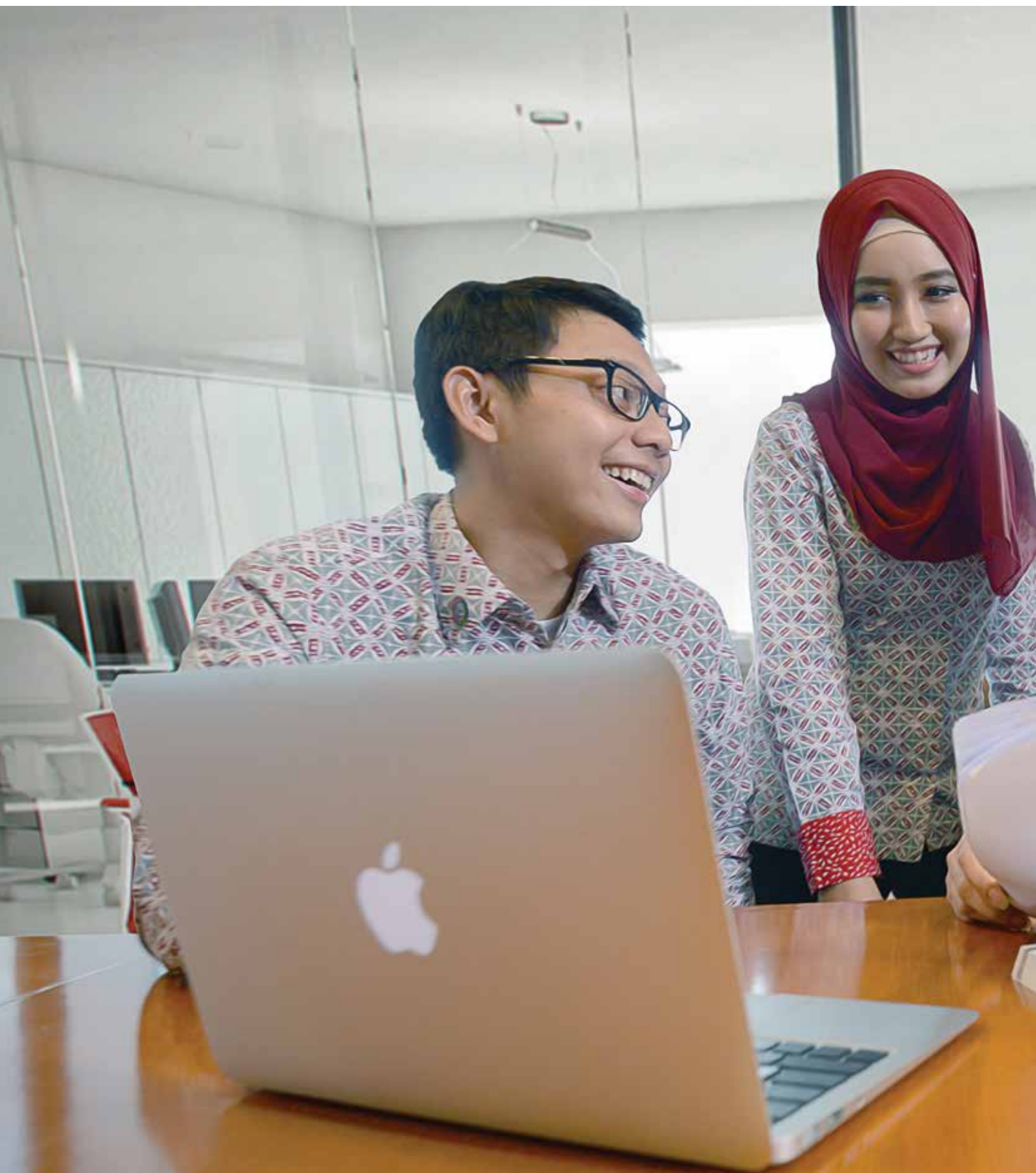
Pabrikasi

Alamat

Sampoerna Strategic Square
North Tower 9th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 45-46
Jakarta 12930
Telepon : +62 21 251 2222
Faksimili : +62 21 5798 2266
Surel : delirathnasari@gmail.com

*) Kepemilikan tidak langsung melalui PT Nindya Karya (Persero)

**) Kepemilikan tidak langsung melalui PT PPA Kapital





04

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

SUMBER DAYA MANUSIA



Perseroan mengambil langkah strategis dengan terus meningkatkan pengembangan sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan dunia industri yang terus berkembang. Perseroan memandang bahwa sumber daya manusia (SDM) bukan sekedar aset Perusahaan namun sekaligus Mitra Strategis yang berperan penting dalam optimalisasi pertumbuhan usaha.

Kebijakan Sumber Daya Manusia

Kebijakan pengelolaan SDM Perseroan di atur berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK-35/PPA/0614 tentang kebijakan manajemen karir karyawan.

Divisi *Human Capital* merancang rencana pengembangan SDM Perseroan yang sejalan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2015-2019 serta kebijakan terkait kepegawaian yang sejalan dengan RJPP tersebut. Hal ini dilakukan guna adanya sinergitas antara tujuan Perseroan dengan SDM yang dibutuhkan.

Tugas pokok Divisi *Human Capital* adalah melaksanakan penyusunan kebijakan, pengembangan dan pengelolaan SDM, dengan fungsinya sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan kepegawaian;
2. Menyusun dan melaksanakan sistem pengembangan dan pembinaan SDM;
3. Memenuhi kebutuhan SDM yang bersumber dari internal dan eksternal Perseroan;
4. Melaksanakan sosialisasi ketentuan kepegawaian dan komunikasi internal terkait bidang kepegawaian;

5. Melakukan penatausahaan kegiatan dan administrasi kepegawaian; dan
6. Melakukan pembayaran remunerasi dan manfaat (*benefit*) karyawan (termasuk pembayaran dan pelaporan PPh 21, iuran dana pensiun serta program Jaminan Sosial).

Kegiatan Sumber Daya Manusia

Selama 2017, kegiatan yang telah dilaksanakan Perseroan melalui Divisi *Human Capital* terkait kebijakan kepegawaian dalam rangka mencapai visi dan misi perusahaan sebagaimana tercantum dalam RJPP tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Penugasan karyawan;
2. Persetujuan perubahan jabatan dan mutasi karyawan;
3. Proses penjaringan bakal calon anggota Direksi anak Perusahaan;
4. Penyusunan Sistem Operasional dan Prosedur (SOP);
5. Penyusunan *Man Power Planning* dan *Training Plan*;
6. Persetujuan Promosi dan Penetapan Jabatan Karyawan dalam Satuan Kerja;
7. Persetujuan pengesahan laporan Ketenagakerjaan; dan
8. Persetujuan pengesahan Peraturan Perusahaan Tahun 2016-2018.

Divisi *Human Capital* juga mengorganisasi kegiatan karyawan berupa kegiatan keagamaan dan kegiatan olahraga dan seni serta upacara hari besar nasional.

Rekrutmen Karyawan

Divisi *Human Capital* mengkoordinasi pelaksanaan rekrutmen dan seleksi karyawan baru. Pada 2017, terdapat penambahan/pengurangan karyawan dengan penjelasan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Karyawan baru	25 orang
Karyawan yang memasuki masa usia pensiun normal	1 orang
Karyawan yang berakhir hubungan kerjanya karena mengundurkan diri	10 orang

Per 31 Desember 2017, jumlah karyawan Perseroan adalah 183 orang yang meningkat 3.4 % dari jumlah karyawan pada 2016 berjumlah 177 orang. Komposisi ini terdiri dari 175 orang karyawan, 3 orang anggota Direksi, 5 orang anggota Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris. Selama 2017, Perseroan juga menerima siswa/mahasiswa magang sebanyak 21 orang.

Komposisi Sumber Daya Manusia

Berikut komposisi SDM Perseroan dalam dua tahun terakhir:

Jumlah Karyawan Berdasarkan Direktorat				
Berdasarkan Direktorat	2017		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Dewan Komisaris	4	2	4	2
Sekretaris Dewan Komisaris	1	1	1	1
Direksi	3	2	4	2
CEO Office	41	22	41	23
D. Investment	30	16	28	16
D. Business Advisory & Asset Management	39	21	36	20
D. Finance & Support	65	36	63	36
Jumlah	183		177	

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Level Organisasi

Jenjang Level Organisasi	2017		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Dewan Komisaris	4	2	4	2
Sekretaris Dewan Komisaris	1	1	1	1
Direktur	3	2	4	2
General Manager	11	6	10	6
Kepala Grup	24	13	25	14
Kepala Unit	44	24	42	24
Officer	49	27	43	24
Sekretaris	27	15	8	5
Staff	9	5	29	16
Penugasan	11	6	11	6
Jumlah	183		177	

Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia

Berdasarkan Usia	2017		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%
> 55 Tahun	9	5	6	4
46-55 Tahun	69	38	69	38
36-45 Tahun	40	22	48	27
26-35 Tahun	44	24	33	19
<25 Tahun	21	11	21	12
Jumlah	183		177	

Jumlah Karyawan Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan Pendidikan	2017		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%
S3	1	1	0	0
S2	52	28	44	25
S1	110	60	112	63
Diploma	8	4	9	5
SMA	12	7	12	7
Jumlah	183		177	

Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Berdasarkan Status Pegawai	2017		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	168	92	163	92
Tidak Tetap	15	8	14	8
Jumlah	183		177	

Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pemetaan Kebutuhan Training dan Realisasi tahun 2017

Dalam rangka mengembangkan kompetensi karyawan dan memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2017, telah dilakukan pendidikan dan pelatihan berbagai bidang baik di internal maupun eksternal. Pengembangan kompetensi karyawan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan dimana selama tahun 2017 terdapat 337 *mandays* pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta diperoleh 11 sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan keterampilan tertentu.

Realisasi Pelatihan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Level Jabatan	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta
Staff/Officer	Public Training	56 peserta
Staff/Officer	Inhouse Training	101 peserta
Unit Head	Public Training	37 peserta
Unit Head	Inhouse Training	67 peserta
Group Head	Public Training	19 peserta
Group Head	Inhouse Training	45 peserta
Division Head	Public Training	6 peserta
Division Head	Inhouse Training	18 peserta
Direksi	Public Training	14 peserta

Realisasi Pelatihan dan Pengembangan SDM

Implementasi program pengembangan karyawan yang dilakukan sejalan dengan kebutuhan bisnis dan pemenuhan target kinerja sehingga mendukung pencapaian target kerja dan tujuan Perseroan. Program pelatihan yang dikembangkan secara komprehensif untuk memenuhi dan meningkatkan kompetensi teknis maupun manajerial karyawan. Perseroan melakukan pendidikan dan pelatihan dengan metode yaitu:

- *In-House Training*
- *Program Public Training*

Sepanjang tahun 2017, Perseroan telah menyelenggarakan sebanyak 11 (sebelas) *in-house training* dan 132 (seratus tiga puluh dua) program *public training*.

Realisasi *Inhouse Training* Tahun 2017

No	Nama Training
1	Pendidikan Dasar Penilaian 1 Bisnis
2	Workshop KPI GM
3	Workshop KPI GM – UH - Staff
4	<i>Financial Modelling for Sensitivity Modelling for Sensitivity & Scenario Analysis</i>
5	<i>Mergers and Acquisitions</i>
6	<i>Financial and Operational Due Diligence</i>
7	<i>Speed Reading for Smart People</i>
8	Mengolah/Mendesain Gambar menggunakan Aplikasi Photoshop
9	<i>Oracle e-Business Suite Financial Module</i>
10	Workshop Transformasi dan Strategi Bisnis
11	<i>Workshop Achieving Fiscal Year 2018 Through Professional Excellence and Growth</i>

Realisasi *Public Training* Tahun 2017

Training	
Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)	<i>Property Disrupt and Digital Transformation</i>
Ujian Kecakapan Profesi Pasar Modal	<i>Brand Development Strategic</i>
<i>Effective Inventory Accounting</i>	<i>Perform Cloud data Science with Azure Machine Learning</i>
Sertifikasi CISA	<i>Transformational Business Leadership</i>
CPA Exam	<i>Asset Management ; Revitalisasi, Utilisasi & Optimalisasi Land Bank (Non Core Asset) BUMN</i>
Pendidikan Dasar Penilaian Properti	<i>Treasury Operation, Activities & Control</i>
<i>Account Payable Management</i>	<i>Professional Financial Modeler</i>
Mentoring Program Master Developer Indonesia	<i>Optimizing & Managing Treasury Audit</i>
<i>General Affairs Development Program</i>	<i>Workshop PSAK Terkini Sesuai Konvergensi IFRS</i>
<i>Executive Leadership Program</i>	Asesor KPKU BUMN
<i>Recruitment & Selection Strategy</i>	<i>Transformational Business Leadership</i>
<i>Certified Risk Management Professional (CRMP)</i>	<i>Business Contract : Drafting and Reviewing</i>
<i>Creativity Accounting vs. Tax Planning</i>	Pendidikan Lanjutan Penilaian (PLP1) Properti
<i>Be A Smart Public Relation</i>	CSR - Mengembangkan Design, menganalisa Efektifitas dan Akuntabilitas Bantuan Sosial Perusahaan
Optimalisasi Peran Corporate Secretary Sebagai Governance Profesional	<i>Risk Based Budgeting</i>
<i>Mastering Comptia Security</i>	<i>Human Resources Management</i>
<i>Management for Professional Secretary</i>	<i>Basic Accounting</i>
<i>Treasury Management</i>	Interpretasi KPKU BUMN
<i>Supply Chain Management</i>	<i>Cobit 5 Foundation</i>
<i>Document Control & Filling System</i>	

Program Beasiswa

Program Beasiswa		
Jenis Pendidikan	Penyelenggara	Total Biaya
S2	Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM	Rp20.250.000,-

Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan

Selama tahun 2017, Perseroan telah mengeluarkan biaya pengembangan kompetensi karyawan sebesar Rp1.704.352.472,-

Pernyataan Persamaan Hak

Perseroan senantiasa memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan baik dalam pengembangan kompetensi, penerimaan karyawan, penilaian kinerja, remunerasi maupun jenjang karir, serta menyediakan pemenuhan hak lainnya seperti gaji pokok, tunjangan, jaminan kesehatan dan lainnya. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada perlakuan diskriminatif di lingkungan Perseroan.

Perseroan menjamin tidak terjadinya diskriminasi di lingkungan Perseroan sehingga tercipta perlakuan yang adil, jujur, dan transparan di kalangan karyawan, sehingga semua karyawan bisa bekerja dengan baik dan maksimal sesuai jabatan dan tugasnya masing-masing dalam mewujudkan visi dan misi Perseroan.

Layanan Sumber Daya Manusia

Perseroan melaksanakan kegiatan-kegiatan layanan SDM yang bertujuan untuk membangun komunikasi yang baik antar unit kerja serta antara manajemen dengan karyawan tentang kebijakan-kebijakan terkait karyawan. Bentuk layanan tersebut adalah:

1. Sosialisasi dan orientasi kepada karyawan baru;
2. Pengumuman kelahiran anak karyawan, berita duka, karyawan baru, karyawan mutasi/perubahan data kepegawaian dan karyawan berakhir hubungan kerja;
3. Penyampaian informasi kepada karyawan yang akan pensiun;
4. Penyampaian Pengumuman pembaharuan pelaporan wajib LHKPN; dan
5. Penyampaian pengumuman terkait layanan asuransi kesehatan, jiwa dan kecelakaan serta pelaporan perpajakan.
6. *Leaders meeting* secara rutin sebulan sekali dengan peserta para *General Manager* untuk saling berbagi informasi termasuk kajian-kajian sebagai masukan kepada Direksi dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan strategis Perseroan.



Penatausahaan Kegiatan dan Administrasi Kepegawaian

Kegiatan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan antara lain:

1. Administrasi dan pelaporan absensi dan cuti;
2. Administrasi karyawan baru, karyawan mutasi, karyawan dalam masa percobaan, promosi dan penetapan jabatan karyawan pada satuan kerja, perubahan/perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu serta karyawan yang berakhir hubungan kerja;
3. Administrasi permohonan pinjaman karyawan;
4. Administrasi permohonan surat keterangan bekerja karyawan untuk keperluan imigrasi, pengurusan visa, bank dan lain-lain;
5. Pemberian bunga/bingkisan bagi karyawan yang melahirkan, rawat inap, menikah dan berduka cita;
6. Administrasi permohonan praktik kerja dan penelitian; dan
7. Administrasi kegiatan karyawan berupa kegiatan olahraga dan seni serta kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar agama.

Strategi Remunerasi

Strategi Remunerasi diperlukan guna meningkatkan pengembangan SDM serta meningkatkan keterikatan karyawan terhadap Perseroan dimana salah satunya adalah remunerasi berbasis kompetensi. Kompetensi karyawan akan mendukung laju perkembangan perusahaan, karena setiap karyawan akan bekerja secara maksimal dalam memuluskan langkah bisnis Perseroan. Kompetensi karyawan ini akan dimulai dari asesmen terkait kinerja karyawan dalam bekerja melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Sistem dan strategi Remunerasi ini juga akan dilakukan evaluasi secara berkala guna penyesuaian dengan keadaan pasar dan kemampuan keuangan perusahaan. Sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan struktur kepangkatan dan gaji karyawan yang berlaku, komponen remunerasi karyawan adalah sebagai berikut:

Gaji

Gaji karyawan yang diterima secara bulanan akan mengalami peninjauan berdasarkan:

1. Pertimbangan dampak inflasi yang berpengaruh terhadap nilai riil gaji karyawan (*Cost of Living Adjustment*);
2. Kinerja karyawan bersangkutan selama bekerja (*merit system*); dan
3. Besaran kenaikan disesuaikan dengan tingkat kemampuan keuangan Perseroan.

Tunjangan Hari Raya (THR)

Perseroan memberikan THR sebesar satu kali upah. THR ini dibayarkan kepada karyawan yang telah menjalani masa kerja tiga bulan atau lebih di Perseroan sesuai dengan ketentuan Ketenagakerjaan yang berlaku.

Tunjangan Cuti Tahunan

Tunjangan cuti tahunan diberikan kepada karyawan yang telah bekerja di Perseroan selama tiga bulan atau lebih dengan besaran satu kali upah.

Tunjangan Cuti Besar

Perseroan memberikan tunjangan cuti besar kepada karyawan sebesar dua kali upah setelah memiliki masa kerja 6 (enam) tahun berturut-turut dan kelipatannya atau pada tahun ke-7, 13, 19, dan seterusnya. Karyawan yang mendapatkan tunjangan cuti besar tidak berhak lagi atas tunjangan cuti tahunan.

Tunjangan Jabatan, Komunikasi, BBM, Pengemudi dan Utilitas

Tunjangan ini diberikan kepada karyawan yang memiliki jabatan/kepengangkatan tertentu dalam Perseroan.

Jaminan Sosial

Perseroan juga memberikan sejumlah jaminan kepada karyawan melalui Jaminan Sosial sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu:

1. BPJS Ketenagakerjaan;
2. Jaminan Kematian;
3. Jaminan Kecelakaan Kerja;
4. Jaminan Hari Tua;
5. Jaminan Pensiun; dan
6. BPJS Kesehatan.

Apresiasi/Insentif Kinerja

Perseroan memberikan apresiasi berupa insentif kinerja kepada karyawan yang didasarkan pada tolak ukur pencapaian RKAP, penilaian kinerja dan masa kerja karyawan.

Fasilitas Kesehatan dan Asuransi

Fasilitas ini diberikan Perseroan kepada karyawan yang terdiri dari fasilitas kesehatan rawat jalan, pertanggungjawaban asuransi rawat inap, asuransi jiwa dan kecelakaan kerja.

Hubungan Industrial

Perseroan membangun hubungan industrial yang berlandaskan pada aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Segala sesuatu yang terkait dengan karyawan dan Perseroan diatur dalam Peraturan Perseroan yang tertuang dalam Buku Saku Peraturan Perusahaan yang diperbaharui setiap dua tahun sekali dan dibagikan kepada seluruh karyawan.

Perseroan melakukan komunikasi dengan karyawan untuk meningkatkan keharmonisan hubungan industrial dengan langkah-langkah antara lain:

- Melibatkan karyawan dalam pembahasan ketentuan Perusahaan
- Kebersamaan dalam penanganan dalam penyelesaian permasalahan karyawan.
- Pelaksanaan kegiatan-kegiatan karyawan seperti ibadah, sosial dan kegiatan olahraga karyawan.

Dengan terjalin baiknya komunikasi antara Perseroan dan Karyawan maka diharapkan akan terjalin sinergi kinerja yang optimal sehingga akan memudahkan dalam pencapaian tujuan Perseroan. Pada 2017, tidak tercatat adanya pelanggaran dalam hak kebebasan berserikat di Perseroan.

Budaya Kerja

Bagi Perseroan, SDM merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari Perseroan dalam usaha mencapai target Perseroan. Eksistensi SDM yang memiliki etos kerja dan budaya kerja yang baik selalu dibutuhkan oleh Perseroan. Untuk mewujudkan budaya kerja yang baik dikalangan karyawan, Perseroan secara terus menerus dan terstruktur senantiasa menanamkan nilai-nilai (*Core Values*) Perseroan yaitu SEEIT (*Stewardship, Entrepreneurship, Excellent, Integrity & Teamwork*).

TEKNOLOGI INFORMASI



Perseroan berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Teknologi Informasi yang baik dan benar di lingkungan Perseroan. Hal ini merupakan upaya Perseroan dalam merespon persaingan usaha yang terus meningkat dan kompetitif.

Melalui penerapan teknologi informasi (TI) yang tepat, akan memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan bagi Perseroan. Karena itu, Perseroan yakin bahwa dengan mendayagunakan teknologi secara efisien, tepat waktu, dan *cost effective*, dapat menghasilkan produk dan layanan yang berkualitas, andal, dan aman. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga menjadi sarana penunjang keberlanjutan usaha sekaligus pendukung efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan kepada konsumen.

Tujuan pengembangan TI di Perseroan antara lain untuk mendukung pengelolaan Perseroan secara strategis; menyediakan dan mengembangkan proses bisnis yang efisien dan efektif dengan senantiasa memperhatikan keselarasan dengan tujuan perusahaan; memastikan pelaksanaan proses manajemen risiko TI yang kuat dan komprehensif; memastikan penyediaan layanan berkualitas berbasis teknologi informasi yang andal dan inovatif; mendukung sekaligus menjadi faktor pendorong untuk pengembangan usaha Perseroan.

Menyikapi pesatnya dinamika industri dan teknologi, Perseroan senantiasa mengembangkan sistem teknologi informasi Perseroan secara terarah dan terukur guna mendukung strategi bisnis Perseroan. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan dan pengembangan TI di Perseroan mengacu pada suatu sistem tata kelola yang dimuat dalam *Master Plan* Teknologi Informasi periode 2015 - 2019, yang dikembangkan secara bersinergi antar sesama BUMN.

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Hadir sebagai kebutuhan yang fundamental dalam menjalankan kegiatan operasional, Perseroan mengoptimalkan pemanfaatan TI di seluruh lini organisasi sehingga pergerakan bisnis dapat berjalan cepat dan tepat. Dalam pengembangan TI, Perseroan juga mempertimbangkan kepentingan dan manfaat jangka panjang sesuai dengan kebutuhan segmen

bisnis perusahaan di lapangan sekaligus rencana kerja Perseroan ke depan.

Sebagai bagian dari upaya perkembangan berkelanjutan tersebut, Grup TI Perseroan menyusun program kerja berdasarkan RKAP 2017 dan *Master Plan* Teknologi Informasi untuk tahun 2015 – 2019. Landasan lain yang digunakan adalah Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi serta *Standard Operating Procedures* (SOP) yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, sepanjang 2017, pengembangan layanan TI diperuntukkan bagi seluruh insan Perseroan. Selain itu, grup TI juga melanjutkan pengembangan sampai dengan *level project* untuk implementasi *Dashboard* Kinerja Keuangan sekaligus pengembangan *Cloud* PPA untuk mendukung unit bisnis *mobile* dalam rangka menunjang kemudahan akses informasi dan data Perseroan.

Sedangkan pengembangan dari aspek aplikasi terus dilakukan secara maksimal dan berkesinambungan guna mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan. Pengembangan rutin lainnya juga telah terlaksana dengan baik, meliputi pengelolaan layanan Prima – *Helpdesk* IT, operasional data center dan *disaster recovery center*, pengelolaan infrastruktur jaringan dan komunikasi, penyediaan sarana dan prasarana kerja karyawan baru, serta pengelolaan situs web perusahaan (<http://www.ptppa.com>) dan intranet perusahaan (PPAWorld).

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Menjawab persaingan usaha yang terus meningkat dan semakin kompetitif, penerapan tata kelola yang baik juga diwujudkan Perseroan dalam pengembangan TI. Pada praktiknya, Perseroan senantiasa melakukan pemantauan berkala serta pemenuhan kepatuhan terhadap aturan-aturan sebagaimana yang termuat dalam Panduan Penyusunan Pengelolaan TI BUMN sesuai Permen PER-2/MBU/2013 Tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara yang diterbitkan tanggal 18 Februari 2013.

Demi pelaksanaan sesuai dengan rencana, Perseroan menyusun *Masterplan* Teknologi Informasi sebagai *blue print* pengembangan TI Perseroan selama tahun 2015-2019. Formulasi *masterplan* tersebut diselaraskan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) guna menentukan strategi bisnis Perseroan menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang solid, Perseroan berharap dapat memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan di masa mendatang.

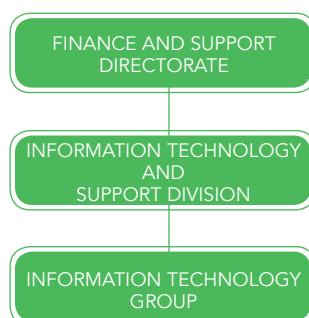
Struktur Organisasi dan Fungsi TI

Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Perseroan berada di bawah Divisi IT & Support, Direktorat *Finance & Support*. Tugas pokok Grup *Information Technology* berdasarkan No. SK-39/PPA/0809 pasal 236 adalah menyediakan dan mengoptimalkan dukungan infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi, sistem aplikasi dan pengelolaan data.

Dalam melaksanakan tugasnya, Grup *Information Technology* menjalankan fungsi sebagai berikut:

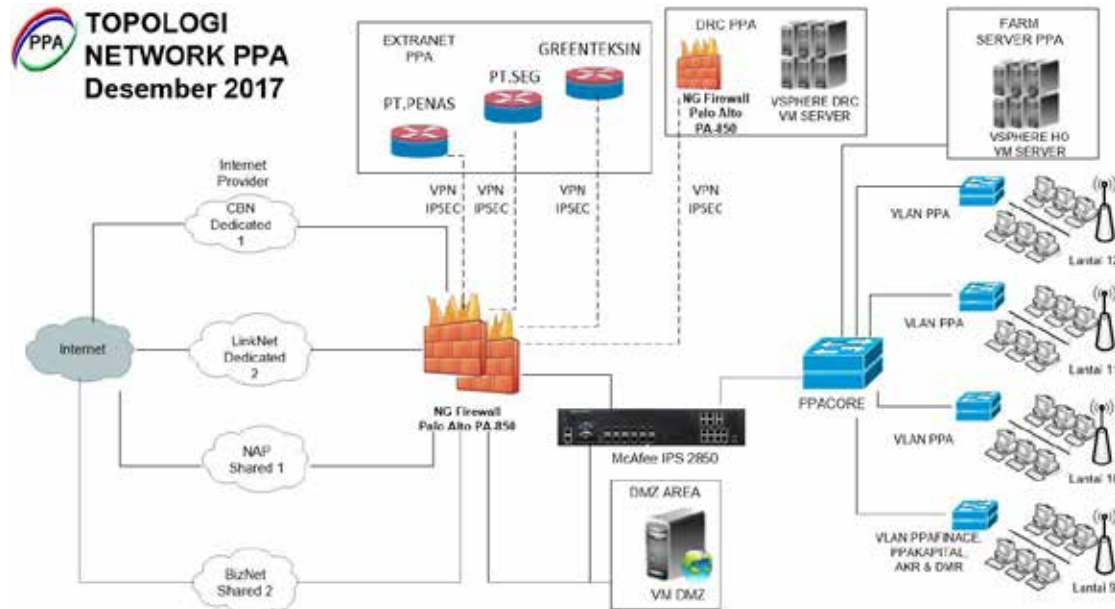
1. Penyiapan kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan dan optimalisasi dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem aplikasi dan pengelolaan data;
2. Pelaksanaan penyediaan dan optimalisasi dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
3. Pelaksanaan penyediaan dan pengembangan sistem aplikasi serta melakukan penelitian dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
4. Penyediaan dan pelaksanaan pengamanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi termasuk melalui proses pengamanan dan duplikasi (*back up*) data secara berkala dan penyediaan sarana untuk penanggulangan kondisi bencana (*disaster recovery plan*).

Struktur Organisasi Grup *Information Technology* selengkapnya adalah sebagai berikut:



Arsitektur Infrastruktur TIK Perseroan

Infrastruktur TIK Perseroan tahun 2017 adalah sebagai berikut:



Kondisi infrastruktur TIK Perseroan 2017 adalah sebagai berikut:

- Perseroan memiliki sebuah *data center* yang terletak di lantai 10 gedung Sampoerna Strategic Square dan menjadi sumber utama pengelolaan informasi bagi Perseroan.
- Sistem jaringan sudah memanfaatkan sistem segmentasi (*vlan*) yang disusun berdasarkan struktur organisasi di Perseroan. Segmentasi ini menjamin kecepatan maksimal transfer data dan sistem keamanan yang lebih maksimal.
- Perangkat keamanan jaringan Perseroan menggunakan dua jenis perangkat yaitu *Intrusion Prevention System (IPS)* dan *Next Generation Firewall* yang berfungsi melindungi jaringan komputer internal dari serangan *cyber*, melindungi *Virtual Private Network (VPN)* dengan enkripsi data ke jaringan DRC dan partner serta meningkatkan kualitas IP telekomunikasi dengan *Quality of Services (QoS)* yang dapat memprioritaskan data VoIP.
- *Bandwidth* jaringan komputer pengguna minimum 100 Mbps dan *bandwidth* jaringan komputer server 1 Gbps sehingga waktu pertukaran data antar komputer dapat berlangsung dengan cepat. *Bandwidth* total jaringan internet adalah 360 Mbps terdiri dari 12 Mbps *dedicated* internasional dan 148 Mbps *dedicated* lokal serta 200 Mbps *shared* Internet untuk lokal maupun internasional akses.
- Server yang dimiliki Perseroan saat ini sebagian besar berumur kurang dari 5 tahun, namun masih ada beberapa yang berumur diatas 5 tahun, Untuk operasional aplikasi inti, menggunakan server yang berumur kurang dari 5 tahun, sedangkan yang berumur diatas 5 tahun hanya digunakan untuk aplikasi penunjang.
- *Domain Controller* menggunakan *Microsoft Windows Server 2016* dimana performansi jaringan, keamanan jaringan, dan kemudahan pemeliharaan masih terjaga dengan baik.
- Sistem *Email* menggunakan *Microsoft Exchange 2016* yang mendukung *smart device* dengan keamanan yang cukup baik.
- Penerapan *wireless connection (wifi)* menggunakan teknologi terbaru yang mengintegrasikan satu *hotspot* dengan *hotspot* lain (SID : *single id*) yang memungkinkan koneksi *devices* tidak terputus selama berada di area kantor Perseroan.

- Sistem komunikasi menggunakan teknologi *Unified Communication* yang mengintegrasikan *voice over IP, video telephony, video conferencing, fax* dan *email*.
- Teknologi virtualisasi server menggunakan *VMWARE 5.5* yang sudah dilengkapi dengan fitur teknologi *backup Veeam*.
- Perseroan memiliki *Disaster Recovery Center (DRC)* yang berlokasi di Bandung, berfungsi sebagai tempat penyimpanan *backup* sistem Perseroan dan juga sebagai tempat pemulihan pada saat terjadi kondisi *disaster* serta sebagai bagian dari *Business Continuity Plan*.

Portofolio Layanan TIK Perseroan

Portofolio Layanan TIK Perseroan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

JENIS LAYANAN	KEGIATAN
SUPPORT	
<i>Unified Communication & Work Facility</i>	Menyediakan layanan <i>email, mobile devices, video conference, Unified communication, virtual private network, dealing room</i> dan fasilitas kerja karyawan yang mendukung kegiatan Perseroan
Data Center dan DRC	Menyediakan dan mengoperasikan data center dan <i>disaster recovery center</i> yang mampu menjaga ketersediaan dan kehandalan informasi Perseroan
Aplikasi Pendukung Kegiatan	Menyediakan aplikasi-aplikasi kesekretariatan yang terintegrasi dengan proyek <i>Paperless Office</i> serta aplikasi pelaporan kegiatan Perseroan untuk menunjang <i>green environment</i>
Pusat Layanan TIK	Menyediakan layanan TIK terintegrasi dan dapat memberikan solusi tepat waktu untuk seluruh permasalahan terkait pemanfaatan TIK dengan menyediakan <i>Single Point of Contact (SPOC)</i> , termasuk dukungan operasional TIK anak Perseroan
KEY OPERATIONAL	
Aplikasi <i>Document Management</i>	Memiliki aplikasi pengelolaan dokumen elektronik untuk menciptakan, review, persetujuan, dan publikasi dokumen dan kemudahan pengaksesan terhadap informasi
<i>Corporate Communication</i>	Memiliki website Perseroan yang menjadi sarana penyampaian informasi mengenai Perseroan, intranet sebagai sarana komunikasi internal karyawan Perseroan.
Aplikasi Keuangan	Menyediakan aplikasi keuangan (PUM, SPM, kas kecil, penagihan), Sistem Informasi Investasi (saham dan obligasi) dan <i>treasury</i> yang bermuara ke dalam aplikasi ERP (<i>Oracle E-business Suites</i>)
STRATEGIC	
Pengelolaan Aset	Memiliki aplikasi pengelolaan aset yang terintegrasi untuk aset properti, hak tagih, saham, dan surat berharga
Restrukturisasi dan Revitalisasi	Implementasi <i>Microsoft Project</i> dan pelaporan ringkasan eksekutif untuk setiap BUMN di PPAWORLD untuk mendukung pelaksanaan dan monitoring kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN
Laporan Kinerja	Memiliki sistem pelaporan kinerja perseroan melalui PPAWORLD untuk mempermudah manajemen dalam melakukan monitoring kinerja perseroan
IT <i>Shared Services</i> dan <i>Due Dilligence</i> TIK	Menyediakan layanan <i>shared services</i> untuk anak Perseroan dan layanan <i>Due Dilligence</i> TIK dalam rangka kegiatan <i>business advisory</i> .

Portofolio Aplikasi Perseroan

Portofolio Aplikasi Perseroan pada 2017 adalah sebagai berikut:

1. Log Surat
2. *Letter Numbering*
3. *Car Pool*
4. *Billing System*
5. Alat Tulis Kantor
6. PPAWORLD
7. *Helpdesk IT*
8. *Oracle E-Busines Suites R12 – Purchase Order, Account Payable, General Ledger, Fixed Asset*
9. Penagihan
10. *Treasury (Money Market)*
11. Investasi Saham
12. HRIS
13. *Asset Tracking System*
14. *Custodian Management Information System*
15. *Working Files Management Information System*
16. *Working Document*
17. Website PPA
18. *Integrated Credit Management Information System*
19. *Integrated Property Management Information System*
20. *Shares Management Information System*
21. *Credit and Shares Management Information System*
22. Ringkasan Eksekutif BUMN
23. Kegiatan Perusahaan
24. *Unified Communication*
25. Aplikasi perpustakaan
26. *Knowledge Management*
27. *Document Trailer PPA*
28. *Electronic Filing PPAK*
29. *Asset Profiling*
30. *Dashboard Kinerja Keuangan dan Finansial*
31. Aplikasi Administrasi Investasi
32. Android APP Layanan Prima
33. Aplikasi *Mailing Room*
34. Aplikasi *Meeting Room*

Pelaksanaan Kegiatan Teknologi Informasi 2017

1. IT *Shared Services* 2017

Pada tahun 2017, Perusahaan yang menggunakan jasa layanan IT *Shared Services* adalah:

- a. PT PPA Finance
- b. PT Survai Udara Panas
- c. PT PPA Kapital
- d. PT Nindya Beton
- e. PT Sejahtera Eka Graha

- f. PT Asia Kaolin Raya
- g. PT Duta Mentari Raya
- h. PT PP Airborne

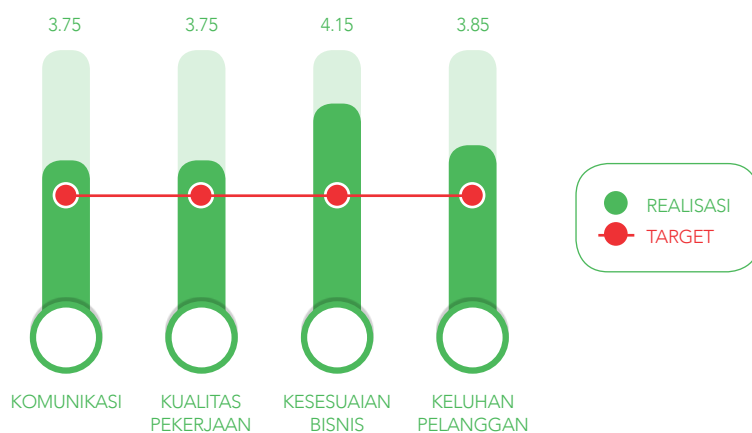
Sementara layanan yang diberikan TI Perseroan untuk layanan *shared services*, dapat dilihat melalui tabel berikut:

	Layanan Data Center	Layanan IT Helpdesk	Layanan E-mail	Layanan PABX (telepon)	Layanan Aplikasi kesekretariatan	Instalasi Ruang Data Center	Instalasi LAN (Workstation dan Wifi)	Layanan Aplikasi Payroll	Layanan Pengawasan CCTV
PT PPA Finance	✓	✓	✓	✓	✓				
PT PPA Kapital	✓	✓	✓	✓	✓				
PT Survai Udara Panas	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
PT Nindya Beton	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
PT Sejahtera Eka Graha	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT Asia Kaolin Raya	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
PT Duta Mentari Raya	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
PT PP Airborne	✓	✓	✓	✓					

Selain itu di bulan November 2017 telah dilakukan survei kepuasan pengguna layanan IT terhadap *shared service* yang mencakup aspek:

- Komunikasi
- Kualitas Pekerjaan
- Kesesuaian Bisnis
- Keluhan Pelanggan

Hasil dari survei tersebut adalah:



2. Kegiatan TI untuk Mendukung Unit Bisnis

Dalam mendukung kegiatan unit bisnis, Grup IT terlibat aktif dalam beberapa kegiatan yaitu :

- Pembuatan Kebijakan dan *Standard Operating Procedure* mengenai Pengelolaan Anak Perusahaan untuk PT Pupuk Kujang.
- Pembuatan dokumen Kerangka Acuan Kerja untuk proyek pengembangan *Dashboard* Keuangan dan penyiapan aplikasi *Asset Profiling* yang memiliki kemampuan *Geographic Information System* (GIS) untuk Kementerian Sosial RI.
- Pembuatan video udara dengan menggunakan *Drone* dan *3D/360 Virtual Reality* untuk proyek yang telah berjalan maupun proyek yang berpotensi untuk dikerjasamakan. Lokasi antara lain di kota Cirebon, Karawang, Bekasi, Pekalongan, Indramayu. Pengambilan foto dengan *3D/360 Virtual Reality* dilakukan di proyek perumahan di Paledang (Cempaka Hijau), Tegal (Green Teksin), Ciomas (Riscon), dan Klub Bogor Raya sebagai sarana promosi dalam penjualan properti.
- Penyiapan media sosial, pameran, dukungan terhadap *website* dan kegiatan lainnya dalam tim *Digital Marketing* untuk proyek properti Green Teksin, Cempaka Hijau maupun Riscon. *Website* Cempaka Hijau dan Green Teksin yang telah ada terus menerus *diupdate* dengan informasi dan kegiatan terbaru termasuk menampilkan hasil video udara maupun foto *3D/360 Virtual Reality* oleh tim *Digital Marketing*.
- Pengelolaan pengembangan pembangkit listrik di Bengkulu dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro.

3. *Dashboard* Kinerja Keuangan Perseroan

Pada tahun 2017, manajemen dapat melakukan pengawasan kinerja keuangan Perseroan dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan fasilitas *dashboard*, sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan.

Pembuatan prototipe *dashboard* telah dilakukan sejak tahun 2015 dengan mengambil data dari aplikasi *Oracle Financials*. Implementasi *dashboard* meliputi:

- *Cash Management*
- KPI Kinerja Kunci
- KPI Tingkat Kesehatan
- Laba Rugi
- Pendapatan dan Beban

Aplikasi *dashboard* Perseroan dapat diakses melalui *mobile device* dan *personal computer*, yang saat ini dapat diakses oleh Direksi, Dewan Komisaris, serta Divisi *Finance & Accounting*.

4. *Digital Community*

Kegiatan dalam *Digital Community* adalah mencari inovasi teknologi dan ide baru yang dapat diimplementasikan di Perseroan untuk membuat proses kerja di Perseroan lebih efektif dan efisien. Kegiatan ini juga merupakan salah satu cara *reverse mentoring*, yaitu memberikan informasi penggunaan *tools* baru kepada generasi sebelumnya.

5. Kegiatan Rutin Grup IT Perseroan 2017

Kegiatan rutin grup IT Perseroan antara lain menindaklanjuti permasalahan dan keluhan karyawan antara lain menindaklanjuti permasalahan dan keluhan karyawan dalam penggunaan IT, operasional *data center* dan *disaster recovery center*, *Rehearsal Disaster Recovery Center*, memonitor kualitas jaringan data dan telepon, pengisian portal BUMN, penyediaan sarana dan prasarana kerja karyawan baru, koordinasi kegiatan *scanning*, mengelola *website* perusahaan (<https://www.ptppa.com>) dan intranet perusahaan (PPAWorld).

6. Laporan Keuangan Teknologi Informasi

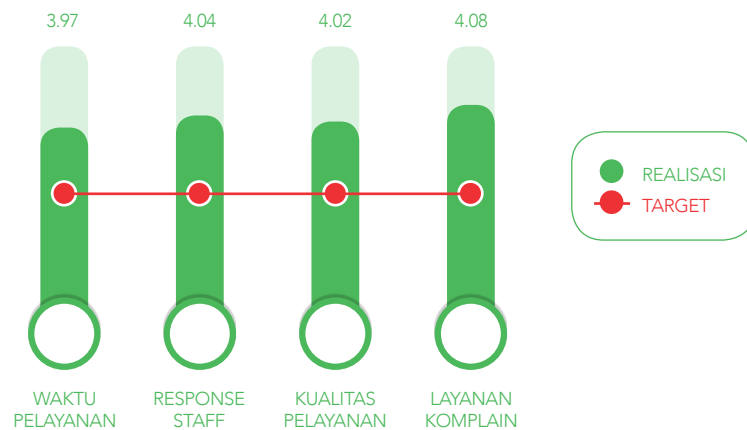
Penerimaan Grup IT Perseroan pada 2017 dari kegiatan *shared services* tercatat sebesar Rp204,47 juta.

7. Pada November 2017 telah dilakukan survei kepuasan pengguna layanan TI internal yang mencakup aspek

- Waktu Pelayanan
- *Response Staff*
- Kualitas Layanan
- Layanan Komplain

Angka penilaian mulai dari Sangat Buruk (1) sampai dengan Sangat Baik (5). Angka hasil survey 2017 melebihi angka yang ditargetkan yaitu mencapai 4.03 dari 3.5 target KPI.

Hasil dari survei tersebut adalah:



Strategi dan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi

Pencapaian Grup IT untuk KPI 2017 adalah 100%. Sedangkan untuk evaluasi *roadmap* proyek TI yang dibuat pada awal tahun 2015 akan terus dilakukan sampai dengan 2019 sesuai dengan dokumen *Masterplan* Teknologi Informasi sebagai berikut:

No	Proyek	Keterangan Tahun 2017
1	Pengembangan aplikasi <i>business intelligence</i>	Telah dilakukan implementasi <i>Dashboard</i> Kinerja Keuangan Perseroan dan dalam proses <i>design</i> dan implementasi <i>dashboard project</i> .
2	Pengembangan HRIS (<i>career path, performance management, development, e-learning</i>)	Pengembangan HRIS untuk modul <i>Performance management</i> dan <i>training</i> telah selesai dikembangkan dan diimplementasikan.
3	Pengembangan <i>Customer Relationship Management</i> (CRM)	Inisiasi pengembangan CRM belum dilakukan karena banyaknya proyek yang ditangani sehingga belum ada sumber daya yang tersedia untuk menanganinya
4	Pengembangan Aplikasi <i>Investment</i>	Inisiasi untuk pengembangan aplikasi <i>investment</i> belum dilakukan sehubungan dengan masih belum adanya pola yang standar
5	Pengembangan IT <i>advisory</i>	IT <i>Advisory</i> telah diinisiasi mulai tahun 2014 dan berlanjut ke tahun 2017. Pada tahun 2017 Grup IT ikut terlibat dalam proyek pembuatan Kebijakan dan SOP untuk PT Pupuk Kujang serta pembuatan Kerangka Acuan Kerja untuk Kementerian Sosial RI
6	Pengembangan <i>private cloud</i> Perseroan (<i>interface channeling</i>)	<i>Private Cloud</i> Perseroan telah diimplementasikan sebagian untuk <i>cloud file sharing</i> dan selanjutnya akan terus dikembangkan.
7	Pengembangan <i>security management system</i> (termasuk <i>encryption appliance</i> , pememajaan perangkat <i>security</i>)	Perangkat keamanan jaringan terus diremajakan sesuai perkembangan IT

No	Proyek	Keterangan Tahun 2017
8	Pengembangan <i>unified communication</i> menuju <i>multimedia integration</i> (termasuk peremajaan perangkat <i>handset</i> dan <i>server</i>)	Pengembangan <i>Unified Communication</i> dengan layanan <i>Cloud Video Conference</i> Telkom V-CUBE yang dapat menjalankan konferensi video dengan multi <i>platform</i> seperti PC, Android, Apple dan perangkat profesional khusus <i>video conference</i> . Telah dilakukan juga uji coba integrasi dengan penyedia layanan <i>Cloud IPPBX</i> Jasnita untuk konektivitas eksternal yang lebih luas dan mendukung multi platform.
9	Implementasi <i>Shared Services</i>	<i>Shared service</i> telah dilakukan di tahun 2017 untuk PT Pratama Persada Airborne.
10	<i>Knowledge Management</i>	Telah diimplementasikan <i>Electronic Filing</i> untuk Direktorat Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen

Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi Perseroan

KODE	PROYEK	Prioritas Utama	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pengembangan <i>funding management system</i>						
B	Pengembangan aplikasi <i>business intelligence</i>						
C	Pengembangan HRIS (<i>career path, performance management, development, e-learning</i>)	✓					
D	Pengembangan <i>marketing management system (branding, digital marketing, sales plan)</i>	✓					
E	Pengembangan CRM	✓					
F	Pengembangan aplikasi <i>investment</i>	✓					
G	Pengembangan ERP Oracle <i>E-business suites</i> (konsolidasi entitas anak dan FA)	✓					
H	Pengembangan IT <i>advisory</i>	✓					
I	Pengembangan <i>private cloud</i> Perseroan (<i>interface channeling</i>)						
J	Pembangunan infrastruktur TI di gedung baru (peremajaan infrastruktur, <i>iots</i> , <i>data center tier 2</i> dan <i>fibre optic</i>)						
K	Pengembangan <i>security management system</i> (termasuk <i>encryption appliance</i> , peremajaan perangkat <i>security</i>)	✓					
L	Pengembangan <i>unified communication</i> menuju <i>multimedia integration</i> (termasuk peremajaan perangkat <i>handset</i> dan <i>server</i>)						
M	Implementasi <i>Shared Services</i>	✓					
N	<i>Knowledge Management</i>	✓					







05

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan bertujuan untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan dan agenda Pemerintah di bidang ekonomi dan program pembangunan nasional pada umumnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut Perseroan melakukan kegiatan usaha yang meliputi pengelolaan aset negara yang berasal dari BPPN, restrukturisasi dan revitalisasi BUMN, kegiatan investasi, dan kegiatan pengelolaan aset lainnya.

Selain kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan juga dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk:

1. Jasa konsultasi, yang terdiri atas jasa konsultasi bisnis manajemen serta penjualan dan/atau pengembangan aset
2. Pengelolaan aset milik: Negara selain aset Negara yang berasal dari BPPN; Pemerintah Daerah; badan hukum yang dimiliki dan/atau didirikan oleh Negara selain Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta, termasuk anak perusahaan BUMN, perusahaan patungan, meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Melakukan penjualan aset termasuk saham dan piutang
 - b. Melakukan penyewaan aset
 - c. Melakukan restrukturisasi piutang termasuk penagihan piutang
 - d. Melakukan restrukturisasi perusahaan
 - e. Pengembangan dan pendayagunaan aset termasuk melalui kerja sama dengan pihak lain

Dalam memudahkan kegiatan-kegiatan usaha tersebut, Perseroan mengelompokkan segmen usaha Perseroan sebagai berikut:

1. Segmen Usaha Pengelolaan Aset
2. Segmen Usaha Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN
3. Segmen Usaha Investasi
4. Segmen Usaha Jasa Konsultasi

Sepanjang tahun 2017, Perseroan mencatat sejumlah pencapaian kinerja dan operasional dari masing-masing segmen kegiatan usaha tersebut, dengan perincian sebagai berikut:

Segmen Usaha Pengelolaan Aset

Kegiatan utama dalam segmen usaha pengelolaan aset adalah mengelola aset negara yang berasal dari BPPN. Dalam perkembangannya, Perseroan juga melakukan pengelolaan aset negara lainnya. Pengelolaan aset-aset negara tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah aset melalui penjualan, pemanfaatan, penyewaan, restrukturisasi dan/atau revitalisasi atas aset.

Sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Aset tahun 2017 yang ditandatangani pada 23 Agustus 2017 oleh Perseroan dengan Menteri Keuangan, Perseroan melakukan kegiatan pengelolaan aset senilai Rp896,29 miliar. Aset yang dikelola Perseroan terdiri atas aset saham dan aset kredit/hak tagih dari PT Sejahtera Eka Graha dan PT Tuban Petrochemical Industries.

Jumlah aset saham PT Sejahtera Eka Graha dan PT Tuban Petrochemical Industries yang dikelola oleh Perseroan pada 2017 tercatat senilai Rp22,48 miliar. Sedangkan nilai aset kredit/hak tagih terhadap PT Tuban Petrochemical Industries yang dikelola Perseroan di tahun 2017 tercatat sebesar Rp873,81 miliar.

Jenis dan Jumlah Aset yang Dikelola Perseroan di Tahun 2017

Jenis Aset	Jumlah Aset	Nilai Aset (Rp)
Aset Saham	2	22.478.750.000
Aset Kredit/Hak Tagih	1	873.811.488.440
Jumlah	3	896.290.238.440

Dari tabel di atas, aset saham berkontribusi 2,50% terhadap total aset yang dikelola Perseroan di tahun 2017. Sementara aset kredit/hak tagih memiliki porsi 97,50%.

Kegiatan Pengelolaan Aset Eks-BPPN

1. Aset Saham

Secara umum, kegiatan pengelolaan aset saham eks BPPN yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- Memelihara aset saham yang meliputi: pemutakhiran data, kegiatan penyimpanan dan penatausahaan dokumen, dan pencatatan kepemilikan;
- Menerima kuasa pemegang saham untuk melakukan kegiatan antara lain: pemantauan dan pengkajian atas kinerja perusahaan dan tindakan korporasi dari perusahaan yang dikelola, serta hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS.

Sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Aset tahun 2017, Perseroan melakukan kegiatan pengelolaan aset terhadap PT Sejahtera Eka Graha dengan nilai aset sebesar Rp22,47 miliar dan PT Tuban Petrochemical Industries dengan nilai aset sebesar Rp8,75 juta.

Pengelolaan Aset Saham Tahun 2017			
Nama Perusahaan	% Kepemilikan	Nilai Aset (Rp)	Keterangan
PT Sejahtera Eka Graha	96,53%	22.470.000.000	Nilai Aset sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 7 Maret 2012
PT Tuban Petrochemical Industries	70,00%	8.750.000	Nilai Aset sesuai KMK No. 69/KMK.06/2008
Jumlah		24.478.750.000	

Jumlah aset saham yang dikelola Perseroan baik dari jumlah perusahaan, kepemilikan, dan nilai aset pada tahun 2017 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

• PT Sejahtera Eka Graha ("SEG")

Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Aset tahun 2017, nilai serah kelola aset SEG tercatat sebesar Rp22,47 miliar, nilai tersebut merupakan nilai aset sementara pada 2017 dan telah dinilai oleh KJPP Rengganis. Perseroan juga telah mengajukan permohonan penetapan nilai aset serah kelola kepada Menteri Keuangan melalui surat No. S-4282/PPA/PD/1117 tanggal 20 November 2017, namun Perseroan belum menerima jawaban atas permohonan tersebut hingga akhir tahun 2017. Per 31 Desember 2017, Perseroan mengelola aset saham SEG milik Menteri Keuangan dengan porsi kepemilikan sebesar 96,53%.

Berbagai kegiatan pengelolaan aset SEG telah diterapkan oleh Perseroan di tahun 2017, antara lain:

1. Sebagai tindak lanjut MOU yang telah dilakukan antara Perseroan, SEG, Kementerian Keuangan dan PT Adhi Karya, telah ditunjuk konsultan Cushman & Wakefield untuk melakukan kajian kelayakan pengembangan kawasan SEG, dengan penambahan asumsi pembangunan LRT di kawasan SEG tersebut. Hasil kajian telah dipresentasikan kepada Kementerian Keuangan pada Juni 2017 dan final reportnya telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan pada tanggal 27 September 2017.
 2. Menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan mengenai rencana pelepasan jaminan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), manajemen SEG telah menunjuk Tim Konsultan untuk mengkaji dampak pelepasan jaminan BLBI tersebut terhadap komposisi pemegang saham di SEG. Draft hasil kajian telah dipresentasikan Tim Konsultan di September 2017, dan selanjutnya Perseroan menyampaikan *final report* kepada Kementerian Keuangan melalui surat nomor: S-4522/PPA/ID/1117 pada tanggal 30 November 2017. Sebagai langkah menentukan landasan transaksi untuk merealisasi skema perubahan pemegang saham pasca pelepasan jaminan BLBI, pada Desember 2017 pengurus Perseroan telah melakukan pendekatan kepada pemegang saham minoritas terkait pelepasan jaminan BLBI yang akan berakibat terdilusinya kepemilikan saham minoritas.
 3. Terkait dengan permintaan Pemerintah Kota Bogor untuk merevitalisasi dan menyerahkan danau milik SEG sebagai bagian dari fasilitas umum Pemerintah Kota Bogor karena dianggap berkontribusi terhadap banjir, Lembaga Afiliasi Penelitian Indonesia Institut Teknologi Bandung (LAPI ITB) sebagai konsultan tertunjuk telah menyampaikan kajian bahwa kontribusi danau Bogor Raya terhadap banjir tidak signifikan. Hasil kajian telah dipresentasikan kepada Pemerintah Kota Bogor sekaligus sebagai upaya mempertahankan dan mengelola danau sebagai bagian pengembangan kawasan, diantaranya dikembangkan sebagai Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM). Terkait dengan rencana tersebut, pada September 2017, Perseroan melakukan diskusi dengan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Bogor untuk menjajaki peluang penjualan air bersih ke PDAM Tirta Pakuan. PDAM Bogor menyatakan saat ini dalam proses pembangunan SPAM baru yang akan mencukupi permintaan air bersih Kota Bogor, sehingga tidak memerlukan pasokan tambahan dari pihak swasta.
- **PT Tuban Petrochemical Industries ("TPI")**

Kegiatan pengelolaan aset saham TPI yang dilakukan Perseroan di tahun 2017, antara lain:

 1. TPI mengajukan perubahan anggaran dasar dalam rangka realisasi TPI sebagai *operating holding company* dengan mengubah Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan Perusahaan.
 2. TPI menyerahkan Laporan Keuangan Konsolidasi tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh KAP RSM-Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.
 3. TPI menyelenggarakan RUPS tahunan untuk tahun buku 2009 sampai dengan 2016. Bersamaan dengan RUPS Tahunan tersebut diselenggarakan pula RUPS Luar Biasa dengan agenda perubahan tugas dan kewenangan Direksi dengan pokok-pokok perubahan sebagai berikut: Penegasan bahwa masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris akan berakhir pada Tahun Buku Ketiga setelah RUPS yang mengangkat anggota Direksi tersebut.

2. Aset Kredit/Aset Hak Tagih

Pada 2017, total Aset Kredit/Hak Tagih terhadap TPI yang dikelola Perseroan tercatat sebesar Rp873,81 miliar.

Pengelolaan Aset Kredit/Hak Tagih Tahun 2017

Nama Perusahaan	Nilai Aset (Rp) *)	Keterangan
PT Tuban Petrochemical Industries	873.811.488.440	Sesuai KMK No. 69/KMK.06/2008, Nilai Kekayaan Negara atas: • <i>Multi Year Bond</i> (Nominal Rp3.266.000.000.000,-) dengan Nilai Aset Rp1.024.000.000.000,- • <i>Mandatory Convertible Bond</i> (Nominal Rp4.167.000,-) dengan Nilai Aset Rp497.813.000.000,-
Jumlah	873.811.488.440	

*) Nilai Aset sudah dikurangi pembayaran yang diterima sampai dengan Desember 2016

Terkait dengan skema rencana penyelesaian *Multi Year Bond* dan *Mandatory Convertible Bond* masih dalam pembahasan intensif diantara Kementerian Keuangan, PT Pertamina (Persero) dan Perseroan.

Nilai aset kredit/hak tagih yang dikelola Perseroan pada tahun 2017 mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yaitu dari Rp910.452.390.331 menjadi Rp873.811.488.440 sehubungan dengan adanya pembayaran yang diterima sampai dengan Desember 2016.

Pendapatan Usaha Segmen Pengelolaan Aset tahun 2017

Adapun kinerja pendapatan jasa yang diperoleh Perseroan dari kegiatan pengelolaan aset eks BPPN pada 2017 tercatat sebesar Rp13,44 miliar, lebih rendah 3,13% bila dibandingkan dengan pendapatan pada 2016 yang tercatat sebesar Rp13,88 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya nilai aset kelolaan yang dikelola oleh Perseroan.

Perseroan memproyeksikan pendapatan dari segmen pengelolaan aset untuk tahun 2018 sebesar Rp13 miliar.

Strategi usaha dalam segmen pengelolaan aset eks BPPN untuk mencapai target tahun 2018 adalah:

- Melakukan pengelolaan aset Kementerian Keuangan;
- Kerjasama Investasi atas aset-aset Kementerian Keuangan yang sudah *free and clear* dan berpotensi untuk dikembangkan.

Kegiatan pengelolaan aset di atas dapat dilakukan sendiri dan/atau kerja sama dengan mitra strategis.

Bidang Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi ("R/R") BUMN

Perseroan juga menjalankan segmen usaha di bidang R/R BUMN. Dalam rangka pelaksanaan R/R BUMN, pada 2017 Perseroan telah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan langkah-langkah dan upaya penagihan agar BUMN-BUMN dalam R/R dapat menyelesaikan kewajiban yang telah jatuh tempo kepada Perseroan;
2. Melakukan *monitoring* atas pelaksanaan program R/R yang mencakup proses produksi, fasilitas produksi, efisiensi, pemasaran dan pelaksanaan proyek; dan
3. Melaksanakan R/R dengan cara bekerja sama dengan mitra strategis.

Pada tahun 2017, saldo pinjaman dana R/R (bersih) yang telah diberikan oleh Perseroan kepada BUMN dalam proses R/R sebesar Rp1,36 triliun, atau meningkat sebesar 0,33% bila dibandingkan dengan saldo pinjaman dana R/R (bersih) tahun 2016 sebesar Rp1,35 triliun.

Kegiatan Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN

Sesuai dengan tujuan pendiriannya, Perseroan telah melaksanakan kegiatan R/R untuk sejumlah BUMN berdasarkan penugasan dari Menteri BUMN. Posisi per 31 Desember 2017, Perseroan melaksanakan kegiatan R/R untuk sejumlah BUMN sebagai berikut:

No	BUMN	Dasar Pelaksanaan Kegiatan R/R
1	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Surat Menteri BUMN No S-452/MBU/2011 tanggal 8 Agustus 2011
2	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Surat Menteri BUMN No. S-365/MBU/2012 tanggal 13 Juli 2012
3	PT PAL Indonesia (Persero)	Surat Menteri BUMN No. S-776/MBU/2009 tanggal 19 Oktober 2009
4	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	Surat Menteri BUMN No. S-133/MBU/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 Surat Menteri BUMN No. S-690/MBU/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Surat Menteri BUMN No. S-107/MBU/02/2016 tanggal 3 Februari 2016
5	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	Surat Menteri BUMN No. S-133/MBU/03/2015 tanggal 18 Maret 2015
6	PT Kertas Leces (Persero)	Surat Menteri BUMN No. S-133/MBU/03/2015 tanggal 18 Maret 2015
7	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	Surat Menteri BUMN No. S-133/MBU/03/2015 tanggal 18 Maret 2015
8	PT Industri Gelas (Persero)	Surat Menteri BUMN No. S-133/MBU/03/2015 tanggal 18 Maret 2015
9	PT Survai Udara Penas (Persero)	Surat Menteri BUMN No. S-133/MBU/03/2015 tanggal 18 Maret 2015
10	PT Boma Bisma Indra (Persero)	Surat Menteri BUMN No. S-721/MBU/2009 tanggal 6 Oktober 2009
11	PT PANN (Persero)	Surat Menteri BUMN No. S-498/MBU/09/2017 tanggal 9 September 2017

Pelaksanaan kegiatan R/R dapat disertai dengan pemberian pinjaman pendanaan kepada BUMN dimaksud, yang berasal dari dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Perseroan ataupun yang berasal dari dana korporasi Perseroan sendiri.

BUMN yang direstrukturisasi dan/atau revitalisasi pada tahun 2017 mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 10 menjadi 11. Penambahan tersebut adalah terkait penugasan dari Menteri BUMN kepada Perseroan untuk melaksanakan R/R terhadap PT PANN (Persero).

Pendapatan Usaha Segmen Revitalisasi dan Restrukturisasi tahun 2017

Sampai dengan 31 Desember 2017, Perseroan telah menerima pembayaran dari BUMN, baik untuk pemenuhan kewajiban denda, bunga dan pokok pinjaman senilai Rp112,28 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp91,50 miliar atau naik sebesar 22,70%.

Pada tahun 2017, Perseroan juga telah menyalurkan sejumlah pinjaman kepada BUMN. Dana tersebut ada yang berasal dari dana PMN, yaitu sebesar Rp1,64 triliun, 5,20% lebih rendah dari penyaluran dana PMN pada tahun 2016 sebesar Rp1,73 triliun. Sedangkan penyaluran dana Perseroan yang merupakan dana talangan di tahun 2017 tercatat sebesar Rp411,28 miliar, 78,52% lebih tinggi dari dana talangan tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp230,38 miliar.

Penyaluran dana pada tahun 2017 juga ada yang berbentuk pembelian *Promissory Notes*, yaitu sebesar Rp202,98 miliar, 10,94% lebih rendah dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp227,90 miliar.

Di tahun 2018, Perseroan menargetkan pendapatan yang berasal dari kegiatan R/R BUMN sebesar Rp65,48 miliar.

Pendapatan tersebut diharapkan diperoleh dari pendapatan bunga pinjaman R/R (PT DI, PT PAL, PT IKI dan PT KKA) sebesar Rp65 miliar dan pendapatan bunga lainnya sebesar Rp480 juta.

Strategi usaha yang akan dilakukan dalam bidang R/R BUMN pada 2018, antara lain:

- Melakukan kegiatan dalam rangka penyehatan BUMN melalui penugasan R/R;
- Memberikan pendanaan jangka pendek/jangka panjang baik melalui perbankan, *investor strategic* atau melalui instrumen keuangan lain;
- Melakukan penagihan, mengupayakan pengurangan *impairment* dan melakukan restrukturisasi pinjaman terkait kegiatan R/R.

Segmen Usaha Investasi

Kegiatan investasi Perseroan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Investasi langsung maupun tidak langsung berupa:
 - a. Pemberian pinjaman untuk membiayai proyek dan/atau kegiatan usaha lainnya;
 - b. Penempatan dana pada suatu proyek atau kegiatan usaha lainnya;
 - c. Pembelian, pengembangan, dan/atau penjualan/penyewaan aset;
 - d. Melakukan penyertaan (dalam rangka pendirian, pembelian saham yang telah dikeluarkan atau saham dalam simpanan) pada perusahaan yang bersifat sementara dalam rangka peningkatan nilai untuk dijual kembali.
2. Investasi pada instrumen Surat Berharga berupa:
 - a. Pembelian Surat Utang termasuk kuasi ekuitas yang tercatat di Bursa Efek atau yang tidak tercatat di Bursa Efek; dan
 - b. Pembelian saham, *warrant* dan produk derivatif lainnya melalui Bursa Efek.

Sepanjang tahun 2017, kegiatan investasi Perseroan direalisasikan melalui entitas anak maupun langsung kepada perusahaan lain dalam bentuk kerjasama, pembiayaan serta investasi portofolio.

Kegiatan investasi yang dilakukan di tahun 2017 mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2016 kegiatan investasi Perseroan sebagian besar hanya di sektor properti, saat ini Perseroan telah menjajaki potensi investasi di sektor industri pupuk dan manufaktur untuk memperluas portofolio investasi.

Kegiatan investasi yang dilakukan Perseroan antara lain:

a. Aset Tegal 1 (Perumahan Green Teksin, Tegal, Jawa Tengah)

Perseroan dan PT Nindya Karya (PT NK) telah menandatangani Perjanjian Kerja sama untuk menjalankan Proyek Tegal yang telah dilaksanakan sejak September 2015. Hingga akhir tahun 2017, jumlah unit yang sedang dibangun adalah 23 unit rumah tipe 36 dan 10 unit tipe 45 dengan progres pekerjaan rata-rata secara keseluruhan 80,00%.

Pada tahun 2017, tim pemasaran telah berpartisipasi dalam pameran perumahan di Kota Tegal dan mengadakan bazar yang dihadiri oleh tamu undangan potensial dan warga sekitar, dimana rencananya acara ini akan dijalankan secara rutin untuk menghidupkan wilayah Perumahan Green Teksin.

Hingga akhir Desember 2017, telah terjual sebanyak 67 unit rumah dari total 84 unit persediaan rumah.

b. Aset Tegal 2

Perseroan telah melakukan optimalisasi Aset Tegal 2 dengan menyewakan aset berupa rumah kepada pihak ketiga. Selain penyewaan, hingga akhir Desember 2017, Perseroan juga telah selesai melakukan pembangunan atas 68 kios dan 2 toilet umum yang telah dapat digunakan oleh warga masyarakat untuk area komersil.

Atas optimalisasi tersebut Perseroan telah memperoleh pendapatan sebesar Rp490.000.000,- (gross).

c. Aset Paledang (Perumahan Cempaka Hijau, Bandung, Jawa Barat)

Selama tahun 2017, tim pemasaran Perumahan Cempaka Hijau telah melaksanakan kegiatan – kegiatan untuk mendukung kegiatan pemasaran dan promosi yaitu:

- Berpartisipasi dalam pameran perumahan di Festival Citilink;
- Peningkatan kegiatan promosi melalui penyebaran flyer dan brosur di lokasi - lokasi potensial;
- Promosi melalui *digital marketing* (website, sosial media);
- Promosi kepada lingkungan karyawan BUMN/ lembaga pemerintah.

Hingga akhir Desember 2017, telah terjual sebanyak 51 unit rumah dari total 58 unit rumah yang sudah dibangun.

d. PT Sejahtera Eka Graha ("SEG")

Pada akhir Agustus 2017, PT Cushman & Wakefield telah menyampaikan hasil Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Danau Bogor Raya.

Studi ini menunjukkan bahwa rencana pengembangan kawasan multi guna (*mixed-use*) di Kawasan Danau Bogor Raya telah layak untuk dikembangkan, dengan atau tanpa adanya stasiun *Light Rail Transit* (LRT). Atas hasil kelayakan studi tersebut, telah ditandatangani Nota Kesepahaman Pengembangan Lahan di Kawasan Danau Bogor Raya, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Perseroan, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan SEG.

e. Kerjasama dengan PT Pertani (Persero) ("Pertani")

Di tahun 2017, Perseroan memberikan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek untuk Modal Kerja Benih Terkontrak kepada Pertani yang merupakan kelanjutan dari pemberian fasilitas pinjaman di tahun 2016.

Dalam perjalanannya, fasilitas ini tidak diperpanjang oleh Pertani sehubungan dengan kebutuhan modal kerja Pertani di tahun 2017 masih bisa dipenuhi oleh dana PMN yang diterima di tahun sebelumnya, serta fasilitas pinjaman dari PT Bank BRI Tbk dan PT Bank Bukopin Tbk.

Seluruh *outstanding* kewajiban telah dilakukan pelunasan oleh Pertani pada tanggal 30 Maret 2017.

f. Kerjasama dengan PT Polytama Propindo ("PP")

Merujuk kepada Kajian Bersama Penambahan Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset ("PMN Tahun 2015") terdapat alokasi sebesar Rp200 miliar untuk pengembangan usaha PP. Alokasi PMN Tahun 2015 bagi PP tersebut bertujuan untuk meningkatkan kegiatan operasional PP dengan memperkuat modal kerja dan penambahan barang modal, diberikan dalam bentuk pinjaman yang selanjutnya dapat dikonversi menjadi penyertaan pada PP.

Penggunaan dana PMN Tahun 2015 di tahun 2017, antara lain digunakan untuk:

- Modal kerja PP agar dapat melakukan produksi secara mandiri, mengingat selama ini PP melakukan produksi melalui skema *tolling* atau kerjasama bagi hasil;
- Pembelian barang modal (*capital expenditure*) berupa *extruder* guna menambah kapasitas produksi dari 180.000 MT/tahun menjadi 240.000 MT/tahun;
- Program *debottlenecking* berupa:
 - Pengadaan *Spherical Tank* untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan propylene; dan
 - Penambahan/perluasan kapasitas gudang untuk penyimpanan *polypropylene*.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan oleh PP di tahun 2017, yaitu Program Produksi Mandiri, Program Manajemen Energi dan Proyek *Polypropylene Granula*.

g. Kerjasama dengan PT KNE Global Persada ("KNE")

KNE merupakan nasabah PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Bank Mandiri") yang bergerak di bidang produksi *fiber cement*. Perseroan telah melakukan pengambilalihan piutang Bank Mandiri kepada KNE melalui *cessie* berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No.173 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) No. 174 yang dibuat dihadapan Notaris Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH., MH., MM. senilai Rp16,76 miliar.

Perseroan melakukan sinergi dengan PT PPA Kapital dan PT Nindya Beton dalam penyelesaian pembangunan fisik atas fasilitas produksi milik KNE dengan target pada awal 2017 KNE dapat memproduksi secara komersial.

Pada Triwulan III tahun 2017, KNE telah beroperasi namun secara operasional, kemampuan produksi KNE belum mencapai target rencana bisnis, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas produk sehingga belum bisa dilakukan restrukturisasi atas *outstanding* utang kepada Perseroan.

Kinerja KNE di Triwulan IV tahun 2017, secara operasional (produksi) dan keuangan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Namun dari sisi *marketing* (penetrasi pasar), produk KNE sudah mulai diterima pasar

h. Kerjasama dengan PT Artha Bangun Persada ("ABP")

Perseroan telah memberikan pinjaman kepada ABP berdasarkan:

- a) Perjanjian Pinjaman No. PP-12/PPA/1215 tertanggal 14 Desember 2015 yang terakhir diubah melalui Addendum Ketiga Perjanjian Pinjaman No. PP-22/PPA/1217 tanggal 13 Desember 2017 ("Fasilitas Pinjaman I"); dan
- b) Perjanjian Pinjaman No. PP-19/PPA/1116 tertanggal 3 November 2016 yang terakhir

diubah melalui Addendum Perjanjian Pinjaman No. PP-23/PPA/1217 tanggal 22 Desember 2017 ("Fasilitas Pinjaman II").

Perseroan melakukan investasi pada ABP sebesar 33,30% saham, dan saham lainnya dimiliki oleh PT Industri Sandang Nusantara (Persero) sebesar 33,30% dan PT Lingkar Barat Development sebesar 33,30%. Adapun ABP bergerak pada bidang *Property Development* dengan aset yang dimiliki adalah tanah seluas 16 Ha, yang rencananya akan dibangun Perumahan, Pertokoan, Mall dan Apartemen.

Perseroan telah membukukan pendapatan bunga dari ABP atas Fasilitas Pinjaman I sejak Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp1,6 miliar atas fasilitas pinjaman yang telah dicairkan sebesar Rp8,5 miliar.

Perseroan telah membukukan pendapatan bunga dari ABP atas Fasilitas Pinjaman II sejak November 2016 sampai dengan November 2017 sebesar Rp100,6 juta.

ABP telah melaksanakan pembayaran sebagian *outstanding* pokok pinjaman atas Fasilitas Pinjaman I dan Fasilitas Pinjaman II sebesar Rp2,9 miliar pada tanggal 31 Oktober 2017.

i. Kerja sama dengan PT Gali Terus Sejahtera ("GTS")

Pada tanggal 9 November 2017, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Investasi dan Perjanjian Jual Beli Surat Utang dengan GTS. Kerja sama diinisiasi oleh PT Kelsri selaku pemegang saham GTS dengan tujuan untuk membiayai pengadaan fasilitas produksi gas alam yang berlokasi di Lapangan Gas Rayu Utara yang akan disewakan kepada PT Indrillco Hulu Energy.

Perseroan dan GTS menyepakati nilai kerja sama tersebut sebesar Rp35,10 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

- Pinjaman Investasi setinggi-tingginya Rp30 miliar dengan bunga sebesar 13% (*gross*). Angsuran pinjaman serta pembayaran bunga dilakukan secara triwulanan dengan pembayaran pertama akan dilakukan pada akhir Maret 2018.
- Jual Beli Surat Utang setinggi-tingginya Rp5,10 miliar dengan kupon sebesar 13% (*gross*). Surat Utang dapat dikonversi menjadi saham pada GTS sewaktu-waktu (*at any time*), selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan kurang 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Penerbitan Surat Utang.
- Sampai saat ini, GTS telah menarik dana Pinjaman Investasi sebesar Rp26,52 miliar.
- Hingga akhir 2017 seluruh peralatan yang tercakup dalam fasilitas produksi yang akan disewakan sudah berada di lokasi proyek, namun masih harus menunggu sertifikasi SKK Migas atas 1 peralatan yaitu Chiller (*Refrigation Package*).

j. Kerja sama dengan PT Riscon Duta Sarana (Perumahan Bukit Hijau Ciomas, Bogor, Jawa Barat)

Perseroan dan RDS telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Surat Utang Konversi dengan plafon sebesar Rp10 miliar dan Perjanjian Pinjaman Jangka Pendek dengan plafon sebesar Rp5 miliar pada 22 Juli 2016. Adapun pinjaman tersebut akan digunakan untuk pembiayaan pengembangan proyek Perumahan bukit hijau, Ciomas, Jawa Barat.

Pada tahun 2017, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung aktivitas pemasaran dan promosi yaitu:

- Peningkatan kegiatan pemasaran dan promosi melalui pembagian *flyer* dan brosur di lokasi-lokasi potensial;
- Mengikuti pameran dalam skala lokal dan nasional;
- Melakukan presentasi kepada mitra strategis (BUMN/BUMD, Perbankan, Pemerintah Daerah);
- Promosi melalui *digital marketing* (*website*, sosial media, bergabung di *marketplace* khusus properti).

Sampai dengan akhir tahun 2017, telah terjual 44 unit rumah dari total 56 rumah yang sudah dibangun.

k. Kerja sama dengan PT Inti Adhiyasa ("PT IA")

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 6 tanggal 27 Mei 2017 Perseroan memberikan fasilitas pinjaman kepada PT IA berupa pembiayaan pembangunan rumah sederhana untuk proyek perumahan kota Kahuripan Purwakarta sebesar Rp50 miliar.

Pada tahun 2017, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung kegiatan pemasaran dan promosi yaitu:

- Membuat dan menandatangani nota kesepahaman untuk bekerja sama dengan pabrik-pabrik yang memiliki tenaga kerja yang berpenghasilan rendah;
- Mengikuti pameran, baik dalam skala lokal maupun nasional;
- Melakukan promosi melalui *digital marketing*, baik melalui *website* maupun sosial media.

Pada Desember 2017, pembangunan tahap I atas 148 unit rumah telah terbangun, dan sejumlah 48 unit rumah telah dilaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli serta telah diserahkan kepada konsumen, sedangkan pembangunan tahap II atas 340 unit rumah baru memasuki tahap awal.

l. Pinjaman Kepada PT PPA Kapital ("PPAK")

Fasilitas pinjaman yang telah diberikan kepada PPAK per 31 Desember 2017 sebesar Rp76,4 miliar dengan *outstanding* sebesar Rp70,98 miliar.

No.	Debitur	Plafond (Rp)	Outstanding 31 Desember 2017
1.	PT Duta Mentari Raya (DMR)	30,400,000,000	28,950,000,000
2.	PT KNE Global Persada	12,600,000,000	12,600,000,000
3.	PT Pratama Persada Airborne (AIRBORNE)	10,000,000,000	10,000,000,000
4.	KSO PPAK-RC Rumah Cerdas	18,700,000,000	14,959,120,148
5.	Operasional DMR	1,621,200,000	1,321,400,000
6.	Operasional PPAK	3,078,800,000	3,077,944,770
Jumlah		76,400,000,000	70,908,464,918

m. Pinjaman Kepada PT Kelsri ("Kelsri")

PT Kelsri telah mendapatkan persetujuan pinjaman *project finance* dari Perseroan yang akan digunakan sebagai pembiayaan pengerjaan proyek dari Pertagas untuk pemasangan pipa. Pencairan fasilitas tidak dapat dilakukan sesuai jadwal disebabkan karena proyek pemasangan pipa dengan menggunakan mesin Horizontal Directional Drilling (HDD) dan Auger, belum direalisasikan karena kendala Pertagas terkait pembebasan lahan. Atas kondisi tersebut dilakukan addendum perjanjian pada tanggal 4 Oktober 2017 sehingga fasilitas yang dimiliki oleh Kelsri disesuaikan menjadi pokok Rp7 miliar biaya monitoring Rp1,984 juta dan bunga Rp1,015 juta jatuh tempo perjanjian tanggal 30 November 2017.

Pada tahun 2017, PT Kelsri telah melakukan pembayaran sebesar Rp6 miliar yang dialokasikan untuk pembayaran atas pokok pinjaman, denda pokok, bunga, denda bunga, monitoring *fee*, dan denda *monitoring fee*.

n. Kerja sama dengan PT Tropisindo Sumber Energi ("TSE")

Pada 22 Desember 2016, Perseroan dan TSE telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Surat Utang Konversi dengan plafon sebesar Rp12 miliar yang akan digunakan untuk pembiayaan pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini-Hydro Sengak 1 di Bengkulu.

Perseroan telah memberikan fasilitas dengan membeli surat utang yang diterbitkan oleh TSE sebesar Rp12 miliar. Sampai dengan Desember 2017, Perseroan telah menerima pembayaran bunga dari Surat Utang sebesar Rp1,43 miliar.

Pada akhir Desember 2017, telah dilakukan penilaian aset milik TSE oleh Kantor Jasa Penilai Publik Andang Kosasih, Maman Firmansyah, Agus Prihatanto & Rekan dengan kesimpulan bahwa nilai wajar atas aset yang dimiliki sebesar Rp478 juta.

p. Pinjaman Kepada PT PPA Finance ("PPAF")

Posisi pinjaman kepada PPAF per 31 Desember 2017 adalah Rp100 miliar dengan *outstanding* sebesar Rp73,88 miliar yang bertujuan sebagai modal kerja untuk pendanaan penyaluran pinjaman kepada nasabah berupa *factoring*, *leasing* dan *lease back*.

q. Kerja sama dengan PT SIG Asia ("SIG")

SIG merupakan Perusahaan Modal Asing yang bergerak di bidang pengolahan dan pembekuan ikan tuna di Bitung, Sulawesi Utara. Fasilitas pinjaman yang diberikan kepada SIG akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, mengubah skema pembayaran kepada pemasok SIG dan memenuhi permintaan tambahan atas pasar ekspor.

(a) Fasilitas Pinjaman

Perseroan telah memberikan fasilitas pinjaman senilai Rp15 miliar dengan jangka waktu 12 bulan berdasarkan Perjanjian Pinjaman dengan SIG tanggal 9 Februari 2017. Perseroan telah membukukan pendapatan bunga pinjaman sejak pencairan pertama di Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp2 miliar atas fasilitas pinjaman yang telah dicairkan sebesar Rp14,50 miliar.

(b) Kerja sama Jual Beli Ikan Tuna

Perseroan telah melakukan kerja sama investasi jual beli ikan tuna dengan SIG berdasarkan Perjanjian Kerja sama Investasi Jual Beli Ikan Tuna tanggal 4 Juli 2017 dengan nilai kerja sama sebesar Rp20 miliar dalam jangka waktu 12 bulan. Nilai kerja sama pada Desember 2017 telah meningkat menjadi Rp35 miliar. Keuntungan yang diperoleh Perseroan dari kerja sama ini sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp3,90 miliar.

r. Kerja sama dengan Polowijo Gosari ("PG")

Perseroan telah memberikan fasilitas pinjaman modal kerja kepada PG pada tahun 2017. Pinjaman modal kerja tersebut merupakan pembiayaan proyek pengadaan produksi pupuk berbasis dolomit dan pupuk majemuk, meliputi biaya bahan baku pupuk majemuk, biaya pengadaan biaya energi, biaya *packaging*, dan biaya transportasi.

Total fasilitas yang diberikan sebesar Rp50 miliar dan telah digunakan seluruhnya, dengan *outstanding* per 31 Desember 2017 sebesar Rp37,92 miliar.

Disamping itu, pada September 2017 Perseroan dan PG telah menandatangani perjanjian jual beli pupuk majemuk dengan total nilai sampai dengan Rp100 miliar.

s. Kerja sama dengan PT National Utility Helicopters ("NUH")

Perseroan telah menandatangani pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek sebesar Rp25 miliar kepada NUH pada tahun 2017. Fasilitas dimaksud digunakan untuk menyelesaikan kewajiban NUH atas pembelian Helikopter Bell 412 EP Reg. PK – URA dan kebutuhan pendukung utama lainnya atas helikopter dimaksud. Adapun helikopter tersebut saat ini masih dikontrak oleh PT Pertamina Hulu Energi hingga Februari 2019.

NUH selama ini dikenal sebagai salah satu operator helikopter di industri migas dengan kegiatan usaha memberikan pelayanan untuk industri migas, pertambangan dan perkebunan yang telah beroperasi sejak Februari 1969. Saat ini NUH memiliki empat helikopter yang telah terkontrak dengan perusahaan migas serta perusahaan pertambangan lainnya.

Pemberian fasilitas pinjaman sebagaimana dijelaskan diatas, merupakan langkah awal dari strategi Perseroan untuk mencoba melakukan akuisisi saham NUH dari pemegang saham mayoritas. Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan *due diligence* oleh pihak ketiga untuk penyusunan proposal akuisisi ini.

Kinerja 2017

Realisasi Pendapatan Hasil Investasi pada 2017 sebesar Rp249 miliar yang mengalami kenaikan sebesar 54,79% dari Rp160,86 miliar pada 2016.

Di tahun 2018, Perseroan menargetkan pendapatan hasil investasi sebesar Rp363,40 miliar, yang terdiri dari pendapatan investasi sebesar Rp208,50 miliar, penjualan atas kerja sama investasi jual beli ikan tuna sebesar Rp60 miliar, penerimaan dividen dari anak usaha sebesar Rp21 miliar dan pendapatan imbal hasil dari *portfolio* investasi sebesar Rp12,60 miliar, serta pendapatan bunga investasi dalam bentuk optimalisasi dana yang belum dipergunakan sebesar Rp61,30 miliar.

Guna mencapai target kegiatan investasi di tahun 2018, Perseroan telah mempersiapkan beberapa strategi usaha, yaitu:

- Melakukan pengembangan investasi pada industri properti, konstruksi, *manufacturing*, petrokimia, *food base*, *agriculture*, *financial services*, pupuk, komponen otomotif dan energi;
- Investasi melalui skema pembiayaan, penyertaan modal, kerja sama dan *trading*;
- Aktif dalam kegiatan asosiasi properti;
- Melakukan kerja sama dalam pengelolaan *Non-Performing Loan* (NPL) bank milik Pemerintah maupun swasta;
- Melakukan kerja sama investasi dengan pihak swasta untuk pembiayaan proyek terkontrak;
- Melakukan kerja sama investasi dalam bentuk *Joint Venture*, Kerjasama Operasi (KSO) atau bentuk lainnya.

Segmen Usaha Jasa Konsultansi

Kegiatan jasa konsultansi yang dijalankan Perseroan, yaitu:

1. Jasa Konsultansi Bisnis dan Manajemen meliputi:
 - *Due diligence*
 - *Business Valuation and Financial Modeling*
 - *Business Plan*
 - *Merger and Acquisitions*
 - *Feasibility Study*
 - Penyusunan *Standard Operating Procedures* (SOP)
 - Restrukturisasi Utang
2. Jasa Konsultansi Penjualan dan/atau pengembangan aset meliputi:
 - Penjualan dan/atau pendayagunaan aset
 - Pemberian jasa *Asset Profiling*
 - Pemberian jasa *Asset Development*

Perusahaan yang menggunakan jasa konsultansi mengalami penambahan menjadi enam perusahaan dari empat perusahaan di tahun sebelumnya. Jasa konsultansi yang diberikan pun mengalami diversifikasi dari tahun sebelumnya, yaitu adanya penambahan jasa kajian bisnis dalam rangka penyelesaian piutang dan pemberian jasa kajian bisnis kelayakan rencana akuisisi saham.

Kinerja 2017

Pendapatan imbalan jasa konsultansi tahun 2017 mencapai Rp17,86 miliar, atau meningkat sebesar 33,50% jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp13,38 miliar.

Pada tahun 2017, Perseroan memberikan jasa konsultansi terutama kepada PT Krakatau Steel (Persero), PT Pupuk Kujang, PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT Djakarta Lloyd (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) dan PT Nindya Beton.

Pada tahun 2018, Perseroan menargetkan kegiatan konsultansi untuk dapat memberikan kontribusi pendapatan Perseroan sebesar Rp6,80 miliar. Proyeksi tersebut diharapkan dapat tercapai melalui pemberian jasa konsultansi kepada PT Krakatau Steel (Persero), PT Pupuk Kujang, PT Nindya Beton dan lainnya.

Strategi usaha yang akan dilakukan dalam bidang jasa konsultansi pada tahun 2018 adalah:

- Melakukan komunikasi intensif dengan *existing Client* untuk memperoleh proyek baru (*repeat order*);
- Melakukan *mapping* dan pengembangan atas jasa konsultansi yang dapat diberikan kepada calon *Client*;
- Melakukan *mapping* kebutuhan jasa konsultansi dari potensial *Client*.

PT PPA Finance ("PPAF")

Entitas Anak	Domisili	Aktivitas	Prosentase Kepemilikan	Tahun Operasi	Jumlah Aset 2017 (dalam Rp juta)	Jumlah Pendapatan 2017 (dalam Rp juta)
PT PPA Finance	Jakarta	Pembiayaan	99.999	2009	863.71	92.20

PPAF mulai beroperasi sejak 21 Desember 2009 berdasarkan surat persetujuan Menteri BUMN No. S-360/MBU/2009 tanggal 27 Mei 2009. Berdasarkan surat tersebut, Perseroan membentuk PPAF dengan kepemilikan saham sebesar 99,999%. Kegiatan usaha utama PPAF adalah pembiayaan, dengan kegiatan usaha yang mencakup:

1. Sewa Guna Usaha (*leasing*) – Pembiayaan Investasi;
2. Anjak Piutang (*factoring*) – Pembiayaan Modal Kerja; dan
3. Pembiayaan Konsumen (*consumer financing*) – Pembiayaan Multiguna.

Kinerja 2017

Selama tahun 2017, PPAF berhasil mencatatkan total pencairan dana pembiayaan sebesar Rp611,46 miliar, mengalami sedikit penurunan sebesar Rp11,9 miliar atau 1,91% dari nilai tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp623,4 miliar.

Pencairan Dana Pembiayaan 2017

Klien	Pembiayaan			Total
	Investasi	Multi Guna	Modal Kerja	
BUMN	-	-	54.957.874.291	54.957.874.291
Koperasi BUMN	35.645.594.887	359.200.000	-	36.004.794.887
Swasta	257.945.891.950	-	254.155.930.133	512.101.822.083
Perorangan	-	8.397.351.169	-	8.397.351.169
Jumlah	293.591.486.837	8.756.551.169	309.113.804.424	611.461.842.430

Selain pencairan pembiayaan, di tahun 2017, PPAF juga telah memperoleh pinjaman dari pihak ketiga untuk mendukung kegiatan pembiayaan yang diberikan, yaitu:

1. Penerbitan MTN II, dengan *plafond* setinggi-tingginya Rp300 miliar, dengan Manajer Investasi PT Syailendra Capital.
2. Pinjaman PT Bank Banten Tbk sebesar Rp95 miliar yang terdiri dari Rekening Koran sebesar Rp45 miliar dan Pinjaman Modal Kerja sebesar Rp50 miliar.
3. Pinjaman PT Bank Mandiri Tbk sebesar Rp150 miliar yang terdiri dari Pinjaman KMK *Revolving* sebesar Rp75 miliar dan Pinjaman KMK *Non-Revolving* sebesar Rp75 miliar.
4. Pinjaman BPD Jateng sebesar Rp75 miliar.

Ikhtisar Keuangan

Untuk kinerja keuangan, pada 2017 realisasi pendapatan usaha PPAF sebesar Rp92,20 miliar atau memenuhi 89,67% dari target RKAP tahun 2017 yang sebesar Rp102,83 miliar. Sementara bila dibandingkan dengan jumlah pendapatan usaha pada 2016 yang sebesar Rp87,59 miliar, pendapatan usaha 2017 mengalami peningkatan sebesar 5,26%. Pada 2017, beban usaha mencapai Rp74,94 miliar yang meningkat 6,29% dari tahun 2016 yang sebesar Rp70,51 miliar. Dengan demikian, laba bersih yang diraih pada 2017 sebesar Rp14,51 miliar atau meningkat 13,18% dari laba bersih pada 2016 yang sebesar Rp12,82 miliar.

Target 2018

Pada 2018, PPAF menargetkan perolehan laba bersih sebesar Rp23,25 miliar dengan pendapatan usaha sebesar Rp138,05 miliar dan guna pencapaian target tersebut program kegiatan PPAF terutama adalah melakukan penyaluran pembiayaan sebesar Rp714,39 miliar dengan komposisi sebagai berikut:

1. *Factoring* ditargetkan sebesar Rp432,39 miliar atau 60,53% dari total dana penyaluran pembiayaan.
2. *Leasing* ditargetkan sebesar Rp258,49 miliar atau 36,18% dari total dana penyaluran pembiayaan.
3. *Consumer Finance* ditargetkan sebesar Rp23,5 miliar atau sebesar 3,29% dari total dana penyaluran pembiayaan.

Penyaluran pembiayaan tersebut akan menggunakan dana pihak ketiga berupa Kredit Modal Kerja, dana yang berasal dari angsuran klien dan penambahan setoran modal sebesar Rp50 miliar dengan persetujuan dari pemegang saham Perseroan.

PT Nindya Karya (Persero) ("NK")

NK beroperasi sejak 1961. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tanggal 13 Agustus Tahun 2012, Perseroan melakukan penyertaan modal pada NK sebesar Rp499.997.421 atau 99% dari modal disetor dan ditempatkan. Kegiatan usaha utama NK adalah Jasa Konstruksi dengan tingkat operasional yang cukup besar dan tersebar diberbagai wilayah Republik Indonesia.

Entitas Anak	Domisili	Aktivitas	Prosentase Kepemilikan	Tahun Operasi	Jumlah Aset 2017 (dalam Rp juta)	Jumlah Pendapatan 2017 (dalam Rp juta)
PT Nindya Karya (Persero)	Jakarta	Konstruksi	99.000	1961	4.208.059	5.816.566

Kinerja 2017

Sepanjang tahun 2017, NK telah berupaya keras untuk memenangkan *tender*, hal tersebut dapat dilihat dari total prosentase keberhasilan *tender* yang dimenangkan yaitu sebesar 23,47% dari total pemasaran *tender* di tahun 2017 sebesar Rp18,53 triliun. NK berhasil melampaui target *tender* yang dimenangkan di awal tahun 2017 sebesar 25%, namun masih sedikit di bawah realisasi tahun 2016 yang tercatat sebesar 28,29%.

Jumlah kontrak tersedia yang merupakan komposisi kontrak lama dan baru juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada 2017, nilai nominal kontrak tersedia tercatat sebesar Rp18,53 triliun, atau meningkat 27,40% dari realisasi tahun 2016 yaitu sebesar Rp14,54 triliun. Nilai kontrak tersedia di tahun 2017 mampu mencapai 92,17%, dari target yang ditetapkan sebesar Rp20,10 triliun.

Nilai investasi hanya mampu tercapai sebesar Rp76,27 miliar, atau 3,31% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2017 sebesar Rp2,30 triliun. Namun nilai tersebut meningkat sebesar Rp65,7 miliar atau 621,57% dari realisasi investasi di tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp10,57 miliar.

Seiring dengan meningkatnya kinerja *financial*, NK juga meningkatkan jumlah pegawai yang dipekerjakan. Pada tahun 2017, jumlah pegawai NK yang berjumlah 992 pegawai dinilai sudah mencapai target yang ditetapkan sebanyak 992 pegawai dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebanyak 814 pegawai.

Ikhtisar Keuangan

Total aset NK per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp4,21 triliun, naik sebesar Rp410,15 miliar atau 110,80% dari tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp3,80 triliun. Nilai pendapatan NK di tahun 2017 juga meningkat cukup signifikan dari Rp4,66 triliun di tahun 2016 menjadi Rp5,82 triliun di tahun 2017, atau naik sebesar 24,85%. Tren positif yang serupa juga diikuti oleh pencapaian laba bersih di tahun 2017 yang meningkat sebesar Rp13,46 miliar menjadi Rp208,80 miliar bila dibandingkan dengan Rp195,34 miliar di tahun 2016. Rasio keuangan likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan net profit margin NK di tahun 2017 telah mampu mencapai target yang ditetapkan awal 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa NK mampu meningkatkan kinerja finansialnya dengan baik di tahun 2017.

Uraian	Realisasi 2017	Target 2017 (RKAP)	Realisasi 2016	Perubahan (yoy)	Prosentase
	(dalam jutaan Rupiah)				
Pemasaran Tender	43.770,13	39.377,13	26.078,81	17.691,32	167,83%
Tender Dimenangkan	10.273,74	9.844,28	7.377,50	2.896,24	139,25%
Kontrak Tersedia	18.526,60	20.100,58	14.541,83	3.984,77	127,40%
Pendapatan Usaha	5.816,57	5.601,71	4.658,65	1.157,97	124,85%
Laba Bersih	208,80	188,03	195,34	13,46	106,89%
Investasi	76,27	2.300	10,57	65,70	116,08%
Jumlah Pegawai	992	992	841	151	117,95%
Aset	4.208,06	3.883,50	3.797,91	410,15	110,80%
Rasio Keuangan Likuiditas	116%	115,36%	116%	0%	100%
Rentabilitas	3,59%	3,36%	4,19%	-0.6%	85,68%
Solvabilitas	138%	133%	126,85%	11.15%	108,80%
Net Profit Margin	3,59%	3.35%	4,19%	-0.6%	85,68%
Tingkat Kesehatan Perusahaan	SEHAT (AA)	SEHAT (AA)	SEHAT (AA)		

Target 2018

Pada 2018, NK menargetkan perolehan laba bersih sebesar Rp281,7 miliar dengan pendapatan usaha sebesar Rp6,98 triliun dan guna pencapaian target tersebut, program kegiatan NK antara lain:

1. Pengembangan Bisnis di bidang Konstruksi antara lain mendirikan dan atau mengakuisisi perusahaan untuk menjadi anak perusahaan dalam mendukung dan memperkuat core bisnis perusahaan di bidang jasa konstruksi.
2. Pengembangan Bisnis di bidang Jalan Tol antara lain: Mendirikan anak perusahaan dan atau bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan penyertaan di Badan Usaha Jalan Tol, melakukan kerja sama dengan pihak konsultan perencana untuk pengembangan ruas tol.
3. Pengembangan Bisnis di bidang Properti/*Realty* antara lain berupa investasi perhotelan, *Real Estate*/perumahan, apartemen, dan Pengurusan Perizinan sebagai Perusahaan Pengelola Hotel;
4. Pengembangan Bisnis di bidang Industri Manufaktur antara lain penyertaan pada pabrik material konstruksi, pembentukan anak perusahaan bidang industri yang mendukung kegiatan konstruksi, *readymix/precast*.
5. Pengembangan Bisnis di bidang Energi antara lain penyertaan pada bidang energi melalui kerja sama dengan pihak lain, pengurusan perijinan sebagai perusahaan pembangkit listrik.

PT PPA Kapital ("PPAK")

Entitas Anak	Domisili	Aktivitas	Persentase Kepemilikan	Tahun Operasi	Jumlah Aset 2017 (dalam Rp juta)	Jumlah Pendapatan 2017 (dalam Rp juta)
PT PPA Kapital	Jakarta	Jasa Pengelolaan Investasi	99.996	2012	166.711	7.941

PPAK beroperasi sejak 22 Juni 2011 berdasarkan persetujuan Menteri Negara BUMN melalui surat Nomor: S-372/MBU/2011 tanggal 22 Juni 2011. Berdasarkan surat tersebut, Perseroan membentuk PPAK dengan kepemilikan saham sebesar 99,996%. Kegiatan usaha utama PPAK adalah jasa, dengan kegiatan usaha yang mencakup:

1. Melakukan jasa pengelolaan investasi dalam bentuk pembelian dan penjualan efek (tidak dalam fungsi sebagai Manajer Investasi).
2. Melakukan kegiatan usaha jasa di bidang pengelolaan aset, baik aset milik sendiri atau aset milik pihak lain yang diserahkan kepada Perseroan.
3. Melakukan kegiatan usaha di bidang jasa konsultasi (tidak dalam fungsi sebagai Manajer Investasi), jasa konsultasi manajemen, jasa konsultasi keuangan dan jasa konsultasi pengelolaan aset.

Kinerja 2017

Sepanjang tahun 2017, realisasi kegiatan investasi PPAK induk masih berasal dari enam transaksi investasi pada mitra perusahaan investasi (*investee companies*) yang dilakukan pada tahun 2016. Dari transaksi investasi tersebut, PPAK menerima hasil investasi, jasa biaya transaksi dan jasa biaya pemantauan. PPAK melakukan pelepasan saham salah satu anak usaha, yaitu PT Pratama Persada Airborne dalam rangka program Restrukturisasi/ Revitalisasi PT Survei Udara Penas (Persero) ("Penas"). Pada bulan Desember 2017, PPAK melakukan pengeluaran saham dalam simpanan dan pemindahan hak kepemilikan saham (pelepasan) kepada pemegang saham minoritas, yaitu Sdr. Nugraha Indra Kusumah. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pelepasan saham kepada Penas. Realisasi pendapatan kegiatan investasi PPAK secara konsolidasi adalah sebesar Rp7,7 miliar. Sedangkan, aset investasi PPAK secara konsolidasi adalah sebesar Rp51 miliar.

Dalam melakukan kegiatan usaha, PPAK senantiasa berusaha bekerja sama dengan mitra perusahaan sasaran (*investee companies*), yang memiliki proyek (atau transaksi) investasi yang baik, dimana nilai dari mitra perusahaan sasaran diharapkan akan berkembang atau meningkat pada masa yang akan datang.

Ikhtisar Keuangan

Untuk kinerja keuangan, pada 2017 realisasi pendapatan usaha PPAK sebesar Rp42,9 miliar atau memenuhi 14% dari RKAP tahun 2017 yang ditargetkan sebesar Rp296,7 miliar. Sementara jika dibandingkan dengan perolehan tahun 2016, pendapatan usaha meningkat 541% dari sebelumnya sebesar Rp7,9 miliar. Pada 2017, beban usaha tercatat sebesar Rp89,7 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 652% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp13,7 miliar. Berdasarkan penilaian manajemen telah dibentuk penyisihan kerugian penurunan nilai (*impairment*) atas Pinjaman

Surat Utang, Piutang Bunga, Piutang Pemantauan, Piutang Biaya Penerbitan, dan Dana Talangan kepada PT Asia Kaolinraya sebesar Rp25,5 miliar. Dengan demikian, rugi bersih yang diperoleh pada 2017 adalah sebesar Rp51,5 miliar sedangkan pada 2016 adalah sebesar Rp3,3 miliar.

Target 2018

Pada 2018, PPAK secara konsolidasi mentargetkan perolehan laba bersih sebesar Rp8,8 miliar dengan pendapatan usaha sebesar Rp148,9 miliar dan guna pencapaian target tersebut program kegiatan PPAK antara lain:

1. PPAK akan bertindak sebagai investor dan/atau pengelola pada:
 - a. PT Duta Mentari Raya sebagai Anak Perusahaan berupa pabrik kelapa sawit,
 - b. PT Asia Kaolinraya sebagai produsen kaolin,
 - c. KSO PPAK - PT Rumah Cerdas berupa pembangunan dan penjualan rumah di Yogyakarta,
 - d. PT KNE Global Persada sebagai produsen *fibre cement*.
2. PPAK akan menjalankan proses pelelangan aset yang dijamin oleh PT Ciptaindah Permata.
3. PPAK akan menjadi investor melalui penyetoran modal pada perusahaan patungan produsen pupuk berbasis dolomit bersama dengan PT Polowijo Gosari dengan nama PT Magnesium Gosari Internasional.
4. PPAK akan menjadi investor untuk proyek-proyek baru.

Kegiatan investasi tersebut akan menggunakan dana pihak ketiga dengan persetujuan dari Perseroan selaku pemegang saham.

Pada April 2017 Perseroan selaku pemegang saham telah melakukan penyetoran modal sebesar Rp75 miliar yang terdiri dari konversi pinjaman pemegang saham sebesar Rp64 miliar dan secara tunai sebesar Rp11 miliar. Sehingga pada tahun 2017 modal PPAK telah disetor penuh sebesar Rp100 miliar.

KINERJA KEUANGAN

Kinerja keuangan yang akan diuraikan dalam bagian ini mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang disajikan dalam buku Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan Konsolidasian telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (anggota RSM), dan mendapat opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan entitas anak tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, serta hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

TABEL LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015 (dalam jutaan Rupiah)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	31 Desember 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015	KENAIKAN/ PENURUNAN	
				SELISIH	%
1	2	3	4	5 = (2-3)	6 = (5:3)
ASET					
Aset Lancar	6.038.931	5.296.363	5.102.888	742.568	14,02
Aset Tidak Lancar	3.441.437	2.593.466	2.197.355	847.971	32,70
JUMLAH ASET	9.480.368	7.889.829	7.300.244	1.590.539	20,16
LIABILITAS					
Liabilitas Jangka Pendek	3.715.530	3.109.266	2.695.688	606.264	19,50
Liabilitas Jangka Panjang	1.055.147	629.235	740.028	425.912	67,69
JUMLAH LIABILITAS	4.770.677	3.738.501	3.435.716	1.032.176	27,61
EKUITAS					
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	4.698.844	4.145.523	3.860.497	553.321	13,35
Kepentingan Non Pengendali	10.847	5.805	4.031	5.042	86,86
JUMLAH EKUITAS	4.709.691	4.151.328	3.864.528	558.363	13,45
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	9.480.368	7.889.829	7.300.244	1.590.539	20,16



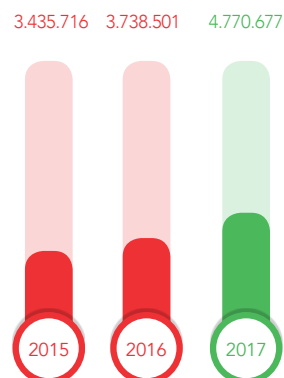
JUMLAH ASET

dalam jutaan Rupiah



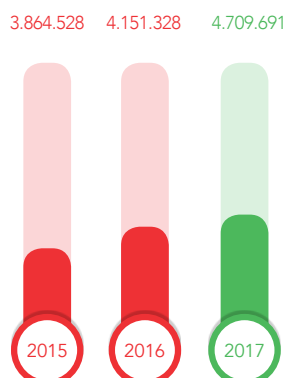
JUMLAH LIABILITAS

dalam jutaan Rupiah



JUMLAH EKUITAS

dalam jutaan Rupiah

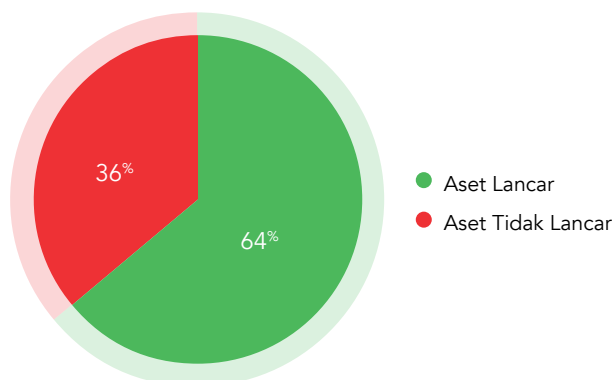


ASET

Pada tanggal 31 Desember 2017, aset Perseroan terealisasi sebesar Rp9,48 triliun dengan komposisi 63,70% aset lancar dan 36,30% aset tidak lancar. Realisasi tersebut meningkat Rp1,59 triliun atau 20,16% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp7,89 triliun. Peningkatan ini berasal dari aset lancar yang mengalami kenaikan sebesar Rp742,57 miliar atau 14,02% dan aset tidak lancar yang mengalami kenaikan sebesar Rp847,97 miliar atau 32,70% dari tanggal 31 Desember 2016. Naiknya aset tidak lancar memiliki kontribusi terbesar dalam kenaikan total aset, baik secara nilai maupun prosentase.



KOMPOSISI ASET 2017



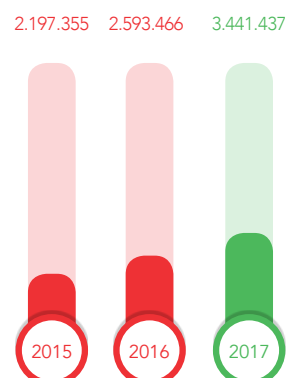
ASET LANCAR

dalam jutaan Rupiah



ASET TIDAK LANCAR

dalam jutaan Rupiah



TABEL ASET LANCAR PER 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015 (dalam jutaan Rupiah)

ASET	31 Desember 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015	KENAIKAN/ PENURUNAN	
				SELISIH	%
1	2	3	4	5 = (2-3)	6 = (5:3)
Kas dan Setara Kas	1.694.156	1.534.252	2.346.889	159.904	10,42
Pinjaman Investasi Jangka Pendek					
Pihak Berelasi	10.427	15.489		(5.062)	-32,68
Pihak Ketiga	298.517	34.252		264.265	771,53
Aset Keuangan Diperdagangkan					
Pihak Berelasi	80.921	90.354	111.029	(9.433)	-10,44
Pihak Ketiga	2.314	5.536	94.394	(3.222)	-58,20
Piutang Usaha					
Pihak Berelasi	341.684	285.126	231.062	56.558	19,84
Pihak Ketiga	879.482	722.983	582.889	156.499	21,65

TABEL ASET LANCAR PER 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015 (dalam jutaan Rupiah)

ASET	31 Desember 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015	KENAIKAN/ PENURUNAN	
				SELISIH	%
1	2	3	4	5 = (2-3)	6 = (5:3)
Piutang Retensi					
Pihak Berelasi	87.760	48.440	22.824	39.320	81,17
Pihak Ketiga	129.206	90.083	55.183	39.123	43,43
Piutang Ventura Bersama Konstruksi	189.408	246.190	317.199	(56.782)	-23,06
Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan					
Pihak Berelasi	207.115	219.215	92.271	(12.100)	-5,52
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja					
Pihak Berelasi	347.956	484.320	109.607	(136.364)	-28,16
Pihak Ketiga	945.766	775.384	508.190	170.382	21,97
Persediaan	170.160	116.762	155.571	53.398	45,73
Uang Muka dan Biaya Dibayar Di Muka	104.468	171.475	151.274	(67.007)	-39,08
Pajak Dibayar Di Muka	474.896	359.238	238.592	115.658	32,20
Aset Lancar Lainnya	74.695	97.264	58.710	(22.569)	-23,20
Jumlah Aset Lancar	6.038.931	5.296.363	5.102.888	742.568	14,02

Aset Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2017, aset lancar tercatat sebesar Rp6,04 triliun terdiri dari kas dan setara kas, pinjaman investasi jangka pendek, aset keuangan diperdagangkan, piutang usaha, piutang retensi, piutang ventura bersama konstruksi, pinjaman yang diberikan - dana talangan, tagihan bruto kepada pemberi kerja, persediaan, uang muka dan biaya dibayar di muka, pajak dibayar di muka, dan aset lancar lainnya. Realisasi tersebut meningkat Rp742,57 miliar atau 14,02% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp5,30 triliun. Peningkatan ini khususnya berasal dari tagihan bruto pemberi kerja kepada pihak ketiga, piutang usaha, dan kas dan setara kas yang peningkatannya berada di kisaran yang sama, yaitu Rp150 miliar sampai Rp170 miliar.

Kas dan Setara Kas

Pada tanggal 31 Desember 2017, kas dan setara kas sebesar Rp1,69 triliun, meningkat Rp159,90 miliar atau 10,42% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1,53 triliun. Peningkatan ini terutama karena kenaikan pada penempatan deposito berjangka di Bank BNI dan Bank BTN.

Pinjaman Investasi Jangka Pendek

Pinjaman investasi jangka pendek adalah pinjaman yang diberikan dalam rangka kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan. Pinjaman tersebut diberikan kepada pihak berelasi dan pihak ketiga. Pada tanggal 31 Desember 2017, *outstanding* pinjaman investasi jangka pendek kepada pihak berelasi sebesar Rp10,43 miliar, menurun Rp5,06 miliar atau 32,68% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp15,49 miliar, karena adanya pelunasan pinjaman oleh PT Berdikari (Persero) dan PT Pertani (Persero).

Di sisi lain, pada tanggal 31 Desember 2017, *outstanding* pinjaman investasi jangka pendek kepada pihak ketiga sebesar Rp298,52 miliar, meningkat Rp264,27 miliar atau 771,53% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp34,25 miliar. Peningkatan ini terutama karena adanya pencairan baru pinjaman investasi kepada PT Polytama Propindo (bukan pihak berelasi) sebesar Rp155,4 miliar dibandingkan tahun lalu.

Aset Keuangan Diperdagangkan

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau bagian dari instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek *actual* saat ini, atau merupakan *derivative*, kecuali *derivative* yang ditetapkan dan efektif sebagai *instrument* lindung nilai. Aset keuangan tersebut berasal dari pihak berelasi dan pihak ketiga. Pada tanggal 31 Desember 2017, aset keuangan diperdagangkan kepada pihak berelasi sebesar Rp80,92 miliar, turun Rp9,43 miliar atau 10,44% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp90,35 miliar. Penurunan ini terutama karena pelunasan sebagian pinjaman PT Istaka Karya (Persero) dan penurunan kepemilikan saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2017, aset keuangan diperdagangkan kepada pihak ketiga sebesar Rp2,31 miliar, menurun Rp3,22 miliar atau 58,20% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp5,54 miliar. Penurunan ini dikarenakan penjualan saham pihak ketiga yang diperdagangkan.

Piutang Usaha

Piutang usaha terjadi akibat transaksi dengan pihak berelasi dan pihak ketiga. Pada tanggal 31 Desember 2017, piutang usaha kepada pihak berelasi sebesar Rp341,68 miliar, meningkat Rp56,56 miliar atau 19,84% dibandingkan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp285,13 miliar. Peningkatan ini terutama karena naiknya piutang jasa konstruksi sebesar Rp40,78 miliar.

Pada tanggal 31 Desember 2017, piutang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp879,48 miliar, meningkat Rp156,50 miliar atau 21,65% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp722,98 miliar. Peningkatan ini terutama karena naiknya saldo piutang sewa pembiayaan (bersih) sebesar Rp119,53 miliar.

Terhadap piutang usaha tersebut, pada tanggal 31 Desember 2017 telah dibentuk penyisihan kerugian penurunan nilai piutang sebesar Rp80,60 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp17,48 miliar atau 27,7% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai tersebut adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang.

Piutang Retensi

Piutang retensi terjadi akibat transaksi PT Nindya Karya dengan pemberi kerja, baik pihak berelasi dan pihak ketiga, yang akan dilunasi setelah penyelesaian kontrak atau pemenuhan kondisi yang ditentukan kontrak.

Pada tanggal 31 Desember 2017, piutang retensi kepada pihak berelasi sebesar Rp87,76 miliar, meningkat Rp39,32 miliar atau 81,17% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp48,44 miliar. Sedangkan, pada tanggal 31 Desember 2017, piutang retensi kepada pihak ketiga sebesar Rp129,21 miliar, meningkat Rp39,12 miliar atau 43,43% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp90,08 miliar. Peningkatan ini dikarenakan bertambahnya penyelesaian kontrak yang dilakukan oleh PT Nindya Karya.

Terhadap piutang retensi tersebut, pada tanggal 31 Desember 2017 telah dibentuk penyisihan kerugian penurunan nilai piutang sebesar Rp19,25 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp4,36 miliar atau 29,3% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai tersebut adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang.

Piutang Ventura Bersama Konstruksi

Merupakan piutang ventura bersama (JV) untuk pembelian material, biaya bank, *overhead*, dan lain-lain yang dikeluarkan oleh Perusahaan untuk kepentingan ventura bersama. Pada tanggal 31 Desember 2017, piutang ventura bersama konstruksi sebesar Rp189,41 miliar, menurun Rp56,78 miliar atau 23,06% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp246,19 miliar. Penurunan ini terutama karena turunnya saldo piutang ventura Nindya – Bumi Karsa dan Nindya – Surya masing-masing sebesar Rp24,86 miliar dan Rp27,10 miliar.

Pinjaman yang Diberikan – Dana Talangan

Perusahaan dapat memberikan pinjaman kepada pihak ketiga dalam kegiatan R/R BUMN berupa dana talangan. Pemberian pinjaman dana talangan tersebut diakui dan dicatat sebagai piutang perusahaan. Perlakuan pencatatan pinjaman dana talangan sama dengan perlakuan atas pinjaman yang diberikan.

Pada tanggal 31 Desember 2017, pinjaman yang diberikan – dana talangan kepada pihak berelasi sebesar Rp207,12 miliar, menurun Rp12,10 miliar atau 5,52% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp219,22 miliar. Penurunan ini dikarenakan terutama karena telah dilunasinya *outstanding* pinjaman oleh PT Industri Sandang Nusantara (Persero) kepada Perseroan sebesar Rp69,13 miliar.

Terhadap pinjaman yang diberikan – dana talangan tersebut, pada tanggal 31 Desember 2017 telah dibentuk penyisihan kerugian penurunan nilai piutang sebesar Rp96,65 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp12,00 miliar atau 17,85% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai tersebut adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang.

Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang Grup yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin.

Pada tanggal 31 Desember 2017, tagihan *bruto* kepada pemberi kerja pihak berelasi sebesar Rp347,96 miliar, menurun Rp136,36 miliar atau 28,16% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp484,32 miliar. Penurunan ini dikarenakan berkurangnya pekerjaan kontrak konstruksi yang dilaksanakan.

Tagihan *bruto* kepada pemberi kerja pihak ketiga sebesar Rp945,77 miliar, meningkat Rp170,38 miliar atau 21,97% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp775,38 miliar. Peningkatan ini dikarenakan bertambahnya pekerjaan kontrak konstruksi yang dilaksanakan.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai tagihan *bruto* dan seluruh tagihan *bruto* dapat ditagih sehingga tidak dibentuk penyisihan penurunan nilai.

Persediaan

Pada tanggal 31 Desember 2017, persediaan sebesar Rp170,16 miliar, meningkat Rp53,39 miliar atau 45,73% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp116,76 miliar. Peningkatan ini dikarenakan naiknya persediaan bahan konstruksi sebesar Rp21,96 miliar, serta adanya penambahan persediaan pupuk dan persediaan properti di tahun 2017 masing-masing sebesar Rp24,76 miliar dan Rp6,68 miliar.

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto.

Uang Muka dan Biaya Dibayar Di Muka

Uang muka pihak ketiga merupakan uang muka kepada *supplier* dan sub kontraktor, sedangkan biaya dibayar di muka merupakan biaya untuk sewa gedung.

Pada tanggal 31 Desember 2017, uang muka dan biaya dibayar di muka sebesar Rp104,47 miliar, turun Rp67,01 miliar atau 39,08% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp171,48 miliar. Penurunan ini terutama karena turunnya jumlah biaya yang dibayar di muka.

Pajak Dibayar Di Muka

Pada tanggal 31 Desember 2017, pajak dibayar di muka sebesar Rp474,89 miliar, meningkat Rp115,66 miliar atau 32,20% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp359,24 miliar. Peningkatan ini terutama karena naiknya pajak dibayar di muka untuk PPN entitas anak Perseroan sebesar Rp96,56 miliar.

Aset Lancar Lainnya

Aset lancar lainnya terdiri atas piutang proyek, dana HPA, piutang talangan biaya BUMN, dan lain-lain. Pada tanggal 31 Desember 2017, aset lancar lainnya sebesar Rp74,69 miliar, turun Rp22,56 miliar atau 23,20% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp97,26 miliar. Penurunan ini dikarenakan adanya penurunan pembayaran HPA kepada Pemerintah sebesar Rp50,63 miliar. Dana HPA merupakan rekening atas aktivitas Hasil Pengelolaan Aset Eks BPPN untuk dan atas nama Menteri Keuangan yang dilakukan oleh Perusahaan.

TABEL ASET TIDAK LANCAR PER 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015 (dalam jutaan Rupiah)

ASET	31 Desember 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015	KENAIKAN/ PENURUNAN	
				SELISIH	%
1	2	3	4	5 = (2-3)	6 = (5:3)
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	114.858	125.710	114.524	(10.852)	-8,63
Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/ atau Revitalisasi					
Pihak Berelasi	1.356.385	1.351.876	1.062.301	4.509	0,33
Pinjaman Investasi Jangka Panjang					
Pihak Berelasi	110.468	8.000	-	102.468	1280,85
Properti Investasi	395.901	292.585	275.097	103.316	35,31
Aset Pajak Tangguhan	20.605	20.435	16.687	170	0,83
Investasi pada Ventura Bersama	348.689	340.884	276.005	7.805	2,29
Investasi Jangka Panjang Lainnya	41.818	42.535	592	(717)	-1,69
Aset Tetap	716.622	386.165	424.591	330.457	85,57
Aset Tidak Lancar Lainnya	336.091	25.276	27.558	310.815	1229,68
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.441.437	2.593.466	2.197.355	847.971	32,70

Aset Tidak Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2017, aset tidak lancar sebesar Rp3,44 triliun terdiri dari aset keuangan tersedia untuk dijual, pinjaman yang diberikan - restrukturisasi dan/atau revitalisasi, pinjaman investasi jangka panjang, properti investasi, aset pajak tangguhan, investasi pada ventura bersama, investasi jangka panjang lainnya, aset tetap, dan aset tidak lancar lainnya. Realisasi aset tidak lancar tersebut meningkat Rp847,97 miliar atau 32,70% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2,59 triliun. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan aset tetap dan aset lancar lainnya, masing-masing sebesar Rp330,46 miliar dan Rp310,82 miliar.

Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual terdiri atas investasi saham dan investasi melalui *fund manager*. Pada tanggal 31 Desember 2017, aset keuangan tersedia untuk dijual sebesar Rp114,86 miliar, turun Rp10,85 miliar atau 8,63% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp125,71 miliar. Penurunan ini dikarenakan turunnya jumlah lembar saham yang dimiliki Perseroan pada investasi saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi

Dalam melaksanakan R/R BUMN dengan skema pemberian pinjaman dana dari Perusahaan, maka pinjaman yang diberikan tersebut dicatat sebagai piutang perusahaan. Pinjaman yang diberikan diakui pada saat pencairannya sebesar pokok pinjaman dan disajikan sebesar jumlah *outstanding* tagihan perusahaan yang belum dilunasi dikurangi dengan penyisihan penurunan nilai pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2017, pinjaman yang diberikan - restrukturisasi dan/atau revitalisasi kepada pihak berelasi sebesar Rp1,36 triliun, meningkat Rp4,51 miliar atau 0,33% dibandingkan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1,35 triliun. Peningkatan Perubahan *outstanding* pinjaman ini dikarenakan naiknya piutang bunga pinjaman dana restrukturisasi/revitalisasi PT Dirgantara Indonesia (Persero) sebesar Rp15,46 miliar, pelunasan sebagian pinjaman yang diberikan PT Merpati Nusantara Airlines dan PT Penataran Angkatan Laut masing-masing sebesar Rp6,98 miliar dan Rp2,45 miliar, serta pelunasan piutang bunga PT Industri Kapal Indonesia sebesar Rp2,06 miliar.

Terhadap pinjaman yang diberikan – Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi tersebut, pada tanggal 31 Desember 2017 telah dibentuk penyisihan kerugian penurunan nilai piutang sebesar Rp386,78 miliar, tidak mengalami perubahan dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2016.

Pinjaman Investasi Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 2017, pinjaman investasi jangka panjang tercatat sebesar Rp110,47 miliar, meningkat Rp102,47 miliar atau 1.280,85% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp8 miliar. Peningkatan ini dikarenakan adanya beberapa pinjaman investasi baru kepada pihak ketiga.

Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Pada tanggal 31 Desember 2017, properti investasi sebesar Rp395,90 miliar, meningkat Rp103,32 miliar atau 35,31% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp292,59 miliar. Peningkatan ini dikarenakan perolehan aset investasi baru berupa tanah di Maros dengan total nilai sebesar Rp57,68 miliar milik PT MNA yang diserahkan kepada Perseroan sebagai kompensasi pembayaran atas sebagian pinjaman yang diberikan oleh Perseroan, dan terdapat tambahan biaya-biaya yang dikapitalisasi ke aset tanah yang berlokasi di Tegal senilai Rp3,02 miliar. Selain itu, pada tahun 2017, terdapat penambahan nilai wajar sebesar Rp42,63 miliar.

Aset Pajak Tangguhan

Pada 2017, aset pajak tangguhan sebesar Rp20,61 miliar, meningkat Rp170 juta atau 0,83% dibandingkan 2016 sebesar Rp20,44 miliar.

Investasi pada Ventura Bersama

Pada tanggal 31 Desember 2017, investasi pada ventura bersama sebesar Rp348,69 miliar, meningkat Rp7,81 miliar atau 2,29% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp340,88 miliar. Peningkatan ini terutama karena kenaikan investasi ventura Bersama yang dilakukan PT Nindya Karya.

Investasi Jangka Panjang Lainnya

Pada tanggal 31 Desember 2017, investasi jangka panjang lainnya sebesar Rp41,82 miliar, turun Rp717 juta atau 1,69% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp42,54 miliar. Penurunan tersebut karena pada tanggal 31 Desember 2017 Perseroan membentuk penyisihan penurunan nilai pinjaman dana sebesar Rp15 miliar atas pinjaman kepada PT Asia Kaolin Raya yang pada posisi 31 Desember 2016 belum dilakukan. Sedangkan nilai investasi jangka panjang lainnya mengalami peningkatan, terutama karena adanya peningkatan *outstanding* pinjaman PT KNE Global Persada sebesar Rp16,1 miliar.

Aset Tetap

Pada tanggal 31 Desember 2017, aset tetap sebesar Rp716,62 miliar, meningkat Rp330,46 miliar atau 85,57% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp386,17 miliar. Peningkatan ini terutama karena adanya surplus revaluasi aset tanah sebesar Rp264,44 miliar dan penambahan aset dalam penyelesaian sebesar Rp92,12 miliar.

Terhadap aset tetap tersebut dilakukan akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp121,19 miliar, meningkat sebesar Rp24,50 miliar atau 20,2% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp96,70 miliar.

Aset tetap diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp46,28 miliar terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya.

Aset Tidak Lancar Lainnya

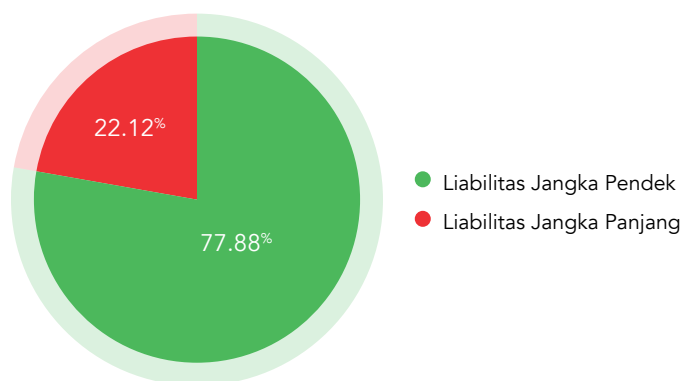
Aset tidak lancar lain-lain terdiri atas deposito berjangka yang dijamin, tanah mentah, uang jaminan, aset *software*, dan lain-lain. Pada tanggal 31 Desember 2017, aset tidak lancar lainnya sebesar Rp336,09 miliar, meningkat Rp310,82 miliar atau 1.229,68% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp25,28 miliar. Peningkatan ini terutama karena naiknya deposito berjangka yang dijamin sebesar Rp314,20 miliar.

LIABILITAS

Pada tanggal 31 Desember 2017, liabilitas Perseroan tercatat sebesar Rp4,77 triliun dengan komposisi 77,88% liabilitas jangka pendek dan 22,12% liabilitas jangka panjang. Nilai tersebut meningkat Rp1,03 triliun atau 27,61% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp3,74 triliun. Peningkatan ini terutama berasal dari liabilitas jangka pendek yang mengalami kenaikan sebesar Rp606,26 miliar atau 19,50% dari tanggal 31 Desember 2016.



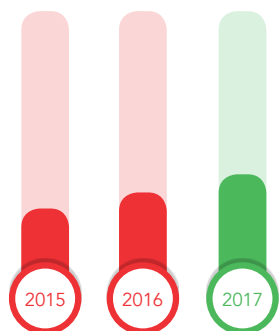
KOMPOSISI LIABILITAS 2017



LIABILITAS JANGKA PENDEK

dalam jutaan Rupiah

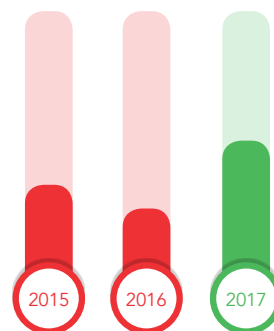
2.695.688 3.109.266 3.715.530



LIABILITAS JANGKA PANJANG

dalam jutaan Rupiah

740.028 629.235 1.055.147



Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2017, liabilitas jangka pendek sebesar Rp3,72 triliun terdiri dari utang usaha, pinjaman bank dan lembaga keuangan, pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun, utang *bruto* kepada pihak ketiga, uang muka pemberi kerja jangka pendek, utang pajak, beban akrual dan utang lain-lain, pendapatan diterima dimuka, serta hasil pengelolaan aset yang masih harus disetor. Nilai tersebut meningkat Rp606,26 miliar atau 19,50% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp3,11 triliun. Peningkatan ini terutama berasal dari pinjaman bank dan lembaga keuangan.

TABEL LIABILITAS PER 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015 (dalam jutaan Rupiah)

LIABILITAS	31 Desember 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015	KENAIKAN/ PENURUNAN	
				SELISIH	%
1	2	3	4	5 = (2-3)	6 = (5:3)
Utang Usaha					
Pihak Berelasi	71.476	1.501	14.397	69.975	4661,89
Pihak Ketiga	1.526.517	1.335.669	1.019.973	190.848	14,29
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan					
Pihak Berelasi	399.340	130.822	255.329	268.518	205,25
Pihak Ketiga	550.677	397.907	240.781	152.770	38,39
Pinjaman Jangka Panjang yang Akan Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun					
Pihak Berelasi	59.551	23.518	7.594	36.033	153,21
Pihak Ketiga	33.992	3.587	-	30.405	847,64
Utang Bruto kepada Pihak Ketiga	628.457	618.204	608.548	10.253	1,66
Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Pendek					
Pihak Berelasi	31.867	24.575	26.109	7.292	29,67
Pihak Ketiga	178.928	265.530	121.154	(86.602)	-32,61
Utang Pajak	55.320	53.925	38.023	1.395	2,59
Beban Akruak dan Utang Lain-lain	141.754	194.212	359.039	(52.458)	-27,01
Pendapatan diterima dimuka	24.929	9.189	-	15.740	171,29
Hasil Pengelolaan Aset yang Masih Harus Disetor	12.722	50.627	4.741	(37.905)	-74,87
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.715.530	3.109.266	2.695.688	606.264	19,50

Utang Usaha

Utang usaha terjadi akibat transaksi dengan pihak berelasi dan pihak ketiga. Pada tanggal 31 Desember 2017, utang usaha kepada pihak berelasi sebesar Rp71,48 miliar, meningkat Rp69,98 miliar atau 4.661,89% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1,50 miliar. Sedangkan, utang usaha kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2017, adalah sebesar Rp1,53 triliun, meningkat Rp190,85 miliar atau 14,29% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp1,34 triliun. Peningkatan ini terutama karena naiknya biaya pengerjaan kontrak-kontrak yang dilaksanakan, seiring dengan penambahan kontrak kerja yang diterima.

Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2017, pinjaman bank dan lembaga keuangan yang diperoleh dari pihak berelasi baik PT PPA induk maupun entitas anak total sebesar Rp399,34 miliar, meningkat Rp268,52 miliar atau 205,25% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp130,82 miliar. Peningkatan ini dikarenakan adanya pinjaman baru yang diperoleh Perseroan dari Bank BTN dan Bank Mandiri.

Disisi lain, pada tanggal 31 Desember 2017, pinjaman bank dan lembaga keuangan kepada pihak ketiga sebesar Rp550,68 miliar, meningkat Rp152,77 miliar atau 38,39% dibandingkan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp397,91 miliar. Peningkatan ini terutama karena adanya pinjaman baru yang diperoleh perusahaan dari Bank China Construction Bank Indonesia sebesar Rp271,19 miliar.

Pinjaman Jangka Panjang yang Akan Jatuh Tempo dalam Setahun

Pada tanggal 31 Desember 2017, pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun kepada pihak berelasi sebesar Rp59,55 miliar, meningkat Rp36,03 miliar atau 153,21% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp23,52 miliar. Sedangkan, pinjaman yang akan jatuh tempo kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2017, sebesar Rp33,99 miliar, meningkat Rp30,41 miliar atau 847,64% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp3,59 miliar. Peningkatan ini dikarenakan kenaikan pinjaman yang akan jatuh tempo kepada Bank Mandiri, BTN, Bank Muamalat, dan BPD Jateng.

Utang Bruto kepada Pihak Ketiga

Utang *bruto* kepada pihak ketiga merupakan utang prestasi kerja sub kontraktor yang belum diberitahukan, baik dari sub kontraktor atau material yang diakui sebagai prestasi karena belum memenuhi syarat pembayaran sesuai kontrak. Pada tanggal 31 Desember 2017, utang *bruto* kepada pihak ketiga sebesar Rp628,46 miliar, meningkat Rp10,25 miliar atau 1,66% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp618,20 miliar. Peningkatan ini dikarenakan kenaikan pekerjaan sub-kontraktor yang telah diakui, terutama untuk Wilayah IV PT Nindya Karya.

Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Pendek

Uang muka pemberi kerja jangka pendek terjadi akibat transaksi dengan pihak berelasi dan pihak ketiga. Pada tanggal 31 Desember 2017, uang muka pemberi kerja jangka pendek kepada pihak berelasi sebesar Rp31,87 miliar, meningkat Rp7,29 miliar atau 29,67% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp24,58 miliar. Peningkatan ini dikarenakan adanya uang muka yang diberikan oleh PT Krakatau Steel dan PT Pelindo III dengan total Rp16,53 miliar, yang belum ada pada tanggal 31 Desember 2016.

Disisi lain, pada tanggal 31 Desember 2017, uang muka pemberi kerja jangka pendek kepada pihak ketiga sebesar Rp178,93 miliar, turun Rp86,60 miliar atau 32,61% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp265,53 miliar. Penurunan ini terutama karena turunnya uang muka dari Bank Indonesia sebesar Rp32,18 miliar, RSUD Mamuju sebesar Rp17,35 miliar, dan Pemerintahan Kota Pekanbaru sebesar Rp15,56 miliar.

Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2017, terdapat utang pajak sebesar Rp55,32 miliar, meningkat Rp1,39 miliar atau 2,59% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp53,93 miliar. Peningkatan ini dikarenakan adanya utang pajak berupa PPN entitas anak sebesar Rp23,98 miliar.

Beban AkruaI dan Utang Lain-Lain

Pada tanggal 31 Desember 2017, beban akrual dan utang lain-lain sebesar Rp141,75 miliar, menurun Rp52,46 miliar atau 27,01% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp194,21 miliar. Penurunan ini terutama karena turunnya beban akrual biaya tantiem sebesar Rp40 miliar dan utang operasional proyek sebesar Rp41 miliar. Utang operasional proyek merupakan utang atas beban ventura bersama yang terjadi atas pinjaman-pinjaman sementara ke proyek-proyek yang dikerjasamakan. Disamping itu, terdapat kenaikan akrual biaya apresiasi karyawan sebesar Rp28,92 miliar, yaitu pencatatan biaya secara akrual berdasarkan anggaran yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

Pendapatan Diterima Dimuka

Pada tanggal 31 Desember 2017, pendapatan diterima dimuka sebesar Rp24,93 miliar, meningkat Rp15,74 miliar atau 171,29% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp9,19 miliar. Peningkatan ini terutama karena pendapatan diterima dimuka dari proyek jalur ganda KAI sebesar Rp9,55 miliar dan proyek jaringan gas Lampung sebesar Rp5,20 miliar.

Hasil Pengelolaan Aset yang Masih Harus Disetor

Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Aset eks BPPN antara Perusahaan dengan Menteri Keuangan pada tanggal 23 Agustus 2017, Hasil Pengelolaan Aset ("HPA") setelah dikurangi dengan Biaya Aset, Imbalan Pengelolaan Aset ("IPA"), Imbalan Kinerja (jika ada) dan Pajak Pertambahan Nilai merupakan penerimaan Negara yang harus disetorkan ke Negara tiap triwulanan. HPA yang belum disetorkan dapat dikelola oleh Perusahaan dan diserahkan beserta bunganya sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2017, HPA yang masih harus disetor kepada Negara sebesar Rp12,72 miliar, turun Rp37,91 miliar atau 74,87% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp50,63 miliar. Penurunan ini dikarenakan naiknya HPA yang telah disetor kepada pemerintah sebesar Rp45,89 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 2017, liabilitas jangka panjang sebesar Rp1,06 triliun terdiri dari liabilitas imbalan kerja karyawan, pinjaman bank jangka panjang, dan uang muka pemberi kerja jangka panjang. Nilai tersebut meningkat Rp425,91 miliar atau 67,69% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp629,24 miliar. Peningkatan ini khususnya berasal dari naiknya pinjaman bank jangka panjang kepada pihak ketiga sebesar Rp344,60 miliar.

TABEL LIABILITAS JANGKA PANJANG PER 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015 (dalam jutaan Rupiah)

LIABILITAS	31 Desember 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015	KENAIKAN/ PENURUNAN	
				SELISIH	%
1	2	3	4	5 = (2-3)	6 = (5:3)
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan	27.897	22.556	32.639	5.341	23,68
Liabilitas Pajak Tangguhan	-	-	452	-	-
Pinjaman Bank Jangka Panjang					
Pihak Berelasi	232.878	153.354	409.156	79.524	51,86
Pihak Ketiga	686.918	342.316	140.000	344.602	100,67
Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Panjang					
Pihak Berelasi	-	7.028	-	(7.028)	-100,00
Pihak Ketiga	107.454	103.981	157.781	3.473	3,34
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.055.147	629.238	740.032	425.909	67,69

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2017, liabilitas imbalan kerja karyawan tercatat sebesar Rp27,90 miliar, meningkat Rp5,34 miliar atau 23,68% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp22,56 miliar. Peningkatan ini terutama dikarenakan adanya penyesuaian penilaian aktuaris atas estimasi manfaat karyawan pasca kerja PT Nindya Karya (Persero).

Perusahaan dan entitas anak memberikan imbalan pasca kerja minimum kepada karyawan yang berhak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pinjaman Bank Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 2017, pinjaman bank jangka panjang kepada pihak berelasi sebesar Rp232,88 miliar, meningkat Rp79,52 miliar atau 51,86% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp153,35 miliar. Peningkatan ini dikarenakan kenaikan *outstanding* pinjaman pada BTN dan BNI, serta adanya pinjaman baru kepada Bank Mandiri.

Disisi lain, pada tanggal 31 Desember 2017, *outstanding* pinjaman bank jangka panjang kepada pihak ketiga sebesar Rp686,92 miliar, meningkat Rp344,60 miliar atau 100,67% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp342,32 miliar. Peningkatan ini dikarenakan naiknya *medium term notes* yang diterbitkan selama tahun 2017 sebesar Rp360 miliar oleh PT Nindya Karya (Persero) dan PT PPA Finance.

Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Panjang

Uang muka pemberi kerja jangka panjang merupakan saldo uang muka yang telah diterima dari pemberi pekerjaan yang pembayarannya dipotongkan dengan tagihan atas setiap pekerjaan yang telah diselesaikan. Pada tanggal 31 Desember 2017, uang muka pemberi kerja jangka panjang kepada pihak berelasi bersaldo nihil, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp7,03 miliar.

Disisi lain, pada tanggal 31 Desember 2017, uang muka pemberi kerja jangka panjang kepada pihak ketiga sebesar Rp107,45 miliar, meningkat Rp3,47 miliar atau 3,34% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp103,98 miliar. Peningkatan ini dikarenakan naiknya uang muka yang diterima dari Kementerian Perhubungan sebesar Rp37,80 miliar.

EKUITAS

Pada tanggal 31 Desember 2017, ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp4,71 triliun. Nilai tersebut meningkat Rp558,36 miliar atau 13,45% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp4,15 triliun. Peningkatan ini berasal dari perolehan laba tahun 2017 yang terakumulasi dalam saldo laba belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp300,69 miliar dan kenaikan surplus revaluasi aset tetap sebesar Rp261,79 miliar.

Adapun ekuitas tersebut terdiri dari:

- Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp4,69 triliun, tumbuh sebesar Rp553,32 miliar atau 13,35% dari Rp4,15 triliun pada tanggal 31 Desember 2016; dan
- Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada kepentingan *non*-pengendali mencapai Rp10,85 miliar, tumbuh sebesar Rp5,04 miliar atau 86,86% dari Rp5,81 miliar pada tanggal 31 Desember 2016.

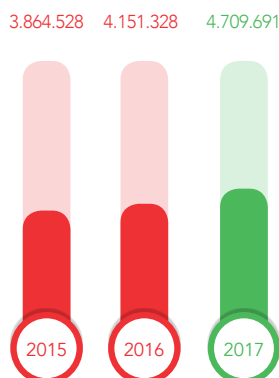
TABEL EKUITAS PER 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015 (dalam jutaan Rupiah)

EKUITAS	31 Desember 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015	KENAIKAN/ PENURUNAN	
				SELISIH	%
1	2	3	4	5 = (2-3)	6 = (5:3)
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk					
Modal Saham - Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham - Modal Dasar 5.000.000 saham					
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					
31 Desember 2017, 2016 dan 2015, masing-masing					
2.996.688, 2.996.688 dan 1.996.688 saham	2.996.688	2.996.688	1.996.688	0	0,00
Uang Muka Setoran Modal		-	1.000.000		
Tambahan Modal Disetor	(305.768)	(305.768)	(305.768)	0	0,00
Saldo Laba:					
Telah Ditentukan Penggunaannya	141.353	141.353	141.353	0	0,00
Belum Ditentukan Penggunaannya	1.404.335	1.103.641	837.032	300.694	27,25
Laba (Rugi) Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk Dijual - Bersih	44.279	53.443	35.026	-9.164	-17,15
Surplus Revaluasi Aset Tetap	417.957	156.166	156.166	261.791	167,64
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	4.698.844	4.145.523	3.860.497	553.321	13,35
Kepentingan Non Pengendali	10.847	5.805	4.031	5.042	86,86
JUMLAH EKUITAS	4.709.691	4.151.328	3.864.528	558.363	13,45



JUMLAH EKUITAS

dalam jutaan Rupiah



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

TABEL LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
TAHUN 2017, 2016 DAN 2015
(dalam jutaan Rupiah)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN	2017	2016	2015	KENAIKAN/ PENURUNAN	
				SELISIH	%
1	2	3	4	5 = (2-3)	6 = (5:3)
PENDAPATAN USAHA	6.355.757	5.000.360	3.969.614	1.355.397	27,11
BEBAN USAHA	(5.782.914)	(4.586.191)	(3.608.667)	-1.196.723	26,09
LABA USAHA	572.843	414.169	360.947	158.674	38,31
Pendapatan Bunga	10.785	11.618	12.599	-833	-7,17
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	-	98.181	1.566	0	0,00
Beban Bunga dan Keuangan	(65.334)	(103.880)	(104.113)	38.546	-37,11
Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi	11.977	3.273	6.559	8.704	265,93
Beban Pajak Final	(168.337)	(137.840)	(105.571)	-30.497	22,12
Bagian Laba Ventura Bersama	133.038	63.283	37.431	69.755	110,23
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(162.042)	(65.404)	(23.530)	-96.638	147,76
LABA SEBELUM PAJAK	332.930	283.400	185.888	49.530	17,48
PAJAK PENGHASILAN					
Manfaat (Beban) Pajak Kini	(6.576)	(6.321)	(12.340)	-255	4,03
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan	131	4.187	(2.586)	-4.056	-96,87
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(6.445)	(2.134)	(14.926)	-4.311	202,01
LABA TAHUN BERJALAN	326.485	281.266	170.962	45.219	16,08

TABEL LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
TAHUN 2017, 2016 DAN 2015
(dalam jutaan Rupiah)

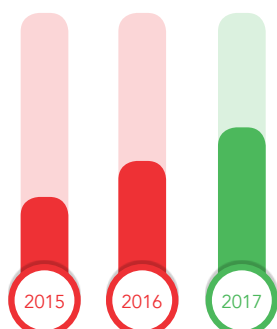
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN	2017	2016	2015	KENAIKAN/ PENURUNAN	
				SELISIH	%
1	2	3	4	5 = (2-3)	6 = (5:3)
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Surplus Revaluasi Aset Tetap	264.436	-	-	264.436	N/A
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Liabilitas Imbalan Pasti	(4.304)	(2.667)	(2.394)	-1.637	61,38
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	(9.164)	18.417	(38.567)	-27.581	-149,76
Total Penghasilan Komprehensif Lain	250.968	15.750	(40.961)	235.218	1493,45
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	577.453	297.016	130.001	280.437	94,42
PENGHASILAN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA					
Pemilik Entitas Induk	324.045	279.466	170.274	44.579	15,95
Kepentingan Non-Pengendali	2.440	1.800	688	-1.556	-86,44
JUMLAH	326.485	281.266	170.962	45.219	16,08
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA					
Pemilik Entitas Induk	572.411	295.242	129.337	277.169	93,88
Kepentingan Non-Pengendali	5.042	1.774	664	3.268	184,22
JUMLAH	577.453	297.016	130.001	280.437	94,42
LABA PER SAHAM (dalam angka penuh)	108.134	93.258	85.280	14.876	15,95



LABA BERSIH

dalam jutaan Rupiah

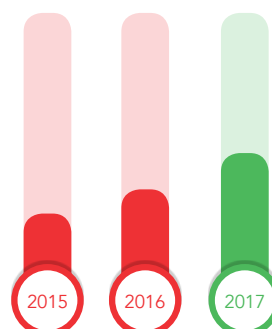
170.962 281.266 326.485



JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

dalam jutaan Rupiah

130.001 297.016 577.453



PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha Perseroan mengalami pertumbuhan sebesar Rp1,36 triliun atau 27,11% dari Rp5 triliun di tahun 2016 menjadi Rp6,36 triliun di tahun 2017. Pendapatan usaha Perseroan didominasi oleh pendapatan jasa konstruksi sebesar 92,25%, dan sisanya sebesar 7,75%.

Pertumbuhan ini terutama berasal dari pendapatan jasa konstruksi yang meningkat Rp1,21 triliun atau 25,87%, pendapatan dari penjualan barang investasi dan pendapatan dari jasa pemetaan masing-masing sebesar Rp62,02 miliar dan Rp35,25 miliar.

TABEL PENDAPATAN USAHA TAHUN 2017, 2016 DAN 2015 (dalam jutaan Rupiah)

PENDAPATAN USAHA 1	2017 2	2016 3	2015 4	KENAIKAN/ PENURUNAN	
				SELISIH 5 = (2-3)	% 6 = (5:3)
Pendapatan Jasa Konstruksi	5.863.162	4.658.086	3.613.197	1.205.076	25,87
Pendapatan Bunga dan Provisi atas Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan dan Dana Restrukturisasi dan Revitalisasi	203.674	175.756	196.457	27.918	15,88
Pendapatan Hasil Investasi	133.686	135.232	127.533	(1.546)	-1,14
Pendapatan Barang Investasi	62.015	-	-	62.015	100,00
Pemetaan	35.250	-	-	35.250	100,00
Pendapatan Penggantian Biaya	26.667	2.029	1.429	24.638	1214,29
Pendapatan Imbalan Jasa Konsultansi	17.859	13.378	11.473	4.481	33,50
Pendapatan Imbalan Pengelolaan Aset (IPA)	13.444	13.879	14.365	(435)	-3,13
Pendapatan Imbalan Kinerja Pengelolaan Aset BUMN		2.000	5.160	(2.000)	-100,00
Jumlah	6.355.757	5.000.360	3.969.614	1.355.397	27,11



PENDAPATAN USAHA

dalam jutaan Rupiah



Pendapatan Jasa Konstruksi

Pendapatan jasa konstruksi diakui ketika bagian dari pekerjaan telah selesai dikerjakan dan ditentukan berdasarkan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode prosentase penyelesaian). Prosentase penyelesaian konstruksi ditetapkan berdasarkan survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Pendapatan jasa konstruksi mengalami pertumbuhan sebesar Rp1,21 triliun atau 25,87% dari Rp4,66 triliun di tahun 2016 menjadi Rp5,86 triliun di tahun 2017. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh kenaikan volume pekerjaan konstruksi.

Pendapatan Bunga dan Provisi atas Pinjaman yang Diberikan

Pendapatan bunga dan provisi atas pinjaman yang diberikan mengalami peningkatan sebesar Rp27,92 miliar atau 15,88% dari Rp175,76 miliar di tahun 2016 menjadi Rp203,67 miliar di tahun 2017. Peningkatan ini dipengaruhi oleh naiknya pinjaman yang diberikan untuk dana talangan dan restrukturisasi dan revitalisasi.

Pendapatan Hasil Investasi

Pendapatan hasil investasi mengalami penurunan sebesar Rp1,55 miliar atau 1,14% dari Rp135,23 miliar di tahun 2016 menjadi Rp133,69 miliar di tahun 2017. Penurunan ini dipengaruhi oleh turunnya pendapatan dari bunga deposito berjangka sebesar Rp25,54 miliar.

Penjualan Barang Investasi

Penjualan barang investasi baru diperoleh pada tahun 2017 sebesar Rp62,02 miliar. Penjualan barang investasi diantaranya kerja sama kegiatan jual beli ikan tuna dengan PT SIG dan jual beli sapi dengan PT Berdikari.

Pemetaan

Pemetaan juga merupakan pendapatan yang baru diperoleh pada tahun 2017. Pemetaan merupakan pendapatan dari jasa pemetaan udara sebesar Rp35,25 miliar. Pendapatan pemetaan udara merupakan

pendapatan yang diperoleh atas proyek pemetaan udara oleh PT PPAirbone (entitas anak) dari PT Survai Udara Panas (Persero) dan PT Karvak Nusa Geomatika masing-masing sebesar Rp17,06 miliar dan Rp18,19 miliar.

Pendapatan Penggantian Biaya

Pendapatan penggantian biaya mengalami pertumbuhan sebesar Rp24,64 miliar atau 1214,29% dari Rp2,03 miliar di tahun 2016 menjadi Rp26,67 miliar di tahun 2017.

Pendapatan Imbalan Jasa Konsultansi

Pendapatan imbalan jasa konsultansi mengalami pertumbuhan sebesar Rp4,48 atau 33,50% dari Rp13,38 miliar di tahun 2016 menjadi Rp17,86 miliar di tahun 2017. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh bertambahnya jasa konsultansi yang diberikan, terutama kepada PT Krakatau Steel (Persero), PT Pupuk Kujang, PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT Djakarta Lloyd (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) dan PT Nindya Beton.

Pendapatan Imbalan Pengelolaan Aset (IPA)

Pendapatan imbalan pengelolaan aset (IPA) mengalami penurunan sebesar Rp435 juta atau 3,13% dari Rp13,88 miliar di tahun 2016 menjadi Rp13,44 miliar di tahun 2017.

Pengelolaan Aset BUMN

Perusahaan tidak lagi memperoleh pendapatan imbalan kinerja dari pengelolaan aset BUMN pada tahun 2017 setelah pada periode sebelumnya memperoleh Rp2 miliar di tahun 2016.

BEBAN USAHA

Beban usaha Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1,20 triliun atau 26,09% dari Rp4,59 triliun di tahun 2016 menjadi Rp5,78 triliun di tahun 2017. Pertumbuhan ini terutama berasal dari naiknya beban proyek sebesar Rp1,06 triliun atau 25,52%.

TABEL BEBAN USAHA TAHUN 2017, 2016 DAN 2015 (dalam jutaan Rupiah)

BEBAN USAHA 1	2017 2	2016 3	2015 4	KENAIKAN/ PENURUNAN	
				SELISIH 5 = (2-3)	% 6 = (5:3)
Beban Proyek	5.203.415	4.145.503	3.217.813	1.057.912	25,52
Pegawai	240.992	247.346	196.575	(6.354)	-2,57
Beban Bunga Bank	89.149	60.456	54.978	28.693	47,46
Harga Pokok Penjualan	58.161	-	-	58.161	100,00
Keperluan Kantor	36.287	42.909	3.885	(6.622)	-15,43
Sewa dan Asuransi	35.418	32.640	30.865	2.778	8,51
Perjalanan Dinas	18.442	15.971	14.798	2.471	15,47
Pemasaran dan Penjualan	12.285	11.846	8.318	439	3,71
Penyusutan	26.096	9.994	10.840	16.102	161,12
Investasi	8.043	24.364	8.568	(16.321)	-66,99
Jasa Konsultan	6.297	12.070	1.699	(5.773)	-47,83
Imbalan Pasca Kerja - Bersih	5.673	5.903	13.358	(230)	-3,90
Penyisihan (Pemulihan) Penurunan Nilai Piutang	(19.652)	(23.373)	19.122	3.721	-15,92
Lain-lain (di bawah Rp 1 milyar)	62.308	562	27.848	61.746	10.986,83
Jumlah Beban Usaha	5.782.914	4.586.191	3.608.667	1.196.723	26,09

LABA USAHA

Laba usaha merupakan selisih dari pendapatan usaha dan beban usaha Perseroan. Dengan perhitungan tersebut, Perseroan berhasil membukukan laba usaha tahun 2017 sebesar Rp572,84 miliar, pencapaian tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp414,17 miliar. Pertumbuhan sebesar Rp158,67 miliar atau 38,31% karena peningkatan pendapatan usaha yang lebih tinggi dari beban usaha.



LABA USAHA

dalam jutaan Rupiah



PENDAPATAN BUNGA

Pendapatan bunga diakui berdasarkan periode waktu terjadinya dengan tingkat bunga yang sesuai atau suku bunga efektif. Pendapatan bunga mengalami penurunan sebesar Rp833 juta atau 7,17% dari Rp11,62 miliar di tahun 2016 menjadi Rp10,79 miliar di tahun 2017. Penurunan ini dipengaruhi oleh turunnya pinjaman yang diberikan.

KEUNTUNGAN PENJUALAN ASET TETAP

Tidak terdapat keuntungan penjualan aset tetap pada tahun 2017 karena perusahaan tidak menjual aset tetap selama tahun 2017. Sementara di tahun 2016, keuntungan penjualan aset tetap yang diperoleh sebesar Rp98,18 miliar.

BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN

Beban bunga dan keuangan mengalami penurunan sebesar Rp38,55 miliar atau 37,11% dari Rp103,88 miliar di tahun 2016 menjadi Rp65,33 miliar di tahun 2017. Penurunan ini dipengaruhi oleh turunnya *outstanding* pinjaman.

KENAIKAN NILAI WAJAR ATAS PROPERTI INVESTASI

Kenaikan nilai wajar atas properti investasi mengalami peningkatan sebesar Rp8,7 miliar atau 265,93% dari sebesar Rp3,27 miliar di tahun 2016 menjadi sebesar Rp11,98 miliar di tahun 2017. Peningkatan ini berdasarkan penilaian atas nilai pasar aset properti investasi oleh KJPP.

BEBAN PAJAK FINAL

Beban pajak final mengalami peningkatan sebesar Rp30,50 miliar atau 22,12% dari Rp137,84 miliar di tahun 2016 menjadi Rp168,34 miliar di tahun 2017. Peningkatan ini dipengaruhi oleh naiknya pendapatan perusahaan kena pajak dari pendapatan jasa konstruksi.

BAGIAN LABA VENTURA BERSAMA

Bagian laba ventura bersama merupakan laba (rugi) yang diperoleh dari proyek-proyek yang dikerjakan secara Ventura Bersama dengan perusahaan lain. Bagian laba ventura bersama mengalami pertumbuhan sebesar Rp69,76 miliar atau 110,23%, dari sebesar Rp63,28 miliar di tahun 2016 menjadi sebesar Rp133,04 miliar di tahun 2017. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh naiknya jumlah proyek ventura yang dikerjakan.

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Beban lain-lain mengalami peningkatan sebesar Rp96,64 miliar atau 147,76% dari beban lain-lain sebesar Rp65,40 miliar di tahun 2016 menjadi sebesar Rp162,04 miliar di tahun 2017.

LABA SEBELUM PAJAK

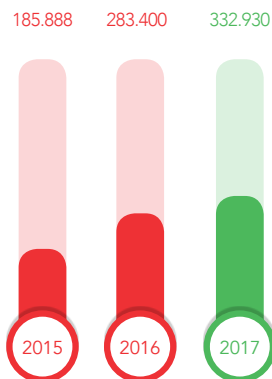
Laba sebelum pajak merupakan laba tahun berjalan sebelum dikurangi jumlah beban pajak penghasilan. Dengan perhitungan tersebut, Perseroan mampu membukukan laba sebelum pajak tahun 2017 sebesar Rp332,93 miliar, pencapaian tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp283,40 miliar.

Pertumbuhan sebesar Rp49,53 miliar atau 17,48% dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan usaha yang diperoleh perusahaan.



LABA SEBELUM PAJAK

dalam jutaan Rupiah



BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Perseroan membukukan beban pajak penghasilan yang mencapai Rp6,45 miliar di tahun 2017, tumbuh sebesar Rp4,31 miliar atau 202,01% dari Rp2,13 miliar di tahun 2016. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh naiknya laba kena pajak perusahaan.

LABA BERSIH

Laba bersih merupakan laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi beban pajak penghasilan. Dengan perhitungan tersebut, Perseroan mampu membukukan laba bersih tahun 2017 sebesar Rp326,49 miliar, pencapaian tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp281,27 miliar. Pertumbuhan sebesar Rp45,22 miliar atau 16,08% terutama dipengaruhi oleh naiknya pendapatan usaha. Adapun laba bersih tahun berjalan tersebut terdiri dari:

- Laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp324,05 miliar, tumbuh sebesar Rp44,58 miliar atau 15,95% dari Rp279,47 miliar di tahun 2016; dan
- Laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali mencapai Rp2,44 miliar, tumbuh sebesar Rp640 juta atau 35,56% dari Rp1,80 miliar di tahun 2016.

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Penghasilan komprehensif lain merupakan penghasilan dan beban, termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam bagian laba rugi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Perseroan memiliki saldo pada akun penghasilan komprehensif lain sebagaimana dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi keuangan (SAK) yang mencapai Rp250,97 miliar di tahun 2017, tumbuh sebesar Rp235,22 miliar atau 1493,45% dari Rp15,75 miliar di tahun 2016. Pertumbuhan ini karena adanya dipengaruhi oleh surplus revaluasi aset tetap sebesar Rp264,44 miliar.

LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Perseroan mampu membukukan jumlah laba komprehensif tahun berjalan tahun 2017 sebesar Rp577,45 miliar, pencapaian tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp297,02 miliar. Pertumbuhan sebesar Rp280,44 miliar atau 94,42% dipengaruhi oleh naiknya laba bersih tahun berjalan dan pendapatan komprehensif lainnya. Adapun laba komprehensif tahun berjalan tersebut terdiri dari:

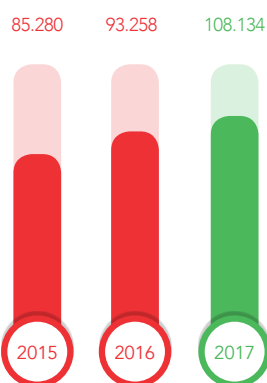
- Laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp572,41 miliar, tumbuh sebesar Rp277,17 miliar atau 93,88% dari Rp295,24 miliar di tahun 2016; dan
- Laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali mencapai Rp5,04 miliar, tumbuh sebesar Rp3,27 miliar atau 184,22% dari Rp1,77 miliar di tahun 2016.

LABA PER SAHAM

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode. Dengan perhitungan tersebut, Perseroan mampu membukukan laba per saham tahun 2017 sebesar Rp108.134 pencapaian tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp93.258. Pertumbuhan sebesar Rp14.876 atau 15,95% dipengaruhi oleh kenaikan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.



LABA PER SAHAM



LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Kas merupakan aset yang paling likuid, sehingga menentukan kelancaran keuangan perusahaan. Laporan arus kas berisi informasi mengenai pengaruh kas dari kegiatan operasi, investasi dan pendanaan serta kenaikan atau penurunan kas bersih suatu perusahaan selama satu periode.

Kas dan setara kas akhir tahun 2017 mencapai Rp1,69 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp159,90 miliar atau 10,42% dari kas dan setara kas akhir tahun 2016 yang mencapai Rp1,53 triliun. Peningkatan ini terutama berasal dari aktivitas pendanaan berupa penerimaan pinjaman bank dan non bank.

TABEL LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN TAHUN 2015, 2016 DAN 2017 (dalam jutaan Rupiah)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN	2017	2016	2015	KENAIKAN/ PENURUNAN	
				SELISIH	%
1	2	3	4	5 = (2-3)	6 = (5:3)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan Kas dari Pelanggan	6.016.633	4.144.611	3.820.577	1.872.022	45,17
Penyaluran Pembiayaan Konsumen	(374.397)	(185.208)	(672.963)	189.189	102,15
Penerimaan IPA Eks BPPN	13.444	13.879	14.365	(435)	-3,13
Penerimaan Restitusi Pajak	-	10.207	8.398	(10.207)	-100,00
Penerimaan Bunga atas Pinjaman yang Diberikan	47.924	84.570	79.381	(36.646)	-43,33

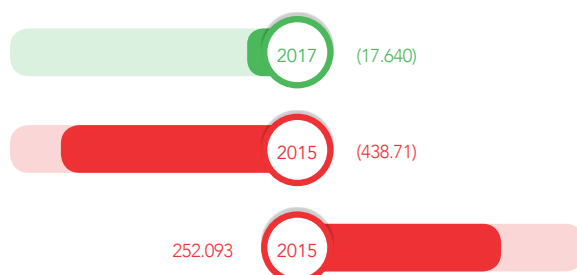
TABEL LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN TAHUN 2015, 2016 DAN 2017 (dalam jutaan Rupiah)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN	2017	2016	2015	KENAIKAN/ PENURUNAN	
				SELISIH	%
1	2	3	4	5 = (2-3)	6 = (5:3)
Penerimaan Penggantian Biaya Aset	243	1.984	1.142	(1.741)	-87,75
Pembayaran Beban Usaha	(5.497.316)	(4.426.592)	(2.788.083)	1.070.724	24,19
Pembayaran Beban Bunga	(182.201)	(147.820)	(152.104)	34.381	23,26
Pembayaran Pajak	(204.179)	(139.716)	(141.887)	64.463	46,14
Penerimaan Hasil Investasi	126.300	142.974	112.017	(16.674)	-11,66
Pencairan Surat Berharga Diperdagangkan	4.341	49.717	(16.978)	(45.376)	-91,27
Pengelolaan Pinjaman Karyawan	(1.204)	(2.062)	(3.186)	(858)	-41,61
Penerimaan (Pengeluaran) Lainnya	32.772	14.746	(8.586)	18.026	122,24
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(17.640)	(438.710)	252.093	(421.070)	-95,98
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan Aset Tetap	(52.827)	(112.138)	(64.779)	(59.311)	-52,89
Penerimaan dan (Pengeluaran) Pinjaman yang Diberikan - Bersih	(577.989)	(327.484)	-	250.505	76,49
Penambahan Ventura Bersama	-	(10.000)	(9.000)	(10.000)	-100,00
Perolehan Properti Investasi	(3.015)	(3.135)	(114.758)	(120)	-3,83
Hasil Penjualan Aset Tetap	9	251.563	1.566	(251.554)	-100,00
Pencairan Surat Berharga Tersedia untuk Dijual	3.970	10.543	20.753	(6.573)	-62,34
Penempatan Deposito yang Dijaminkan	(316.000)	-	-	316.000	100,00
Perolehan Aset Tak Berwujud	(669)	-	-	669	100,00
Penambahan Investasi Jangka Panjang Lainnya	(133)	(247)	(92)	(114)	-46,15
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(946.654)	(190.898)	(166.310)	755.756	395,90
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan Pinjaman Bank dan Non Bank	15.245.645	7.111.093	1.825.962	8.134.552	114,39
Pembayaran Pinjaman Bank dan Non Bank	(14.462.358)	(7.283.906)	(1.429.112)	7.178.452	98,55
Penerimaan Pinjaman <i>Medium Term Notes</i>	500.000	-	-	500.000	100,00
Pembayaran Pinjaman <i>Medium Term Notes</i>	(140.000)	-	-	140.000	100,00
Pembayaran Dividen	(19.089)	(10.216)	(11.000)	8.873	86,85
Penerimaan Tambahan Modal	-	-	1.000.000	-	-
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	1.124.198	(183.029)	1.385.850	1.307.227	714,22
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	159.904	(812.637)	471.633	972.541	119,68
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.534.252	2.346.889	935.152	(812.637)	-34,63
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1.694.156	1.534.252	1.406.785	159.904	10,42



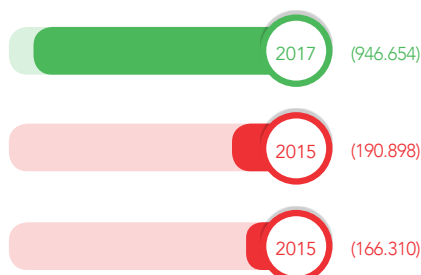
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

dalam jutaan Rupiah



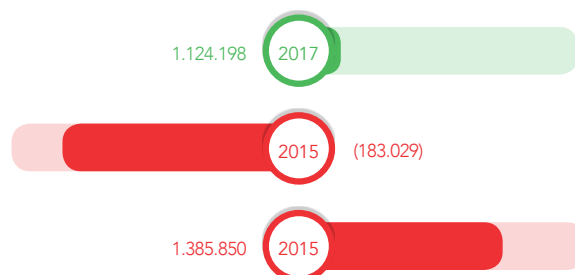
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

dalam jutaan Rupiah



ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

dalam jutaan Rupiah



ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi akhir tahun 2017 sebesar Rp17,64 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp421,07 miliar atau 95,98% dari sebesar Rp438,71 miliar di akhir tahun 2016. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan kas masuk dari penerimaan pelanggan selama tahun 2017 sebesar Rp1,87 triliun, sehingga dapat menutup kenaikan beban operasional yang lain walaupun pembayaran beban usaha juga meningkat sebesar Rp1,07 triliun.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi akhir tahun 2017 sebesar Rp946,65 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp755,76 miliar atau 395,90% dari sebesar Rp190,90 miliar di akhir tahun 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya pengeluaran pinjaman yang diberikan sebesar Rp250,51 miliar dan adanya penempatan deposito yang dijamin sebesar Rp316 miliar di tahun 2017.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan akhir tahun 2017 sebesar Rp1,12 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp1,31 triliun atau 714,22% dari kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun 2016 sebesar Rp183,03 miliar di akhir tahun 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya penerimaan pinjaman bank dan non-bank sebesar Rp8,13 triliun dari tahun 2016, meskipun pembayaran pinjaman di tahun 2017 juga meningkat sebesar Rp7,18 triliun.

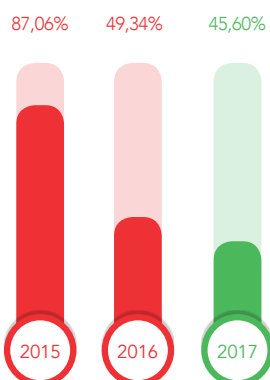
RASIO KINERJA KEUANGAN

TABEL RASIO KINERJA KEUANGAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

RASIO KINERJA KEUANGAN	2017	2016	2015
Rasio Likuiditas			
Rasio Kas	45,60%	49,34%	87,06%
Rasio Lancar	162,53%	170,34%	189,30%
Rasio Profitabilitas			
Margin Laba Kotor	9,01%	8,28%	9,09%
Margin Laba Sebelum Pajak	5,23%	5,67%	4,68%
Margin Laba Bersih	5,13%	5,62%	4,31%
Tingkat Pengembalian Aset	3,44%	3,56%	2,34%
Tingkat Pengembalian Modal	6,93%	6,78%	4,42%
Rasio Solvabilitas			
Rasio Utang terhadap Aset	50,32%	47,38%	47,06%
Rasio Utang terhadap Modal	101,29%	90,06%	88,90%
Rasio Aktivitas Piutang			
Periode Penagihan (hari)	70,13	73,59	74,84
Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan Usaha	27,11%	25,97%	84,48%
Laba Tahun Berjalan	16,08%	64,52%	46,26%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	94,42%	128,47%	40,14%
Aset	20,16%	8,08%	39,92%
Liabilitas	27,61%	8,81%	39,13%
Ekuitas	13,45%	7,42%	40,64%
Rasio Industri			
Penilaian Kajian Restrukturisasi/Revitalisasi atau Penugasan Khusus	100	100	100
Indikator Kinerja	102,35	97,9	105,6
Tingkat Kesehatan	94	92,5	92



RASIO KAS



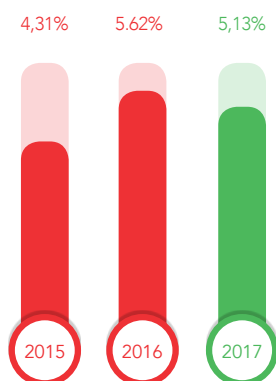
RASIO LANCAR



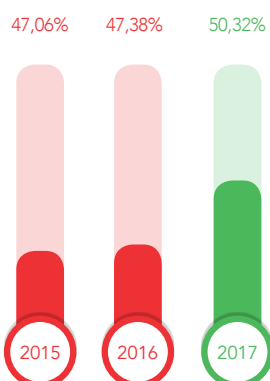
MARGIN LABA KOTOR



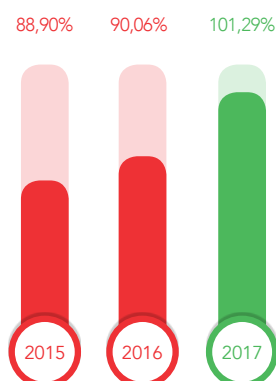
MARGIN LABA BERSIH



RASIO UTANG TERHADAP ASET



RASIO UTANG TERHADAP MODAL



RASIO PROFITABILITAS

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba diukur dengan rasio profitabilitas. Tingkat profitabilitas perusahaan dapat dilihat dari *Profit Margin*, *Return on Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). Pada tahun 2017, margin laba kotor tercatat sebesar 9,01% lebih tinggi dari periode sebelumnya, yaitu sebesar 8,28%. Sementara pencapaian margin laba bersih di kisaran 5,13%, lebih rendah dari periode sebelumnya yaitu sebesar 5,62% terutama karena peningkatan beban lain-lain.

ROA pada tahun 2017 tercatat sebesar 3,44%, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 3,56%. Sementara ROE tercatat sebesar 6,93%, sedikit mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,78%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan laba dalam menghasilkan aset dan ekuitas cenderung stabil.



TINGKAT PENGEMBALIAN ASET



TINGKAT PENGEMBALIAN MODAL



RASIO PERTUMBUHAN

Indikator kinerja keuangan utama Perseroan tahun 2017 seperti pendapatan usaha, total aset, liabilitas dan ekuitas mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, meski pertumbuhan laba tahun berjalan dan laba komprehensif pertumbuhannya tidak sebesar tahun sebelumnya dikarenakan kenaikan beban usaha, pertumbuhannya masing-masing masih di atas 10%.

Rasio likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas piutang akan dibahas di bagian Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Pengukuran kemampuan membayar utang dilakukan dengan mengukur rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan melunasi kewajiban jangka pendek, sedangkan rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan memenuhi seluruh kewajiban. Pengukuran rasio likuiditas terdiri dari rasio kas dan rasio lancar. Berdasarkan hasil pengukuran, kemampuan Perseroan dalam melunasi kewajiban jangka pendek masih sangat baik meski menurun dibandingkan tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan.

TABEL RASIO LIKUIDITAS TAHUN 2017, 2016 DAN 2015 (dalam %)

RASIO LIKUIDITAS 1	2017	2016	2015	KENAIKAN/ PENURUNAN	
	2	3	4	5 = (2-3)	6 = (5:3)
Kas dan Setara Kas	1.694.156	1.534.252	2.346.889	159.904	10,42%
Jumlah Aset Lancar	6.038.931	5.296.363	5.102.888	742.568	14,02%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.715.530	3.109.266	2.695.688	606.264	19,50%
Rasio Lancar	162,53%	170,34%	189,30%	-0,08	-4,73%
Rasio Kas	45,60%	49,34%	87,06%	-0,04	-7,58%

Kondisi likuiditas Perseroan mengalami penurunan baik rasio lancar maupun rasio kas. Rasio kas dihitung dengan cara membandingkan kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan dengan jumlah liabilitas jangka pendeknya, sedangkan rasio lancar dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendeknya.

Pada tahun 2017, tingkat rasio lancar dan rasio kas mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 masing-masing menjadi sebesar 162,53% dan 45,60%. Namun, rasio lancar masih diatas 100% artinya perusahaan mampu melunasi kewajiban jangka pendek jika sumber pembayarannya berasal dari aset lancar. Dengan demikian, kemampuan membayar utang jangka pendek Perseroan masih sangat baik.

TABEL RASIO SOLVABILITAS TAHUN 2015, 2016 DAN 2017 (dalam %)

RASIO SOLVABILITAS 1	2017	2016	2015	KENAIKAN/PENURUNAN	
	2	3	4	5 = (2-3)	6 = (5:3)
Jumlah Liabilitas	4.770.677	3.738.507	3.435.724	1.032.170	27,61%
Jumlah Ekuitas	4.709.691	4.151.328	3.864.528	558.363	13,45%
Jumlah Aset	9.480.368	7.889.829	7.300.244	1.590.539	20,16%
Rasio Utang terhadap Aset	50,32%	47,38%	47,06%	0,03	6,20%
Rasio Utang terhadap Modal	101,29%	90,06%	88,90%	0,11	12,48%

Kondisi solvabilitas Perseroan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dapat diukur melalui rasio liabilitas terhadap aset (*debt to total asset ratio*) dengan cara membandingkan total liabilitas terhadap total asetnya dan rasio liabilitas terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*) dengan cara membandingkan jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitasnya.

Bila dibandingkan dengan tingkat solvabilitas tahun 2016 berarti terdapat peningkatan masing-masing menjadi sebesar 50,32% untuk rasio utang terhadap aset dan 101,29% untuk rasio utang terhadap modal pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan perusahaan mampu melunasi seluruh utang-utangnya dengan modal sendiri.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

TABEL KOLEKTIBILITAS PIUTANG (dalam jutaan Rupiah)

AKTIVITAS PIUTANG 1	2017 2	2016 3	2015 4	KENAIKAN/PENURUNAN	
				5 = (2-3)	6 = (5:3)
Piutang Usaha	1.221.166	1.008.109	813.951	213.057	21,13%
Pendapatan Usaha	6.355.757	5.000.360	3.969.614	1.355.397	27,11%
Lama Penagihan Rata-rata (hari)	70,13	73,59	74,84	(3,46)	-4,70%
Rasio Perputaran Piutang (kali)	5,20	4,96	4,88	0,24	4,84%

Untuk mengetahui periode waktu perputaran piutang Perseroan melakukan pengukuran tingkat kolektibilitas piutang. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat kolektibilitas piutang Perseroan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kolektibilitas piutang di tahun 2017 mencapai 70,13 hari, sedangkan di tahun 2016 mencapai 73,59 hari, mengalami percepatan sebanyak 3 (tiga) hari di tahun 2017.

Percepatan tersebut dikarenakan meningkatnya kontrak pekerjaan yang telah diselesaikan, namun Perseroan dapat meningkatkan rata-rata tertagihnya piutang. Selain itu, rasio perputaran piutang meningkat dari 4,96 kali menjadi 5,20 kali pada tahun 2017. Hal ini berarti kemampuan piutang dalam menghasilkan pendapatan usaha meningkat.

Berikut *aging* piutang retensi:

TABEL JUMLAH PIUTANG RETENSI BERDASARKAN UMUR (HARI)
(dalam jutaan Rupiah)

JUMLAH PIUTANG RETENSI BERDASARKAN UMUR (HARI)	2017 Rp	2016 Rp
< 12 Bulan	181.812	136.674
> 12 Bulan-24 Bulan	39.158	1.849
> 24 Bulan	15.245	14.890
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(19.249)	(14.890)
Jumlah-Bersih	216.966	138.523

STRUKTUR MODAL

Komposisi struktur modal tahun 2017 yang dimiliki oleh Perseroan adalah 50,32% berasal dari Liabilitas dan 49,68% berupa Ekuitas, komposisi ini mengalami perubahan jika dibandingkan dengan 2016. Komposisi struktur modal yang berasal dari Liabilitas mengalami peningkatan 6,21% sedangkan Ekuitas menurun 5,59% dibandingkan dengan komposisi liabilitas dan ekuitas tahun sebelumnya.

TABEL STRUKTUR MODAL TAHUN 2017, 2016 DAN 2015 (dalam jutaan Rupiah)

STRUKTUR MODAL	2017		2016		2015		KENAIKAN/ PENURUNAN	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	SELISIH	%
LIABILITAS	4.770.677	50,32%	3.738.501	47,38%	3.435.716	47,06%	1.032.176	27,61%
EKUITAS	4.709.691	49,68%	4.151.328	52,62%	3.864.528	52,94%	558.363	13,45%
ASET	9.480.368	100,00%	7.889.829	100,00%	7.300.244	100,00%	1.590.539	20,16%

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Perseroan memonitor modal dengan dasar rasio utang terhadap modal yang disesuaikan. Rasio ini dihitung sebagai berikut: utang neto dibagi jumlah ekuitas. Utang neto merupakan total utang (sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan setara kas.

Tujuan Perseroan dan entitas anak dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya serta untuk mengelola struktur modal yang optimal dan meminimalisasi biaya modal secara efektif.

Dalam rangka pengembangan usaha tahun 2017, Perseroan melakukan kebijakan struktur modal Perseroan pada akhir tahun 2017 adalah berupa penambahan liabilitas sebesar Rp1,03 triliun atau sebesar 27,61% dan penambahan pada ekuitas sebesar Rp558,36 miliar atau sebesar 13,45% yang berasal dari akumulasi saldo laba.

TABEL STRUKTUR MODAL TAHUN 2017, 2016 DAN 2015 (dalam jutaan Rupiah)

STRUKTUR MODAL	2017	2016	2015	KENAIKAN/ PENURUNAN	
				SELISIH	%
1	2	3	4	5 = (2-3)	6 = (5:3)
Permodalan					
Total Liabilitas	4.770.677	3.738.501	3.435.716	1.032.176	27,61%
Dikurangi:					
Kas dan Setara Kas	1.694.156	1.534.252	2.346.889	159.904	10,42%
Liabilitas Neto		2.204.249	1.088.827		
Total Ekuitas	4.709.691	4.151.328	3.864.528	558.363	13,45%
Rasio Liabilitas Neto terhadap Modal		0,53	0,28		

IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Hingga akhir tahun 2017, tidak terdapat ikatan material atas investasi barang modal, sehingga informasi terkait tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-langkah yang direncanakan untuk melindungi risiko posisi mata uang asing terkait tidak dapat disajikan dalam laporan tahunan ini.

INVESTASI BARANG MODAL

Investasi barang modal yang dilakukan Perseroan berupa aset tetap, yaitu:

No.	Investasi	Tujuan Investasi	Nilai Investasi Rp Juta
1	Tanah	Pendukung operasional	480.240
2	Gedung	Peningkatan fasilitas bangunan	101.077
3	Kendaraan Bermotor	Peningkatan kapasitas armada transportasi	17.626
4	Peralatan Proyek	Pendukung operasional	196.929
5	Peralatan Kantor	Pendukung operasional	30.920
6	Prasarana Umum	Peningkatan fasilitas bangunan	11.023
7	Aset Dalam Penyelesaian	Pendukung operasional	-
Jumlah			837.815

PERBANDINGAN ANTARA TARGET PADA AWAL TAHUN BUKU DENGAN HASIL YANG DICAPAI (REALISASI), DAN TARGET ATAU PROYEKSI YANG INGIN DICAPAI UNTUK SATU TAHUN MENDATANG

LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RKAP

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) Perseroan tahun 2017:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556).
4. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.
6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan dirubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012.
7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
8. Surat Menteri BUMN S-513/MBU/08/2016 tanggal 30 Agustus 2016, tentang Penyampaian Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2017.

PT PPA (KONSOLIDASIAN)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	REALISASI 2017 (Rp juta)	TARGET RKAP 2017 (Rp juta)	PENCAPAIAN	TARGET RKAP 2018 (Rp juta)
ASET				
Aset Lancar	6.038.931	4.058.024	148,81%	5.095.353
Aset Tidak Lancar	3.441.437	4.860.313	70,81%	5.634.976
JUMLAH ASET	9.480.368	8.918.337	106,30%	10.730.329
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek	3.715.530	2.467.873	150,56%	2.231.837
Liabilitas Jangka Panjang	1.055.147	2.081.750	50,69%	3.591.858
JUMLAH LIABILITAS	4.770.677	4.549.623	104,86%	5.823.696
EKUITAS	4.709.691	4.368.714	107,80%	4.906.633
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	9.480.368	8.918.337	106,30%	10.730.329

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

ASET

Perseroan mencatatkan realisasi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp9,48 triliun, tercapai 106,30% dari target RKAP Tahun 2017 sebesar Rp8,92 triliun, hal ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan pada kas dan setara kas sebesar Rp159,90 miliar, piutang usaha kepada pihak berelasi sebesar Rp56,56 miliar, piutang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp156,49 miliar, aset tetap sebesar Rp330,46 miliar, dan aset tidak lancar lainnya sebesar Rp310,82 miliar.

LIABILITAS

Perseroan mencatatkan realisasi jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp4,77 triliun, tercapai 104,86% dari target RKAP Tahun 2017 sebesar Rp4,55 triliun. Hal ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan pada utang usaha kepada pihak berelasi sebesar Rp69,98 miliar, utang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp190,85 miliar, pinjaman bank dan lembaga keuangan kepada pihak berelasi sebesar Rp268,52 miliar, pinjaman bank dan lembaga keuangan kepada pihak ketiga sebesar Rp152,77 miliar, pinjaman bank jangka panjang kepada pihak berelasi sebesar Rp79,52 miliar, dan pinjaman bank jangka panjang kepada pihak ketiga sebesar Rp344,60 miliar.

EKUITAS

Perseroan mencatatkan realisasi jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp9,48 triliun, tercapai 107,8% dari target RKAP Tahun 2017 sebesar Rp8,92 triliun. Hal ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan saldo laba sebesar Rp300,69 miliar dan kenaikan surplus revaluasi aset tetap sebesar Rp261,79 miliar.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN	REALISASI 2017 (Rp juta)	TARGET RKAP 2017 (Rp juta)	PENCAPAIAN	TARGET RKAP 2018 (Rp juta)
Pendapatan Usaha	6.355.757	6.314.731	100,65%	8.042.283
Beban Usaha	(5.782.914)	(5.839.661)	99,03%	(7.396.471)
Laba Usaha	572.843	475.040	120,59%	645.812
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	(239.913)	(161.629)	148,43%	(236.621)
Laba Sebelum Pajak	332.930	313.441	106,22%	409.191
Pajak Penghasilan	(6.445)	(13.398)	48,10%	(16.410)
Laba Tahun Berjalan	326.485	300.043	108,81%	392.780
Pendapatan Komprehensif Lain	501.936	-	N/A	-
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	577.453	300.043	192,46%	392.780

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN PENDAPATAN USAHA

Pada tahun 2017, pendapatan usaha terealisasi sebesar Rp6,36 triliun, tercapai 100,65% dari target RKAP Tahun 2017 sebesar Rp6,31 triliun, hal ini terutama dipengaruhi oleh pendapatan jasa konstruksi yang meningkat Rp1,21 triliun, serta pendapatan dari penjualan barang investasi dan pendapatan dari jasa pemetaan masing-masing sebesar Rp62,02 miliar dan Rp35,25 miliar.

LABA TAHUN BERJALAN

Pada tahun 2017, laba tahun berjalan terealisasi sebesar Rp326,49 miliar, tercapai 108,81% dari target RKAP Tahun 2017 sebesar Rp300,04 miliar, hal ini terutama dipengaruhi oleh naiknya pendapatan usaha.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN	REALISASI 2017 (Rp juta)	TARGET RKAP 2017 (Rp juta)	PENCAPAIAN	TARGET RKAP 2018 (Rp juta)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	-17.640	17.179	-102,68%	170.246
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	-946.654	(3.261.350)	29,03%	(2.479.284)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	1.124.198	2.759.023	40,75%	1.971.863
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	159.904	(485.148)	132,96%	(337.175)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	1.534.252	1.640.521	93,52%	1.223.532
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	1.694.156	1.155.373	146,63%	886.357

ARUS KAS

Pada tahun 2017, saldo akhir kas dan setara kas terealisasi sebesar Rp1,69 triliun, tercapai 146,63% dari target RKAP Tahun 2017 sebesar Rp1,16 triliun, hal ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan deposito berjangka yang merupakan bagian dari aktivitas pendanaan berupa penerimaan pinjaman untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi.

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN	REALISASI 2017	TARGET RKAP 2017	PENCAPAIAN	TARGET RKAP 2018
Aspek Keuangan	34	28	121,43%	32,5
Aspek Operasional	45	45	100%	45
Aspek Administrasi	15	15	100%	15
Total Skor	94	88	106,82%	92,5
Tingkat Kesehatan	Sehat (AA)	Sehat (AA)		Sehat (AA)

No	Key Performance Indicator	Realisasi 2017	Target (RKAP 2017)	Pencapaian	Target (RKAP 2018)
1	Keuangan dan Pasar				
1.1	Return on Equity (ROE)	6,93%	6,90%	100,43%	5,80%
1.2	Return on Asset (ROA)	3,44%	3,40%	101,18%	3,40%
1.3	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional	90,99%	92,50%	98,37%	92,00%
1.4	Yield in Investment (YOI)	12,10%	8,00%	151,25%	8,00%
1.5	Laba Bersih Anak Perusahaan PPAF dan PPAK	Negatif 37.029 juta	30.010 juta	-123,39%	
2	Fokus Pelanggan				
2.1	Indeks Kepuasan Pelanggan	3.43	3	114,33%	3
2.2	Indeks Kepuasan Mitra Strategis	4.75	3	158,33%	3
3	Efektivitas Produk dan Proses				
3.1	Realisasi Investasi dan/atau Jasa Advisory	11 Proyek	4 Proyek	275,00%	4 Proyek
3.2	Restrukturisasi Pinjaman R/R BUMN	100%	100%	100%	100%
4	Fokus Tenaga Kerja				
4.1	Produktivitas Tenaga Kerja (Rp juta)	1.765	1.622	108,82%	2,014
4.2	Indeks Kepuasan Karyawan (indeks)	3.59	3	119,67%	3
5	Kepemimpinan, Tatakelola & Tanggung Jawab Kemasyarakatan				
5.1	Score GCG (skor)	88,04	86	102,37%	86
5.2	Ketepatan Penyampaian Laporan Berkala Elektronik BUMN	100%	80%	125,00%	80%
5.3	Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan				

No	Key Performance Indicator	Realisasi 2017	Target (RKAP 2017)	Pencapaian	Target (RKAP 2018)
5.3.1	Efektivitas Penyaluran Program Kemitraan	83,79%	80%	104,74%	80%
5.3.2	Efektivitas Penyaluran Program Bina Lingkungan	99,63%	80%	124,54%	80%
5.3.3	Tingkat Kolektibilitas Program Kemitraan	99,74%	80%	124,68%	80%

ASPEK KEUANGAN	REALISASI 2017	TARGET RKAP 2017	PENCAPAIAN	TARGET RKAP 2018
Return on Equity (ROE)	6,9%	6,9%	100%	5,8%
Yield on Investment (YOI)	12,1%	8,0%	151,25%	8,0%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	91,0%	92,5%	98,38%	92,0%
Total Modal Sendiri terhadap Total Aset	49,7%	49%	101,43%	-

Berdasarkan kinerja 2017, hasil skor tingkat kesehatan Perseroan pada tahun 2017 tercapai 106,82% dibandingkan target, dan mengalami peningkatan dari tahun 2016 dengan skor 92,5.

Meskipun demikian, Perseroan tetap berupaya untuk meningkatkan kinerja di segala bidang usaha untuk tahun-tahun mendatang dan tetap optimis dalam menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif.

PROSPEK USAHA 2018

Perekonomian global pada tahun 2018 diproyeksikan mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2017. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di 2018 mencapai 3,7% lebih tinggi dari 2017 yang mencapai 3,6%. Pertumbuhan ekonomi global tersebut ditopang oleh meningkatnya volume perdagangan dunia dan peningkatan harga komoditas.

Pada konteks Nasional, Pemerintah dalam APBN 2018 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi domestik sebesar 5,4%, inflasi sebesar 3,5%, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp13.500 per dollar AS dan suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3% per tahun. Belanja rumah tangga menjadi kontributor utama pertumbuhan, disamping belanja Pemerintah dalam bidang infrastruktur masih terus digiatkan guna mendukung peningkatan daya saing dan konektivitas. Komitmen Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur akan terus mendorong pertumbuhan di sektor konstruksi, transportasi dan pergudangan. Sedangkan pada sektor keuangan diharapkan meningkat seiring dengan peningkatan arus dana dari implementasi kebijakan *tax amnesty*.

Dengan memperhatikan proyeksi kondisi perekonomian global maupun domestik tersebut di atas, Perseroan menghadapi kondisi yang lebih menantang untuk dapat mencapai target dan sasaran Perseroan di tahun 2018. Sebagaimana tahun 2017, Perseroan akan tetap menjalankan strategi pertumbuhan terutama melalui kegiatan investasi dan *advisory*, di samping tetap melaksanakan tugas

R/R BUMN serta pengelolaan aset eks BPPN. Dalam bidang investasi, Perseroan akan melanjutkan pengembangan investasi yang telah dilakukan antara lain pada sektor properti serta pembiayaan proyek, disamping juga tetap menginisiasi peluang investasi yang baru. Sedangkan pada bidang *advisory*, Perseroan berupaya untuk memperkuat posisinya dengan memanfaatkan akses Perseroan ke pasar. Dalam bidang pengelolaan aset eks BPPN, Perseroan melakukan pengelolaan aset saham Perusahaan milik Kementerian Keuangan dalam rangka mengoptimalkan pengembalian aset. Sedangkan dalam bidang R/R BUMN, Perseroan melakukan kegiatan penyelesaian R/R BUMN serta pengawasan terhadap pelaksanaan program R/R BUMN terkait.

Pengembangan Perseroan juga dilakukan pada entitas anak antara lain dengan melakukan pengembangan entitas anak pada bidang konstruksi dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintah dan entitas anak pada sektor keuangan melalui pembiayaan serta investasi.

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor jasa, maka Sumber Daya Manusia Perseroan merupakan aset utama Perseroan. Untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM Perseroan, maka pada 2018 Perseroan mencanangkan program pengembangan SDM yang komprehensif baik *hardskill* maupun *softskill* yang sesuai dengan kompetensi inti Perseroan.

ASPEK PEMASARAN

Sepanjang 2017, Perseroan dengan giat meluncurkan berbagai strategi pemasaran dengan cara menanamkan pemahaman publik akan kegiatan-kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan. Selain itu, Perseroan secara aktif menjalin hubungan dengan pihak-pihak potensial dalam rangka memperluas jangkauan pasar. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan aset, Perseroan selalu berusaha untuk memperluas akses sumber-sumber pendanaan termasuk membangun hubungan kerja sama yang strategis dengan BUMN, BUMD, Instansi Pemerintah dan Swasta untuk memperlancar kegiatan bisnis yang sudah dan akan dikembangkan oleh Perseroan.

Walaupun segmen pengelolaan aset adalah salah satu lini utama bisnis Perseroan, namun Perseroan juga selalu mengutamakan perkembangan segmen-segmen usaha lainnya seperti segmen konsultasi, kegiatan R/R, serta investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperkuat basis usaha Perseroan di masa mendatang. Oleh karena itu di tahun 2017, Perseroan telah berupaya melakukan beberapa strategi pemasaran untuk memajukan segmen-segmen usahanya, antara lain dengan meningkatkan *brand awareness* serta membangun hubungan dengan *potential customer*.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Perubahan Susunan Direksi

Berdasarkan keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan Nomor: SK-14/MBU/01/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Perubahan Nomenklatur, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset, yang dituangkan dalam Akta Nomor 33 Tanggal 12 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Desman, SH, MH di Jakarta, sebagaimana telah menerima surat penerimaan dan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AHA.01.03-0082216 Tanggal 26 Februari 2018, Menteri BUMN selaku RUPS mengangkat Bapak Nasrizal Nazir sebagai Direktur Investasi Perseroan.

Susunan Direksi Perseroan per tanggal 16 Januari 2018 menjadi sebagai berikut:

Direksi	
Direktur Utama	Henry Sihotang
Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen	Andi Saddawero
Direktur Investasi	Nasrizal Nazir
Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja	Ajar Setiadi

Pengalihan Kepemilikan Saham Investasi PT PPA Kapital

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pratama Persada Airborne No. 12 dan Berdasarkan SK Kemenkumham No.AHU-AH.01.03-0022536 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, pada tanggal 16 Januari 2018 terjadi pemindahan hak kepemilikan saham PT PPA Kapital atas PT Pratama Persada Airborne kepada PT Survai Udara Penas sejumlah 9.009 (sembilan ribu sembilan) saham dengan nilai nominal sebesar Rp9.009.000.000.

DIVIDEN

DIVIDEN	Tahun Buku		
	2016	2015	2014
Laba Bersih	114,48	170,96	281,27
Dividen Kas yang Dibagikan (Rp miliar)	11,00	10,22	19,09
Dividen per Lembar Saham (Rupiah penuh)	5.509	3.409	6.370
Payout Ratio	9,61%	5,98%	6,79%
Tanggal Pengumuman	19 Mei 2015	31 Mei 2016	18 Mei 2017
Tanggal Pembayaran	19 Juni 2015	30 Juni 2016	16 Juni 2017

Kebijakan Pembagian Dividen

Dasar kebijakan perusahaan mengenai pembagian dividen adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar masing-masing sebesar 2.996.688 lembar untuk periode 31 Desember 2017 dan 2016.

Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 18 Mei 2017 dan 31 Mei 2016, para pemegang saham memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp19.09 miliar dan Rp10.22 miliar.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN YANG DILAKSANAKAN PERUSAHAAN (ESOP/MSOP)

Perseroan belum memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen sampai dengan 31 Desember 2017, sehingga Laporan Tahunan tahun 2017 tidak menyajikan informasi terkait program tersebut, seperti informasi jumlah saham, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak karena tidak relevan.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan tidak mendaftarkan Perusahaan di pasar modal dan tidak melakukan penawaran umum saham kepada publik (*Initial Public Offering*) sampai dengan Laporan Tahunan tahun 2017 ini diterbitkan, sehingga informasi mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tidak relevan untuk disajikan pada Laporan Tahunan ini.

INFORMASI MATERIAL INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Sampai akhir tahun 2017, Perseroan tidak melakukan hal material terkait investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, dan restrukturisasi utang/modal.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Tabel Pihak Berelasi dan Sifat Hubungan

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Pihak-pihak Berelasi	Hubungan	Transaksi
PT BNI	Dikendalikan oleh Pemerintah RI	Kas dan Setara Kas & Pinjaman Bank
PT Bank Mandiri	Dikendalikan oleh Pemerintah RI	Kas dan Setara Kas
PT BRI	Dikendalikan oleh Pemerintah RI	Kas dan Setara Kas & Pinjaman Bank
PT BTN	Dikendalikan oleh Pemerintah RI	Kas dan Setara Kas & Pinjaman Bank
PT Boma Bisma Indra	Dikendalikan oleh Pemerintah RI	Aset Keuangan Diperdagangkan & Pinjaman Dana Talangan
PT Survai Udara Panas	Dikendalikan oleh Pemerintah RI	Aset Keuangan Diperdagangkan & Pinjaman Dana Talangan
PT Industri Sandang Nusantara	Dikendalikan oleh Pemerintah RI	Aset Keuangan Diperdagangkan & Pinjaman Dana Talangan

Pihak-pihak Berelasi	Hubungan	Transaksi
PT Istaka Karya	Dikendalikan oleh Pemerintah RI	Aset Keuangan Diperdagangkan
PT Kertas Kraft Aceh	Dikendalikan oleh Pemerintah RI	Pinjaman Dana Talangan & Pinjaman Restrukturisasi/Revitalisasi
PT Kertas Leces	Dikendalikan oleh Pemerintah RI	Pinjaman Dana Talangan
PT Artha Bangun Pratama	Dikendalikan oleh Pemerintah RI	Pinjaman Dana Talangan
PT Djakarta Lloyd	Dikendalikan oleh Pemerintah RI	Pinjaman Dana Talangan
PT Merpati Nusantara Airlines	Dikendalikan oleh Pemerintah RI	Pinjaman Dana Talangan & Pinjaman Restrukturisasi/Revitalisasi
PT Penataran Angkatan Laut Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah RI	Pinjaman Dana Talangan & Pinjaman Restrukturisasi/Revitalisasi
PT Dirgantara Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah RI	Pinjaman Restrukturisasi/Revitalisasi
PT Iglas	Dikendalikan oleh Pemerintah RI	Pinjaman Restrukturisasi/Revitalisasi
PT Industri Kapal Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah RI	Pinjaman Restrukturisasi/Revitalisasi
PT Sarana Multi Infrastruktur	Dikendalikan oleh Pemerintah RI	Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah RI	Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan
PT ASDP Indonesia Ferry	Dikendalikan oleh Pemerintah RI	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Uang Muka Jangka Pendek
PT Adhi Karya	Dikendalikan oleh Pemerintah RI	Piutang Usaha & Piutang Retensi
PT Angkasa Pura II	Dikendalikan oleh Pemerintah RI	Piutang Usaha & Tagihan Bruto
PT DOK & Perkapalan Surabaya	Dikendalikan oleh Pemerintah RI	Piutang Usaha
PT Pelindo II	Dikendalikan oleh Pemerintah RI	Piutang Retensi
PT Pelindo III	Dikendalikan oleh Pemerintah RI	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Uang Muka Jangka Pendek
PT Pertamina	Dikendalikan oleh Pemerintah RI	Tagihan Bruto
PT Bukit Asam	Dikendalikan oleh Pemerintah RI	Tagihan Bruto
PT Perusahaan Gas Negara	Dikendalikan oleh Pemerintah RI	Pinjaman Dana Talangan
PT Berdikari	Dikendalikan oleh Pemerintah RI	Pinjaman Dana Talangan
PT Pertani	Dikendalikan oleh Pemerintah RI	Pinjaman Investasi Jangka Pendek

Tabel Jumlah Transaksi Material dengan Pihak Berelasi

	2017 Rp	2016 Rp	2017 %	2016 %
Aset				
Kas dan Setara Kas	1.029.827	1.268.231	10,86%	16,07%
Piutang Usaha	358.623	174.564	3,78%	2,21%
Piutang Referensi	90.323	23.052	0,95%	0,29%
Pinjaman yang Diberikan-Dana Talangan	207.115	119.475	2,18%	1,51%
Tagihan Bruto	1.293.722	617.798	13,65%	7,83%
Pinjaman yang Diberikan-Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi	1.356.385	1.062.301	14,31%	13,46%
Liabilitas				
Utang Usaha	71.476	1.501	0,75%	0,02%

Tabel Jumlah Transaksi Material dengan Pihak Berelasi

	2017 Rp	2016 Rp	2017 %	2016 %
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan	691.769	307.694	7,30%	3,90%
Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Pendek	24.575	26.109	0,26%	0,33%
Pendapatan				
Pendapatan Usaha	121.939	91.039	1,92%	1,82%

Prosentase di atas merupakan perbandingan dengan total aset. Dari tabel di atas, transaksi kas dan setara kas, tagihan *bruto*, dan pinjaman yang diberikan untuk revitalisasi dan revitalisasi yang berada di atas 10% dari total aset di tahun 2017. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan kebijakan harga dan syarat normal, sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi.

Pihak-pihak berelasi adalah perusahaan dan perorangan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Pihak berelasi termasuk anak usaha, pemegang saham pengendali dan mayoritas, induk dari pemegang saham mayoritas, dan pemegang saham akhir.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi perusahaan terutama berhubungan dengan pinjam-meminjam dana dalam kegiatan normal usaha. Perseroan telah melakukan *review* atas transaksi dengan pihak-pihak berelasi dan menilai wajar transaksi-transaksi tersebut dan sejalan dengan tujuan perusahaan untuk mengelola aset negara.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

Sampai akhir tahun 2017, Perseroan tidak memiliki perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PERUSAHAAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) telah menerbitkan standar baru dan revisi atas standar akuntansi pada tahun 2017. Standar ini belum berlaku efektif untuk tahun 2017. Perubahan dan penyesuaian tersebut antara lain:

Efektif berlaku pada atau tanggal setelah tanggal 1 Januari 2017:

1. Amandemen PSAK No. 1 (Amandemen 2015): "Penyajian Laporan Keuangan"
2. PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016): "Laporan Keuangan Interim"
3. PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016): "Imbalan Kerja"
4. PSAK No. 58 (Penyesuaian 2016): "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan"

5. PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016): "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
6. ISAK No. 31: "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi"
7. ISAK No. 32: "Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan"

Efektif berlaku pada atau tanggal setelah tanggal 1 Januari 2018:

1. PSAK No. 16 (Amandemen 2015): "Aset Tetap"
2. PSAK No. 69: "Agrikultur"
3. PSAK No. 2 (Amandemen 2016): "Laporan Arus Kas"
4. PSAK No. 46 (Amandemen 2016): "Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi"
5. PSAK No. 13 (Amandemen 2017): "Properti Investasi"
6. PSAK No. 53 (Amandemen 2017): "Pembayaran Berbasis Saham."
7. PSAK No. 15 (Penyesuaian 2017): "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
8. PSAK No. 67 (Penyesuaian 2017): "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain".

Perusahaan telah mengevaluasi dampak dari standar akuntansi yang direvisi dan berlaku setelah tanggal 1 Januari 2017 tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian. Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

Untuk standar akuntansi yang berlaku setelah tanggal 1 Januari 2018, hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi, Grup masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru dan amandemen standar tersebut.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian tahun 2017 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI).

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Kondisi makro ekonomi, yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global dan domestik, secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak terhadap pelaksanaan bisnis Perseroan di 2017. Di samping hal tersebut, Perseroan juga menghadapi berbagai kendala yang berpotensi memberikan dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Di bidang R/R BUMN, Perseroan memiliki beberapa kendala, antara lain sebagai berikut:

1. Beberapa BUMN yang akan disehatkan telah berhenti beroperasi,
2. Pada umumnya BUMN yang akan disehatkan dalam kondisi *non-bankable* dan adanya keterbatasan pendanaan Perseroan untuk menjembatani program R/R (dana talangan) dan
3. Beberapa BUMN yang disehatkan masuk dalam koridor kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta munculnya beberapa isu perburuhan.

Dibidang investasi, sumber pendanaan menjadi salah satu faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan sebuah investasi. Dibidang *advisory*, perusahaan jasa konsultasi yang telah lebih dahulu berdiri merupakan tantangan bagi Perseroan untuk memperluas jangkauan pasar. Sedangkan dibidang jasa pengelolaan aset eks BPPN, jumlah dan nilai aset yang diserahkan ke Perseroan semakin menurun seiring dengan pelaksanaan tugas yang telah diselesaikan dengan baik oleh Perseroan.

Perseroan optimis bahwa kelangsungan seluruh segmen usaha akan berjalan dengan baik seiring dengan penerapan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2018-2022 yang bertujuan untuk menjadikan Perseroan sebagai perusahaan investasi dan restrukturisasi perusahaan. Rencana Jangka Panjang yang berlangsung selama lima tahun tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu: Konsolidasi (2018), *Rapid Growth* (2019-2021) dan *Sustainable* (2022). Sejauh ini, manajemen menilai bahwa Perseroan telah berhasil melakukan transformasi sesuai Rencana Jangka Panjang 2015-2019 Perseroan. Oleh karena

itu, kelangsungan usaha Perseroan dimasa yang akan datang diyakini akan menjadi lebih baik lagi dengan semakin meningkatnya kinerja Perseroan melalui penggunaan potensi usaha yang optimal dan manajemen risiko yang terukur.

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

Membayar pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Bentuk komitmen Perseroan kepada Negara diwujudkan dalam pemenuhan kewajiban Perseroan sebagai Wajib Pajak dan sebagai Pemotong Pajak. Kontribusi ini terus meningkat seiring dengan pertumbuhan Perseroan.

Jumlah kewajiban pajak Perseroan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp55,32 miliar, meningkat Rp17,30 miliar atau 45,49% dibandingkan tahun sebelumnya.

Uraian	2017	2016
Utang Pajak		
Perusahaan		
PPh Pasal 4 (2)	16	15
PPh Pasal 21	3.624	1
PPh Pasal 22	187	894
PPh Pasal 23	923	78
	4750	988
Entitas Anak		
PPh Pasal 4 (2)	10.738	22.582
PPh Pasal 21	4.987	3.741
PPh Pasal 22	5.129	-
PPh Pasal 23	2.802	8.222
PPh Pasal 25	517	354
PPh Pasal 29	2.423	2.136
Pajak Pertambahan	23.975	-
Nilai	50.570	37.035
Jumlah	55.320	38.023

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan atas Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2017 yang tertuang dalam risalah rapat tanggal 20 Januari 2017, telah ditentukan indikator dari 3 (tiga) aspek yaitu:

Aspek Keuangan

No	Keterangan	Target (RKAP 2017)	Bobot	Pencapaian	Skor
1	Aspek Keuangan				
1.1	Return On Equity (ROE)	6,9%	8	6,93%	7
1.2	Yield on Investment (YOI)	8,0%	12	12,1%	12
1.3	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional	92,5%	10	90,9%	8
1.4	Total Modal Sendiri terhadap Total Aset	49%	10	49,7%	7
Jumlah Aspek Keuangan			40		34

Aspek Operasional

No	Keterangan	Target (RKAP 2017)	Bobot	Pencapaian	Skor
2	Aspek Operasional				
2.1	Penyelesaian Kajian RR/Penugasan Khusus	100%	10	100%	10
2.2	Number of new services/products	4 Proyek	15	11 Proyek	15
2.3	Realisasi program kerja pengelolaan aset eks BPPN sesuai Perjanjian Pengelolaan Aset	100%	10	100%	10
2.4	Produktivitas Tenaga Kerja (Rp Juta)	1.622	10	1.765	10
Jumlah Aspek Operasional			45		45

Aspek Administrasi

No	Keterangan	Target (RKAP 2017)	Bobot	Pencapaian	Skor
3	Aspek Administrasi				
3.1	Penyampaian Laporan Perhitungan Tahunan	31/5/2017	3	23/2/2017	3
3.2	Penyampaian Rancangan RKAP	31/10/2017	3	30/10/2017	3
3.3	Penyampaian Laporan Manajemen Triwulan	<30 Hari	3	< 30 hari	3
3.4	Kinerja PKBL (Efektivitas Penyaluran PK)	> 80 %	2	83,79%	2
3.5	Kinerja PKBL (Efektivitas Penyaluran BL)	> 80 %	2	99,63%	2
3.6	Kinerja PKBL (Tingkat Kolektibilitas PK)	> 80 %	2	99,74%	2
Jumlah Aspek Administrasi			15		15

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002, dengan jumlah skor sebesar 94, maka Perseroan adalah BUMN "Sehat" dengan klasifikasi kesehatan "AA".

Key Performance Indicators (KPI)

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017 dan Kontrak Manajemen Perseroan yang telah ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan atas Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017 yang tertuang dalam risalah rapat tanggal 20 Januari 2017 telah ditentukan indikator dari *Key Performance Indicators* (KPI), yaitu sebagai berikut:

Aspek Keuangan dan Pasar

No	Keterangan	Target (RKAP 2017)	Bobot	Pencapaian	Skor
1	Keuangan				
1.1	Return On Equity (ROE)	6,9%	6	6,93%	6,03
1.2	Return on Asset (ROA)	3,4%	6	3,44%	6,08
1.3	BOPO	92,5%	5	90,99%	5,08
1.4	Yield on Investment (YOI)	8,0%	5	12,1%	6,00
1.5	Laba Bersih Anak Perusahaan (PPAF dan PPAK)	30.010 juta	2	37.029 juta	0,00
Jumlah			24		23,19

Aspek Fokus Pelanggan

No	Keterangan	Target (RKAP 2017)	Bobot	Pencapaian	Skor
2	Fokus Pelanggan				
2.1	Indeks Kepuasan Pelanggan	3	8	3,43	8,4
2.2	Indeks Kepuasan Mitra Strategis	3	8	4,75	8,4
Jumlah			16		16,8

Aspek Efektivitas Produk dan Proses

No	Keterangan	Target (RKAP 2017)	Bobot	Pencapaian	Skor
3	Efektivitas Produk & Proses				
3.1	Number of new services/products	4 Proyek	20	11 Proyek	21
3.2	Penyelesaian Kajian Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi/ Penugasan Khusus	100%	10	100%	10
Jumlah			30		31

Aspek Fokus Tenaga Kerja

No	Keterangan	Target (RKAP 2017)	Bobot	Pencapaian	Skor
4	Fokus Tenaga Kerja				
4.1	Produktivitas Tenaga Kerja (Rp juta)	1.622	10	1.765	10,5
4.2	Indeks Kepuasan Karyawan (indeks)	3	5	3,59	5,25
	Jumlah		15		15,75

Aspek Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan

No	Keterangan	Target (RKAP 2017)	Bobot	Pencapaian	Skor
5	Kepemimpinan, Tata Kelola & Tanggung Jawab Kemasyarakatan				
5.1	Score GCG (skor)	86	5	88,04	5,12
5.2	Ketepatan Penyampaian Laporan Berkala elektronik BUMN	80%	4	100%	4,20
5.3	Pelaksanaan PKBL				
5.3.1	Efektivitas Penyaluran Program Kemitraan	80%	2	83,79%	2,09
5.3.2	Efektivitas Penyaluran Program Bina Lingkungan	80%	2	99,63%	2,10
5.3.3	Tingkat Kolektibilitas Program Kemitraan	80%	2	99,74%	2,10
	Jumlah		15		15,61

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017 dan Kontrak Manajemen Perseroan yang telah ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan atas Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017 yang tertuang dalam risalah rapat tanggal 20 Januari 2017, *Key Performance Indicators* (KPI) Perseroan mendapat jumlah skor sebesar 102,35.





06

TATA KELOLA PERUSAHAAN

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan implementasi Tata Kelola Perusahaan, Perseroan telah melakukan pengembangan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) untuk tahun 2017 dengan menindaklanjuti hasil rekomendasi asesmen yang telah dilakukan secara internal (*self assessment*) oleh Perseroan pada tahun 2016.

Selain itu, Perseroan juga meningkatkan internalisasi GCG secara lebih intensif kepada seluruh karyawan dengan melakukan sosialisasi internalisasi budaya Perseroan serta melakukan asesmen sebagai bentuk pengukuran penerapan GCG di tahun buku 2017.

Tujuan Penerapan GCG

Dalam menjalankan tata kelola perusahaan, Perseroan senantiasa berkomitmen dan mengacu pada prinsip GCG yang terukur dan akuntabel. Perseroan meyakini bahwa dengan mengimplementasikan GCG akan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan bisnis dan memberi nilai tambah pada kinerja Perseroan yang berdaya saing serta berkelanjutan. Filosofi dalam menjalankan bisnis ini menjadi latar belakang yang kuat bagi Perseroan untuk menetapkan tujuan dalam menerapkan prinsip GCG.

Tujuan penerapan GCG bagi Perseroan, antara lain:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan Perseroan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan;
2. Membangun mekanisme *Check and Balances* antar organ Perseroan serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja Perseroan dan komunikasi antar organ Perseroan dan pemangku kepentingan lainnya;

3. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta citra dan reputasi Perseroan, sehingga mampu mendorong peningkatan hubungan bisnis dan kinerja Perseroan;
4. Memaksimalkan nilai Perseroan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar Perseroan memiliki daya saing yang kuat;
5. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perseroan;
6. Mendorong agar organ Perseroan dapat membuat keputusan dan menjalankan tindakan yang dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan khususnya di sekitar Perseroan;
7. Memberikan kontribusi dalam perekonomian nasional yang dapat dicapai melalui R/R BUMN, pengelolaan aset eks BPPN dan aset BUMN, serta kegiatan investasi; dan
8. Membantu meningkatkan iklim investasi nasional melalui program/kegiatan yang dilaksanakan.

Dasar Hukum

Perseroan memiliki komitmen penuh dan secara konsisten menegakkan penerapan prinsip GCG dengan mengacu kepada beberapa aturan formal yang menjadi landasan bagi Perseroan dalam penerapan prinsip GCG, yaitu:

1. Undang Undang Republik Indonesia, di antaranya adalah:
 - a. Undang Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Undang Undang Republik Indonesia No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No.25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - c. Undang Undang Republik Indonesia No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
 - d. Undang Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - e. Undang Undang Republik Indonesia No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
 - f. Undang Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, di antaranya adalah:
- a. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara.
 - b. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-05/MBU/2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Badan Usaha Milik Negara, dengan perubahan terakhir yaitu No.PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012.
 - c. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara.
 - d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
 - e. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara.
 - f. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
 - g. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara dengan perubahan terakhirnya yaitu Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
 - h. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan lainnya

Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN

Kebijakan dan Struktur Tata Kelola Perusahaan

Perseroan menyadari bahwa untuk membangun GCG yang berdampak pada Perseroan tidak hanya cukup

dengan memiliki infrastruktur yang representatif, tetapi juga harus dilengkapi dengan *soft-structure* yang memadai dalam mengoperasikan kegiatan usahanya. *Soft-structure* bagi Perseroan adalah suatu landasan yang mengatur Perseroan dalam membentuk kebijakan atau menyusun peraturan Perseroan. Kebijakan juga harus dipahami sebagai petunjuk dalam menjalankan perusahaan yang tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di industri di mana perusahaan menjalani usahanya.

Perseroan telah memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance Code*), Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*), Pedoman Kerja/Piagam (*Charter*) untuk organ Perseroan, baik Direksi maupun Dewan Komisaris serta organ-organ Penunjang Dewan Komisaris Perseroan. Dengan demikian, penerapan prinsip GCG akan memberikan dampak yang signifikan dalam jangka panjang, jika sudah menjadi budaya yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance Code/ GCG Code*)

Pada 31 Januari 2017, Direksi dan Dewan Komisaris telah menandatangani GCG Code sebagai bagian dari *GCG Manual*. GCG Code dirancang untuk memberikan acuan bagi penerapan prinsip GCG di lingkungan Perseroan agar tugas dan kewenangan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham serta mekanisme yang meliputi antara organ-organ penunjang tersebut dapat berjalan efisien, efektif, dan konsisten. Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kemandirian serta kesetaraan) dalam setiap aktivitas bisnis, sehingga diharapkan terjadi keselarasan dalam mencapai Visi, Misi, dan target Perseroan.

GCG Code Perseroan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Latar belakang penerapan prinsip GCG memiliki maksud dan tujuan yang tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku sebagai dasar hukumnya;
2. Visi, Misi, Nilai-nilai perusahaan, dan Kebijakan yang berlaku dalam Perseroan memiliki hubungan yang saling terkait dan menunjang kegiatan bisnis Perseroan;
3. Prinsip-prinsip GCG senantiasa menjadi perspektif dalam setiap pembuatan kebijakan dan implementasinya. Artinya setiap kebijakan yang disusun dan kemudian diimplementasikan harus tetap memperhatikan unsur transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan;
4. Organ-organ Perseroan seperti Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi menjalankan fungsinya, saling berinteraksi dalam pola hubungan yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip GCG;
5. Pedoman disusun bertujuan untuk mendukung kinerja organ Perseroan. Pedoman yang dimaksud meliputi pedoman yang ada dari sisi Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan GCG, dan Sekretaris Dewan Komisaris. Sementara dari sisi Direksi, yaitu Internal Audit, Sekretaris Perusahaan, Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, Tata Kelola Teknologi Informasi, dan Auditor Eksternal;
6. Informasi dikelola baik dari sisi akses, kerahasiaan maupun keterbukaannya;
7. Perseroan wajib memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perseroan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja;
8. Perseroan membina dan menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan seperti dengan Karyawan, Instansi Pemerintah Terkait, BUMN lain, Kreditur, Rekanan, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lain;
9. Perseroan mengelola perilaku usaha yang mengedepankan nilai-nilai etika bisnis dan persaingan usaha yang sehat antara lain menghindari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mengatur kegiatan donasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan; dan

10. Perseroan senantiasa melakukan pengukuran terhadap penerapan prinsip GCG berdasarkan hasil penilaian (*assessment*) dan evaluasi (*review*) secara berkala agar terjadi proses perbaikan (*improvement*) dalam menjalankan bisnisnya.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab I Mengenai Ketentuan Umum Pasal 1, Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

1. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.
2. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Implementasi GCG Perseroan mengacu pada optimalisasi peran dan hubungan antara Organ Perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam perkembangannya, ketiga organ tersebut membutuhkan dukungan dari infrastruktur tambahan tata kelola Perusahaan baik berupa sistem/mekanisme (*softstructure*) maupun unit kerja (*hardstructure*). Pelaksanaan GCG Perseroan tentunya mengacu pada ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan lainnya atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan.

RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris saling menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam menjalankan tugas pengelolaan Perseroan, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan Internal Audit serta satuan kerja lain yang menjalankan fungsi pengelolaan Perseroan.

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite-komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris Perseroan adalah:

1. Komite Audit
Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, yang membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan kewajibannya dalam mengkaji efektivitas sistem pengendalian internal, efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal, serta dalam mengkaji dan memberikan persetujuan semua informasi dan usulan yang disiapkan dan diajukan pihak lainnya, seperti Laporan Keuangan, Laporan Manajemen, Laporan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara, dan Laporan Tahunan Perseroan.
2. Komite Pemantau Risiko dan GCG
Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk memantau secara berkala dan merekomendasikan perbaikan terhadap implementasi GCG dan manajemen risiko yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh Perseroan.

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Mekanisme tata kelola merupakan mekanisme implementasi GCG yang tercermin dalam sistem yang kuat. Hal ini menjadi penting, karena implementasi GCG tidak cukup hanya dengan mengandalkan pilar struktur pemerintahan, melainkan dibutuhkan adanya peraturan yang jelas dalam bentuk mekanisme.

Mekanisme tata kelola dapat diartikan sebagai aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol (pengawasan) terhadap keputusan tersebut.

Mekanisme tata kelola yang dimiliki Perseroan antara lain:

- **Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

Penyusunan pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik ditujukan untuk memberikan acuan bagi penerapan prinsip GCG di lingkungan Perseroan agar tugas organ-organ utama GCG seperti RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi serta mekanisme kerja diantara ketiga organ dapat berjalan dengan efisien, efektif dan konsisten serta tetap memperhatikan prinsip-prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kemandirian serta kesetaraan).

- **Board Manual**

Penyusunan *Board Manual* bertujuan agar tugas dan kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris serta mekanisme kerja diantara kedua organ dapat berjalan dengan efisien, efektif dan konsisten serta tetap memperhatikan prinsip-prinsip GCG.

- **Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct)**

Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) disusun berdasarkan pertimbangan bahwa dalam mengelola Perseroan selain harus mengikuti peraturan perundang-undangan harus pula menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) juga menjadi standar minimal yang harus dipatuhi oleh Insan Perseroan dalam menjalankan tugas sehari-hari.

- **Piagam (Charter) Komite di bawah Dewan Komisaris**

Piagam (*Charter*) Komite di Bawah Dewan Komisaris bertujuan untuk memberikan arahan kepada organ Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dan GCG dalam pelaksanaan tugas sebagai organ pendukung Dewan Komisaris. Karakteristik Piagam Komite ini bersifat fleksibel dan dilakukan sesuai kebutuhan.

- **Piagam (Charter) Internal Audit**

Piagam (*Charter*) Internal Audit memiliki peran untuk meningkatkan fungsi pengendalian yang terintegrasi di lingkup Perseroan dan memastikan kegiatan operasional telah dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan main yang berlaku.

Asesmen Penerapan Prinsip GCG

Perseroan secara berkala melakukan pengukuran atas penerapan prinsip GCG. Melalui proses pengukuran tersebut, Perseroan memiliki tujuan untuk:

- Menguji dan menilai penerapan prinsip GCG melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan perbandingan dengan indikator dan parameter pengujian yang telah ditentukan.
- Memberikan gambaran hasil pengukuran melalui pemberian nilai atas penerapan prinsip GCG, berikut rekomendasi perbaikan yang diusulkan, guna mengurangi kesenjangan antara tataran praktik dengan indikator dan parameter pengujian.
- Memantau konsistensi penerapan prinsip GCG di lingkungan organisasi Perseroan, serta untuk memperoleh masukan demi penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG.
- Mendorong pengelolaan Perseroan yang semakin profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perseroan.

Pada tahun 2017 Perseroan telah melakukan asesmen penerapan prinsip GCG yang dilakukan oleh asesor independen (PT Icon Global Solusi) dengan menggunakan kriteria dan metodologi yang ditetapkan oleh Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S-MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara tanggal 6 Juni 2012, yang bertujuan untuk menilai penerapan Tata Kelola Perusahaan di Perseroan dengan kajian yang meliputi 6 (enam) aspek pokok dengan total nilai yang diperoleh oleh Perseroan adalah sebesar 88,04 dari total nilai maksimal yaitu sebesar 100 yang setara dengan 88,04 % atau mencapai kualifikasi "Sangat Baik". Penjabaran pencapaian nilai tersebut adalah sebagai berikut:

NO	ASPEK PENGUJIAN/ INDIKATOR/PARAMETER	BOBOT	CAPAIAN TAHUN 2017		PENJELASAN
			SKOR	% CAPAIAN	
1	Komitmen terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan	7,00	6,8099	97,10%	Sangat Baik
2	Pemegang Saham	9,00	8,3798	93,11%	Sangat Baik
3	Dewan Komisaris	35,00	32,1671	91,91%	Sangat Baik
4	Direksi	35,00	31,7288	90,65%	Sangat Baik
5	Pengungkapan informasi dan transparansi	9,00	6,4522	71,72%	Cukup Baik
6	Aspek lainnya	5,00	2,5000	50%	Kurang Baik
SKOR KESELURUHAN		100,00	88,0410	88,04%	
KLASIFIKASI KUALITAS PENERAPAN GCG				Sangat Baik	

Perolehan skor asesmen penerapan prinsip GCG 2017 jika dibandingkan dengan hasil asesmen yang dilakukan pada tahun 2016, mengalami peningkatan poin. Skor asesmen penerapan prinsip GCG Perseroan senantiasa mengalami peningkatan yang mencerminkan adanya upaya perbaikan serta evaluasi terhadap penerapan GCG di lingkungan Perseroan. Adapun hasil asesmen penerapan prinsip GCG pada tahun-tahun sebelumnya dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tahun	Skor Asesmen GCG	Company Corporate Governance Scorecard (CCGS) yang digunakan	Pelaksana
2007	81,85	Menggunakan indikator parameter <i>assessment</i> berdasarkan Surat Kementerian Negara BUMN No.S-612/S.MBU/2005 tanggal 19 Oktober 2005.	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
2013	78,03	Menggunakan indikator parameter <i>assessment</i> berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012.	PT Kharisma Insani Manajemen (Independen)
2014	81,73	Menggunakan indikator parameter <i>assessment</i> berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012.	<i>Self Assessment</i>
2015	85,96	Menggunakan indikator parameter <i>assessment</i> berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012.	PT Sinergi Daya Prima (Independen)
2016	87,47	Menggunakan indikator parameter <i>assessment</i> berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012.	<i>Self Assessment</i>
2017	88,04	Menggunakan indikator parameter <i>assessment</i> berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012.	PT Icon Global Solusi (Independen)

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Sebagai salah satu organ Perseroan, RUPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Wewenang RUPS

Wewenang RUPS yang dimaksud, antara lain:

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat dalam RUPS harus terdiri dari orang-orang yang patut dan layak (*fit and proper*) bagi Perseroan;
2. Menetapkan pembatasan kewenangan Direksi berdasarkan jumlah dan/atau jangka waktu atas kegiatan-kegiatan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
3. Berdasarkan usulan/permintaan Direksi, RUPS dapat menyetujui pengalihan lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan sebagai jaminan hutang;
4. Mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar;
5. Menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi;
6. Menyetujui laporan tahunan dan penggunaan laba bersih Perseroan dalam RUPST;

7. Menyetujui RKAP serta RJPP; dan
8. Menetapkan auditor eksternal dengan mempertimbangkan pendapat Komite Audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris

Kewenangan tersebut harus dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang.

Hak Pemegang Saham

Dalam paradigma penerapan GCG, kapasitas Pemegang Saham tidak hanya sebatas pada aspek permodalan semata, Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dibekali beberapa hak sebagai wujud timbal-balik kepentingan. Ruang lingkup hak Pemegang Saham terdiri atas penerimaan manfaat permodalan, pengawasan atas jalannya kegiatan operasional yang dilakukan oleh Direksi serta hak-hak lainnya.

Ketentuan pemberian hak-hak utama Pemegang Saham Perseroan dijelaskan dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdiri dari:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.
2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan dari hasil likuidasi.
3. Menjalankan hak-hak lainnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Akses informasi kepada Pemegang Saham

Perseroan memberikan jaminan terhadap akses informasi yang setara kepada seluruh Pemegang Saham. Akses yang dimiliki oleh Perseroan agar mudah dijangkau oleh Pemegang Saham Perseroan antara lain:

1. Laporan Keuangan Tahunan *Audited*;
2. Laporan Tahunan Perseroan;
3. Laporan Manajemen Perseroan yang disampaikan setiap triwulan; dan
4. Publikasi laporan kegiatan Perseroan melalui media massa dan *website* Perseroan.

Kebijakan Hubungan dengan Pemegang Saham

Kepemilikan saham Perseroan 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara, kebijakan hubungan antara Perseroan dengan Pemegang Saham diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan tata aturannya tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham Perseroan adalah Negara Republik Indonesia dengan prosentase kepemilikan saham 100%.

Program Kepemilikan Saham Bagi Manajemen dan Karyawan

Perseroan belum memiliki kebijakan mengenai kepemilikan saham bagi manajemen maupun karyawan Perseroan karena alokasi saham Perseroan saat ini 100% dikuasai oleh Negara Republik Indonesia.

Penyelenggaraan RUPS, Pemberitahuan RUPS dan Catatan yang Termuat dalam Surat Pemanggilan RUPST/RUPSLB

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan RUPS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Semua RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS tersebut maka RUPS dapat diadakan dimanapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
3. RUPS dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat;
4. Direksi menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB dengan didahului pemanggilan RUPS;
5. Penyelenggaraan RUPS dapat pula dilakukan atas permintaan: a) seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah; atau b) Dewan Komisaris;
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya;
7. Surat tercatat yang dimaksud disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris;
8. Alasan permintaan penyelenggaraan RUPS, antara lain namun tidak terbatas pada: a) Direksi tidak melaksanakan RUPST sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b) masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir; atau c) dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan;
9. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;
10. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka: a) permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau b) Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS;
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;

12. RUPS yang diselenggarakan Direksi hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan terkait dari Direksi dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi;
13. RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan terkait dari Dewan Komisaris;
14. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu masing-masing 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS, Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat melakukan pemanggilan sendiri RUPS setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;
15. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;
16. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar;
17. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;
18. Perseroan wajib memberikan salinan bahan RUPS kepada Pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta; dan
19. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu dan isi dalam media penyampaian yang dimaksud, dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan, keputusan RUPS tetap sah jika semua Pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

RUPS RKAP Tahun Buku 2017

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 17 RUPS RKAP diselenggarakan untuk membahas sekurang-kurangnya misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan Perseroan, program kerja, anggaran Perusahaan, proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaan serta hal-hal lain yang membutuhkan persetujuan dalam RUPS. Perseroan menyelenggarakan RUPS RKAP tahun buku 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Pelaksanaan RUPS	Mata Acara Agenda	Keputusan
Jumat, 20 Januari 2017	Keputusan tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017 serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2017	A. Rapat menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2017, termasuk didalamnya Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris, dengan pokok-pokok sebagai berikut: 1. Perhitungan Laba (Rugi) Laba Bersih Konsolidasian PT PPA (Persero) Tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp300.043 Juta 2. Proyeksi Neraca Neraca Konsolidasian PT PPA (Persero) per 31 Desember 2017 ditargetkan ditutup dengan Total Aset sebesar Rp8.918.337 Juta 3. Arus Kas B. Rapat menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) tahun 2017 sesuai dengan Hasil Telaahan RKA-PKBL PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Nomor: RIS-35/D7.MBU.3/12/2016.
	Keputusan tentang Persetujuan Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Tahun 2017 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Rapat menyetujui Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan tahun 2017 PT PPA (Persero) sebagaimana diajukan dalam RUPS dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan RUPS ini.
	Key Performance Indicators (KPI) yang Tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2017 antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dengan Pemegang Saham	Keputusan tentang Persetujuan dan Pengesahan Rapat menyetujui dan mengesahkan Key Performance Indicators (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2017 antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dengan Pemegang Saham sebagaimana diajukan dalam RUPS dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan RUPS ini.
	Keputusan tentang Persetujuan dan Pengesahan Key Performance Indicators (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2017	Rapat menyetujui dan mengesahkan Key Performance Indicators (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2017 sebagaimana diajukan dalam RUPS dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan RUPS ini.
	Persetujuan Penambahan Setoran Modal dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) kepada Anak Perusahaan, yaitu kepada PT PPA Kapital sebesar Rp75 Miliar dan kepada PT PPA Finance sebesar Rp50 Miliar.	a. Menyetujui penambahan setoran modal dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) kepada anak perusahaan, yaitu kepada PT PPA Kapital sebesar Rp75 Miliar dan kepada PT PPA Finance sebesar Rp50 Miliar. b. Pelaksanaan tambahan setoran modal agar dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta memperhatikan ketentuan yang berlaku di prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

RUPS Kinerja Tahun Buku 2016

RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2016 ("RUPS Tahunan 2016")

Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan 2016 berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 18, untuk melaporkan Laporan Tahunan Perusahaan kepada Pemegang Saham meliputi laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan kegiatan Perusahaan, gaji, tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Agenda dan keputusan RUPS Tahunan 2016 adalah Kinerja Perseroan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2017 adalah sebagai berikut:

Mata Acara Agenda	Keputusan
Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2016 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2016.	Rapat menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2016 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2016.
Pengesahan atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et decharge</i>) kepada Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang menjabat atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2016.	A. Mengesahkan: - Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai laporan No. R/060.AGA/ sat.2/2017 tanggal 22 Februari 2017 dengan pendapat bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT PPA (Persero) dan entitas anak tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. - Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai dengan laporannya No. R/061.AGA/ sat.2/2017 tanggal 22 Februari 2017, dengan pendapat bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT PPA (Persero) tanggal 31 Desember 2016, serta aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. B. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et decharge</i>) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, serta terhadap pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL serta tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2016.	Rapat menyetujui penetapan penggunaan laba yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2016 sebesar Rp279.466 juta sebagai berikut: - Dividen Tunai sebesar Rp19.089 juta. - Cadangan Umum sebesar Rp13.973 juta. - Laba Ditahan sebesar Rp246.404 juta.
Penetapan Tantiem dan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Rapat menyetujui tantiem atas kinerja tahun buku 2016 dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2017 ditetapkan kemudian secara tersendiri.
Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2017.	Rapat Menyetujui: - Penunjukan dan penetapan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagai auditor Laporan Keuangan tahun buku 2017 dan juga sebagai auditor Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2017, serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menindaklanjuti penetapan tersebut (termasuk negosiasi imbalan jasa/fee) sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. - Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf Aryanto, Mawar & Rekan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.
Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN 2015 Periode Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2016.	Rapat menyetujui Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN 2015 Periode Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2016.

Informasi mengenai RUPS Tahun Sebelumnya

Secara berkelanjutan Perseroan memantau tindak lanjut dan status realisasi dari keputusan serta arahan RUPS dan secara periodik dilaporkan ke Pemegang Saham. Tindak lanjut atas keputusan dan arahan dan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Hasil Keputusan dan Arahan RUPS	Realisasi Tindak Lanjut Keputusan dan Arahan RUPS	Status
RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2015	5 (lima) agenda dan 5 (lima) keputusan dan arahan selesai ditindaklanjuti	100%

Sampai dengan 2017, keputusan dan arahan Pemegang Saham untuk RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2016 telah selesai ditindaklanjuti dengan realisasinya sebesar 100% dan telah dilaporkan kepada Pemegang Saham.

DEWAN KOMISARIS

Perseroan memiliki Dewan Komisaris sebagai Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan. Selain itu, Dewan Komisaris juga memantau secara berkelanjutan efektivitas penerapan praktik GCG di Perseroan. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sesuai dengan *Board Manual* yang mengatur hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dan GCG

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan melalui proses yang transparan.

- Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
- Sehat jasmani dan rohani, tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah.

Proses Pengangkatan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan diangkat berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham Pengendali. Calon Anggota Dewan Komisaris harus melalui beberapa tahapan seleksi sebelum diusulkan Pemegang Saham dalam RUPS.

Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Dewan Komisaris

Seluruh calon anggota Dewan Komisaris Perseroan wajib lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Pemegang Saham sebelum diangkat menjadi Dewan Komisaris Perseroan. Berikut Tabel Status Uji Kelayakan dan Kepatutan Dewan Komisaris pada 2017:

Tabel Uji Kelayakan dan Kepatutan Dewan Komisaris

Nama	Domisili	Status	Pelaksana <i>Fit & Proper Test</i>
Edy Putra Irawady	Jakarta	Lulus 2016	Kementerian BUMN
Taufik Sukasah	Jakarta	Lulus 2013	Kementerian BUMN
Dedi Rudaedi	Jakarta	Lulus 2013	Kementerian BUMN
Hendrika Nora Oslo Sinaga *)	Jakarta	Lulus 2014	Kementerian BUMN
Tirta Hidayat *)	Jakarta	Lulus 2017	Kementerian BUMN

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh Pemegang Saham

*) SK-104/MBU/06/2017 tanggal 5 Juni 2017, Pemegang Saham memberhentikan dengan hormat Sdri. Hendrika Nora Oslo Sinaga dan mengangkat Sdr. Tirta Hidayat sebagai Anggota Dewan Komisaris.

Pemberhentian Dewan Komisaris

Berdasarkan *Board Manual* Perseroan, anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. Adapun alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, yaitu:

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar,
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;
5. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Mengundurkan diri.

Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana maksud diatas berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/02/2015, bahwa anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Menteri selaku RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Menteri selaku RUPS demi kepentingan dan tujuan BUMN, misalnya, tetapi tidak terbatas pada:

1. Dalam rangka restrukturisasi perusahaan;
2. Memasuki masa usia pensiun dari Aparatur Sipil Negara, bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang merupakan penugasan dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain.

Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris

Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang

dari 30 hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.

Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

Program Pengenalan Bagi Dewan Komisaris

Perseroan memiliki kebijakan Program Pengenalan Dewan Komisaris yang diatur dalam *Board Manual*. Program pengenalan Dewan Komisaris ini diperuntukkan bagi Dewan Komisaris yang baru menjabat. Program ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas aktivitas bisnis, rencana Perusahaan ke depan, panduan kerja serta memberikan pengetahuan lebih kepada Dewan Komisaris baru terkait organisasi dan operasional Perseroan. Dalam program pengenalan Dewan Komisaris ini pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan adalah Sekretaris Perusahaan.

Materi yang disampaikan dalam Berita Acara Penyelenggaraan Pengenalan Perusahaan kepada Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh Sekretaris Perusahaan dan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1. Pemberian Anggaran Dasar, *Board Manual*, Pedoman GCG, Pedoman Manajemen Risiko, Pedoman WBS, Kode Etik Perseroan, SK Direksi tentang pedoman dan penerapan GCG, laporan hasil penilaian penerapan GCG Perseroan dan Laporan Tahunan Perseroan;
2. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya;

3. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
4. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian intern serta tugas dan peran Komite Audit dan Komite-Komite lain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris;
5. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

Program pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan atau program lainnya.

Sepanjang tahun 2017, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris Perseroan yaitu pemberhentian dengan hormat Sdri. Hendrika Nora Osloi Sinaga dan pengangkatan Sdr. Tirta Hidayat sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-104/MBU/06/2017 tanggal 5 Juni 2017. Selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2017 diselenggarakan program pengenalan Dewan Komisaris yang dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan dan Sekretaris Dewan Komisaris.

Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan 31 Juni 2017 sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode Jabatan
Edy Putra Irawady	Komisaris Utama	SK-78/MBU/04/2016 14 April 2016	2016 – 2021 (Kedua)
Taufik Sukasah	Komisiaris	SK-219/MBU/2013 12 April 2013	2013 – 2018 (Pertama)
Dedi Rudaedi	Komisaris	SK-357/MBU/2013 19 September 2013	2013 – 2018 (Pertama)
Hendrika Nora Osloi Sinaga	Komisaris	SK-244/MBU/2014 17 Oktober 2014	2014 – 2017 (Pertama)

Pada tahun 2017 terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris Perseroan pada periode Juni - Desember 2017 yang ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 117 tanggal 21 Juni 2017 sebagaimana telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dengan No. AHU-AH.01.03-0151562 tanggal 11 Juli 2017:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode Jabatan
Edy Putra Irawady	Komisaris Utama	SK-78/MBU/04/2016 14 April 2016	2016 – 2021 (Kedua)
Taufik Sukasah	Komisiaris	SK-219/MBU/2013 12 April 2013	2013 – 2018 (Pertama)
Dedi Rudaedi	Komisaris	SK-357/MBU/2013 19 September 2013	2013 – 2018 (Pertama)
Tirta Hidayat	Komisaris	SK-104/MBU/06/2017 5 Juni 2017	2017 – 2022 (Pertama)

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris

Dalam menentukan komposisi Dewan Komisaris, Perseroan telah mempertimbangkan aspek keberagaman diantaranya usia, pendidikan, pengalaman kerja dan jenis kelamin. Dengan keberagaman tersebut diharapkan Dewan Komisaris dapat melakukan pengawasan yang baik atas aktivitas bisnis dalam mencapai target dan kinerja Perseroan. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut:

Dewan Komisaris	Tingkat Pendidikan Terakhir			Pengalaman Kerja (Tahun)		Usia		Jenis Kelamin	
	S1	S2	S3	<20	>20	< 50	>50	L	P
Edy Putra Irawady		✓			✓		✓	✓	
Taufik Sukasah		✓			✓		✓	✓	
Dedi Rudaedi		✓			✓		✓	✓	
Hendrika Nora Oslo Sinaga		✓			✓	✓			✓
Tirta Hidayat			✓		✓		✓	✓	

Penilaian atas Kinerja Masing-Masing Komite yang Berada di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Dewan Komisaris telah mengeluarkan Surat Keputusan dengan No. PER-01/KOM/PPA/IX/2015 Tentang Indikator Metode Evaluasi Kinerja Tahunan Komite Perusahaan Perseroan (Persero) PT PPA.

Dewan Komisaris telah melaksanakan evaluasi terhadap kinerja Komite Audit serta Komite Pemantau Risiko dan GCG pada tahun 2017. Penilaian kinerja Komite Dewan Komisaris berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang telah tersusun dalam RKA tahunan, saran, rekomendasi dan masukan yang diberikan oleh Komite Dewan Komisaris serta tingkat kehadiran rapat. Hasil penilaian sebagai berikut:

1. Anggota Komite Audit, berdasarkan hasil asesmen mendapatkan capaian nilai rata-rata sebesar 98,93 atau dengan kriteria "Sangat Baik". Rincian penilaian terdapat pada bab Komite Audit, sub bab Penilaian Kinerja Komite Audit.
2. Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG berdasarkan hasil asesmen mendapatkan capaian nilai rata-rata sebesar 94,00 atau dengan kriteria "Sangat Baik". Rincian penilaian terdapat pada bab Penilaian Kinerja Komite Pemantau Risiko dan GCG.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris Perseroan telah memiliki panduan yang tertuang dalam *Board Manual*. *Board Manual* tersebut disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang dan dimutakhirkan secara berkala. Landasan hukum yang menjadi acuan *Board Manual* sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Anggaran Dasar Perseroan;
3. Pedoman GCG Perseroan.

Board Manual mengatur berbagai aspek mengenai Dewan Komisaris, diantaranya:

1. Dewan Komisaris, meliputi:
 - Ketentuan Umum Jabatan Anggota Dewan Komisaris
 - Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
 - Kewajiban Dewan Komisaris
 - Tanggung Jawab Dewan Komisaris
 - Pembagian Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
 - Prinsip-Prinsip Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris
 - Etika Jabatan Dewan Komisaris
 - Rapat Dewan Komisaris
 - Organ Pendukung Dewan Komisaris
2. Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi, meliputi:
 - Pertemuan Formal
 - Pertemuan Informal
 - Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
 - Program Pengenalan Perseroan
 - Pelaporan Berkala

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati tugas dan wewenang Direksi dalam mengelola Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Direksi menghormati tugas dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perusahaan.
3. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, yang dilandasi oleh suatu mekanisme hubungan kerja yang baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Perusahaan secara akurat, lengkap, dan tepat waktu.
5. Direksi bertanggung jawab atas akurasi, kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian informasi Perusahaan kepada Komisaris.
6. Hubungan kerja antara organ-organ di bawah Dewan Komisaris dengan organ-organ di bawah Direksi diatur berdasarkan kesepakatan antara Dewan Komisaris dan Direksi.
7. Hubungan kerja Dewan Komisaris dengan Direksi adalah hubungan *check and balances* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan meningkatkan kesehatan Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen bersama untuk melakukan tugas masing-masing sehingga dapat tercapai kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang, yang tercermin pada:
 - a. Terlaksananya dengan baik pengendalian internal dan manajemen risiko.
 - b. Tercapainya imbal hasil (*return*) yang optimal bagi Pemegang Saham.
 - c. Terlindunginya kepentingan *stakeholders* secara wajar.
 - d. Terlaksananya suksesi kepemimpinan yang wajar demi kesinambungan manajemen di semua lini organisasi Perusahaan.
 - e. Terpenuhinya pelaksanaan GCG di Perusahaan secara konsisten

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris tetap berpegang teguh pada tanggung jawabnya, dan semua fungsi ini dikoordinasikan oleh Komisaris Utama. Adapun tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
2. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;

3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris;
4. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas apabila dapat membuktikan:
 - a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan di atas diimplementasikan dengan melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab secara internal berdasarkan Berita Acara Dewan Komisaris Nomor BA-01/PPA/KOM/0617 tanggal 22 Juni 2017, dibagi dalam 3 (tiga) aspek bidang tugas, yaitu:

1. Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris sebagaimana di atur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan RUPS Perseroan:

Nama	Jabatan	Tugas Pengawasan
Edy Putra Irawady	Komisaris Utama	Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP.
Taufik Sukasah	Anggota Dewan Komisaris	Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai laporan tahunan apabila diminta. Menyusun Program Kerja Tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
Dedi Rudaedi	Anggota Dewan Komisaris	Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan. Membentuk Komite Audit. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
Tirta Hidayat/ Hendrika Nora Osloi Sinaga	Anggota Dewan Komisaris	Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada rapat umum pemegang saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan dan Arahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Pengesahan RKAP serta RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan.

2. Monitoring Pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris:

No	KPI Dewan Komisaris	Target	Person in Charge
1.	Aspek Pengawasan dan Pengarahan		
	Review/analisis kinerja bulanan perusahaan	12 x	Dedi Rudaedi
	Pemberian nasihat/saran kepada Direksi	15 x	Edy Putra Irawady
	Monitoring tindak lanjut hasil/temuan audit internal/eksternal	6 x	Dedi Rudaedi
	Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil asesmen GCG	2 x	Tirta Hidayat / Hendrika Nora O.S.
	Monitoring Aset kelolaan atau perusahaan yang direstrukturasikan dan/atau direvitalisasi oleh Perseroan melalui kunjungan berkala	3 x	Dedi Rudaedi
2	Aspek Pelaporan		
	Penyusunan dan penyampaian Program Kerja Tahunan	1 x	Taufik Sukasah
	Penyampaian laporan/pendapat/saran kepada Pemegang Saham/RUPS	7 x	Tirta Hidayat / Hendrika Nora O.S.
	Penyampaian Laporan Tugas Pengawasan	4 x	Tirta Hidayat / Hendrika Nora O.S.
3	Aspek Dinamis dan Lain-Lain		
	Peningkatan kompetensi (masing-masing anggota Dewan Komisaris)	1 x	Taufik Sukasah
	Penyusunan dan penyampaian rekomendasi atas RKAP/RJPP	1 x	Edy Putra Irawady

3. Koordinasi terkait pemberian nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan:

No	Nama	Bidang kerja
1.	Edy Putra Irawady	Koordinator anggota Dewan Komisaris, serta membidangi terkait organisasi dan <i>Corporate Strategic Planning and Monitoring</i> .
2.	Taufik Sukasah	Koordinasi terkait Direktorat Investasi, serta unit <i>Legal & Corporate Secretary</i> .
3.	Dedi Rudaedi	Koordinasi terkait Direktorat Keuangan dan Dukungan Kerja, serta unit Internal Auditor/SPI.
4.	Tirta Hidayat/Hendrika Nora O. S.	Koordinasi terkait Direktorat Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen, serta unit <i>Risk Management</i> .

Wewenang Dewan Komisaris

Berdasarkan *Board Manual*, Dewan Komisaris memiliki wewenang yang meliputi:

Wewenang Dewan Komisaris

Sesuai Anggaran Dasar, dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berwenang untuk:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga serta memeriksa kekayaan Perseroan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

8. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

Independensi Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris harus bertindak secara independen. Independensi merupakan aspek yang perlu diperhatikan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya benturan kepentingan. Dewan Komisaris melaksanakan tugas semata-mata untuk kepentingan perusahaan dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda dengan kepentingan perusahaan.

Berikut merupakan independensi anggota Dewan Komisaris selama 2017:

Kriteria Independensi	Edy Putra Irawady	Taufik Sukasah	Dedi Rudaedi	Hendrika Nora Osloi Sinaga	Tirta Hidayat
Bukan anggota Manajemen Perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓
Bebas dari hubungan usaha dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan	✓	✓	✓	✓	✓
Bukan Pemegang Saham mayoritas Perusahaan atau pegawai yang berhubungan langsung dengan Pemegang Saham mayoritas Perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓
Bukan pegawai atau pernah bekerja sebagai eksekutif pada Perusahaan atau anggota Perusahaan afiliasi, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris	✓	✓	✓	✓	✓
Bukan penasihat atau konsultan utama profesional yang material bagi Perusahaan atau perusahaan afiliasi, atau pegawai yang berhubungan langsung dengan penyedia jasa, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris	✓	✓	✓	✓	✓
Bukan pemasok atau pelanggan utama dari Perusahaan atau perusahaan afiliasi atau pegawai dari/atau yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan utama	✓	✓	✓	✓	✓

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

Selama 2017, hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan satu sama lain, Direksi dan Pemegang Saham dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan di Perusahaan Lain					
		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Edy Putra Irawady	Komisaris Utama	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Taufik Sukasah	Komisaris	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Dedi Rudaedi	Komisaris	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Hendrika Nora Osloi Sinaga	Komisaris	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tirta Hidayat	Komisaris	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Perseroan mewajibkan Dewan Komisaris mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Perseroan maupun pada perusahaan lain yang terafiliasi dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan Perseroan dalam daftar khusus yang harus diperbarui setiap tahunnya.

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham					
		Perseroan		Anak Perusahaan		Perusahaan Lain	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Edy Putra Irawady	Komisaris Utama		✓		✓		✓
Taufik Sukasah	Komisaris		✓		✓		✓
Dedi Rudaedi	Komisaris		✓		✓		✓
Hendrika Nora Osloi Sinaga	Komisaris		✓		✓		✓
Tirta Hidayat	Komisaris		✓		✓		✓

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Seluruh Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku terkait penerapan GCG.

Rangkap jabatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan di Perseroan	Jabatan di Perusahaan/lembaga Lain
Edy Putra Irawady	Komisaris Utama	Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Taufik Sukasah	Komisaris	-
Dedi Rudaedi	Komisaris	Pengajar Politeknik Keuangan Negara STAN

Nama	Jabatan di Perseroan	Jabatan di Perusahaan/lembaga Lain
Hendrika Nora Oslo Sinaga	Komisaris	Asisten Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata, Kementerian BUMN
Tirta Hidayat	Komisaris	Koordinator Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris

Dalam rangka memenuhi Anggaran Dasar Perseroan dan sebagai acuan untuk pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris pada 2017, maka Dewan Komisaris telah menyusun RKA Dewan Komisaris 2017. RKA Dewan Komisaris telah disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari usulan RKAP Perseroan Tahun 2017 yang disampaikan oleh Direksi kepada Menteri BUMN atas surat Dewan Komisaris Nomor S-40/PPA/KOM/1016 tanggal 14 Oktober 2016 perihal Pernyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun Buku 2017 serta surat Rekomendasi Dewan Komisaris atas RKAP Perseroan Tahun 2017 melalui surat Dewan Komisaris No. S-44/PPA/KOM/1016 tanggal 30 Oktober 2017 perihal Pendapat dan Saran atas RKAP PT PPA Tahun Buku 2017. RKA Dewan Komisaris telah disetujui oleh RUPS Perseroan pada RUPS RKAP Perseroan tanggal 20 Januari 2017 di Kementerian BUMN.

RKA Dewan Komisaris memuat pembagian tugas Dewan Komisaris, prognosa program kerja Dewan Komisaris pada 2017, program kerja Dewan Komisaris pada 2017, anggaran biaya Dewan Komisaris serta program kerja Komite Dewan Komisaris.

Realisasi RKA Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaporkan tugas pengawasan setiap bulan sebagaimana diatur dalam RUPS RKAP 2017. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Dewan Komisaris sesuai dengan RKA Dewan Komisaris pada 2017, meliputi:

1. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat dalam bidang Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi ("R/R") BUMN
2. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat dalam bidang Pengelolaan Aset (termasuk Aset Eks BPPN)
3. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat dalam bidang Investasi (termasuk kegiatan *Treasury*)
4. Dalam pengelolaan entitas anak, Dewan Komisaris akan melakukan analisis terhadap kinerja anak perusahaan secara berkala, untuk kemudian hasilnya akan disampaikan sebagai pokok-pokok saran dan nasihat kepada Direksi, dalam rangka perbaikan.
5. Dalam rangka mengidentifikasi dan menetapkan *new initiatives* program (sesuai dengan dinamika lingkungan bisnis), Dewan Komisaris akan senantiasa mengupayakan untuk memberikan masukan terhadap program-program baru yang digagas oleh Direksi, dan mengupayakan dapat memberikan masukan (saran ada nasihat) mengenai peluang-peluang pemantauan dan pelaporan atas pelaksanaan bisnis yang memungkinkan untuk dikelola/dilaksanakan oleh Perseroan.
6. Melakukan pemantauan dan pelaporan atas pelaksanaan *business plan* dana PMN yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2015.

Program Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Selama 2017, Anggota Dewan Komisaris mengikuti berbagai program pelatihan, seminar atau *workshop* sebagai berikut:

Topik Pelatihan	Tanggal	Tempat	Peserta	Penyelenggara
Forum Diskusi pada FGD Sinergi BUMN untuk Meningkatkan Investasi sehubungan dengan Pepres No.91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	12 Oktober 2017	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Dewan Komisaris, Direksi dan Eksternal	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Rapat Kerja Grup PT PPA Tahun 2017	7 – 8 Desember 2017	Bogor	Dewan Komisaris dan Direksi, serta jajaran organ Dewan Komisaris dan manajemen Perseroan	PT PPA

Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Tahun 2017:

No	Aktivitas	Keterangan
1	Kunjungan Dewan Komisaris ke Surabaya - Investasi PT PPA - PT Polowijo dan Aset kelolaan PT PPA - PT PON.	24 – 26 Agustus 2017
2	Kunjungan Dewan Komisaris ke Bogor- Investasi PT PPA - Proyek Perumahan Bukit Hijau Ciomas - PT Riscon.	7 November 2017
3	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Bandung dalam rangka <i>monitoring</i> R/R PT PPA - PT Dirgantara Indonesia	21 – 22 November 2017

Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara berkala melaksanakan rapat baik rapat internal maupun Rapat Gabungan dengan Direksi. Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, pelaksanaan rapat Dewan Komisaris diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan. Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.

Agenda Rapat, Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris

Selama 2017, Dewan Komisaris menyelenggarakan 25 kali rapat, terdiri atas 13 kali rapat internal Dewan Komisaris dan 12 kali rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Agenda pembahasan rapat, frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran sebagaimana berikut:

Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris

No	Tanggal	Agenda	Kehadiran
1.	19 Januari 2017	- Persiapan RUPS RKAP Tahun 2017; - Review Perubahan Ketentuan Perusahaan tentang GCG (<i>Board Manual</i>, GCG dan <i>Code of Conduct</i>); - Pembahasan Masa Penugasan Organ Dewan Komisaris (KA dan Sekdekom).	- Edy Putra Irawady - Taufik Sukasah - Dedi Rudaedi - Hendrika Nora O. Sinaga
2.	31 Januari 2017	- Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; - Rencana Aksi <i>Blue Skies</i> dalam RKAP 2017; - Progress General Audit Tahun Buku 2016; - Rencana Perubahan Ketentuan GCG Perusahaan; dan - Lain-lain.	- Edy Putra Irawady - Taufik Sukasah - Dedi Rudaedi - Hendrika Nora O. Sinaga
3.	27 Februari 2017	- Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; - Evaluasi Kinerja dan Arus Kas Bulan Januari Tahun 2017; - Status Penanganan Aset Eks BPPN; - Program Sinergi BUMN Tahun 2017; dan - Lain-Lain.	- Edy Putra Irawady - Taufik Sukasah - Dedi Rudaedi
4.	21 Maret 2017	- Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; - Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Bulan Februari Tahun 2017; - Hasil <i>Self Assessment</i> GCG Tahun 2016; - Pengelolaan Kegiatan Usaha PT PPA Kapital dan PT PPA Finance.	- Edy Putra Irawady - Taufik Sukasah - Dedi Rudaedi - Hendrika Nora O. Sinaga
5.	27 April 2017	- Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; - Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Triwulan I Tahun 2017; - Evaluasi Kinerja Direksi dan Pengusul Remunerasi; - Pelaksanaan <i>Business Plan</i> PMN Tahun 2015 per TW I/2017; - Pembahasan atas Laporan Tahunan PT PPA Tahun Buku 2016.	- Edy Putra Irawady - Taufik Sukasah - Dedi Rudaedi - Hendrika Nora O. Sinaga
6.	22 Mei 2017	- Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; - Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. April Tahun 2017; - Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa serta Kebijakan Mutu dan Pelayanan; - Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan GCG dan Manajemen Risiko.	- Edy Putra Irawady - Taufik Sukasah - Dedi Rudaedi - Hendrika Nora O. Sinaga
7.	22 Juni 2017	- Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; - Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Mei Tahun 2017; - Perkembangan Program <i>Blue Skies</i> RKAP Tahun 2017; - Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan.	- Edy Putra Irawady - Taufik Sukasah - Dedi Rudaedi - Tirta Hidayat
8.	26 Juli 2017	- Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; - Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Triwulan II Tahun 2017; - Pengelolaan Kegiatan Usaha PT Nindya Karya; - Pelaksanaan <i>Business Plan</i> PMN Tahun 2015 per TW II/2017; - Usulan Pengisian Jabatan Anggota Direksi PT PPAF – Finalisasi Surat Dewan Komisaris ke Direksi.	- Edy Putra Irawady - Taufik Sukasah - Dedi Rudaedi - Tirta Hidayat
9.	24 Agustus 2017	- Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; - Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Juli Tahun 2017; - Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Karir dan Suksesi Manajemen; dan - Lain-lain.	- Edy Putra Irawady - Taufik Sukasah - Dedi Rudaedi - Tirta Hidayat
10.	25 September 2017	- Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; - Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Agustus Tahun 2017; - Pengelolaan Kegiatan Usaha PT PPA Finance dan PT PPA Kapital; dan - Lain-lain.	- Edy Putra Irawady - Taufik Sukasah - Dedi Rudaedi - Tirta Hidayat

Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris

No	Tanggal	Agenda	Kehadiran
11.	30 Oktober 2017	1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Triwulan III Tahun 2017; 3. Pelaksanaan <i>Business Plan</i> PMN Tahun 2015 per TW III/2017; 4. Pembahasan RKAP PT PPA Tahun Buku 2018; 5. Surat Sesmen KBUMN; Pergantian Anggota Komite PRG&GCG.	• Edy Putra Irawady • Taufik Sukasah • Dedi Rudaedi
12.	27 November 2017	1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Oktober 2017; 3. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang GCG dan Manajemen Risiko; 4. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Teknologi Informasi; dan 5. Lain-lain.	• Edy Putra Irawady • Taufik Sukasah • Dedi Rudaedi • Tirta Hidayat
13.	27 Desember 2017	1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. November 2017; 3. Evaluasi Program <i>Blue Skies</i> dalam RKAP Tahun 2017; 4. Agenda RUPS RKAP Tahun Buku 2018; dan 5. Lain-lain.	• Edy Putra Irawady • Taufik Sukasah • Dedi Rudaedi

Sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-104/MBU/06/2017 tanggal 5 Juni 2017, Pemegang Saham memberhentikan dengan hormat Sdri. Hendrika Nora osloi Sinaga dan mengangkat Sdr. Tirta Hidayat sebagai Anggota Dewan Komisaris.

Agenda Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi (Rapat Gabungan)

No	Tanggal	Agenda	Kehadiran
1.	31 Januari 2017	1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Rencana Aksi <i>Blue Skies</i> dalam RKAP 2017; 3. <i>Progress General Audit</i> Tahun Buku 2016; 4. Rencana Perubahan Ketentuan GCG Perusahaan; dan 5. Lain-lain.	• Edy Putra Irawady • Taufik Sukasah • Dedi Rudaedi • Hendrika Nora O. Sinaga
2.	27 Februari 2017	1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja dan Arus Kas Bulan Januari Tahun 2017; 3. Status Penanganan Aset Eks BPPN; 4. Program Sinergi BUMN Tahun 2017; dan 5. Lain-Lain.	• Edy Putra Irawady • Taufik Sukasah • Dedi Rudaedi
3.	21 Maret 2017	1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Bulan Februari Tahun 2017; 3. Hasil <i>Self Assessment</i> GCG Tahun 2016; 4. Pengelolaan Kegiatan Usaha PT PPA Kapital dan PT PPA Finance.	• Edy Putra Irawady • Taufik Sukasah • Dedi Rudaedi • Hendrika Nora O. Sinaga
4.	27 April 2017	1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Triwulan I Tahun 2017; 3. Evaluasi Kinerja Direksi dan Pengusul Remunerasi; 4. Pelaksanaan <i>Business Plan</i> PMN Tahun 2015 per TW I/2017; 5. Pembahasan atas Laporan Tahunan PT PPA Tahun Buku 2016.	• Edy Putra Irawady • Taufik Sukasah • Dedi Rudaedi • Hendrika Nora O. Sinaga
5.	22 Mei 2017	1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. April Tahun 2017; 3. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa serta Kebijakan Mutu dan Pelayanan; 4. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan GCG dan Manajemen Risiko.	• Edy Putra Irawady • Taufik Sukasah • Dedi Rudaedi • Hendrika Nora O. Sinaga
6.	22 Juni 2017	1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Mei Tahun 2017; 3. Perkembangan Program <i>Blue Skies</i> RKAP Tahun 2017; 4. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan.	• Edy Putra Irawady • Taufik Sukasah • Dedi Rudaedi • Tirta Hidayat

Agenda Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi (Rapat Gabungan)

No	Tanggal	Agenda	Kehadiran
7.	26 Juli 2017	1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Triwulan II Tahun 2017; 3. Pengelolaan Kegiatan Usaha PT Nindya Karya; 4. Pelaksanaan <i>Business Plan</i> PMN Tahun 2015 per TW II/2017. 5. Usulan Pengisian Jabatan Anggota Direksi PT PPAF – Finalisasi Surat Dewan Komisaris ke Direksi.	• Edy Putra Irawady • Taufik Sukasah • Dedi Rudaedi • Tirta Hidayat
8.	24 Agustus 2017	1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Juli Tahun 2017; 3. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Karir dan Suksesi Manajemen; 4. Lain-lain.	• Edy Putra Irawady • Taufik Sukasah • Dedi Rudaedi • Tirta Hidayat
9.	25 September 2017	1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Agustus Tahun 2017; 3. Pengelolaan Kegiatan Usaha PT PPA Finance dan PT PPA Kapital; dan 4. Lain-lain.	• Edy Putra Irawady • Taufik Sukasah • Dedi Rudaedi • Tirta Hidayat
10.	30 Oktober 2017	1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Triwulan III Tahun 2017; 3. Pelaksanaan <i>Business Plan</i> PMN Tahun 2015 per TW III/2017; 4. Pembahasan RKAP PT PPA Tahun Buku 2018.	• Edy Putra Irawady • Taufik Sukasah • Dedi Rudaedi
11.	27 November 2017	1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Oktober 2017; 3. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang GCG dan Manajemen Risiko; 4. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Teknologi Informasi; dan 5. Lain-lain.	• Edy Putra Irawady • Taufik Sukasah • Dedi Rudaedi • Tirta Hidayat
12.	27 Desember 2017	1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. November 2017; 3. Evaluasi Program <i>Blue Skies</i> dalam RKAP Tahun 2017; 4. Agenda RUPS RKAP Tahun Buku 2018; dan 5. Lain-lain.	• Edy Putra Irawady • Taufik Sukasah • Dedi Rudaedi

Frekuensi Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Tahun 2017	Kehadiran Rapat Komisaris	Persentase Kehadiran (%)
Edy Putra Irawady	Komisaris Utama	13	13	100
Taufik Sukasah	Komisaris	13	13	100
Dedi Rudaedi	Komisaris	13	13	100
Hendrika Nora Oslo Sinaga	Komisaris	6	5	83
Tirta Hidayat	Komisaris	7	6	86

Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat. Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan seluruh anggota Komisaris yang hadir dalam rapat. Risalah rapat Dewan Komisaris yang asli disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan didokumentasikan, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya. Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir menandatangani surat kuasa dalam rangka GCG untuk kepastian pengambilan keputusan dalam setiap rapat.

Frekuensi Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Tahun 2017	Kehadiran Rapat Komisaris	Persentase Kehadiran (%)
Edy Putra Irawady	Komisaris Utama	12	12	100
Taufik Sukasah	Komisaris	12	12	100
Dedi Rudaedi	Komisaris	12	12	100
Hendrika Nora Osloj Sinaga	Komisaris	6	5	83
Tirta Hidayat	Komisaris	7	5	72

Keputusan, Tanggapan dan Persetujuan Dewan Komisaris

Keputusan Dewan Komisaris

Selama 2017, Dewan Komisaris telah memberikan keputusan yang bersifat pengawasan dan penasehatan atas pengelolaan usaha Perseroan antara lain:

No	Nomor Keputusan	Perihal
1.	S-06/PPA/KOM/0217	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2016
2.	S-20/PPA/KOM/0517	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Triwulan I Tahun 2017
3.	S-33/PPA/KOM/0817	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Triwulan II Tahun 2017
4.	S-37/PPA/KOM/0817	Penetapan Honorarium KAP untuk Audit Umum atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan PKBL Tahun Buku 2017
5.	S-58/PPA/KOM/1117	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Triwulan III Tahun 2017

Tanggapan dan Persetujuan Dewan Komisaris

Selain pengawasan dan arahan yang bersifat rutin, selama 2017 Dewan Komisaris juga telah memberikan persetujuan dan tanggapan yang perlu menjadi perhatian Direksi sebagai berikut:

No	Tanggal	Perihal
1.	19 Januari 2017	Usulan Penambahan Modal Disetor PT PPA Finance sebesar Rp50 miliar
2.	31 Januari 2017	Rencana Pemberian Apresiasi/Insentif Kinerja Tahun 2016 dan Penyesuaian/Kenaikan Upah Tahun 2017 bagi Karyawan PT PPA
3.	21 Maret 2017	Usulan Calon Anggota Direksi PT PPA Finance
4.	8 Agustus 2017	Rekomendasi atas Usulan Calon Anggota Direksi PT PPA Finance
5.	24 Agustus 2017	Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris PT PPA atas Perubahan Rencana Penggunaan Dana PMN Tahun 2015 Alokasi Dana R/R PT Survai Udara Penas (Persero) ("Penas")
6.	28 Oktober 2017	Pengadaan Penilai Independen Assessment GCG Tahun Buku 2017
7.	22 November 2017	Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Pembentukan Perusahaan Patungan di Bidang Pengelolaan Hutan dalam Rangka Pengoperasian Kembali Pabrik Kertas PT Kertas Kraft Aceh ("PT KKA")
8.	28 Desember 2017	Pengelolaan Situs Internet (Website) PT PPA
9.	28 Desember 2017	Saran dan Nasihat Dewan Komisaris dari Hasil Kunjungan Dewan Komisaris pada Proyek Perumahan Bukit Hijau Cimas

No	Tanggal	Perihal
10.	28 Desember 2017	Saran dan Nasihat Dewan Komisaris dari hasil Kunjungan Dewan Komisaris pada PT Polowijo Gosari ("PT PG")
11.	28 Desember 2017	Saran dan Nasihat Dewan Komisaris dari Hasil Kunjungan Dewan Komisaris ke PT Petro Oxo Nusantara ("PT PON")
12.	28 Desember 2017	Saran dan Nasihat Dewan Komisaris tentang Manajemen Sumber Daya Manusia ("SDM")

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris senantiasa berupaya meningkatkan kinerja pengawasan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian yang dilakukan setiap tahun. Penilaian realisasi kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara kolegial oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Selain itu, Dewan Komisaris juga melakukan penilaian realisasi kinerja pengawasan bersifat kolegial berdasarkan RKA dalam KPI secara tahunan dan mandiri. Sementara terkait pemenuhan penerapan GCG, penilaian kinerja Dewan Komisaris telah dilakukan melalui asesmen GCG dengan aspek khusus Dewan Komisaris.

Kebijakan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Perseroan telah memiliki Kebijakan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris yang tercantum dalam Kontrak Manajemen *Key Performance Indicator* Dewan Komisaris yang mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Anggaran Dasar Perseroan;
3. Berita Acara Pembagian Tugas Anggota-Anggota Dewan Komisaris tahun 2017.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Pada 2017, penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara kolegial oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Dewan Komisaris juga melakukan penilaian independen terhadap pencapaian indikator penilaian kinerja. Sementara untuk pemenuhan aspek Dewan Komisaris dalam assessment GCG, pada 2017 dilakukan oleh asesor independen PT i-Con Global Solusi.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

KPI Dewan Komisaris

Secara keseluruhan, realisasi pencapaian KPI Dewan Komisaris pada 2017 sangat baik, yaitu mencapai nilai 109,58% Rincian realisasi pencapaian KPI Dewan Komisaris pada 2017 sebagai berikut:

Aspek dan Parameter Perspektif KPI Dewan Komisaris	Bobot (%)	Nilai Akhir (%)
Aspek Pengawasan dan Pengarahan	50	51,58
Aspek Pelaporan	35	42,86
Aspek Dinamis/Lain-lain	15	15,14
Jumlah	100	109,58

Asesmen GCG Aspek Dewan Komisaris

Melalui penilaian atas penerapan GCG yang berdasar pada alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 pada 6 Juni 2012, Dewan Komisaris memiliki porsi tersendiri terkait sejauh mana Dewan Komisaris memenuhi standar penerapan GCG.

Hasil *assessment* GCG pada 2017 yang dilaksanakan oleh Konsultan Independen, penerapan GCG untuk Dewan Komisaris telah mencapai nilai 32,1671 dari nilai maksimum 35 atau capaian sebesar 91,90% dengan predikat "Sangat Baik". Capaian tersebut berdasarkan indikator penilaian sebagai berikut:

Capaian Assessment GCG Aspek Dewan Komisaris 2017	
Aspek Pengujian/Indikator – Dewan Komisaris	Pemenuhan Indikator (%)
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.	1,0110
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas dan menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	1,9627
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan Direksi.	2,9040
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	9,1530
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	6,0741
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.	1,1962
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tawaran/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.	2,3160
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.	0,4283
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.	1,6590
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri rapat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	1,0885
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	2,5131
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif.	1,8613

Hasil *assessment* GCG atas tingkat pemenuhan parameter dan kriteria aspek Dewan Komisaris disimpulkan bahwa capaian parameter pada beberapa kategori telah mencapai *best practice* atau sangat baik, diantaranya:

- Dewan Komisaris memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris, menetapkan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris, menyusun rencana kerja setiap tahun yang memuat sasaran/target yang ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada Pemegang Saham.
- Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi perusahaan sesuai kewenangannya, serta memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
- Dewan Komisaris memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan Perusahaan, kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir, kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK), kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya, kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Peran Dewan Komisaris dalam pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan perusahaan/perusahaan patungan.

Rekomendasi Asesmen GCG 2017 Aspek Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan asesmen GCG 2017, Perseroan mendapatkan rekomendasi pengembangan dalam penerapan GCG di Perseroan, secara umum rekomendasi untuk aspek Dewan Komisaris adalah:

- Agar program pelatihan Dewan Komisaris dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai media peningkatan kapasitas anggota Dewan Komisaris.
- Perbaikan pengaturan tata kelola yang meliputi penetapan (1) kebijakan/pedoman terkait penyediaan kebutuhan informasi bagi Dewan Komisaris yang harus dipenuhi Direksi dan memuat antara lain: jenis informasi yang perlu disampaikan (baik yang berkala maupun insidental), standar waktu penyampaian serta mekanisme penyampaian informasi tersebut, (2) ketentuan jangka waktu penyampaian tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP kepada RUPS dalam *Board Manual*.
- Mempertajam pemberian arahan tentang: (1) penguatan sistem pengendalian intern perusahaan, yang dilakukan berdasarkan telaahan atas efektivitas pengendalian intern, (2) manajemen risiko, yang dilakukan berdasarkan telaahan kecukupan dan kualitas infrastruktur pengelolaan risiko Perusahaan, serta potensi risiko berikut alternatif penanganannya, (3) kepatuhan peraturan perundang-undangan berlaku berdasarkan telaahan atas kajian risiko dan legal (*risk and legal review*) atas rencana inisiatif bisnis, kebijakan dan rencana kerjasama yang akan dilakukan oleh Perusahaan, kegiatan/upaya-upaya penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi, kajian-kajian hukum (*legal opinion*) atas rencana tindakan dan permasalahan yang terjadi terkait dengan kesesuaian hukum atau ketentuan yang berlaku.
- Agar Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja individual Direksi berdasarkan capaian kinerja, target dan indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam Kontrak Manajemen.
- Agar menginstruksikan kepada Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dan GCG agar merencanakan dan melaksanakan *self-assessment* atas capaian kinerjanya secara berkala, dengan mencantumkan perbandingan antara realisasi pelaksanaan kegiatan dengan program kerja, berikut substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya pada Laporan Triwulanan dan Tahunan Komite.

Alasan Belum/Tidak Diterapkannya Rekomendasi

Hingga tahun buku 2017, Perseroan berupaya menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas pelaksanaan asesmen GCG 2016. Hal-hal yang belum ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dari hasil asesmen GCG tahun 2017 sebagaimana disebutkan di atas. Adapun pengembangan penerapan GCG yang telah dilakukan untuk aspek Dewan Komisaris dalam tahun 2017 sebagai berikut:

- Dewan Komisaris telah menyampaikan kepada Pemegang Saham untuk menetapkan penunjukan Komisaris Independen PT PPA (Persero);
- Penyusunan pelaporan pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran;
- Tingkat kesegeraan dalam pengambilan keputusan persetujuan terhadap usulan Direksi dalam kurun 14 hari kerja sesuai dengan piagam Dewan Komisaris;
- Penajaman pemberian arahan Dewan Komisaris kepada Direksi tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya, kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya, kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya, kebijakan SDM dan *talent pool*;
- Meminta Direksi untuk menyusun kebijakan Pengelolaan Induk dan Anak Perusahaan;
- Menandatangani Pakta Integritas (Pernyataan Tidak Berbenturan Kepentingan) dan Daftar Khusus kepemilikan saham Dewan Komisaris pada awal Tahun sesuai dengan Anggaran Dasar;
- Memperbaharui *Board Manual* dan Piagam Komisaris sebagai landasan pengaturan tata tertib rapat Dewan Komisaris yang sudah diterapkan yaitu mengenai (1) Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya maupun (2) Pembahasan usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait usulan Direksi.

DIREKSI

Direksi merupakan organ utama dalam tata kelola Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan, untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan secara kolektif melakukan pengelolaan Perseroan serta melaksanakan prinsip GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Susunan Direksi dan Keberagaman Direksi

Komposisi Direksi Perseroan beranggotakan 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang sebagai Direktur Utama dan 3 (tiga) orang sebagai Direktur, yang meliputi Direktur Investasi, Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen serta Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja.

Berikut merupakan susunan lengkap Direksi Perseroan periode Januari-November 2017 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-252/MBU/11/2017 tanggal 21 November 2017 dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) No 60 tanggal 11 Juni 2014, sebagaimana telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dengan No. AHU-AH.16858.40.22.2014 tanggal 1 Juli 2014:

Susunan Direksi Januari - November 2017

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
1	Saiful H Manan	Direktur Utama	SK-38/MBU/2014 tanggal 21 Februari 2014
2	Andi Saddawero	Direktur Investasi	SK-38/MBU/2014 tanggal 21 Februari 2014
3	Henry Sihotang	Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen	SK-112/MBU/2014 tanggal 22 Mei 2014
4	Ajar Setiadi	Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja	SK-112/MBU/2014 tanggal 22 Mei 2014

Pada tahun 2017 terjadi perubahan komposisi Direksi Perseroan pada periode November - Desember 2017 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-252/MBU/11/2017 tanggal 21 November 2017 dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 08 tanggal 4 Desember 2017 sebagaimana telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dengan No. AHU-AH.01.03- 0197744 tanggal 6 Desember 2017:

Susunan Direksi November - Desember 2017

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
1	Henry Sihotang	Direktur Utama	SK-252/MBU/11/2017 tanggal 21 November 2017

Susunan Direksi November - Desember 2017

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
2	Andi Saddawero	Direktur Investasi merangkap Plt. Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen	SK-38/MBU/2014 tanggal 21 Februari 2014 dan Keputusan Dewan Komisaris No. 10/KEP. KOM/PPA/XI/2017 tanggal 30 November 2017
3	Ajar Setiadi	Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja	SK-112/MBU/2014 tanggal 22 Mei 2014

Kebijakan Keberagaman Komposisi Direksi

Perseroan saat ini memiliki keberagaman latar belakang anggota Direksi, baik dari aspek pendidikan, usia maupun pengalaman kerja sebelumnya.

Dari sisi pendidikan, masing-masing anggota Direksi Perseroan memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda baik dalam maupun luar negeri. Selain itu, bidang studi yang dijalani juga beragam mulai dari keuangan, teknik, manajemen hingga ekonomi pembangunan. Keragaman tersebut telah memberi warna tersendiri bagi Perseroan.

Dari sisi usia, komposisi yang beragam terlihat dari 2 (dua) orang anggota masih tergolong berusia muda, sedangkan 2 (dua) orang lainnya merupakan profesional senior yang memiliki pengalaman panjang bekerja di berbagai perusahaan.

Sementara itu, dari segi pengalaman kerja, jajaran Direksi memiliki latar belakang karier yang beragam. Sebelum menjabat sebagai Direktur di Perseroan, setiap anggota Direksi masing-masing memiliki posisi strategis di perusahaan masing-masing. Dua orang Direktur Perseroan merupakan Karyawan yang mengikuti perjalanan sejak awal berdirinya Perseroan. Sedangkan Direktur lainnya, sebelum menjabat sebagai Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen Perseroan, yang bersangkutan menjabat sebagai *Executive Vice President* Bank Mandiri.

Keberagaman Susunan Direksi

Direksi	Tingkat Pendidikan Terakhir			Pengalaman Kerja		Usia	Jenis Kelamin	
	S1	S2	S3	<20	>20		L	P
Saiful H Manan*		✓			✓	60 Tahun	✓	
Andi Saddawero		✓			✓	48 Tahun	✓	
Henry Sihotang**		✓			✓	56 Tahun	✓	
Ajar Setiadi		✓			✓	50 Tahun	✓	

* Menjabat sebagai Direktur Utama hingga November 2017

** Menjabat Sebagai Direktur Utama sejak November 2017 menggantikan Saiful H Manan

Hubungan Afiliasi Antara Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Hubungan Afiliasi dengan:					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
Dewan Komisaris	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Edy Putra Irawady		✓		✓		✓
Taufik Sukasah		✓		✓		✓
Dedi Rudaedi		✓		✓		✓
Tirta Hidayat		✓		✓		✓

Nama	Hubungan Afiliasi dengan:					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
Direksi	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Saiful H Manan*		✓		✓		✓
Andi Saddawero		✓		✓		✓
Henry Sihotang**		✓		✓		✓
Ajar Setiadi		✓		✓		✓

*Menjabat sebagai Direktur Utama hingga November 2017

** Menjabat Sebagai Direktur Utama sejak November 2017 menggantikan Saiful H Manan

Pernyataan Independensi dan Potensi Benturan Kepentingan

Direksi dalam menjalankan segala tindakan kepengurusan Perseroan atau hubungan dengan pihak lain harus bersifat independen tanpa campur tangan pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan yang secara material dapat mengganggu keobjektifan dan kemandirian tugas Direksi yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan Perseroan. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, antar anggota Direksi serta antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus keatas maupun garis kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Kepemilikan saham anggota Direksi beserta Keluarga dalam Perseroan

Direksi beserta keluarga, tidak memiliki saham Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan Wewenang Direksi

Tugas Direksi

Berdasarkan Pedoman Kerja Direksi disebutkan bahwa Direksi bertugas untuk menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan, dimana anggota Direksi tetap harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Wewenang Direksi

Direksi berwenang untuk:

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS;
5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan;
7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Pendelegasian Wewenang

Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan, apabila tidak ditetapkan lain oleh Direksi, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh rapat Direksi.

Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota-anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut.

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing Direksi

Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan telah melakukan pembagian tugas berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK-29/PPA/0415 tertanggal 27 April 2015 tentang Pedoman Kerja Direksi, pembagian tugas Direksi Perseroan yang masing-masing membawahi 4 (empat) fungsi direktorat, adalah sebagai berikut:

Jabatan	Tugas Utama
Direktur Utama	Merencanakan, menetapkan, mengarahkan, mengomunikasikan, mengevaluasi arah dan strategi perusahaan serta memimpin jalannya Perseroan dalam rangka pencapaian visi dan misi Perseroan.
Direktur Investasi	Merencanakan, menetapkan, menyetujui, mengomunikasikan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan investasi, advisory dan pengelolaan aset eks BPPN sesuai dengan target dan strategi Perseroan dalam rangka mencapai visi dan misi Perseroan.
Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen	Merencanakan, menetapkan, menyetujui, mengomunikasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advisory, pengelolaan aset dan restrukturisasi/revitalisasi BUMN sesuai dengan target dan strategi Perseroan dalam rangka mencapai visi dan misi Perseroan.
Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja	Merencanakan, menetapkan, menyetujui, mengomunikasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana perusahaan, sistem keuangan dan akuntansi, pengelolaan sumber daya manusia, teknologi informasi, pengadaan barang dan jasa, serta penyediaan sarana dan prasarana operasional kantor sesuai dengan target dan strategi Perseroan dalam rangka mencapai visi dan misi Perseroan.

Pengembangan Kompetensi Direksi

Board Manual Perseroan telah mengatur mengenai pelaksanaan Program Orientasi dan Pelatihan bagi Direksi. Direksi diharuskan untuk melakukan kegiatan peningkatan kompetensi untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan profesionalisme, maka Perseroan memfasilitasi anggota Direksi untuk mengikuti program-program pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Direksi. Selama tahun 2017, Direksi telah mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, *workshop* dan presentasi sebagai berikut:

Direksi	Jenis Pelatihan/Seminar	Tanggal	Penyelenggara
Saiful H Manan*	<i>Executive Leadership Program</i> - 1	25 Januari 2017 13 April 2017	Forum Human Capital Indonesia
	FGD (<i>Appreciate Inquiry</i>)	26 April 2017	Forum Human Capital Indonesia
	FGD Peningkatan Sinergi BUMN dalam Pemanfaatan Peluang Investasi	12 Oktober 2017	
Andi Saddawero	<i>Executive Leadership Program</i> - 1	25 Januari 2017 5-6 Mei 2017	Forum Human Capital Indonesia
Henry Sihotang**	<i>Executive Leadership Program</i> - 1	25 Januari 2017 13 April 2017	Forum Human Capital Indonesia
Ajar Setiadi	<i>Executive Leadership Program</i> - 1	25 Januari 2017 13 April 2017 27 April 2017	Forum Human Capital Indonesia
	Sosialisasi Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/06/2017	28 September 2017	Kementerian BUMN Republik Indonesia

*Menjabat sebagai Direktur Utama hingga November 2017

** Menjabat Sebagai Direktur Utama sejak November 2017 menggantikan Saiful H Manan

Program Pengenalan Perusahaan untuk Direksi

Program pengenalan perusahaan diberikan untuk anggota Direksi yang baru diangkat. Penanggung jawab program pengenalan perusahaan adalah Sekretaris Perusahaan.

Materi yang disampaikan dalam Berita Acara Penyelenggaraan Pengenalan Perusahaan kepada Direksi yang ditandatangani oleh Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:

1. Pemberian Anggaran Dasar, *Board Manual*, Pedoman GCG, Pedoman Manajemen Risiko, Pedoman WBS, Kode Etik Perseroan, SK Direksi tentang pedoman dan penerapan GCG, laporan hasil penilaian penerapan GCG Perseroan dan Laporan Tahunan Perseroan;
2. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya;
3. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
4. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian intern.
5. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

Program pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan atau program lainnya.

Tahun 2017 terdapat perubahan, namun tidak terdapat penambahan dari susunan anggota direksi Perseroan, sehingga tidak terdapat program pengenalan perusahaan terhadap anggota Direksi baru.

Pedoman Kerja Direksi

Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Dewan Komisaris dan Direksi berpedoman pada *Board Manual*. *Board Manual* tersebut berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten untuk menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar prinsip GCG untuk mencapai visi misi Perseroan.

Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan dari Pemegang Saham serta praktik terbaik GCG.

Tujuan *Board Manual* adalah untuk mempermudah Dewan Komisaris dan Direksi dalam memahami peraturan yang terkait dengan tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Berbagai hal yang diatur dalam *Board Manual* diantaranya dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Ketentuan umum jabatan anggota Direksi
2. Tugas dan wewenang Direksi
3. Kewajiban Direksi
4. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi
5. Etika jabatan
6. Pelaksanaan tugas pengelolaan Perseroan oleh Direksi
7. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan Direksi
8. Rapat Direksi
9. Organ Penunjang Direksi:
 - Divisi Internal Audit
 - Sekretaris Perusahaan
10. Hubungan dengan anak perusahaan
11. Benturan kepentingan

Di samping itu, Direksi dalam melaksanakan tugasnya juga mengacu pada Pedoman Kerja Direksi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. SK-58/PPA/1215 tanggal 10 Desember 2015 yang berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Rapat Direksi
3. Keputusan di Luar Rapat Direksi
4. Komunikasi Hasil Keputusan Direksi
5. Ketentuan Lain-Lain
6. Ketentuan Penutup

Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2017, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 14 kali yang dipimpin oleh Direktur Utama atau anggota Direksi lainnya dalam hal Direktur Utama berhalangan hadir. Hasil rapat diputuskan dengan mengedepankan musyawarah mufakat dan dituangkan secara tertulis ke dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Saiful H Manan*	7	7	100%
Andi Saddawero	14	14	100%
Henry Sihotang**	14	14	100%
Ajar Setiadi	14	14	100%

*Menjabat sebagai Direktur Utama hingga November 2017

** Menjabat Sebagai Direktur Utama sejak November 2017 menggantikan Saiful H Manan

Berikut adalah rekapitulasi frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing Direktur beserta agenda pembahasan dalam Rapat Direksi:

No	Tanggal	No. Risalah Rapat	Agenda	Kehadiran	Persentase (%)
1	17/01/2017	MOM - 01/PPA/ BOD/0117	Rapat Koordinasi Kerja	1. Saiful H. Manan 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Henry Sihotang	100%
2	30/01/2017	MOM - 02/PPA/ BOD/0217	1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat BOD-BOC bulan Des 2016; 2. Rencana Aksi Kegiatan <i>Blue Skies</i> dalam RKAP 2017; 3. Progres General Audit Tahun Buku 2016; 4. Rencana Perubahan Ketentuan GCG Perusahaan; 5. Laporan Perkembangan Kerjasama dengan Sultan Kesepuhan Cirebon.	1. Saiful H. Manan 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Henry Sihotang	100%
3	21/03/2017	MOM - 03/PPA/ BOD/0317	Persetujuan Kerjasama Investasi Dalam Bentuk <i>Project Financing</i>	1. Saiful H. Manan 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Henry Sihotang	100%
4	21/06/2017	MOM - 04/PPA/ BOD/0317	Rapat Koordinasi Kerja	1. Saiful H. Manan 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Henry Sihotang	100%
5	1/08/ 2017	MOM - 05/PPA/ BOD/0317	1. Laporan Kinerja Keuangan Semester I Tahun 2017 PT PPA dan Anak Perusahaan 2. Rapat Koordinasi	1. Saiful H. Manan 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Henry Sihotang	100%
6	24/08/ 2017	MOM - 06/PPA/ BOD/0317	Persetujuan Penjualan Saham PT Duta Mentari Raya	1. Saiful H. Manan 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Henry Sihotang	100%
7	23/10/2017	MOM -07/PPA/ BOD/1017	Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2018	1. Saiful H. Manan 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Henry Sihotang	100%
8	24/11/2017	MOM -08/PPA/ BOD/1117	Rapat Koordinasi	1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi	100%
9	27/11/2017	MOM -09/PPA/ BOD/1117	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018	1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi	100%

No	Tanggal	No. Risalah Rapat	Agenda	Kehadiran	Persentase (%)
10	28/11/2017	MOM -10/PPA/BOD/1117	Permohonan Persetujuan Terkait Restrukturisasi PT Survai Udara Penas; Pinjaman Pembelian Lidar ke PT Pratama Persada Airborne	1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi	100%
11	28/11/2017	MOM -11/PPA/BOD/1117	Laporan Analisa Pembelian Saham PT Nindya Beton	1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi	100%
12	6/12/2017	MOM -12/PPA/BOD/1217	Pembahasan Kasus Gugatan dari Syarifuddin Arsyad Temenggung	1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi	100%
13	11/12/2017	MOM -13/PPA/BOD/1217	1. Permintaan Kementerian BUMN terkait Laporan Kinerja Anak Perusahaan 2. RKAP Tahun 2018 3. RJPP Tahun 2019-2022	1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi	100%
14	22/12/2017	MOM -14/PPA/BOD/1217	Persetujuan Penerimaan Fasilitas Pinjaman dan Pelaksanaan Penjaminan Tagihan dari PT Bank Shinhan Indonesia PPA	1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi	100%

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Selama Tahun 2017

Sepanjang tahun 2017, pelaksanaan tugas Direksi diluar pelaksanaan tugas rutin dan yang bersifat teknis, dapat dilihat pada keputusan yang dikeluarkan. Berikut ini rincian surat keputusan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Direksi.

No	Nomor Surat Keputusan	Perihal
1	Tanggal 31 Januari 2017	Pedoman <i>Board Manual</i>
2	Tanggal 31 Januari 2017	Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance Code</i>)
3	Tanggal 31 Januari 2017	Pedoman Etika dan Perilaku (<i>Code of Conduct</i>)
4	SK-8A/PPA/0217 tanggal 10 Februari 2017	Kebijakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
5	SK-24/PPA/0517 tanggal 30 Mei 2017	Penunjukan Pegawai Perusahaan Dalam Rangka Penyampaian Data, Laporan, Dan Dokumen BUMN Secara Elektronik
6	SK-44/PPA/0917 tanggal 19 September 2017	Kebijakan Akuntansi keuangan
7	SK-46/PPA/1017 tanggal 9 Oktober 2017	Kebijakan Penunjang Kegiatan Rapat, Representasi Dan Kegiatan Tertentu
8	SK-60/PPA/1217 tanggal 29 Desember 2017	Kebijakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi

Sampai dengan akhir tahun 2017, Direksi belum membentuk komite-komite yang struktur organisasinya langsung berada di bawah Direksi. Meski demikian, dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan, Direksi memiliki organ-organ pendukung yaitu Sekretaris Perusahaan dan Divisi Internal Audit. Direksi menilai pelaksanaan kegiatan Sekretaris Perusahaan dan Divisi Internal Audit sepanjang 2017 sudah efektif serta sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilakukan secara kolegal maupun individual oleh Pemegang Saham. Penilaian kinerja oleh pemegang saham dilakukan dalam RUPS Tahunan tentang Laporan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan.

RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquite et charge*) kepada Direksi Perseroan atas segala hasil pengurusan dan pengelolaan perusahaan yang telah dilakukan.

Indikator penilaian kinerja Direksi meliputi aspek sebagai berikut:

1. Pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) Kontrak Manajemen tahun 2017;
2. Pencapaian Kinerja Operasional dan Keuangan tahun 2017;
3. Pelaksanaan implementasi GCG tahun 2017.

Pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) Perseroan tahun 2017

Pencapaian KPI Tahun 2017 meliputi prosedur review sebagai berikut:

1. Pada Perspektif Keuangan dan Pasar, penilaian dilakukan dengan menghitung skor yang diperoleh dari realisasi *Return on Equity* (ROE), *Return on Asset* (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, *Yield on Investment* (YOI), Laba Bersih Anak Perusahaan (PPAF dan PPAK) berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen dibandingkan dengan Kontrak Manajemen dan *Key Performance Indicators* (KPI).
2. Pada Perspektif Fokus Pelanggan, penilaian dilakukan dengan menghitung skor yang diperoleh dari Indeks Kepuasan Pelanggan, Indeks Kepuasan Mitra Strategis berdasarkan laporan kinerja manajemen yang telah diverifikasi, dianalisa, dan dibandingkan dengan Kontrak Manajemen dan *Key Performance Indicators* (KPI).

3. Pada Perspektif Efektivitas Produk dan Proses, penilaian dilakukan dengan menghitung skor yang diperoleh dari Realisasi Investasi dan/atau Jasa Advisory dan Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN yang dibandingkan dengan Kontrak Manajemen dan *Key Performance Indicators* (KPI).
4. Pada Perspektif Fokus Tenaga Kerja, penilaian dilakukan dengan menghitung skor yang diperoleh dari realisasi target Produktivitas Tenaga Kerja dan indeks kepuasan karyawan yang telah diverifikasi, dianalisa, dan dibandingkan dengan Kontrak Manajemen dan *Key Performance Indicators* (KPI).
5. Pada Perspektif Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan, penilaian dilakukan dengan menghitung skor yang diperoleh dari penilaian GCG, Ketepatan Penyampaian Laporan Berkala elektronik BUMN, Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Efektivitas Penyaluran Program Kemitraan, Efektivitas Penyaluran Program Bina Lingkungan, Tingkat Kolektibilitas Program Kemitraan yang telah diverifikasi, dianalisa, dan dibandingkan dengan Revisi Kontrak Manajemen dan *Key Performance Indicators* (KPI).

Laporan Penilaian Tingkat Pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) Perseroan

Berdasarkan RKAP Tahun 2017 dan Kontrak Manajemen Perseroan yang telah ditetapkan melalui RUPS atas Pengesahan RKAP Tahun 2017 tanggal 20 Januari 2017 telah ditentukan indikator dari *Key Performance Indicators* (KPI) Perseroan.

Dari hasil penilaian diperoleh skor KPI Perseroan sebesar 102,35% dengan kriteria "Sangat Baik". Adapun perincian nilai KPI Perseroan dijabarkan sebagai berikut:

No	Perspektif	Tahun 2017
		Nilai KPI
1	Keuangan & Pasar	23,19
2	Fokus Pelanggan	16,8
3	Efektivitas Produk & Proses	31,0
4	Fokus Tenaga Kerja	15,75
5	Kepemimpinan, Tata Kelola & Tanggung Jawab Kemasyarakatan	15,61
TOTAL		102,35
Kriteria		SANGAT BAIK

Asesmen GCG Aspek Direksi

Perseroan telah melakukan Penilaian Penerapan Prinsip GCG tahun 2017 yang dilakukan oleh penilai independen (PT Icon Global Solusi) dengan menggunakan kriteria dan metodologi yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN No. SK-16/S-MBU/2012 pada tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, di mana salah satu aspek yang diukur adalah penerapan tata kelola perusahaan di tingkat Direksi dan organ penunjang.

Penilaian GCG terhadap Direksi meliputi berbagai indikator, di antaranya:

- Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.
- Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.
- Direksi menyusun perencanaan Perseroan.
- Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perseroan.
- Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perseroan.
- Direksi melaksanakan pengurusan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
- Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perseroan dan *stakeholders*.
- Direksi memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.

- Direksi memastikan Perseroan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu.
- Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Direksi menyelenggarakan pengawasan internal yang berkualitas dan efektif.
- Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif.
- Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Hasil Asesmen Aspek GCG Direksi

Dari hasil asesmen yang dilakukan terhadap penerapan 13 indikator yang terbagi ke dalam 52 parameter menghasilkan skor 31,884 dari skor maksimal 35, atau memenuhi 91,09% kriteria penilaian yang digunakan dan mencapai kategori Sangat Baik.

PENGUNGKAPAN PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan basis formula yang ditetapkan oleh RUPS serta telah melalui kajian oleh Dewan Komisaris melalui pendalaman yang dilakukan oleh pemegang saham.

Prosedur Remunerasi Dewan Komisaris

Pada tahun 2017, prosedur dan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan berdasarkan:

1. Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 96 ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Bentuk Tunjangan dan Fasilitas, serta komponen lain yang termasuk di dalam komponen penghasilan (selain gaji) mengacu pada ketentuan;
2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana diubah dengan Peraturan Nomor. PER-02/MBU/06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN;
3. Keputusan RUPS melalui Surat Nomor S-30/D6.MBU/06/2016 Hal: Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas untuk Tahun 2016 serta tantien atas Kinerja Tahun Buku 2015 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Penghasilan Dewan Komisaris Perseroan saat ini telah mengikuti Peraturan Menteri BUMN serta Keputusan RUPS tersebut di atas, terdiri dari:

1. Honorarium:
 - a. Komisaris Utama sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama.
 - b. Komisaris sebesar 90% dari Honorarium Komisaris Utama.
2. Tunjangan:
 - a. Hari Raya sebesar 1 bulan Honorarium
 - b. Transportasi sebesar 20% dari Honorarium
 - c. Asuransi purna jabatan dengan premi per tahun sebesar 25% dari Honorarium setahun termasuk Asuransi jiwa dan kecelakaan.

3. Fasilitas:
 - a. Kesehatan (rawat jalan, rawat inap melalui asuransi dan *medical check up*).
 - b. Bantuan Hukum melalui Asuransi *Director & Officer Liabilities*.
4. Lain-lain sesuai anggaran:
 - a. Biaya pakaian.
 - b. Perkumpulan Profesi.
5. Tantiem sesuai dengan keputusan RUPS. Pajak atas tantiem menjadi beban Anggota Dewan Komisaris penerima Tantiem.

Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan melalui RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2017 telah menyetujui pemberian tantiem tahun 2016 dan remunerasi Dewan Komisaris tahun 2017 yang ditetapkan berdasarkan Surat Kementerian BUMN Nomor S-20/D6.MBU/06/2017 tanggal 21 Juni 2017 Tentang Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas untuk Tahun 2017 serta Tantiem Atas Kinerja Tahun Buku 2016 PT PPA.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Tahun 2017, Perseroan membayarkan remunerasi kepada Anggota Dewan Komisaris sebesar Rp8.097.245.501 terdiri dari Honorarium, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Hari Raya, Biaya Pakaian, Premi Asuransi, Kesehatan Rawat Jalan dan Tantiem tahun 2016.

Remunerasi tersebut telah disesuaikan dengan kinerja Dewan Komisaris pada tahun buku 2017. Rincian struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris, sebagai berikut:

Berikut ini tabel Remunerasi/Penghasilan bagi Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017:

Dalam Rupiah penuh	
Honorarium	2.597.400.000
Tunjangan Transportasi	519.480.000
Tunjangan Hari Raya	216.450.000
Tunjangan Pakaian	80.000.000
Tunjangan-Asuransi Purna Jabatan	632.770.312
Fasilitas Kesehatan Rawat Jalan	126.106.122
Premi Asuransi Rawat Inap	117.269.573
Tantiem Tahun 2016 (Netto)	1.747.706.894
Pajak Penghasilan	2.060.062.600
Jumlah	8.097.245.501

Struktur Remunerasi Direksi

Penghasilan Direksi Perseroan saat ini telah mengikuti Peraturan Menteri BUMN dan Keputusan RUPS, terdiri dari:

1. Gaji:
 - a. Direktur Utama Tahun 2017 sesuai Keputusan RUPS.
 - b. Direktur sebesar 90% dari Gaji Direktur Utama.
2. Tunjangan:
 - a. Hari Raya sebesar 1 bulan Gaji.
 - b. Perumahan sebesar 40% dari Gaji maksimal Rp27.500.000.
 - c. Asuransi purna jabatan dengan premi per tahun sebesar 25% dari Gaji setahun termasuk Asuransi jiwa dan kecelakaan.
3. Fasilitas:
 - a. 1 (satu) unit kendaraan dinas melalui sewa.
 - b. Kesehatan (rawat jalan, rawat inap melalui asuransi dan *medical check up*).
 - c. Bantuan Hukum melalui Asuransi *Director & Officer Liabilities*.
4. Lain-lain sesuai anggaran:
 - a. Operasional Kendaraan Dinas untuk biaya Pengemudi dan Bahan Bakar Minyak diberikan *lump sum* per bulan.
 - b. Biaya pakaian.
 - c. Perkumpulan Profesi, *Club Membership* dan representasi.
5. Tantiem sesuai dengan keputusan RUPS. Pajak atas tantiem menjadi beban Anggota Direksi penerima Tantiem

Tahun 2017, Perseroan membayarkan remunerasi kepada Anggota Direksi sebesar Rp18,55 miliar terdiri dari Gaji, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Hari Raya, Biaya Pakaian, Premi Asuransi, Kesehatan Rawat Jalan dan Tantiem tahun 2016.

Penetapan Penghasilan Direksi Tahun 2017 dan Tantiem Tahun 2016 berdasarkan Surat Kementerian BUMN Nomor S-20/D6.MBU/06/2017 tanggal 21 Juni 2017 Tentang Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas untuk Tahun 2017 serta Tantiem Atas Kinerja Tahun Buku 2016 Perseroan.

Berikut ini tabel Remunerasi bagi Direksi untuk Tahun Buku 2017:

Dalam Rupiah penuh	
Gaji	5.612.454.544
Tunjangan Perumahan	1.282.500.000
Tunjangan Hari Raya	481.000.000
Tunjangan Pakaian	80.000.000
Tunjangan-Asuransi Purna Jabatan	1.481.999.999
Fasilitas Kesehatan Rawat Jalan	702.918.511
Premi Asuransi Rawat Inap & BPJS Kesehatan	207.670.687
Operasional Kendaraan	419.727.273
Tantiem Tahun 2016 (Neto)	3.883.793.101
Pajak Penghasilan	5.671.726.700
Jumlah	19.823.790.815

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Perseroan memiliki Organ Pendukung Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite-Komite dan Sekretariat Dewan Komisaris. Komite-Komite dan Sekretariat di bawah Dewan Komisaris berfungsi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Organ Pendukung Dewan Komisaris terdiri dari:

1. Sekretaris Dewan Komisaris
2. Komite Audit;
3. Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG;

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris antara lain mengatur administrasi dan pelaksanaan tata kelola yang baik dan benar untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif guna melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan. Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris sesuai amanat Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Tugas dan Fungsi Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Secara rinci fungsi Sekretaris Dewan Komisaris antara lain:

1. Mempersiapkan rapat termasuk bahan rapat Dewan Komisaris.
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat Dewan Komisaris dan gabungan Direksi & Dewan Komisaris, maupun dokumen penting lainnya.
4. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris.
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Persyaratan Sekretaris Dewan Komisaris

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Sekretaris Dewan Komisaris sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris, di antaranya:

1. Memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan pembinaan Perseroan;
2. Memiliki integritas yang baik;
3. Memahami fungsi kesekretariatan;
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Marta Kurniawan **32 tahun**

Sekretaris Dewan Komisaris



Marta Kurniawan lahir di Palembang, 10 Maret 1985. Saat ini berdomisili di Depok, Jawa Barat. Menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris sejak 3 April 2017 berdasarkan SK nomor 03/KEP.KOM/ PPA/IV/2017.

Menyelesaikan pendidikan DIII spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/STAN (2006), Program Sarjana jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2010).

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Staf Dewan Komisaris PT PN V (Persero) (2008-2013), Staf Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta I (2012-2013), Anggota Komite Audit PT PN XII (Persero) (2014 - awal 2017). Saat ini menjabat sebagai Kasubbid Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Ia1, Kementerian BUMN.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sekretaris Dewan Komisaris

Selama 2017, Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Sebagai penghubung Dewan Komisaris dan Direksi, serta Pemegang Saham.
2. Mengadministrasikan undangan rapat Dewan Komisaris, menyiapkan bahan rapat (*briefing sheet*) dan menyusun konsep risalah rapat Dewan Komisaris.
3. Membuat konsep surat-surat keluar dan laporan kegiatan penugasan bersama-sama Komite,
4. Mendokumentasikan surat-surat Dewan Komisaris, mengadministrasikan surat masuk, surat keluar, keputusan dan peraturan Dewan Komisaris,
5. Menyusun rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris,
6. Menyusun rancangan Laporan Dewan Komisaris, triwulanan, dan tahunan.
7. Mengumpulkan bahan dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
8. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Perusahaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.
9. Melakukan tugas kesekretariatan lainnya.

Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris

Penetapan remunerasi bagi Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perseroan. Besaran dan jenis penghasilan yang diperoleh Sekretaris Dewan Komisaris adalah meliputi Honorarium sebesar 15% dari gaji Direktur Utama, tunjangan transport maksimal 20% dari honorarium dan tunjangan komunikasi maksimal 5% dari honorarium serta diberikan insentif kinerja tahunan. Insentif kinerja tahunan diberikan dengan pertimbangan kemampuan Perseroan dan kewajiban anggaran.

Komite Audit

Komite Audit diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dengan tugas utama, yaitu membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tugasnya mengawasi hal-hal yang terkait dengan kecukupan pelaporan dan pengungkapan laporan keuangan serta tugas lainnya seperti yang tercantum dalam Piagam Komite Audit. Pembentukan Komite Audit bertujuan untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan pemenuhan prinsip tata kelola yang baik. Komite Audit Perseroan dibentuk sebagai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Mengingat peran Komite Audit yang cukup penting, individu yang dapat memegang jabatan pada Komite Audit perlu memenuhi persyaratan khusus, antara lain memiliki pengalaman dalam bidang audit dan keuangan dan memahami proses bisnis Perseroan. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan.

Pedoman Kerja Komite Audit

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Komite Audit Perseroan telah dilengkapi Pedoman Kerja dalam Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor PER 02/KOM/PPA/XI/2014 tentang Piagam (*Charter*) Komite Audit dan Piagam (*Charter*) Komite Pemantau Risiko dan GCG Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset Piagam (*Charter*) Komite Audit Edisi 2014 yang disahkan oleh Dewan Komisaris tertanggal 19 Desember 2014.

Piagam Komite Audit mencakup keanggotaan, persyaratan keanggotaan termasuk persyaratan kompetensi dan independensi, wewenang dan tanggung jawab, tugas dan fungsi, rencana kerja dan anggaran, rapat-rapat, pelaporan, masa jabatan, penghasilan anggota serta evaluasi kinerja.

Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Pengangkatan anggota Komite Audit melalui proses penilaian sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan peran dengan sebaik-baiknya. Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja sebagai berikut:

1. Komite Audit Perseroan memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagai Komite Audit. Profil Anggota Komite Audit dapat dilihat dalam Bagian Profil Komite Audit.
2. Proses rekrutmen Anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kompetensi, keahlian dan integritas dan kemampuan bekerja sama.
3. Dewan Komisaris melakukan wawancara untuk menggali lebih dalam calon anggota Komite Audit. Selanjutnya, Dewan Komisaris melakukan rapat untuk menentukan calon anggota Komite Audit terpilih. Selanjutnya, penetapan dan pengangkatan calon anggota Komite Audit dilakukan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris.
4. Seluruh Anggota Komite Audit Perseroan memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.

Berdasarkan Piagam (*Charter*) Komite Audit Perseroan dinyatakan bahwa masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan untuk Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit Perseroan berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan berakhir.

Susunan Anggota Komite Audit

Komposisi Anggota Komite Audit Perseroan terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Komite merangkap sebagai anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite.

Jabatan	Nama	Periode Jabatan
Ketua	Dedi Rudaedi	Januari – Desember 2017
Anggota-Tenaga Ahli Aspek Teknis	Iko Marita M.	Januari – Desember 2017
Anggota-Tenaga Ahli Aspek Administrasi dan Keuangan	Hendy M. Fakhruddin	Januari – Mei 2017
	Ahmad Malkan Lubis	Juni – Desember 2017

Profil Ringkas Komite Audit

Dedi Rudaedi Ketua Komite Audit	Profil Dedi Rudaedi dapat dilihat di bagian Profil Dewan Komisaris
Iko Marita Mustokoweni, 51 tahun Anggota Komite Audit 	Iko Marita Mustokoweni lahir di Malang, 24 Mei 1966. Saat ini berdomisili di Bogor. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak 1 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/KEP.KOM/PPA/IV/2015. Memeroleh gelar sarjana di bidang Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (1989). Memiliki pengalaman sebagai staff Dewan Komisaris Perseroan, Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan, Anggota Sekretariat Tim Pemberesan dan Anggota Sekretariat Komite Kebijakan Sektor Keuangan ("KKSK") di BPPN, Kepala Divisi Kebijakan Perusahaan dan Administrasi di PT Bank Niaga.
Ahmad Malkan Lubis, 64 tahun Anggota Komite Audit 	Ahmad Malkan Lubis lahir di Medan, tanggal 15 Maret 1953. Saat ini berdomisili di Depok. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak 5 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 06/KEP.KOM/PPA/VI/2017. Menyelesaikan pendidikan Strata-1 di bidang Ekonomi dari University of the District of Columbia tahun 1986. Memperoleh gelar Master of Art jurusan Ekonomi pada Virginia Polytechnic Institute and State University di Virginia, Amerika Serikat (1986-1988) dan Doktor jurusan Ekonomi pada University of Maryland, Amerika Serikat (1989-1993). Saat ini juga menjabat sebagai anggota Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi di Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. Sebelum menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG, beliau pernah bekerja di Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, sebagai Penasehat Indonesia National Entrepreneurship (WIRATIF), Penasehat di ASEAN Connectivity through Trade and Investment (ACTI), Penasehat di Support for Economic Analysis Development in Indonesia (SEADI), Penasehat di Trade & Investment Climate Program to the Indonesia National Single Window (INSW).

Dasar Keputusan:

SK-06/KEP.KOM/PPA/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017, tentang Pemberhentian (Ahmad Malkan Lubis sebagai Komite PR&GCG) dan Pengangkatan Anggota Komite Audit (Ahmad Malkan Lubis sebagai KA) PT PPA (Persero).

Seluruh Anggota Komite Audit memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik.

Independensi Komite Audit

Komite Audit diketuai oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris dan dua anggota profesional lainnya berasal dari luar Perseroan serta mempunyai latar belakang keuangan dan latar belakang yang sesuai dengan bidang industri Perseroan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit bekerja secara profesional dan independen.

Anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan jumlah, komposisi, kriteria, kompetensi, dan independensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna menguatkan/mendukung penerapan ketentuan tentang independensi Komite Audit tersebut di atas, telah dibuat Surat Pernyataan Independensi Komite Audit pada saat pengangkatan tahun 2017 yang dijabarkan aspek independensi sebagai berikut:

Aspek Independensi	Dedi Rudaedi	Iko Marita. M	Ahmad Malkan Lubis
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perseroan, Anak Perusahaan maupun Perusahaan afiliasi	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan pejabat Pemerintah Daerah	✓	✓	✓

Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris dan Direksi, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak secara independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, fungsi utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi fungsi pengawasannya yaitu agar pengelolaan Perseroan dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan tugas dan dalam pelaporannya, Komite Audit bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan tugas, Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana yang tertuang dalam Piagam Komite Audit (*Committee Audit Charter*) yang disahkan dalam keputusan Dewan Komisaris No. PER 02/KOM/PPA/XI/2014 / Piagam (*Charter*) Komite Audit Edisi 2014 tertanggal 19 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal.
2. Mengevaluasi hasil pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh Divisi Internal Audit dan Auditor Eksternal.
3. Memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan penyempurnaan sistem pengendalian manajemen beserta penerapannya.
4. Menganalisis, menilai, membuat rekomendasi dan menyampaikan informasi mengenai hal yang ditelaah, sesuai dengan tugas dan wewenangnya
5. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan baik dari pihak eksternal maupun internal Perseroan.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
7. Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk kemudian disahkan sebelum tahun buku berjalan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Komite Audit telah merealisasikan Program Kerja Komite Audit sepanjang 2017. Komite Audit menyerahkan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan kepada Komisaris Utama. Adapun rincian realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komite Audit selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Berkaitan dengan evaluasi oleh Dewan Komisaris atas kinerja perusahaan.	Menyiapkan Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen dan Laporan Pengawasan sebagai berikut : Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2016, surat Dewan Komisaris telah dikirimkan kepada Pemegang Saham melalui surat Nomor : S-06/PPA/KOM/0117 tanggal 31 Januari 2017. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris TW I Tahun 2017, dan tanggapan atas Laporan Manajemen PT PPA TW I Tahun 2017. Surat Dewan Komisaris telah dikirimkan kepada Pemegang Saham melalui surat Nomor : S-20/PPA/KOM/0517 dan S-21/PPA/KOM/0517 tanggal 17 Mei 2017. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris TW II Tahun 2017, dan tanggapan atas Laporan Manajemen PT PPA TW II Tahun 2017. Surat Dewan Komisaris telah dikirimkan kepada Pemegang Saham melalui surat Nomor : S-33/PPA/KOM/0817 dan S-32/PPA/KOM/0817 tanggal 10 Agustus 2017. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris TW III Tahun 2017, dan tanggapan atas Laporan Manajemen PT PPA TW III Tahun 2017. Surat Dewan Komisaris telah dikirimkan kepada Pemegang Saham melalui surat Nomor : S-57/PPA/KOM/1117 dan S-58/PPA/KOM/1117 tanggal 29 November 2017.
2.	Berkaitan dengan atas Realisasi Penggunaan PMN Tahun 2015	Untuk Laporan penggunaan PMN Tahun 2016, serta untuk Triwulan I, II dan III Tahun 2017. Dewan Komisaris telah menandatangani Laporan-laporan tersebut bersama Direksi dan menyampaikan kepada Kementerian BUMN.
3.	Berkaitan dengan Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>) PT PPA Tahun 2016	Telah dilakukan penyusunan <i>draft Annual Report</i> PT PPA Tahun 2016 untuk bagian Dewan Komisaris dan Organ pendukung. Telah dilakukan evaluasi atas <i>draft Annual Report</i> PT PPA Tahun 2016 yang disampaikan oleh Direksi dan telah disiapkan konsep Pendapat dan Saran atas Laporan Tahunan PT PPA Tahun Buku 2016. Pendapat dan saran Dewan Komisaris telah disampaikan kepada Menteri BUMN melalui surat nomor : S-22/PPA/KOM/0517 tanggal 17 Mei 2017.

No	Kegiatan	Keterangan
4.	Berkaitan dengan kegiatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi ("RR") BUMN	Telah dilakukan hal-hal sebagai berikut : Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai Perubahan Rencana Penggunaan Dana PMN Tahun 2015 Alokasi Dana RR PT Survai Udara Penas (Persero) ("Penas"). Tanggapan Dewan Komisaris telah disampaikan kepada Direksi melalui surat Nomor : S-40/PPA/KOM/0817 tanggal 24 Agustus 2017. Sehubungan dengan dilaksanakannya <i>peer review</i> atas kegiatan RR BUMN oleh PT PPA, telah dilakukan serangkaian pertemuan dengan <i>Person in Charge</i> dari <i>business unit</i> dan Divisi Internal Audit, untuk pengumpulan data dan informasi.
5.	Berkaitan dengan Kegiatan Investasi	Menyusun konsep surat saran dan nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi mengenai : Investasi PT PPA pada PT Polowijo Gosari (surat nomor: S-63/PPA/KOM/1217 tanggal 28 Desember 2017) Investasi PT PPA pada Proyek Perumahan Bukit Hijau Ciomas (surat nomor: S-62/PPA/KOM/1217 tanggal 28 Desember 2017).
6.	Berkaitan dengan Kegiatan Pengelolaan Aset	Menyusun konsep surat saran dan nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi mengenai PT Petro Oxo Nusantara ("PT PON"), anak perusahaan PT Tuban Petrochemical Industries (aset kelolaan ex BPPN).
7.	Berkaitan dengan Kegiatan Pengelolaan Entitas Anak	Mengikuti rapat khusus Dewan Komisaris bersama dengan Direktur Investasi mengenai penanganan PT PPA Finance dan PT PPA Kapital pada tanggal 20 Maret 2017. Melakukan evaluasi atas rekomendasi Direksi mengenai penunjukan Direksi PT PPA Finance. Tanggapan Dewan Komisaris telah disampaikan kepada Direksi melalui surat Nomor S-30/PPA/KOM/0717 tanggal 26 Juli 2017.
8.	Berkaitan dengan Kegiatan <i>Support and Services</i>	Menyusun konsep surat saran dan nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi mengenai pengelolaan <i>website</i> PT PPA (surat nomor : S-60/PPA/KOM/1217 tanggal 28 Desember 2017) Menyusun surat saran dan nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi mengenai Pengelolaan Sumber Daya Manusia PT PPA (surat nomor: S-65/PPA/KOM/1217 tanggal 28 Desember 2017) Melakukan Pembahasan dengan Divisi Akuntansi dan Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Bidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan dengan Divisi Keuangan, serta memberikan saran-saran untuk perbaikan Kebijakan Akuntansi dan Keuangan.
9.	Berkaitan dengan Kegiatan Divisi Internal Audit ("DIA")	Telah dilakukan pembahasan dan evaluasi/telaahan atas hasil audit/review DIA sebagai berikut: • Memo Divisi Internal Audit Nomor : M-44/PPA/DIA-PD/0816 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Laporan Audit atas Kegiatan RR PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) ("PT MNA"). • Memo Divisi Internal Audit Nomor : M-53/PPA/DIA-PD/1016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Laporan Audit IT Control per 31 Juli 2016. • Memo Divisi Internal Audit Nomor : M-10/PPA/DIA-PD/0117 tanggal 30 Januari 2017 tentang Laporan Review atas Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Pegawai. • Memo Divisi Internal Audit Nomor : M-38/PPA/DIA-PD/0517 tanggal 29 Mei 2017 tentang Laporan Review atas Kegiatan Jasa Konsultansi pada Direktorat BAAM. • Memo Divisi Internal Audit Nomor : M-74/PPA/DIA-PD/1017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Laporan Audit atas Kegiatan Sekretariat Perusahaan. • Memo Divisi Internal Audit Nomor : M-78/PPA/DIA-PD/1017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Laporan Audit atas Pengelolaan PT Sejahtera Eka Graha. • Telah dilaksanakan <i>interview</i> DIA dengan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko & GCG sehubungan dengan pelaksanaan asesmen GCG untuk aspek Dewan Komisaris • Telah dilaksanakan pembahasan perubahan Piagam (Charter) dan SOP DIA. • Telah dilaksanakan pembahasan rencana kerja pelaksanaan <i>peer review</i> kegiatan RR BUMN oleh PT PPA. • Telah dilaksanakan pembahasan mengenai hasil audit compliance atas kegiatan RR PT Dirgantara Indonesia ("PT DI") yang merupakan bagian dari kegiatan <i>peer review</i> RR BUMN. • Telah dilaksanakan pembahasan dengan DIA mengenai Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK sampai dengan Semester II Tahun 2016 pada PT PPA (Persero). • Telah dilakukan pembahasan atas kegiatan audit yang dilaksanakan oleh DIA selama Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III Tahun 2016.

No	Kegiatan	Keterangan
10.	Berkaitan dengan Audit Eksternal/Kantor Akuntan Publik ("KAP")	Kegiatan Audit oleh KAP RSM AAJ atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT PPA Tahun 2016: - Komite Audit PT PPA mengikuti kegiatan <i>Closing</i> Audit Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan ("KAP RSM AAJ") PT Nindya Karya ("PT NK") untuk wilayah V pada tanggal 10 – 12 Januari 2017 di Makasar, yang dihadiri juga oleh Komite Audit PT NK. - Mengikuti proses <i>closing</i> Audit PT PPA Konsolidasian Tahun Buku 2016 KAP RSM AAJ pada tanggal 7 – 8 Februari 2017, yang dihadiri oleh manajemen PT PPA dan entitas anak. - Hasil Audit Konsolidasian PT PPA Tahun Buku 2016 oleh KAP RSM AAJ telah diselesaikan sesuai dengan yang diperjanjikan dan telah diserahkan oleh manajemen kepada Sekretariat Dewan Komisaris pada tanggal 22 Februari 2018. - Telah menyusun Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KAP AAJ atas Hasil Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT PPA Tahun Buku 2016 & Usulan Penunjukan untuk Laporan Keuangan PT PPA Konsolidasian Tahun 2017 kepada RUPS. Dewan Komisaris telah menyampaikannya kepada RUPS melalui surat Nomor : S-14/PPA/KOM/0417 tanggal 20 April 2017. - Kegiatan Audit Laporan Keuangan PT PPA Konsolidasian Tahun Buku 2017: - Telah melakukan pembahasan dengan manajemen PT PPA, Entitas Anak dan KAP RSM AAJ mengenai rencana <i>General Audit</i> PT PPA dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2017. - Menyiapkan surat Dewan Komisaris mengenai penetapan fee KAP untuk jasa audit Laporan Keuangan PT PPA Konsolidasian Tahun Buku 2017, dan Dewan Komisaris telah mengirimkan surat-surat sebagai berikut: - Kepada Direksi Nomor : S-37/PPA/KOM/0817 tanggal 22 Agustus 2017 perihal Penetapan Honorarium Kantor Akuntan Publik untuk Audit Umum atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2017. - Kepada Menteri BUMN Nomor : S-36/PPA/KOM/0817 tanggal 22 Agustus 2016 perihal Laporan Penetapan Honorarium Kantor Akuntan Publik untuk Audit Umum atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2017.
11.	Penyusunan Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2017	Telah dilaksanakan pembahasan dalam rapat internal Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko & GCG mengenai rancangan Rencana Kerja Dewan Komisaris ("RKA Dekom") Tahun 2018. Menyiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor: S-40/PPA/KOM/1016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal Penyerahan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun Buku 2018, untuk menjadi bagian dari RKAP PT PPA Tahun 2018.
12.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PT PPA Tahun 2017	Telah dilaksanakan pembahasan mengenai RKAP PT PPA (Konsolidasian) Tahun 2017 di dalam rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko & GCG dengan Manajemen PT PPA. Menyiapkan tanggapan Dewan Komisaris mengenai RKAP PT PPA Tahun 2018. Surat Dewan Komisaris Nomor: S-49/PPA/KOM/1017 tanggal 30 Oktober 2017 perihal Pendapat dan Saran atas RKAP PT PPA Tahun Buku 2018 telah dikirimkan kepada Menteri BUMN.
13.	Berkaitan dengan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris	Kegiatan kunjungan lapangan Dewan Komisaris yang diikuti adalah sebagai berikut: Tujuan kunjungan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 11 – 12 Agustus 2017, untuk meninjau : - Proyek perumahan Kota Kahuripan di Purwakarta; dan - Proyek perumahan Cempaka Hijau di Bandung - Tujuan kunjungan kota Gresik pada tanggal 25 - 26 Agustus 2017, untuk meninjau: - Lokasi usaha dan tambang milik PT Polowijo Gosari; dan - Lokasi usaha PT Petro Oxo Nusantara. - Tujuan kunjungan kota Bogor pada tanggal 7 November 2017 untuk meninjau proyek Perumahan Bukit Hijau Ciomas. - Tujuan kunjungan Kota Bandung pada tanggal 21 – 22 November 2017 untuk meninjau lokasi usaha PT Dirgantara Indonesia (Persero).
14.	Berkaitan dengan aspek dinamis (peningkatan kompetensi)	Partisipasi pada FGD Sinergi BUMN Untuk Meningkatkan Investasi sehubungan dengan Perpres No.91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, tanggal 12 Oktober 2017.
15.	Berkaitan dengan dukungan terhadap Komite Pemantau Risiko & GCG (KPR&GCG)	Mengikuti pertemuan pada tanggal 19 Januari 2017, tentang: Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) Pedoman Etika dan Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) <i>Board Manual</i> Mengikuti pertemuan pada tanggal 9 Mei 2017, tentang: Pembahasan Laporan Pelaksanaan Divisi Manajemen Risiko Triwulan I tahun 2017; Pembahasan Tindak Lanjut <i>Assessment</i> GCG.

No	Kegiatan	Keterangan
16.	Kegiatan lainnya	Pembahasan Arah PT PPA ke Depan dan Rencana untuk Pelaksanaan FGD PT PPA, dengan manajemen PT PPA yang diwakili oleh GM Divisi <i>Strategic Planning & Monitoring</i> .
17.	Total Jumlah Rapat	Rapat Komite Audit sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 13 (tiga belas) kali RUPS sebanyak 2 (dua) kali.

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala mengacu pada Piagam Komite Audit. Pertemuan dengan auditor eksternal minimal sebulan sekali pada saat ada jadwal pemeriksaan audit. Dalam pelaksanaan rapat Komite Audit dapat mengundang Manajemen Perseroan melalui Divisi Internal Audit untuk memberikan informasi yang diperlukan.

Selama 2017, Komite Audit melakukan berbagai jenis rapat dengan total berjumlah 23 kali rapat. Mayoritas Anggota Komite Audit menghadiri pertemuan tersebut. Keputusan yang diambil dalam rapat Komite Audit Perseroan telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Komite Audit. Risalah rapat di tandatangi oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Komite Audit yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (*disenting opinion*) yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.

Agenda pembahasan rapat Komite Audit selama tahun 2017 sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Kehadiran
1	10 – 12 Januari 2017	Kunjungan Kerja Komite Audit atas Proses <i>Closing Meeting</i> Audit RSM AAJ di Cabang PT NK Wilayah V Makassar – Hotel The Rinra	Dedi Rudaedi Iko Marita Mustokoweni Hendy M. Fakhruddin
2	19 Januari 2017	Rapat KA dan Manajemen (DIA) RKA Tahun 2017 Divisi Internal Audit ("DIA") dan Lain-lain.	Dedi Rudaedi Iko Marita Mustokoweni Hendy M. Fakhruddin
3	19 Januari 2017	Rapat KA, KPR & GCG dan Manajemen Pembahasan tentang Perubahan Ketentuan GCG yang mencakup : Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) Pedoman Etika dan Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) <i>Board Manual Progress</i> Audit KAP Tahun Buku 2015; dan Lain-lain.	Dedi Rudaedi Hendrika Nora Osloi Sinaga Iko Marita Mustokoweni Hendy M. Fakhruddin Ahmad Malkan Lubis Triza Noviasari
4	7-8 Februari 2017	Kunjungan Kerja Komite Audit atas Proses <i>Closing Meeting</i> Audit KAP AAJ dan Manajemen PT PPA di Hotel The Hotel Bogor 101 Surya Kencana.	Dedi Rudaedi Iko Marita Mustokoweni Hendy M. Fakhruddin
5	09 Februari 2017	Rapat KA, KPR & GCG dan Manajemen (DIA) Pembahasan <i>Interview</i> dengan Ka. DIA dalam rangka asesmen GCG Aspek Dewan Komisaris; dan Lain-lain.	Dedi Rudaedi Hendrika Nora Osloi Sinaga Hendy M. Fakhruddin Ahmad Malkan Lubis Triza Noviasari
6	14 Maret 2017	Rapat KA dan Manajemen (DIA) Pembahasan Laporan Audit atas Kegiatan RR PT MNA (Persero); Pembahasan Laporan Audit atas IT Control per 31 Juli 2016; Pembahasan Laporan <i>Review</i> atas Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Pegawai.	Dedi Rudaedi Iko Marita Mustokoweni Hendy M. Fakhruddin

No	Tanggal	Agenda	Kehadiran
7	11 April 2017	Rapat KA dan Manajemen (DIA) Pembahasan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK sampai dengan Semester II Tahun 2016 pada PT PPA (Persero) Pembahasan Ringkasan Eksekutif Laporan Audit atas Kegiatan R/R PT Merpati Nusantara Airlines (Persero).	Dedi Rudaedi Iko Marita Mustokoweni
8	20 April 2017	Rapat KA, KPR&GCG dan Manajemen Pembahasan Draft Surat Usulan Penetapan Penghasilan Tahun 2017 dan Tantiem Tahun 2016 bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT PPA; Pembahasan Draft Surat Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KAP RSM AAJ atas Hasil Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT PPA Tahun Buku 2016 dan Usulan Penunjukan untuk Laporan Keuangan PT PPA Konsolidasian Tahun 2017; Pembahasan Confidential KA dengan SDM.	Dedi Rudaedi Iko Marita Mustokoweni
9	26 April 2017	Rapat KA, KPR&GCG dan Manajemen Pembahasan Realisasi Penggunaan PMN Tahun 2015 per Triwulan I Tahun 2017; Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2017.	Dedi Rudaedi Iko Marita Mustokoweni
10	9 Mei 2017	Rapat KA, KPR&GCG dan Manajemen Pembahasan Laporan Pelaksanaan Divisi Manajemen Risiko Triwulan I tahun 2017; dan Lain-lain.	Dedi Rudaedi Hendrika Nora Oslo Sinaga Ahmad Malkan Lubis Iko Marita Mustokoweni Triza Noviasari
11	15 Juni 2017	Rapat KA, KPR&GCG dan Manajemen Pembahasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan dengan Divisi Keuangan; Pembahasan Pelaksanaan Laporan SPI Triwulan I Tahun 2017 dan Pembahasan Tindak Lanjut Assessment GCG.	Dedi Rudaedi Iko Marita Mustokoweni Triza Noviasari
12	26 Juli 2017	Rapat KA dan KPR&GCG Persiapan Rapat BOC & BOD; dan Lain-lain.	Dedi Rudaedi Tirta Hidayat Iko Marita Mustokoweni Ahmad Malkan Lubis
13	3 Agustus 2017	Rapat KA, KPR&GCG dan Manajemen Pembahasan Rencana Penunjukan KAP Div. <i>Finance & Accounting</i> Pembahasan Hasil Audit Jasa Konsultansi Div. Internal Audit.	Dedi Rudaedi Iko Marita Mustokoweni
14	15 Agustus 2017	Rapat KA dan Manajemen, Anak Perusahaan PT PPA dan KAP AAJ RSM Pembahasan Penawaran Jasa Audit KAP AAJ; dan Lain-lain	Dedi Rudaedi Iko Marita Mustokoweni Ahmad Malkan Lubis
15	24 Agustus 2017	Rapat Internal KA dan KPR&GCG Pembahasan Surat S-2938/PPA/PD/0817 tanggal 21 Agustus 2017, perihal Permohonan Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Penggunaan Dana PMN Tahun 2015 pada PT PPA untuk Alokasi Penanganan PT Survai Udara Penas (Persero) ("Penas"); (finalisasi Surat Dewan Komisaris) dan Lain-lain.	Dedi Rudaedi Tirta Hidayat Iko Marita Mustokoweni Ahmad Malkan Lubis Hendy M. Fakhruddin Triza Noviasari
16	30 Agustus 2017	Rapat, KA, KPR&GCG dan Manajemen Pembahasan Arah PT PPA ke Depan dan Rencana untuk Pengadaan FGD PT PPA – GM Divisi <i>Strategic Planning & Monitoring</i> ; Pembahasan <i>Peer Review</i> RR BUMN – GM Internal Audit.	Dedi Rudaedi Iko Marita Mustokoweni Ahmad Malkan Lubis

No	Tanggal	Agenda	Kehadiran
17	12 September 2017	Rapat KA, KPR&GCG dan Manajemen Pembahasan mengenai PT Dirgantara Indonesia ("PT DI"); dan Lain-lain.	Dedi Rudaedi Iko Marita Mustokoweni Ahmad Malkan Lubis Hendy M. Fakhruddin Triza Noviasari
18	03 Oktober 2017	Rapat KA dan KPR&GCG Pembahasan RKA Dewan Komisaris Tahun 2018; dan Lain-lain.	Dedi Rudaedi Iko Marita Mustokoweni Ahmad Malkan Lubis Triza Noviasari
19	17 Oktober 2017	Rapat KA, KPR&GCG dan Manajemen Pembahasan Rencana Penunjukan Asesor GCG PT PPA; dan Pembahasan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA).	Dedi Rudaedi Tirta Hidayat Iko Marita Mustokoweni Hendy M. Fakhruddin Triza Noviasari
20	24 Oktober 2017	Rapat KA, KPR&GCG dan Manajemen Pembahasan RKAP PT PPA Tahun Buku 2018; dan Lain-lain.	Dedi Rudaedi Iko Marita Mustokoweni Ahmad Malkan Lubis Hendy M. Fakhruddin Triza Noviasari
21	14 Nopember 2017	Rapat KA, KPR&GCG dan Manajemen Pembahasan surat No.S-4109/PPA/PD/1117, tgl 8 November 2017 perihal Permohonan Tanggapan Dewan Komisaris atas Pembentukan Perusahaan Patungan dibidang Pengelolaan Hutan dalam Rangka Pengoperasian Pabrik Kertas PT KKA; Pembahasan <i>Peer Review</i> RR BUMN untuk PT PAL dan PT IKI dengan mengundang PIC dari BAAM dan DIA. (tidak jadi dilaksanakan); dan Rapat rutin dengan DIA membahas laporan TW III DIA dan hasil audit/review yang belum dibahas bersama KA.	Dedi Rudaedi Iko Marita Mustokoweni Ahmad Malkan Lubis
22	14 Desember 2017	Rapat KA dan Manajemen Pembahasan Laporan Keuangan PT PPA; dan Lain-lain.	Dedi Rudaedi Iko Marita Mustokoweni Ahmad Malkan Lubis
23	18 Desember 2017	Rapat KA dan Manajemen Pembahasan <i>Peer Review</i> RR BUMN; dan Lain-lain.	Dedi Rudaedi Iko Marita Mustokoweni Ahmad Malkan Lubis

Tabel Kehadiran Rapat Komite Audit

No	Nama	Kehadiran	Jumlah	Persentase (%)
1	Dedi Rudaedi	23	23	100
2	Iko Marita Mustokoweni	22	23	96
3	Hendy M. Fakhruddin	6	6	100
4	Ahmad Malkan Lubis	13	18	73

Program Pelatihan Komite Audit

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Komite Audit, Perseroan memberikan kesempatan kepada anggota Komite Audit mengikuti pelatihan dan seminar.

Berikut ini adalah daftar pelatihan yang telah diikuti anggota Komite Audit.

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Penyelenggara
Dedi Rudaedi	Ketua	Partisipasi pada FGD Sinergi BUMN Untuk Meningkatkan Investasi sehubungan dengan Perpres No.91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.	Jakarta tanggal 12 Oktober 2017	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Ahmad Malkan Lubis	Anggota	Partisipasi pada FGD Sinergi BUMN Untuk Meningkatkan Investasi sehubungan dengan Perpres No.91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.	Jakarta tanggal 12 Oktober 2017	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Dedi Rudaedi	Ketua	Rapat Kerja Grup PT PPA	Bogor tanggal 7-8 Desember 2017	PT PPA
Iko Marita Mustokoweni	Anggota	Rapat Kerja Grup PT PPA	Bogor tanggal 7-8 Desember 2017	PT PPA
Ahmad Malkan Lubis	Anggota	Rapat Kerja Grup PT PPA	Bogor tanggal 7-8 Desember 2017	PT PPA

Penilaian Kinerja Komite Audit

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, kinerja Komite Audit dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Dewan Komisaris. Metode penilaian kinerja tersebut berdasarkan pada realisasi dan penyelesaian program kerja yang telah tersusun dalam rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Audit yang dilaporkan secara triwulanan maupun tahunan dalam laporan Komite Audit.

Penilaian juga dilakukan atas saran, rekomendasi dan masukan yang diberikan oleh Komite Audit terkait penyempurnaan *soft-structure* pendukung pelaksanaan audit, pelaksanaan dan peningkatan efektivitas audit dan sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap perundangan yang berlaku. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Audit untuk periode jabatan berikutnya.

Kebijakan Remunerasi Komite Audit

Mengacu pada Piagam Komite Audit, penghasilan anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perseroan. Penghasilan anggota Komite Audit berupa honorarium dengan jumlah maksimal 15-20% dari gaji Direktur Utama dengan ketentuan pajak ditanggung Perseroan dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lainnya selain honorarium tersebut.

KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG

Saat ini keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya bersifat keberhasilan secara kinerja operasional dan keuangan (*well-managed*). Seiring dengan perubahan lingkungan bisnis serta meningkatnya ekspektasi *stakeholders*, maka keberhasilan sebuah perusahaan juga ditentukan oleh keberhasilan perusahaan terhadap aspek tata kelola perusahaan dan pengelolaan risiko secara terpadu (*well-governed*) sesuai Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Komite Pemantau Risiko dan GCG merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai Peraturan Dewan Komisaris No. PER-01/KOM/PPA/VI/2011 tentang Komite Pemantau Risiko dan GCG PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) untuk membantu efektivitas fungsi pengawasan terutama dalam pemantauan atas implementasi *Enterprise Risk Management* (ERM) perusahaan dan pelaksanaan GCG pada Perseroan. Komite Pemantau Risiko dan GCG dibentuk mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN. Dalam melaksanakan tugas dan pelaporannya, Komite Pemantau Risiko dan GCG bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Pembentukan Komite Pemantau Risiko dan GCG merupakan komitmen dan inisiatif Dewan Komisaris dalam mendukung terbentuknya perusahaan yang *well-managed* dan *well-governed*. Melalui Komite ini, diharapkan Dewan Komisaris mampu mendorong dan mendukung implementasi Manajemen Risiko secara terintegrasi (ERM) dan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam seluruh proses bisnis dan aktivitas di entitas anak.

Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko dan GCG

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Komite Pemantau Risiko dan GCG Perseroan telah dilengkapi Pedoman Kerja dalam Piagam Komite Pemantau Risiko dan GCG berdasarkan Peraturan Dewan Komisaris Nomor PER-03/KOM/PPA/XI/2014 tentang Piagam (*Charter*) Komite Audit dan Piagam (*Charter*) Komite Pemantau Risiko dan GCG yang disahkan oleh Dewan Komisaris tanggal 19 Desember 2014.

Piagam tersebut antara lain mencakup keanggotaan, tugas dan fungsi, masa jabatan, persyaratan keanggotaan, program kerja dan penganggaran, rapat-rapat komite, pelaporan, akses dan kerahasiaan informasi, evaluasi kinerja komite dan penghasilan anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Pemantau Risiko dan GCG

Sesuai dengan Piagam Komite Pemantau Risiko dan GCG, pengangkatan dan pemberhentian Komite Pemantau Risiko dan GCG dilakukan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG melalui proses penilaian sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan peran dengan sebaik-baiknya. Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Risiko dan GCG Perseroan memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagai Komite Pemantau Risiko dan GCG. Profil Anggota Komite dapat dilihat dalam Bagian Profil Komite Pemantau Risiko dan GCG.

2. Proses rekrutmen Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kompetensi, keahlian dan integritas dan kemampuan bekerja sama.
3. Dewan Komisaris melakukan wawancara untuk menggali lebih dalam calon anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG. Selanjutnya, Dewan Komisaris melakukan rapat untuk menentukan calon anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG terpilih. Selanjutnya, penetapan dan pengangkatan calon anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG dilakukan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris.
4. Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG Perseroan memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.

Berdasarkan Piagam (*Charter*) Komite Pemantau Risiko dan GCG Perseroan menyatakan bahwa masa jabatan anggota Komite PR dan GCG yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Pemberhentian anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan untuk Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG Perseroan berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan berakhir.

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG

Komposisi susunan anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG terdiri dari 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang bertindak sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG dan 2 (dua) orang anggota yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris Perseroan bertindak sebagai anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG. Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan GCG sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama	Periode Jabatan
Ketua	Hendrika Nora Oslo Sinaga	Januari – Mei 2017
	Dedi Rudaedi	Juni 2017
	Tirta Hidayat	Juli – Desember 2017
Anggota - membidangi Manajemen Risiko	Ahmad Malkan Lubis	Januari – Mei 2017
	Hendy M. Fakhruddin	Juli – Desember 2017
Anggota - membidangi GCG	Triza Noviasari	Januari – November 2017
	Awal Susmanto	Desember 2017

Dasar Keputusan:

1. SK-06/KEP.KOM/PPA/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017, tentang Pemberhentian (Ahmad Malkan Lubis sebagai Komite PR&GCG) dan Pengangkatan Anggota Komite Audit (Ahmad Malkan Lubis sebagai Komite Audit) PT PPA (Persero).
2. SK-07/KEP.KOM/PPA/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017, tentang Pengukuhan Pemberhentian Ketua KPR&GCG (Hendrika Nora O. Sinaga) dan Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua KPR&GCG (Dedi Rudaedi) PT PPA (Persero).
3. SK-08/KEP.KOM/PPA/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017, tentang Pengangkatan Ketua (Tirta Hidayat) dan Anggota Komite PR&GCG (Hendy M. Fakhruddin) PT PPA (Persero).
4. SK-09/KEP.KOM/PPA/VI/2017 tanggal 20 November 2017, tentang Pemberhentian (Triza Noviasari) dan Pengangkatan Anggota Komite PR&GCG (Awal Susmanto) PT PPA (Persero).

Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik.

Profil Ringkas Komite Pemantau Risiko dan GCG

Tirta Hidayat Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG	Profil Tirta Hidayat dapat dilihat di bagian Profil Dewan Komisaris.
Hendy M. Fakhruddin, 47 tahun Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG 	Hendy M. Fakhruddin lahir di Samarinda, 5 September 1969. Saat ini berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG sejak 3 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-08/KEP.KOM/PPA/VII/2017. Memperoleh gelar sarjana di bidang Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (1997). Memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) dari Universitas Bina Nusantara (2002) dan gelar Magister Hukum (MH) dari Universitas Trisakti (2015). Memiliki sertifikasi internasional dari OCEG berupa GRC Professional (GRCP) dan GRC Auditor (GRCA). Berpengalaman kerja di Bursa Efek Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan Konsultan dengan spesialisasi Governance – Risk Management – Compliance (GRC Specialist).
Awal Susmanto, 33 tahun Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG 	Awal Susmanto lahir di Kebumen, 11 Juli 1984. Saat ini berdomisili di Serang. Menjabat sebagai anggota pada Komite Pemantau Risiko dan GCG sejak 20 November 2017 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 09/KEP.KOM/PPA/VI/2017. Meraih gelar Akuntan melalui Diploma IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2010). Saat ini menjabat sebagai Pemeriksa Anggaran di Inspektorat, Kementerian BUMN. Sebelum menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG, beliau pernah pula menjadi Anggota Komite Risiko PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

Independensi Komite Pemantau Risiko dan GCG

Komite Pemantau Risiko dan GCG diketuai oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris dan dua anggota profesional lainnya berasal dari luar Perseroan serta mempunyai latar belakang Keuangan dan latar belakang yang sesuai dengan bidang industri Perseroan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Pemantau Risiko dan GCG bekerja secara profesional dan independen.

Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG telah memenuhi persyaratan jumlah, komposisi, kriteria, kompetensi, dan independensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna menguatkan/mendukung penerapan ketentuan tentang independensi Komite Pemantau Risiko dan GCG tersebut di atas, telah dibuat Surat Pernyataan Independensi Komite Pemantau Risiko dan GCG pada saat pengangkatan pada tahun 2017 yang dijabarkan aspek independensi sebagai berikut:

Aspek Independensi	Tirta Hidayat	Hendy M. Fakhruddin	Awal Susmanto
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di PT PPA, Anak Perusahaan maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di PT PPA	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah	✓	✓	✓

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris dan Direksi, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak secara independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko dan GCG

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, fungsi utama Komite Pemantau Risiko dan GCG adalah membantu Dewan Komisaris dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan tugas dan dalam pelaporannya, Komite Pemantau Risiko dan GCG bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan tugas, Komite Pemantau Risiko dan GCG bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Pertanggungjawaban Komite Pemantau Risiko dan GCG kepada Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dan GCG sebagaimana yang tertuang dalam Piagam Komite Pemantau Risiko dan GCG yang disahkan dalam keputusan Dewan Komisaris No. PER-02/KOM/PPA/XI/2014 / Piagam (*Charter*) Komite Pemantau Risiko dan GCG Edisi 2014 tertanggal 19 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko secara Terintegrasi pada seluruh proses bisnis (ERM).
2. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) termasuk penerapan GCG pada Perusahaan Anak.
3. Memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
4. Menganalisis, menilai, membuat rekomendasi dan menyampaikan informasi mengenai hal yang ditelaah, sesuai dengan tugas dan wewenang
5. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan baik dari pihak eksternal maupun internal Perseroan.

6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko dan GCG kepada Dewan Komisaris.
7. Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk kemudian disahkan sebelum tahun buku berjalan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko dan GCG

Sepanjang tahun 2017, Komite Pemantau Risiko dan GCG telah melaksanakan berbagai aktivitas guna mendukung fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Pada dasarnya, rapat-rapat yang dilakukan oleh komite merepresentasikan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, oleh sebab itu secara umum rapat komite merupakan rapat yang dilaksanakan dan dihadiri oleh Komite baik Komite Audit, maupun Komite Pemantau Risiko dan GCG Perseroan. Untuk hal-hal tertentu yang bersifat khusus, maka rapat dilakukan oleh komite tertentu. Adapun rincian realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komite Pemantau Risiko dan GCG selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Berkaitan dengan evaluasi oleh Dewan Komisaris atas kinerja perusahaan.	Menyiapkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2016. Menyiapkan Laporan Triwulanan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2017. Menyiapkan Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulanan Tahun 2017.
2.	Berkaitan dengan Laporan Tahunan (Annual Report) PT PPA Tahun 2016	Menyusun <i>draft Annual Report</i> Perseroan Tahun 2016 untuk Bagian Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris. Menyusun konsep Pendapat dan Saran atas Laporan Tahunan PT PPA Tahun Buku 2016.
3.	Berkaitan dengan RKAP Tahun Buku 2017	Melakukan rapat pembahasan persiapan RUPS RKAP TA 2017 dengan Dewan Komisaris pada tanggal 19 Januari 2017.
4.	Berkaitan dengan Kegiatan Investasi	Melakukan rapat pembahasan dengan PIC dari manajemen Perseroan pada tanggal 20 Maret 2017 mengenai pengelolaan kegiatan usaha PT PPA Finance dan PT PPA Kapital.
5.	Berkaitan dengan kegiatan GCG	- Melakukan pembahasan dengan Kadiv <i>Corporate Secretary</i> atas usulan perubahan ketentuan GCG diantaranya <i>GCG Code</i>, <i>Code of Conduct</i> dan <i>Board Manual</i> pada tanggal 19 Januari 2017, dan lanjutan pemutakhirannya. - Mengikuti <i>self assessment</i> GCG Perseroan Tahun 2016 area Dewan Komisaris yang diwakili oleh Ketua Komite PRGCG dengan Kepala SPI tanggal 9 Februari 2017 termasuk menyiapkan dokumen dan informasi serta melakukan evaluasi atas final draft hasil <i>self assessment</i> GCG tahun 2016 area Dewan Komisaris dan menyampaikan hal-hal yang perlu diklarifikasi. - Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil <i>assessment</i> GCG dengan Kepala SPI pada tanggal 15 Juni 2017.
6.	Berkaitan dengan penerapan Manajemen Risiko (ERM) Perusahaan	Melakukan pembahasan mengenai realisasi kegiatan Divisi Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan I tahun 2017 bersama Kadiv MR pada tanggal 9 Mei 2017. Mengusulkan pelaksanaan sertifikasi manajemen risiko berbasis BNSP yaitu <i>Certified Risk Professional</i> (CRP), namun belum dapat dilaksanakan pada tahun 2017.

No	Kegiatan	Keterangan
7.	Berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Perusahaan	Sehubungan dengan perkembangan dan adopsi atas aspek transparansi dan <i>disclosure</i> dalam ASEAN <i>Scorecard</i> , mengusulkan perbaikan dan pembenahan keterbukaan informasi perusahaan khususnya situs web PPA (Persero), komite mengusulkan secara formal peningkatan keterbukaan informasi perusahaan melalui <i>website</i> .
8.	Berkaitan dengan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris	- Kegiatan kunjungan lapangan Dewan Komisaris yang diikuti adalah sebagai berikut: - Tujuan kunjungan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 11 – 12 Agustus 2017, untuk meninjau: - Proyek perumahan Kota Kahuripan di Purwakarta; dan - Proyek perumahan Cempaka Hijau di Bandung - Tujuan kunjungan kota Gresik pada tanggal 25 - 26 Agustus 2017, untuk meninjau: - Lokasi usaha dan tambang milik PT Polowijo Gosari; dan - Lokasi usaha PT Petro Oxo Nusantara. - Tujuan kunjungan kota Bogor pada tanggal 7 November 2017 untuk meninjau proyek Perumahan Bukit Hijau Ciomas. - Tujuan kunjungan Kota Bandung pada tanggal 21 – 22 November 2017 untuk meninjau lokasi usaha PT Dirgantara Indonesia (Persero).
9.	Berkaitan dengan mendukung Komite Audit	Mengikuti dan secara aktif terlibat dalam Pembahasan dengan Divisi Internal Audit mengenai realisasi kegiatan Divisi Internal Audit sampai dengan Triwulan I tahun 2017.
10.	Kegiatan Lainnya	Mengikuti kegiatan konsinyering bersama Dewan Komisaris pada tanggal 17-19 Februari 2017 di Batam.
11.	Total Jumlah Rapat	Rapat Komite sebanyak 15 (lima belas) kali Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 13 (tiga belas) kali RUPS sebanyak 2 (dua) kali.

Frekuensi Pertemuan, Tingkat Kehadiran dan Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko dan GCG

Komite Pemantau Risiko dan GCG yang merupakan organ pendukung Dewan Komisaris mengikuti rapat-rapat yang dilaksanakan Dewan Komisaris termasuk turut mengikuti rapat yang diselenggarakan secara bersama dengan Komite Audit maupun rapat yang khusus dilaksanakan dalam konteks pemantauan Manajemen Risiko dan GCG Perseroan. Sepanjang 2017, Komite Pemantau Risiko dan GCG telah mengikuti rapat sebanyak 15 Kali.

Agenda pembahasan rapat internal Komite Pemantau Risiko dan GCG pada 2017:

No	Tanggal	Agenda	Kehadiran/Keterangan
1.	19 Januari 2017	Rapat KPR & GCG dan Manajemen. Pembahasan tentang perubahan ketentuan GCG yang mencakup: Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) Board Manual	Tim Komite: Hendrika Nora Oslo Sinaga Ahmad Malkan Lubis Triza Noviasari
2.	9 Februari 2017	Rapat KA, KPR & GCG dan Manajemen (DIA) Pembahasan <i>Interview</i> dengan Ka. SPI dalam rangka asesment GCG Aspek Dewan Komisaris; dan Lain-lain.	Tim Komite: Dedi Rudaedi Hendrika Nora Oslo Sinaga Hendy M. Fakhruddin Ahmad Malkan Lubis Triza Noviasari

No	Tanggal	Agenda	Kehadiran/Keterangan
3.	20 April 2017	Rapat KA, KPR & GCG dan Manajemen Pembahasan Draft Surat Usulan Penetapan Penghasilan Tahun 2017 dan Tantiem Tahun 2016 bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT PPA; Pembahasan Draft Surat Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KAP RSM AAJ atas Hasil Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT PPA Tahun Buku 2016 dan Usulan Penunjukan untuk Laporan Keuangan PT PPA Konsolidasian Tahun 2017; Pembahasan Confidential KA dengan SDM.	Tim Komite: Dedi Rudaedi Iko Marita Mustokoweni
4.	26 April 2017	Rapat KA, KPR & GCG dan Manajemen Pembahasan Realisasi Penggunaan PMN Tahun 2015 per Triwulan I Tahun 2017; Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2017	Tim Komite: Dedi Rudaedi Iko Marita Mustokoweni
5.	9 Mei 2017	Rapat KA, KPR & GCG dan Manajemen Pembahasan Laporan Pelaksanaan Divisi Manajemen Risiko Triwulan I tahun 2017; dan Lain-lain.	Tim Komite: Dedi Rudaedi Hendrika Nora Oslo Sinaga Ahmad Malkan Lubis Iko Marita Mustokoweni Triza Noviasari
6.	15 Juni 2017	Rapat KA, KPR & GCG dan Manajemen Pembahasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan dengan Divisi Keuangan; Pembahasan Pelaksanaan Laporan DIA Triwulan I Tahun 2017 dan Pembahasan Tindak Lanjut Assessment GCG.	Tim Komite: Dedi Rudaedi Hendrika Nora Oslo Sinaga Iko Marita Mustokoweni Triza Noviasari
7.	26 Juli 2017	Rapat KA dan KPR & GCG Persiapan Rapat BOC & BOD; dan Lain-lain.	Tim Komite: Dedi Rudaedi Tirta Hidayat Iko Marita Mustokoweni Ahmad Malkan Lubis
8.	3 Agustus 2017	Rapat KA, KPR & GCG dan Manajemen Pembahasan Rencana Penunjukan KAP Div. Finance & Accounting Pembahasan Hasil Audit Jasa Konsultansi Div. Internal Audit.	Tim Komite: Dedi Rudaedi Iko Marita Mustokoweni
9.	24 Agustus 2017 (Marriot Surabaya)	Rapat KA dan KPR & GCG Pembahasan Surat S-2938/PPA/PD/0817 tanggal 21 Agustus 2017, perihal Permohonan Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Penggunaan Dana PMN Tahun 2015 pada PT PPA untuk Alokasi Penanganan PT Survei Udara Panas (Persero) ("Panas"); (finalisasi Surat Dewan Komisaris) dan Lain-lain.	Tim Komite: Dedi Rudaedi Tirta Hidayat Iko Marita Mustokoweni Ahmad Malkan Lubis Hendy Fakhruddin Triza Noviasari
10.	30 Agustus 2017	Rapat, KA, KPR & GCG dan Manajemen Pembahasan Arah PT PPA ke Depan dan Rencana untuk Pengadaan FGD PT PPA – GM Divisi <i>Strategic Planning & Monitoring</i> ; Pembahasan <i>Peer Review</i> RR BUMN – GM Internal Audit.	Tim Komite: Dedi Rudaedi Iko Marita Mustokoweni Ahmad Malkan Lubis
11.	12 September 2017	Rapat KA, KPR & GCG dan Manajemen Pembahasan mengenai PT Dirgantara Indonesia ("PT DI"); dan Lain-lain.	Tim Komite: Dedi Rudaedi Iko Marita Mustokoweni Ahmad Malkan Lubis Hendy Fakhruddin Triza Noviasari
12.	03 Oktober 2017	Rapat KA dan KPR & GCG Pembahasan RKA Dewan Komisaris Tahun 2018; dan Lain-lain.	Tim Komite: Dedi Rudaedi Iko Marita Mustokoweni Ahmad Malkan Lubis Triza Noviasari
13.	17 Oktober 2017	Rapat KA, KPR & GCG dan Manajemen Pembahasan Rencana Penunjukan Asesor GCG PT PPA; dan Pembahasan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA).	Tim Komite: Dedi Rudaedi Iko Marita Mustokoweni Hendy Fakhruddin Triza Noviasari

No	Tanggal	Agenda	Kehadiran/Keterangan
14.	24 Oktober 2017	Rapat KA, KPR & GCG dan Manajemen Pembahasan RKAP PT PPA Tahun Buku 2018; dan Lain-lain.	Tim Komite: Dedi Rudaedi Iko Marita Mustokoweni Ahmad Malkan Lubis Hendy Fakhruddin Triza Noviasari
15.	14 November 2017	Rapat KA, KPR & GCG dan Manajemen Pembahasan surat No.S-4109/PPA/PD/1117, tgl 8 November 2017 perihal Permohonan Tanggapan Dewan Komisaris atas Pembentukan Perusahaan Patungan dibidang Pengelolaan Hutan dalam Rangka Pengoperasian Pabrik Kertas PT KKA; Pembahasan <i>Peer Review</i> RR BUMN untuk PT PAL dan PT IKI dengan mengundang PIC dari BAAM dan DIA. (tidak jadi dilaksanakan); dan Rapat rutin dengan DIA membahas laporan TW III DIA dan hasil audit/review yang belum dibahas bersama KA	Tim Komite: Dedi Rudaedi Iko Marita Mustokoweni Ahmad Malkan Lubis

Jumlah pertemuan dan tingkat kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Hendrika Nora Oslo Sinaga	Ketua	5	3	60
Dedi Rudaedi	Ketua	1	1	100
Tirta Hidayat	Ketua	7	3	43
Ahmad Malkan Lubis	Anggota	19	13	69
Triza Noviasari	Anggota	14	11	79
Hendy M. Fakhruddin	Anggota	16	10	63
Awal Susmanto	Anggota	0	0	0

Program Pelatihan Komite Pemantau Risiko dan GCG

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Komite Pemantau Risiko dan GCG, Perseroan memberikan kesempatan kepada anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG mengikuti pelatihan dan seminar.

Berikut ini adalah daftar pelatihan yang telah diikuti anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG.

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Penyelenggara
Tirta Hidayat	Ketua	Partisipasi pada FGD Sinergi BUMN Untuk Meningkatkan Investasi sehubungan dengan Perpres No.91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.	Jakarta tanggal 12 Oktober 2017	Kemenko
		Rapat Kerja Grup PT PPA	Bogor tanggal 7-8 Desember 2017	PT PPA
Hendy Fakhruddin	Anggota	Rapat Kerja Grup PT PPA	Bogor tanggal 7-8 Desember 2017	PT PPA

Penilaian Kinerja Komite Pemantau Risiko dan GCG

Evaluasi Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko dan GCG berdasarkan Piagam dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Dewan Komisaris. Metode penilaian kinerja tersebut berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang telah tersusun dalam RKA tahunan Komite Pemantau Risiko dan GCG yang dilaporkan secara triwulanan maupun tahunan dalam laporan Komite Pemantau Risiko dan GCG.

Penilaian juga dilakukan atas saran, rekomendasi dan masukan yang diberikan oleh Komite Pemantau Risiko dan GCG terkait penyempurnaan *soft-structure* pendukung pelaksanaan GCG dan manajemen risiko, pelaksanaan dan peningkatan efektivitas GCG dan manajemen risiko serta pengelolaan program investasi dan pengembangan di Perseroan.

Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG untuk periode jabatan berikutnya.

Kebijakan Remunerasi Komite Pemantau Risiko dan GCG

Sesuai yang tercantum pada Piagam Komite Pemantau Risiko dan GCG dan Surat Edaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor SE-23/XII/2013, penghasilan anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan. Penghasilan Komite Pemantau Risiko dan GCG berupa honorarium dengan jumlah 15-20% dari gaji Direktur Utama dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lainnya selain honorarium tersebut.

Fungsi Nominasi dan/atau Remunerasi

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, bahwa jumlah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) Komite, yaitu Komite Audit dan Komite lainnya jika diperlukan. Implementasi saat ini di Perseroan telah terbentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dan GCG. Mempertimbangkan bahwa perseroan telah memenuhi ketentuan jumlah maksimal komite yang ditetapkan, maka untuk perbantuan pengawasan pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris melalui penugasan lainnya kepada Komite Audit dan/atau dibantu oleh Komite Pemantau Risiko dan GCG.

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Tugas dan tanggung jawab Fungsi Nominasi dan Remunerasi adalah melakukan pengawasan sistem dan proses penetapan nominasi serta penyusunan dan pemberian remunerasi Dewan Komisaris maupun Direksi.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Komite Audit telah melaksanakan penugasan program kerja bidang nominasi dan remunerasi selama 2017, diantaranya:

1. Meninjau Kebijakan SDM dan pelaksanaannya,
2. Meninjau usulan remunerasi Direksi,
3. Membahas pengembangan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Penilaian Kinerja Direksi,
4. Membahas pengembangan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Kebijakan Dewan Komisaris dalam Pemilihan Calon Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Patungan Perseroan.

Proses Suksesi Direksi

Dalam mewujudkan mekanisme pemilihan dan penggantian anggota Direksi yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, calon anggota Direksi Perseroan telah melalui beberapa rangkaian proses sebelum diusulkan oleh Pemegang Saham. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-03/MBU/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN, dan PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN.

Proses suksesi calon Direksi Perseroan, dan Direksi/Komisaris Anak Perusahaan Perseroan dijelaskan sebagai berikut:



Anggota Direksi Perseroan diangkat dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham, calon anggota Direksi melalui beberapa rangkaian proses seleksi sebelum diusulkan oleh Pemegang Saham. Adapun pengangkatan Direksi ditetapkan oleh RUPS.

Selain itu, untuk memastikan regenerasi dalam pengelolaan Perseroan, Perseroan memiliki program *Talent Management System* yang bertujuan untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin untuk menempati posisi-posisi kunci maupun kandidat Direksi dari internal Perseroan jika sewaktu-waktu diperlukan untuk mengisi jabatan yang lowong. Hingga akhir tahun buku 31 Desember 2017, terdapat 2 (dua) orang anggota Direksi yang berasal dari internal Perseroan. Selain itu, pengembangan SDM kandidat pimpinan Perseroan dilakukan juga melalui penempatan karyawan Perseroan menjadi Direksi pada Anak Perusahaan.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan diangkat oleh Perseroan dengan mempertimbangkan kemampuan profesional serta integritasnya di perusahaan, lingkungan bisnis dan *stakeholders*. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Fungsi dan peran Sekretaris Perusahaan dijabarkan dalam Petunjuk Teknis Sekretaris Perusahaan yang ditetapkan oleh Direktur Utama Perseroan pada tanggal 5 Oktober 2011.

Petunjuk Teknis Sekretaris Perusahaan berisi kebijakan yang mengatur tugas pokok Grup *Corporate Internal*, Grup *Corporate Communication* serta Grup *Legal Counsel*.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu bila diminta.
3. Sebagai penghubung (*liaison officer*).
4. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.
5. Memberikan saran/pendapat hukum kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan.
6. Mengkoordinasikan fungsi dukungan aspek hukum dalam kegiatan operasional Perseroan.

Profil Sekretaris Perusahaan

Pada saat ini Sekretaris Perusahaan Perseroan dijabat oleh Edi Winanto sejak 16 September 2016 berdasarkan surat Keputusan Direksi Perseroan No.: SK-59/PPA/0916 tanggal 16 September 2016.

Berikut profil ringkasnya:

Edi Winanto, 54 tahun
Sekretaris Perusahaan



Edi Winanto lahir di Batang, 28 Desember 1963. Saat ini berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak September 2016.

Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum dari Universitas Islam Sultan Agung (1989) dan S2 Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada (2005).

Karirnya di Perseroan bermula saat menjadi Kepala Divisi Hukum PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sejak tahun 2004.

Struktur Organisasi Divisi *Corporate Secretary & Legal Counsel*

Struktur organisasi Divisi *Corporate Secretary & Legal Counsel* Perseroan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:



Program Kerja dan Realisasi Kegiatan Sekretaris Perusahaan tahun 2017

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan sepanjang 2017 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	RKAP 2017	Realisasi 2017
1	Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan Rapat Direksi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan	12	14
2	Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan Rapat Dewan Komisaris & Direksi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan	12	12
3	Membuat Risalah Rapat Direksi	12	14 Risalah Rapat Direksi dengan status Final
4	Mengelola Dokumen Perusahaan: Penatausahaan dokumen setiap kali dokumen diterima	Seluruh dokumen Perusahaan yang diterbitkan oleh seluruh satuan kerja	Penatausahaan seluruh dokumen Perusahaan
5	Menjalankan fungsi pelaksanaan dan pendokumentasian RUPS dan Rapat Direksi	2 Keputusan RUPS dan 12 Risalah Rapat Direksi	2 Keputusan RUPS dan 14 Risalah Rapat Direksi

No	Kegiatan	RKAP 2017	Realisasi 2017
6	Membuat Laporan Manajemen: a. Triwulan b. Tahunan	a. 3 Laporan Manajemen Triwulan b. 1 Laporan Manajemen Tahunan	a. Laporan Manajemen Triwulan I, II, III b. 1 Laporan Manajemen Tahunan
7	Membuat <i>Annual Report</i>	Penyusunan <i>Annual Report</i>	<i>Annual Report</i> tahun 2016
8	Melaksanakan Program Pengenalan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi baru setiap ada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris baru	Setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris baru	Pada tahun 2017 telah dilaksanakan program pengenalan terhadap 1 anggota Dewan Komisaris baru pada tanggal 7 Juni 2017.
9	Menyalurkan dana Program Kemitraan	Penyaluran diatas 80% dari dana tersedia	Realisasi penyaluran dana PK sebesar 83,79%
10	Monitoring Kolektibilitas Pinjaman Program Kemitraan	Kolektibilitas Pinjaman diatas 80% dari dana yang disalurkan	Realisasi kolektibilitas pinjaman sebesar 99,74%
11	Menyalurkan dana Program Bina Lingkungan	Menyalurkan dana Program Bina Lingkungan diatas 80% dari dana tersedia	Realisasi penyaluran dana Bina Lingkungan sebesar 99,63%
12	<i>News Monitoring</i>	Rutin dilakukan harian	Rutin dilakukan harian
13	<i>News Analysis</i>	Rutin dilakukan bulanan	Rutin dilakukan bulanan
14	Publikasi Info <i>Corporate Secretary</i>	Rutin dilakukan menyesuaikan kegiatan Perseroan	Rutin dilakukan menyesuaikan kegiatan Perseroan
15	Transparansi Informasi: <i>Website</i> Perseroan & Portal BUMN	<i>Update</i> dan <i>Maintenance Data</i>	<i>Update</i> dan <i>Maintenance Data</i>
16	Transparansi Informasi: pengelolaan email corpsec@ptppa.com	Rutin dilakukan harian	Rutin dilakukan harian
17	Dukungan pada kegiatan acara peringatan hari besar nasional	Disesuaikan dengan program acara Pemerintah	Pelaksanaan: • Upacara HUT RI ke-71 • Upacara Kesaktian Pancasila • Upacara Hari Pahlawan
18	<i>Company Visit</i>	Disesuaikan dengan kegiatan perusahaan	• Pada tanggal 19 Mei 2017 Perseroan bersama tim dari Kementerian BUMN dan DJKN Kementerian Keuangan mengadakan kunjungan kerja dalam rangka evaluasi berkala pelaksanaan Program R/R PT DI tahun 2016. • Pendampingan kunjungan kerja Kementerian BUMN ke Polyrama, Balongan Jawa Barat pada tanggal 24 Mei 2017.
19	Infrastruktur <i>Branding</i>	Pelaksanaan distribusi Kalender 2017 Perseroan kepada <i>stakeholder</i> eksternal & media.	Selesai

No	Kegiatan	RKAP 2017	Realisasi 2017
20	Dukungan Kegiatan Perusahaan	Disesuaikan dengan kebutuhan	Bersama dengan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Sarinah (Persero), PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung dalam pelaksanaan kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri di Propinsi DKI Jakarta dan Program Siswa Mengenal Nusantara di Kalimantan Timur pada bulan Agustus 2017
21	Protokoler Direksi	Pendampingan Direksi pada acara formal/informal Perseroan	Dilaksanakan sesuai kebutuhan termasuk pendampingan dalam <i>company visit</i>
22	Kegiatan <i>Group Legal Counsel</i>	Pemberian dukungan aspek hukum pada kegiatan Perseroan	Dukungan aspek hukum pada seluruh kegiatan Perseroan yaitu: • Kegiatan Restrukturisasi/ Revitalisasi BUMN • Kegiatan investasi Perseroan • Kegiatan pengelolaan aset Perseroan • Kegiatan Operasional Perseroan • Kegiatan Penanganan Litigasi

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan Tahun 2017

Selama tahun 2017 Sekretaris Perusahaan telah melakukan aktivitas pengembangan kompetensi antara lain:

No	Pelatihan/Workshop	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
1	Workshop Achieving Fiscal Year 2018 Through Professional Excellence and Growth	7-8 Des 2017	PT Perusahaan Pengelola Aset	Bogor

Penilaian Kinerja Sekretaris Perusahaan

Direktur Utama Perseroan melakukan evaluasi atas kinerja Sekretaris Perusahaan untuk tahun 2017. Indikator penilaian berdasarkan parameter kriteria Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan. Untuk tahun 2017, Sekretaris Perusahaan telah mencapai target Perseroan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.

Keterbukaan Informasi

Dalam hal keterbukaan informasi, Direksi wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Triwulanan/Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan kepada Pemegang Saham, dan Instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas, dan objektif.

Selain pengungkapan informasi sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, Direksi harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan hal-hal penting lainnya yang berguna untuk pengambilan keputusan Pemegang Saham serta pemangku kepentingan lainnya, antara lain mengenai:

1. Tujuan, sasaran usaha dan strategi Perseroan;
2. Penilaian terhadap Perseroan oleh eksternal auditor, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
3. Riwayat hidup anggota Dewan Komisaris, Direksi dan eksekutif kunci Perseroan, serta gaji dan tunjangan mereka;
4. Sistem pemberian honorarium untuk eksternal auditor Perseroan.
5. Sistem penggajian dan pemberian tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Faktor risiko material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor risiko;
7. Informasi material mengenai karyawan Perseroan dan Pemangku Kepentingan;
8. Klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perseroan dan perkara yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan Perseroan;
9. Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan/atau yang sedang berlangsung; dan
10. Pelaksanaan pedoman GCG.

Direksi dan Dewan Komisaris secara aktif mengungkapkan melaksanakan pelaksanaan prinsip GCG dan materialitas masalah yang dihadapi. Seluruh Organ Perseroan memastikan bahwa semua informasi dan/atau suatu produk Perseroan dirahasiakan sampai pengumuman mengenai hal tersebut disampaikan kepada masyarakat.

Komunikasi dan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik milik Perseroan, antara Perseroan dengan Para Pemangku Kepentingan harus terjalin hubungan yang sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan dan saling menghormati berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para Pemangku Kepentingan yang dimaksud dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan milik Perseroan meliputi:

1. Karyawan;
2. Instansi Pemerintah terkait;
3. BUMN lain;
4. Kreditur;
5. Rekanan;
6. Masyarakat; dan
7. Pemangku kepentingan lain yang mempunyai hubungan hukum dengan Perseroan.

AUDIT INTERNAL

Divisi Internal Audit (DIA) merupakan unit kerja independen yang dipimpin oleh *General Manager* yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Divisi Internal Audit merupakan mitra manajemen dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), pengelolaan risiko serta penerapan pengendalian internal di lingkungan perseroan dan dituntut untuk selalu dapat memberikan nilai tambah dan landasan yang kuat bagi perusahaan.

Dasar Hukum Penunjukan dan Struktur Organisasi Divisi Internal Audit

Merujuk pada Ketentuan pasal 28 dan pasal 29 Peraturan Menteri BUMN nomor PER-01/MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, *General Manager* IA diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Jumlah Pegawai Divisi Internal Audit

Jumlah personil pada DIA saat ini berjumlah 5 (lima) orang, masing-masing terdiri dari 1 *General Manager*, 1 *Group Head/Specialist* Madya dan 2 *Junior Specialist*. DIA juga didukung oleh 1 (satu) orang Sekretaris yang juga bertugas pada Divisi *Risk Management*.

Persyaratan Menjadi Auditor Internal

Perseroan telah menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pegawai untuk menjadi auditor Perseroan. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan audit, Piagam Internal Audit mengharuskan auditor memenuhi kualifikasi tertentu, yaitu:

1. Memiliki integritas serta perilaku yang objektif dan profesional, dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
3. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
4. Wajib mematuhi standar profesi dan kode etik audit internal.
5. Wajib mematuhi aturan perilaku yang ditetapkan oleh Perusahaan, wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, penetapan/putusan pengadilan, atau kewajiban profesi.
6. Memahami prinsip-prinsip manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan yang baik.
7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

Sertifikasi Profesi

Sertifikasi profesi menunjukkan kualitas auditor yang memadai dalam menunjang tugas dan tanggung jawabnya. Dari keseluruhan pegawai pada DIA, 2 orang di antaranya telah memiliki sertifikasi profesi sebagai berikut:

- Auditor Ahli, CIA, CRMA, CA : 1 orang
- Auditor Ahli, ERMAP, CA : 1 orang

Keterangan:

No	Nama Sertifikasi Profesi	Lembaga Penerbit
1.	Auditor Ahli	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
2.	Chartered Accountant (CA)	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
3.	Certified Internal Auditor (CIA)	The Institute of Internal Auditors (IIA)
4.	Certification in Risk Management Assurance (CRMA)	The Institute of Internal Auditors (IIA)
5.	Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)	ERM Academy

Pengembangan Kompetensi Auditor Internal Tahun 2017

Perseroan memiliki program pengembangan kompetensi baik secara internal maupun yang diadakan oleh lembaga eksternal. Pengembangan kompetensi pada lembaga eksternal dilakukan melalui pelatihan formal dalam bentuk kursus atau seminar/lokakarya.

Selama tahun 2017, auditor internal telah mengikuti program pelatihan sebagai berikut:

No	Nama Training/ Event	Jumlah Peserta	Penyelenggara Training	Tempat dan Waktu
1.	Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) 2017	1	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	Medan, 9-10 Mei 2017
2.	Optimizing and Managing Treasury Audit Process	1	Media Edutama Indonesia	Malang, 8-10 Agustus 2017
3.	Pelatihan Asesor KPKU BUMN	1	Forum Ekselen BUMN	Jakarta, 14-16 Agustus 2017
4.	Konferensi Nasional II FKSPI Tahun 2017	1	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI)	Bali, 23-25 Agustus 2017
5.	KPKU Assessor Preparation Course	1	Forum Ekselen BUMN	Bandung, 15-16 September 2017
6.	IIA Indonesia National Conference 2017	2	The Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia	Bandung, 10-11 Oktober 2017

Struktur Organisasi Divisi Internal Audit

Struktur organisasi DIA ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK-28/PPA/0415 dan No. SK-31/PPA/0415 sebagai berikut:



Sesuai jenjangnya, setiap Auditor mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan penugasan audit internal mengacu kepada panduan profesi dan rencana kegiatan yang telah disusun.

Profil *General Manager* Divisi Internal Audit

General Manager DIA diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Saat ini *General Manager* DIA dijabat oleh Made Sumadi Arta berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK-31/PPA/0415 tanggal 27 April 2015, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dengan Surat Nomor S-14/PPA/KOM/0415 tanggal 7 April 2015. Adapun profil ringkas *General Manager* DIA sebagai berikut:

Made Sumadi Arta, 56 tahun
General Manager DIA



Lahir di Singaraja pada tanggal 2 September 1961, menjabat sebagai *General Manager* DIA sejak 1 Mei 2015. Menyelesaikan pendidikan Akuntan dari STAN pada tahun 1989, Diploma on Governmental Auditing tahun 1993 di Adelaide South Australia, serta Magister Manajemen STIE IBII tahun 1997. Mengawali karir sebagai auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak 1983. Sejak tahun 1999 bergabung dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan dilanjutkan pada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sejak 2004 dengan menjabat sebagai Kepala Unit pada Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PPA. Pada tahun 2008 dipromosikan sebagai Kepala Grup SPI/ Divisi Internal Audit PT PPA. Memiliki sertifikasi profesi: Auditor Ahli (BPKP), ERMAP, CA

Jenis pelatihan yang telah diikuti *General Manager* DIA diantaranya :

1. Konferensi Nasional II FKSPI Tahun 2017, Bali (FKSPI)
2. IIA Indonesia National Conference 2016, Bali (IIA Indonesia)
3. Interpretasi KPKU, Jakarta (Forum Ekselen BUMN)
4. International Seminar: *The Relevance of Professional Accountant in a Hyper Connected World*, Jakarta (IAI-IFAC)
5. ISO 31000 Risk Management, Bandung (ERMA)

Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan DIA

DIA berperan melaksanakan fungsi *assurance* dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan objektif bagi manajemen sehingga dapat mendorong penciptaan nilai tambah dan memperbaiki operasional bisnis Perseroan. Tugas dan tanggung jawab DIA sesuai Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) meliputi:

1. Menyusun rencana audit internal berbasis risiko sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun
2. Menyampaikan rencana audit internal kepada Direktur Utama dan Komite Audit Perseroan untuk dilakukan *review* dan persetujuan.
3. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan sesuai dengan kebijakan Perseroan.
4. Melakukan audit/*review* dengan tujuan tertentu pada satuan kerja dan /atau kegiatan, sesuai dengan rencana audit internal tahunan.
5. Memberikan opini dan/atau kesimpulan yang objektif tentang kegiatan yang diaudit serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.
6. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada pihak terkait.
7. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan rencana aksi atas rekomendasi yang telah diberikan.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
9. Melakukan tugas lain yang dipandang perlu oleh Direktur Utama Perseroan.

10. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama Perseroan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
11. Baik dalam penugasan audit maupun konsultasi, DIA hanya bertanggung jawab pada rekomendasi dan/atau masukan serta opini dan/atau kesimpulan yang dihasilkan dari prosedur yang dilakukan secara memadai dari penugasan tersebut.

Aktivitas Divisi Internal Audit

Perencanaan dan Realisasi Audit 2017

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan Internal Audit yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") tahun 2017, Internal Audit merencanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Penugasan Audit/Review sebanyak 12 (dua belas) penugasan, termasuk melaksanakan pemantauan terhadap tindak lanjut unit-unit kerja atas rekomendasi dalam laporan audit/review Internal Audit yang dilakukan secara bulanan. Monitoring tindak lanjut dilakukan sampai dengan rekomendasi yang telah disepakati oleh unit kerja terkait selesai ditindaklanjuti.
2. Penugasan Konsultasi (*Consulting*) sesuai dengan permintaan unit-unit kerja dan/atau arahan Direktur Utama.
3. Manajemen internal audit yang meliputi administrasi penugasan, pemutakhiran kebijakan dan prosedur, pemutakhiran rencana, serta pelaporan kegiatan.
4. Kegiatan lain yang meliputi: *counterpart* auditor eksternal (BPK RI/Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan/KAP) sesuai dengan penugasan mereka, rapat dengan Komite Audit dan Direktur Utama sesuai kebutuhan, serta monitoring tindak lanjut atas rekomendasi auditor eksternal (bila masih ada yang terbuka).

Dari 12 (dua belas) penugasan audit/review yang direncanakan, selama tahun 2017 Internal Audit telah melakukan penugasan Audit/Review sebanyak 11 (sebelas) penugasan dari RKAP 2017 dan 3 penugasan audit di luar RKAP 2017. Ditambah dengan penyelesaian luncuran RKAP 2016 sebanyak 1 (satu) penugasan, maka penugasan audit/review DIA selama tahun 2017 adalah sebanyak 15 (lima belas) penugasan. Untuk kegiatan *consulting*, selama tahun 2017 DIA telah melaksanakan 2 penugasan dengan menghasilkan 4 produk laporan.

Sistem Informasi Internal Audit

Untuk membantu Internal Audit dalam mengelola pelaksanaan audit dan konsultasi, mulai dari perencanaan hingga pelaporan hasil audit dan konsultasi, serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana aksi atas rekomendasi hasil audit, maka Perseroan membuat sistem informasi audit internal yang diberi nama Sistem Administrasi Penugasan dan Temuan Audit (SAPTA).

SAPTA berfungsi untuk:

1. Melakukan penilaian risiko Perseroan untuk pembuatan Rencana Audit Tahunan Berbasis Risiko oleh Internal Audit;
2. Menilai tingkat kecukupan dan efektivitas *internal control*. SAPTA telah dilengkapi dengan modul untuk mengukur tingkat kecukupan dan efektivitas *internal control* sesuai dengan *framework* COSO, yaitu mencakup tujuan operasi, kepatuhan dan pelaporan
3. Menilai kinerja auditor internal dalam pelaksanaan tugas audit dan konsultasi;
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana aksi yang disampaikan oleh *auditee* atas rekomendasi hasil audit. Internal Audit dapat menerima, mengevaluasi dan menyetujui atau menolak laporan pelaksanaan rencana aksi yang disampaikan oleh *auditee* atas rekomendasi hasil audit dan evaluasi;
5. Melaporkan hasil audit dan konsultasi serta status pelaksanaan rencana aksi atas rekomendasi hasil audit dan konsultasi.

Quality Assurance

Agar Audit Internal sebagai fungsi *assurance* perusahaan dapat berjalan dengan baik dan efektif, maka fungsi Audit Internal didukung oleh berbagai komponen/ elemen yang saling mendukung. Seluruh komponen/ elemen pendukung Internal Audit senantiasa diawasi untuk dinilai kecukupan dan keefektifannya sebagai penjaminan mutu (*quality assurance*) atas kegiatan Audit Internal.

Oleh karena itu, secara periodik Audit Internal melaksanakan *periodic internal assessment* untuk meninjau seluruh aspek dari kegiatan/aktivitas audit internal dan secara berkelanjutan mengawasi tingkat efektivitasnya.

AUDITOR EKSTERNAL

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Perseroan dilakukan dengan melaksanakan audit eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Mekanisme Pemilihan Akuntan Publik 2017

Penetapan Akuntan Publik

Sesuai keputusan RUPS tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Risalah RUPS tentang pengesahan laporan keuangan tahun buku 2017, RUPS Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan Penunjukan dan penetapan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagai auditor Laporan Keuangan tahun buku 2017 dan juga sebagai auditor Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2017, dengan melibatkan peran aktif dari Komite Audit.

Berdasarkan surat Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) No. S-37/PPA/KOM/0817 tanggal 22 Agustus 2017, KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan telah ditetapkan sebagai Akuntan Publik yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.

Proses Penunjukan Auditor Eksternal

Proses penunjukan Auditor Eksternal dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap Kantor Akuntan Publik.
2. Komite Audit melaporkan Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2017 kepada Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris menyampaikan Penetapan Kantor Akuntan Publik dalam Rangka Audit Umum Perseroan Tahun Buku 2017
4. Dewan Komisaris mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik.

Auditor Eksternal Perseroan 2011-2017

Tahun	Kantor Akuntan Publik		Nilai Kontrak (Rp)	Jasa Audit
2011	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto	Saptoto Agustomo	495.000.000	Audit atas Laporan Keuangan Audit Lapran Keuangan PKBL Audit Kepatuhan Audit Hasil Evaluasi Kinerja Perseroan
2012	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto	Saptoto Agustomo	495.000.000	Audit atas Laporan Keuangan Audit Lapran Keuangan PKBL Audit Kepatuhan Audit Hasil Evaluasi Kinerja Perseroan
2013	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto	Maurice Ganda Nainggolan	495.000.000	Audit atas Laporan Keuangan Audit Lapran Keuangan PKBL Audit Kepatuhan Audit Hasil Evaluasi Kinerja Perseroan

Tahun	Kantor Akuntan Publik		Nilai Kontrak (Rp)	Jasa Audit
2014	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto	Arief A. Dhani	495.000.000	Audit atas Laporan Keuangan Audit Laporan Keuangan PKBL Audit Kepatuhan Audit Hasil Evaluasi Kinerja Perseroan
2015	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto	Saptoto Agustomo	709.500.000	Audit atas Laporan Keuangan Audit Lapran Keuangan PKBL Audit Kepatuhan Audit Hasil Evaluasi Kinerja Perseroan
2016	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto	Saptoto Agustomo	522.500.000	Audit atas Laporan Keuangan Audit Lapran Keuangan PKBL Audit Kepatuhan Audit Hasil Evaluasi Kinerja Perseroan
2017	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Saptoto Agustomo	528.000.000	Audit atas Laporan Keuangan Audit Laporan Keuangan PKBL Audit Hasil Evaluasi Kinerja Perseroan

Ruang Lingkup Pekerjaan Akuntan Publik

1. Melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak Tahun Buku 2017 yang mencakup audit atas perusahaan induk dan review Konsolidasian atas Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Melakukan review atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perseroan untuk Tahun Buku 2017 sesuai dengan Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Menteri Badan Usaha Milik Negara
3. Melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun Buku 2017.

Di luar hal-hal di atas, Kantor Akuntan Publik tidak memberikan jasa lain kepada Perseroan.

Pengawasan atas Auditor Eksternal

Penunjukan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dilakukan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penunjukan tersebut telah ditelaah dan diawasi oleh Komite Audit termasuk dalam hal penetapan audit fee atas dasar kewajiban. Komite Audit melakukan pengawasan selama pelaksanaan proses audit eksternal melalui pertemuan secara rutin dengan Kantor Akuntan Publik untuk membahas seluruh temuan dan perkembangan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik, membantu dan memastikan bahwa tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan audit serta melakukan evaluasi atas kualitas proses audit, memastikan pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Mengenai Hubungan antara Perusahaan, Akuntan Publik dan Otoritas

Perseroan telah menyelenggarakan pelaksanaan audit eksternal dan kepatuhan terhadap ketentuan mengenai hubungan antara Perseroan, Akuntan Publik dan Otoritas dengan efektif, antara lain sebagai berikut:

Fungsi Audit Eksternal

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik pada pasal 3 ayat 1 disebutkan Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
- b. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang sama oleh Perseroan wajib didasarkan pada perjanjian kerja.
- c. Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan Perseroan wajib melakukan audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta sesuai dengan perjanjian kerja dan ruang lingkup audit. Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Efektivitas Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik

Komite Audit berkoordinasi dengan Divisi Internal Audit Perseroan melakukan kajian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal untuk memastikan bahwa seluruh temuan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ditetapkan dan meningkatkan kinerja baik dari segi keuangan maupun operasional. Perseroan berupaya menindaklanjuti setiap temuan pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik, sehingga secara efektif mampu menekan temuan-temuan ditahun berikutnya.

Hasil Pemeriksaan

Hasil Pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh auditor eksternal disampaikan dalam bentuk Opini Laporan Keuangan. Untuk tahun 2017, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan memperoleh Opini disajikan secara Wajar tanpa Pengecualian. Hal ini menunjukkan Perseroan telah menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasian secara akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku serta lepas dari salah saji yang material.

MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perseroan. Penerapan manajemen risiko yang komprehensif merupakan salah satu aspek penting bagi Perseroan untuk mengelola secara efektif, efisien dan konsisten berbagai risiko yang dihadapi sebagai perwujudan dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Perseroan senantiasa menyusun, mengevaluasi, dan menyempurnakan kebijakan dan prosedur untuk mendukung kegiatan usaha dalam rangka mewujudkan efektivitas strategi manajemen risiko agar tetap sejalan dengan perkembangan bisnis yang semakin kompleks.

Dasar Penerapan Manajemen Risiko

Sebagai salah satu bentuk mandat dan komitmen Perseroan dalam penerapan Manajemen Risiko secara luas dan terintegrasi, serta dalam rangka menunjang kepastian pencapaian tujuan/Rencana Jangka Panjang, Perseroan telah menyusun Kebijakan Manajemen Risiko dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK-62/PPA/1109 tanggal 16 Nopember 2009.

Pada tahun 2015, Perseroan telah melakukan pembaharuan terhadap Kebijakan Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-49/PPA/0915 tanggal 17 September 2015. Kebijakan Manajemen Risiko tersebut mengatur tentang sistem manajemen risiko di Perseroan yang mengacu pada standar ISO 31000:2009 "*Risk Management-Principles and Guideline*" dan menjadi pedoman bagi seluruh insan Perseroan dalam melaksanakan kegiatan manajemen risiko.

Sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko, penerapan manajemen risiko di Perseroan dilakukan pada:

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- b. Penyusunan dan persetujuan usulan kegiatan/transaksi.
- c. Pembuatan laporan risiko.
- d. Penyusunan Kebijakan.

Tujuan dari penerapan manajemen risiko bagi Perseroan adalah:

- a. Memberikan perlindungan dan kesinambungan kegiatan Perseroan dari kemungkinan timbulnya kejadian yang dapat mengganggu tercapainya tujuan Perseroan yang diakibatkan dari berbagai aktivitas bisnisnya serta menjaga tingkat risiko pada level yang dapat diterima oleh Perseroan
- b. Menyediakan *early warning signal* bagi pengambilan keputusan dengan pengendalian risiko yang baik.
- c. Membantu manajemen dalam menganalisis pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan guna memberikan nilai tambah (*operational excellence*).
- d. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan manajemen risiko dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di Perseroan sesuai dengan filosofi manajemen risiko yaitu manajemen risiko bersifat melekat pada setiap Karyawan dan Direksi Perseroan dan harus diintegrasikan ke dalam proses kerja.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko di Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris
2. Direksi

3. Komite Pemantau Risiko dan *Good Corporate Governance* yang diketuai oleh salah satu anggota Dewan Komisaris
4. Divisi Manajemen Risiko
5. *Risk Owner* (seluruh satuan kerja bisnis dan *support*)
6. Internal Audit

Untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerapan manajemen risiko, Perseroan membentuk Divisi Manajemen Risiko yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK-28/PPA/0415 tanggal 27 April 2015.

Struktur organisasi Divisi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:



Jumlah personil pada Divisi Manajemen Risiko saat ini berjumlah 3 orang, terdiri dari 1 General Manager, 1 Specialist Madya, dan 1 Specialist.

Kualifikasi/Sertifikasi Profesi

Dari 3 orang personil Divisi Manajemen Risiko tersebut, 2 orang diantaranya memiliki sertifikasi profesi, yaitu *Certified Risk Management Professional* (CRMP) yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR).

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawab Divisi Manajemen Risiko dalam mendorong terlaksananya pengelolaan risiko secara efektif sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko adalah:

- a. Menyusun/mengembangkan Kebijakan Manajemen Risiko dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kegiatan utama Perseroan.
- b. Melakukan evaluasi efektivitas penerapan Kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku di Perseroan.
- c. Memfasilitasi penyusunan laporan Profil Risiko pada satuan kerja Pemilik Risiko (*Risk Owner*).
- d. Melakukan pelaporan Profil Risiko Perseroan sebagai *early warning signal* kepada Direksi.
- e. Memberikan layanan konsultasi atas penerapan Manajemen Risiko di Perseroan.
- f. Melaksanakan *review* kecukupan kajian risiko atas kegiatan Perseroan yang bersifat strategis dan/atau melibatkan aspek finansial dengan nilai tertentu.

Kinerja Divisi Manajemen Risiko

Pada tahun 2017, Divisi Manajemen Risiko telah melaksanakan program kerja sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan 2 Kebijakan dan 2 SOP.
- b. Melakukan *review* dan memberi masukan atas 4 Kebijakan dan 4 SOP yang disusun oleh satuan kerja diluar Divisi Manajemen Risiko.
- c. Melakukan evaluasi atas 3 Kebijakan dalam rangka menilai kesesuaian Kebijakan yang berlaku dengan perkembangan kegiatan Perseroan.
- d. Memfasilitasi penyusunan Profil Risiko pada *risk owner* dan menyusun Laporan Profil Risiko Perseroan.

- e. Melakukan *review* kecukupan kajian risiko atas 141 dokumen usulan kegiatan Perseroan
- f. Memberi masukan dan/atau pendapat terkait manajemen risiko kepada satuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan Perseroan.
- g. Memberikan masukan dan/atau pendapat terkait dengan manajemen risiko atas rencana kegiatan investasi anak perusahaan serta Kebijakan/SOP yang disusun oleh anak perusahaan.

Strategi Manajemen Risiko

Dalam mendukung kegiatan usaha Perseroan, penerapan manajemen risiko dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Menyusun dan memastikan tersedianya Kebijakan dan SOP sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan penerapan manajemen risiko.
- b. Mengintegrasikan proses manajemen risiko kedalam proses bisnis Perseroan, antara lain dengan cara:
 - Melakukan kajian risiko atas sasaran strategis Perseroan pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan,
 - Menerapkan pelaksanaan kajian risiko atas setiap usulan kegiatan/proyek yang akan dilakukan oleh Perseroan,
 - Melakukan asesmen risiko secara berkala dan menyusun laporan profil risiko Perseroan.
- c. Melakukan sosialisasi dan fasilitasi penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan budaya risiko di Perseroan.

Selain itu, Direksi mengkomunikasikan secara berkelanjutan kepada seluruh insan Perseroan tentang pentingnya penerapan manajemen risiko yang efektif dalam rangka memastikan pencapaian tujuan Perseroan.

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko dilakukan secara periodik dengan mempertimbangkan antara lain perubahan struktur organisasi, penerbitan ketentuan perundang-undangan baru yang terkait

dengan kegiatan Perseroan, penetapan strategi baru atau perubahan strategi Perseroan.

Selain itu, evaluasi atas efektivitas manajemen risiko juga dilakukan melalui:

- a. Pelaksanaan penilaian risiko secara berkala atas kegiatan utama Perseroan melalui pendekatan *Risk & Control Self Assessment* (RCSA).
- b. *Review* atas Kebijakan dan SOP untuk memastikan bahwa Perseroan senantiasa memiliki Kebijakan dan SOP terkini sesuai dengan perkembangan kegiatan Perseroan.
- c. Rapat berkala antara Divisi Manajemen Risiko dengan Komite Pemantau Risiko dan GCG.

Profil Risiko dan Mitigasi Risiko

Sejalan dengan komitmen Direksi Perseroan untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara efektif dan efisien, maka setiap jenjang organisasi Perseroan harus menerapkan manajemen risiko dengan memperhatikan prioritas dan manfaat tiap program kerja/proyek bagi kelangsungan usaha Perseroan.

Dalam rangka melindungi dan memberi nilai tambah serta menjadi bagian dari pengambilan keputusan, penerapan manajemen risiko di Perseroan antara lain dilakukan pada aktivitas sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan persetujuan usulan kegiatan/proyek
 Dalam menyusun suatu usulan kegiatan/proyek, satuan kerja pengusul harus melakukan kajian risiko yaitu identifikasi dan analisis risiko yang dapat timbul dari kegiatan yang diusulkan serta mitigasi atas risiko tersebut. Selanjutnya Divisi Manajemen Risiko akan melakukan *review* atas kecukupan kajian risiko yang dilakukan oleh satuan kerja pengusul sebagai masukan/pertimbangan bagi manajemen dalam mengambil keputusan.
- b. Identifikasi dan Penilaian Risiko

Secara berkala setiap satuan kerja/*risk owner* melakukan identifikasi dan penilaian risiko dalam rangka menyusun profil risiko dari satuan kerjanya. Pelaksanaan identifikasi dan penilaian risiko oleh *risk owner* akan difasilitasi oleh Divisi Manajemen Risiko. Dalam pelaksanaan penilaian risiko tersebut, Perseroan menggunakan pendekatan RCSA.

Identifikasi risiko untuk tahun 2017 dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2017. Berdasarkan kajian yang dilakukan selama periode tahun 2017, risiko-risiko utama yang dihadapi Perseroan dibagi menjadi risiko strategis, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko reputasi.

No	Risiko	Potensi Penyebab	Tindak Lindung
1.	Risiko Strategis	Pemilihan target investasi yang tidak tepat sehingga Perseroan tidak dapat melakukan pengembangan bisnis sesuai dengan rencana yang telah disusun.	Melakukan uji tuntas dan kajian kelayakan yang cukup (antara lain aspek komersial, aspek hukum) atas target investasi dalam penyusunan rencana bisnis dan membuat keputusan investasi.
2.	Risiko Strategis	Ketidaktepatan pengambilan strategi dalam menentukan opsi R/R BUMN.	• Uji Tuntas baik dari aspek keuangan, aspek hukum, aspek operasional dan aspek lainnya untuk mendapat gambaran menyeluruh dari BUMN terkait, termasuk permasalahan yang dihadapi BUMN. • Analisa industri untuk mendukung analisa prospek bisnis BUMN ke depan termasuk analisa atas prediksi kondisi perekonomian untuk jangka waktu tertentu dalam rangka penetapan opsi R/R BUMN dan rencana bisnis.
3.	Risiko Strategis	Tidak tercapainya target kinerja sebagian Anak Perusahaan.	• Pemantauan kinerja Anak Perusahaan melalui Laporan Perkembangan Proyek yang dibiayai Anak Perusahaan. • Pertemuan dengan Anak Perusahaan secara triwulanan dan sewaktu-waktu bila diperlukan dalam rangka evaluasi kinerja. • Memberi masukan kepada Anak Perusahaan untuk melakukan pengawasan atas proyek-proyek yang dibiayai. • Anak Perusahaan dapat menempatkan wakilnya di dalam proyek-proyek yang dibiayai.
4.	Risiko Strategis	Alokasi investasi pada perusahaan dan sektor industri tertentu yang dipilih sebagai target investasi mengalami perlambatan atau jenuh.	Dalam melakukan alokasi investasi memperhatikan tema investasi yang sedang berkembang dipasar dengan mencermati <i>outlook</i> ekonomi global dan ekonomi Indonesia.
5.	Risiko Kredit	Tidak terbayarnya pinjaman yang diberikan dalam rangka melaksanakan R/R BUMN kepada beberapa BUMN ("Debitur") yang antara lain dipengaruhi oleh: • Operasional Debitur terganggu atau tidak efisien. • Beban utang terlalu besar • Revenue lebih rendah dari biaya usaha. • Kondisi fasilitas produksi yang relatif kurang baik. • Komitmen yang rendah dari beberapa manajemen Debitur untuk memenuhi kewajibannya ke Perseroan. • Ketiadaan pembiayaan untuk modal kerja dan revitalisasi alat produksi pada beberapa Debitur.	• Pelaksanaan kajian kelayakan R/R BUMN terhadap seluruh aspek yang mempengaruhi kinerja usaha dan kemampuan Debitur untuk mengembalikan dana yang diterima dari Perseroan. • Penetapan persyaratan jaminan/agunan. • Pemantauan atas pemenuhan persyaratan dan kondisi yang telah ditetapkan antara Perseroan dan Debitur. • Memantau pencapaian target kinerja Debitur dan mengusulkan langkah antisipasi untuk meningkatkan kinerja. • Melakukan upaya penagihan yang efektif agar pembayaran kewajiban Debitur dapat dilakukan secara teratur sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan. • Melakukan langkah-langkah dalam rangka mengupayakan agar program R/R BUMN dapat diselesaikan tepat waktu sesuai perencanaan.
6.	Risiko Kredit	Kerugian atau kehilangan dana yang diinvestasikan pada pembiayaan proyek tertentu.	• Melakukan <i>due diligence</i> dan kajian kelayakan investasi yang memadai sebelum mengambil keputusan investasi. • Penetapan persyaratan jaminan/agunan • Menerapkan mekanisme <i>escrow account</i> (<i>rekening joint signature</i>) untuk menampung dana pembayaran proyek. • Pemantauan dan evaluasi atas kinerja debitur/proyek untuk memastikan terpenuhinya persyaratan/ketentuan yang diatur dalam perjanjian kredit dan/atau perjanjian lainnya.

No	Risiko	Potensi Penyebab	Tindak Lindung
7.	Risiko Bisnis	Tidak tercapainya target imbalan jasa kegiatan pengelolaan aset.	- Melakukan pemantauan pengelolaan aset berdasarkan rencana kerja yang telah disepakati oleh pemilik aset. - Mencari solusi atas hal hal yang dapat menghambat pelaksanaan rencana kerja. - Melaporkan kepada pemilik aset terkait rencana kerja yang tidak dapat direalisasi karena adanya permasalahan diluar kontrol Perseroan.
8.	Risiko Bisnis	Tidak tercapainya target pendapatan dari kegiatan <i>advisory</i> .	- Menyusun marketing <i>tool/sales kit</i>. - Menjalankan aktivitas inisiasi/marketing kepada <i>prospective clients</i>. - Mengembangkan kemampuan personil (<i>soft skill & hard skill</i>). - Memelihara hubungan baik dengan <i>existing customer/client</i> untuk mengupayakan perolehan <i>repeat order</i>.
9.	Risiko Pasar	Terjadi penurunan nilai atau kerugian atas portofolio saham dan surat utang akibat pergerakan harga saham/surat utang yang merugikan (<i>adverse movement</i>).	- Pemantauan secara berkesinambungan terhadap antara lain pergerakan indikator ekonomi, <i>outlook</i> industri, kondisi politik dan sosial, pergerakan bursa global dan regional yang akan mempengaruhi nilai saham dan diikuti dengan langkah-langkah antisipasi atas hasil pemantauan tersebut. - Penyebaran transaksi saham pada beberapa sektor industri dan pemilihan saham-saham yang memiliki fundamental dan kinerja yang baik. - Transaksi pada saham dilakukan pada saham yang likuid dan memiliki kapitalisasi pasar yang besar. - Pembagian tenor surat utang (<i>obligasi</i>) dengan memperhatikan penyebaran durasi obligasi yang telah dimiliki oleh Perseroan. - Pelaksanaan evaluasi secara berkala atas kinerja portofolio saham dan surat utang untuk memastikan bahwa perkembangannya masih sesuai dengan batasan, strategi dan target yang ditetapkan yang dapat diikuti dengan recomposisi dan realokasi portofolio.
10.	Risiko Likuiditas	Perseroan tidak memiliki dana yang cukup dan/atau tidak mampu mendapatkan pendanaan dari pihak lain dalam rangka membiayai kegiatan usahanya.	- Penetapan skala prioritas investasi yang akan dibiayai dengan mempertimbangkan antara lain tingkat imbal hasil, risiko, dan nilai strategis proyek yang akan dibiayai. - Membangun hubungan dan jaringan yang baik dengan berbagai pihak serta mendayagunakan sumber daya Perseroan dalam rangka memperoleh pendanaan dari pihak lain (<i>bank/investor strategis</i>).

Rencana Program dan Realisasi Manajemen Risiko

Rencana, target dan realiasi program manajemen risiko tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Rencana	Target	Realisasi
Penyusunan Kebijakan dan SOP dalam rangka mendukung kegiatan Perseroan dan penerapan manajemen risiko	Penyusunan 2 (dua) Kebijakan dan 2 (dua) SOP	Telah disusun 2 (dua) Kebijakan dan 2 (dua) SOP
Memastikan satuan kerja/ <i>risk owner</i> melakukan kajian risiko (identifikasi, analisis dan mitigasi risiko) atas kegiatan yang dilaksanakan	Setiap satuan kerja pengusul harus melakukan kajian risiko atas setiap usulan kegiatan utama yang diusulkan	Hampir seluruh usulan kegiatan utama (> 90%) telah dilengkapi dengan kajian risiko

Rencana	Target	Realisasi
Melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan Kebijakan yang berlaku	Status Kebijakan Perseroan senantiasa terkini sesuai perkembangan kegiatan usaha Perseroan	Telah dilakukan review atas 3 (tiga) Kebijakan
Melakukan asesmen risiko dan menyusun Laporan Profil Risiko	Seluruh satuan kerja bisnis harus melakukan asesmen risiko dan menyusun Laporan Profil Risiko	Telah dilakukan asesmen risiko untuk seluruh kegiatan pada satuan kerja bisnis dan Laporan Profil Risiko Perseroan yang disusun telah disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Upaya Peningkatan Budaya Risiko

Faktor penting untuk mendukung efektivitas implementasi manajemen risiko Perseroan adalah adanya budaya risiko yang kuat (*strong risk culture*) di dalam suatu organisasi. Upaya-upaya dalam rangka meningkatkan budaya risiko di Perseroan dilakukan melalui:

1. Direksi secara berkesinambungan mengkomunikasikan dan mendorong agar seluruh satuan kerja (*risk owner*) untuk terus mengembangkan budaya risiko (*risk culture*) dan meningkatkan *quality risk management* serta kepatuhan terhadap kebijakan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan Perseroan.
2. Penyusunan Kebijakan, prosedur persetujuan kegiatan (*approval procedure*) dan SOP didasarkan pada pertimbangan manajemen risiko.
3. Divisi Manajemen Risiko secara aktif memberikan dukungan dan memfasilitasi penerapan manajemen risiko di Perseroan.
4. Mengikuti pelatihan, seminar serta sertifikasi di bidang manajemen risiko dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kompetensi manajemen risiko.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sebagai salah satu implementasi GCG, Perseroan telah memastikan bahwa sistem pengendalian internal yang dimiliki berjalan secara efektif. Sistem pengendalian internal Perseroan dijalankan dengan fokus untuk memastikan bahwa Perseroan telah memiliki laporan dan informasi keuangan yang andal, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta efektivitas kegiatan operasional.

Kesesuaian dengan Kerangka COSO

Perseroan berkomitmen dalam upaya menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif secara konsisten, dengan melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan, sesuai prinsip-prinsip Internal *Control-Integrated Framework* yang diterbitkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization (COSO) of the Treadway Commission*.

Penerapan pengendalian internal yang dilakukan Dewan Komisaris mencakup bentuk-bentuk pengawasan dan pemberian nasihat terkait proses kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan risiko, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dalam menjalankan penerapan pengendalian internal, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dan GCG.

Sementara itu, Direksi secara konsisten melakukan penerapan pengendalian internal guna mengamankan investasi dan aset Perseroan. Hal ini dilakukan melalui penerapan kebijakan dan prosedur perusahaan dengan tetap memenuhi aspek kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, terkait kegiatan usaha Perseroan dan manajemen risiko, rencana strategis, pembagian tugas, pendelegasian wewenang serta kebijakan akuntansi yang memadai.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Sistem Pengendalian Internal Perseroan dan entitas anak dirancang dan dilaksanakan berdasarkan kerangka kerja internal yang ditetapkan oleh COSO. Kesesuaian pelaksanaan pengendalian internal Perseroan dengan kerangka kerja pengendalian internal COSO, antara lain:

1. Pengendalian Lingkungan

Perseroan senantiasa menjunjung tinggi nilai integritas dan etika yang berlaku bagi seluruh karyawan. Perseroan juga selalu memastikan bahwa seluruh karyawan telah memiliki kompetensi pada setiap tingkat jabatan, memiliki struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan yang jelas, kebijakan sumber daya manusia yang memadai, serta bekerja sesuai nilai-nilai yang dianut Perseroan.

2. Penilaian Risiko

Dalam pengendalian keuangan, operasional, dan kepatuhan, Perseroan mengidentifikasi tujuan secara keseluruhan dan proses bisnis yang dijalankan, serta mengidentifikasi risiko yang ada. Perseroan juga telah mengantisipasi tiap perubahan guna meminimalisasi risiko.

3. Pengendalian Aktivitas

Perseroan memastikan bahwa pengendalian internal telah berjalan dengan baik melalui pembuatan prosedur dan kebijakan untuk semua unit bisnis, keamanan atas aplikasi data dan jaringan, serta melakukan pemeliharaan atas setiap perubahan aplikasi bisnis yang dijalankan. Selain itu, Perseroan juga telah memastikan kelangsungan bisnis serta melakukan evaluasi secara berkala kepada tiap tenaga *outsourcing* yang digunakan Perseroan.

4. Informasi dan Komunikasi

Perseroan telah menyediakan berbagai informasi yang berkualitas terkait penanganan risiko serta pengendalian internal kepada tiap pemangku kepentingan. Selain itu, Perseroan memastikan bahwa informasi-informasi tersebut telah terkomunikasikan secara efektif.

5. Pemantauan

Perseroan telah menerapkan sistem pengawasan yang berlangsung secara berkelanjutan melalui Audit Internal serta *Unit Compliance and Business Process Improvement*. Hasil dari proses pengawasan tersebut dilaporkan secara berkala kepada Direksi dan Komite Audit.

Evaluasi atas Efektivitas Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko

Divisi Internal Audit telah melakukan evaluasi secara uji petik atas efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko pada kegiatan-kegiatan yang terpilih berdasarkan asesmen risiko. Berdasarkan hasil evaluasi, Divisi Internal Audit menyimpulkan bahwa secara umum pengendalian internal dan manajemen risiko atas kegiatan-kegiatan di atas telah diterapkan secara memadai.

PERKARA HUKUM

Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan

Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan

No	Nama (atau nomor) Perkara dan Posisi Perseroan	Status	Risiko Terhadap Perseroan	Pokok Perkara
1	No. 381/Pdt.G/2016 PN Jkt Pst Penggugat: Said Gasim Perseroan selaku Turut Tergugat I	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atas gugatan dari Penggugat ditolak.	Tidak ada tuntutan ganti rugi kepada Perseroan;	Gugatan perihal Perbuatan Melawan Hukum atas objek perkara yang sebelumnya dikelola oleh Perseroan
2	No. 20/Pdt.G/2016 PN Tuban Penggugat : Subagyo; Ngayati dan Kastari Perseroan selaku Turut Tergugat	Proses Kasasi di Mahkamah Agung RI yang diajukan oleh Subagyo; Ngayati dan Kastari sebagai Pemohon Kasasi, atas Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur	Tidak ada tuntutan ganti rugi kepada Perseroan;	Gugatan perihal Perbuatan Melawan Hukum atas objek perkara yang sebelumnya dikelola oleh Perseroan
3	No. 104/Pdt.G/2016 PN Bogor Penggugat : CV Delima Jaya Perseroan selaku Turut Tergugat II	- Atas putusan PN Bogor, Pihak Tergugat (KPKNL Bogor) Tgl. 13-12-2017 mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Jawa Barat. - Proses penanganan di tingkat Banding.	Tidak ada tuntutan ganti rugi kepada Perseroan	Gugatan perihal Perbuatan Melawan Hukum atas objek perkara yang sebelumnya dikelola oleh Perseroan
4	No. 279/Pdt.G/PN. Jkt Sel Penggugat : Anthony Handoko Perseroan selaku Turut Tergugat I	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah SHM No. 1065/ Kemanggisian.	Tidak ada tuntutan ganti rugi kepada Perseroan	Gugatan perihal Perbuatan Melawan Hukum atas objek perkara yang sebelumnya dikelola oleh Perseroan
5	No. 455/Pdt.G/2017 PN Jkt Sel Penggugat : Sugiarto Perseroan selaku Turut Tergugat	Proses sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Tidak ada tuntutan ganti rugi kepada Perseroan	Gugatan perihal Perbuatan Melawan Hukum atas objek perkara yang sebelumnya dikelola oleh Perseroan
6	No. 637/Pdt.G/2017 PN Jkt Pst Penggugat : Syafruddin A. Temenggung Perseroan selaku Turut Tergugat II	Proses Penanganan perkara di tingkat Pengadilan Negeri	Tidak ada tuntutan ganti rugi kepada Perseroan	Gugatan perihal Perbuatan Melawan Hukum atas objek perkara yang sebelumnya dikelola oleh Perseroan

Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan

No	Nama (atau nomor) Perkara dan Posisi Perseroan	Status	Risiko Terhadap Perseroan	Pokok Perkara
7	No. 53830/PP/M.XIVB/15/2014 Pengadilan Pajak Penggugat : Direktur Jenderal Pajak – Terbanding/Pemohon PK Perseroan selaku Pemohon	Perkara telah <i>in-kracht</i> (mempunyai kekuatan hukum tetap) sesuai putusan PK MA-RI No, 378/B/PK/PJK/2017 tgl. 10 Mei 2017		

Perkara di Anak Usaha Perseroan

Sepanjang tahun 2017, tidak ada perkara hukum yang dihadapi oleh Anak Usaha Perseroan, termasuk yang menyangkut Dewan Komisaris dan Direksi Anak Usaha Perseroan.

Perkara Yang Dihadapi Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi

Selama tahun 2017, tidak ada perkara yang dihadapi oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

Informasi Tentang Sanksi Administratif

Selama tahun 2017, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan oleh otoritas yang berwenang kepada Perseroan, anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Perseroan menyediakan akses Informasi dan data Perseroan secara tepat waktu, akurat dan lengkap kepada pemegang saham, regulator serta seluruh *stakeholders* lainnya. Keterbukaan Informasi kepada seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian penting dari implementasi prinsip transparansi Informasi.

Beberapa akses Informasi yang disediakan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Komunikasi Eksternal

Website

Salah satu media Utama yang digunakan oleh Perseroan dalam menyajikan Informasi adalah melalui website Perseroan <https://www.ptppa.com> baik dalam Bahasa Indonesia maupun dalam Bahasa Inggris. Informasi yang tersedia antara lain:

1. Struktur grup Perusahaan;
2. Profil Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
3. Pemegang saham;
4. Informasi Laporan tahunan dan laporan keuangan
5. Informasi mengenai tata kelola perusahaan
6. Informasi pelaksanaan RUPS

e-mail

Perseroan secara terbuka menyiapkan jalur komunikasi dengan para pemangku kepentingan melalui surel untuk mengakomodir berbagai pertanyaan terkait dengan Perseroan dengan menghubungi Sekretaris Perusahaan pada email: corpsec@ptppa.com

Media Massa

Perseroan memuat informasi penting yang perlu diketahui oleh publik sebagai bentuk transparansi bagi para pemangku kepentingan dalam surat kabar berperedaran nasional. Selain itu Perseroan juga selalu menjaga hubungan baik dengan media massa untuk memberikan *update* informasi penting Perseroan dengan melakukan kunjungan media dan melalui *workshop*. Selama tahun 2017, Perseroan telah melakukan beberapa kunjungan baik ke kantor media cetak maupun media elektronik.

Siaran Pers

Perseroan secara aktif mempublikasikan setiap kejadian atau kegiatan penting dalam bentuk siaran pers yang disampaikan melalui media, situs web Perseroan dan regulator. Sepanjang tahun 2017, Perseroan menerbitkan 3 (tiga) siaran pers.

Annual Report

Perseroan menyediakan sarana informasi melalui *Annual Report* yang disusun setiap tahun. *Annual Report* disampaikan kepada pemegang saham, regulator serta seluruh *stakeholders* lainnya.

Sustainability Report

Perseroan juga menyediakan sarana informasi mengenai kegiatan sosial dan kemasyarakatan Perseroan secara menyeluruh melalui *Sustainability Report*.

Laporan Manajemen

Terkait penyampaian laporan kepada Pemegang Saham, Perseroan telah melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dengan menyampaikan Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan kepada Pemegang Saham.

Komunikasi Internal

Perseroan menyediakan sarana komunikasi yang menjadi sarana diskusi bagi karyawan dengan manajemen yang secara berkala dilakukan, baik secara korporasi maupun per masing-masing unit kerja.

Town Hall Meeting

Perseroan menyelenggarakan pertemuan secara berkala yang melibatkan interaksi langsung antara Manajemen dengan seluruh karyawan Perseroan, untuk membahas pencapaian target Perseroan serta membahas *issue-issue* terkini yang dialami Perseroan.

Meet and Greet

Perseroan menyelenggarakan *talkshow* yang dihadiri oleh seluruh karyawan Perseroan dengan mengundang narasumber dari berbagai instansi negara maupun lainnya untuk menjadi pembicara dan memaparkan hal-hal yang bersifat inspiratif. *Meet and Greet* ditutup dengan sesi tanya jawab antara narasumber dan karyawan Perseroan dengan maksud untuk menciptakan *talkshow* yang interaktif.

Peringatan hari besar Nasional

Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara terus menghargai hari-hari besar Nasional dan menghargai jasa para pahlawan dengan cara melaksanakan Upacara, seperti Upacara memperingati Hari Pahlawan, Upacara memperingati Hari Kemerdekaan, Upacara memperingati Hari Kartini dan lainnya. Adapun yang menjadi petugas pelaksana adalah dari karyawan Perseroan.

KODE ETIK

Kepercayaan para *stakeholders* seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan bagi peningkatan nilai dan kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Citra dan reputasi Perseroan dengan kepercayaan para pemangku kepentingan sangat erat kaitannya dengan perilaku setiap individu dalam Perseroan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan.

Atas dasar pemikiran ini, maka Perseroan menyusun Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct—CoC Code*) yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Januari 2017.

CoC Code Perseroan menjadi pedoman dan panduan bagi:

1. Insan Perseroan.
2. Pihak Eksternal yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan.
3. Perseroan dan seluruh entitas Anak Perseroan.
4. Mitra Kerja yang bekerja sama dengan Perseroan.

Setiap Insan Perseroan wajib untuk menerapkan Budaya Perseroan dan Kode Etik Perseroan sebagai panduan bertindak dalam menetapkan hubungan kerja, pola pikir, sikap dan perilaku sehari-hari dengan sesama karyawan dan/atau pihak-pihak lainnya yang meliputi namun tidak terbatas pada mitra kerja, masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya.

Isi dan Keberlakuan CoC Code

Untuk melaksanakan pengelolaan perusahaan yang baik dan benar diperlukan suatu pedoman yang bertujuan untuk membentuk dan mengatur kesesuaian tingkah laku sehingga mencapai penerapan GCG yang konsisten, menjadi standar minimal yang harus di patuhi oleh insan Perseroan dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan. CoC Code Perseroan memuat hal-hal sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- a. Latar belakang.
- b. Maksud, Tujuan dan Manfaat *Code of Conduct*.
- c. Landasan Penyusunan *Code of Conduct*.
- d. Visi dan Misi Perusahaan.
- e. Definisi dan Istilah.

Bab II Etika Usaha

- a. Etika Perseroan dengan Karyawan.
- b. Etika Perseroan dengan Pemerintah.
- c. Etika Perseroan dengan Pemegang Saham.
- d. Etika Perseroan Dengan Pelanggan.
- e. Etika Perseroan Dengan Mitra Usaha.
- f. Etika Perseroan Dengan Pesaing.
- g. Etika Perseroan Dengan Kreditur/Investor.
- h. Etika Perseroan Dengan Penyedia Barang/Jasa.
- i. Etika Perseroan Dengan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar.
- j. Etika Perseroan Dengan Media Massa.
- k. Etika Perseroan Dengan Anak Perseroan.

Bab III Komitmen, Etika Kerja dan Tata Perilaku Insan Perusahaan

- a. Komitmen Insan Perseroan.
- b. Etika Kerja Insan Perseroan.
 1. Etika Kerja Sesama Insan Perseroan.
 2. Etika Kerja Jajaran Manajemen dan Karyawan.
- c. Tata Perilaku Insan Perseroan.
 1. Kepatuhan terhadap Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Lainnya.
 2. Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan.
 3. Pemberian dan Penerimaan Hadiah/ Cenderamata, Jamuan, Hiburan dan Donasi.
 4. Keselamatan Kerja, Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan.
 5. Kesempatan yang Sama untuk mendapatkan Pekerjaan dan Promosi.
 6. Perlindungan Informasi Perusahaan dan *Intangible Asset*.

7. Perlindungan Harta Perseroan.
8. Pencatatan Data Perseroan dan Penyusunan Laporan.
9. Perilaku Asusila, Narkotika, Obat Terlarang, Perjudian dan Merokok.
10. Aktivitas Politik dan politik.

Bab IV Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku

- a. Komitmen Penegakan *Code of Conduct*.
- b. Sosialisasi dan Internalisasi.
- c. Pelanggaran.
 - a. Mekanisme Pelaporan pelanggaran.
 - b. Sanksi atas pelanggaran.

Sosialisasi dan Upaya Penegakan Pedoman Perilaku

CoC Code diungkapkan dan/atau disebarkan kepada semua insan Perseroan melalui berbagai media yang dimiliki Perseroan, termasuk melalui teknologi informasi yang dapat diakses oleh insan Perseroan setiap saat.

Media Sosialisasi CoC Code antara lain melalui:

- Website
- Peraturan Perusahaan
- Surel
- Pernyataan Komitmen yang ditandatangani bersama
- Iklan di Koran
- Sosial media

Pada tahun 2017, upaya penegakan Pedoman Perilaku dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:

1. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Insan Perseroan yang diperbaharui setiap tahun.
2. Sosialisasi melalui media internal dan eksternal Perseroan.
3. Sosialisasi melalui media eksternal Perseroan.
4. Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

5. Pelaporan Gratifikasi kepada KPK dan kerja sama Program Pengendalian Gratifikasi dengan KPK.
6. Iklan larangan Gratifikasi di media massa dan website.

Setiap Insan Perseroan telah menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen penerapan CoC Code dalam operasional Perseroan. Persentase penandatanganan komitmen CoC Code oleh Insan Perseroan adalah sebanyak 100%.

Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik

1. Setiap Insan Perseroan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap CoC Code akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perseroan.
2. Sanksi bagi Karyawan yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi.
3. Dewan Komisaris dan/atau Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan.
4. Sanksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham.
5. Sanksi bagi mitra kerja atau *stakeholders* lain yang melakukan pelanggaran adalah sesuai ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

Tingkat Pelanggaran dan Sanksi

Tingkat Pelanggaran	Jenis Sanksi
Hukuman Disiplin Ringan	Surat Peringatan Pertama
Hukuman Disiplin Sedang	Surat Peringatan Kedua Surat Peringatan Ketiga
Hukuman Disiplin Berat	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Laporan dan Penindakan tahun 2017

Selama tahun 2017, tidak terdapat pelanggaran dan pengenaan sanksi atas pelanggaran CoC Code di Perseroan.

Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan CoC Code

Pada tahun 2017, Perseroan telah melakukan survey pemahaman atas CoC Code sebagai evaluasi terhadap efektivitas pemahaman dan pelaksanaan CoC Code sekaligus sebagai tindak lanjut atas hasil asesmen penerapan GCG tahun 2016.

Evaluasi terhadap CoC Code

Sebagai pedoman yang bersifat dinamis, CoC Code dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai prinsip GCG dan perkembangan lingkungan usaha. Evaluasi terakhir yang dilakukan Perseroan terhadap CoC Code pada tanggal 31 Januari 2017.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Latar Belakang

Dalam rangka menunjang implementasi prinsip GCG, diperlukan suatu sistem pengawasan yang baik, efisien dan berlaku untuk seluruh insan Perseroan dan para *stakeholders*.

Oleh karena itu, Perseroan telah menyusun dan menetapkan Pedoman *Whistleblowing System* (WBS) berdasarkan Keputusan Direksi: SK-3/PPA/0215 tanggal 5 Februari 2015 tentang Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*-WBS)

Tujuan

Tujuan penyusunan WBS adalah sebagai pedoman dalam menerapkan dan mengelola pelaporan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di Perseroan, sehingga tercipta hal-hal sebagai berikut:

- Terciptanya iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra Perseroan.
- Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.
- Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah dugaan pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
- Mengurangi biaya dalam menangani akibat dan terjadinya pelanggaran.
- Meningkatkan reputasi Perseroan.

Jenis dugaan pelanggaran yang dapat dilaporkan antara lain:

- Korupsi;
- Kecurangan;
- Gratifikasi;
- Benturan Kepentingan
- Pelanggaran hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan bisnis Perseroan.
- Pelanggaran peraturan/kebijakan/prosedur internal yang dapat merugikan Perseroan.
- Ketidakpatutan dalam etika bisnis dan etika kerja yang berlaku secara umum.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Pihak yang berhak melakukan pelaporan adalah setiap pihak terkait dengan Perseroan atau pihak ketiga di luar Perseroan yang merasa dirugikan atau hanya ingin melaporkan terjadinya dugaan pelanggaran. Laporan dugaan pelanggaran dapat dilakukan oleh pelapor melalui:

a. E-mail	: whistleblowing@ptppa.com , atau
b. Surat	: PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) u.p Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai 9 J1. Jend. Sudirman Kay. 45 — 46, Jakarta — 12930
c. Website Perseroan.	

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Laporan WBS yang diterima akan ditangani oleh Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran, dalam hal ini adalah:

- Ketua : GM Divisi Internal Audit.
- Anggota : GM Divisi *Corporate Secretary & Legal Counsel*, GM *Human Capital*, dan GM Manajemen Risiko.
- Sekretaris : Personil dari Divisi Internal Audit yang ditunjuk oleh GM Divisi Internal Audit untuk melaksanakan tugas-tugas administratif.

Perlindungan Bagi Pelapor

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, Perseroan akan memberikan perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan terhadap pelapor meliputi:

- a. Jaminan kerahasiaan terhadap identitas pelapor.
- b. Perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan yang terjadi di Perseroan sebagai akibat dari adanya laporan dugaan pelanggaran oleh insan Perseroan antara lain:
 - Pemecatan yang tidak adil.
 - Penundaan kenaikan atau penurunan jabatan/pangkat.
 - Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk.
 - Catatan yang merugikan dalam personal *file record*.
- c. Jaminan bagi *stakeholders* bahwa Perseroan tetap akan memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk berhubungan dengan Perseroan.

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penanganan Pengaduan

1. Setiap laporan WBS yang masuk akan dicatat dan didaftarkan pada registrasi khusus yang dibuat oleh Tim WBS, kemudian dievaluasi berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh, dan selanjutnya dibuat rekomendasi apakah akan dilakukan investigasi lebih lanjut untuk melakukan pendalaman.
2. Jika laporan dugaan pelanggaran tidak memenuhi syarat minimal pelaporan dalam sistem WBS Perseroan, Tim WBS dapat menyatakan tidak akan melanjutkannya ke tahap investigasi, dan menutup masalah yang dilaporkan tersebut.
3. Jika laporan dugaan pelanggaran tersebut ditindaklanjuti dengan investigasi, maka Tim WBS menyampaikan perkembangannya kepada Direksi.

4. Setelah selesai investigasi, apabila terbukti maka Tim WBS akan berkoordinasi dengan satuan kerja terkait untuk memberikan sanksi, jika terkait dengan adanya tindak pidana, maka tim WBS akan menyerahkan kepada instansi yang berwenang.
5. Hal-hal yang terkait dengan pelanggaran yang dianggap urgent maka akan dilaporkan kepada Direksi untuk mendapatkan arahan tindak lanjut.

Jumlah Pelaporan Pelanggaran

Sepanjang tahun 2017 tidak terdapat pelaporan pelanggaran yang diterima oleh Perseroan.

Monitoring dan Evaluasi

Untuk menjamin efektivitas penerapan WBS perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi sasaran yang telah ditetapkan pada awal penancangan sistem WBS dan juga memastikan bahwa pencapaian tersebut sesuai dengan tuntutan bisnis Perseroan maupun peraturan perundangan yang berlaku. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh Direksi melalui Divisi Internal Audit atau menggunakan pihak luar yang independen. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan sistem WBS maupun melakukan pemantauan atas rekomendasi asesmen penerapan GCG. Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan kepada Direksi. Pada tahun 2017, Perseroan melakukan survei sebagai evaluasi terhadap efektivitas pemahaman dan pelaksanaan WBS, sekaligus sebagai tindak lanjut atas hasil asesmen penerapan GCG tahun 2016.





07

TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa kelangsungan usaha jangka panjang dipengaruhi oleh hubungan dan kemampuan Perseroan dalam memenuhi harapan para pemangku kepentingan dan hanya dapat dibangun dengan memberikan keseimbangan antara *People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership*.

Pendahuluan

Untuk melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development*, Perseroan menggunakan pendekatan 5P bagi terwujudnya keseimbangan manusia (*people*), bumi (*planet*), kesejahteraan (*prosperity*), melalui kerja sama yang kuat (*partnership*) untuk menciptakan kedamaian (*peace*). Konsep 5P ini mendukung capaian pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*). Dengan demikian, diharapkan keberadaan perseroan tidak hanya bermanfaat bagi para pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lebih luas yaitu pekerja, konsumen, pemasok, masyarakat sekitar, negara dan lain-lain.



Landasan Pelaksanaan

Pada dasarnya kebijakan pelaksanaan program CSR Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik negara, terutama pasal 2 dan 88 yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat (1) huruf e
Salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.
- b. Pasal 88 ayat (1)
BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/ koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

Pada Bab V Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dimana Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Selain itu dasar kegiatan CSR Perseroan tahun 2017 dilakukan dengan tetap mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017.

Kebijakan tersebut mendasari Perseroan untuk mengimplementasikan CSR di dalam Perseroan. Perseroan juga meyakini bahwa kesinambungan usaha tidak hanya diperoleh melalui pencapaian target finansial semata, tetapi juga sangat ditunjang oleh investasi non-finansial yang dibangun melalui kontribusi Perseroan pada pengembangan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan lingkungan hidup serta hal-hal yang bersifat responsif terhadap bencana alam dan musibah besar lainnya yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian, ke depannya tercipta respon yang konstruktif dan timbal balik di antara *stakeholders* kepada Perseroan, sehingga memberikan dampak pada peningkatan nilai (*value*) bagi kepuasan seluruh *stakeholders* dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Visi dan Misi

Visi dan Misi pelaksanaan CSR/PKBL Perseroan merujuk pada visi dan misi kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai berikut:

Visi

Sebagai unit khusus yang mampu memberikan dukungan bagi Perseroan dalam tugas dan tanggung jawab sosial.

Misi

Unit CSR/PKBL Perseroan berperan aktif dalam:

1. Meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri;
2. Memberdayakan, memperbaiki dan meningkatkan kondisi sosial masyarakat; dan
3. Meningkatkan dan memberikan citra positif bagi Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara dalam perannya bersama Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tata Kelola CSR

Pelaksanaan kegiatan CSR di Perseroan menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab Unit PKBL. Kepala PKBL Perseroan dirangkap jabatannya oleh *GM Corporate Secretary & Legal Counsel* dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam menjalankan tugasnya, apabila diperlukan unit PKBL dapat dibantu oleh unit kerja lainnya. Berikut ini adalah struktur organisasi PKBL.



Anggaran Dana dan Lingkup Kegiatan

Seluruh pelaksanaan program CSR/PKBL yang dilakukan Perseroan menggunakan anggaran dana yang berasal dari penyisihan Laba Bersih Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam PERMEN-09 tersebut. Berikut jumlah dana tersedia dan penyaluran pada tahun 2010-2017.

Fokus Pengelolaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan CSR di lingkungan Perseroan dilakukan dengan kerja sama dengan para pemangku kepentingan di dalam dan luar Perseroan, baik dari unsur pemerintahan maupun masyarakat. Realisasi program CSR yang dijalankan Perseroan terfokus pada 4 (empat) area yaitu:

1. Tanggung jawab terhadap lingkungan hidup;
2. Tanggung jawab terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan;
3. Tanggung jawab terhadap ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja; dan
4. Tanggung jawab terhadap pelanggan

Melalui berbagai program yang terselenggara pada tahun buku 2017, Perseroan meyakini bahwa program-program tersebut memiliki manfaat yang berkelanjutan.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Komitmen Perseroan terhadap kelestarian lingkungan hidup diimplementasikan melalui kebijakan untuk menjaga lingkungan yang dimulai dari lingkungan Perseroan sendiri. Hal ini dilakukan secara berkala, dengan harapan dapat membawa perubahan ke lingkungan yang lebih besar.

Kebijakan

Perseroan memiliki komitmen terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap kegiatan Perseroan berkewajiban untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, setiap kegiatan Perseroan telah memiliki dokumen lingkungan sebagai acuan untuk mengelola dampak lingkungan yang dihasilkan dari setiap kegiatan operasional Perseroan. Perseroan juga merealisasikan program penghematan energi dan air sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air.

Tujuan pelaksanaan program CSR terhadap lingkungan hidup adalah membangun menjaga pelestarian ekosistem alam, sekaligus memberi kontribusi nyata untuk lingkungan hidup.

Pengelolaan Limbah

Untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan, Perseroan melakukan berbagai upaya, termasuk diantaranya uji emisi dan penggunaan BBM dengan kualitas yang baik bagi kendaraan dinas dan operasional yang lebih ramah lingkungan. Untuk limbah beracun yang didapat dalam operasional sehari-hari, yaitu oli bekas dari kendaraan operasional, Perseroan menyerahkannya kepada pihak ketiga yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan

Untuk merealisasikan pelaksanaan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, Perseroan membuka segala bentuk pengaduan yang berkaitan dengan masalah lingkungan, khususnya terkait aktivitas yang dilakukan Perseroan jika ditemukan terkait dengan pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Pengaduan bisa disampaikan melalui buku tamu pada website Perseroan, dengan alamat www.ptppa.com. Pada tahun 2017, Perseroan tidak mendapat laporan pengaduan yang berkaitan dengan masalah lingkungan; termasuk juga tidak ada denda atas ketidakpatuhan Perseroan terhadap undang-undang atau peraturan tentang lingkungan.

Program Lingkungan Hidup yang Berhubungan dengan Kegiatan Operasional Perseroan

Dalam rangka menjaga keselarasan dan keselamatan bumi, Perseroan berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan. Selama tahun 2017 Partisipasi aktif tanggung jawab Perseroan terhadap pengelolaan lingkungan hidup diwujudkan dalam program sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan Masyarakat Pedalaman Mentawai
Sejalan dengan program Pemerintah untuk membantu pembangunan di daerah Terdepan, Tertinggal dan Terluar (3T), Perseroan melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Pedalaman Mentawai dengan menyalurkan bantuan Program

Bina Lingkungan berupa Sarana Listrik Panel Surya dan Sarana Air Bersih di Dusun Buttui, Desa Madobak dan Dusun Salapak, Desa Salapak di mana ketersediaan infrastruktur umum di wilayah pedalaman masih sangat minim. Pada momentum tersebut Perseroan juga mulai merancang program pendidikan yang ditujukan kepada anak-anak Mentawai serta mulai mencanangkan program bercocok tanam dan ternak sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat pedalaman yang selama ini sangat bergantung dari hutan.

b. Program Pengembangan dan Pendampingan Petani Kopi

Dengan melihat potensi Desa Suka Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, Perseroan membentuk Desa Binaan dengan bentuk program berupa Pengembangan dan Pendampingan Petani Kopi. Pada pelaksanaan program tersebut Perseroan memberikan pelatihan budidaya kopi, perawatan hingga *pasca* panen. Tidak hanya fokus pada kegiatan produksi, Perseroan juga memberikan edukasi tentang pemanfaatan Hutan TWA (Taman Wisata Alam) yang selama ini banyak dipergunakan sebagai lahan tanaman kopi, dari sisi regulasi dan pelestarian alam. Sehingga didapatkan jalan tengah antara regulator dan petani untuk solusi terbaik yang tetap memperhatikan kelestarian alam.

c. Program Sarana Air

Air merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi kelangsungan hidup dan lingkungan. Perseroan memandang hal tersebut sebagai salah satu prioritas program yang telah terealisasi di beberapa titik wilayah di tahun 2017. Program yang telah menjangkau wilayah Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatra Barat ini diantaranya, Instalasi Air Minum, Pembangunan Saluran Irigasi Pertanian dan Pembangunan Sarana Air Bersih serta MCK.

yaitu pihak manajemen kantor beserta seluruh karyawan berupaya menerapkan berbagai program penghematan seperti hemat kertas penghematan listrik serta hemat air melalui sosialisasi dan anjuran. Program tersebut dapat memberikan manfaat nyata seperti pengurangan biaya operasional, peningkatan efisiensi, dan juga peningkatan citra Perseroan. Berikut daftar kegiatan dan aktivitas dalam mendukung terciptanya *Green Office*:

a. *Paperless*

Hemat kertas dan tinta dengan cara mengurangi penggunaan kertas, penyimpanan dokumen dalam bentuk *soft copy*, pemanfaatan email sebagai media menyebarluaskan pengumuman atau sosialisasi di internal Perseroan, dan penggunaan kertas bekas.

b. Penghematan Energi

Menghemat penggunaan listrik melalui kebijakan untuk memakai barang elektronik yang hemat daya serta pengaturan jam kerja yang efisien untuk mengurangi dampak dari penggunaan penerangan dan alat pendingin ruangan gedung kantor;

c. Penghematan air

Hemat air dengan cara menggunakan air sesuai kebutuhan dan menutup kran air apabila tidak diperlukan.

Sertifikasi Lingkungan Hidup

Hingga 31 Desember 2017, Perseroan belum memperoleh sertifikasi terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Program Green Office

Pengelolaan lingkungan hidup di sekitar kantor pusat telah dilakukan dalam mendukung pengelolaan kantor yang ramah lingkungan atau *green office*. Program *green office* merupakan bentuk nyata kontribusi dalam mengelola kantor dengan prinsip ramah lingkungan,

ASPEK PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Kebijakan

Kebijakan Perseroan dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial kepada masyarakat mengacu pada PERMEN-09, PPERMEN-03, dan PERMEN-02.

Tujuan pelaksanaan program CSR terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan adalah untuk membangun hubungan harmonis dengan masyarakat, sekaligus memberi kontribusi nyata untuk lingkungan masyarakat yang sejahtera. Sejumlah kebijakan yang terkait dengan CSR mengacu pada PERMEN-09, PERMEN-03, dan PERMEN-02. Menurut PERMEN-09, Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

Realisasi Kegiatan

Komitmen Perseroan dalam pengembangan sosial dan kemasyarakatan diwujudkan dengan menyelenggarakan serangkaian program sebagai berikut:

Program Kemitraan tahun 2017

Realisasi Dana Pinjaman Program Kemitraan tahun 2017

Realisasi Dana Pinjaman Program Kemitraan 2017	
Keterangan	Dana Realisasi
Pinjaman Program Kemitraan	
Usaha Kecil	14.961.300.000
Pembinaan Program Kemitraan	81.686.878
Jumlah	15.042.986.878

Program Kemitraan Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil dengan menyalurkan pelimpahan dana perusahaan untuk diberikan pinjaman kepada bisnis usaha kecil dengan bunga yang rendah. Tujuan dari pemberian pinjaman tersebut untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri. Program Kemitraan Perseroan telah bekerjasama dengan PT Bahana Artha Ventura (BAV) untuk membantu dalam menyalurkan dana Program Kemitraan langsung kepada Mitra Binaan melalui Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD). Kerja sama ini dimaksudkan agar penyaluran dana Program Kemitraan dapat tersebar di seluruh Indonesia dengan target tepat sasaran. Pada tanggal 14 Maret 2017, Perseroan melakukan agenda Penandatanganan Kerja sama dengan PMVD antara lain PT Sarana Bengkulu Ventura, PT Sarana Lampung Ventura, PT Sarana Jateng Ventura, PT Sarana Bali Ventura, dan PT Sarana Kalbar Ventura dengan total kerja sama sebesar Rp12 miliar.

Selama tahun 2017 Perseroan dapat menyalurkan dana pinjaman ke berbagai provinsi di Indonesia sebesar Rp15 miliar. Sebanyak 212 Mitra Binaan baru yang tergabung dalam Program Kemitraan dengan jenis usaha Perdagangan, Jasa, Industri, Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan.

Selain memberikan pinjaman, Program Kemitraan Perseroan juga melakukan pembinaan terhadap Mitra Binaan melalui Pendidikan/Pelatihan serta Pemasaran/Promosi. Tujuan dari Pembinaan tersebut agar Mitra Binaan Perseroan bukan hanya mendapatkan pinjaman namun nilai tambah bagi sumber daya manusianya.

Saldo Outstanding Piutang Program Kemitraan hingga akhir Desember 2017 (dalam jutaan Rupiah)		
Keterangan	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2017
Outstanding Piutang	8.518	15.693

Untuk meningkatkan kualitas piutang, Perseroan juga memantau pembayaran angsuran masing-masing Mitra Binaan. Selama tahun 2017 Mitra Binaan Perseroan tertib dan tepat waktu dalam pengembalian pinjaman dengan tingkat kolektibilitas yang lancar. Hal ini terbukti dari rasio tingkat kolektibilitasnya hingga mencapai 99,74% dengan dana *outstanding* lebih dari Rp15 miliar dengan 374 Mitra Binaan.

Tahun	Kolektibilitas
2014	99.41%
2015	99.38%
2016	99.29%
2017	99.74%

Program Bina Lingkungan tahun 2017

Realisasi Penyaluran Program Bina Lingkungan tahun 2017
(dalam jutaan Rupiah)

No	Nama Program	Realisasi (Rp Juta)
1	Bantuan Korban Bencana Alam	45
2	Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan	326
3	Bantuan Peningkatan Kesehatan	25
4	Bantuan Pelestarian Lingkungan	-
5	Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana	301
6	Bantuan Sarana Ibadah	396
7	Bantuan Sosial Pengentasan Kemiskinan	2.068
8	Pembinaan Program Kemitraan	-
JUMLAH		3.162

- a. Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan
Realisasi program bantuan reguler/berjalan periode tahun 2017 yang bekerja sama dengan Program LPDP, berupa bantuan beasiswa untuk 5 (lima) siswa tingkat SMA/SMK di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta; Bantuan sarana prasarana pendidikan di SMK Teknik Mesin Cisaat dan SMK Seni Pakungwati, Cirebon, Provinsi Jawa Barat; Bantuan penyelenggaraan kegiatan Siswa Mengenal Nusantara di DKI Jakarta dan Kalimantan Timur; serta Bantuan pengadaan laptop di Nusa Tenggara Timur.

- b. Bantuan Sarana dan/atau Prasarana Umum.
Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih masih menjadi fokus bantuan yang dipilih oleh unit Bina Lingkungan Perseroan, awal agustus lalu program bantuan sarana dan/atau prasarana umum mulai direalisasikan dalam bentuk bantuan pembuatan sumur dalam di Desa Kaligambir, Kec. Panggungrejo, dan pembuatan sarana perpipaan air bersih di Desa Birowo, Kec. Binangun, Kab. Blitar. Prov. Jawa Timur. Tidak hanya itu, untuk mengantisipasi luapan air dan pencegahan gagal panen padi di musim penghujan, Unit Bina Lingkungan Perseroan memberikan bantuan perbaikan saluran irigasi dan mesin pompa air di Desa Cengkok, Kec. Tarokan, Kab. Kediri, Prov. Jawa Timur. Dalam rangka mendukung program Nawacita, membantu pembangunan di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), unit Bina Lingkungan Perseroan juga mulai membantu pengadaan Sarana Listrik Panel Surya dan Sarana Air Bersih di pedalaman Mentawai, Sumatera Barat.

- c. Bantuan Sosial Kemasyarakatan dan Pengentasan Kemiskinan.
Penyaluran Bantuan Sosial Kemasyarakatan dan Pengentasan Kemiskinan yang dilakukan pada tahun 2017 meliputi: Pengiriman Hewan Qurban untuk Kaum Dhuafa di Beberapa Daerah di DKI Jakarta dan Jawa Barat seiring dengan perayaan Hari Raya Islam Idul Adha; Partisipasi Perseroan sebagai Co-PIC dalam Kegiatan "BUMN Hadir Untuk Negeri" Tahun 2017 di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan kegiatan yang meliputi Siswa Mengenal Nusantara dan Jalan Sehat; Bantuan Biaya Operasional Jalan Sehat "Langkah Untuk Negeri" Anak Berkebutuhan Khusus, Rumah Autis (Kaum Dhuafa) dalam Program BUMN Hadir untuk Negeri 2017; Pemberian Bantuan Sembako dan Perlengkapan Sekolah Anak di Mentawai, Sumatera Barat; serta pada akhir tahun 2017 unit Bina Lingkungan Perseroan merintis sebuah Program dengan sistem klaster berbasis Pertanian Kopi dan Peternakan Sapi yang diharapkan dapat memaksimalkan potensi daerah Kepahiang, Provinsi Bengkulu dan menambah pendapatan perekonomian daerah setempat.



ASPEK KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Kesetaraan Kesempatan

Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Manusia di Perseroan senantiasa memastikan prinsip kesetaraan bagi setiap Insan Perseroan, baik pria maupun wanita dalam pengembangan potensi dan karir di seluruh lingkungan Perseroan. Perseroan tidak mentolerir tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun. Prinsip pengelolaan Sumber Daya Manusia di Perseroan dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, kejujuran, adil tanpa membedakan suku, agama, ras, keterbatasan fisik, dan jenis kelamin.

Kesempatan Bekerja Bagi Masyarakat Setempat

Perseroan mengundang seluruh putra putri daerah terbaik, berkualitas, memiliki komitmen, integritas, dan moralitas tinggi serta sanggup bekerja keras untuk bergabung dan tumbuh bersama keluarga besar Perseroan. Secara umum, kebijakan terkait kesempatan bekerja bagi warga setempat berlaku pada area aset kelolaan dan entitas anak Perseroan. Lebih dari itu, Perseroan percaya kearifan lokal para putra putri daerah menjadi aset penting dan daya tarik unik untuk kelangsungan usaha bagi Perseroan.

Internalisasi Budaya Perusahaan

Perseroan memahami bahwa budaya perusahaan yang kuat membuat karyawan bangga untuk mewakili Perseroan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan. Budaya Perseroan menanamkan nilai-nilai melalui SEEIT (*Stewardship, Entrepreneurship, Excellent, Integrity and Teamwork*).

Seluruh nilai-nilai dan budaya Perseroan tersebut senantiasa dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dalam berbagai kesempatan, baik itu dalam bentuk pelatihan formal maupun informal, *sharing session*, motivasi, bimbingan, penilaian kinerja karyawan, dan acara-acara kebersamaan karyawan di lingkungan Perseroan.

Perseroan menjadikan pengelolaan manusia sebagai salah satu aspek keberlanjutan perusahaan. Sepanjang tahun 2017, Perseroan telah melakukan berbagai upaya untuk para karyawan agar mendapatkan kenyamanan dalam bekerja, mulai dari lingkungan kerja yang nyaman dan aman melalui berbagai program Kesehatan dan Keselamatan Kerja ("K3"), survei kepuasan karyawan secara berkala, hingga kegiatan-kegiatan kebersamaan karyawan seperti perayaan hari besar keagamaan, perayaan ulang tahun Perseroan dan *outing* Perseroan. Hal demikian dilaksanakan untuk menjadikan karyawan merasa menjadi bagian dari keluarga besar Perseroan.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perseroan berkomitmen untuk selalu menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan dengan senantiasa berupaya untuk menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang terakreditasi sesuai standar nasional dan internasional. Untuk itu, Perseroan melakukan berbagai aktivitas K3 secara berkala dengan terus menerus memperhatikan dan menjaga kesehatan karyawan, serta melengkapi karyawan dengan prosedur dan peralatan kerja yang memadai sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan di tempat kerja. Perseroan juga menjalankan pelatihan rutin untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari kecelakaan kerja.

Adapun prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja yang tercantum dalam Pedoman Etika dan Perilaku Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Mentaati setiap peraturan perundang-undangan dan/atau standar tentang keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja.
2. Menguasai dan memahami situasi dan kondisi lingkungan kerja serta menerapkan sistem keamanan, keselamatan kerja, kesehatan dan pelestarian lingkungan secara konsisten.
3. Mengutamakan tindakan pencegahan yaitu yang bersifat menghindari terjadinya kecelakaan.
4. Menghindari segala perbuatan yang mencelakakan diri sendiri atau orang lain, mengganggu kesehatan, seperti minuman yang memabukkan, mengkonsumsi obat-obat terlarang, dan lain-lain sesuai ketentuan Perseroan.
5. Melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan yang terjadi sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku dan senantiasa memiliki rencana penanggulangan keadaan darurat.
6. Melaksanakan program kepedulian akan pelestarian lingkungan yang diimplementasikan melalui kegiatan Program Bina Lingkungan Perseroan.

Pelatihan dan Sosialisasi K3 untuk Karyawan Perusahaan

Perseroan secara berkala mengikutsertakan karyawan untuk mengikuti pelatihan K3 bersertifikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sepanjang tahun 2017, telah diadakan masing-masing satu kali sosialisasi dan simulasi bencana serta

kebakaran yang diikuti oleh seluruh karyawan sebagai bagian dari pelatihan K3 yang rutin dilakukan oleh Perseroan bersama dengan pengelola gedung.

Peralatan Perlindungan Pribadi

Penyediaan peralatan perlindungan pribadi yang sesuai dengan kondisi dan risiko K3 di masing-masing unit usaha telah menjadi salah satu upaya Perseroan dalam memastikan lingkungan kerja yang aman bagi setiap insan Perseroan yang bekerja di lingkungan Perseroan. Perseroan memastikan ketersediaan jenis dan jumlah peralatan perlindungan pribadi pada setiap unit kerja Perseroan dan mewajibkan seluruh karyawan yang bekerja di area kerja yang memiliki potensi dan risiko bahaya mengenakan peralatan perlindungan pribadi selama menjalani pekerjaannya sesuai dengan standar yang berlaku.

Perlindungan Karyawan

Perlindungan karyawan atas kecelakaan kerja diwujudkan dengan mengikutsertakan seluruh karyawan dalam program yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yaitu:

1. BPJS Ketenagakerjaan, yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun.
2. BPJS Kesehatan, yang mencakup Rawat Jalan, dan Rawat Inap. Selain itu, Perseroan mengikutsertakan karyawannya dalam program Dana Pensiun Lembaga Keuangan bagi karyawan yang sudah diangkat menjadi karyawan tetap.

Selain hal tersebut di atas, Perseroan juga memberikan fasilitas kesehatan rawat jalan, pertanggungan asuransi rawat inap, asuransi jiwa dan kecelakaan kerja dari Penyedia Jasa Asuransi lainnya.

Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan serta Layanan Medis

Perseroan telah menetapkan program keselamatan dan kesehatan kerja yang bertujuan untuk mencapai kecelakaan nihil pada setiap operasi. Program tersebut mencakup pelatihan, penyuluhan yang berkesinambungan, penyediaan sarana dan prasarana untuk keselamatan kerja, melakukan pengawasan dan inspeksi secara rutin. Pada tahun 2017 tidak terjadi kecelakaan kerja di lingkungan kerja Perseroan.

Seluruh karyawan tetap Perseroan juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan berkala (*medical check-up*) secara rutin. Untuk mengantisipasi penyakit yang berbahaya maupun yang menular, karyawan Perseroan mendapatkan vaksinasi secara gratis.

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Sesuai yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan Perseroan, apabila terjadi ketidakpuasan dari karyawan atas hubungan kerja dan syarat-syarat kerja, akan diselesaikan secara musyawarah dengan atasan langsung minimal *Group Head*. Apabila belum dapat diselesaikan, diteruskan kepada atasannya yang lebih tinggi sampai dengan tingkat Direktur. Apabila masih belum dapat diselesaikan, diteruskan kepada Direktur yang membawahi Bidang Sumber Daya Manusia dan apabila ketidakpuasan tersebut berpengaruh terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan maka akan diserahkan kepada Keputusan Direksi.

Apabila secara internal hal tersebut belum juga dapat diselesaikan, maka akan ditempuh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mengatasi berbagai masalah dalam lingkup operasional, Perseroan juga senantiasa mengacu terhadap peraturan perundang-undangan peraturan Pemerintah, Peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maupun instansi terkait lainnya.

Survei Kepuasan Karyawan

Untuk memastikan pemenuhan persyaratan dan harapan utama para karyawan, Perseroan melakukan survei kepuasan karyawan. Hasil survei tersebut memastikan seberapa baik Perseroan memenuhi persyaratan dan harapan pekerja untuk pengembangan karir, kesejahteraan, serta keamanan dan keselamatan lingkungan pekerja.

Survei kepuasan karyawan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali. Pada tahun 2017, survei kepuasan karyawan memperoleh nilai sebesar 71,74%.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN

Kebijakan

Kegiatan usaha Perseroan adalah menyediakan dukungan Revitalisasi/Restrukturisasi, Pengelolaan Aset, dan Investasi serta jasa konsultasi kepada pelanggan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta. Guna memastikan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan, Perseroan memastikan bahwa mekanisme dan prosedur pemberian layanan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Realisasi Kegiatan

Realisasi kegiatan CSR terhadap pelanggan dilaksanakan melalui penyediaan sarana komunikasi dengan pelanggan yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media. Selain itu, Perseroan menyediakan *contact person* yang diperlukan untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan.

Sepanjang tahun 2017, Perseroan tidak pernah menerima sanksi denda atau sanksi hukum yang terkait dengan peraturan pengadaan jasa maupun informasi atau komunikasi pemasaran. Disamping itu sebagai bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap pelanggan, Perseroan melakukan usaha-usaha pemenuhan hak-hak pelanggan untuk memperoleh informasi mengenai kinerja produk, antara lain melalui:

- Memberikan pelayanan dengan kualitas prima dan bermutu.
- Memberikan solusi inovatif dan bertanggung jawab kepada pelanggan.
- Menyediakan informasi yang akurat.
- Menjalinkan hubungan kerja yang wajar.
- Meminimalkan risiko penggunaan jasa Perseroan.

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN 2017 PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) tahun 2017 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 3 April 2018

DEWAN KOMISARIS



Edy Putra Irawady
Komisaris Utama



Tirta Hidayat
Komisaris



Dedi Rudaedi
Komisaris



Taufik Sukasah
Komisaris

DIREKSI



Henry Sihotang
Direktur Utama



Ajar Setiadi
Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja



Andi Saddawero
Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen



Nasrizal Nazir
Direktur Investasi

REFERENSI OJK

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Hlm. Page
I. Umum General				
1	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris. The Annual Report shall be written in the good Indonesian, and also recommended to present this report in English.			
2	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca The Annual Report shall be printed with a good quality and using readable font type and size			
3	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas The Annual Report shall present corporate identity obviously	Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman.	Company's Name and Annual Report period shall be presented at: 1. Front Cover; 2. Spine; 3. Back Cover; and 4. Every Page	
4	Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan The Annual Report shall be uploaded at the Company's Website	Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.	Including recent and 4 recent years Annual Report.	
II. Ikhtisar Data Keuangan Penting Financial Information Highlights				
1	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun Information of comparatives statements of incomes within recent 3 (three) fiscal years or since the beginning of operation, if the Company commences its business activity less than 3 (three) years	Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi): a. Distribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Distribusikan kepada kepentingan nonpengendali; 3. Penghasilan komprehensif periode berjalan; a. Distribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Distribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan 4. Laba (rugi) per saham. Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.	The information includes: 1. Revenue/Sales; 2. Earning (loss); a. Attributable to owner of parent entity; and b. Attributable to non-controlling interest 3. Comprehensive Income for the year; a. Attributable to owner of parent entity; and b. Attributable to non-controlling interest 4. Profit (loss) per share). Notes: if the Company does not have subsidiary, the Company shall present total statements of profit (loss) and comprehensive income for current period.	10

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Hlm. Page
2	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun Information of comparative financial positions within recent 3 (three) fiscal years or since the beginning of operation, if the Company commences its business activity less than 3 (three) years	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas.	The information includes: 1. Total investment with associations; 2. Total assets; 3. Total liabilities; and 4. Total equity.	11
3	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun Comparative financial ratio within recent 3 (three) fiscal years or since the beginning of operation, if the Company commences its business activity less than 3 (three) years	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.	The information covers 5 (five) common financial ratio that are relevant with the Company's industry.	11
4	Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik Shares Price Information in Table and Chart	1. Jumlah saham yang beredar; 2. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: a. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; b. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan c. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. 3. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: a. Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan b. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. Untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.	1. Total Shares Outstanding 2. Information as table includes: a. Market capitalization based on price at the Stock Exchange where the shares are listed; b. The highest, lowest and closing shares prices based on price at the Stock Exchange where the shares are listed; c. Shares trading volume at the Stock Exchange where the shares are listed. 3. Information in chart is at least including: a. Closing price based on price at the Stock Exchange where the shares are listed; b. Shares trading volume at Stock Exchange where shares trading is at the Stock Exchange where the Company's shares are listed. For every quarter in the last 2 years.	13

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Hlm. Page
5	Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir Information on issued Bonds, Sukuk or Converted Bonds within recent 2 (two) fiscal years	Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/ obligasi konversi yang beredar (outstanding); 2. Tingkat bunga/imbalan; 3. Tanggal jatuh tempo; dan 4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2015 dan 2016. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.	The information includes: 1. Total bonds/sukuk/converted bonds outstanding; 2. Interest/yield rate; 3. Date of Maturity; and 4. Bonds/Sukuk Rating in 2015 and 2016 Notes: if the Company did not have bonds/sukuk/converted bonds, the condition shall be reported.	13
III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi Report from Board of Commissioners and Board of Directors				
1	Laporan Dewan Komisaris Report from Board of Commissioners	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; 3. Pandangan atas penerapan/ pengelolaan whistleblowing system (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	Contains the followings: 1. Assessment on the Board of Directors Performance in the course of Company's management altogether with the assessment basis; 2. View on the Company's business prospect prepared by the Board of Directors and basis for the consideration; 3. View on Whistle Blowing System (WBS) implementation and role of the Board of Commissioners in the WBS practice; and 4. Change to Board of Commissioners composition altogether with the reason (if any).	26
2	Laporan Direksi Report from Board of Directors	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: a. kebijakan strategis; b. perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan c. kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya; 2. Analisis tentang prospek usaha; 3. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan 4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.	Contains the followings: 1. Analysis on the Company's performance including : a. strategic policy; b. comparison between target and realization; and c. issues experienced by the Company and settlement plants; 2. Business prospect analysis; 3. Corporate governance practice; and 4. Change to Board of Directors composition altogether with the reason (if any).	34
3	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Signatures of the Board of Directors and Board of Commissioners Members	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	Contains the followings: 1. The signatures are disclosed in separated sheet; 2. Board of Directors and Board of Commissioners Responsibility Statement upon the Authenticity of the Annual Report Contents; 3. Signed by all Board of Directors and Board of Commissioners Members by declaring their name and position; and 4. Written explanation in a separated letter for any Board of Directors or Board of Commissioners member not signing the Annual Report, or: written explanation in a separated letter for other members if the written explanation from respective member is unavailable.	276

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Hlm. Page
IV. Profil Perusahaan Company Profile				
1.	Nama dan alamat lengkap perusahaan Name and Full Address of the Company	Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website.	The information includes name and address, zip code, phone number, fax number, email and website.	46
2	Riwayat singkat perusahaan Brief History of the Company	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan	Includes, among others: date/ year of establishment, name and effective date of the Company's name change. Notes: if the Company's not doing any name changes, the condition shall be disclosed.	48
3	Bidang usaha Line of Business	Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	The description includes: 1. Business activity based on the latest Articles of Association; 2. Business activity that is operated; and 3. Products and services provided.	52
4	Struktur Organisasi Organization Structure	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah direksi.	In chart, including name and position at least until one level below the Board of Directors	55
5	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Vision and Mission	Mencakup: 1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direvisi dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan.	Includes: 1. Vision; 2. Mission; and 3. Explanation of the Vision and Mission Approval by the Board of Directors/Board of Commissioners 4. Statements of Corporate Culture	56
6	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris Identity and Brief Profile of Board of Commissioners Members	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi & Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	The information includes: 1. Name; 2. Position (including position in other companies or organizations); 3. Age; 4. Domicile; 5. Education (Major and Educational Institution) 6. Career History (Position, Institution & Serving Period); and 7. Appointment History (period and position) as member of Board of Commissioners in the Company since initial appointment.	60
7	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi Identity and Brief Profile of Board of Directors Members	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	The information includes: 1. Name; 2. Position (including position in other companies or organizations); 3. Age; 4. Domicile; 5. Education (Major and Educational Institution) 6. Career History (Position, Institution and Serving Period); and 7. Appointment History (period and position) as member of Board of Directors in the Company since initial appointment.	64

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Hlm. Page
8	Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi Employee Demography (2 years comparative) and description of their competency development (i.e. employee education and training aspects)	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.	The information includes: 1. Employee demography by organization level; 2. Employee demography by education level; 3. Employee demography by employment status; 4. Employee competency development program initiated in recent fiscal year consists of training participants (position level), type of training, and purpose of the training; and 5. Realization of employee competency development budget.	78
9	Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition	Mencakup antara lain: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. 3. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.	Contains the followings: 1. List of Top 20 Shareholders Name and Ownership Percentage; 2. Name of Shareholders and ownership percentage, including: a. Name of Shareholders with 5% or higher Shares Ownership; and b. Public shareholders with less than 5% shares ownership; and the ownership percentage. 3. Name of Director and Commissioner with Shares Ownership; Notes: If the Board of Directors and Board of Commissioners do not have direct shares ownership, the condition shall be disclosed.	70
10	Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi List of subsidiary and/or association	Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).	The information in tables includes: 1. Subsidiary and Association; 2. Shares ownership percentage; 3. Description of business line of the subsidiary and/or association; and 4. Description of operational status of the subsidiary and/or association (operating or not yet operated)	71
11	Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV).	Group Structure as chart illustrating the subsidiary, association, joint venture and special purpose vehicle (SPV).	72
12	Kronologi penerbitan saham (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku Shares Listing Chronology (including private placement) and/or shares listing since the initial issuance until end of fiscal year	Mencakup antara lain: 1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (corporate action); 2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (corporate action); dan 3. Nama bursa di mana saham perusahaan dicatatkan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.	Includes the information, as follows: 1. Years of shares listing, total shares, shares par value and shares offering prices for each corporate action. 2. Total shares listed after each corporate action; and 3. Name of the stock exchange where the shares are listed. Notes: If the Company does not have shares listing chronology, the condition shall be disclosed.	70

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Hlm. Page
13	Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku Other Securities Listing Issuance and/or Listing Chronology since the initial issuance until end of fiscal year	Mencakup antara lain: 1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; 2. Nilai penawaran efek lainnya; 3. Nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan; dan 4. Peringkat efek. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan.	Includes the information, as follows: 1. Name of other securities, other securities issuance date, interest/yield rate of other securities, and maturity date of other securities; 2. Other securities offering price; 3. Name of stock exchange where other securities are listed; and 4. Securities rating. Notes: if the Company does not have other securities listing chronology and issuance, the condition shall be disclosed.	70
14	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang Name and address of stock market supporting institution and/or profession	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.	Includes the information, as follows: 1. Name and address of Shares Registrar/Company's Shares Administrator; 2. Name and Address of Public Accountant Firm; and 3. Name and address of rating company.	73
15	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional National and International scales awards received and/or valid certifications in recent fiscal year	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional.	National and International scales awards received and/or valid certifications in recent fiscal year.	23
16	Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada) Name and address of subsidiary or branch office or representative office (if any)	Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan.	Includes the information, as follows: 1. Name and address of the subsidiary; and 2. Name and address of branch/representative office. Notes: if the Company does not have any subsidiary/branch office/representative office, shall be disclosed.	75
17	Informasi pada Website Perusahaan Information at Official Website	Meliputi paling kurang: 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. Isi Kode Etik; 3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan; 4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan 6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.	Includes the information, at least, as follows: 1. Shareholders information until individual end-owners; 2. Code of Conducts contents; 3. Information about General Meetings of Shareholders (GMS) at least including agenda discussed in the GMS, GMS Minutes of Meeting Summary and important date information, such as GMS announcement date, GMS invitation date, GMS Summary publication date; 4. Separated Financial Statements (5 recent years); 5. Profile of Board of Commissioners and Board of Directors; and 6. Charter of the Board of Commissioners, Committees and Internal Audit Unit	74

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Hlm. Page
18	Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal Education and/or training program participated by Board of Commissioners, Board of Directors, the Committees, Corporate Secretary and Internal Audit Unit	Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti): 1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; 2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; 3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; 4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; 5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; 6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan 7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal. yang diikuti pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan.	Includes the information, at least, as follows (type and person who is relevant to participate in): 1. Education and/or training program for Board of Commissioners; 2. Education and/or training program for Board of Directors; 3. Education and/or training program for Audit Committee; 4. Education and/or training program for Remuneration and Nomination Committee; 5. Education and/or training program for Other Committees; 6. Education and/or training program for Corporate Secretary; and 7. Education and/or training program for Internal Audit Unit. Notes: if there is no education and/or training program done in the fiscal year, the condition shall be disclosed.	186, 199, 218, 229, 235, 238
V. Analisa & Pembahasan Manajemen Atas Kinerja Perusahaan Management Discussion & Analysis on Company Performance				
1	Tinjauan operasi per segmen usaha Operational Review by Business Segment	Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: a. Produksi; b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; c. Penjualan/pendapatan usaha; dan d. Profitabilitas.	The information contains, as follows: 1. Explanation about each business segment. 2. Performance by business segment, including: a. Production; b. Increasing/decreasing production capacity; c. Sales/Revenue; and d. Profitability.	98
2	Uraian atas kinerja keuangan perusahaan Description on Financial Performance	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain & penghasilan komprehensif periode berjalan; dan 5. Arus kas.	Financial performance analysis including comparison of financial performance in recent fiscal year with earlier year and the cause of increasing/decreasing performance (narrative explanation and table), includes the information, as follows: 1. Current assets, non-current assets, and total assets; 2. Current liabilities, non-current liabilities and total liabilities; 3. Equity; 4. Sales/Revenue, expense and profit (loss), comprehensive income & total comprehensive income (loss); and 5. Cash flows.	116

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Hlm. Page
3	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan Discussion and analysis on solvency and receivables collectability by presenting calculation of ratio that are relevant with the Company's industry	Penjelasan tentang : 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang.	Explanation on : 1. Solvency, both short-term and long-term; and 2. Receivables collectability ratio.	143
4	Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy) Discussion on capital structure and capital structure policy	Penjelasan atas: 1. Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies); dan 3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal.	Explanation on: 1. Capital structure description comprising of interest/sukuk based liabilities and equity; and 2. Capital structure policies; and 3. Basis for capital structure policy preference	145
5	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir Discussion on material commitment for capital expenditure	Penjelasan tentang: 1. Nama pihak yang melakukan ikatan; 2. Tujuan dari ikatan tersebut; 3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.	Explanation on: 1. Name of the committed party; 2. Purpose of the commitment; 3. Source of fund expected to fulfill the commitment; 4. Denomination currency; and 5. Initiatives planned by the Company as protection from related foreign currency. Notes: if the Company does not have any commitment related with capital expenditure in the recent fiscal year, the condition shall be disclosed.	146
6	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir Discussion on capital expenditure realization in recent fiscal year	Penjelasan tentang: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.	Explanation on: 1. Type of capital expenditure; 2. Purpose of capital expenditure; and 3. Value of capital expenditure realization in recent fiscal year. Notes: if there is no capital expenditure realization, the condition shall be disclosed.	147
7	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan Information on comparison between target at beginning of fiscal year with the result (realization), and target or projection to be achieved within one upcoming period in terms of revenue, profit, capital structure or others considered necessary for the Company.	Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.	The information includes: 1. Comparison between target at beginning of fiscal year and result (realization); and 2. Target or projection to be achieved within one upcoming period	147

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Hlm. Page
8	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan Subsequent material information and fact after accountant reporting date	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.	Description on subsequent material event after accountant reporting date including its impact to future performance and business risk. Notes: If there is no subsequent material information after accountant reporting date, the condition shall be disclosed.	152
9	Uraian tentang prospek usaha perusahaan Description on business prospect	Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	Description on business prospect related with the industry and economics generally followed by quantitative supporting data from reliable sources.	151
10	Uraian tentang aspek pemasaran Description on marketing aspect	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.	Description on marketing aspect of the Company's products and/or services, i.e. marketing strategy and market share.	152
11	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir Description on dividend policy and amount of cash dividend per share and total dividend per annum that is announced or paid within 2 (two) recent fiscal years	Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. Payout ratio; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.	The information includes: 1. Dividend policy; 2. Total dividend paid; 3. Total cash dividend per share; 4. Payout ratio; and 5. Cash dividend announcement and payment date in each year. Notes: If no dividend payment, the reason shall be disclosed.	153
12	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku Employee and/or management stock option plan (ESOP/MSOP)	Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga exercise. Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.	The information includes: 1. Amount of ESOP/MSOP shares and realization; 2. Maturity; 3. Requirement for eligible employee and/or management; 4. Exercise price. Notes: If the program is unavailable, the condition shall be disclosed.	154
13	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana) Public offering proceeds realization (in the course of the Company has a mandatory to report proceeds realization)	Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.	The information includes: 1. Total proceeds; 2. Proceeds realization plan; 3. Detail of proceeds realization; 4. Outstanding; and 5. Date of GMS approval on the change of proceeds realization (if any). Notes: if the public offering proceeds realization information is not available, the condition shall be disclosed.	154

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Hlm. Page
14	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi Material information on investment, expansion, divestment, business merger/joint, acquisition and/or debt/capital restructuring	Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.	The information includes: 1. Name of the transaction and nature of the affiliated relation; 2. Explanation about the transaction fairness; 3. Reason of the transaction; 4. Realization of the transaction during the recent fiscal year period; 5. Company policy related with transaction review mechanism; and 6. Compliance with related Law and regulation. Notes: if the transaction is unavailable, the condition shall be disclosed.	154
15	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir Description on change in regulation in recent fiscal year.	Uraian memuat antara lain: 1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan 2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan, agar diungkapkan.	The information contains information, as follows: 1. Name of changing regulation; and 2. Impacts (quantitative and/or qualitative) to the Company (if significant) or statements that the impact is less material. Notes: if there is no changing regulation, the condition shall be disclosed.	156
16	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir Impact to the Company Description on change in accounting policy implemented in recent fiscal years	Uraian memuat antara lain: 1. Perubahan kebijakan akuntansi; 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	Description includes: 1. Change in accounting policy; 2. Reason of the change to the accounting policy; and 3. Quantitative impact on the financial statements Notes: If there is no change in accounting policy, the condition shall be disclosed.	156
17	Informasi kelangsungan usaha Information on Business Sustainability	Pengungkapan informasi mengenai: 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment. Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.	Disclosure of information, as follows: 1. Issues with potential significant impact towards the Company's business sustainability in the recent fiscal year. 2. Assessment from the management on issues explained at point 1; and 3. Assumption used by the Management in the assessment. Notes: If there is no issue with potential significant impact towards the Company's business sustainability in the recent fiscal year, the underlying assumption of the management for ensuring that there is no with potential significant impact towards the Company's business sustainability in the recent fiscal year shall be disclosed.	157

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Hlm. Page
VI. Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance				
1	Uraian Dewan Komisaris Description on Board of Commissioners	Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).	Description includes: 1. Description on Board of Commissioners' responsibility; 2. Evaluation to performance of each Committee under the Board of Commissioners and evaluation basis; and 3. Disclosure on Board Charter (Board of Commissioners Working Guideline and Procedure).	176
2	Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris) Information about Independent Commissioner (minimum 30% of total Board of Commissioners)	Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	Includes the information, as follows: 1. Independent Commissioner appointment criteria; and 2. Statement of Independency for every Independent Commissioner.	179
3	Uraian Direksi Description of Board of Directors	Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).	The information includes: 1. Scope of individual duty and responsibility for every Board of Directors member; 2. Assessment on the Committees under the Board of Directors (if any); and 3. Disclosure on Board Charter (Board of Directors Working Guideline and Procedure).	194
4	Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2017 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi GCG Assessment for Fiscal Year 2017 including, at least, Board of Commissioners and Board of Directors aspects	Memuat uraian mengenai: 1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian; 2. Pihak yang melakukan penilaian; 3. Skor penilaian masing-masing kriteria; 4. Rekomendasi hasil penilaian; dan 5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2017, agar diungkapkan.	The information includes: 1. Assessment criteria: 2. Name of the Assessor; 3. Score for each criteria; 4. Assessment recommendation; and 5. Reason for recommendation that is not/not yet implemented. Notes: If there is no GCG Assessment in 2017, the condition shall be disclosed.	179, 191, 203

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Hlm. Page
5	Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Description on remuneration policy for Board of Commissioners and Board of Directors	Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan 6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.	The information includes: 1. Disclosure of Board of Commissioners remuneration proposal until stipulation procedure; 2. Disclosure of Board of Directors remuneration proposal until stipulation procedure; 3. Remuneration structure indicating remuneration component and amount per component for every Board of Commissioners member; 4. Remuneration structure indicating remuneration component and amount per component for every Board of Directors member; 5. Disclosure of Board of Directors remuneration indicator; and 6. Disclosure of performance and non-performance incentives and/or stock option received by every Board of Commissioners and Board of Directors member (if any). Notes: If the performance and non-performance incentives and/or stock option received by every Board of Commissioners and Board of Directors member are unavailable, the condition shall be disclosed.	205
6	Frekuensi & Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan) Meeting frequency & attendance list that is attended by majority of the members in Board of Commissioners meeting (minimum once in 2 months), Board of Directors meeting (minimum once in 1 month), and Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting (Management Meeting) (minimum once in 4 months)	Informasi memuat antara lain: 1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat. untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.	The information includes: 1. Meeting date; 2. Meeting participants; and 3. Meeting agenda. for every Board of Commissioners meeting, Board of Directors meeting or Management Meeting	186, 200
7	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu Information about ultimate and controlling shareholders, both direct and non-direct shareholders until individual shareholder.	Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali. Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.	Presented as scheme or chart, with separation between ultimate and controlling shareholders. Notes: Ultimate shareholders refer to any party with direct and indirect shares ownership minimum 20% (twenty per cent) of voting rights from total shares with voting rights issued by a Company who are not controlling Shareholders.	70

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Hlm. Page
8	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali Disclosure of affiliation among the Board of Directors members, Board of Commissioners and Ultimate/Controlling Shareholders	Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.	The information includes: 1. Affiliation among the Board of Directors members; 2. Affiliation between Board of Directors and Board of Commissioners members; 3. Affiliation between Board of Directors members with Ultimate and/or Controlling Shareholders; 4. Affiliation among the Board of Commissioners members; and 5. Affiliation between Board of Commissioners members with Ultimate and/or Controlling Shareholders. Notes: If the affiliation is unavailable, the condition shall be disclosed.	184, 196
9	Komite Audit Audit Committee	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit; 2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.	The information includes: 1. Name and position of Audit Committee members; 2. Educational background (Major and Institution) and career history (Position, Institution, and tenure) of the Audit Committee members; 3. Independency of Audit Committee members; 4. Description of duty and responsibility; 5. Description of Audit Committee working report in the fiscal year; and 6. Audit Committee meeting frequency and attendance level.	210
10	Komite Nominasi dan/atau Remunerasi Nomination and/or Remuneration Committee	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi direksi.	The information includes: 1. Name, position and brief profile of Nomination and/or remuneration committee members; 2. Independency of nomination and/or remuneration committee members; 3. Description of duty and responsibility; 4. Description of nomination and/or remuneration committee working report in the fiscal year; and 5. Nomination and/or remuneration committee meeting frequency and attendance level; 6. Statements of nomination and/or remuneration committee charter; and 7. Board of Directors succession policy.	231

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Hlm. Page
11	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan Other Committees under the Board of Commissioners established by the Company	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.	The information includes: 1. Name, position, and brief profile of the other committee's members; 2. Independency of other committee's members; 3. Description of duty and responsibility; 4. Description of working report by the other committees; and 5. Other committees meeting frequency and attendance level.	220
12	Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan Description of Corporate Secretary Duty and Function	Mencakup antara lain: 1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Domisili; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan 4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	The information includes: 1. Name and brief profile of Corporate Secretary; 2. Domicile; 3. Description of duty and responsibility; and 4. Corporate secretary working report in the fiscal year.	232
13	Uraian mengenai unit audit internal Description on Internal Audit Unit	Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan 6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal.	The information includes: 1. Name of Internal Audit Unit Chief; 2. Total personnel (internal auditor) at Internal Audit Unit; 3. Certification as internal audit profession; 4. Position of internal audit unit in the organization structure; 5. Description of internal audit unit working report; and 6. Party who appointed and discharged Head of Internal Audit Unit.	237
14	Akuntan Publik Public Accountant	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.	The information includes: 1. Name and period of public accountant auditing the annual financial statements for 5 recent years; 2. Name and period of Public Accountant Firm auditing annual financial statements for 5 recent years; 3. Amount of fee for each service provided by the public accountant in recent fiscal year; and 4. Other service provided by Public Accountant Firm besides annual financial statements audit service Notes: If there is no other service provided, the condition shall be disclosed.	241
15	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan Description on Risk Management	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.	The information includes: 1. Explanation on risk management system implemented by the Company 2. Explanation on evaluation done to effectiveness of the risk management system; 3. Explanation on risks profile of the Company; and 4. Risk mitigation plan.	244

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Hlm. Page
16	Uraian mengenai sistem pengendalian intern Description on internal control system	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian internal, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – internal control framework); dan 3. Penjelasan mengenai hasil revaluasi yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian internal pada tahun buku.	The information includes: 1. Brief explanation on internal control system including financial and operational controlling; 2. Explanation of internal control system compliance with international-standard framework (COSO – internal control framework); and 3. Explanation on evaluation to the internal control system	250
17	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup Description on corporate social responsibility related with environment	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. 3. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.	The information includes: 1. Activity target/plan in 2016 as implemented by the management; 2. Activity realization and quantitative impact from the activity; and related with environmental initiative engaged with operational activity of the Company, such as environment-friendly and recycle material and energy consumption, waste treatment system, environment issue complaint mechanism, environmental aspect consideration in loans disbursement for the customers, and others 3. Environmental certification.	267
18	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja Description on corporate social responsibility related with Employment, Occupational Health and Safety	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2017 yang ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.	The information includes: 1. Activity target/plan in 2017 as implemented by the management; and 2. Activity realization and quantitative impact from the activity related with employment, occupational health and safety practice such as equality of gender and job opportunity, employee turnover ratio, remuneration, occupational issue handling mechanism, and others.	269
19	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan Description on corporate social responsibility related with social and community development	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2017 yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan 3. Biaya yang dikeluarkan Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain.	The information includes: 1. Activity target/plan in 2017 as implemented by the management; 2. Activity realization and impact from the activity; and 3. Allocated budget Related with social and community development, such as local workers employment, community development in operational area, social facilities and infrastructures development, other types of donation, anti-corruption policy and procedure communication, anti-corruption training and others.	272

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Hlm. Page
20	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen Description on corporate social responsibility related with responsibility to customers	Mencakup antara lain: 1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2017 ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.	The information includes: 1. Activity target/plan in 2017 as implemented by the management; and 2. Activity realization and impact from the activity Related with product responsibility such as customer health and safety, product information, channel, customer complaint number and handling and others	275
21	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan Litigation encountered by the Company, subsidiary, Board of Directors and/or Board of Commissioners members serving in the Annual Report period	Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.	The information includes: 1. Case/lawsuit summary; 2. Case/lawsuit settlement status; 3. Risk encountered by the Company and value of the litigation/lawsuit; and 4. Administrative sanction charged to the Entity, Board of Commissioners and Board of Directors members by the authorized regulator (stock market, banking and other authorities) in recent fiscal year (or statements of free from any administrative sanction). Notes: In the course of the Entity, Board of Commissioners and Board of Directors members do not encounter any litigation, the condition shall be disclosed.	252
22	Akses informasi dan data perusahaan Corporate Information and Data Access	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.	Description on the availability of corporate information and data access publicly, i.e via website (in Indonesian and English), mass media, mailing list, bulletin, analyst meeting and others	254
23	Bahasan mengenai kode etik Description on Code of Conducts	Memuat uraian antara lain: 1. Pokok-pokok kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	The information includes: 1. Code of Conducts provisions; 2. Disclosure that Code of Conducts prevail for entire organization level; 3. Code of Conducts dissemination; 4. Punishment for every violation as stipulated in the Code of Conducts (normative); 5. Number of Code of Conducts violation, punishment administered in recent fiscal year Notes: If Code of Conducts violation is unavailable in recent fiscal year, the condition shall be disclosed.	256

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Hlm. Page
24	Pengungkapan mengenai whistleblowing system Disclosure on Whistle Blowing System	Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi whistleblower; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan 6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	The information includes Whistle Blowing System mechanism, as follows: 1. Fraud report submission; 2. Protection to the Whistle Blower; 3. Report handling; 4. Report Manager authority; and 5. Total report received and processed in recent fiscal year; and 6. Punishment/follow-up on the report that had been processed completely during the fiscal year. Notes: If neither incoming or processed report in recent fiscal year, the condition shall be disclosed.	259
25	Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Composition Diversity Policy	Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.	Description of written policy of the Company on Board of Commissioners and Board of Directors composition diversity policy in terms of educational background (major), career history, age and gender. Notes: if the policy is unavailable, the condition shall be disclosed altogether with the consideration.	179
VII. Informasi Keuangan Financial Information				
1	Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Declaration from the Board of Directors and/or Board of Commissioners on Financial Statements Responsibility	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	Compliance with regulations related with Financial Statements Responsibility	299
2	Opini auditor independen atas laporan keuangan Independent Auditor Opinion on the Financial Statements			301
3	Deskripsi Auditor Independen di Opini Description of Independent Auditor in the Opinion	Deskripsi memuat tentang: 1. Nama dan tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.	Description includes information, as follows: 1. Name & signature; 2. Date of Audit Report; and 3. KAP and Public Accountant Registries.	302
4	Laporan keuangan yang lengkap Complete Financial Statements	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	Full disclosure of financial statements parts, as follows: 1. Statements of financial position (balance sheet); 2. Statements of profit or loss; 3. Statements of equity change; 4. Statements of cash flows; 5. Notes on the financial statements; and 6. Comparative statements on earlier period; and 7. Statements of financial position at beginning of earlier period when the entity implemented certain accounting policy retrospectively or restating the financial statement accounts, or when the entity reclassified the accounts in the financial statements (if relevant)	303

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Hlm. Page
5	Perbandingan tingkat profitabilitas Comparison of profitability	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.	Comparative profit (loss) for the year and earlier year	305
6	Laporan Arus Kas Statements of Cash Flows	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.	The information includes: 1. Classification of three activity categories: operating, investing and financing; 2. Implementation of direct method to report cash flows from operating activities; 3. Separation of disclosure between inflow and outflow cash in recent year on operating, investing and financing activities; and 4. Disclosure of non-cash transaction that shall be disclosed in the notes on financial statements.	307
7	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Summary of Accounting Policy	Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pajak penghasilan; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan.	The information, at least, includes: 1. Statement of compliance with the FAS; 2. Basis of Financial Statements measurement and preparation; 3. Recognition of income and expenses; 4. Employment benefits; and 5. Financial Instruments.	313
8	Pengungkapan transaksi pihak berelasi Disclosure of related party transaction	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.	The disclosure includes: 1. Name of related parties; and nature and relation with the related parties; 2. Amount of the transaction and percentage total related income and expenses; and 3. Amount of balance and percentage to total assets or liabilities.	465
9	Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan Disclosure of taxation-related information	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2017; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	The disclosure shall present information as follows: 1. Fiscal reconciliation and current tax calculation; 2. Explanation on relationship between tax income (expense) and accounting income. 3. Statements of reconciliated Taxable Income (LKP) is placed as basis for the Entity Income Tax Annual SPT 2017 submission; 4. Detail of deferred tax assets and liabilities recognized in the financial statements for every presentation period, and total deferred tax income (expenses) recognized in statements of profit or loss if the amount is unrecognized in the total deferred tax assets or liabilities recognized in the statements of financial position; and 5. Disclosure of any tax dispute event	361

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Hlm. Page
10	Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap Disclosure related with fixed assets	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.	The disclosure shall present information as follows: 1. Depreciation method applied; 2. Disclosure on selected accounting policy between revaluation model and cost model; 3. Significant method and assumption applied to estimate fair value of the fixed assets (for revaluation model) or disclosure of fixed assets fair value (for cost model); and 4. Reconciliation of total fixed assets gross booked value and accumulative depreciation at beginning and end of period by presenting: addition, deduction and reclassification.	380
11	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi Disclosure related with operation segment	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.	The disclosure shall present information as follows: 1. General information including factors applied to identify the reported segment; 2. Information on profit or loss, assets and liabilities of the reported segment; 3. Reconciliation of total segment revenue, reported segment profit or loss, segment assets, segment liabilities and other material elements of the segments to total related in the entity; and 4. Disclosure at entity level, including information about product and/or service, geographical area and main customers.	-
12	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan Disclosure related with Financial Instruments	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; 4. Kebijakan manajemen risiko; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.	The disclosure shall present information as follows: 1. Detail information of owned financial instruments by classification; 2. Fair value and its hierarchical level for every financial instrument group; 3. Explanation of risk related with the financial instrument; market risk, credit risk and liquidity risk; 4. Risk management policy; and 5. Quantitative risk analysis related with financial instrument.	318
13	Penerbitan laporan keuangan Financial Staements Publication	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.	The disclosure shall present information as follows: 1. Date of authorization for the financial statements publication; and 2. Authorized party of the financial statements.	469



LAPORAN KEUANGAN



**PT PERUSAHAAN PENGELOLA
ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016**

***PT PERUSAHAAN PENGELOLA
ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES***

***Consolidated Financial Statement
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016***

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016		<i>Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2017 and 2016</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1-2	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>
Informasi Tambahan		<i>Additional Information</i>
Laporan Posisi Keuangan (Entitas Induk)	I	<i>Statements of Financial Position (Parent Entity)</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (Entitas Induk)	II	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Parent Entity)</i>
Laporan Perubahan Ekuitas (Entitas Induk)	III	<i>Statements of Changes in Equity (Parent Entity)</i>
Laporan Arus Kas (Entitas Induk)	IV	<i>Statements of Cash Flows (Parent Entity)</i>
Informasi Tambahan	V	<i>Additional Information</i>



PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

State-owned Asset Management Company

**PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**

**BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
RELATING TO
RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017 AND 2016
PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama / Name	: Henry Sihotang
Alamat kantor / Office Address	: Sampoerna Strategic Square North Tower 12th Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930
Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain / Domicile as stated in ID Card	: Jl. Bukit Hijau VIII No.23 RT.009/RW.013 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Nomor Telpn / Phone Number	: 021-57982222
Jabatan / Position	: Direktur Utama / President Director
2. Nama / Name	: Ajar Setiadi
Alamat kantor / Office Address	: Sampoerna Strategic Square North Tower 10th Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930
Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain / Domicile as stated in ID Card	: Griya Bukit Jaya Blok N.2/3 RT.010/RW.027 Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor.
Nomor Telpn / Phone Number	: 021-57982222
Jabatan / Position	: Direktur / Director

Menyatakan bahwa:

State that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian;	We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements;
2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;	The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;	All information contained in the consolidated financial statements is complete and correct;
4. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;	The consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas anak.	We are responsible for internal control system within the company and its subsidiaries.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 20 Februari 2018 / February 20, 2018

Direktur Utama/
President Director

(Henry Sihotang)



Direktur/
Director

(Ajar Setiadi)

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor/Number : R/029.AGA/sat.3/2018

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi/
Shareholders, Commissioners and Directors

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk memenuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2017, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017 terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan opini atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2017 and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2017, was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of the Company (parent entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2017 and the statement of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information

untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan kesimpulan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal berdasarkan audit kami. Pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal tersebut kami laksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Pernyataan Standar Auditing No. 62 (Seksi 801) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

We also have tested on the Company's compliance with certain laws and regulations and internal controls. The compliance with certain laws and regulations and internal controls are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express a conclusion on the Company's compliance with certain laws and regulations and internal controls based on our audit. Testing of the compliance with certain laws and regulations and internal controls that we performed were in accordance with State Financial Auditing Standards established by the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia and Standards of Auditing No. 62 (Section 801) established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal, disampaikan secara terpisah kepada manajemen masing-masing dalam laporan kami No. R/008.AAT/sat/2018 dan No. R/009.AAT/sat/2018 tanggal 20 Februari 2018.

The compliance to certain regulations and internal controls, are submitted separately to the management, in our reports No. R/008.AAT/sat/2018 and No. R/009.AAT/sat/2018 dated February 20, 2018, respectively.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Saptoto Agustomo

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0499/
Public Accountant License Number: AP.0499

Jakarta, 20 Februari 2018/ February 20, 2018

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	Catatan/ Notes	2017 Rp	2016 Rp	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	3	1,694,156	1,534,252	Cash and Cash Equivalents
Pinjaman Investasi Jangka Pendek				Short-term Investment Loans
Pihak Berelasi	4	10,427	15,489	Related Parties
Pihak Ketiga	4	298,517	34,252	Third Parties
Aset Keuangan Diperdagangkan				Held for Trading Financial Assets
Pihak Berelasi	5	80,921	90,354	Related Parties
Pihak Ketiga	5	2,314	5,536	Third Parties
Piutang Usaha				Accounts Receivable
Pihak Berelasi	6	341,684	285,126	Related Parties
Pihak Ketiga	6	879,482	722,983	Third Parties
Piutang Retensi				Retention Receivables
Pihak Berelasi	7	87,760	48,440	Related Parties
Pihak Ketiga	7	129,206	90,083	Third Parties
Piutang Ventura Bersama Konstruksi	8	189,408	246,190	Joint Venture Construction Receivables
Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan				Loans Receivable-Bailout
Pihak Berelasi	9	207,115	219,215	Related Parties
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja				Gross Amount Due from Customers
Pihak Berelasi	10	347,956	484,320	Related Parties
Pihak Ketiga	10	945,766	775,384	Third Parties
Persediaan	11	170,160	116,762	Inventories
Uang Muka dan Biaya Dibayar Di Muka	12	104,468	171,475	Advances and Prepaid Expenses
Pajak Dibayar Di Muka	13a	474,896	359,238	Prepaid Taxes
Aset Lancar Lainnya	14	74,695	97,264	Other Current Assets
Jumlah Aset Lancar		6,038,931	5,296,363	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	15	114,858	125,710	Available for Sale Financial Assets
Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi				Loans Receivable - Restructuring and/or Revitalization
Pihak Berelasi	16	1,356,385	1,351,876	Related Parties
Pinjaman Investasi Jangka Panjang				Short-term Investment Loans
Pihak Ketiga	19	110,468	8,000	Third Parties
Properti Investasi	17	395,901	292,585	Investment Property
Aset Pajak Tangguhan	13d	20,605	20,435	Deferred Tax Assets
Investasi pada Ventura Bersama	18	348,689	340,884	Investment in Joint Ventures
Investasi Jangka Panjang Lainnya	20	41,818	42,535	Other Long-Term Investments
Aset Tetap	21	716,622	386,165	Property, Plant and Equipment
Aset Tidak Lancar Lainnya	14	336,091	25,276	Other Non-Current Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		3,441,437	2,593,466	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		9,480,368	7,889,829	TOTAL ASSETS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	Catatan/ Notes	2017 Rp	2016 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha				Accounts Payable
Pihak Berelasi	22	71,476	1,501	Related Parties
Pihak Ketiga	22	1,526,517	1,335,669	Third Parties
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan				Bank and Financial Institution Loans
Pihak Berelasi	23	399,340	130,822	Related Parties
Pihak Ketiga	23	550,677	397,907	Third Parties
Pinjaman Jangka Panjang yang Akan Jatuh Tempo				Current Maturities of
Dalam Satu Tahun				Long Term Loan
Pihak Berelasi	23	59,551	23,518	Related Parties
Pihak Ketiga		33,992	3,587	Third Parties
Utang Bruto kepada Pihak Ketiga	24	628,457	618,204	Gross Amount Due to Third Parties
Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Pendek				Short-Term Advances from Customers
Pihak Berelasi	25	31,867	24,575	Related Parties
Pihak Ketiga	25	178,928	265,530	Third Parties
Utang Pajak	13.b	55,320	53,925	Taxes Payable
Beban Akruai dan Utang Lain-lain	26	141,754	194,212	Accrued Expenses and Other Payables
Pendapatan diterima dimuka	27	24,929	9,189	Unearned Revenue
Hasil Pengelolaan Aset yang Masih				Proceeds from Assets Management for
Harus Disetor	28	12,722	50,627	Remittance
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		3,715,530	3,109,266	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan	29	27,897	22,556	Employee Benefit Liabilities
Pinjaman Bank Jangka Panjang				Long-Term Bank Loans
Pihak Berelasi	23	232,878	153,354	Related Parties
Pihak Ketiga	23	686,918	342,316	Third Parties
Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Panjang				Long-Term Advances from Customers
Pihak Berelasi	30	--	7,028	Related Party
Pihak Ketiga	30	107,454	103,981	Third Parties
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		1,055,147	629,235	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		4,770,677	3,738,501	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik				Equity Attributable to Owner
Entitas Induk				of the Parent
Modal Saham-Nilai Nominal Rp 1.000.000				Share Capital - Rp 1,000,000 par value
per saham - Modal Dasar 5.000.000 saham				per share - Authorized Capital 5,000,000 shares
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				Issued and Fully Paid
31 Desember 2017 dan 2016, masing-masing				December 31, 2017 and 2016
2.996.688 saham	31.a	2,996,688	2,996,688	2,996,688 shares, respectively
Tambahan Modal Disetor	31.d	(305,768)	(305,768)	Additional Paid in Capital
Saldo Laba:				Retained Earnings:
Telah Ditentukan Penggunaannya	31.b	141,353	141,353	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya	31.c	1,404,335	1,103,641	Unappropriated
Labanya (Rugi) Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk				Unrealized Gain (Loss) on Available
Dijual - Bersih	31.e	44,279	53,443	for Sale Securities - Net
Surplus Revaluasi Aset Tetap	31.f	417,957	156,166	Revaluation Surplus of Property, Plant and Equipment
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada				Total Equity Attributable to Owner of
 Pemilik Entitas Induk		4,698,844	4,145,523	the Parent
Kepentingan Non Pengendali	31.g	10,847	5,805	Non-Controlling Interest
JUMLAH EKUITAS		4,709,691	4,151,328	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		9,480,368	7,889,829	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
THE CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	Catatan/ Notes	2017 Rp	2016 Rp	
PENDAPATAN USAHA	32	6,355,757	5,000,360	REVENUES
BEBAN USAHA	33	(5,782,914)	(4,586,191)	OPERATING EXPENSE
LABA USAHA		572,843	414,169	OPERATING INCOME
Pendapatan Bunga		10,785	11,618	Interest Income
Keuntungan Penjualan Aset Tetap		--	98,181	Gain on Sale of Property, Plant, and Equipment
Beban Bunga dan Keuangan		(65,334)	(103,880)	Interest Expense and Financial Charge
Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi	21	11,977	3,273	Increase in Fair Value of Investment Property
Beban Pajak Final	37	(168,337)	(137,840)	Final Tax Expense
Bagian Laba Ventura Bersama	34	133,038	63,283	Share of the Profit of Joint Ventures
Pendapatan (Beban) Lain-lain		(162,042)	(65,404)	Other Income (Expenses)
LABA SEBELUM PAJAK		332,930	283,400	INCOME BEFORE TAX
PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAXES
Manfaat (Beban) Pajak Kini		(6,576)	(6,321)	Current Tax Benefit (Expenses)
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan		131	4,187	Deferred Tax Benefit (Expenses)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan		(6,445)	(2,134)	Total Income Tax Expense
LABA TAHUN BERJALAN		326,485	281,266	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will not be reclassified to profit or loss
Surplus Revaluasi Aset Tetap	21	264,436	--	Property, Plant and Equipment Revaluation Surplus
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Liabilitas Imbalan Pasti		(4,304)	(2,667)	Actuarial Gain (Loss) from Defined Benefit Liabilities
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will be reclassified to profit or loss
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual		(9,164)	18,417	Available for Sale Financial Assets
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain		250,968	15,750	Total Other Comprehensive Income
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		577,453	297,016	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA				INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO
Pemilik Entitas Induk		324,045	279,466	Owners of The Parent Entity
Kepentingan Non-Pengendali		2,440	1,800	Non-Controlling Interests
JUMLAH		326,485	281,266	TOTAL
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA				COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO
Pemilik Entitas Induk		572,411	295,242	Owners of The Parent Entity
Kepentingan Non-Pengendali		5,042	1,774	Non-Controlling Interest
JUMLAH		577,453	297,016	TOTAL
LABA PER SAHAM (dalam angka penuh)	36	108,134	93,258	EARNINGS PER SHARE (in full amount)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada

Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

For the Years Ended

December 31, 2017 and 2016

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/Equity Attributable to Owner of the Parent									
Modal Saham/ Share Capital	Uang Muka Setoran Modal/ Advance Payment of Capital	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid in Capital	Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual/ on Available for Sale Financial Assets	Surplus Revaluasi Aset Tetap/ Revaluation Surplus of Property, Plant and Equipment	Saldo Laba/Retained Earnings *) Telah Ditemukan Penggunaan/ Appropriated	Saldo Laba/Retained Earnings *) Belum Ditemukan Penggunaan/ Unappropriated	Jumlah/ Total	Kepentingan Non- Pengendali/ Non-controlling Interests	Jumlah Ekuitas/ Total Equity
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo Per 31 Desember 2015	1,996,688	1,000,000	(305,768)	35,026	156,166	141,353	837,032	3,864,497	4,031
									3,864,528
									Balance as of December 31, 2015
Setoran Modal	1,000,000	(1,000,000)	-	-	-	-	-	-	-
Penggunaan Saldo Laba 2015	-	-	-	-	-	-	(10,216)	-	(10,216)
Dividen Tunai	-	-	-	-	-	-	279,466	1,800	281,266
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	18,417	-	-	(2,641)	(26)	15,750
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Per 31 Desember 2016	2,996,688	-	(305,768)	53,443	156,166	141,353	1,103,641	5,805	4,151,327
									Balance as of December 31, 2016
Penggunaan Saldo Laba 2016	-	-	-	-	-	-	(19,090)	-	(19,090)
Dividen Tunai	-	-	-	-	-	-	324,045	2,440	326,485
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	(9,164)	261,791	-	(4,261)	2,602	250,968
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	-	-	-	44,279	417,957	141,353	1,404,335	10,847	4,709,691
Saldo Per 31 Desember 2017	2,996,688	-	(305,768)	44,279	417,957	141,353	1,404,335	10,847	4,709,691
									Balance as of December 31, 2017

*) Saldo laba termasuk keuntungan (kerugian) aktuarial dari program imbalan pensiun *) Retained earnings includes actuarial gain (loss) arising from defined benefit plan

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS**
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	Catatan/ Notes	2017 Rp	2016 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan		6,016,633	4,144,611	Cash Receipts from Customers
Penyaluran Pembiayaan Konsumen		(374,397)	(185,208)	Disbursement for Financing
Penerimaan IPA Eks BPPN		13,444	13,879	Proceeds from SOEs' Asset Management
Penerimaan Restitusi Pajak		--	10,207	Cash Receipts from Tax Refund
Penerimaan Bunga atas Pinjaman yang Diberikan		47,924	84,570	Proceeds from Loan Receivables Interest
Penerimaan Penggantian Biaya Aset		243	1,984	Reimbursable Cost of Assets
Pembayaran Beban Usaha		(5,497,316)	(4,426,592)	Payment of Operating Expenses
Pembayaran Beban Bunga		(182,201)	(147,820)	Payment of Interest Expenses
Pembayaran Pajak		(204,179)	(139,716)	Tax Paid
Penerimaan Hasil Investasi		126,300	142,974	Proceeds of Investment
Pencairan Surat Berharga Diperdagangkan		4,341	49,717	Receipt from Trading Securities
Pengelolaan Pinjaman Karyawan		(1,204)	(2,062)	Management of loan to Employee
Penerimaan (Pengeluaran) Lainnya		32,772	14,746	Other Income
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi		(17,640)	(438,710)	Net Cash Used in Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan Aset Tetap		(52,827)	(112,138)	Acquisitions of Property, Plant and Equipment
Penerimaan dari (Pengeluaran) Pinjaman yang Diberikan - Bersih		(577,989)	(327,484)	Receipt from (Disbursement) of Loans
Penambahan Ventura Bersama		--	(10,000)	Additional Investment in Joint Ventures
Perolehan Properti Investasi		(3,015)	(3,135)	Acquisition of Investment Properties
Hasil Penjualan Aset Tetap		9	251,563	Proceeds from Disposal of Property, Plant and Equipment
Pencairan Surat Berharga Tersedia untuk Dijual		3,970	10,543	Disbursement Securities Available for Sale
Penempatan Deposito yang Dijaminkan		(316,000)	--	Placement Deposit Guaranteed
Perolehan Aset Tak Berwujud		(669)	--	Acquisitions of Intangible Asset
Penambahan Investasi Jangka Panjang Lainnya		(133)	(247)	Additional Other Long term Investments
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(946,654)	(190,898)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan Pinjaman Bank dan Non Bank		15,245,645	7,111,093	Receipts from Bank and Non Bank
Pembayaran Pinjaman Bank dan Non Bank		(14,462,358)	(7,283,906)	Payment for Loan Bank and Non Bank
Penerimaan Pinjaman <i>Medium Term Notes</i>		500,000	--	Receipt from Medium Term Notes
Pembayaran Pinjaman <i>Medium Term Notes</i>		(140,000)	--	Payment for Medium Term Notes
Pembayaran Dividen		(19,089)	(10,216)	Dividend Payment
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan		1,124,198	(183,029)	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		159,904	(812,637)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		1,534,252	2,346,889	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	3	1,694,156	1,534,252	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Tambahan informasi aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan dalam Catatan 38

Additional information of non cash activities are presented in Note 38

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

1. Umum

1.a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 7 tanggal 27 Februari 2004 dari Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-05780/HT.01.01.TH.2004 tanggal 9 Maret 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 2004, Tambahan No. 4541. Akta pendirian Perusahaan tersebut dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset. Beberapa ketentuan dalam PP No. 10 Tahun 2004 telah diubah dengan diterbitkannya PP No. 61 tahun 2008 tanggal 4 September 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2004 yang menetapkan, antara lain perluasan maksud dan tujuan Perusahaan dan ruang lingkup kegiatan Perusahaan.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan No. 62 tanggal 21 Februari 2014 dari Desman, S.H. Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-10460.AH.01.02 tanggal 10 Maret 2014.

Berdasarkan Akta No. 27 dari Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2016 menyatakan persetujuan penambahan modal Perusahaan sebesar Rp1.000.000 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, dengan demikian modal ditempatkan yang semula sebesar Rp1.996.688 menjadi sebesar Rp2.996.688. Perubahan ini telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 8 Maret 2016.

1. General

1.a. Establishment and General Information

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("the Company") was established under Notarial Deed No. 7 dated February 27, 2004 of Lenny Janis Ishak, S.H., Notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia under the Decree No. C-05780/HT.01.01.TH.2004 dated March 9, 2004 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 39 dated May 14, 2004, Supplement 4541. The deed of establishment was made based on Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia No. 10 Year 2004 dated February 27, 2004 regarding the Establishment of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) in Asset Management Area. Several clauses in the PP No. 10 Year 2004 have been amended by the issuance of PP No. 61 Year 2008 dated September 4, 2008 regarding the Amendment to Government Regulation No. 10 Year 2004 which stipulates, among others expanded the purposes and objectives of the Company and its scope of activities.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by Deed of the Company's Meeting Resolution No. 62 dated February 21, 2014 of Desman, S.H., Notary in Jakarta. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by under the Decree No. AHU-10460.AH.01.02 dated March 10, 2014.

Based on Notarial deed no. 27 of Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notary in Jakarta, on February 15, 2016, declared approval of the capital increase of the Company Rp1,000,000 from the State Budget for Fiscal Year 2015, thus the original issued capital amounted Rp1,996,688 amounted to Rp2,996,688. These changes have been noted by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, Directorate General of Legal Administration on March 8, 2016.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

1. Umum (Lanjutan)

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan program pembangunan nasional pada umumnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perusahaan melakukan kegiatan usaha yang meliputi:

1. Pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setelah pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, untuk dan atas nama Menteri Keuangan;
2. Restrukturisasi dan/atau revitalisasi Badan Usaha Milik Negara ("BUMN");
3. Kegiatan investasi; dan
4. Kegiatan pengelolaan aset BUMN.

Perusahaan berkedudukan di Sampoerna Strategic Square, North Tower Lantai 9 sampai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45-46, Jakarta.

1.b. Struktur Entitas Anak

Perusahaan memiliki pengendalian atas entitas-entitas anak pada 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Aktivitas Bisnis Utama/ Core Business Activity	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operation	Jumlah Aset 31 Desember 2017/ Total Assets 31-Dec- 2017 Rp	Jumlah Pendapatan 31 Desember 2017/ Total Revenues 31-Dec-17 2017 Rp
PT PPA Finance ("PT PPAF")	Jakarta	Pembiayaan/Financing	99.999	2009	863,712	92,205
PT PPA Kapital ("PT PPAK")	Jakarta	Pembiayaan/Financing	99.996	2012	146,962	12,485
PT Nindya Karya ("PT NK")	Jakarta	Konstruksi/Construction	99.000	1961	4,549,648	5,642,745
PT Nindya Beton *) ("PT NB")	Jakarta	Pabrikasi/Manufacturing	100.000	2013	126,265	106,370
PT Duta Mentari Raya **) ("PT DMR")	Jakarta	Pabrikasi/Manufacturing	98.150	2014	128,333	--
PT Pratama Persada Airborne **) ("PT PPAI")	Jakarta	Survei Udara dan Pemetaan/Aerial Survey and Mapping Services	90.000	2016	49,005	35,250

*) Kepemilikan tidak langsung melalui PT Nindya Karya/Indirectly ownership through PT Nindya Karya

**) Kepemilikan tidak langsung melalui PT PPA Kapital/Indirectly ownership through PT PPA Kapital

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Aktivitas Bisnis Utama/ Core Business Activity	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operation	Jumlah Aset 31 Desember 2016/ Total Assets December 31, 2016 Rp	Jumlah Pendapatan Tahun 2016/ Total Revenues 2016 Rp
PT PPA Finance ("PT PPAF")	Jakarta	Pembiayaan/Financing	99.999	2009	633,343	87,598
PT PPA Kapital ("PT PPAK")	Jakarta	Pembiayaan/Financing	99.996	2012	122,579	13,235
PT Nindya Karya ("PT NK")	Jakarta	Konstruksi/Construction	99.000	1961	3,649,041	4,583,104
PT Nindya Beton *) ("PT NB")	Jakarta	Pabrikasi/Manufacturing	100.000	2013	177,840	79,263
PT Duta Mentari Raya **) ("PT DMR")	Jakarta	Pabrikasi/Manufacturing	98.150	2014	108,185	--
PT Pratama Persada Airborne **) ("PT PPAI")	Jakarta	Survei Udara dan Pemetaan/Aerial Survey and Mapping Services	99.99	2016	10,001	--

*) Kepemilikan tidak langsung melalui PT Nindya Karya/Indirectly ownership through PT Nindya Karya

**) Kepemilikan tidak langsung melalui PT PPA Kapital/Indirectly ownership through PT PPA Kapital

1. General (Continued)

According to Article 3 of the Company's Articles of Association, the purposes and objectives of the Company are to undertake and support the Government's policies and programs in economics sector and national development programs in general. To achieve its purposes and objectives the Company conducts several business activities which comprise of:

1. State's asset management which originated from Indonesian Banking Restructuring Agency (IBRA) after the termination and dissolution the task of IBRA, for and on behalf of the Minister of Finance;
2. Restructuring and/or revitalization of State-Owned Enterprises ("SOE's");
3. Investment activities; and
4. SOE's asset management activities.

The Company is located at the Sampoerna Strategic Square, North Tower Floor 9th to 12th, Jalan Jenderal Sudirman Lot 45-46, Jakarta.

1.b. Subsidiaries Structure

The Company has control the Subsidiaries at December 31, 2017 and 2016 as follows:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

1. Umum (Lanjutan)

• **PT PPAF**

Berdasarkan surat persetujuan Menteri Negara BUMN No. S-360/MBU/2009 tanggal 27 Mei 2009, Perusahaan membentuk PT PPAF dengan kepemilikan saham sebesar 99,999%.

• **PT PPAK**

Berdasarkan persetujuan Menteri Negara BUMN melalui surat No. S-372/MBU/2011 tanggal 22 Juni 2011, Perusahaan membentuk PT PPAK dengan kepemilikan saham sebesar 99,996%.

• **PT NK**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012, Perusahaan melakukan penyertaan modal pada PT NK sebesar Rp499.997.421.000 (Rupiah penuh) atau merupakan 99% dari modal disetor dan ditempatkan.

• **PT NB**

Pada tahun 2013, PT NK mempunyai entitas anak yaitu PT NB yang didirikan berdasarkan Perjanjian Usaha Patungan antara PT NK dan Perusahaan No. 013/DIRUT/KTR/SEKPER/02/2013 dan PKS-01/PPA/0213 tanggal 1 Februari 2013, Keputusan Para Pemegang Saham PT NK No. SK-149/MBU/2013 dan KEP-PS 04/PPA/0213 tanggal 18 Februari 2013 tentang Pendirian Entitas Anak PT NK di bidang produksi beton pracetak. Akta Perseroan Terbatas PT NB tanggal 19 Februari 2013 dari Khairina S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-10206.AH.01.01 Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

Permodalan untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai oleh para pendiri, yaitu:

- PT NK sebanyak 510 juta saham atau seluruhnya Rp51.000.
- Perusahaan sebanyak 490 juta saham atau seluruhnya Rp49.000.

1. General (Continued)

• **PT PPAF**

Based on the letter of approval from the Minister of SOE's No. S-360/MBU/2009 dated May 27, 2009, the Company established PT PPAF, with share's ownership of 99.999%.

• **PT PPAK**

Based on the approval of the Minister of SOE's through letter No. S-372/MBU/2011 dated June 22, 2011, the Company established PT PPAK with share's ownership of 99.996%.

• **PT NK**

Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 69 Year 2012, the Company made an equity investment in PT NK for Rp499,997,421,000 (full amount) or 99% of the issued and paid up capital.

• **PT NB**

In 2013, PT NK has subsidiary, named PT NB that is established according to Joint Venture Agreement between PT NK and the Company No.013/DIRUT/KTR/SEKPER/02/2013 and PKS-01/PPA/0213, dated February 1, 2013, Shareholders Decisions of PT NK No. SK-149/MBU/2013 and KEP-PS 04/PPA/0213 dated February 18, 2013, regarding Establishment of Subsidiary of PT NK in precast concrete production sector. The Limited Company Deed of PT NB dated February 19, 2013 of Khairina, S.H., Notary in Jakarta which has approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia through The Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia Decision Number AHU-10206.AH.01.01 Year 2013 regarding Authorization of the Company's Legal Entity.

The first capital has been taken part and fully paid with cash by the founders, as follow:

- PT NK amounting to 510 million shares or totally Rp51,000.
- The Company amounting to 490 million shares or totally Rp49,000.

1. Umum (Lanjutan)

• **PT DMR**

Pada tahun 2015, PT PPAK mempunyai entitas anak yaitu PT DMR yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 3 tanggal 3 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, S.H., L.L.M, dengan maksud dan tujuan berusaha dalam bidang industri dan perdagangan. Untuk mencapai tujuan tersebut PT DMR dapat melakukan kegiatan industri kelapa sawit dan perdagangan ekspor dan impor.

Permodalan telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai yaitu:

- PT PPAK sebanyak 54 lembar saham atau seluruhnya Rp54.000.000 (Rupiah penuh).
- PT Koperasi Karyawan PPA sebanyak 1 lembar saham atau seluruhnya Rp1.000.000 (Rupiah penuh).

Berdasarkan Akta Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M. No. 15 pada tanggal 5 September 2016, Entitas Anak melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp66.000 dan peningkatan modal disetor menjadi Rp33.055 yang dilakukan melalui konversi hutang dari Entitas Induk. Akta ini telah disetujui oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor. AHU-0016192.AH.01.02 Tahun 2016 Tanggal 7 September 2016. Sehingga susunan pemegang saham Entitas Anak per 31 Desember 2016 menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham/Shareholders	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Amount of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Pemilikan/ Ownership Percentage	Jumlah (Rp)/ Amount (Rp)
PT PPA Kapital	33,054	99.997%	33,054
Koperasi Karyawan PPA	1	0.003%	1
Jumlah/ Amount	33,055	100%	33,055

• **PT PPAi**

PT PPAK memiliki 99,99 % saham Entitas Anak pada 31 Desember 2016 di PT Pratama Persada Airborne ("PT PPAi").

Entitas anak ini dikonsolidasikan oleh Perusahaan sejak 31 Desember 2016. Akta ini telah disetujui oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor. AHU-0058316.AH.01.01 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016

1. General (Continued)

• **PT DMR**

In 2015, PT PPAK has subsidiary, named PT DMR that is established according to notary deed made by Mala Mukti, S.H., L.L.M No.3 dated February 3, 2014, with the intention and purpose to engage in industry and commerce. To achieve these objectives PT DMR may perform the palm oil industry, export, and import trade.

The capital has been issued and fully paid with cash, as follow:

- PT PPAK amounting to 54 shares or totally Rp54,000,000 (full amount).
- PT Koperasi Karyawan PPA amounting to 1 shares or totally Rp1,000,000 (full amount).

Based on Notarial Deed of Mala Mukti, S.H., LL.M. No. 15 dated September 5, 2016, the Subsidiary increased its authorized capital to Rp66,000 and increased the paid-up capital to Rp33,055 which was conducted through the conversion of debt of the Parent Entity. The deed was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0016192.AH.01.02 2016 dated September 7, 2016. Therefore the Subsidiary's shareholders structure as of December 31, 2016 is as follows:

• **PT PPAi**

PT PPAK has 99.99% shares on Subsidiary on December 31, 2016 in PT Pratama Persada Airborne ("PT PPAi").

This subsidiary is consolidated by the Company since December 31, 2016. The Deed is agreed by the Decree of Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in the Decree No. AHU-0058316.AH.01.01. Year 2016 dated December 30, 2016.

1. Umum (Lanjutan)

PT PPAi didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 39 tanggal 29 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Nurhasanah, S.H., MKn. tanggal 29 Desember 2016. PT PPAi dibentuk dengan maksud dan tujuan berusaha dalam bidang perdagangan dan jasa. Untuk mencapai tujuan tersebut PT PPAi menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum dan jasa survai udara dan pemetaan.

1. General (Continued)

PT PPAi was established by Deed of Establishment No. 39 dated December 29, 2016 under a Notary Nurhasanah, S.H., MKn. on December 29, 2016. PT PPAi is established with the intent and purpose to engage in trade and services. To achieve these objectives, PT PPAi carries on business in general trade and air survey and mapping services.

Pemegang Saham/Shareholders	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Amount of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Pemilikan/ Ownership Percentage	Jumlah (Rp)/ Amount (Rp)
PT PPA Kapital	9,009	90.00 %	9,009
Nugraha Indra Kusumah	992	9.91%	992
Modal Pesanan	9	0.09%	9
Jumlah/ Amount	10,001	100%	10,001

Perusahaan dan entitas anak selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Grup".

The Company and subsidiaries hereinafter collectively be referred as "the Group".

1.c. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. SK-38/MBU/2014 tanggal 21 Februari 2014, SK-112/MBU/2014 tanggal 22 Mei 2014, SK-244/MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014, SK-78/MBU/04/2016 tanggal 14 April 2016, SK-104/MBU/06/2017 tanggal 5 Juni 2017 dan SK-252/MBU/11/2017 tanggal 21 November 2017 susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

1.c. The Board of Commissioners, Directors and Employees

Based on the Minister of SOE's Decree as a General Meeting of Shareholders, No. SK-38/MBU/2014 dated February 21 2014, SK-112/MBU/2014 dated May 22 2014, SK-244/MBU/10/2014 dated October 17 2014, SK-78/MBU/04/2016 dated April 14 2016, SK-104/MBU/06/2017 dated June 5 2017 dan SK-252/MBU/11/2017 dated November 21 2017 the composition of Board of Commissioners and Directors as follows:

	2017	
Dewan Komisaris: Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris	Edy Putra Irawady Dedi Rudaedi Taufik Sukasah Tirta Hidayat	Board of Commissioners: President Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner
Direksi: Direktur Utama Direktur Direktur	Henry Sihotang Andi Saddawero Ajar Setiadi	Directors: President Director Director Director
	2016	
Dewan Komisaris: Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris	Edy Putra Irawady Dedi Rudaedi Taufik Sukasah Hendrika Nora Osloi	Board of Commissioners: President Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner
Direksi: Direktur Utama Direktur Direktur Direktur	Saiful Haq Manan Andi Saddawero Henry Sihotang Ajar Setiadi	Directors: President Director Director Director Director

1. Umum (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 jumlah karyawan Perusahaan masing-masing 183 dan 177 orang (tidak diaudit).

Jumlah remunerasi yang diterima oleh komisaris per 2017 sebesar Rp8.097 dan tahun 2016 sebesar Rp7.364, sedangkan jumlah remunerasi yang diterima dewan direksi tahun 2017 sebesar Rp19.824 dan tahun 2016 sebesar Rp18.563.

1. General (Continued)

As of December 31, 2017 and 2016 the numbers of employees of the Company, were 183 and 177 persons, respectively (unaudited).

The total of remuneration received by the board of commissioners for the year 2017 amounted to Rp8,097 and for 2016 amounted to Rp7,364 respectively, while remuneration received the board of directors for year 2017 amounted to Rp19,824 and for year 2016 amounted to Rp18,563.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan

2.a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI).

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

2. Significant Accounting Policies

2.a. Compliance with the Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements are prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI).

2.b. The Basis of Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements are been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian atas Standar Akuntansi Keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK yang diterbitkan oleh DSAK-IAI dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, yaitu:

- Amandemen PSAK No. 1 (Amandemen 2015): "Penyajian Laporan Keuangan"
- PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016): "Laporan Keuangan Interim"
- PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016): "Imbalan Kerja"
- PSAK No. 58 (Penyesuaian 2016): "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan"
- PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016): "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- ISAK No. 31: "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi"
- ISAK No. 32: "Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan"

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan diperiode berjalan atau tahun sebelumnya.

2.d. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 1.b.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

2. Significant Accounting Policies (Continued)

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

2.c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

The following are revisions, amendments and adjustments of standards and interpretations of standard issued by DSAK-IAI and effectively applied for the year starting on or after January 1, 2017, as follows:

- Amendment PSAK No. 1 (Amendment 2015): "Presentation of Financial Statements"
- PSAK No. 3 (Improvement 2016): "Interim Financial Statements"
- PSAK No. 24 (Improvement 2016): "Employee Benefits"
- PSAK No. 58 (Improvement 2016): "Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations"
- PSAK No. 60 (Improvement 2016): "Financial Instrument: Disclosure"
- ISAK No. 31: "Interpretation of the Scope of PSAK No. 13: Investment Property"
- ISAK No. 32: "Definition and Hierarchy of Financial Accounting Standards"

The Implementation of the standards above had no significant effect on the amounts reported for the current year or prior financial year.

2.d. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and subsidiaries as described in Note 1.b.

A subsidiary is an entity controlled by the Group, i.e. the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the *investee*).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang, secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**2. Significant Accounting Policies
(Continued)**

The existence and effect of substantive potential voting rights that the Group has the practical ability to exercise (i.e. substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls another entity.

The Group's financial statements incorporate the results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its subsidiaries are directly and indirectly controlled. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control of the acquired business, until that control ceases.

The Company prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows are eliminated in full on consolidation.

The Group attributes the profit and loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (i.e. transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusts the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

**2. Significant Accounting Policies
(Continued)**

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

- (a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- (b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);
- (c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- (d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- (e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
- (f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

If the Group loses control, the Group:

- (a) Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;*
- (b) Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);*
- (c) Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstances that result in the loss of control;*
- (d) Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;*
- (e) Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAKs, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary;*
- (f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.*

2.e. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Perusahaan dan seluruh entitas anak adalah Rupiah.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut:

2.e. Foreign Currency Transactions and Balances

In preparing financial statements, each of the entities within the Group record by using the currency of the primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The functional currency of the Company and all subsidiaries is Rupiah.

Transactions during the year in foreign currencies are recorded in Rupiah by applying to the foreign currency amount the spot exchange rate between Rupiah and the foreign currency at the date of transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, ie middle rate of Bank of Indonesia at December 31, 2017 and 2016 as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	
1 USD	13,548	13,436	1 USD

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

2.f. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau

**2. Significant Accounting Policies
(Continued)**

Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

2.f. Related Parties Transactions and Balances

A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

- a) *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
 - i. *has control or joint control over the reporting entity;*
 - ii. *has significant influence over the reporting entity; or*
 - iii. *is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- b) *An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:*
 - i. *The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);*
 - ii. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);*
 - iii. *Both entities are joint ventures of the same third party;*
 - iv. *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;*
 - v. *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;*
 - vi. *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a); or*

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

**2. Significant Accounting Policies
(Continued)**

- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

- vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).
- viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Government related entity can be an entity which is controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Government that representing as the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the SOE's Ministry as a shareholder's representative.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

2.g. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya.

2.g. Financial Instrument

Initial Recognition and Measurement

The Group recognizes a financial asset or a financial liability in the consolidated statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measure all financial assets and financial liabilities at its fair value.

Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

In the case of a financial asset or financial liability not measured at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability are classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

**2. Significant Accounting Policies
(Continued)**

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:

(i) **Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)**

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

(ii) **Pinjaman yang Diberikan dan Piutang**

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- (a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- (b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
- (c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Subsequent Measurement of Financial Assets

Subsequent measurement of financial assets depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial assets in one of the following four categories:

(i) **Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)**

Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

(ii) **Loans and Receivables**

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- (a) those that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;
- (b) those that upon initial recognition designated as available for sale; or
- (c) those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- (iii) **Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)**
Investasi HTM adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- (iv) **Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (AFS)**
Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**2. Significant Accounting Policies
(Continued)**

After initial recognition, loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method.

- (iii) **Held-to-Maturity (HTM) Investments**
HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Group has the positive intention and ability to hold to maturity.

After initial recognition, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method.

- (iv) **Available-for-Sale (AFS) Financial Assets**
AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available for sale on initial recognition or are not classified as (a) loans and receivable, (b) held-to-maturity investment, or (c) financial assets at fair value through profit or loss.

After initial recognition, AFS financial assets are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value is recognized on other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses, until the financial assets is derecognized. At that time, the cumulative gain losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

Investment in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are measured at cost.

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial liabilities into one of the following categories:

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

**2. Significant Accounting Policies
(Continued)**

- (i) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)
Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

- (ii) Liabilitas Keuangan Lainnya
Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokkan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut.

- (i) *Financial liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)*
Financial liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) are financial liabilities held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial liabilities is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit or loss.

- (ii) *Other Financial Liabilities*
Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at FVTPL are grouped in this category and are measured at amortized cost using the effective interest method.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

The Group derecognizes a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfers the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Group transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group derecognizes the financial asset and recognize separately as asset or liability any rights and obligation created or retained in the transfer.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- (a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- (b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- (c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- (d) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**2. Significant Accounting Policies
(Continued)**

If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset and has retained control, the Group continues to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group continues to recognize the financial asset.

The Group removes a financial liability from its statement of financial position when, and only when, it is extinguished, i.e. when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

Impairment of Financial Assets

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred, if and only if, there is an objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (loss event), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

The following are objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired:

- (a) Significant financial difficulty of the issuer or obligor;*
- (b) A breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments;*
- (c) It becoming probable that the borrower will be in enter bankruptcy or other financial reorganization;*
- (d) Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**2. Significant Accounting Policies
(Continued)**

For investment in equity instrument, a significant and prolonged decline in the fair value of the equity instrument below its cost is an objective evidence of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on loans and receivable or held-to-maturity investments carried at amortized cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate and recognized in profit or loss.

When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognized in other comprehensive income and there is objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial asset has not been derecognized. The amount of the cumulative loss that is reclassified is the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortisation) and current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan memper-
timbangkan seluruh persyaratan kontraktual
dalam instrumen keuangan tersebut, seperti
pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa
lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian
kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup
seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan
atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak
yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku
bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh
premium atau diskonto lain.

Reklasifikasi

Grup tidak mereklasifikasi derivatif dari diukur
pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif
tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak
mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari
diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal
instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh
Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba
rugi. Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan
yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika
aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan
penjualan atau pembelian kembali aset keuangan
tersebut dalam waktu dekat. Grup tidak
mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke
dalam nilai wajar melalui laba rugi setelah
pengakuan awal.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan
Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi
diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga
jatuh tempo, maka investasi tersebut
direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan
diukur kembali pada nilai wajar.

Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas
investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam
jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak
signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga
jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk
dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi
tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah
mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian
kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok
telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal
pembayaran atau telah diperoleh pelunasan
dipercepat atau terkait dengan kejadian tertentu
yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan
tidak dapat diantisipasi secara wajar.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**2. Significant Accounting Policies
(Continued)**

*When calculating the effective interest rate,
the Group estimates cash flows considering all
contractual terms of the financial instrument,
for example, prepayment, call and similar
option, but shall not consider future credit
losses. The calculation includes all fees and
points paid or received between parties to the
contract that are an integral part of the
effective interest rate, transaction costs, and
all other premiums or discounts.*

Reclassification

*The Group shall not reclassify a derivative out
of the fair value through profit or loss category
while it is held or issued and not reclassify any
financial instrument out of the fair value
through profit or loss category if upon initial
recognition was designated by the Group as at
fair value through profit or loss. The Group
may reclassify that financial asset out of the
fair value through profit or loss category if a
financial asset is no longer held for the
purpose of selling or repurchasing in the near
term. The Group shall not reclassify any
financial instrument into the fair value through
profit or loss category after initial recognition.*

*If, as a result of a change in Group's intention
or ability, it is no longer appropriate to classify
an investment as held to maturity, it shall be
reclassified as available for sale and
remeasured at fair value.*

*Whenever sales or reclassification of more
than an insignificant amount of held-to-
maturity investments, any remaining held-to-
maturity investments shall be reclassified as
available for sale, other than sales or
reclassification that are so close to maturity or
the financial asset's call date, occur after all
the financial asset's original principal has been
collected substantially through scheduled
payments or prepayments, or are attributable
to an isolated event that is beyond control,
non-recurring, and could not have been
reasonably anticipated.*

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

**2. Significant Accounting Policies
(Continued)**

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1)
- (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2)
- (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3)

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that will be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- (i) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1)*
- (ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2)*
- (iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3)*

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses observable market data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Perpindahan antara level hirarki wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN, Perusahaan dapat memiliki beberapa instrumen keuangan yang tidak mengacu atau berlaku di pasar dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal, seperti Pinjaman yang Diberikan, Pinjaman Dana Talangan, Talangan Biaya Pengelolaan Aset dan Surat Utang.

Pinjaman yang Diberikan

Dalam melaksanakan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN dengan skema pemberian pinjaman dana dari Perusahaan, maka pinjaman yang diberikan tersebut dicatat sebagai Piutang Perusahaan. Pinjaman yang Diberikan diakui pada saat pencairannya sebesar pokok pinjaman dan disajikan sebesar jumlah outstanding tagihan Perusahaan yang belum dilunasi dikurangi dengan Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman.

Pinjaman Dana Talangan

Perusahaan dapat memberikan pinjaman kepada pihak ketiga berupa dana talangan. Pemberian Pinjaman Dana Talangan ini diakui dan dicatat sebagai Piutang Perusahaan. Perlakuan pencatatan Pinjaman Dana Talangan sama dengan perlakuan atas Pinjaman yang Diberikan.

Talangan Biaya Pengelolaan Aset

Talangan Biaya Pengelolaan Aset diakui dan dicatat sebagai Piutang Perusahaan, terjadi antara lain apabila:

- Terdapat tagihan Perusahaan kepada Pemerintah cq Menteri Keuangan RI atas pembayaran biaya-biaya yang dilakukan oleh Perusahaan untuk keperluan aset Negara yang tidak diserahkan kepada Perusahaan dan/atau pembayaran biaya lainnya berdasarkan permintaan dari Kementerian Keuangan RI.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**2. Significant Accounting Policies
(Continued)**

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

In the framework of the implementation of restructuring and/or revitalization of SOEs, the Company may have some financial instruments that do not refer to or apply in the market and its fair value can not be measured reliably, such as Loans Receivable, Fund Advance Loans Receivable, Advances on Asset Management and Promissory Notes.

Loans Receivable

In implementing the Restructuring and/or Revitalization of SOEs with a scheme of lending funds from the Company, then the loans are recorded as accounts receivable of the Company. Loans Receivable is recognized at the time of drawdown of the loan principal and stated at the amount of outstanding bills of the Company which have not been paid deducted by the Allowance for Impairment of Loans.

Fund Advance Loans Receivable

The Company can provide loans to third parties in the form of fund advance. Fund Advance Loans Receivable is recognized and recorded as accounts receivable of the Company. The treatment of recording Fund Advance Loans Receivable is similar to the treatment of Loans Receivable.

Advances on Assets Management

Advances on Assets Management are recognized as a receivable of the Company, among other things, if:

- *There are bills of the Company to the Government of the Republic of Indonesia cq Minister of Finance ("MOF") for expense payments made by the Company for purposes of State's assets which are not managed to the Company and/or payment of other expenses by request from MOF.*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

- Perusahaan diminta oleh BUMN pemilik aset untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu atas biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka pengelolaan aset yang diserahkan kepada Perusahaan dan biaya tersebut adalah beban BUMN yang bersangkutan. Dalam hal ini, Perusahaan hanya memberikan talangan atas pembayaran biaya pengelolaan aset sedangkan transaksi dengan pihak ketiga dan dokumen pembayaran atas biaya tersebut (perjanjian pemberian jasa dan/atau kontrak dengan pihak ketiga, purchase order, tagihan, kwitansi, faktur) seluruhnya dapat atas nama BUMN yang bersangkutan.

Perusahaan mengakui nilai wajar instrumen keuangan tersebut di atas sesuai dengan harga transaksinya, yaitu nilai wajar pembayaran yang diserahkan atau diterima.

2.h. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

2.i. Anjak Piutang

Anjak piutang *with recourse* diakui sebagai tagihan anjak piutang sebesar nilai piutang yang diperoleh dan dinyatakan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, setelah dikurangi pendapatan anjak piutang ditangguhkan. Selisih antara tagihan anjak piutang dengan jumlah pembayaran kepada klien diakui sebagai pendapatan anjak piutang ditangguhkan dan diamortisasi selama periode kontrak menggunakan suku bunga efektif.

2.j. Aset Takberwujud

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat 10-20 tahun.

Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya, atas umur ekonomis 5-10% per tahun.

**2. Significant Accounting Policies
(Continued)**

- *The Company is requested by SOEs owner of assets to make advance payments for the expenses required in order to manage the transferred-assets given to the Company and these expenses are burden of SOEs' concerned. In this case, the Company only provides advances for the payment of asset management expenses, while transactions with third parties and all documents of the expenses payment (service delivery agreement and/or contract with third parties, purchase orders, invoices, receipts, invoices) could be on behalf of SOE's concerned.*

The Company recognizes the fair value of financial instruments mentioned above in accordance with the transaction price, i.e. the fair value given or received payment.

2.h. Cash and Cash Equivalent

Cash and cash equivalent are cash on hand, cash in bank (demand deposit) and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

2.i. Factoring

Factoring with recourse is recognized as the amount of receivables acquired and is stated at net realizable value, net of deferred income factoring. The difference between the factoring receivables and the amount of payments made to the client is recognized as deferred factoring income and will be amortized over the period of respective factoring agreements using the effective interest rate.

2.j. Intangible Assets

Intangible asset is measured on initial recognition at cost. After initial recognition, intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss. The useful life of intangible asset is assessed to be either finite or indefinite. Intangible assets are amortized by using straight line method based on estimated useful lives of 10-20 years.

Amortisation is calculated so as to write off the cost of the asset, less its estimated residual value, over its useful economic life 5-10% per annum

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

**2. Significant Accounting Policies
(Continued)**

2.k. Piutang Retensi

Piutang retensi merupakan piutang Grup kepada pemberi kerja yang akan dilunasi setelah penyelesaian kontrak atau pemenuhan kondisi yang ditentukan kontrak. Piutang retensi dicatat pada saat pemotongan sejumlah persentase tertentu dari setiap tagihan termin untuk ditahan oleh pemberi kerja sampai suatu kondisi setelah penyelesaian kontrak dipenuhi.

2.k. Retention Receivables

Retention receivable represents receivable from owner of the project which will be paid after completion of the contract or fulfillment of certain condition in the contract. Retention receivable is recorded when certain percentage deduction is applied in every account receivable's claim which retained by the owner of project up to certain condition after completion of the contract has been met.

2.l. Tagihan Bruto Kepada Pemberi Jasa

Tagihan bruto kepada pemberi jasa merupakan piutang Grup yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin.

2.l. Gross Amount due from Customers

Gross amount due from customers represents the Group receivable originated from construction contract in progress. Gross amount due from customers is presented as the net amount of costs incurred plus recognized profits, less the sum of recognized losses and progress billings.

Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan yang belum diterbitkan faktur karena perbedaan antara tanggal berita acara kemajuan (*progress*) fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Gross amount due from customers is recognized as revenue based on the percentage of completion method which is stated on the certificate of work completion, while the invoice is still unbilled due to the difference between the date of physical progress certificates and the submission of billing on the statement of financial position date.

2.m. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

2.m. Inventories

Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the weighted average method. Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

The amount of any write-down of inventories to net realizable value and all losses of inventories shall be recognized as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net realizable value, is recognized as a reduction in the amount of inventories recognised as an expense in the period in which the reversal occurs.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

2.n. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar dimuka adalah biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

2.o. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

Penentuan nilai wajar investasi didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan serta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**2. Significant Accounting Policies
(Continued)**

2.n. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are the costs which have been paid but will be charged in the future over the periods benefits using straight-line method.

2.o. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Investment property is recognized as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

After initial recognition, the Group decides to use fair value model and measure all of its investment property at fair value. A gain or loss arising from a change in the fair value of investment property is recognized in profit or loss for the period in which it arises.

The fair value of investment property is based on a valuation by an independent valuer who holds a recognised and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued.

Transfer to investment property is made when, and only when, there is a change in use, evidenced by end of owner-occupation and commencement of an operating lease to another party.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik dan dimulainya pengembangan untuk dijual.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

2.p. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

Kelompok	2017	2016	Group
Gedung	2-20	20-30	Buildings
Kendaraan Bermotor	2 - 8	2 - 8	Vehicles
Peralatan Proyek	2 - 8	2 - 8	Project Equipments
Peralatan Kantor	2 - 8	2 - 8	Office Equipments
Prasarana Umum	5	5	Public Facilities

**2. Significant Accounting Policies
(Continued)**

Transfer from investment property is made when, and only when, there is a change in use, evidenced by commencement of owner-occupation and commencement of development with a view to sale.

An investment property is derecognized on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

2.p. Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

After initial recognition, property, plant and equipment, except land, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Depreciation of property, plant and equipment starts when it is available for use and it is computed by using straight-line method based on the estimated useful lives of assets as follows:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Pada tahun 2017, PT NB melakukan perubahan masa manfaat umur ekonomis untuk aset tetap sesuai Keputusan Direksi Nomor: KEP-27/DIR/12/2017 tentang perubahan penetapan umur ekonomis dan nilai residu aset tetap.

Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset dalam Konstruksi" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

Grup memilih menggunakan model revaluasi untuk aset tanah yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal, yakni nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**2. Significant Accounting Policies
(Continued)**

On 2017, PT NB changes the useful life of building regarding to Board of Director Decree No: KEP-27/DIR/12/2017 regarding changes on property, plant and equipment useful life and residual value.

Lands are recognized at its cost and are not depreciated.

Self-constructed Property, Plant and Equipment are presented as part of the Property, Plant and Equipment under "Asset in Progress" and are stated at its cost. All costs, including borrowing costs, incurred in relation with the construction of these assets are capitalized as part of the cost of assets in construction. Cost of assets in construction shall exclude any internal profits, cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred.

The accumulated costs will be transferred to the respective Property, Plant and Equipment items at the time the asset is completed or ready for use and are depreciated since the operation.

The carrying amount of an item of Property, Plant and Equipment is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition (that determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized.

At the end of each reporting period, the Company made regular review of the useful lives, residual values, depreciation method and residual life based on the technical conditions.

The Group choose to use revaluation model for an item of Property, Plant and Equipment whose fair value can be measured reliably, being its fair value at the date of the revaluation less any subsequent accumulated impairment losses.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.

Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.

Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

2.q. Aset Lain-lain

Persediaan properti berupa tanah dan bangunan dicatat berdasarkan nilai perolehan yaitu beban-beban yang dikeluarkan serta beban bunga yang menjadi beban atas kredit yang digunakan dalam kegiatan tersebut.

2.r. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Grup menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

**2. Significant Accounting Policies
(Continued)**

If asset's carrying amount is increased as a result of a revaluation, the increase is recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus. However, the increase is recognized in profit or loss to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognized in profit or loss.

If asset's carrying amount is decreased as a result of a revaluation, the decrease is recognized in profit or loss. However, the decrease is recognized in other comprehensive income to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset. The decrease recognized in other comprehensive income reduces the amount accumulated in equity under the heading of revaluation surplus.

Revaluation is made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair value at the end of the reporting period.

2.q. Other Assets

Property inventory in form of land and building are recorded based on the acquisition cost that are incurred and interest expenses that are used for such activities.

2.r. Impairment of Non Financial Assets

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group shall estimate the recoverable amount of the asset. Recoverable amount is determined for an individual asset, if it is not possible, the Group determines the recoverable amount of the asset's cash-generating unit.

The recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and its value in use. Value in use is the present value of the estimated future cash flows of the asset or cash generating unit. Present values are computed using pre-tax discount rates that reflect the time value of money and the risks specific to the asset or unit whose impairment is being measured.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

2.s. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian sewa atau suatu perjanjian yang mengandung sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya pada tanggal awal sewa.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Grup sebagai Lessor

Grup mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan. Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto Grup sebagai lessor dalam sewa pembiayaan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**2. Significant Accounting Policies
(Continued)**

If, and only if, the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset shall be reduced to its recoverable amount. The reduction is an impairment loss and is recognized immediately in profit or loss.

An impairment loss which is recognized in prior period for an asset other than goodwill is reversed if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If this is the case, the carrying amount of the asset shall be increased to its recoverable amount. That increase is a reversal of an impairment loss.

2.s. Lease

The determination of whether a lease agreement or an agreement containing with a lease is a finance lease or an operating lease depends on the substance of transaction rather than the form of the contract at the inception date of lease.

A lease is classified as finance leases if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership. A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

Group as Lessor

Group recognizes assets under a finance lease as a receivable in the statement of financial position at an amount equal to the net investment in the lease. Collection of lease receivable is treated as principal payments and finance income. The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on Group's net investment in the finance lease as lessor.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Grup menyajikan aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan dalam jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontingen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

2.t. Pengaturan Bersama

Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai ventura bersama.

Ventura bersama merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai venturer bersama.

Ventura bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas.

2.u. Utang Bruto kepada Pihak Ketiga

Utang bruto kepada pihak ketiga merupakan utang prestasi kerja sub kontraktor yang belum diberita-acarakan, baik dari sub kontraktor atau material yang diakui sebagai prestasi karena belum memenuhi syarat pembayaran sesuai kontrak.

Utang bruto pihak ketiga disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba atau dikurangi rugi yang diakui.

**2. Significant Accounting Policies
(Continued)**

Group presents assets subject to operating leases in the statement of financial position according to the nature of the asset. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized as an expense over the lease term on the same basis as the lease income. Contingent rents, if any, be recognized as income in the period incurred. Lease income from operating leases is recognized as revenue on a straight-line basis over the lease term.

2.t. Joint Arrangement

Joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control, i.e. the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exist only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

The Group classifies joint arrangement as joint venture

Joint venture represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers.

A joint venturer recognizes its interest in a joint venture as an investment and account for that investment using the equity method.

2.u. Gross Amount Due to Third Parties

Gross amount due to third parties represents uncertificated subcontractor working progress, either from subcontractor or materials which are recognized as progress since it has not fulfilled the certain payment condition as stated in the contract.

Gross amount due to the third parties is presented as the differences between costs occurred added by gain or deducted by realized loss.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

**2. Significant Accounting Policies
(Continued)**

2.v. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur dengan handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran pertama, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

Pendapatan Pengelolaan Aset

Pendapatan pengelolaan aset diakui pada periode terjadinya yang terdiri dari:

- Pendapatan Pengelolaan Aset eks BPPN berupa imbalan pengelolaan aset, imbalan kinerja dan pendapatan yang berkaitan dengan biaya pengelolaan aset yang dapat diperoleh kembali.
- Pendapatan Pengelolaan Aset BUMN berupa jasa pengelolaan rutin dan jasa keberhasilan.

Pendapatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi

Pendapatan kegiatan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN berupa pendapatan bunga pinjaman dan pendapatan jasa restrukturisasi dan/atau revitalisasi diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

Jasa Konstruksi

Pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian). Persentase penyelesaian konstruksi ditetapkan berdasarkan survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Jika kemungkinan besar terjadi bahwa total biaya kontrak akan melebihi total pendapatan kontrak, maka taksiran rugi segera diakui sebagai beban.

Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal.

2.v. Revenues and Expenses Recognition

Revenue is recognized when it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the amount of revenue can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and Value Added Tax (VAT)

The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized:

Revenue from Asset Management

Revenue of Asset Management is recognized in the period when it is occurred consist of:

- *Revenue from Asset Management ex-IBRA assets which is made up of asset management fees, success fees and revenues related with reimbursable costs.*
- *Revenue from Asset Management SOEs' assets which are routine management fees and success fees.*

Revenue from Restructuring and/or Revitalization

Revenues of SOEs' restructuring and/or revitalization which comprise loan interest income and income from restructuring and/or revitalization are recognized as incurred on an accrual basis

Construction Services

Contract revenue and contract costs associated with the construction contract is recognized as revenue and expenses respectively by reference to the stage of completion of the contract activity at the end of the reporting period (percentage of completion method). Construction percentage of completion is determined based on survey of work performed.

When it is probable that total contract costs will exceed total contract revenue, the expected loss shall be recognized as an expense immediately.

Contract revenue comprised of the initial amount of revenue agreed in the contract and variations in contract work, claims, and incentive payments to the extent that is probable that it will results in revenue and it is capable of being reliably measured.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Biaya kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak, biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum dan dapat dialokasikan pada kontrak, dan biaya lain yang secara spesifik dapat ditagihkan ke pelanggan sesuai isi kontrak.

Pendapatan Sewa

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Uang muka sewa yang diterima dari penyewa dicatat ke dalam akun pendapatan diterima di muka dan akan diakui sebagai pendapatan secara berkala sesuai dengan kontrak sewa yang berlaku.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga diakui berdasarkan periode waktu terjadinya dengan tingkat bunga yang sesuai atau suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari transaksi sewa pembiayaan diakui apabila kemungkinan besar Entitas Anak akan memperoleh manfaat ekonomis sehubungan dengan transaksi tersebut dan jumlah pendapatan dapat diukur secara handal.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (dengan dasar akrual).

2.w. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan atau selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

**2. Significant Accounting Policies
(Continued)**

Contract cost comprised of costs that relate directly to the specific contract, costs that are attributable to contract activity in general and can be allocated to the contract, and such other costs as are specifically chargeable to the customer under the terms of the contract.

Rental Revenue

Rental revenue from operating leases are recognized as revenue on a straight line basis over the lease term. Initial direct costs incurred in negotiating and rental arrangements are added to the carrying amount of the leased asset and recognized on a straight-line basis over the lease term.

Advances received from rental are recorded in unearned revenue account and will be recognized as revenue on a regular basis over the rental periods.

Interest Income

Interest income is recognized based on timely basis, with an appropriate interest rate or the effective interest rate.

Interest income from finance leases is recognized when it is probable the Subsidiaries will obtain economic benefits related with these transactions and the revenues could be measured reliably.

Expenses

Expenses are recognized as incurred (on an accrual basis).

2.w. Borrowing Cost

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, are capitalized as part of the cost of that asset. Other borrowing costs are recognized as an expense when incurred. Borrowing costs may include interest expense, finance charges in respect of finance leases, or exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

**2. Significant Accounting Policies
(Continued)**

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Grup telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.

Capitalization of borrowing costs commences when the Group undertakes activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale and expenditures for the asset and its borrowing costs has been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sale are complete.

2.x. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

2.x. Income Taxes

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax are recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan

2. Significant Accounting Policies (Continued)

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

- a) the initial recognition of goodwill; or*
- b) the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a) the Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

**2. Significant Accounting Policies
(Continued)**

- b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
- entitas kena pajak yang sama; atau
 - entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

- memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

- b) the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:

- the same taxable entity; or
- different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

The Group offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

- has legally enforceable right to set off the recognized amounts; and
- intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.

2.y. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("UU 13/2003").

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

2.y. Employee Benefits

Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short-term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Post-employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 ("Law 13/2003").

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the *Projected Unit Credit* method. Present value benefit obligation determine by discounting the benefit.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Grup mengakui jumlah beban dan liabilitas atas iuran terutang kepada program iuran pasti, ketika pekerja telah memberikan jasa kepada entitas selama suatu periode.

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- a) Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- b) Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK No. 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

2.z. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari aset dan liabilitas, dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

2. Significant Accounting Policies (Continued)

The Group account not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

Group recognizes an expense and a liability for contribution payable to a defined contribution plan, when an employee has rendered service to the entity during a period.

Termination Benefits

The Group recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:

- (a) When the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and*
- b) When the Group recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK No. 57 and involves payment of termination benefits.*

The Group measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

2.z. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgements

The preparation of consolidated financial statements requires management to make judgement estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, disclosures of contingent assets and liabilities at the date of the consolidated financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next reporting period.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan dibawah ini.

Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting
Estimasi Umur Manfaat

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material oleh perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat peralatan berdasarkan faktor-faktor seperti perubahan teknologi dan potensi keuntungan yang diperoleh dari penggunaan peralatan tersebut. Kondisi ini dapat menyebabkan Perusahaan dan entitas anak melakukan penurunan maupun penghapusan aset tetap apabila peralatan tersebut sudah usang seiring dengan perkembangan teknologi. Jumlah tercatat aset tetap dan aset takberwujud disajikan pada Catatan 21 dan 14.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("UU 13/2003").

**2. Significant Accounting Policies
(Continued)**

The main assumption of the future and the other major source of estimation uncertainty at the end of the reporting period that have a significant risk of material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities for the year, disclosed below.

Group bases its estimates on assumptions and parameters that are available at the time the financial statements are prepared. And assumptions about the future development of the situation, may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Company. The changes are reflected in the related assumptions at the time of the occurrence.

Accounting Estimates and Assumptions
Estimated Useful Lives

Group intangible assets based on factors such as the condition of technical and technological developments in the future. Future operating results will be materially affected by the estimation changes caused by changes in factors mentioned above.

Group performs periodic review over the useful life of the equipment based on factors such as changes in technology and the potential benefits arising from the use of such equipment. This condition can cause a decrease or elimination of the The Company and subsidiaries property, plant and equipment if the equipment is obsolete due to technological developments The carrying amount of Property, Plant and Equipment and intangible assets are disclosed in Notes 21 and 14.

Post-Employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 ("Law 13/2003").

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup yang memiliki pengaruh lebih dari 10% kewajiban imbalan pasti, ditangguhkan dan diamortisasi secara garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktuari dan perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 29.

Nilai Wajar Properti Investasi dan Aset Tetap Tanah

Nilai wajar properti investasi dan tanah bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, tingkat inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan dan biaya Grup. Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material nilai wajar dari properti investasi. Jumlah tercatat properti investasi disajikan pada Catatan 17.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**2. Significant Accounting Policies
(Continued)**

The determination of Group's post-employment benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from PT NK assumptions which effects are more than 10% of the defined benefit obligations are deferred and being amortized on a straight-line basis over the expected average remaining service years of the qualified employees.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

Management believe that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its employee benefits liabilities and net employee benefits expense. Detailed information has been disclosed on Note 29.

Fair Value of Investment Property and Land

The Group's fair value of investment property and land depends on its selection of certain assumptions used by the independent appraisal in calculation of such amounts. Those assumptions include among others, discount rate, inflation rate and revenue and cost increase rate. The Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate and significant differences in the Group's assumptions may materially affect the valuation of its investment property. The carrying amount has been disclosed on Note 17.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha

Grup mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha.

Pertimbangan dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

2.aa.Laba Per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusi, Grup menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrument berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar masing-masing sebesar 2.996.688 lembar untuk periode 31 Desember 2017 dan 2016.

2. Significant Accounting Policies (Continued)

Allowance for Impairment Losses on Accounts Receivable

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment losses on trade receivables

Judgement in Applying the Accounting Policies

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Classification of Financial Assets and Liabilities

Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with Group's accounting policies.

2.aa.Earnings Per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

For the purpose of calculating diluted earnings per share, the Group shall adjust profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, and the weighted average number of shares outstanding, for the effect of all dilutive potential ordinary shares. The numbers of weighted average shares outstanding are 2,996,688 shares as of December 31, 2017 and 2016 respectively.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

3. Kas dan Setara Kas

3. Cash and Cash Equivalents

	2017 Rp	2016 Rp	
Kas	1,501	1,003	Cash on Hand
Bank			Cash in Banks
Pihak Berelasi			Related Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	122,792	109,097	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	43,188	16,304	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4,337	3,259	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1,617	793	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	58	526	Other (each below Rp 1,000)
Dolar Amerika Serikat			US Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	55	--	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	19	--	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah Pihak Berelasi	172,066	129,979	Total Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	15,010	--	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	9,483	49	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan	1,098	--	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan
PT Bank Bukopin Tbk	337	2,354	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	47	3,164	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	1,260	3,364	Other (each below Rp 1,000)
Jumlah Bank - Pihak Ketiga	27,235	8,930	Total Banks - Third Parties
Jumlah Bank	199,301	138,909	Total Cash in Banks
Deposito Berjangka			Time Deposits
Pihak Berelasi			Related Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	361,660	204,635	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	355,000	52,000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	137,101	540,249	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4,000	10,000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah Pihak Berelasi	857,761	806,884	Total Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	226,000	108,140	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	144,521	108,969	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT Bank Panin Tbk	125,000	4,554	PT Bank Panin Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	67,172	125,157	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	52,900	--	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Shinhan Bank Indonesia	20,000	--	Shinhan Bank Indonesia
PT Bank CIMB Niaga Tbk	--	174,836	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Victoria International Tbk	--	45,000	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank Victoria Syariah	--	15,800	PT Bank Victoria Syariah
PT Bank Mega Tbk	--	5,000	PT Bank Mega Tbk
Jumlah Pihak Ketiga	635,593	587,456	Total Third Parties
Jumlah Deposito Berjangka	1,493,354	1,394,340	Total Time Deposits
Jumlah Kas dan Setara Kas	1,694,156	1,534,252	Total Cash and Cash Equivalents
Tingkat Suku Bunga Kontraktual Deposito per Tahun	6.50% - 8%	6.50% - 9.5%	Interest Rate on Time Contractual Deposit per Annum
Tingkat Nisbah Bagi Hasil (setara tingkat suku bunga)	--	10%	Profit Sharing Rate (equivalent interest rate)
Jangka Waktu	1 - 3 bulan/months	1 - 3 bulan/months	Maturity Period

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

4. Pinjaman Investasi Jangka Pendek

4. Short-term Investment Loans

	2017 Rp	2016 Rp
Pinjaman Investasi Jangka Pendek - Pokok Pinjaman		
Pihak Berelasi		
PT Artha Bangun Pratama	10,333	10,564
PT Berdikari (Persero)	4	2,993
PT Pertani (Persero)	--	1,763
Pihak Berelasi	10,337	15,320
Pihak Ketiga		
PT Polyrama Propindo	165,500	10,100
PT Carpediem Mandiri	39,000	--
PT Polowijo Gosari	37,920	--
PT KNE Global Persada	16,830	16,830
PT SIG Asia	14,525	--
PT Duta Cipta Pakar Perkasa	13,042	--
PT Energy Management Indonesia	3,350	--
PT Kelsri	3,006	7,000
Jumlah Pihak Ketiga	293,173	33,930
Jumlah Pinjaman Investasi Jangka Pendek - Pokok Pinjaman	303,510	49,250
Pinjaman Investasi yang Diberikan - Bunga Pinjaman		
Pihak Berelasi		
PT Artha Bangun Pratama	90	85
PT Pertani (Persero)	--	84
Pihak Berelasi	90	169
Pihak Ketiga		
PT Carpediem Mandiri	2,620	--
PT Polowijo Gosari	2,019	--
PT Polyrama Propindo	663	10
PT KNE Global Persada	642	216
PT Kelsri	39	96
PT National Utility Helicopters	3	--
Jumlah Pinjaman Investasi yang Diberikan - Bunga Pinjaman	5,986	322
Penyisihan Penurunan Nilai Bunga Pinjaman		
PT KNE Global Persada	(642)	--
Jumlah Penyisihan Penurunan Nilai Bunga Pinjaman	(642)	--
Pinjaman Investasi yang Diberikan - Bunga Pinjaman - Bersih	5,434	491
Jumlah Pinjaman Investasi yang Diberikan	308,944	49,741

**Short Term Investment Loans- Principal
Related Parties**

PT Artha Bangun Pratama
PT Berdikari (Persero)
PT Pertani (Persero)
Total Related Parties

Third Parties

PT Polyrama Propindo
PT Carpediem Mandiri
PT Polowijo Gosari
PT KNE Global Persada
PT SIG Asia
PT Duta Cipta Pakar Perkasa
PT Energy Management Indonesia
PT Kelsri

Total Third Parties

Total Short Term Investment Loans- Principal

**Short Term Investment Loans- Interest
Related Parties**

PT Artha Bangun Pratama
PT Pertani (Persero)
Total Related Parties

Third Parties

PT Carpediem Mandiri
PT Polowijo Gosari
PT Polyrama Propindo
PT KNE Global Persada
PT Kelsri
PT National Utility Helicopters

Total Short Term Investment Loan- Interest

Allowance for Impairment Short Term Investment - Interest

PT KNE Global Persada
Total Allowance for Impairment Short Term Investment-Interest

Short Term Investment Loans- Interest - Net

Total Short Term Investment Loans

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

4. Pinjaman Investasi Jangka Pendek (Lanjutan)

a. PT Polytama Propindo

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No PP-22/PPA/1216 tanggal 22 Desember 2016, Perusahaan memberikan Fasilitas Pinjaman Modal Kerja Jangka Pendek kepada PT Polytama Propindo dengan total jumlah pokok maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp100.000 dengan jangka waktu pinjaman adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pinjaman yaitu tanggal 22 Desember 2016. Bunga kredit sebesar 10% pertahun (tidak termasuk pajak) dan biaya provisi sebesar 0,5% dari fasilitas pinjaman, yang dibayarkan pada setiap tanggal efektif ditandatanganinya perjanjian pinjaman tersebut. Fasilitas Pinjaman ini digunakan sebagai sarana untuk pembiayaan modal kerja operasional PT Polytama Propindo.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No PP-22/PPA/1216 tanggal 22 Desember 2016, Perusahaan memberikan Fasilitas Pinjaman Modal Kerja Jangka Pendek kepada PT Polytama Propindo dengan total jumlah pokok maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp100.000 dengan jangka waktu pinjaman adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pinjaman yaitu tanggal 22 Desember 2016. Bunga kredit sebesar 10% pertahun (tidak termasuk pajak) dan biaya provisi sebesar 0,5% dari fasilitas pinjaman, yang dibayarkan pada setiap tanggal efektif ditandatanganinya perjanjian pinjaman tersebut. Dengan ketentuan PT Polytama wajib melakukan pelunasan atas pencairan selambatnya 3 bulan terhitung sejak penarikan, jika PT Polytama tidak melakukan pelunasan, maka dana atas plafond pinjaman yang belum digunakan tidak dapat dicairkan. Fasilitas Pinjaman ini digunakan sebagai sarana untuk pembiayaan modal kerja operasional PT Polytama Propindo. Pada tanggal 28 Agustus 2017 berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. PP-15/PPA/0817 dan Perjanjian Pinjaman PP-16/PPA/0817, Perusahaan menambah plafond Fasilitas Pinjaman Modal Kerja Jangka Pendek dan Pinjaman Investasi sebesar Rp80.000 yang jatuh tempo pada 27 Agustus 2018 dan Rp20.000 yang jatuh tempo pada 27 Agustus 2020 dengan bunga kredit sebesar 12% per tahun.

4. Short-term Investment Loans (Continued)

a. PT Polytama Propindo

Based on the Loan Agreement No. PP-22 / PPA / 1216 dated December 22, 2016, the Company provides Short Term Loan of Working Capital Facility to PT Polytama Propindo with total amount of principal maximum of Rp100,000 with the maturity period of 12 (twelve) months starting from the date of signing the Loan Agreement which is dated December 22, 2016. Loan interest is 10% per year (excluding taxes) and the fee provision amounting to 0,5% of the loan facility which is paid on effective date. Loan facility is used to finance operational working capital PT Polytama Propindo.

Based on the Loan Agreement No. PP-22 / PPA / 1216 dated December 22, 2016, the Company provides Short Term Loan of Working Capital Facility to PT Polytama Propindo with a maximum total amount of principal of Rp100,000 and maturity period of 12 (twelve) months starting from the signing date of the Loan Agreement on December 22, 2016. Loan interest is 10% per year (excluding taxes) and provision fee is 0,5% from the loan facility, which are paid on the agreement signing date. This agreement has provision that PT Polytama is obligated to settle the disbursement at least 3 months from the withdrawal date. If PT Polytama does not settle, then the funds of the unused loan plafond cannot be disbursed. Loan facility is used to finance operational working capital of PT Polytama. On August 28, 2017, based on Loan Agreement No. PP-15/PPA/0817 and Loan Agreement No. PP-16/PPA/0817, the Company agreed to add the plafond for Short Term Loan of Working Capital Facility and Loan Investment, by Rp80,000 which will due on August 27, 2018 and by Rp20,000 which will due on August 27, 2020 with interest rate 12% per annum.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

4. Pinjaman Investasi Jangka Pendek (Lanjutan)

Saldo pada awal tahun 2017 sebesar Rp10.100. Total pencairan pinjaman di tahun 2017 sebesar Rp536.700. Penerimaan atas pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp371.200. Saldo pada 31 Desember 2017 sebesar Rp165.500.

b. PT Carpediem Mandiri

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No 145 tanggal 22 September 2017, Perusahaan memberikan Fasilitas Pinjaman (*Project Financing*) kepada PT Carpediem Mandiri dengan total jumlah pokok maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp39.000. Bunga kredit sebesar 10% pertahun dengan jangka waktu pinjaman adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian.

Total pencairan pinjaman di tahun 2017 sebesar Rp39.000. Penerimaan atas pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2017 sebesar Rp39.000.

c. PT Polowijo Gosari

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No PP-9/PPA/0517 tanggal 29 Mei 2017, Perusahaan memberikan Fasilitas Pinjaman kepada PT Polowijo Gosari berupa pembiayaan kontrak pengadaan pupuk majemuk dan pupuk berbasis dolomit dengan total jumlah pokok maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp50.000. Bunga kredit sebesar 10% pertahun dengan jangka waktu pinjaman adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian.

Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2017 sebesar Rp48.355. Penerimaan atas pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp10.435. Saldo pada 31 Desember 2017 sebesar Rp37.920.

d. PT KNE Global Persada

Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 173 dan Akta Pengalihan Piutang No. 174 tanggal 31 Agustus 2016 Notaris di Semarang Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., transaksi yang dilakukan Perusahaan yaitu pengambilalihan piutang (cessie) PT KNE Global Persada ("KNE") dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan harga beli piutang yang disepakati sebesar Rp16.830. Selama tahun 2017, KNE telah beroperasi secara komersial.

4. Short-term Investment Loans (Continued)

Beginning balance of the year 2017 is amounting to Rp10,100. Total disbursement of loans in 2017 amounting to Rp536,700. Receipt of loan payment in the current year amounting to Rp371,200. Balance at December 31, 2017 amounting to Rp165,500.

b. PT Carpediem Mandiri

Based on the Loan Agreement No. 145 dated September 22, 2017, the Company provides Loan Facility (Project Financing) to PT Carpediem Mandiri with total amount principal maximum of Rp39,000. Loan interest is 10% with the maturity period of 12 (twelve) starting from the date of signing the Loan Agreement.

Total disbursement of loans in 2017 amounting to Rp39,000. Receipt of loan payment in the current year amounting to Nil. Balance at December 31, 2017 amounting to Rp39,000.

c. PT Polowijo Gosari

Based on the Loan Agreement No PP-9/PPA/0517 dated May 29, 2017, the Company provides Loan Facility (Project Finance) to PT Polowijo Gosari to financing of procurement contract of compound and dolomit fertilizer project with total amount of principal maximum of Rp50,000. Loan Credit interest is 10% with the maturity period of 12 (twelve) months starting from the date of signing the agreement.

Total disbursement of loans in 2017 amounting to Rp48,355. Receipt of loan payment in the current year amounting to Rp10,435. Balance at December 31, 2017 amounting to Rp37,920.

d. PT KNE Global Persada

Based on Notary Deed of Sale and Purchase Agreement of Receivables No. 173 and Notary Deed Transfer of Receivables No. 174 dated August 31, 2016 Notary in Semarang Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., transactions made by the Company are factoring (cessie) of PT KNE Global Persada ("KNE") from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with the agreed purchase price receivable amounted to Rp16,830. During 2017, KNE has operate commercially.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

4. Pinjaman Investasi Jangka Pendek (Lanjutan)

Restrukturisasi pinjaman (eks PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) diperlukan untuk memberikan kelonggaran yang cukup bagi KNE untuk melaksanakan rencana bisnisnya dan kembali mendapatkan kepercayaan dari perbankan, dengan salah satu kondisi antara lain bahwa pembangunan fisik atas fasilitas produksi telah selesai dan telah dilakukan trial production

Saldo awal tahun 2017 sebesar sebesar Rp16.830. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2017 sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2017 sebesar Rp16.830.

e. PT SIG Asia

Pada tanggal 9 Februari 2017 telah ditandatangani Perjanjian Nomor PP-05/PPA/0217 antara Perusahaan dan PT SIG Asia berupa pembiayaan kebutuhan modal kerja operasional untuk produksi, pengolahan dan perdagangan hasil olahan tuna dengan saldo maksimum pinjaman senilai Rp15.000. Bunga kredit sebesar 10.5% pertahun dengan jangka waktu pinjaman adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian.

Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2017 sebesar Rp15.000. Penerimaan atas pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar sebesar Rp477. Saldo pada 31 Desember 2017 sebesar Rp14.523.

f. PT Duta Cipta Pakar Perkasa

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No 73 tanggal 10 November 2017, Perusahaan memberikan Fasilitas Pinjaman Modal Kerja kepada PT Duta Cipta Pakar Perkasa dengan total jumlah pokok maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp81.000. Bunga kredit sebesar 16% pertahun dengan jangka waktu pinjaman adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian

Saldo awal tahun 2017 sebesar Nihil. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2017 sebesar Rp13.042. Penerimaan atas pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2017 sebesar Rp13.042.

4. Short-term Investment Loans (Continued)

Restructuring of loans (ex PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) is required to provide sufficient leeway for KNE to implement its business plan and regain the confidence from the banks, with one of the conditions i.e. the physical construction of the production facility should have been completed and trial production has been carried out.

Beginning balance of the year 2017 is amounting to Rp16,830. Total disbursement of loans in 2017 amounting to Nil. Receipt of loan payment in 2017 amounting to Nil. Balance at December 31, 2017 amounting to Rp16,830

d. PT SIG Asia

On February 9, 2017 there was signed an Agreement No. PP-05 / PPA / 0217 between the Company and PT SIG Asia to financing the operational working capital requirements for production, processing and trade of processed tuna with maximum loan balance amounting to Rp15,000. Loan interest is 10.5% with the maturity period of 12 (twelve) months starting from the date of signing the loan agreement.

Total disbursement of loans in 2017 amounting to Rp15,000. Receipt of loan payment in 2017 amounting to Rp477. Balance at December 31, 2017 amounting to Rp14,523.

e. PT Duta Cipta Pakar Perkasa

Based on the Loan Agreement No 73 dated November 10, 2017, the Company provides Loan Facility Working Capital to PT Duta Cipta Pakar Perkasa with total amount of principal maximum of Rp81,000. Credit interest is 16% with the maturity period of 12 (twelve) months starting from the date of signing the Loan Agreement.

Beginning balance of the year 2017 is Nil. Total disbursement of loans in 2017 amounting to Rp13,042. Receipt of loan payment in the current year amounting to Nil. Balance at December 31, 2017 amounting to Rp13,042.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

4. Pinjaman Investasi Jangka Pendek (Lanjutan)

g. PT Artha Bangun Pratama

Perusahaan memberikan pinjaman kepada PT Artha Bangun Pratama berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman No.PP-06/PPA/1214 tanggal 15 Desember 2014. Pada tanggal 8 September 2015 dilakukan perubahan perjanjian dengan No.PP-06/PPA/0915. Perusahaan memberikan fasilitas pinjaman modal kerja jangka pendek dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp15.949. Pada tanggal 14 Desember 2015 dilakukan perubahan perjanjian secara menyeluruh dengan nomor perjanjian No.PP-22/PPA/1215.

Kemudian pada tanggal 7 September 2016 dilakukan addendum atas Perubahan Perjanjian Pemberian Pinjaman Jangka Pendek dengan No.PP-17/PPA/0916. Pada tanggal 14 Desember 2016 dilakukan lagi addendum II atas Perubahan Perjanjian Pemberian Pinjaman Jangka Pendek dengan No.PP-21/PPA/1216. Hingga saat ini PT Artha Bangun Pratama masih memiliki sisa pinjaman sebesar Rp10.564 dengan tingkat suku bunga 15% per tahun (tidak termasuk pajak) dan biaya provisi sebesar 0,25% dari total jumlah maksimum pinjaman yang diberikan.

Berdasarkan perjanjian No-PP/19/PPA/1116 tanggal 3 November 2016, PT Artha Bangun Pratama mendapat fasilitas pinjaman baru sebesar Rp1.112 dengan tingkat suku bunga 15% per tahun (tidak termasuk pajak) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Total pencairan fasilitas pinjaman baru sebesar Rp485. Pemberian pinjaman bertujuan untuk pembayaran biaya jasa konsultan pembuatan studi kelayakan rencana pengembangan aset PT Artha Bangun Pratama dan menetapkan *Owner Estimate* serta untuk mendapatkan mitra strategis terbaik.

Saldo pada awal tahun 2017 sebesar Rp10.564. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2017 sebesar Rp2.573. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp2.804. Saldo pada 31 Desember 2017 sebesar Rp10.333.

4. Short-term Investment Loans (Continued)

f. PT Artha Bangun Pratama

The Company provided loans to PT Artha Bangun Pratama based on Loan Agreement No.PP-06/PPA/1214 on December 15, 2014. On September 8, 2015 The Company amended the agreement with No.PP-06/PPA/0915. The Company provided working capital loan facility with a maximum amount of short-term loan facility amounting to Rp15,949. On December 14, 2015, the Company amended the agreement through Agreement Number No.PP-22/PPA/1215.

Then on September 7, 2016, an addendum was made to Changes in Short Term Loan Agreement No.PP-17/PPA/0916. On December 14, 2016, addendum II was made on Changes in Short Term Loan Agreement No.PP-21/PPA/1216. Until now, PT Artha Bangun Pratama still has outstanding loans amounting to Rp10,564 with an interest rate of 15% per year (excluding tax) and the fee provision amounting to 0.25% of the maximum total principal amount.

Based on Agreement No-PP / 19 / PPA / 1116 dated November 3, 2016, PT Artha Bangun Pratama got a new credit facility amounted to Rp1,112 with rate of 15% per year (tax excluded) with period of 12 (twelve) months. Total disbursement of new loan facility is Rp485. The loan lending is aimed to pay consulting service fees for feasibility study of PT Artha Bangun Pratama asset development and establish Owner Estimate as well as to get the best strategic partner.

Beginning balance of the year 2017 is amounting to Rp10,564. Total disbursement of loans in 2017 amounting to Rp2,573. Receipt of loan payment in the current year amounting to Rp2,804. Balance at December 31, 2017 amounting to Rp10,333.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

4. Pinjaman Investasi Jangka Pendek (Lanjutan)

h. PT Energy Management Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No 46 tanggal 29 September 2017, Perusahaan memberikan Fasilitas Pinjaman Modal Kerja kepada PT Energy Management Indonesia dengan total jumlah pokok maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp5.000, dengan jangka waktu pinjaman adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian.

Saldo pada awal tahun 2017 sebesar Nihil. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2017 sebesar Rp3.350. Penerimaan atas pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2017 sebesar Rp3.350.

i. PT Kelsri

Pada tanggal 24 November 2016 Perusahaan menyetujui pemberian pinjaman *Project Financing* dengan menandatangani Akta No. 96 (Perjanjian Pemberian Pinjaman Proyek *Financing – Non Revolving* kepada PT Kelsri) dan selanjutnya pada tanggal 29 November 2016 dilakukan addendum perjanjian dengan penandatanganan Akta No.117, dengan fasilitas pokok pinjaman maksimum Rp28.000. Bunga kredit sebesar 15% per tahun memiliki jangka waktu 90 hari.

Saldo pada awal tahun 2017 sebesar Rp7.000. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2017 sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp3.994. Saldo pada 31 Desember 2017 sebesar Rp3.006.

j. PT Berdikari (Persero)

Pada tanggal 18 Agustus 2016 telah ditandatangan Perjanjian Nomor PP-15/PPA/0816 antara Perusahaan dan PT Berdikari (Persero) ("Berdikari") yang merupakan Addendum keempat dari Perjanjian Pemberian Pinjaman Jangka Pendek No. 5/PPA/0615 yang sebelumnya ditandatangan pada tanggal 16 Juni 2015, dan telah jatuh tempo pada tanggal 2 Juli 2016.

4. Short-term Investment Loans (Continued)

g. PT Energy Management Indonesia

Based on the Loan Agreement No 46 dated September 29, 2017, the Company provides Loan Facility Working Capital to PT Energy Management Indonesia with total amount of principal maximum of Rp5,000, with the maturity period of 12 (twelve) months starting from the date of signing the Loan Agreement.

Beginning balance of the year 2017 is amounting to Nil. Balance of disbursement in 2017 amounting to Rp3,350. Receipt of loan payment in the current year amounting to Nil. Balance at December 31, 2017 amounting to Rp3,350.

h. PT Kelsri

On November 24, 2016, the Company approved lending of Project Financing by signing the Deed No. 96 (Project Financing Loan Agreement - Non Revolving to PT Kelsri) and later, on November 29, 2016, performed the amended agreement with the signing of Deed No. 117, with maximum of principal amount of Rp28,000. The credit interest is 15% per year with 90 days term.

Beginning balance of the year 2017 is amounting to Rp7,000. Balance of disbursement in 2017 is Nil. Receipt of loan payment in the current year amounting to Rp3,994. Balance at December 31, 2017 amounting to Rp3,006.

i. PT Berdikari (Persero)

On August 18, 2016 Treaty No. PP-15 / PPA / 0816 between the Company and PT Berdikari (Persero) ("Berdikari") was signed, which is the fourth addendum of the Short Term Loans Agreement No. 5/PPA/0615 which previously was signed on June 16, 2015, and matured on July 2, 2016.

4. Pinjaman Investasi Jangka Pendek (Lanjutan)

Dengan perpanjangan tersebut, maka jangka waktu pinjaman akan jatuh tempo pada tanggal 2 Juli 2017. Perusahaan memberikan pinjaman jangka pendek kepada Berdikari dengan jumlah maksimum pokok pinjaman sebesar Rp40.000 dan bersifat revolving dengan tingkat suku bunga telah disesuaikan dari 16,5% menjadi 14,5% per tahun. Sampai dengan Desember 2017, masih ada outstanding pokok pinjaman sebesar Rp4, yang merupakan biaya asuransi yang timbul atas resiko kehilangan, sakit dan kematian sapi hidup. Berdasarkan perjanjian kerjasama No. PKS-03/PPA/0317, biaya asuransi akan diperhitungkan sebagai bagian dari dana investasi PPA

Saldo pada awal tahun 2017 sebesar Rp2.993. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2017 sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp2.989. Saldo pada 31 Desember 2017 sebesar Rp4.

k. PT Pertani (Persero)

Pada tanggal 28 April 2016 telah dilakukan Addendum dan Pernyataan kembali atas Perjanjian Pinjaman Jangka Pendek atas No PP-09/PPA/1115 tanggal 10 November 2015 Notaris Muhamat Hatta, S.H., di Jakarta. Pinjaman yang diberikan yaitu dalam bentuk modal kerja proyek benih terkontrak. Jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp85.000, dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sejak tanggal addendum perjanjian terakhir yang ditandatangani pada tanggal 28 April 2016. Bunga kredit sebesar 13,75% per tahun (tidak termasuk pajak) dan biaya provisi sebesar 0,5% dari fasilitas pinjaman.

Saldo pada awal tahun 2017 sebesar Rp1.763. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2017 sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp1.763. Saldo pada 31 Desember 2017 sebesar Nihil.

4. Short-term Investment Loans (Continued)

With such extension, the term of the loan will mature on July 2, 2017. The Company provides short-term loans to Berdikari with a maximum principal amounting to Rp40,000 and a revolving with the interest rate adjusted from 16.5% to 14.5% per year. Until December 2017, there is still outstanding of principle amounting to Rp4, which is the cost of insurance arising from the risk of loss, illness and death of the cow. Based on Agreement No. PKS-03/PPA/0317, insurance costs will be calculated as part of PPA Investment Funds

Beginning balance of the year 2017 is amounting to Rp2,993. Balance of disbursement in 2017 amounting to Nil. Receipt of loan payment in the current year amounting to Rp2,989. Balance at December 31, 2017 amounting to Rp4.

j. PT Pertani (Persero)

On April 28, 2016, Addendum and Restatement was made to Short Term Loan Agreement No. PP-09/PPA/1115 dated November 10, 2015 with Notary Muhamat Hatta, S.H., in Jakarta. The loan provided is in form of working capital for seed projects contracted. The maximum principal amount is Rp85,000, with a maturity period of 12 months from the last addendum date which was signed on April 28, 2016. The loan interest is to 13.75% per year (excluding taxes) and provision fee amounted to 0.5% from loan facility.

Beginning balance of the year 2017 is amounting to Rp1,763. Total of disbursement in 2017 is Nil. Receipt of loan payment in the current year amounting to Rp1,763. Balance at December 31, 2017 amounting to Nil.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

5. Aset Keuangan Diperdagangkan

5. Held for Trading Financial Assets

	2017 Rp	2016 Rp	
Aset Keuangan Diperdagangkan:			Financial Assets Held for Trading:
Pihak Berelasi			Related Parties
Secured Promissory Notes PT Boma Bisma Indra (Persero)	67,829	67,829	Secured Promissory Notes PT Boma Bisma Indra (Persero)
Secured Promissory Notes PT Survai Udara Penas (Persero)	58,230	58,230	Secured Promissory Notes PT Survai Udara Penas (Persero)
(Penurunan Nilai Secured Promissory Notes			Impairment Secured Promissory Notes
PT Survai Udara Penas (Persero)	(58,230)	(58,230)	PT Survai Udara Penas (Persero)
Secured Promissory Notes PT Istaka Karya (Persero)	2,431	10,500	Secured Promissory Notes PT Istaka Karya (Persero)
Saham	10,661	12,025	Shares
Jumlah Pihak Berelasi	80,921	90,354	Total Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties
Saham	2,314	5,536	Shares
Jumlah Pihak Ketiga	2,314	5,536	Total Third parties
Jumlah	83,235	95,890	Total

Pada tanggal 31 Desember 2017, nilai aset keuangan diperdagangkan untuk saham sebesar Rp12.975 dengan rincian sebagai berikut:

On December 31, 2017, the carrying value of held for trading financial assets in shares securities amounting to Rp12,975 as follow:

	2017 (Nilai Penuh/ Full Amount)			2016 (Nilai Penuh/ Full Amount)			
	Harga/ Price Rp	Persediaan lembar Saham/ Stock	Nilai Wajar/ Fair Value Rp	Harga/ Price Rp	Persediaan lembar Saham/ Stock	Nilai Wajar/ Fair Value Rp	
Jenis Saham							Shares
Pihak Berelasi							Related Parties
PT Waskita Beton Precast Tbk	406	9,705,000	3,940,230,000	550	10,105,000	5,557,750,000	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	4,430	400,000	1,772,000,000	3,970	75,000	297,750,000	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT PP (Persero) Tbk	2,620	650,000	1,703,000,000	--	--	--	PT PP (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1,550	925,000	1,433,750,000	2,360	300,000	708,000,000	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	2,200	514,200	1,131,240,000	2,540	264,220	671,118,800	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7,975	50,000	398,750,000	--	--	--	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Aneka Tambang Persero Tbk	620	75,000	46,500,000	--	--	--	PT Aneka Tambang Persero Tbk
PT Adhi Karya Persero Tbk	1,880	125,000	235,000,000	--	--	--	PT Adhi Karya Persero Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	9,900	100	990,000	9,150	306,112	2,800,924,800	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	--	--	--	4,310	304,100	1,310,671,000	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT PP (Persero) Tbk	--	--	--	3,790	150,000	568,500,000	PT PP (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	--	--	5,500	20,000	110,000,000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah Pihak Berelasi			10,661,460,000			12,024,714,600	Total Related Parties
Pihak Ketiga							Third Parties
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	1,355	875,000	1,185,625,000	--	--	--	PT PP London Sumatera Indonesia Tbk
PT Astra International Tbk	8,275	50,000	413,750,000	--	--	--	PT Astra International Tbk
PT United Tractors Tbk	35,000	8,400	294,000,000	--	--	--	PT United Tractors Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	1,685	140,000	235,900,000	--	--	--	PT Kalbe Farma Tbk
PT Bukit Asam Tbk	2,450	75,000	183,750,000	--	--	--	PT Bukit Asam Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1,140	28	31,920	--	--	--	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Indocement Tunggul Perkasa Tbk	--	--	--	15,375	185,000	2,844,375,000	PT Indocement Tunggul Perkasa Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	--	--	--	7,900	150,000	1,185,000,000	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Adaro Energy Tbk	--	--	--	2,070	400,000	828,000,000	PT Adaro Energy Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	--	--	--	38,800	17,500	679,000,000	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	--	--	--	735	28	20,580	PT Bank Pan Indonesia Tbk
Jumlah Pihak Ketiga			2,313,056,920			5,536,395,580	Total Third Parties
Nilai Tercatat (dalam Rupiah Penuh)			12,974,516,920			17,561,110,180	Carrying Value (in Full Amount)
Nilai Tercatat (dalam Jutaan Rupiah)			12,975			17,561	Carrying Value (in Million of Rupiah)

a. PT Boma Bisma Indra (Persero)

Pada tanggal 28 Desember 2012, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT Boma Bisma Indra (Persero) (PT BBI) Sertifikat SPN III sebesar Rp31.810 dengan tingkat suku bunga 12% dan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2014 dan tidak diperpanjang. PT BBI tidak sanggup membayar SPN tersebut sehingga pembayaran akan dilakukan dengan penjualan aset yang dimiliki oleh PT BBI.

a. PT Boma Bisma Indra (Persero)

On December 28, 2012, the Company signed an Agreement of SPN Issuance with PT Boma Bisma Indra (Persero) (PT BBI) SPN Certificate III amounting to Rp31,810, with interest rate of 12% per annum and mature on January 31, 2014 and was not extended. PT BBI was unable to pay the SPN so that payments will be made by the sale of asset PT BBI.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

5. Aset Keuangan Diperdagangkan (Lanjutan)

Pada tanggal 7 Februari dan 15 April 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT BBI Sertifikat SPN V dan VI, masing-masing sebesar Rp2.519, Rp3.005, dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 8 Februari dan 8 Juli 2014. PT BBI tidak sanggup membayar SPN tersebut sehingga pembayaran akan dilakukan dengan penjualan aset yang dimiliki oleh PT BBI.

Pada tanggal 2 dan 28 September 2013, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT BBI Sertifikat SPN IV, masing-masing sebesar Rp7.194 dan Rp1.469, dengan tingkat suku bunga 12% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2014 dan tidak diperpanjang. PT BBI tidak sanggup membayar SPN tersebut sehingga pembayaran akan dilakukan dengan penjualan aset yang dimiliki oleh PT BBI.

Pada tanggal 11, 24 Oktober, 15 November, 2, 13 dan 20 Desember 2013 Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT BBI Sertifikat SPN V, masing-masing sebesar Rp3.170, Rp5.056, Rp814, Rp2.607, Rp4.187 dan Rp1.233 dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 8 Februari 2015. Belum ada pembayaran sampai dengan penerbitan laporan keuangan.

Pada tanggal 11, 24 Oktober, 15 November, 2, 13 dan 20 Desember 2013 Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT BBI Sertifikat SPN VI, masing-masing sebesar Rp903, Rp1.895, Rp3.003, Rp1.237, Rp786 dan Rp259 dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 8 Juni 2014 dan tidak diperpanjang. Pada tanggal 30 April 2014, PT BBI telah melakukan pelunasan SPN VI sebesar Rp3.318. PT BBI tidak sanggup membayar SPN tersebut sehingga pembayaran akan dilakukan dengan penjualan aset yang dimiliki oleh PT BBI.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pendahuluan No. PJ-02/PPA/1215 dengan PT BBI yang merupakan dasar atas pelaksanaan utang PT BBI kepada Perusahaan. Perjanjian pendahuluan ini merupakan bentuk komitmen dari PT BBI untuk melakukan restrukturisasi utang kepada Perusahaan dan menjalankan serta merealisasikan hasil kesepakatan antara pihak.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**5. Held for Trading Financial Assets
(Continued)**

On February 7 and April 15, 2014, the Company signed an Agreement of SPN issuance with PT BBI SPN Certificate V and VI amounting to Rp2,519, Rp3,005, respectively, with interest rate of 14% per annum and mature on February 8 and July 8, 2014 and was not extended. PT BBI was unable to pay the SPN so that payments will be made by the sale of asset PT BBI.

On September 2 and 28, 2013, the Company signed an Agreement of SPN Issuance with PT BBI SPN Certificate IV amounting to Rp7,194 and Rp1,469 respectively, with interest rate of 12% per annum and mature on January 31, 2014 and was not extended. PT BBI was unable to pay the SPN so that payments will be made by the sale of asset PT BBI.

On October 11, 24, November 15, December 2, 13 and 20, 2013, the Company signed an Agreement of SPN Issuance with PT BBI SPN Certificate V amounting to Rp3,170, Rp5,056, Rp814, Rp2,607, Rp4,187 and Rp1,233, respectively, with interest rate of 14% per annum and mature on February 8, 2015. There is no payment until the issuance of the financial statement.

On October 11, 24, on November 15, on December 2, 13 and 20, 2013, the Company signed an an Agreement of SPN Issuance with PT BBI SPN Certificate VI, amounting to Rp903, Rp1,895, Rp3,003, Rp1,237, Rp786 and Rp259, respectively, with interest rate of 14% per annum and mature on June 8, 2014 was not extended. On April 30, 2014, PT BBI has paid the SPN VI amounting to Rp3,318. PT BBI was unable to pay the SPN so that payments will be made by the sale of asset PT BBI's assets.

On December 31, 2015, the Company signed a Preliminary Agreement No. PJ-02/PPA/1215 with PT BBI which is the basis for the implementation of PT BBI's debt to The Company. This preliminary agreement acts as commitment from PT BBI to The Company to restructure its payable implement and realize the agreement result of both parties.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

5. Aset Keuangan Diperdagangkan (Lanjutan)

Pada tanggal 5 Oktober 2017, PT PPA dan PT BBI telah mendiskusikan skema penyelesaian SPN ke PT PPA dengan opsi *Debt to Equity Swap* ("DES") dan penyampaian Rencana Bisnis PT BBI (RJPP) yang sudah mengakomodir pelaksanaan DES tersebut. Pada tanggal 1 November 2017, dilakukan pertemuan antara PT PPA dengan PT BBI terkait pembahasan proyeksi keuangan sebagai bentuk tindak lanjut penyelesaian SPN melalui pelaksanaan *Debt Equity Swap* (DES). Dalam pertemuan tersebut, PT BBI menyampaikan bahwa secara umum Kementerian BUMN dapat menerima usulan penyelesaian SPN PT BBI dengan skema DES, dan meminta agar PT BBI bersama PT PPA dapat secepatnya menyusun dan melaporkan kajian terkait dengan DES tersebut.

Pada bulan Desember 2017, telah dilakukan pembahasan terkait penyusunan kajian/bahan presentasi untuk Kementerian BUMN terkait dengan pelaksanaan DES. Perusahaan sudah menyampaikan Draft kajian tersebut ke PT BBI untuk dapat dilengkapi. Namun, masih perlu dilakukan pembahasan strategi usaha dan proyeksi keuangan terutama dampak DES terhadap kinerja keuangan PT BBI.

b. PT Survai Udara Penas (Persero)

Pada tanggal 29 November 2012, 28 Februari dan 3 April 2013 Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT Survai Udara Penas (Persero) (PT Penas) Sertifikat PN I, masing-masing sebesar Rp5.000, Rp4.340 dan Rp15.038 dengan tingkat suku bunga 12% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 22 November 2014. PT Penas sedang dalam proses akuisisi menjadi anak perusahaan sehingga Perusahaan belum melakukan pengambilan aset PT Penas.

Pada tanggal 20 September dan 23 Desember 2013 Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT Penas Sertifikat PN II, masing-masing sebesar Rp23.856 dan Rp1.759 dengan tingkat suku bunga 12% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 22 November 2014. PT Penas sedang dalam proses akuisisi menjadi anak perusahaan sehingga Perusahaan belum melakukan pengambilan aset PT Penas.

**5. Held for Trading Financial Assets
(Continued)**

On October 5, 2017, PT PPA and PT BBI have discussed the SPN settlement scheme to PPA with *Debt to Equity Swap* ("DES") option and submission of Business Plan of PT BBI (RJPP) which is already accommodate DES implementation. On November 1, 2017 the meeting has been held between PT PPA and PT BBI to discussed financial projection as a form of follow up SPN settlement through the implementation of *Debt Equity Swap* (DES). In the meeting, PT BBI convey that Ministry of BUMN can accept the proposed of SPN settlement PT BBI with DES scheme, and request that PT BBI along with PT PPA can compile and report immediately the study related to DES.

On December 2017, the discussion about preparation of study and presentation materials for Ministry of SOE related to DES implementation has been held. The Company has submitted the draft to PT BBI for completion. However, the discussion of business strategy and financial projection, especially the impact of DES on the financial performance of PT BBI still need to be performed.

b. PT Survai Udara Penas (Persero)

On November 29, 2012, February 28 and April 3, 2013, The Company signed an Agreement of SPN issuance with PT Survai Udara Penas (Persero) (PT Penas) PN I Certificate, amounting to Rp5,000, Rp4,340 and Rp15,038, respectively, with interest rate of 12% per annum and mature on November 22, 2014. PT Penas is in the process of acquisition became a subsidiary in which the Company has not made decision to PT Penas asset.

On September 20 and December 23, 2013, The Company signed an Agreement of SPN with PT Survai Udara Penas (Persero) (PT Penas) PN II Certificate, amounting to Rp23,856 and Rp1,759, respectively, with interest rate of 12% per annum and mature on November 22, 2014. PT Penas is in the process of acquisition became a subsidiary in which the Company has not made decision to the PT Penas asset

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

5. Aset Keuangan Diperdagangkan (Lanjutan)

Pada tanggal 30 Januari, 14 April, 5 dan 28 Mei 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT Survai Udara Penas (Persero) (PT Penas) Sertifikat SPN I dan II, masing-masing sebesar Rp622, Rp1.992, Rp944 dan Rp677, dengan tingkat suku bunga 12% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 22 November 2014. PT Penas sedang dalam proses akuisisi menjadi anak Perusahaan sehingga Perusahaan belum melakukan pengambilan aset PT Penas.

Pada tanggal 20 Agustus 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT Survai Udara Penas (Persero) (PT Penas) Sertifikat PN Seri A sebesar Rp3.168 dengan tingkat suku bunga 12% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 19 Agustus 2016.

c. PT Istaka Karya (Persero)

Pada tanggal 30 September 2013 dan 23 Desember 2013 Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN I dan II dengan PT Istaka Karya (Persero) (PT Istaka Karya) Sertifikat SPN, masing-masing sebesar Rp13.500 dan Rp3.000 dengan tingkat suku bunga 12% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2015 dan 23 Juni 2015.

Pada tanggal 31 Juli 2014, 31 Agustus 2014, 30 September 2014, 31 Oktober 2014, 30 Nopember 2014 dan 31 Desember 2014, PT Istaka Karya telah melakukan pelunasan SPN I dan II sebesar Rp14.375.

Pada tanggal 22 Januari 2015, 20 Februari 2015, 25 Maret 2015 dan 26 April 2015, PT Istaka Karya telah melakukan pelunasan SPN II sebesar Rp538, Rp643, Rp581 dan Rp363.

Pada tanggal 9 April 2015, 12 Mei 2015 dan 30 Juni 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT Istaka Karya (Persero) Sertifikat SPN I masing-masing sebesar Rp3.000, Rp6.000 dan Rp1.500 dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2017.

Pada tanggal 9 April 2015 dan 12 Mei 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN II dengan PT Istaka Karya (Persero) Sertifikat SPN II masing-masing sebesar Rp750 dan Rp1.500 dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2017.

**5. Held for Trading Financial Assets
(Continued)**

On January 30, April 14, May 5 and 28, 2014, The Company signed an Agreement of SPN issuance with PT Survai Udara Penas (Persero) (PT Penas) SPN Certificate I and II amounting to Rp622, Rp1,992, Rp944 and Rp677 respectively, with interest rate of 12% per annum and mature on November 22, 2014. PT Penas is in the process of acquisition became a subsidiary in which the Company has not made decision to asset PT Penas.

On August 20, 2015, the Company signed an Agreement of SPN issuance with PT Survai Udara Penas (Persero) (PT Penas) SPN Series A amounting to Rp3,168, with interest rate of 12% per annum and mature on August 19, 2016.

c. PT Istaka Karya (Persero)

On September 30 and December 23, 2013, The Company signed an Agreement of SPN I and II issuance with PT Istaka Karya (Persero) (PT Istaka Karya) SPN certificate, amounting to Rp13,500 and Rp3,000, respectively with interest rate of 12% per annum and mature on March 30, 2015 and June 23, 2015.

On July 31, 2014, August 31, 2014, September 30, 2014, October 31, 2014, November 30, 2014 and December 31, 2014, PT Istaka Karya has paid the SPN I and II amounting to Rp14,375.

On January 22, 2015, February 20, 2015, March 25, 2015 and April 26, 2015, PT Istaka Karya has paid the SPN II amounting to Rp538, Rp643, Rp581 and Rp363, respectively.

On April 9, 2015, May 12, 2015 and June 30, 2015, the Company signed an Agreement of SPN issuance with PT Istaka Karya (Persero) (PT Istaka Karya) SPN I certificate, amounting to Rp3,000, Rp6,000 and Rp1,500, respectively, with interest rate of 14% per annum and mature on March 24, 2017.

On April 9, 2015 and May 12, 2015 the Company signed an Agreement of SPN II issuance with PT Istaka Karya (Persero) SPN II certificate, amounting to Rp750 and Rp1,500, respectively, with interest rate of 14% per annum and mature on March 24, 2017.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

5. Aset Keuangan Diperdagangkan (Lanjutan)

Pada tanggal 9 April 2015 dan 12 Mei 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN III dengan PT Istaka Karya (Persero) Sertifikat SPN III masing-masing sebesar Rp750 dan Rp1.500 dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2017.

Pada tanggal 9 April 2015, 30 Juni 2015 dan 28 Agustus 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN IV dengan PT Istaka Karya (Persero) Sertifikat SPN IV masing-masing sebesar Rp2.200, Rp3.000 dan Rp500 dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2017.

Pada tanggal 28 Agustus 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN V dengan PT Istaka Karya (Persero) Sertifikat SPN V sebesar Rp5.000 dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2017.

Pada tanggal 2 September 2015, PT Istaka Karya melakukan penarikan SPN V sebesar Rp10.000.

Pada tanggal 15 September 2015, PT Istaka Karya melakukan penarikan SPN II sebesar Rp750 dan 15 Oktober 2015, PT Istaka Karya telah melakukan pelunasan SPN II sebesar Rp500.

Pada tanggal 18 September 2015, 29 September 2015, 9 Oktober 2015, 13 November 2015, 23 Oktober 2015, PT Istaka Karya melakukan penarikan SPN VI masing-masing sebesar Rp3.000, Rp1.500, Rp1.500, Rp1.500, Rp2.500. Sedangkan pada tanggal 30 November 2015, 21 Desember 2015, dan 31 Desember 2015 PT Istaka Karya telah melakukan pelunasan SPN VI masing-masing sebesar Rp2.000, Rp6.000 dan Rp 2.000.

Pada tanggal 15 September 2015, PT Istaka Karya melakukan penarikan SPN III sebesar Rp750 dan 15 Oktober 2015, PT Istaka Karya telah melakukan pelunasan SPN III sebesar Rp500.

Pada tanggal 25 September 2015, 15 Oktober 2015 dan 19 November 2015, PT Istaka Karya telah melakukan pelunasan SPN I masing-masing sebesar Rp1.000, Rp1.000 dan Rp1.000.

**5. Held for Trading Financial Assets
(Continued)**

On April 9, 2015 and May 12, 2015, the Company signed an Agreement of SPN III issuance with PT Istaka Karya (Persero) SPN III certificate, amounting to Rp750, Rp1,500, respectively, with interest rate of 14% per annum and mature on March 24, 2017.

On April 9, 2015, June 30, 2015 and August 28, 2015, the Company signed an Agreement of SPN IV issuance with PT Istaka Karya (Persero) SPN IV certificate, amounting to Rp2,200, Rp3,000 and Rp500, respectively, with interest rate of 14% per annum and mature on March 24, 2017.

On August 28, 2015, the Company signed an Agreement of SPN V issuance with PT Istaka Karya (Persero) SPN V certificate, amounting to Rp5,000 with interest rate of 14% per annum and mature on March 24, 2017.

On September 2, 2015, PT Istaka Karya has withdrawn the SPN V amounting to Rp10,000.

On September 15, 2015, PT Istaka Karya has withdrawn the SPN II amounting to Rp750 and on October 15, 2015 has paid the SPN II amounting to Rp500.

On September 18, 2015, September 29, 2015, October 9, 2015, November 13, 2015, October 23, 2015, PT Istaka Karya has withdrawn the SPN VI amounting to Rp3,000, Rp1,500, Rp1,500, Rp1,500, Rp2,500, respectively. While on November 30, 2015, December 21, 2015, and December 31, 2015 PT Istaka Karya has paid the SPN VI amounting to Rp2,000, Rp6,000 and Rp2,000, respectively.

On September 15, 2015, PT Istaka Karya has withdrawn the SPN III amounting to Rp750 and on October 15, 2015 PT Istaka Karya has paid the SPN III amounting to Rp500.

On September 25, 2015, October 15, 2015 and November 19, 2015, PT Istaka Karya has paid the SPN I amounting to Rp1,000, Rp1,000 and Rp1,000, respectively.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

5. Aset Keuangan Diperdagangkan (Lanjutan)

Pada tanggal 30 September 2015, PT Istaka Karya telah melakukan penarikan SPN VII sebesar Rp3.200, dan pada tanggal 29 Desember 2015, PT Istaka Karya melakukan pelunasan SPN VII sebesar Rp3.200.

Pada tanggal 8 Oktober 2015, 4 Desember 2015 PT Istaka Karya telah melakukan penarikan SPN VIII sebesar Rp5.000 dan Rp6.000.

Pada tanggal 7 Desember 2015, PT Istaka Karya telah melakukan pelunasan SPN IV sebesar Rp1.000.

Pada tahun 2016, PT Istaka Karya melakukan pembayaran SPN sebesar Rp32.700.

Pada tahun 2017, PT Istaka karya melakukan pembayaran SPN sebesar Rp8,069 Saldo pada 31 Desember 2017 sebesar Rp2,431.

**5. Held for Trading Financial Assets
(Continued)**

On September 30, 2015, PT Istaka Karya has withdrawn SPN VII amounting to Rp3,200 and on September 29, 2015, PT Istaka Karya has paid SPN VII amounting to Rp3,200

On October 8, 2015, December 4, 2015, PT Istaka Karya has withdrawn SPN VIII amounting to Rp5,000 and Rp6,000.

On December 7, 2015, PT Istaka Karya has paid SPN IV amounting to Rp1,000

In 2016, PT Istaka Karya has paid the SPN amounting to Rp32,700.

In 2017, PT Istaka Karya has paid the SPN amounting to Rp8,069. Balance at December 31, 2017 amounting to Rp2,431.

6. Piutang Usaha

6. Accounts Receivable

	2017 Rp	2016 Rp	
<u>Pihak Berelasi</u>			<u>Related Parties</u>
Piutang Jasa Konstruksi	193,558	152,774	Construction Services Receivable
Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih	60,861	77,584	Financial Lease Receivables - Net
Piutang Bunga dan Monitoring	31,546	15,020	Monitoring and Interest Receivables
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih	17,131	19,627	Consumer Finance Receivables - Net
Talangan Biaya Pengelolaan Aset Beban Debitur	7,495	5,470	Asset Management Fee Bailouts
Piutang Hasil Investasi Surat Berharga	7,325	16,077	Investment Income on Securities Receivables
Piutang Advisory	6,109	4,893	Advisory Receivable
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	34,598	4,354	Others (belows Rp 1,000 each)
Jumlah Pihak Berelasi	358,623	295,799	Total Related Parties
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(16,939)	(10,673)	Less: Allowance for Impairment Losses
Jumlah Pihak Berelasi - Bersih	341,684	285,126	Total Related Parties - Net
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih	533,758	414,228	Financial Lease Receivables - Net
Piutang Jasa Konstruksi	239,802	271,889	Construction Services Receivables
Tagihan Anjak Piutang - Bersih	157,022	77,086	Factoring Receivables - Net
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih	10,486	8,661	Consumer Finance Receivables - Net
Bunga Deposito Berjangka	2,076	3,567	Interest on Time Deposits
Jumlah Pihak Ketiga	943,144	775,431	Total Third Parties
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(63,662)	(52,448)	Less: Allowance for Impairment Losses
Jumlah Pihak Ketiga - Bersih	879,482	722,983	Total Third Parties - Net
Jumlah - Bersih	1,221,166	1,008,109	Total - Net

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

6. Piutang Usaha (Lanjutan)

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

	2017 Rp	2016 Rp
Saldo Awal Tahun	(63,121)	(59,142)
Penambahan di Tahun Berjalan	(19,952)	(3,979)
Pemulihan / Penghapusan di Tahun Berjalan	2,472	--
Saldo Akhir Tahun	(80,601)	(63,121)

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai di atas adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang.

6. Accounts Receivables (Continued)

The movements in allowance for impairment losses of receivables are as follows:

Balance at Beginning of The Year
Addition in Current Year
Recovery / Write off in Current Year
Balance at Ending of The Year

7. Piutang Retensi

Merupakan piutang retensi PT NK dengan rincian sebagai berikut:

	2017 Rp	2016 Rp
Pihak Berelasi	90,323	51,003
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(2,563)	(2,563)
Jumlah Pihak Berelasi - Bersih	87,760	48,440
Pihak Ketiga	145,892	102,410
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(16,686)	(12,327)
Jumlah Pihak Ketiga - Bersih	129,206	90,083
Jumlah - Bersih	216,966	138,523

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

	2017 Rp	2016 Rp
Saldo Awal Tahun	(14,889)	(12,405)
Penambahan di Tahun Berjalan	(5,487)	(2,485)
Pemulihan di Tahun Berjalan	1,127	--
Saldo Akhir Tahun	(19,249)	(14,890)

Jumlah piutang retensi berdasarkan umur (hari) sebagai berikut:

	2017 Rp	2016 Rp
< 12 Bulan	181,812	136,674
> 12 - 24 Bulan	39,158	1,849
> 24 Bulan	15,245	14,890
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(19,249)	(14,890)
Jumlah - Bersih	216,966	138,523

7. Retention Receivables

Represents the retention receivables to PT NK with the following details:

Related Parties
Less: Allowance for Impairment of Losses
Total Related Parties - Net

Third Parties
Less: Allowance for Impairment of Losses
Total Third Parties - Net
Total - Net

The movements in allowance for impairment losses of receivables are as follows:

Total retention receivables by aging (day) are as follows:

< 12 Bulan
> 12 - 24 Bulan
> 24 Bulan
Allowance for Impairment Losses of Receivables
Total - Net

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

7. Piutang Retensi (Lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai di atas adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang.

7. Retention Receivables (Continued)

Management believes that the above allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that may arise from uncollectible receivable.

8. Piutang Ventura Bersama Konstruksi

8. Construction Joint Venture Receivables

	2017 Rp	2016 Rp	
Nindya - Sejahtera	31,614	29,374	Nindya - Sejahtera
Nindya - Bumi Karsa	27,371	52,235	Nindya - Bumi Karsa
Nindya - Lampiri	20,748	33,402	Nindya - Lampiri
Nindya - Pembangunan Perumahan	15,747	11,663	Nindya- Pembangunan Perumahan
Nindya - Catur Perkasa	15,365	20,105	Nindya - Catur Perkasa
Nindya - Passokkorang - Adhijaya	14,569	20,187	Nindya - Passokkorang - Adhijaya
Nindya - Jaya Konstruksi	9,953	--	Nindya - Jaya Konstruksi
Nindya - Pembangunan Perumahan - Utama Karya	7,126	--	Nindya - Pembangunan Perumahan - Utama Karya
Nindya - Sarana	5,926	--	Nindya - Sarana
Nindya - Brantas	5,448	6,828	Nindya - Brantas
Nindya - MCC - Wika - Waskita	4,578	1,249	Nindya - MCC - Wika - Waskita
Nindya - PT PPA	4,000	4,000	Nindya - PT PPA
Nindya - Andesmont	3,520	938	Nindya - Andesmont
Nindya - Bina Nusa Lestari	3,196	--	Nindya - Bina Nusa Lestari
Nindya - Surya	2,745	29,848	Nindya - Surya
Nindya - Utama Karya	2,533	2,502	Nindya - Utama Karya
Nindya - Inti	2,530	1,219	Nindya - Inti
Nindya - Utama Karya - Wijaya Karya	2,392	--	Nindya - Utama Karya - Wijaya Karya
Nindya - Karya Pribumi	2,028	--	Nindya - Karya Pribumi
Nindya - Cipuga	1,500	2,068	Nindya - Cipuga
Nindya - Adhi Karya	1,389	880	Nindya - Adhi Karya
Nindya - Tamiang	1,380	1,020	Nindya - Tamiang
Nindya - Leo Tunggal Mandiri	1,015	--	Nindya - Leo Tunggal Mandiri
Nindya - Wijaya Karya	389	8,001	Nindya - Wijaya Karya
Nindya - Tuju Wali Wali	50	1,656	Nindya - Tuju Wali Wali
Nindya - PP - HK	--	8,315	Nindya - PP - HK
Nindya - Passokkorang	--	2,430	Nindya - Passokkorang
Nindya - Istaka Karya	--	1,502	Nindya - Istaka Karya
Nindya - Sugriwo	--	1,471	Nindya - Sugriwo
Nindya - PT Aecom Indonesia - PT Bina Enarcon E.	--	1,312	Nindya - PT Aecom Indonesia - PT Bina Enarcon E
Nindya - PDKA	--	1,211	Nindya - PDKA
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Miliar)	2,296	2,776	Others (each below Rp 1 Billion)
Jumlah	189,408	246,190	Total

Merupakan piutang ventura bersama (JV) untuk pembelian material, biaya bank, overhead, dan lain-lain yang dikeluarkan oleh Perusahaan untuk kepentingan ventura bersama.

Represents receivables from construction joint venture for material purchase, bank fees, overhead, and others disbursed by the Company for the interest of JV purposes.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**9. Pinjaman yang Diberikan – Dana Talangan
Kepada Pihak-pihak Berelasi**

9. Loans Receivable – Bailout

	2017 Rp	2016 Rp	
Pokok Pinjaman Dana Talangan			Principal Bailout Loans
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	135,836	135,836	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
PT Kertas Leces (Persero)	54,244	50,000	PT Kertas Leces (Persero)
PT Istaka Karya (Persero)	52,897	26,800	PT Istaka Karya (Persero)
PT Iglas (Persero)	34,901	30,701	PT Iglas (Persero)
PT Survai Udara Penas (Persero)	22,509	22,510	PT Survai Udara Penas (Persero)
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	--	69,128	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
Jumlah Pokok Pinjaman Dana Talangan	300,387	334,975	Total Principal Bailout Loans
Piutang Bunga Pinjaman Dana Talangan			Interest Receivable on Bailout Loans
PT Kertas Leces (Persero)	1,534	1,534	PT Kertas Leces (Persero)
PT Istaka Karya (Persero)	1,118	--	PT Istaka Karya (Persero)
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	370	--	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
PT Survai Udara Penas (Persero)	360	360	PT Survai Udara Penas (Persero)
Jumlah Piutang Bunga Pinjaman Dana Talangan	3,382	1,894	Total Receivable on Bailout Loans Interest
Jumlah Pinjaman Dana Talangan	303,769	336,869	Total Bailout Loans
Dikurangi:			Less:
Penyisihan Penurunan Nilai Pokok Pinjaman			Allowance for Impairment of Loans Receivable
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	(49,617)	(49,617)	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
PT Kertas Leces (Persero)	(30,534)	(50,000)	PT Kertas Leces (Persero)
PT Survai Udara Penas (Persero)	(16,143)	(16,143)	PT Survai Udara Penas (Persero)
Jumlah Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman	(96,294)	(115,760)	Total Allowance for Impairment of Loans
Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Bunga Pinjaman			Allowance for Impairment of Interest Receivable on Loans
PT Survai Udara Penas (Persero)	(360)	(360)	PT Survai Udara Penas (Persero)
PT Kertas Leces (Persero)	--	(1,534)	PT Kertas Leces (Persero)
Jumlah Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Bunga Pinjaman Dana Talangan	(360)	(1,894)	Total Allowance for Impairment of Interest Receivable on Loans
Jumlah Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman	(96,654)	(117,654)	Total Allowance for Impairment of Loans
Biaya Perolehan yang Belum Diamortisasi			Unamortized Cost
Jumlah Biaya Perolehan yang Belum Diamortisasi	--	--	Total Unamortized Cost
Jumlah Pengurangan	(96,654)	(117,654)	Total Deduction
Jumlah Pinjaman Dana Talangan - Bersih	207,115	219,215	Total Bailout Loans - Net

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

The movements in allowance for impairment losses of receivables are as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	
Saldo Awal Tahun	(117,654)	(108,989)	Balance at Beginning of The Year
Penambahan di Tahun Berjalan	--	(8,665)	Addition in Current Year
Pemulihan di Tahun Berjalan	21,000	--	Recovery in Current Year
Saldo Akhir Tahun	(96,654)	(117,654)	Balance at Ending of The Year

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

10. Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja

10. Gross Amount Due from Customers

	2017 Rp	2016 Rp	
Pihak Berelasi	347,956	484,320	Related Parties
Pihak Ketiga	945,766	775,384	Third Parties
Jumlah - Bersih	1,293,722	1,259,704	Total - Net

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai tagihan bruto dan seluruh tagihan bruto dapat ditagih sehingga tidak dibentuk penyisihan penurunan nilai.

Management believes that there are no indications of impairment of gross amount and all gross amount are collectible therefore no allowance for impairment losses has been provided.

11. Persediaan

11. Inventories

	2017 Rp	2016 Rp	
Persediaan Bahan Konstruksi	138,722	116,762	Construction Raw Material
Persediaan Pupuk	24,759	--	Fertilizer Inventory
Persediaan Properti	6,679	--	Inventory of Property
Jumlah	170,160	116,762	Total

12. Uang Muka dan Biaya Dibayar Di muka

12. Advances and Prepaid Expenses

	2017 Rp	2016 Rp	
Uang Muka Pihak Ketiga	74,671	70,691	Advance to Third Parties
Biaya Dibayar di Muka	29,797	100,784	Prepaid Expenses
Jumlah	104,468	171,475	Total

Uang muka pihak ketiga merupakan uang muka kepada supplier dan subkontraktor. Biaya dibayar di muka merupakan biaya untuk sewa gedung dan asuransi.

Advance to third parties represents prepayment to suppliers and subcontractor. Prepaid expenses are for rent building and insurance.

13. Perpajakan

13. Taxation

a. Pajak Dibayar Di muka

a. Prepaid Taxes

	2017 Rp	2016 Rp	
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
Pajak Pertambahan Nilai	23,576	15,767	Value Added Tax
Pajak Penghasilan Pasal 23	31,775	24,685	Income Tax Article 23
Pajak Penghasilan Pasal 25	8,920	4,147	Income Tax Article 25
Pajak Penghasilan Pasal 22	132	--	Income Tax Article 22
	64,403	44,599	
<u>Entitas Anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Pajak Pertambahan Nilai	407,985	311,426	Value Added Tax
Pajak Penghasilan Pasal 23	1,306	2,647	Income Tax Article 23
Pajak Penghasilan 4 Ayat 2	755	238	Income Tax Article 4 (2)
Pajak Penghasilan Pasal 25	447	328	Income Tax Article 25
	410,493	314,639	
Jumlah	474,896	359,238	Total

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

13. Perpajakan (Lanjutan)

13. Taxation (Continued)

b. Utang Pajak

b. Taxes Payable

	2017 Rp	2016 Rp	
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
PPH Pasal 4(2)	16	15	Income Tax Article 4(2)
PPH Pasal 21	3,624	1	Income Tax Article 21
PPH Pasal 22	187	894	Income Tax Article 22
PPH Pasal 23	923	78	Income Tax Article 23
	<u>4,750</u>	<u>988</u>	
<u>Entitas Anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
PPH Pasal 4(2)	10,738	22,582	Income Tax Article 4 (2)
PPH Pasal 21	4,987	3,741	Income Tax Article 21
PPH Pasal 22	5,129	--	Income Tax Article 22
PPH Pasal 23	2,802	8,222	Income Tax Article 23
PPH Pasal 25	517	354	Income Tax Article 25
PPH Pasal 29	2,423	2,136	Income Tax Article 29
Pajak Pertambahan Nilai	23,975	--	Value Added Tax
	<u>50,570</u>	<u>37,035</u>	
Jumlah	<u>55,320</u>	<u>38,023</u>	Total

c. Pajak Penghasilan Badan

c. Income Taxes

	2017 Rp	2016 Rp	
Laba Sebelum Pajak Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian	332,930	283,400	Income Before Tax Based on Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laba Sebelum Pajak Entitas Anak	(198,375)	(180,399)	Income Before Tax of Subsidiaries
Bagian Laba yang Telah Diperhitungkan Pajak Penghasilan Final	(90,421)	(156,177)	Portion of Income Accounted for Final Income Tax
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan	<u>44,134</u>	<u>(53,176)</u>	Income (Loss) Before Corporate Income Tax
Beda Waktu:			Timing Differences:
Provisi Pinjaman yang Diberikan	--	1,353	Provision for Loans Receivable
Apresiasi Karyawan	3,770	5,090	Employees' Appreciation
Penyisihan Penurunan Nilai	(33,931)	(58,495)	Allowance for Impairment Loss
Beban Imbalan Pasca Kerja - Bersih	(796)	(5,184)	Employee Benefits Expense - Net
Tantiem	(2,685)	(608)	Tantiems
Penyusutan Aset Tetap	(217)	(42)	Fixed Assets Depreciation
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(89)	(18)	Intangible Assets Amortization
Beda Tetap:			Permanent Differences:
Kenaikan Nilai Wajar Properti Investasi	(31,285)	--	Increase in Fair Value of Investment Property
Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan	45,678	40,995	Non Deductible Expenses
Jumlah Koreksi Fiskal	<u>(19,555)</u>	<u>(16,909)</u>	Total Fiscal Correction
Laba Kena Pajak Sebelum Kompensasi Rugi Fiskal	24,579	(70,085)	Taxable Income Before Fiscal Losses Compensation
Rugi Fiskal Awal Periode			Fiscal Loss at Beginning of Period
Kompensasi Rugi Fiskal:			Fiscal Tax Losses Compensation:
Tahun 2016	(70,085)	--	Year 2016
Akumulasi Rugi Fiskal	<u>(45,506)</u>	<u>(70,085)</u>	Accumulated Fiscal Losses
Pajak Penghasilan Badan Tahun Berjalan (25%)	--	--	Corporate Income Tax Expense on Current Year (25%)
Beban Pajak Kini - Entitas Anak:			Current Tax Expenses - Subsidiaries :
PT PPA Finance	4,130	4,369	PT PPA Finance
PT Nindya Karya	1,214	1,537	PT Nindya Karya
PT Nindya Beton	--	415	PT Nindya Beton
PT Pratama Persada Airborne	1,232	--	PT Pratama Persada Airborne
Beban Pajak Kini - Entitas Anak	<u>6,576</u>	<u>6,321</u>	Current Tax Expenses - Subsidiaries
Jumlah Beban Pajak Kini - Konsolidasian	<u>6,576</u>	<u>6,321</u>	Total Current Tax Expense - Consolidation

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

13. Perpajakan (Lanjutan)

13. Taxation (Continued)

d. Pajak Tangguhan

d. Deferred Tax

	2015	Dibebankan ke Laporan Laba Rugi/ Charged to Profit or Loss	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif/ Charged to Comprehensive Income	2016	Dibebankan ke Laporan Laba Rugi/ Charged to Profit or Loss	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif/ Charged to Comprehensive Income	2017
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Pajak Tangguhan							
Perusahaan							
Rugi Fiskal	--	--	--	--	--	--	--
Rugi Fiskal Tidak Bisa Terpulihkan	--	8,654	--	8,654	(2,966)	--	5,688
Liabilitas Imbalan Kerja	3,300	(2,532)	--	768	(45)	--	723
Akrual Tantiem	2,164	(150)	--	2,014	669	--	2,683
Akrual Apresiasi Karyawan	3,646	1,238	--	4,884	999	--	5,883
Aset Tetap	240	(167)	--	73	24	--	97
Aset Takberwujud	13	4	--	17	(50)	--	(33)
Pinjaman yang Diberikan	(99)	(573)	--	(672)	523	--	(149)
Sub Jumlah	9,264	6,474	--	15,738	(846)	--	14,892
PT PPA Finance							
Akrual Tantiem dan Apresiasi Karyawan	532	97	--	629	(301)	--	328
Piutang Usaha	1,484	--	--	1,484	--	--	1,484
Liabilitas Imbalan Kerja	57	15	15	95	25	24	144
Sub Jumlah	2,073	112	15	2,208	(276)	24	1,956
PT PPA Kapital							
Rugi Fiskal	1,554	(306)	--	1,248	--	--	1,248
Liabilitas Imbalan Kerja	--	--	--	15	71	15	101
Sub Jumlah	1,554	(306)	--	1,263	71	15	1,349
PT Pratama Persada Airborne							
Aset Tetap	--	--	--	--	8	--	8
Sub Jumlah	--	--	--	--	8	--	8
PT Duta Mentari Raya							
Rugi Fiskal	273	719	--	992	--	--	992
Sub Jumlah	273	719	--	992	--	--	992
PT Nindya Beton							
Rugi Fiskal	4,404	(4,404)	--	--	--	--	--
Penyisihan Rugi Fiskal	(881)	881	--	--	--	--	--
Aset Tetap	--	--	--	234	1,174	--	1,408
Sub Jumlah	3,523	(3,523)	--	234	1,174	--	1,408
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	16,687	3,476	15	20,435	131	39	20,605
Liabilitas Pajak Tangguhan							
PT Nindya Beton							
Aset Tetap	(452)	452	--	--	--	--	--
Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan	(452)	452	--	--	--	--	--

Deferred Tax Assets
Company
Tax Losses
Unrecoverable Tax Losses
Employee Benefits Liabilities
Accrued Tantiems
Accrued Employees' Appreciation
Property, Plant and Equipment
Intangible Asset
Loans Receivable
Sub Total
PT PPA Finance
Accrued Tantiems and Employee Appreciation
Accounts Receivable
Employee Benefits Liabilities
Sub Total
PT PPA Kapital
Fiscal Loss
Employee Benefits Liabilities
Sub Total
PT Pratama Persada Airborne
Property Plant and Equipment
Sub Total
PT Duta Mentari Raya
Fiscal Loss
Sub Total
PT Nindya Beton
Fiscal Loss
Allowance for Fiscal Loss
Property Plant and Equipment
Sub Total
Total Deferred Tax Assets
Deferred Tax Liabilities
PT Nindya Beton
Property Plant and Equipment
Total Deferred Tax Liabilities

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

13. Perpajakan (Lanjutan)

e. Pemeriksaan Pajak dan Sengketa Pajak

Pemeriksaan Pajak Tahun 2013

Pemeriksaan pajak tahun 2013 dilaksanakan karena adanya kelebihan pembayaran pajak Perusahaan. Setelah pemeriksaan pajak dilakukan, kantor pajak menerbitkan Surat Keterangan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") No. 00002/406/13/093/14 tanggal 30 Desember 2014 dimana Perusahaan berhak menerima pengembalian pajak sebesar Rp8.398 yang merupakan kredit pajak PPh Pasal 23 tahun 2013. Pengembalian pajak tersebut telah diterima Perusahaan pada tanggal 22 Januari 2015.

Pemeriksaan Pajak Tahun 2014

Sehubungan dengan pemeriksaan pajak untuk tahun 2014 atas PPh Badan, pemeriksa pajak menetapkan adanya koreksi fiskal positif sebesar Rp2.457 sehingga laba kena pajak menjadi sebesar Rp44.309, yang dikompensasi dengan kerugian fiskal dari tahun sebelumnya senilai Rp44.309. Pemeriksa pajak juga menetapkan koreksi positif atas kredit pajak PPh 23 sebesar Rp80 sehingga PPh 23 yang dapat dikreditkan menjadi Rp10.207.

Terkait dengan koreksi fiskal positif tersebut, pemeriksa pajak menerbitkan SKPLB no. 00026/406/14/093/16 tanggal 22 April 2016 dimana Perusahaan akan menerima pengembalian pajak sebesar Rp10.207. Pengembalian pajak tersebut telah diterima Perusahaan pada tanggal 20 Mei 2016.

Pemeriksaan Pajak Tahun 2015

Pemeriksaan pajak tahun 2015 dilaksanakan karena adanya kelebihan pembayaran pajak Perusahaan sebagaimana tercantum pada SPT Tahunan PPh Badan tahun 2015, dengan status SPT Lebih Bayar sebesar Rp9.888. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN-00122/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2016 dari Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Badan dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan.

Sengketa Pajak

Selama periode tahun 2017, tidak terdapat Sengketa Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak maupun dengan Kantor Pelayanan Pajak sesuai domisili Perusahaan.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, Perusahaan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun 2016 ke Kantor Pelayanan Pajak.

13. Taxation (Continued)

e. Tax Examination and Tax Disputes

Tax Audit 2013

Tax Audit 2013 was conducted to tax overpayment by Company. After tax audit completely implemented, tax office issued Overpayment Tax Assessment Letter ("SKPLB") no. No.0002/406/13/093/14 dated December 30, 2014 which stated that company will receive tax refund for Rp8,398 related to prepaid tax article 23 Period 2013. The tax refund effectively credited in Company's bank account on January 22, 2015.

Tax Audit 2014

According to tax audit 2014 for Corporate Income Tax, tax auditor stated that there is positive tax correction of Rp2,457 so the taxable income for Rp44,309, that compensation with tax loss from previous year amounting to Rp44,309. Tax auditor also decide positive correction for prepaid tax article 23 amounting to Rp80 so that creditable prepaid tax 23 will be Rp10,207.

Related to those positive tax corrections, tax auditor issued SKPLB no. 00026/406/14/093/16 dated April 22, 2016 in which Company will received tax refunds amounting to Rp10,207. The Tax Refund effectively credited in Company's bank accounts on May 20, 2016.

Tax Audit 2015

In 2015, tax audit conducted for the overpaid taxes as stated in the Company's Annual Income Tax in 2015, with the status of SPT overpayment amounting to Rp9,888. Examination carried out in accordance with Surat Perintah Pemeriksaan No: PRIN-00122 /WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/ 2016 of the Tax Office and is currently still in the process of examination.

Tax Dispute

During 2017, there are no Tax Dispute with the Tax Authorities in accordance with the Company's domicile.

Until issuance date of these consolidated financial statements, the Company has reported the 2016 Annual Tax Return (SPT) to the tax office.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

13. Perpajakan (Lanjutan)

Laba kena pajak dan beban pajak tahun 2016 yang tercatat tidak berbeda material dengan yang dilaporkan dalam SPT 2016.

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, kerugian pajak dapat dilakukan ke depan untuk jangka waktu maksimal lima tahun.

13. Taxation (Continued)

Reported taxable income and tax expense for the year 2016 immaterially varied from SPT 2016 submitted by the Company to the tax office

Under Indonesia taxation laws, tax losses may be carried forward for a maximum period of five years.

14. Aset Lain-lain

	2017 Rp	2016 Rp
<u>Aset Lancar Lainnya</u>		
Piutang Proyek	29,159	22,579
Dana HPA	14,090	64,798
Piutang Talangan Biaya BUMN	11,790	8,763
Lain-lain	23,823	5,292
Sub Total	78,862	101,432
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Piutang	(4,167)	(4,168)
Jumlah	74,695	97,264
<u>Aset Tidak Lancar Lainnya</u>		
Deposito Berjangka yang Dijaminkan	319,079	4,879
Tanah Mentah	6,092	11,580
Uang Jaminan	5,248	5,831
Aset Takberwujud - Software	3,525	2,320
Lain-lain	2,147	666
Jumlah	336,091	25,276

14. Other Assets

<u>Other Current Assets</u>
Project Receivable
HPA's Fund
SOEs' Bailout Loans Receivable
Others
Sub Total
Less: Allowance for Impairment of Receivables
Total
<u>Other Non-Current Assets</u>
Time Deposits Pledged as Collateral
Undeveloped Land
Deposit Guarantee
Intangible Assets - Software
Others
Total

- Piutang proyek merupakan tagihan kepada PT Manunggal Muara Palma (MMP) oleh PT NK, Entitas Anak. Proyek dihentikan sebab MMP tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Badan Arbitrase Nasional (BANI) yang telah dimenangkan oleh Entitas Anak dan MMP diharuskan membayar sejumlah uang.
- Piutang talangan biaya BUMN merupakan piutang atas restrukturisasi/revitalisasi BUMN.
- Deposito berjangka yang dijaminkan
 - Deposito berjangka yang dijaminkan merupakan deposito di PT Bank CIMB Niaga Tbk yang dijaminkan atas pinjaman karyawan.
 - Deposito berjangka yang dijaminkan sebesar Rp 316.000 merupakan deposito berjangka Perusahaan pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atas fasilitas pinjaman Kredit Swadana Lembaga PRK dengan tingkat suku bunga sebesar 7,65% per tahun.

- Project receivable on project is billed to PT Manunggal Muara Palma (MMP) owned by PT NK, a subsidiary. The project was stopped because MMP did not meet payment obligations in accordance with the agreements that have been made by Badan Arbitrase Nasional (BANI) that has been won by subsidiary and MMP is required to pay some amount of money.*
- SOE's Fund advance loans receivable represent receivable to SOE's restructuring/revitalization.*
- Time Deposit which are pledged*
 - Time deposits which are pledged as collateral represent time deposit in PT Bank CIMB Niaga Tbk which are pledged on the employee loans.*
 - The guaranteed time deposit amounting to Rp316,000 represents the Company's time deposit at PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk on the loan facility of Kredit Swadana PRK with an interest rate of 7.65% per annum.*

14. Aset Lain-lain (Lanjutan)

14. Other Assets (Continued)

Dana HPA merupakan rekening atas aktivitas Hasil Pengelolaan Aset yang dilakukan oleh Perusahaan.

HPA's fund represent account of the activity of Asset Management conducted by the Company.

15. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

15. Available for Sale Financial Assets

	2017 Rp	2016 Rp	
Saham	60,213	74,769	Shares
Investasi melalui <i>Fund Manager</i>			Investments through Fund Managers
Bahana TCW Invesment Management	54,645	50,941	Bahana TCW Invesment Management
Nilai Wajar	<u>114,858</u>	<u>125,710</u>	Fair Value

Investasi pada saham di tahun 2017 dan 2016 merupakan investasi pada saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk (PT WK) yang dalam kelompok LQ 45 dengan jumlah lembar saham dan nilai wajar sebagai berikut:

Investment in shares in 2017 and 2016 represent to investment in share of PT Waskita Karya (Persero) Tbk (PT WK) which is included in the group of LQ 45 with amount of shares and fair value as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	
Jumlah Lembar	27,369,608	29,436,508	Number of Share
Nilai Wajar	2,200	2,540	Fair Value

Investasi melalui *Fund Manager* PT Bahana TCW dilakukan berdasarkan Perjanjian No. 010/BTM-PPA/VIII/11 tanggal 26 Agustus 2011 dan dilakukan addendum III pada tanggal 26 Agustus 2014.

Investments by the Fund Manager Bahana TCW made pursuant to the Agreement No. 010 / BTM-PPA/VIII/11, dated August 26, 2011, and performed addendum III on August 26, 2014.

Pada tanggal 17 Oktober 2014 dan 24 November 2014 dilakukan *redemption* dengan nilai imbal hasil masing-masing sebesar Rp8.233 dan Rp2.003. Per 31 Desember 2015 nilai investasi melalui PT Bahana TCW sebesar Rp42.055 dengan *Net Aset Value* (NAV) sebesar Rp44.537.

On October 17, 2014 and November 24, 2014 made redemption on the value of the yield amounting to Rp8,233 and Rp2,003, respectively. As of December 31, 2015 the value of the investment through PT Bahana TCW amounting to Rp42,055 with Net Aset Value (NAV) amounting to Rp44,537.

Kenaikan (penurunan) nilai aset keuangan tersedia untuk dijual yang belum terealisasi adalah sebagai berikut:

Unrealized gain (loss) on available for sale securities are as follow:

Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	Kenaikan (Penurunan) Nilai yang Belum Direalisasi / Unrealized Gain (Loss) on Available for Sale Securities		Available for Sale Financial Assets
	2017 Rp	2016 Rp	
Saham	41,850	55,019	Shares
Investasi melalui <i>Fund Manager</i> Bahana	2,429	(1,576)	Investment through Bahana's Fund Manager
Jumlah	<u>44,279</u>	<u>53,443</u>	Total

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

15. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual (Lanjutan) **15. Available for Sale Financial Assets (Continued)**

Mutasi penghasilan komprehensif lainnya atas penjualan aset keuangan tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut: *Movement of other comprehensive income related to the sale of available for sales assets as follows:*

	2017 Rp	2016 Rp	
Saldo Awal			Beginning Balance
Perubahan Kenaikan (Penurunan) Nilai yang Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk Dijual	53,443	35,026	Change in Unrealized Gain (Loss) on Available for Sale Securities
Penyesuaian Reklasifikasi Efek Tersedia untuk Dijual	(5,514)	39,778	Reclassification Adjustment on Available for Sale Securities
Jumlah	(3,650)	(21,361)	
	<u>44,279</u>	<u>53,443</u>	Total

16. Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi kepada Pihak-pihak Berelasi **16. Loans Receivable – Restructuring and/or Revitalization Related Parties**

	2017 Rp	2016 Rp	
Pokok Pinjaman Dana Restrukturisasi/Revitalisasi			Restructuring/Revitalization Principal
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	623,458	630,443	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	605,000	605,000	PT Dirgantara Indonesia (Persero)
PT Penataran Angkatan Laut (Persero)	225,147	227,598	PT Penataran Angkatan Laut (Persero)
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	141,612	141,612	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
PT Iglas (Persero)	89,084	89,084	PT Iglas (Persero)
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	31,638	31,639	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
Jumlah Pokok Pinjaman Dana Restrukturisasi/Revitalisasi	<u>1,715,939</u>	<u>1,725,376</u>	Total Principal Loan Restructuring/Revitalization
Piutang Bunga Pinjaman Dana Restrukturisasi/Revitalisasi			Interest Receivable on Restructuring/Revitalization Loans
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	15,463	--	PT Dirgantara Indonesia (Persero)
PT Iglas (Persero)	12,359	12,359	PT Iglas (Persero)
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	--	2,061	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
Jumlah Piutang Bunga Pinjaman Dana Restrukturisasi/Revitalisasi	<u>27,822</u>	<u>14,420</u>	Total Interest receivable on Restructuring/Revitalization Loans
Jumlah Pinjaman Dana Restrukturisasi/Revitalisasi	<u>1,743,761</u>	<u>1,739,796</u>	Total Restructuring/Revitalization Loans
Dikurangi:			Less:
Penyisihan Penurunan Nilai Pokok Pinjaman			Allowance for Impairment of Principal Loans
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	(221,669)	(203,025)	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	(141,612)	(141,612)	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
PT Iglas (Persero)	(23,497)	(29,077)	PT Iglas (Persero)
Jumlah Penyisihan Penurunan Nilai Pokok Pinjaman	<u>(386,778)</u>	<u>(373,714)</u>	Total Allowance for Impairment of Principal Loans
Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Bunga Pinjaman			Allowance for Impairment Loans Interest Receivable on
PT Iglas (Persero)	--	(12,359)	PT Iglas (Persero)
Jumlah Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Bunga Pinjaman	<u>--</u>	<u>(12,359)</u>	Total Allowance for Impairment of Interest Receivable on Loans
Jumlah Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman	<u>(386,778)</u>	<u>(386,073)</u>	Total Allowance for Impairment of Loans
Biaya Perolehan yang Belum Diamortisasi			Unamortized Cost
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	(229)	(228)	PT Dirgantara Indonesia (Persero)
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	(208)	(1,458)	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	(161)	(161)	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
Jumlah Biaya Perolehan yang Belum Diamortisasi	<u>(598)</u>	<u>(1,847)</u>	Total Unamortized Cost
Jumlah Pengurangan	<u>(387,376)</u>	<u>(387,920)</u>	Total Deduction
Jumlah Pinjaman Restrukturisasi/Revitalisasi - Bersih	<u>1,356,385</u>	<u>1,351,876</u>	Total Loans Restructuring/Revitalization Receivable - Net

Perikatan dan perjanjian terkait pinjaman yang diberikan-restrukturisasi dan/atau revitalisasi kepada pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 40.

Commitments and agreements related to loans receivable–restructuring and/or revitalization related parties are disclosed in Note 40.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

17. Properti Investasi

17. Investment Property

2017						
1 Januari / January 1	Penambahan Additions	Pengurangan Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ December 31		
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
Biaya Perolehan:						Acquisition Cost:
Tanah dan Bangunan	212,902	60,690	--	273,592		Lands and Buildings
Jumlah Biaya Perolehan	212,902	60,690	--	273,592		Acquisition Cost
Akumulasi Perubahan						Accumulated Changes
Nilai Wajar	79,683	42,626	--	122,309		Fair Value
Nilai Tercatat	292,585			395,901		Carrying Value
2016						
1 Januari / January 1	Penambahan Additions	Pengurangan Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ December 31		
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
Biaya Perolehan:						Acquisition Cost:
Tanah dan Bangunan	198,686	14,216	--	212,902		Lands and Buildings
Jumlah Biaya Perolehan	198,686	14,216	--	212,902		Acquisition Cost
Akumulasi Perubahan						Accumulated Changes
Nilai Wajar	76,411	3,272	--	79,683		Fair Value
Nilai Tercatat	275,097			292,585		Carrying Value

Perusahaan

Properti investasi Perusahaan merupakan tanah yang berlokasi di Desa Dampyak, Tegal seluas 60.847 m². Tidak terdapat perubahan nilai wajar atas tanah yang terletak di Tegal.

Properti Investasi berupa tanah dan bangunan senilai Rp82.908 dengan SHGB No. 1393 dan SHGB No. 1399 sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 15 Tanggal 26 Januari 2015 dan Akta Jual Beli Nomor 08/2015 dan 07/2015 Tanggal 4 Februari 2015 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Julius Purnawan, S.H., M.Si.

SHGB Nomor 1393 Tanggal 6 Oktober 2010 terletak di Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta dengan luas 985m². Diatas tanah ini berdiri bangunan sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 2862/IMB/PG/1977 Tanggal 16 Juni 1977.

Tanah dan bangunan tersebut disewakan oleh perusahaan kepada PT Energy Management Indonesia (Persero) berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Perkantoran dengan Nomor PSM1/PPA/PD/0415 Tanggal 20 April 2015 dengan jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan 29 Februari 2015 dengan nilai Rp1.598 belum termasuk PPN.

The Company

Investment Properties the Company are the land that located at Desa Dampyak, Tegal 60,847 sqm area. There is no change in the fair value of land located in Tegal.

Investment property of land and buildings amounting to Rp82,908 with SHGB No. 1393 and SHGB No. 1399 in accordance with Sale and Purchase Agreement No. 15 on January 26, 2015 and the Deed of Sale and Purchase No. 08/2015 and 07/2015 on February 4, 2015 at Land Deed Officer Julius Purnawan, S.H., M.Si.

SHGB Number 1393 Date October 6, 2010 located at Melawai Village, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta with an area of 985sqm. The building stands on land in accordance with the Building Permit Number: 2862/IMB/PG/1977 on June 16, 1977.

The land and building are leased by the Company to PT Energy Management Indonesia (Persero) based on the lease agreement Office Building with No. PSM1/PPA/PD/0415 on April 20, 2015 at a period of 1 year starting from March 1, 2015 until February 29, 2015 amounted to Rp1,598 excluding VAT.

17. Properti Investasi (Lanjutan)

Nilai atas tanah dan bangunan yang yang disebutkan diatas berdasarkan nilai wajar atas penilaian dari KJPP Damianus Ambur & Rekan tanggal 3 September 2014 senilai Rp82.908.

Pada tahun 2015 Perusahaan juga membeli sebidang tanah kosong Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) 123 dengan luas 60.336m² yang terletak di Desa Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal senilai Rp24.454.

Pada tanggal 28 Desember 2015 telah dilakukan penilaian aset oleh KJPP Herman, Meirizki & Rekan atas aset tanah dan bangunan Perusahaan yang terletak di jalan Wolter Monginsidi No. 4 & 6, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penilaian, nilai pasar atas aset tersebut sebesar Rp87.554 sedangkan nilai buku atas aset tersebut adalah sebesar Rp86.825.

Pada tanggal 28 Desember 2015 telah dilakukan penilaian aset oleh KJPP Herman, Meirizki & Rekan atas aset tanah dan bangunan rumah tinggal Perusahaan yang terletak di jalan Pala Raya Tegal, propinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penilaian, nilai pasar atas aset tersebut sebesar Rp54.474 sedangkan nilai buku atas aset tersebut adalah sebesar Rp45.855.

Pada tahun 2016, Perusahaan memperoleh Aset tanah Syamsudin Noor dan Tompo Balang dengan total nilai sebesar Rp11.080 milik PT MNA, diserahkan kepada Perusahaan sebagai kompensasi pembayaran atas sebagian Pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan.

Pada tahun 2016, terdapat tambahan biaya-biaya yang dikapitalisasi ke Aset Tegal senilai Rp2.633.

Pada tahun 2017, Perusahaan memperoleh Aset tanah Maros dengan total nilai sebesar Rp57.675 milik PT MNA, diserahkan kepada Perusahaan sebagai kompensasi pembayaran atas sebagian Pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan. Selain itu, terdapat tambahan biaya-biaya yang dikapitalisasi ke asset tegal senilai Rp3.015.

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2017 diestimasi berdasarkan penilaian atas nilai pasar yang dilakukan oleh penilai independen KJPP Herman Meirizki dan Rekan.

17. Investment Property (Continued)

The value of land and buildings mentioned above are based on KJPP Damian Ambur & Rekan's assessment dated September 3, 2014 amounting to Rp82,908.

In 2015 the Company also purchased a land with SHGB 123 with an area of 60,336sqm located in the Dampyak Village, Kramat, Tegal amounting to Rp24,454.

On December 28, 2015 has been conducted valuation of asset by KJPP Herman, Meirizki & Partners on land and building assets of the Company located on Wolter Monginsidi No. 4 & 6 street , Melawai, Kebayoran Baru sub-district, South Jakarta, Jakarta Province. Based on the results of the assessment, the market value of those assets amounted to Rp87,554, while the book value of these asset is Rp86,825.

On December 28, 2015 has been conducted valuation of asset by KJPP Herman, Meirizki & Partners on land and building of residential houses assets of the Company located on Pala raya Tegal street, Central Java Province. Based on the results of the assessment, the market value of those assets amounted to Rp54,474, while the book value of these asset is Rp45,855.

In 2016, the Company acquired land assets Syamsudin Noor and Tompo Balang amounting to Rp11,080 which owned by PT MNA, handed over to the Company as compensation payment for partial loan given by the Company.

In 2016, there are additional capitalized cost for Aset Tegal amounting to Rp2,633.

In 2017, the Company acquired land assets Maros amounting to Rp57,675 which owned by PT MNA, handed over to the Company as compensation payment for partial loan given by the Company, otherwise, there are additional capital cost of asset Tegal amounting to Rp3,015.

The fair value of investment property as of December 31, 2017 is estimated based on market valuation which is conducted by independent appraisal KJPP Herman Meirizki dan Rekan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

17. Properti Investasi (Lanjutan)

Akumulasi kenaikan nilai wajar properti investasi setelah direvaluasi pada bulan Desember 2017 sebesar Rp90.223. Kenaikan nilai wajar dicatat pada laba rugi sebesar Rp30.649.

Untuk penilaian tanah, penilai menggunakan pendekatan pasar (*market approach*) dengan cara mempertimbangkan penjualan dari aset sejenis atau pengganti dan data pasar terkait, serta menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan. Pada umumnya, aset yang dinilai (obyek penilaian) dibandingkan dengan transaksi aset yang sebanding, baik yang telah terjadi transaksi maupun aset yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli.

PT NK

Properti investasi PT NK merupakan tanah yang berlokasi di Jl. Bajak V Medan seluas 9.363 m², Jl. Raya Trosobo KM. 23 Kel. Sidorejo, Krian, Sidoarjo seluas 10.440 m², Jl. Poros Dusun Patene Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Makassar seluas 4.572 m², dan Jl. Madrasah II/3 Cipinang Cempedak, Jakarta Timur seluas 5.828 m².

Berdasarkan laporan penilaian, nilai wajar properti investasi pada Desember 2015 adalah sebesar Rp133.069. Kenaikan nilai wajar yang timbul sebesar Rp67.168 dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada laba rugi tahun 2015.

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2017 diestimasi berdasarkan penilaian atas nilai pasar yang dilakukan oleh penilai independen Jimmy Prasetyo & Rekan.

Akumulasi kenaikan nilai wajar properti investasi setelah direvaluasi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp79.416. Kenaikan nilai wajar dicatat pada pendapatan lain-lain sebesar Rp11.977.

Untuk penilaian tanah, penilai menggunakan pendekatan pasar (*market approach*) dengan cara mempertimbangkan penjualan dari aset sejenis atau pengganti dan data pasar terkait, serta menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan. Pada umumnya, aset yang dinilai (obyek penilaian) dibandingkan dengan transaksi aset yang sebanding, baik yang telah terjadi transaksi maupun aset yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli.

17. Investment Property (Continued)

Increase from accumulated fair value of investment property was revalued on December 2017, amounted to Rp 90,223. Increasing of fair value is recorded in the income statement amounted to Rp30,649.

For land valuation, the appraisal uses market approach, by considering the sale of similar assets or the alternative and related market data, and generates the value estimation through comparison process. In general, the asset valued (valuation object) is compared to a comparable asset transaction, either with one that has existed before, or with assets that are still being offered as a transaction process.

PT NK

Investment properties of PT NK are land that are located at Jl. Bajak V Medan 9,363 sqm area, Jl. Raya Trosobo KM. 23 Kel. Sidorejo, Krian, Sidoarjo 10,440 sqm area, Jl. Poros Dusun Patene Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Makassar 4,572 sqm area, and Jl. Madrasah II/3 Cipinang Cempedak, Jakarta Timur 5,828 sqm area.

Based on the appraisal report, the fair value of investment property in December 2015 amounting to Rp133,069. Increasing of fair value amounting to Rp67,168 are recorded as other income in net income for the year 2015.

The fair value of investment properties as of December 31, 2017 is estimated based on market value method by Jimmy Prasetyo & Partners independent appraisal.

Increase from accumulated fair value of investment property was revalued on December 2017, amounted to Rp 79,416. Increasing of fair value is recorded on other income amounted to Rp11,977.

For land valuation, the appraisal uses market approach, by considering the sale of similar assets or the alternative and related market data, and generates the value estimation through comparison process. In general, the asset valued (valuation object) is compared to a comparable asset transaction, either with one that has existed before, or with assets that are still being offered as a transaction process.

17. Properti Investasi (Lanjutan)

PT DMR

Properti Investasi PT DMR merupakan tanah, bangunan dan sarana pelengkap kolam limbah yang terletak di Jalan Desa Kebon Lado, Desa Kebon Lado, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau seluas 145.267 m².

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2016 diestimasi berdasarkan penilaian atas nilai pasar yang dilakukan oleh penilai independen KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan.

Nilai tercatat properti investasi telah direvaluasi pada bulan Desember 2016 sebesar Rp3.775. Kenaikan nilai wajar dicatat pada pendapatan lain-lain sebesar Rp3.272.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat perubahan signifikan atas nilai wajar properti investasi di tahun berjalan

Tidak terdapat kenaikan nilai wajar atas properti investasi tanah milik PT DMR per 31 Desember 2017.

Untuk penilaian tanah, penilai menggunakan pendekatan pasar (*market approach*) dengan cara mempertimbangkan penjualan dari aset sejenis atau pengganti dan data pasar terkait, serta menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan. Pada umumnya, aset yang dinilai (obyek penilaian) dibandingkan dengan transaksi aset yang sebanding, baik yang telah terjadi transaksi maupun aset yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli.

17. Investment Property (Continued)

PT DMR

Investment Properties of PT DMR include land, building, and supplementary facilities waste ponds which located in Desa Kebon Lado Street, Village of Kebon Lado, District of Singingi, Regency of Kuantan Singingi, Province of Riau, covering an area of 145,267 m².

The fair value of investment property as of December 31, 2016 is estimated based on market valuation which is conducted by independent appraisal KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan.

Recorded amount of investment property was revalued on December 2016, amounted to Rp 3,775. Increasing of fair value is recorded on other income amounted to Rp3,272.

Based on management review, there no significant changes on investment property fair value in the current year.

There is no increase in the fair value of PT DMR land investment properties as of December 31, 2017

For land valuation, the appraisal used market approach, by considering the sale of similar assets or the alternative and related market data, and generates the value estimation through comparison process. In general, the asset valued (valuation object) is compared to a comparable asset transaction, either with one that has existed before, or with assets that are still being offered as a transaction process.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

18. Investasi pada Ventura Bersama

18. Investments in Joint Ventures

31 Desember 2017/December, 31 2017					
Saldo Awal/ Beginning Balance	Setoran (Penarikan)/ Koreksi/ Placement (Withdrawal)/ Correction		Pengakuan Laba (Rugi)/ Gain (Loss) Recognition	Saldo Akhir/ Ending Balance	
	Rp	Rp			
Nindya - PPA dan Nindya	84,415	1,499	(1,231)	84,683	Nindya - PPA dan Nindya
ISN-PPA-LBD - PT Artha Bangun Pratama	54,406	--	(1,901)	52,504	ISN-PPA-LBD - PT Artha Bangun Pratama
Nindya - Universal	13,512	(13,440)	28,822	28,894	Nindya - Universal
Nindya - Utama Karya	15,317	(5,435)	12,426	22,308	Nindya - Utama Karya
Nindya - Tamiang	10,058	--	9,298	19,356	Nindya - Tamiang
Nindya - Jaya Konstruksi	15,195	(818)	4,187	18,564	Nindya - Jaya Konstruksi
Nindya - Cipuga	--	--	13,069	13,069	Nindya - Cipuga
Nindya - PP - Utama Karya	8,516	--	4,121	12,637	Nindya - PP - Utama Karya
PPAK Rumah Cerdas	9,278	(233)	971	10,016	PPAK Rumah Cerdas
Nindya - PP	4,481	--	5,359	9,839	Nindya - PP
Nindya - Bumi Karsa	7,815	(4,532)	5,594	8,876	Nindya - Bumi Karsa
Nindya - Surya	6,085	--	1,897	7,983	Nindya - Surya
Nindya - Paesa - Adhi Karya - Panrisau	8,790	(1,521)	--	7,269	Nindya - Paesa - Adhi Karya - Panrisau
Nindya - Wijaya Karya	12,664	(14,862)	8,311	6,113	Nindya - Wijaya Karya
Nindya - MCC - Wika - Waskita	3,315	--	2,765	6,080	Nindya - MCC - Wika - Waskita
Nindya - Leo Tunggal Mandiri	--	--	5,165	5,165	Nindya - Leo Tunggal Mandiri
Nindya - Wijaya - Waskita	11,140	(14,798)	8,704	5,046	Nindya - Wijaya - Waskita
Nindya - Brantas	14,727	(12,126)	1,933	4,533	Nindya - Brantas
Nindya - Inti	2,864	--	1,415	4,279	Nindya - Inti
Nindya - Passokkorang - Adhijaya	3,804	--	--	3,804	Nindya - Passokkorang - Adhijaya
Nindya - Indah Pratama	83	(2,255)	4,596	2,423	Nindya - Indah Pratama
Nindya - Andesmont	16,106	(13,727)	--	2,379	Nindya - Andesmont
Nindya - Adhi Karya	361	(3,511)	5,343	2,193	Nindya - Adhi Karya
Nindya - Utama Karya - Wijaya Karya	433	(4,000)	5,720	2,153	Nindya - Utama Karya - Wijaya Karya
Nindya - Sejahtera	--	--	1,940	1,940	Nindya - Sejahtera
Nindya - PDKA	5,076	(3,316)	--	1,759	Nindya - PDKA
Nindya - Kwarsa Hexagon	1,486	(137)	--	1,348	Nindya - Kwarsa Hexagon
Nindya - Adhi - Wira	--	--	1,269	1,269	Nindya - Adhi - Wira
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Miliar)	30,959	890	3,266	2,206	Others (Each below Rp 1 Billion)
Jumlah	340,884	(92,323)	133,038	348,689	Total

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

18. Investasi pada Ventura Bersama (Lanjutan)

18. Investments in Joint Ventures (Continued)

31 Desember 2016/December, 31 2016									
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Setoran (Penarikan)/ Koreksi/ Placement (Withdrawal)/ Correction	Pengakuan Laba (Rugi)/ Gain (Loss) Recognition	Saldo Akhir/ Ending Balance					
	Rp	Rp	Rp	Rp					
Nindya - PPA dan Nindya	73,440	12,206	(1,231)	84,415	Nindya - PPA dan Nindya				
ISN-PPA-LBD - PT Artha Bangun Pratama	59,929	(3,622)	(1,901)	54,406	ISN-PPA-LBD - PT Artha Bangun Pratama				
Nindya - Andesmont	16,161	--	(55)	16,106	Nindya - Andesmont				
Nindya - Utama Karya	5,493	(1,033)	10,857	15,317	Nindya - Utama Karya				
Nindya - Jaya Konstruksi	2,635	--	12,561	15,195	Nindya - Jaya Konstruksi				
Nindya - Brantas	15,145	(389)	(30)	14,727	Nindya - Brantas				
Nindya - Universal	--	--	13,512	13,512	Nindya - Universal				
Nindya - Wijaya Karya	10,692	(11,140)	13,112	12,664	Nindya - Wijaya Karya				
Nindya - Wijaya - Waskita	--	11,140	--	11,140	Nindya - Wijaya - Waskita				
Nindya - Tamiang	--	--	10,058	10,058	Nindya - Tamiang				
PPAK Rumah Cerdas	--	9,700	(422)	9,278	PPAK Rumah Cerdas				
Nindya - Paesa - Adhi Karya - Panrisau	9,580	(790)	--	8,790	Nindya - Paesa - Adhi Karya - Panrisau				
Nindya - PP - Utama Karya	2,058	0	6,458	8,516	Nindya - PP - Utama Karya				
Nindya - Bumi Karsa	7,660	(3,128)	3,283	7,815	Nindya - Bumi Karsa				
Nindya - Resis Mangku Buana	6,674	--	--	6,674	Nindya - Resis Mangku Buana				
Nindya - Surya	2,327	(2,000)	5,759	6,085	Nindya - Surya				
Nindya - Sugriwo	5,322	--	--	5,322	Nindya - Sugriwo				
Nindya - PDKA	--	--	5,076	5,076	Nindya - PDKA				
Nindya - Tuah Sejati	4,590	--	--	4,590	Nindya - Tuah Sejati				
Nindya - PP	--	(16)	4,496	4,481	Nindya - PP				
Nindya - Passokkorang - Adhijaya	3,804	--	--	3,804	Nindya - Passokkorang - Adhijaya				
Nindya - Sacna - NKE	3,733	--	(170)	3,563	Nindya - Sacna - NKE				
Nindya - MCC - Wika - Waskita	--	--	3,315	3,315	Nindya - MCC - Wika - Waskita				
Nindya - Inti	--	--	2,864	2,864	Nindya - Inti				
Nindya - DGI	2,650	--	--	2,650	Nindya - DGI				
Nindya - Sacna	2,571	--	--	2,571	Nindya - Sacna				
Nindya - Tuju Wali Wali	2,318	--	--	2,318	Nindya - Tuju Wali Wali				
Nindya - Catur Perkasa	2,391	(598)	--	1,793	Nindya - Catur Perkasa				
Nindya - Kwarsa Hexagon	5,763	(4,277)	--	1,486	Nindya - Kwarsa Hexagon				
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Miliar)	37,190	(5,873)	(24,258)	2,354	Others (Each below Rp 1 Billion)				
Jumlah	282,126	180	63,283	340,884	Total				

Per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, investasi pada ventura bersama masing-masing sebesar Rp348,689 dan Rp340,884.

As of December 31, 2017 and 2016, investments in joint ventures amounting to Rp348,689 and Rp340,884, respectively.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

19. Pinjaman Investasi Jangka Panjang – Pihak Ketiga

19. Long-term Investment Loans – Third Parties

	2017 Rp	2016 Rp
PT Inti Adhiyasa	29,435	--
PT Gali Terus Sejahtera	26,517	--
PT National Utility Helicopter	24,362	--
Tropisindo Sumber Energi	13,438	--
PT Riscon Duta Sarana	11,624	8,000
PT Prabu Wahana International	5,093	--
Jumlah	110,468	8,000

PT Inti Adhiyasa
PT Gali Terus Sejahtera
PT National Utility Helicopter
Tropisindo Sumber Energi
PT Riscon Duta Sarana
PT Prabu Wahana International
Total

1. PT Inti Adhiyasa

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No 06 tanggal 29 Mei 2017, Perusahaan memberikan Fasilitas Pinjaman kepada PT Inti Adhiyasa berupa pembiayaan pembangunan rumah sederhana untuk proyek perumahan kota Kaharupan Purwakarta dengan saldo maksimum pinjaman senilai Rp 50.000. Bunga kredit sebesar 10% pertahun dengan jangka waktu pinjaman adalah 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian.

Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2017 sebesar Rp41.444. Penerimaan atas pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp12.009. Saldo pada 31 Desember 2017 sebesar Rp29.435.

2. PT Prabu Wahana International

Pada tanggal 13 Januari 2017 PT Prabu Wahana International dan Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Kerja dalam Bentuk Project Financing dengan plafon sebesar Rp24.500 yang akan digunakan untuk pembiayaan penyewaan pesawat di wilayah provinsi Papua dan provinsi Kalimantan Utara. Fasilitas pinjaman tersebut dikenakan suku bunga 12,5% per tahun dengan jangka waktu fasilitas pinjaman selama 48 Bulan sejak di tanda tanganinya perjanjian sampai dengan 13 Januari 2021.

Saldo pada awal tahun sebesar Nihil. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2017 sebesar Rp5.391. Pelunasan pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp298. Saldo pada 31 Desember 2017 sebesar Rp5.093.

1. PT Inti Adhiyasa

Based on the Loan Agreement No. 06 dated May 29, 2017, the Company provides Loan Facility (Project Finance) to PT Inti Adhiyasa to finance the construction of a simple house for a Kaharupan Purwakarta residential project worth Rp50,000. Loan interest is 10% with the maturity period of 24 (twenty four) months starting from the date of signing the Loan Agreement.

Total disbursement of loans in 2017 amounting to Rp41,444. Receipt of loan payment in the current year amounting to Rp12,009. Balance at December 31, 2017 amounting to Rp29,435.

2. PT Prabu Wahana International

On January 13, 2017 PT Prabu Wahana International and The Company has signed an Agreement Working Capital Loan in the Form of Project Financing amounted to Rp 24,500 which will be used as financing aircraft leasing region of the provinces of Papua and Kalimantan North Province. This loan facility is subject to interest at 12.5% per annum. This facility will be due after 48 months as of January 13, 2021.

The beginning balance of the year amounting is Nil. Receipt of loan payment in 2017 amounting to Rp5,391. Payment of the loan in the current year amounting to Rp298. Balance at December 31, 2017 amounting to Rp5,093.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

19. Pinjaman Investasi Jangka Panjang – Pihak Ketiga

3. PT National Utility Helicopters

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No 103 tanggal 22 Desember 2017, Perusahaan memberikan Fasilitas Pinjaman kepada PT National Utility Helicopters dengan total jumlah pokok maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp50.000. Bunga kredit sebesar 17.5% pertahun dengan jangka waktu pinjaman adalah 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian.

Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2017 sebesar Rp24.362. Penerimaan atas pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2017 sebesar Rp24.362.

4. PT Riscon Dutasarana

Pada tanggal 22 Juli 2016 PT Riscon Duta Sarana dan Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Jual beli Surat Utang Konversi No SU-03/PPA/0716 dengan jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp10.000, tingkat suku bunga 5% per tahun dan IRR 35% pada saat pelunasan atau konversi surat utang dilaksanakan. Surat Utang tersebut memiliki jangka waktu selama 24 bulan sejak tanggal efektif dan dapat dikonversi menjadi saham pada PT Riscon Duta Sarana sewaktu-waktu setelah 90 hari sejak tanggal penerbitan pertama kali surat utang. Surat Utang tersebut telah berlaku efektif pada tanggal 3 Agustus 2016.

Saldo awal tahun sebesar Rp8.000. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2017 sebesar Rp3.624. Penerimaan atas pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2017 sebesar Rp11.624.

5. PT Tropisindo Sumber Energi

Pada tanggal 22 Desember 2016 telah ditandatangani Perjanjian Nomor PP-23/PPA/1216 antara Perusahaan dan PT Tropisindo berupa pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga mini hydro ("PLTMh") di sungai air sengkak, kabupaten kepahiang, Provinsi Bengkulu senilai Rp12.000 dengan bunga 12,5% selama 60 bulan.

19. Long-term Investment Loans – Third Parties

3. PT National Utility Helicopters

Based on the Loan Agreement No 103 dated December 22, 2017, the Company provides Loan Facility to PT National Utility Helicopters with total amount of principal maximum of Rp 50,000. Credit interest is 17.5% with the maturity period of 15 (fifteen) months starting from the date of signing the Loan Agreement.

Total disbursement of loans in 2017 amounting to Rp24,362. Receipt of loan payment in the current year amounting to Nil. Balance at December 31, 2017 amounting to Rp24,362.

4. PT Riscon Dutasarana

On July 22, 2016 PT Riscon Duta Sarana and PPA signed the sale and purchase of Bonds Convertible number SU-03 / PPA / 0716 with a maximum total principal amount Rp10,000, with an interest rate of 5% pa and an IRR of 35% at the time of redemption or conversion of debentures held. Bonds with the maturity period is 24 months from the effective date and can be converted into shares of PT Riscon Duta Sarana any time after 90 days from the date of first issuance of debt securities. Bonds has been effective on August 3, 2016.

Beginning balance of the year amounting to Rp8,000. Total disbursement of loans in 2017 amounting to Rp3,624. Receipt of loan payment in the current year amounting to Nil. Balance at December 31, 2017 amounting to Rp11,624.

5. PT Tropisindo Sumber Energi

On December 22, 2016 was signed Agreement No. PP-23 / PPA / 1216 between the Company and PT Tropisindo form of development cooperation projects of mini hydro power plants ("MHP") in river air sengkak, Kepahiang District, Bengkulu provision amounting to Rp12,000 with interest rate 12.5% for 60 months.

19. Pinjaman Investasi Jangka Panjang – Pihak Ketiga

Jumlah pencairan pinjaman di tahun 2017 sebesar Rp13.438. Penerimaan atas pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2017 sebesar Rp13.438.

6. PT Gali Terus Sejahtera

Berdasarkan M-102/PPA/D.2-ID/1017 yang telah di sepakati oleh Perusahaan dan PT Gali Terus Sejahtera. Pemberian Pinjaman berupa Surat Utang dengan plafond sebesar Rp5.100 Fasilitas Surat Utang tersebut dikenakan suku bunga 13% p.a dengan jangka waktu fasilitas pinjaman selama 36 Bulan sejak di tanda tangannya perjanjian. Pinjaman Investasi dengan maksimal plafond sebesar Rp30.000 Fasilitas Pinjaman Investasi tersebut dikenakan suku bunga 13% p.a (termasuk pajak) dengan jangka waktu fasilitas pinjaman selama 30 Bulan sejak di tanda tangannya perjanjian. Sampai dengan May 8, 2020. Bunga yang akan dibayarkan secara Triwulan. Kedua fasilitas yang akan digunakan untuk pembiayaan Pembelian modal barang untuk memenuhi kebutuhan Pengadaan Jasa Proyek Rental Fasilitas Produksi Lapangan Gas Rayu Utara.

Jumlah pencairan pinjaman di tahun 2017 sebesar Rp26.517. Penerimaan atas pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2017 sebesar Rp26.517.

19. Long-term Investment Loans – Third Parties

Total disbursement of loans in 2017 amounting to Rp13,438. Receipt of loan payment in the current year amounting to Nil. Balance at December 31, 2017 amounting to Rp13,438.

6. PT Gali Terus Sejahtera

Based on M-102/PPA/D.2-ID/1017 which has been agreed by the Company and PT Gali Terus Sejahtera. The Company approved to lending Bonds with Rp5,100 plafond with 13% interest rate per annum and loan term period 36 months since the agreement was signed. Investment loan with maximum plafond Rp30,000 with 13% interest rate per annum and loan term period 30 months since the agreement was signed until May 8, 2020. The interest will be paid quarterly. Both facilities will be used for financing Procurement of Rental Project Service Production Facilities in Lapangan Gas Rayu Utara.

Total disbursement of loans in 2017 amounting to Rp26,517. Receipt of loan payment in the current year amounting to Nil. Balance at December 31, 2017 amounting to Rp26,517.

20. Investasi Jangka Panjang Lainnya

20. Other long-term Investment

	2017 Rp	2016 Rp	
PT KNE Global Persada	27,600	11,500	PT KNE Global Persada
PT Asia Kaolinraya	15,000	15,000	PT Asia Kaolinraya
PT Cipta Indah Permata	10,000	10,000	PT Cipta Indah Permata
Ventura Bersama PPAK Rumah Cerdas	3,246	5,246	Ventura Bersama PPAK Rumah Cerdas
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (d/h PT Marga Kunciran Cengkareng)	972	789	PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (d/h PT Marga Kunciran Cengkareng)
Jumlah Investasi Jangka Panjang Lainnya	56,818	42,535	Total Other Long-Term Investment
Dikurangi :			Less :
Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman Dana			Allowance for Impairment of Loans Receivable
PT Asia Kaolinraya	(15,000)	-	PT Asia Kaolinraya
Jumlah Pengurang	(15,000)	-	Total Deduction
Jumlah	41,818	42,535	Total

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

20. Investasi Jangka Panjang Lainnya (Lanjutan)

1. PT Asia Kaolinraya

Perusahaan memiliki Surat Utang Konversi dengan PT Asia Kaolinraya (AKR) sesuai dengan Akta Perjanjian No. 56 tanggal 18 Januari 2016 sebesar Rp15.000 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 30 Desember 2022 yang memiliki tingkat suku bunga 20% per tahun (tidak termasuk pajak).

Pada tahun 2017, PT PPAK membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas investasi ke PT Asia Kaolinraya sebesar Rp15.000.

2. PT Cipta Indah Permata

Perusahaan memiliki Surat Utang Konversi dengan PT Cipta Indah Permata (CIP) sesuai dengan Akta Perjanjian No. 90 tanggal 29 Maret 2016 sebesar Rp 10.000 dengan jangka waktu 33 bulan, dengan tingkat suku bunga 16% per tahun (sudah termasuk pajak).

3. Ventura Bersama PPAK Rumah Cerdas

Perusahaan memberikan fasilitas pinjaman kepada Ventura Bersama PPAK Rumah Cerdas dengan Akta Nomor 75 tanggal 28 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M. Notaris di Jakarta. Jumlah pokok fasilitas pinjaman keseluruhan sebesar Rp9.000 yang memiliki jangka waktu 36 bulan dengan tingkat suku bunga 18% per tahun netto. Realisasi pinjaman per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp3.246.

4. PT KNE Global Persada

Perusahaan memiliki Surat Utang Konversi dengan PT KNE Global Persada (KNE) sesuai dengan Akta Perjanjian No. 86 tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp15.000, dengan jangka waktu dari mulai tanggal efektif sampai dengan 31 Desember 2025, yang memiliki tingkat suku bunga 16% per tahun (sudah termasuk pajak). Realisasi surat utang per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp11.500.

Pada Januari dan Maret 2017 telah dilakukan pencairan atas sisa plafond Surat Utang Konversi PT KNE sejumlah Rp3.500.

Perusahaan memiliki Surat Utang Konversi kedua dengan PT KNE sesuai dengan Akta Perjanjian No. 59 tanggal 26 Mei 2017 sebesar Rp12.600, dengan jangka waktu perjanjian satu tahun sejak tanggal efektif, yang memiliki tingkat suku bunga 11% per tahun (sudah termasuk pajak).

Saldo pada 31 Desember 2017 sebesar Rp27.600

20. Other long-term Investment (Continued)

1. PT Asia Kaolinraya

The Company has Convertible Bonds with PT Asia Kaolinraya (AKR) based on Deed of Agreement No. 56 dated January 18, 2016 amounted to Rp 15,000 starting from the effective date until 30 December 2022 with gross interest rate of 20% per annum (excluded tax).

In 2017, PT PPAK make an allowance for impairment losses on investment to PT Asia Kaolinraya amounting to Rp15,000.

2. PT Cipta Indah Permata

The Company has Convertible Bonds with PT Cipta indah Permata (CIP) based on Deed of Agreement No. 90 dated March 29, 2016 amounted to Rp10,000 with period of 33 months term and net interest rate of 16% per annum (included tax).

3. Joint Venture PPAK Rumah Cerdas

The Company provides a loan facility to Joint Venture PPAK Rumah Cerdas by Deed No. 75 dated March 28, 2016, made by Mala Mukti, S.H., LL.M. notary in Jakarta. The principal amount of overall loan facility is Rp9,000 with period of 36 months and interest of 18% net rate per annum. Loan realized as of December 31, 2017 amounted to Rp3,246.

4. PT KNE Global Persada

The Company has Convertible Debt Securities with PT KNE Global Persada (KNE) based on the Agreement Deed No. 86 dated August 30, 2016 amounted to Rp15,000, starting from the effective date until December 31, 2025 with net interest rate of 16% per annum (included tax). The realized convertible debt securities as of December 31, 2016 amounted to Rp11,500.

In January and March 31, 2017 total disbursement Convertible Debt Securities of PT KNE amounted to Rp3,500.

The Company has Convertible Debt Securities with PT KNE Global Persada (KNE) based on the Agreement Deed No. 59 dated May 26, 2017 amounted to Rp12,600, with maturity date one year from the effective date of the agreement, the interest rate of the Convertible Debt Securities 11% per annum (included tax)

Balance at December 31, 2017 amounting to Rp27,600.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

20. Investasi Jangka Panjang Lainnya (Lanjutan)

5. PT Marga Kunciran Cengkareng

Pada tahun 2011, PT NK bermaksud untuk melepaskan kepemilikan sahamnya sesuai surat No. 0612/DUT/SEKPER/07/2011 tanggal 21 Juli 2011 dan sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris berdasarkan surat No. 95/kom/07/2011 tertanggal 22 Juli 2011.

Berdasarkan Surat No. 12/MKC/II/2013 tanggal 25 Januari 2013, PT Marga Kunciran Cengkareng bermaksud membentuk kepanitiaan bersama antara PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT NK dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

PT NK memutuskan untuk membatalkan pelepasan saham PT Marga Kunciran Cengkareng, yang kemudian dibatalkan berdasarkan surat No. 1197/DIRUT/SEKPER/10/2014 Tanggal 20 Oktober 2014.

Sesuai dengan surat No. 191/MKC-AA/XII/2014 Tanggal 22 Desember 2014, para pemegang saham setuju untuk melakukan RUPS Pembatalan Pelepasan Saham PT NK (Persero) di PT Marga Kunciran Cengkareng.

Pada tanggal 29 Juni 2015, Perusahaan melakukan pembayaran tambahan setoran modal kepada PT Marga Kunciran Cengkareng sebesar Rp46 atau sebesar 0,28% dari total saham yang dikeluarkan berdasarkan Akta No.01 tanggal 6 Agustus 2015 oleh Notaris Efemia Surjawati Salim, S.H., M.Hum.

Pada tanggal 25 Agustus 2015, Perusahaan melakukan pembayaran tambahan setoran modal kepada PT Marga Kunciran Cengkareng sebesar Rp46 atau sebesar 0,28% dari total saham yang dikeluarkan. Berdasarkan surat PT Marga Kunciran Cengkareng No.42/MKC/IV/ 2015 pada tanggal 20 April 2015 perihal setoran modal. Sampai dengan laporan diterbitkan, akta penambahan setoran modal masih dalam proses pengurusan.

Pada tanggal 6 Januari 2016, Perusahaan melakukan pembayaran tambahan setoran modal kepada PT Marga Kunciran Cengkareng sebesar Rp48 atau sebesar 0,28% dari total saham yang dikeluarkan berdasarkan surat PT Marga Kunciran Cengkareng No.132/MKC/XI/2015 pada tanggal 12 November 2015 perihal setoran modal.

20. Other long-term Investment (Continued)

5. PT Marga Kunciran Cengkareng

In 2011, PT NK has intention to divest its shares ownership according to letter No. 0612/DUT/SEKPER/07/2011 on July 21, 2011 and has approved by Board of Commissioners based on the letter No. 95/kom/07/2011, dated July 22, 2011.

Based on the letter No. 12/MKC/II/2013 dated January 25, 2013, PT Marga Kunciran Cengkareng intends to build a Joint Committee between PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT NK and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

PT NK decided to cancel the release of shares PT Marga Kunciran Cengkareng, based on letter No. 1197/DIRUT/SEKPER/10/2014 dated October 20, 2014.

Based on the letter No. 191/MKC-AA/XII/2014 on December 22, 2014, The shareholders agreed to do RUPS about cancellation of releasing shares of PT NK on PT Marga Kunciran Cengkareng.

On June 29, 2015 the Company paid additional shares to PT Marga Kunciran Cengkareng amounting to Rp46 or 0.28% of total shares issued based on Deed No.01 dated August 6, 2015 notarial deed by Efemia Surjawati Salim, S.H., M.Hum.

On August 25, 2015 the Company paid additional shares to PT Marga Kunciran Cengkareng amounting to Rp46 or 0.28% of total share issued. Based on PT Marga Kunciran letter No. 42/MKC/IV/2015 dated April 20, 2015 regarding additional paid up capital. As to the date of this report issuance, the Deed is still in process.

On January 6, 2016 the Company paid additional shares to PT Marga Kunciran Cengkareng amounting to Rp48 or 0.28% of total share issued based on PT Marga Kunciran letter No. 132/MKC/XI/2015 dated November 12, 2015 regarding additional paid up capital.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

20. Investasi Jangka Panjang Lainnya (Lanjutan)

Pada tanggal 19 Februari 2016, Perusahaan melakukan pembayaran tambahan setoran modal kepada PT Marga Kunciran Cengkareng sebesar Rp45 atau sebesar 0,28% dari total saham yang dikeluarkan berdasarkan surat PT Marga Kunciran Cengkareng No.12a/MKC/II/2016 pada tanggal 16 Februari 2016 perihal setoran modal.

Pada tanggal 19 Februari 2016, Perusahaan melakukan pembayaran tambahan setoran modal kepada PT Marga Kunciran Cengkareng sebesar Rp45 atau sebesar 0,28% dari total saham yang dikeluarkan berdasarkan surat PT Marga Kunciran Cengkareng No.12a/MKC/II/2016 pada tanggal 16 Februari 2016 perihal setoran modal.

Pada tanggal 23 Mei 2016, Perusahaan melakukan pembayaran tambahan setoran modal kepada PT Marga Kunciran Cengkareng sebesar Rp71 atau sebesar 0,28% dari total saham yang dikeluarkan berdasarkan surat PT Marga Kunciran Cengkareng No.44/MKC/V/2016 pada tanggal 10 Mei 2016 perihal setoran modal.

Pada tanggal 9 Agustus 2016, Perusahaan melakukan pembayaran tambahan setoran modal kepada PT Marga Kunciran Cengkareng sebesar Rp34 atau sebesar 0,28% dari total saham yang dikeluarkan berdasarkan surat PT Marga Kunciran Cengkareng No.84/MKC/VII/2016 pada tanggal 27 Juli 2016 perihal setoran modal.

Pada tanggal 19 Mei 2017, Perusahaan melakukan pembayaran tambahan setoran modal kepada PT Marga Kunciran Cengkareng sebesar Rp42 atau sebesar 0,28% dari total saham yang dikeluarkan berdasarkan surat PT Marga Kunciran Cengkareng No.130/JKC/IV/2017 pada tanggal 27 April 2017 perihal permohonan penambahan setoran modal.

Pada tanggal 4 Agustus 2017, Perusahaan melakukan pembayaran tambahan setoran modal kepada PT Marga Kunciran Cengkareng sebesar Rp71 atau sebesar 0,28% dari total saham yang dikeluarkan berdasarkan surat PT Marga Kunciran Cengkareng No.200/JKC/VII/2017 pada tanggal 21 Juli 2017 perihal permohonan tambahan setoran modal.

Pada tanggal 29 November 2017, Perusahaan melakukan pembayaran tambahan setoran modal kepada PT Marga Kunciran Cengkareng sebesar Rp19 atau sebesar 0,28% dari total saham yang dikeluarkan berdasarkan surat PT Marga Kunciran Cengkareng No.321/JKC/XI/2017 pada tanggal 7 November 2017 perihal revisi permohonan tambahan setoran modal.

20. Other long-term Investment (Continued)

On February 19, 2016 the Company paid additional shares to PT Marga Kunciran Cengkareng amounting to Rp45 or 0.28% of total share issued based on PT Marga Kunciran letter No. 12a/MKC/II/2016 dated February 16, 2016 regarding additional paid up capital.

On February 19, 2016 the Company paid additional shares to PT Marga Kunciran Cengkareng amounting to Rp45 or 0.28% of total share issued based on PT Marga Kunciran letter No. 12a/MKC/II/2016 dated February 16, 2016 regarding additional paid up capital.

On May 23, 2016 the Company paid additional shares to PT Marga Kunciran Cengkareng amounting to Rp71 or 0.28% of total share issued based on PT Marga Kunciran letter No. 44/MKC/V/2016 dated May 10, 2016 regarding additional paid up capital.

On August 9, 2016 the Company paid additional shares to PT Marga Kunciran Cengkareng amounting to Rp34 or 0.28% of total share issued based on PT Marga Kunciran letter No. 84/MKC/VII/2016 dated July 27, 2016 regarding additional paid up capital.

On May 19, 2017 the Company paid additional paid up capital to PT Marga Kunciran Cengkareng amounting to Rp42 or 0.28% of total share issued based on PT Marga Kunciran letter No. 130/JKC/IV/2017 dated April 27, 2017 regarding additional paid up capital request.

On August 4, 2017 the Company paid additional capital to PT Marga Kunciran Cengkareng amounting to Rp71 or 0.28% of total share issued based on PT Marga Kunciran letter No. 200/JKC/VII/2017 dated July 21, 2017 regarding additional paid up capital request.

On November 29, 2017 the Company paid additional paid up capital to PT Marga Kunciran Cengkareng amounting to Rp19 or 0.28% of total share issued based on PT Marga Kunciran letter No. 321/JKC/XI/2017 dated November 7, 2017 regarding additional paid up capital request.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

20. Investasi Jangka Panjang Lainnya (Lanjutan)

20. Other long-term Investment (Continued)

Pada tanggal 14 Desember 2017, berdasarkan akta pernyataan keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham perseroan terbatas PT Jasamarga Kunciran Cengkareng, No. 15, nilai nominal saham PT Nindya Karya adalah Rp971 dengan total lembar saham 106.786.

On December 14, 2017, based on the deed of shareholder decree statement outside the general meeting of shareholders of PT Jasamarga Kunciran Cengkareng, no. 15, the par value of PT Nindya Karya shares is Rp971 with total shares of 106,786 shares.

21. Aset Tetap

21. Property, Plant and Equipment

2017						
1 Januari / January 1	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Surplus Revaluasi/ Revaluation Surplus	31 Desember December 31	
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan:						Acquisition Cost:
Kepemilikan Langsung						Direct Ownership
Tanah	207,022	--	8,783	264,435	480,240	Lands
Gedung	40,278	3,895	58,492	--	101,077	Buildings
Kendaraan Bermotor	15,355	3,859	(1,588)	--	17,626	Vehicles
Peralatan Proyek	88,903	33,178	74,848	--	196,929	Project Equipments
Peralatan Kantor	20,678	10,191	9	60	30,920	Office Equipments
Prasarana Umum	--	--	11,023	--	11,023	Public Infrastructure
Aset Dalam Penyelesaian	110,624	40,994	(151,618)	--	--	Asset in Progress
Jumlah	482,860	92,117	1,598	264,435	837,815	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Kepemilikan Langsung						Direct Ownership
Gedung	18,290	6,855	1,589	--	23,556	Buildings
Kendaraan Bermotor	14,344	2,410	--	--	16,754	Vehicles
Peralatan Proyek	48,008	16,221	--	--	64,229	Project Equipments
Peralatan Kantor	16,053	--	9	--	16,044	Office Equipments
Prasarana Umum	--	609	--	--	609	Public Infrastructure
Jumlah	96,695	26,096	1,598	--	121,193	Total
Nilai Tercatat	386,165				716,622	Carrying Value
2016						
1 Januari / January 1	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Surplus Revaluasi/ Revaluation Surplus	31 Desember/ December 31	
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan:						Acquisition Cost:
Kepemilikan Langsung						Direct Ownership
Tanah	219,433	5,937	(18,348)	--	207,022	Lands
Gedung	123,608	4,495	(96,985)	9,160	40,278	Buildings
Kendaraan Bermotor	15,591	488	(724)	--	15,355	Vehicles
Peralatan Proyek	96,326	14,957	(26,755)	4,375	88,903	Project Equipments
Peralatan Kantor	17,365	3,313	--	--	20,678	Office Equipments
Aset Dalam Penyelesaian	45,570	96,244	(17,655)	(13,535)	110,624	Asset in Progress
Jumlah	517,893	125,434	(160,467)	--	482,860	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Kepemilikan Langsung						Direct Ownership
Gedung	19,757	2,255	(3,722)	--	18,290	Buildings
Kendaraan Bermotor	14,044	1,024	(724)	--	14,344	Vehicles
Peralatan Proyek	45,049	5,114	(2,155)	--	48,008	Project Equipments
Peralatan Kantor	14,452	1,601	--	--	16,053	Office Equipments
Jumlah	93,302	9,994	(6,601)	--	96,695	Total
Nilai Tercatat	424,591				386,165	Carrying Value

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

21. Aset Tetap (Lanjutan)

Nilai aset tanah tercatat 31 Desember 2017 berdasarkan laporan penilai independen yang menggunakan nilai pasar wajar tahun 2017 oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan, Dolly S & Rekan, Toto Suharto & Rekan, Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan. Surplus revaluasi dicatat sebesar Rp264.435 per 31 Desember 2017.

Perusahaan memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatra, Sulawesi dan Papua dengan hak legal berupa SHGB atas nama PT NK.

Penjualan aset tetap tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017 Rp	2016 Rp
Harga Jual Aset Tetap	9	251,563
Nilai Buku Tercatat	--	(153,866)
Keuntungan Penjualan Aset Tetap - Bersih	9	97,697

Beban penyusutan atas aset tetap dicatat pada beban usaha (Catatan 33)

Aset tetap, berupa tanah dan bangunan dijadikan jaminan atas perolehan kredit dari Indonesia Eximbank, PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 23).

Aset Tetap diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp46.283 terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya pada PT Asuransi Adira Dinamika, PT ASEI Asuransi Indonesia (Persero), PT Mandiri AXA General Insurance, PT Asuransi Tripakarta, PT Asuransi Jasindo, PT Asuransi Jasa Tania Tbk, dan PT Asuransi Central Asia.

Berdasarkan penelaahan Manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap, sehingga Manajemen tidak membentuk cadangan penurunan nilai aset tetap pada 31 Desember 2017.

22. Utang Usaha

	2016 Rp	2017 Rp
Pihak Berelasi	71,476	1,501
Pihak Ketiga	1,526,517	1,335,669
Jumlah	1,597,993	1,337,170

21. Property, Plant and Equipment (Continued)

The fair value of investment property as of December 31, 2017 are estimated by KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan, Dolly S & Rekan, Toto Suharto & Rekan, Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan independent appraisal. Surplus revaluation of fixed asset as of December 31, 2017 amounted to Rp 264,435.

The Company owns several of land that are located in Jakarta, West Java, East Java, Central Java, Bali, East Nusa Tenggara, West Nusa Tenggara, Sumatra, Sulawesi, and Papua with legal rights in SHGB under the name of PT NK.

Sale of property, plant and equipment in 2017 and 2016 are as follows:

		Selling Price of Fixed Assets
		Carrying Book Value
		Gain on Sale of Property, Plant and Equipment

Depreciation expense on property, plant and equipment recorded in operating expenses (Notes 33)

Property, plant and equipment such as land and buildings are used as collateral for loans in Indonesia Eximbank, PT Sarana Multi Infrastruktur and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Note 23).

Property, Plant and Equipment are insured with coverage value amounting to Rp46,283 against the risk of fire accident and others to PT Asuransi Adira Dinamika, PT ASEI Asuransi Indonesia (Persero), PT Mandiri AXA General Insurance, PT Asuransi Tripakarta, PT Asuransi Jasindo, PT Asuransi Jasa Tania Tbk, dan PT Asuransi Central Asia.

Based on Management review, there are no events or changes in circumstances indicating impairment of property, plant, and equipment, the Management does not provide allowance for impairment of property plant and equipment as of December 31, 2017.

22. Accounts Payable

	2016 Rp	2017 Rp
Pihak Berelasi	71,476	1,501
Pihak Ketiga	1,526,517	1,335,669
Jumlah	1,597,993	1,337,170

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

23. Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan

23. Bank and Financial Institution Loans

	2017 Rp	2016 Rp
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Pendek		
Pihak Berelasi		
<u>Perusahaan</u>		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	189,145	--
<u>Entitas Anak</u>		
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	70,000	130,822
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	70,000	--
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	70,000	--
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	195	--
Jumlah	399,340	130,822
Pihak Ketiga		
<u>Perusahaan</u>		
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	271,192	--
Shinhan Bank Indonesia	81,778	--
PT Bank Pembangunan Daerah Banten	50,000	--
PT Bank CIMB Niaga Tbk	--	157,677
<u>Entitas Anak</u>		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	120,000	177,825
PT Bank Pembangunan Daerah Banten	27,707	17,263
PT Bank Victoria International Tbk	--	45,000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	--	142
Jumlah	550,677	397,907
Jumlah Pinjaman Jangka Pendek	950,017	528,729
Bagian Pinjaman Jangka Panjang yang Akan Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun		
Pihak Berelasi		
<u>Entitas Anak</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	35,616	--
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	23,935	--
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	23,518
Jumlah	59,551	23,518
Pihak Ketiga		
<u>Entitas Anak</u>		
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	17,557	3,587
PT Bank Pembangunan Daerah Jateng	16,435	--
Jumlah	33,992	3,587
Jumlah	93,543	27,105
Pinjaman Bank Jangka Panjang dan Non Bank Jangka Panjang		
Pihak Berelasi		
<u>Entitas Anak</u>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	85,000	28,804
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	70,528	34,550
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	47,350	--
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	30,000	90,000
Jumlah	232,878	153,354
Pihak Ketiga		
<u>Entitas Anak</u>		
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	50,655	53,410
PT Bank Pembangunan Daerah Banten	34,453	48,906
PT Bank Pembangunan Daerah Jateng	1,810	--
Medium Term Notes	600,000	240,000
Jumlah	686,918	342,316
Jumlah Pinjaman Jangka Panjang	1,013,339	522,775

Short Term Bank and Financial Institution Loans

Related Parties
<u>The Company</u>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
<u>Subsidiaries</u>
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Total
Third Party
<u>The Company</u>
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Shinhan Bank Indonesia
PT Bank Pembangunan Daerah Banten
PT Bank CIMB Niaga Tbk
<u>Subsidiaries</u>
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Banten
PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Total
Total Short Term Loans

**Current Maturities of
Long Term Loans**

Related Parties
<u>Subsidiaries</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Total
Third Parties
<u>Subsidiaries</u>
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jateng
Total
Total

Long Terms Bank and Financial Institution Loans

Related Parties
<u>Subsidiaries</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Total
Third Parties
<u>Subsidiaries</u>
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Banten
PT Bank Pembangunan Daerah Jateng
Medium Term Notes
Total
Total Long Term Loans

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**23. Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan
(Lanjutan)**

1) PT Bank CIMB Niaga Tbk

Perusahaan

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.076/PK/CB/JKT/2016 tanggal 29 Juni 2016 (Legalisasi Notaris Desman, S.H. Hum. No.98/Leg/VI/2016) Perusahaan mendapatkan pinjaman kredit dari PT Bank CIMB Niaga Tbk, dengan jumlah pokok maksimum sebesar Rp250.000 dengan tingkat suku bunga kredit sebesar tingkat suku bunga deposito ditambah 1,5%. Jangka waktu Fasilitas Pinjaman 12 (dua belas) bulan dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit, mulai dari tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017. Pinjaman tersebut digunakan untuk Pembiayaan modal kerja atas proyek-proyek Perusahaan, Fidusia atas tagihan setiap proyek-proyek yang dikerjakan oleh Perusahaan baik yang telah ada maupun yang akan ada dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari jumlah fasilitas kredit.

Saldo awal tahun 2017 sebesar Rp157.677. Total pencairan selama tahun berjalan sebesar Nihil. Pembayaran atas pinjaman bank pada tahun berjalan sebesar Rp157.677. Saldo pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Nihil.

PT PPAF

Pada tanggal 22 Agustus 2015 Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan nilai pinjaman sebesar Rp15.000. Jangka waktu kredit satu tahun dihitung sejak penandatanganan kredit sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016. Bunga kredit sebesar 13,5% per tahun, dan sampai dengan 31 Desember 2016 PPAF masih dalam proses perpanjangan kredit. Atas pinjaman ini perusahaan wajib menyerahkan fidusia piutang sebesar 125% dari plafond pinjaman.

Saldo pada awal tahun 2017 sebesar Rp142. Total pencairan selama tahun berjalan sebesar Nihil. Pelunasan pada tahun berjalan Rp142. Saldo pada 31 Desember 2017 sebesar Nihil.

**23. Bank and Financial Institution Loans
(Continued)**

1) PT Bank CIMB Niaga Tbk

The Company

Based on Credit Agreement No.076 / PK / CB / JKT / 2016 dated June 29, 2016 (Notarial Legalization Desman, S.H. Hum. 98 / Leg / VI / 2016) the Company get a credit loan from PT Bank CIMB Niaga Tbk with a maximum principal amounting to Rp250,000 at the rate of + 1.5% Time Deposit and Duration Loan Facility twelve (12) months from the signing of the Credit Agreement, from the date of June 29, 2016 until June 29, 2017. The loan is for working capital financing on the Company's project, Fiduciary top of the bill for any projects undertaken by the Company either existing or to be there with the guarantee amount of 100% of the credit facility.

Balance at the beginning of the year 2017 amounting to Rp157,677. Total drawdown of loans in current year amounting to Nil. Repayment of Bank loan amounting to Rp157,677. Balance as of December 31, 2017 amounting to Nil.

PT PPAF

On August 22, 2015 the Company signed a Working Capital Credit Agreement with a loan value of Rp15,000. Credit period of one year from the signing of the loan up to October 22, 2016. Interest rate of 13.5% per year, and up to December 31, 2016, PPAF is still in the process of credit extension. On this loan companies are required to submit a fiduciary accounts receivable amounting to 125% of the loan ceiling.

Balance at the beginning of the year 2017 amounted to Rp142. Total drawdown of loan in current year is Nil. Repayment of the loan amounting to Rp142. Balance as of December 31, 2017 is Nil.

**23. Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan
(Lanjutan)**

**2) Shinhan Bank Indonesia
Perusahaan**

Berdasarkan Perjanjian No.38 tanggal 27 Desember 2017 dihadapan notaris Glenna Martin, SH. MKn., Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan Shinhan Bank Indonesia. Plafond pinjaman tersebut sebesar Rp100.000. Pinjaman tersebut adalah fasilitas pinjaman yang bersifat revolving. Tingkat suku bunga pinjaman tersebut adalah 8.75% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2018.

Saldo pada awal tahun 2017 adalah Nihil. Total pencairan fasilitas pinjaman di tahun 2017 sebesar Rp81.778, dan pelunasan sebesar Nihil. Saldo per 31 Desember 2017 Rp81.778.

**3) PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Perusahaan**

Berdasarkan Perjanjian kredit No.23 tanggal 28 September 2017 dihadapan notaris Notaris Veronica Nataadmadja, SH. M Corp. M Com Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank China Construction Bank Indonesia dengan Plafond pinjaman tersebut sebesar Rp400.000. Tingkat suku bunga pinjaman tersebut adalah 8.75% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan dari 28 September 2017 sampai 28 September 2018.

Saldo pada awal tahun 2017 adalah Nihil. Total pencairan fasilitas pinjaman selama tahun 2017 sebesar Rp427.649, dan pelunasan sebesar Rp156.457. Saldo per 31 Desember 2017 Rp271.192

**4) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PT NK**

Berdasarkan surat persetujuan kredit No. PDB/SP3/33/2017 tanggal 07 Juni 2017, Perusahaan, memperoleh kredit modal kerja dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, antara lain:

- 1) Fasilitas Pembiayaan Kredit Modal Kerja Ekspor
 - a. Pagu kredit yang diberikan Rp400.000;
 - b. Tujuan penggunaan untuk proyek-proyek luar negeri ataupun proyek dalam negeri yang terkait/menunjang perdagangan internasional (ekspor);

**23. Bank and Financial Institution Loans
(Continued)**

**2) Shinhan Bank Indonesia
The Company**

Based on Credit Agreement No. 38 dated December 27, 2017 (Notarial Legalization Glenna Martin SH. MKn., the Company get credit loan from Shinhan Bank Indonesia. Maximum principle amounting to Rp100,000. The loan is a revolving loan facility. The loan interest rate is 8,75% per annum with a loan term of twelve (12) months and matures on December 28, 2018.

Balance at the beginning of the year 2017 is Nil. Total drawdown of loans in 2017 amounting to Rp81,778. Repayment of the loan is Nil. Balance as of December 31, 2017 amounting to Rp81,778.

**3) PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
The Company**

Based on Loan Agreement No. 23 dated September 28, 2017 in front of Notary Veronica Nataadmadja., the Company get loan from PT Bank China Construction Bank Indonesia with maximum plafond amounting to Rp400,000. Loan interest rate is 8.75% per annum with duration loan of facility twelve (12) months from September 28, 2017 until September 28, 2018.

Balance at the beginning of the year 2017 amounting to Nil. Total drawdown of loans in 2017 amounting to Rp427,649. Repayment of the loan amounting to Rp156,457. Balance as of December 31, 2017 amounting to Rp271,192

**4) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PT NK**

Based on the credit agreement letter No. PDB/SP3/33/2016 date June 07, 2017, the Company, obtained working capital loan from Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, such as:

- 1) Financing facility of Working Capital Export Credit
 - a. Maximum limit of Rp400,000;
 - b. The purpose of use is for overseas or domestic projects, which related to projects that support international trade (exports);

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**23. Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan
(Lanjutan)**

- c. Jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan 9 Juni 2018;
- d. Jaminan berupa:
- Piutang atas kontrak yang dibiayai dan/atau dijamin oleh LPEI minimal 125% dari total pagu kredit (Catatan 6);
 - Tanah dan Bangunan diatas SHGB No. 19 yang berlokasi di Jl. Padma No. 6 Kotamadya Denpasar, Bali atas nama Perusahaan diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp1.918 (Catatan 21);
 - Tanah dan Bangunan di atas SHGB No. 352 yang berlokasi di Jl. Ciung Wanara No. 1 Kabupaten Badung, Bali atas nama Perusahaan telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp4.862 (Catatan 21);
 - Tanah dan Bangunan di atas SHGB No. 3 dan SHGB No. 4 yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk No. 129-A, Desa Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Bali atas nama Perusahaan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp11.563 (Catatan 21);
 - Tanah dan Bangunan di atas SHGB No. 65 dan SHGB No. 75 yang berlokasi di Jl. Majapahit No. 36, Kelurahan Ampenan Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat atas nama Perusahaan diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp10.133 (Catatan 21);
 - Tanah dan Bangunan di atas SHGB No. 356 yang berlokasi di Jl. Parikesit No. 10, Kelurahan Cakranegara Barat, Cakranegara, Nusa Tenggara Barat, atas nama Perusahaan diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp999 (Catatan 21).
 - Tanah di atas SHGB No. 1347 yang berlokasi di Jl. Cisait, Kelurahan Walantaka, Kragilan, Serang, Banten

**23. Bank and Financial Institution Loans
(Continued)**

- c. The period is for 1 (one) year, starting June 9, 2017 until June 9, 2018;
- d. Collaterals:
- Accounts receivable over a contract that financed and/or guaranteed by LPEI minimum 125% of total Maximum limit (Note 6);
 - Land and buildings on SHGB No. 19 located at Jl. Padma No.6 Kotamadya Denpasar, Bali registered under the name of Company tied with mortgage right amounting to Rp1,918 (Note 21);
 - The land and building on SHGB No. 352, located at Jl. Ciung Wanara no.1 Bandung registered under the name of Company tied with mortgage right amounting to Rp4,862 (Note 21);
 - The land and building on SHGB No. 3 and SHGB No. 4 located on Jl. Hayam Wuruk No. 129-A Sumerta Kelod Village, East Denpasar, Bali registered under the name of Company tied with mortgage right amounting to Rp11,563, (Note 21);
 - The land and building on SHGB No. 65 and SHGB No. 75 located at Jl. Majapahit No. 36, Ampenan Selatan Village, Mataram, West Nusa Tenggara registered under the name of Company tied with mortgage right amounting to Rp10,133 (Note 21);
 - The land and building on SHGB No. 356, located at Jl. Parikesit No.10, West Cakranegara Village, Cakranegara, West Nusa Tenggara, registered under the name of Company tied with mortgage right amounting to Rp999 (Note 21).
 - The Land on SHGB No. 1347, located at Jl. Cisait, Walantaka Village, Kragilan, Serang, Banten.

**23. Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan
(Lanjutan)**

**23. Bank and Financial Institution Loans
(Continued)**

- 2) Fasilitas Pinjaman Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- Pagu kredit yang diberikan Rp200.000;
 - Penerbitan Jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan baik dalam negeri maupun luar negeri yang menunjang kegiatan ekspor;
 - Suku bunga kredit sebesar 9,8% per tahun.
 - Jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 9 Juni 2017 sampai dengan 9 Juni 2018;.

Saldo pada awal tahun 2017 sebesar Rp130.822. Total pencairan pinjaman di tahun 2017 sebesar Rp879.900. Pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp940.722. Saldo pada 31 Desember 2017 sebesar Rp70.000.

**3) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT NK**

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) (SP3K) No. 743/KOM-KKI/2017 tanggal 29 September 2017, PT NK mendapatkan pinjaman dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB), sebagai berikut:

- Jenis fasilitas kredit yaitu KMKK Standby Loan
- Pagu kredit Rp300.000.
- Suku bunga kredit sebesar 10,5%
- Tujuan:
Modal kerja usaha jasa konstruksi dan pengadaan untuk proyek yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD/BUMN.

2) *Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Loan Facilities*

- Maximum limit amounting to Rp200,000;*
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Surety issuance for infrastructure projects undertaken in both domestic and foreign, which support export activities;*
- Credit interest rate amounted to 9.8% per year.*
- The period is for 1 (one) year, starting June 9, 2017 until June 9, 2018.*

The beginning balance of the year 2017 amounting to Rp130,822. Total drawdown of loans in 2017 amounting to Rp879,900. Payment of the loan in the current year amounting to Rp940,722. The outstanding balance at December 31, 2017 amounting to Rp70,000.

**3) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT NK**

Based on the Notice of Credit Approval (SP3K) No. 07/KOM-KKI/2017 dated September 29, 2017, PT NK obtained loans from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk as follows:

- Type of credit facility is KMKK Standby Loan*
- Maximum limit of credit maximum to Rp300,000.*
- Credit interest rate is 10.5%*
- Purposes:
Working capital of construction and procurement services for the project which the funds originate from APBN / APBD / SOE.*

**23. Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan
(Lanjutan)**

- Fasilitas *Cash Loan* maksimum sebesar Rp350.000, yang dapat ditarik untuk pembiayaan proyek sedangkan Fasilitas *Non Cash Loan* maksimum sebesar Rp350.000.
 - Fasilitas kredit *Non Cash Loan* per sub pagu kredit dapat berubah menjadi fasilitas kredit *Cash Loan* per sub pagu kredit apabila Fasilitas sub pagu kredit *Non Cash Loan* tersebut dinyatakan wanprestasi/default. Selanjutnya atas seluruh fasilitas akan dilakukan *stop booking* (tidak dapat dicairkan) sampai dengan fasilitas sub pagu kredit yang wanprestasi/default telah dilunasi oleh debitur.
 - Fasilitas *Non Cash Loan* dapat digunakan sebagai sarana disposisi untuk transaksi seperti SKBDN, L/C, Bank Garansi, dan Hedging.
- Jangka Waktu
12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo kredit sebelumnya 11 April 2017 sampai dengan 11 April 2018.

Saldo awal tahun 2017 sebesar Rp177.825. Total pencairan pinjaman di tahun 2017 sebesar Rp479.500. Pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp537.325. Saldo per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp120.000.

**4) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT NK**

- 1) Berdasarkan Surat No. BIN/2.2/816/R tanggal 11 November 2015 serta amandemen No.BIN/2.2/222/R tanggal 23 Maret 2016, dan amandemen Surat No. BIN/2.2/120 tanggal 10 Juli 2017, PT NK mendapatkan kredit modal kerja dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk perihal penambahan fasilitas kredit kerja transaksional.

**23. Bank and Financial Institution Loans
(Continued)**

- The maximum of *Cash Loan Facility* is Rp350,000, which could be drawn for project financing, while the maximum of *Non-Cash Loan Facility* is Rp350,000.
 - Sub-Plafon of *Non Cash Loan Credit Facility* can be turned into sub-plafon *Cash Loan Credit Facility* if the sub-plafon *Non Cash Loan Facility* is declared in default. Furthermore, the entire facilities will be stopped booking (could not be drawn) until the default sub-plafon facilities have been paid by the debtor.
 - *Non-Cash Loan Facility* can be used as a mean of disposition for such transactions, such as SKBDN, L/C, Bank Bond, and Hedging.
- Time Period
12 (twelve) months after the previous credit's due date on April 11, 2017 until April 11, 2018.

The beginning balance of the year 2017 amounting to Rp177,825. Total drawdown of loans in 2017 amounting to Rp479,500. Repayment of the loan in the current year amounting to Rp537,325. Balance at December 31, 2017 amounting to Rp120,000.

**4) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT NK**

- 1) Based on the letter No. BIN/2.2/816/R dated November 11, 2015, and amendment letter No.BIN/2.2/222/R dated March 23, 2016 and amendment letter BIN/2.2/120 dated July 10, 2017, PT NK obtained working capital loans from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk regarding to the addition of transactional working loan facility.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**23. Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan
(Lanjutan)**

**23. Bank and Financial Institution Loans
(Continued)**

Jaminan

- Tanah/Bangunan kantor serta gudang di Jl. Majapahit No. 496 Kel. Tlogomulyo, Kec. Genuk, Semarang, Jateng di atas SHGB No. 2 dan SHGB No. 111 atas nama PT NK (Catatan 21).
- Tanah/Bangunan rumah tinggal di Jl. Tenggilis Tengah No. 4, Kel. Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, kotamadya Surabaya, Jawa Timur dengan SHGB No. 721 dan SHGB No. 725 atas nama PT NK (Catatan 21)).
- Tanah/Bangunan di Jl. Wolter Monginsidi No. 159, Kel. Gulak Galik, Kec. Teluk Betung Utara, Kotamadya Bandar Lampung, Lampung dengan SHGB No. 05 atas nama PT NK (Catatan 21).
- Tanah di Gg. Wongso, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Medan, Sumatera Utara dengan SHGB No. 546 atas nama PT NK (Catatan 21).
- Tanah/Bangunan kantor serta gudang di Jl. Surabaya Mojokerto KM 23 Ds. Sidorejo, Krian, Sidoarjo, Jatim di atas SHGB No. 2 atas nama PT NK (Catatan 21).
- Tanah/Bangunan rumah tinggal serta gudang terletak di Jl. Bonto Sunggu No. 22 Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Makassar, Sul-Sel di atas SHGB No. 20005/Manuruki (d/h 4197/Mangasa) atas nama PT NK (Catatan 21).
- Tanah/Bangunan rumah tinggal di Jl. Pembangunan I Kel. Gurabesi Kec. Jayapura Utara, Jayapura, Irian Jaya di atas SHGB No. 798/Gurabesi (d/h No. 508/Gurabesi) atas nama PT NK (Catatan 21).
- Tanah/Bangunan kantor serta gudang di Jl. Nindya Karya No. 9 Kel. Gurabesi Jayapura Utara, Jayapura, Irian Jaya di atas SHGB No. 599 atas nama PT NK (Catatan 21).
- Tanah/ Bangunan Gedung Kantor Pusat di Jl. Letjend. Haryono MT Kav.22, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur di atas SHGB No.36 atas nama Perusahaan (Catatan 21).

Collaterals

- Land/office buildings and warehouse on Jl. Majapahit No. 496 Kel. Tlogomulyo, Kec. Genuk, Semarang, Central Java on SHGB No. 2 and SHGB No. 111 registered under the name of PT NK (Note 21).
- Land/building the House on Jl. Tenggilis No. 4, Kel. Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kab. Surabaya, East Java with SHGB No. 721 and SHGB No. 725 registered under the name of PT NK (Note 21).
- Land/building on Jl. Wolter Monginsidi No. 159, Kel. Gulak Galik, Kec. Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Lampung with SHGB No. 05 registered under the name of PT NK (Note 21).
- Land in Gg. Wongso, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Medan, North Sumatra with SHGB No. 546 registered under the name of PT NK (Note 21).
- Land/building of Office and warehouse on Jl. Surabaya to Mojokerto KM 23 Ds. Krian, Sidorejo, Sidoarjo, East Java, on SHGB No. 2 registered under the name of PT NK (Note 21).
- Land/building of House and warehouse located on Jl. Bonto Sunggu No. 22 Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Makassar, South Sulawesi on SHGB No. 20005/Manuruki (formerly 4197/Mangasa) registered under the name of PT NK (Note 21).
- Land/building of House on Jl. Pembangunan I Kel. Gurabesi Kec. North of Jayapura, Jayapura, Irian Jaya, on SHGB No. 798/Gurabesi (formerly No. 508/Gurabesi) registered under the name of PT NK (Note 21).
- Land/building of Office and warehouse on Jl. Nindya Karya No. 9 Kel. Gurabesi North of Jayapura, Jayapura, Irian Jaya, on SHGB No. 599 registered under the name of PT NK (Note 21).
- Land/Building of Main Office Building on Jl. Letjend. Haryono MT Kav.22, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, on SHGB No. 36 registered under the name of the Company (Note 21)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**23. Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan
(Lanjutan)**

**23. Bank and Financial Institution Loans
(Continued)**

Pagu Kredit KMK Transaksional

- a. Pagu kredit sebesar Rp375.000
- b. Jangka Waktu :
 - Pagu kredit: 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo fasilitas yaitu sejak tanggal 21 Januari 2017 s/d 20 Januari 2018.
 - Realisasi Kredit: Maksimal sesuai dengan jangka waktu proyek dalam kontrak.

Pagu Kredit KMK Revolving

- a. Pagu kredit sebesar Rp50.000;
- b. Jangka Waktu: 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 21 Januari 2017 s/d 20 Januari 2018;
- c. Tujuan penggunaan: Tambahan modal kerja untuk keperluan operasional perusahaan.

Non Cash Loan

- a. Pagu kredit sebesar Rp2.675.000;
- b. Jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan sejak tanggal 21 Januari 2017 s/d 20 Januari 2018.
- c. Jaminan dikaitkan jaminan KMK revolving.

- 2) Berdasarkan Surat No. BIN/2.2/550/R tanggal 23 Agustus 2017, PT NK mendapatkan kredit modal kerja transaksional.
 - a. Pagu kredit sebesar Rp60.000.
 - b. Tujuan penggunaan: Tambahan modal kerja Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan BTS. Kec. Siding/Seluas – BTS. Kec. Sekayam/Entikong (MYC);
 - c. Jangka Waktu: 9 (sembilan) bulan sejak tanggal 23 Agustus 2017 s/d 25 Mei 2018
 - d. Jaminan: Piutang termin atas proyek yang dibiayai akan diikat cession dan dikaitkan dengan fasilitas berjalan.

Maximum limit of KMK Revolving:

- a. Maximum limit credit amounting to Rp375,000
- b. Period:
 - Maximum limit: 12 (twelve) months starting January 21, 2018 until January 20, 2018.
 - Credit realization: Maximum realization in accordance with the duration of the project in the contract.

Maximum limit of KMK Revolving

- a. Maximum limit credit amounting Rp50,000;
- b. Period: 12 (twelve) months starting January 21, 2017 until January 20, 2018;
- c. The purpose: additional working capital for the company operating necessary.

Non Cash Loan

- a. Maximum limit credit is Rp2,675,000;
- b. The period is 12 (twelve) months since January 21, 2017 until January 20, 2018.
- c. Collateral is related with KMK revolving collateral.

- 2) Based on the letter No. Bin/2.2/550/R dated August 23, 2017, PT NK obtained transactional working capital loans.
 - a. Maximum credit limit amounting to Rp60,000.
 - b. Purpose: additional working capital for The Construction of BTS. Siding/Seluas Road – BTS. Kec. Sekayam/Entikong (MYC) Project;
 - c. Period: 9 (nine) Months starting August 23, 2017 until May 25, 2018;
 - d. Collateral: Accounts receivable termin of financed projects is tied with cession and is associated with current facilities.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**23. Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan
(Lanjutan)**

- 3) Berdasarkan Surat No. BIN/2.2/713/R tanggal 05 Desember 2017, PT NK mendapatkan kredit modal kerja transaksional.
- a. Pagu kredit sebesar Rp70.000.
 - b. Tujuan penggunaan: Tambahan modal kerja Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalur Ganda Jalan Kereta Api Lintas Selatan Jawa KM 164+000 s.d 167+100 antara Madiun - Kedungbanteng
 - c. Jangka Waktu: sejak PK ditandatangani s/d 25 Februari 2018;
 - d. Jaminan: Piutang termin atas proyek yang dibiayai akan diikat cession dan dikaitkan dengan fasilitas berjalan.
- 4) Berdasarkan Surat No. BIN/2.2/649/R tanggal 06 Oktober 2017, PT NK mendapatkan kredit modal kerja transaksional.
- a. Pagu kredit sebesar Rp35.500.
 - b. Tujuan penggunaan: Tambahan modal kerja Proyek Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pemukiman Nelayan/Tepi Air Kampung Beting Kota Pontianak.
 - c. Jangka Waktu: sejak PK ditandatangani s/d 25 Februari 2018;
 - d. Jaminan: Piutang termin atas proyek yang dibiayai akan diikat cession dan dikaitkan dengan fasilitas berjalan.

Saldo pada awal tahun 2017 sebesar Rp28.804. Total pencairan pinjaman di tahun 2017 sebesar Rp10.617.511. Pelunasan pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp10.491.315. Saldo pada 31 Desember 2017 sebesar Rp155.000.

**5) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT PPAF**

Pada tanggal 24 Desember 2014, PT PPAF menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan nilai pinjaman sebesar Rp60.000 dengan tingkat bunga 12,5% efektif per tahun adjustable rate yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan Bank. Jangka waktu kredit 36 bulan dimulai sejak tanggal penandatanganan sampai dengan 24 Desember 2017. Berdasarkan Akta Perjanjian No. 05 tanggal 04 Juni 2015, PT PPAF mendapat tambahan pagu pinjaman menjadi sebesar Rp160.000 dengan tingkat bunga 12,5%, jangka waktu kredit selama 3 tahun

Atas pinjaman ini PT PPAF wajib menyerahkan jaminan berupa tagihan lancar atau fiducia senilai 120%.

**23. Bank and Financial Institution Loans
(Continued)**

- 3) Based on the letter No. Bin/2.2/713/R dated December 05, 2017, PT NK obtained transactional working capital loans.
- a. Maximum limit amounting to Rp70,000,
 - b. Purpose: additional working capital for The Construction of Double Track Railway Southern Java KM 164+000 to 167+100 between Madiun – Kedungbanteng
 - c. Period: since the signing of the credit until February 25, 2018;
 - d. Collateral: Accounts receivable termin of financed projects is tied with cession and is associated with current facilities.
- 4) Based on the letter No. Bin/2.2/649/R dated /October 06, 2017, PT NK obtained transactional working capital loans.
- a. Maximum limit credit amounting to Rp35,500,
 - b. Purpose: additional working capital for The Construction of Fisherman Village Kampung Beting, Pontianak
 - c. Period: since the signing of the credit until February 25, 2018;
 - d. Collateral: Accounts receivable termin of financed projects is tied with cession and is associated with current facilities.

Balance at the beginning of the year 2017 amounting to Rp28,804. Total drawdown of loans in 2017 amounting to 10,617,511. Payment of the loan in the current year amounting to Rp10,491,315. Balance at December 31, 2017 amounting to Rp155,000.

**5) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT PPAF**

On December 24, 2014, PT PPAF signed a Working Capital Credit Agreement from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with a loan value of Rp60,000 with an effective interest rate of 12.5% per year adjustable rate that can change at any time in accordance with Bank. The credit period of 36 months starting from the date of signing until December 24, 2017. Based on the Deed of Agreement No. 05 dated June 4, 2015, PT PPAF received an additional maximum limit to the size Rp160,000 with an interest rate of 12.5%, a credit period of 3 years.

On this loan, PT PPAF must submit a guarantee in the form of current or fiduciary bills worth 120%.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**23. Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan
(Lanjutan)**

Berdasarkan surat penawaran putusan kredit No. R.II-ADK/DKR-2/10/2016 yang telah ditandatangani dan disetujui oleh PT PPAF atas fasilitas kredit KMK Factoring, bahwa BRI telah memperpanjang fasilitas tersebut, dengan plafond kredit menjadi Rp50.000, dengan tingkat suku bunga 12,5% dan akan jatuh tempo pada 23 Agustus 2017.

Saldo pada awal tahun 2017 adalah sebesar Rp23.518. Total pencairan di tahun 2017 sebesar Nihil. Total pelunasan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Rp23.518. Saldo pada 31 Desember 2017 sebesar Nihil. .

**6) PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT NK**

Berdasarkan surat yang diterbitkan No. S-542/SMI/DPI/0617 tanggal 20 Juni 2017, Perusahaan mendapatkan kredit modal kerja dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) melalui Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Revolving Fasilitas Pembiayaan dan Perjanjian Pembiayaan.

- a. Jenis Fasilitas berupa Pembiayaan Modal Kerja.
- b. Pagu kredit sebesar Rp200.000 (Total Fasilitas Pembiayaan).
- c. Keperluan modal kerja untuk melaksanakan pembangunan proyek-proyek infrastruktur sebagai berikut:
 - Proyek Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan No. HK.02.03/SATKER/PJSA SDA-NT.II/BEND/108/XI/2015 tanggal 27 November 2015;
 - Proyek Preservasi dan Pelebaran Jalan Kota Takengon – Sp. Uning – Uwak (MYC 2016 – 2018), Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) No. HK.02.03/CTR-Br.A2/13/ APBN/2016 tanggal 4 Oktober 2016;
 - Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Prijetan (4.513 Ha), Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur (Multiyears Contract) berdasarkan Surat Perjanjian No. HK0203 An/IRWAI/K-PRJTN/SPK/MYC/01 tanggal 24 Agustus 2016;

**23. Bank and Financial Institution Loans
(Continued)**

Based on the letter of credit decision deals No. R.II-ADK/DKR-2/10/2016 has been signed and approved by PT PPAF to credit facilities for working capital Factoring, that BRI has extended the facility, the credit limit be Rp50,000, with an interest rate of 12.5 % and will mature on August 23, 2017.

Balance at the beginning of the year 2017 amounted Rp23,518. Total drawdown in 2017 is Nil. Total repayment of the loan in the current year amounted Rp23,518. The balance on December 31, 2017 is Nil.

**6) PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT NK**

Based on the Loan Agreement No. S-542/SMI/DPI/0617 dated June 20, 2017, the Company obtained working capital loans from PT Sarana Multi infrastructure (Persero) (PT SMI) through a Revolving Working Capital Financing Facility Agreement and Financing Facilities.

- a. Types of Facilities is Working Capital Financing.
- b. Maximum limit credit amounting to Rp200,000 (Total Financing Facilities).
- c. Working capital purposes to carry out the construction of infrastructure project as below:
 - Rotiklot Dam Project in Belu Regency, East Nusa Tenggara, based on the letter of unit price contract No. HK.02.03/SATKER/PJSA SDA-NT.II/BEND/108/XI/2015 dated November 27, 2015;
 - Takengon City – Sp. Uning – Uwak (MYC 2016 – 2018) Preservation and Widening Project, Nangroe Aceh Darussalam Province, based on the letter of contract No. HK.02.03/CTR-Br.A2/13/APBN/2016 dated October 4, 2016;
 - Prijetan Irrigation Network rehabilitation project (4,513 Ha), Lamongan Regency, East Java Province (Multiyears Contract) based on the contract No. HK0203-An/IRWAI/K-PRJTN/SPK/MYC/01 dated August 24, 2016.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**23. Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan
(Lanjutan)**

**23. Bank and Financial Institution Loans
(Continued)**

• Proyek Revitalisasi Danau Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan No. HK.02.03/AU/SB-RDT/56 tanggal 19 Desember 2016. • Proyek-proyek infrastruktur lain yang dibiayai dari dana APBN dan sektornya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.100/PMK.010/2009 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-48/D.05/2015 tanggal 30 April 2015 • Proyek-proyek infrastruktur lain yang dibiayai dari dana APBN dan sektornya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.100/PMK.010/2009 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-48/D.05/2015 tanggal 30 April 2015 d. Jangka Waktu: 12 (dua belas) bulan sejak 28 Juni 2017 s/d 27 Juni 2018; e. Jaminan berupa jaminan yang lazim dipersyaratkan oleh Kreditur dalam Fasilitas Pembiayaan ini, termasuk namun tidak terbatas pada: • Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 366/Harjosari II atas Nama PT NK dengan luas tanah sebesar 5.170 m² yang terletak di Jl. Sisingamaraja Kel. Hardjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara (Catatan 21). • Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 118/Harjosari II atas nama PT NK dengan luas tanah sebesar 1.442 m² yang terletak di Jl. Kampung/Lorong IX Kel. Harjosari, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara (Catatan 21). • Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 20019/Losari atas nama PT NK dengan luas tanah sebesar 966 m² yang terletak di Jl. Lamadukelleng No. 28 Kel. Losari, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Catatan 21).	- Tempe Lake Revitalization Project, Wajo Regency, South Sulawesi Province, based on the letter of unit price contract No. HK.02.03/AU/SB-RDT/56 dated December 19, 2016. - Other projects that are financed from state budget funds and sectors according the Minister of Finance Regulation No. 100/PMK.010/2009 and the Finance Authority Service letter No. S-48/D.05/2015 dated April 30, 2015. - Other projects that are financed from state budget funds and sectors according the Minister of Finance Regulation No. 100/PMK.010/2009 and the Finance Authority Service letter No. S-48/D.05/2015 dated April 30, 2015. d. Period: 12 (tweleve) months starting June 28, 2017 until June 27, 2018; e. Collateral in the form of a guarantee is normally required by creditors in this financing facility, including but not limited to: • The land and Building ownership proof with SHGB No. 366/Harjosari II registered under the name of PT NK with a land area of 5,170 sqm located on Jl. Sisingamaraja Kel. Hardjosari II, Kec. Medan Amplas, Medan, North Sumatra (Note 21). • The land and Building ownership proof with SHGB No. 118/Harjosari II registered under the name of PT NK with a land area of 1,442 sqm located on Jl. Kampung/Hallway IX Kel. Harjosari, Kec. Medan Amplas, Medan, North Sumatra (Note 21). • The land and Building ownership proof with SHGB No. 20019/Losari registered under the name of PT NK with a land area of 966 sqm located on Jl. Lamadukelleng No. 28 Kel. Losari, Kec. Ujung Pandang, Makassar, South Sulawesi (Note 21).

**23. Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan
(Lanjutan)**

**23. Bank and Financial Institution Loans
(Continued)**

- Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 22/Neglasari atas nama PT NK dengan luas tanah sebesar 1.085 m² yang terletak di Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 67 Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat (Catatan 21).
 - Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 23/Neglasari atas nama PT NK dengan luas tanah sebesar 1.085 m² yang terletak di Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 65A Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat (Catatan 21).
 - Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 00023/Besusu Tengah atas nama PT NK dengan luas tanah sebesar 1.548 m² yang terletak di Kel. Basusu Tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Sulawesi Tengah (Catatan 21).
 - Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 18/Besusu atas nama PT NK dengan luas tanah sebesar 2.016 m² yang terletak di Kel. Basusu Tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Sulawesi Tengah (Catatan 21).
 - Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 00022/Besusu Tengah atas nama PT NK dengan luas tanah sebesar 1.584 m² yang terletak di Kel. Basusu Tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Sulawesi Tengah (Catatan 21).
 - Tagihan/piutang (siswa termin) atas proyek yang dibiayai dan akan dilakukan pengikatan awal secara Fidusia minimal sebesar 150% dari Total Fasilitas Pembiayaan. Selanjutnya nilai tagihan /piutang (siswa termin) dijaga minimal 150% dari outstanding Fasilitas Pembiayaan.
- f. Pembayaran utang pokok fasilitas Pembiayaan ini dilakukan selambat-lambatnya pada saat berakhirnya perjanjian kontrak antara Debitur dengan pemberi kerja atau pemilik proyek infrastruktur (*bowheer*) atau berakhirnya jangka waktu Fasilitas Pembiayaan.
- The land and Building ownership proof with SHGB No. 22/Neglasari registered under the name of PT NK with a land area of 1,085 sqm located on Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 67 Kec. Cibeunying Kaler, Bandung, West Java (Note 21).
 - The land and Building ownership proof with SHGB No. 23/Neglasari registered under the name of PT NK with a land area of 1,085 sqm located on Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 65A Kec. Cibeunying Kaler, Bandung, West Java (Note 21).
 - The land and Building ownership proof with SHGB No. 00023/Besusu Central registered under the name of PT NK with a land area of 1,548 sqm located in Kel. Basusu tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Central Sulawesi (Note 21).
 - The land and Building ownership proof with SHGB No. 18/Besusu registered under the name of PT NK with a land area of 2,016 sqm located in Kel. Basusu tengah Kec. Palu Tengah Kab. Dongkala, Central Sulawesi (Note 21).
 - The land and Building ownership proof with SHGB No. 00022/Besusu Central registered under the name of PT NK with a land area of 1,584 sqm located in Kel. Basusu tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Central Sulawesi (Note 21).
 - Billing accounts receivable (the remainder of the term) for a project that was financed and will be conducted early in a binding Fiduciary minimum of 150% of the Total financing facility. Next invoice/receivable (residual term) is kept for a minimum of 150% of the outstanding financing facility.
- f. Payment of the principal debt financing facility is conducted no later than at the time of expiry of the contractual agreements between the debtor and employer or the owner of the infrastructure projects (*bowheer*) or the expiry of the period of financing facility.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**23. Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan
(Lanjutan)**

Saldo awal tahun sebesar Rp90.000. Total pencairan pinjaman di tahun 2017 sebesar Rp110.000. Pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp170.000. Saldo pada 31 Desember 2017 sebesar Rp30.000.

**7) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Perusahaan**

Berdasarkan Perjanjian Kredit Swadana No.0001 /PK-Swad/Jkh.Ut/CSMU/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017. Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dari PT Bank Tabungan Negara Tbk. Dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp300.000, tingkat suku bunga 7.65% selama 12 bulan sampai 30 Agustus 2018.

Jaminan atas fasilitas kredit ini berupa deposito yang dijaminkan pada dari PT Bank Tabungan Negara Tbk. senilai Rp316.000.

Saldo pada awal tahun 2017 sebesar Nihil. Total pencairan pinjaman selama tahun 2017 sebesar Rp675.955. Pembayaran pada tahun berjalan sebesar Rp486.810. Saldo pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp189.145.

PT PPAF

Berdasarkan Perjanjian No.64/JKH.UT/HCLU/III/2015 tanggal 24 Maret 2015, PT PPAF telah menandatangani penambahan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp50.000, dengan tingkat bunga 12,75% dengan jangka waktu selama 3 tahun. Atas penambahan tersebut PT PPAF harus menyerahkan jaminan berupa piutang sebesar 125% dari plafond pinjaman.

Pada tanggal 24 November 2014 Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp43.500 dan tingkat bunga 13% efektif per tahun adjustable rate yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan Bank. Jangka waktu kredit 36 bulan sejak tanggal penandatanganan sampai dengan 24 November 2017.

**23. Bank and Financial Institution Loans
(Continued)**

The beginning balance of the year amounting to Rp90,000. Total drawdown of loans in 2017 amounting to Rp110,000. Payment of the loan in the current year amounting to Rp170,000. Balance at December 31, 2017 Amounting to Rp30,000.

**7) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
The Company**

Based on Credit Agreement No.0001/PK-Swad/Jkh.Ut/CSMU/VIII/2017 dated August 30, 2017 the Company get a credit loan from PT Bank Tabungan Negara with a maximum principal of Rp300,000, while the interest rate is 7.65% for 12 months until August 30, 2018

The collateral for this credit facility is deposits which are pledged to dari PT Bank Tabungan Negara Tbk amounted to Rp316,000.

Balance at the beginning of the year 2017 is Nil. Total drawdown of loans in 2017 amounting to Rp675,955. Repayment of the loan in current year amounting to Rp486,810. Balance as of December 31, 2017 amounting to Rp189,145.

PT PPAF

Based on Agreement No: 64 / JK.H.UT / HCLU / III / 2015 dated March 24, 2015, PT PPAF has signed additional loan limit amounting to Rp50,000, with interest rate of 12.75% with a term of 3 years. On the addition of PT PPAF must submit a guarantee in the form of receivables amounting to 125% of the loan limit.

On November 24, 2014, the Company signed an Agreement on Working Capital of the State Savings Bank (Persero) Tbk with a maximum loan value of Rp43,500 and effective interest rate of 13% per year adjustable rate that can change at any time in accordance with Bank. The loan period is 36 months from the date of signing until November 24, 2017.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**23. Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan
(Lanjutan)**

Atas pinjaman ini perusahaan wajib menyerahkan jaminan berupa tagihan piutang dengan kolektibilitas lancar sebesar 125% dari nilai plafon yang diberikan, atau setara dengan nilai maksimum sebesar Rp54.375.

Pada tanggal 16 Mei 2012 Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Linkage Program dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Jakarta Harmoni dengan jumlah maksimal outstanding pada tahun pertama sebesar Rp10.000, tahun kedua sebesar Rp7.500 dan dilunasi pada saat jatuh tempo di tahun ketiga. Jangka waktu kredit 36 bulan terhitung sejak penandatanganan kredit sampai dengan tanggal 16 Mei 2015. Bunga kredit sebesar 11,75% efektif per tahun adjustable rate yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan Bank. Terhitung mulai 11 Oktober 2013, suku bunga kredit Perusahaan menjadi 13% per tahun.

Atas pinjaman ini Perusahaan wajib menyerahkan jaminan pokok berupa tagihan piutang kepada debitur Perusahaan dengan kolektibilitas lancar, dengan coverage minimal 150% dari plafond kredit dan tidak sedang dipinjamkan ke pihak lain.

Saldo awal tahun 2017 pinjaman sebesar Rp34.550. Pelunasan pinjaman pada tahun 2017 sebesar Rp34.550. Tidak ada pencairan selama tahun berjalan. Saldo pinjaman pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Nihil.

Berdasarkan Akta Perjanjian No. : 30 tanggal 31 Maret 2017, PT PPA Finance mendapat fasilitas kredit dengan jumlah pagu kredit Rp100.000. dengan tingkat bunga sebesar 10,75%. Jangka waktu kredit 60 bulan sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022.

Saldo pada awal 2017 tahun sebesar Nihil. Total pencairan di tahun 2017 sebesar Rp101.351. Total pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Rp6.693. Saldo per 31 Desember 2017 adalah Rp94.658.

**23. Bank and Financial Institution Loans
(Continued)**

The Company are required to submit a guarantee in the form of bills receivable with current collectibility of 125% of the value of the ceiling / outstanding given, or equivalent to the maximum value of Rp54,375.

On May 16, 2012, the Company signed a Credit Agreement Linkage Program with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Jakarta Branch Harmony with the maximum number of outstanding in the first year amounted to Rp10,000, the second year amounting to Rp7,500 and repaid at maturity in the third year. The credit period of 36 months starting from the signing of the loan until May 16, 2015. Interest rate of 11.75% per year effective adjustable rate that can change at any time in accordance with Bank. Starting from October 11, 2013, the Company loan interest rate is 13% per year.

The company must submit the guarantee form to the debt subject to the debtor company with collectibility smoothly, with a minimum coverage of 150% of the credit limit and is not being lent to other parties.

Balance at beginning of the year 2017 amounted to Rp34,550. Total repayment of the loan in the current year amounted to Rp34,550. There is no drawdown in the current year. Balance at December 31, 2017 is Nil.

Based on Agreement No: 30 dated March 31, 2017, PT PPAF has signed loan facility with limit amounting to Rp100,000, with interest rate of 10.75% with term of 60 months, starting from March 31, 2017 until March 30, 2022.

Balance at beginning of the year 2017 is Nil. Total drawdown in 2017 amounted to Rp101.351. Total repayment of the loan in the current year amounted to Rp6,693. Balance at December 31, 2017 amounted to Rp94,658.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**23. Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan
(Lanjutan)**

**8) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT PPAF**

Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 154 tanggal 29 November 2017, Notaris M.Kholid Artha, S.H., PT PPAF memperoleh Kredit Modal Kerja dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah pokok maksimum pinjaman sebesar Rp 75.000 dengan buka pinjaman sebesar 9,75% per tahun. Jangka waktu pencairan pinjaman 12 bulan terhitung mulai tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2018. Jangka waktu angsuran end user maksimal 36 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas kredit jaminan. Pinjaman tersebut digunakan untuk tambahan modal kerja untuk membiayai kegiatan usaha pembiayaan end user, Atas pinjaman ini PT PPAF wajib menyerahkan jaminan berupa tagihan lancar atau fidusia senilai 110%.

Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 155 tanggal 29 November 2017, Notaris M.Kholid Artha, S.H., PT PPAF mendapatkan pinjaman kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah pokok maksimum pinjaman sebesar Rp 75.000 dengan tingkat suku bunga kredit sebesar 9,75% per tahun. Jangka waktu pencairan pinjaman 12 bulan terhitung mulai tanggal 29 November 2017 sampai dengan 29 November 2018. Jangka waktu pembayaran pokok maksimal 12 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas kredit dan dibayarkan sekaligus. Pinjaman tersebut digunakan untuk tambahan modal kerja untuk membiayai kegiatan usaha pembiayaan end user, Atas pinjaman ini PT PPAF wajib menyerahkan jaminan berupa tagihan lancar atau fidusia senilai 110%.

Saldo awal tahun 2017 sebesar Nihil. Total pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp82.996. Pembayaran atas pinjaman bank pada tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp82.996.

PT NK

Berdasarkan Surat No. WBG.CB2/SCD.SPPK.-026/2017 tanggal 24 November 2017, Perusahaan mendapatkan Fasilitas KMK dan Non Cash Loan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

**23. Bank and Financial Institution Loans
(Continued)**

**8) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT PPAF**

Based on Credit Agreement No.154 dated June 29, 2016 Notary M.Kholid Artha, S.H., PT PPAF get a credit loan from PT Ban Mandiri (Persero) Tbk with a maximum principal amounting to Rp75,000 with the interest rate 9,75% per annum. The loan disbursement period of 12 months commencing from November 29, 2017 to November 29, 2018. The maximum principal repayment period is 36 months from the date of loan drawdown and is payable at the same time. The loan is for working capital financing on the end user. On this loan,PT PPAF must submit a guarantee in the form of current or fiduciary bills worth 110%

Based on Credit Agreement No.155 dated November 29, 2017 Notary M.Kholid Artha, S.H., PT PPAF get a credit loan from PT Ban Mandiri (Persero) Tbk with a maximum principal amounting to Rp75,000 with the interest rate 9,75% per annum. The loan disbursement period of 12 months commencing from November 29, 2017 to November 29, 2018. The maximum principal repayment period is 12 months from the date of loan drawdown and is payable at the same time. The loan is for working capital financing on the end user. On this loan,PT PPAF must submit a guarantee in the form of current or fiduciary bills worth 110%

Balance at the beginning of the year 2017 amounting to Nil. Total drawdown of loans in current year amounting to Rp82,996. Repayment of Bank loan amounting to Nil. Balance as of December 31, 2017 amounting to Rp 82,996.

PT NK

Based on the letter No. WBG.CB2/SCD.SPPK.-026/2017 dated November 24, 2017, the Company, obtained KMK and Non Cash Loan Facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**23. Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan
(Lanjutan)**

- 1). Fasilitas Kredit Modal Kerja
 - a. Pagu kredit sebesar Rp300.000;
 - b. Tujuan penggunaan Tambahan modal kerja Proyek Pekerjaan Pembangunan Dermaga 005 Tanjung Priok
 - c. Jangka Waktu: 24 bulan sejak 13 Desember 2017 s/d 13 Desember 2019;
 - d. Jaminan:
 - Piutang usaha dan stock persediaan barang diikat fiducia
 - Sebidang tanah dan bangunan SHGB No. 414/Cipinang Cempedak, seluas 5.828 m², terletak di Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur atas nama PT Nindya Karya (Persero) (Catatan 21)
 - 2 (dua) bidang tanah dan bangunan SHGB No. 1689 dan 1690, seluas 159 m² dan 100 m² di Komp. Sudirman Business Center Kav. 1 & 2, Desa Simpang Tiga, Pekanbaru atas nama PT Nindya Karya (Persero). (Catatan 21)
- 2). Non Cash Loan
 - a. Pagu kredit sebesar Rp1.100.000;
 - b. Tujuan penggunaan Tambahan modal kerja Proyek Pekerjaan Pembangunan Dermaga 005 Tanjung Priok
 - c. Jangka Waktu: sejak penandatanganan add PK s/d 25 Agustus 2018;
 - d. Jaminan dikaitkan dengan jaminan KMK

Saldo awal tahun 2017 sebesar Nihil. Total pencairan pinjaman di tahun 2017 sebesar Rp70.000. Pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2017 sebesar Rp70.000.

**9) PT Bank Victoria International Tbk
PT PPAF**

Berdasarkan Perjanjian No : 574/DL/VIII/15 tanggal 15 Agustus 2015, PT PPAF mendapat fasilitas kredit dengan jumlah maksimum kredit Rp25.000 dengan tingkat bunga 8,5% dan atas fasilitas tersebut juga menyerahkan jaminan berupa deposito sebesar Rp25.000 dengan jangka waktu 1 tahun, dengan suku bunga kredit sebesar 8,5% per tahun.

**23. Bank and Financial Institution Loans
(Continued)**

- 1). Working capital credit facility;
 - a. Maximum credit limit amounting to Rp300,000;
 - b. The purpose: additional working capital for The Construction of Port 005 Tanjung Priok
 - c. Period 24 months since December 13, 2017 until December 13, 2019;
 - d. Collateral:
 - Account receivable and inventory conducted in a binding fiduciary
 - Land and building SHGB No.414/Cipinang Cempedak, with a land area 5,828 m², located at Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, East Jakarta registered under the name of Company. (Note 21)
 - 2 (two) land and buildings SHGB No.1689 and 1690, with a land area 159 m² and 100 m², located at Sudirman Bussines Center Kav. 1 & 2, Desa Simpang Tiga, Pekanbaru registered under the name of Company. (Note 21)
- 2). Non Cash Loan
 - a. Maximum credit limit amounting to Rp1,100,000;
 - b. The purpose: additional working capital for The Construction of Port 005 Tanjung Priok
 - c. Period: since the signing of credit add until August 25, 2018;;
 - d. Collateral is related with KMK revolving collateral.

The beginning balance of the year 2017 amounting to Nil. Total drawdown of loans in 2017 amounting to Rp70,000. Payment of the loan in the current year amounting to Nil. Balance at December 31, 2017 amounting to Rp70,000.

**9) PT Bank Victoria International Tbk
PT PPAF**

Based on the Agreement No: 574 / DL / VIII / 15 dated August 15, 2015, PT PPAF got a credit facility with a maximum credit limit amounting to Rp25,000 with an interest rate of 8.5% and also submit a deposit guarantee amounting to Rp25,000 with a term of 1 year, with a loan interest rate 8.5% per year.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**23. Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan
(Lanjutan)**

Berdasarkan Pengubahan I terhadap Perjanjian Kredit No : 574/DL/VIII/15 tertanggal 1 Juli 2016, PPAF telah memperpanjang fasilitas kredit senilai Rp20.000. selain itu, PT PPAF juga mendapatkan penambahan fasilitas kredit sebesar Rp20.000 tingkat suku bunga 8,5%, dan juga telah menambahkan tambahan jaminan berupa deposito sebesar Rp20.000 dengan jangka waktu 1 tahun.

Saldo pada awal tahun adalah Rp45.000. Tidak terdapat pencairan pada tahun berjalan. Total pembayaran pada tahun berjalan sebesar Rp45.000. Saldo per 31 Desember 2017 adalah sebesar Nihil.

**10) PT Bank Pembangunan Daerah Banten
Perusahaan**

Berdasarkan Perjanjian No.14 tanggal 21 Juni 2017, dihadapan notaris Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH. MH. MKn perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank Pembangunan Daerah Banten dengan total plafond Rp50.000 dengan Tingkat suku bunga dari pinjaman tersebut adalah 9% per tahun selama 12 bulan.

Saldo pada awal tahun sebesar Nihil, total pencairan fasilitas pinjaman sebesar Rp50.000 serta pembayaran pada tahun berjalan sebesar nihil. Saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp50.000

PT PPAF

Berdasarkan Perjanjian No.30 tanggal 11 November 2016, PT PPAF menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank Pembangunan Daerah Banten dengan total plafon Rp75.000 yang terdiri dari Rp25.000 adalah fasilitas Pinjaman Rekening Koran - Revolving yang diperuntukan untuk pembiayaan Anjak Piutang dan biaya operasional, dan Rp50.000 adalah fasilitas KMK – Non Revolving yang diperuntukkan untuk pembiayaan finance lease dan consumer finance. Tingkat suku bunga dari pinjaman tersebut adalah 12,5% per tahun

Berdasarkan Adendum I Perjanjian Kredit tanggal 24 Mei 2017 Nomor 13, Bank menyetujui perpanjangan dan suplesi (penambahan) fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) yang semula Rp25.000 suplesi (penambahan) sebesar Rp20.000 sehingga plafond Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) menjadi sebesar Rp45.000.

**23. Bank and Financial Institution Loans
(Continued)**

Based on the first alteration to the Credit Agreement No: 574 / DL / VIII / 15, dated July 1, 2016, PT PPAF has extended the loan facility worth Rp20,000. Besides PPAF also obtain additional credit facilities amounting to Rp20,000 with interest rate 8.5%, and also has an additional guarantee in the form of deposits by Rp20,000 for 1 year.

Balance at the beginning of the year amounting to Rp45,000. There is no drawdown in the current year. Total repayment in the current year amounted to Rp45,000. Balance as of December 31, 2017 amounted to Nil.

**10) PT Bank Pembangunan Daerah Banten
The Company**

Based on Credit Agreement No. 14 dated June 21, 2017 in the front of Notary Dewi Tenty Septi Artiany, SH. MH. MKn., the Company get loan from PT Bank Pembangunan Daerah Banten with facility limit amounting to Rp50,000, with interest rate 9% for 12 (twelve) months.

Balance at the beginning of the year is Nil. Total drawdown of loans in 2017 amounting to Rp50,000. Repayment of the loan amounting to Nil. Balance as of December 31, 2017 amounting to Rp50,000

PT PPAF

Based on Agreement No.30 dated November 11, 2016, PT PPAF signed Credit Agreements with PT Bank Pembangunan Daerah Banten with a total limit of Rp75,000 consisting of Rp25,000 is the Current Account Loan facilities - Revolving allocated for financing Factoring and operational costs, and Rp50,000 is Credit facility - Non Revolving, that intended to financing the costumer lease financing and consumer finance. The interest rate on these loans is 12.5% for the year.

Based on Addendum I Credit Facility No.13 dated May 24, 2017, Bank agreed to renew and increase the credit facility of Account Balance Loan (PRK) by Rp25,000, therefore the plafond of Account Balance Loan (PRK) increased from Rp20,000 to Rp45,000.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**23. Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan
(Lanjutan)**

Saldo pada awal tahun adalah sebesar Rp66.169. Total pencairan di tahun berjalan sebesar Rp333.641. Pembayaran pada tahun berjalan adalah sebesar Rp337.650. Saldo pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp62.160.

**11) PT Bank Pembangunan Daerah Jateng
PT PPAF**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No 38 tanggal 17 November 2017, Notaris Dini Handanayatie, S.H., PT PPAF mendapatkan pinjaman kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah pinjaman maksimum sebesar Rp 75.000 dengan tingkat bunga 11,50% efektif per tahun yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan bank. Jangka waktu kredit 60 bulan. Pinjaman tersebut digunakan untuk tambahan modal kerja untuk membiayai kegiatan usaha pembiayaan *end user*. Atas pinjaman ini PT PPAF wajib menyerahkan jaminan berupa tagihan lancar atau fidusia.

Saldo awal tahun sebesar Nihil. Pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp18.245. Pembayaran atas pinjaman bank pada tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp18.245.

**12) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT DMR**

- a. Berdasarkan "Perjanjian Pemberian *Line Facility* Murabahah I" yang diaktakan oleh Notaris Nurhasanah, S.H., M.Kn. No. 09 tanggal 14 September 2016, PT DMR menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, untuk Pemberian *Line Facility* Rp70.000 yang akan digunakan untuk pembelian Obyek Akad. Fasilitas pinjaman ini berjangka waktu 60 bulan dengan *grace period* 60 bulan.
- b. Berdasarkan "Perjanjian Pemberian *Line Facility* Murabahah II" yang diaktakan oleh Notaris Nurhasanah, S.H., M.Kn. No. 10 tanggal 14 September 2016, PT DMR menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, untuk Pemberian *Line Facility* Rp5.000 bersifat *Revolving* yang akan digunakan untuk pembelian Obyek Akad. Fasilitas pinjaman ini berjangka waktu 12 bulan dengan jangka waktu per pencairan 6 bulan.

**23. Bank and Financial Institution Loans
(Continued)**

Balance at the beginning of the year amounting to Rp66,169. Total drawdown in the current year is Rp333,641. Total repayment in the current year amounted to Rp337,650. Balance as of December 31, 2017 amounted to Rp62,160.

**11) PT Bank Pembangunan Daerah Jateng
PT PPAF**

Based on Credit Agreement No.38 dated November 17 2017 Notary Dini Handayatie, S.H., PT PPAF get a credit loan from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah with a maximum principal amounting to Rp75,000 with the interest rate 11,5% per annu with loan term of sixty (60) months and matures on November 17, 2022. The loan is for working capital financing on the end user. On this loan, PT PPAF must submit a guarantee in the form of current or fiduciary.

Balance at the beginning of the year amounting to Nil. Total drawdown of loans in 2017 amounting to R18,245. Repayment of Bank loan amounting to Nil. Balance as of December 31, 2017 amounting to Rp 18,245.

**12) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT DMR**

- a. Based on "Perjanjian Pemberian *Line Facility* Murabahah I" Deed No.19 by Notary Public Nurhasanah, S.H., M.Kn. dated September 14, 2016, PT DMR signed a loan agreement with PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, for the *Line Facility* of Rp70,000, which will be used to purchase Akad Object. This loan facility has a 60 months term with grace period of 60 months.
- b. Based on "Perjanjian Pemberian *Line Facility* Murabahah II" Deed No.10 by Notary Public Nurhasanah, S.H., M.Kn. dated September 14, 2016, PT DMR signed a revolving loan agreement with PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, for the *Line Facility* of Rp5,000 which will be used to to purchase Akad Object. This loan facility has a 12 months term with time span per disbursement is 6 months.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**23. Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan
(Lanjutan)**

Fasilitas pinjaman tersebut diatas dijamin dengan seagai berikut:

- Sebidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01 (Pengganti)/Kebun Lado, seluas 100.000 M2. (Catatan 21)
- Fidusia atas Piutang dengan nilai fidusia sebesar Rp 75.000.
- Atas semua perlengkapan yang terdapat diatas tanah sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 (Pengganti)/Kebun Lado dengan nilai fidusia sebesar Rp93.662.
- Pemberian Garansi Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dari Entitas Induk.

Perjanjian tersebut juga memuat beberapa pembatasan bagi Perusahaan, antara lain sebagai berikut:

- Seluruh hutang pemegang saham wajib dijadikan subordinasi dan bersifat *non bearing interest loan*.
- Menarik kembali modal yang telah disetor
- Menjaminkan kembali aset yang telah dijaminakan di Bank kepada pihak lain.
- Melakukan pelunasan hutang kepada pemegang saham sebelum pembiayaan berakhir.

Saldo awal tahun sebesar Rp56.997. Total pencairan pinjaman di tahun 2017 sebesar Rp15.520. pembayaran selama tahun berjalan sebesar Rp4.305 Saldo pada 31 Desember 2017 sebesar Rp68.212.

**13) Medium Term Notes
PT PPAF**

Pinjaman jangka panjang lainnya merupakan pinjaman bukan bank berupa penerbitan MTN (*Medium Term Notes*) dengan jumlah maksimal pokok MTN sebesar Rp200.000 yang dibagi menjadi 3 seri dengan jangka waktu tiga tahun.

**23. Bank and Financial Institution Loans
(Continued)**

The loan facility above is secured with certain objects as follows:

- *A plot of land with the certificate of Building Rights (HGB) No. 01 (Alternate)/ Kebun Lado, measured to 100,000 sqm. (Notes 21)*
- *Fiduciary for Receivables with value amounted to Rp75.000.*
- *All equipments on the land with the certificate of Building Rights (HGB) No. 01 (Alternate)/ Kebun Lado, with fiduciary value of Rp93,662.*
- *Corporate Guarantee from Parent Company.*

The agreement also covered some limitation for the Company, some of which are as follows:

- *All shareholder payables must be converted to subordinate and has non bearing interest loan value.*
- *Withdraw all deposited capitals.*
- *Ensure all assets guaranteed in Bank to other parties.*
- *Settle all payables to shareholders before payment period is over.*

The beginning balance of the year amounting to Rp56,997. Total deawdown of loans in 2017 amounting to Rp15,520. Rrepayment in the current year amounting to Rp4,305. Balance at December 31, 2017 amounting to Rp68,212.

**12) Medium Term Notes
PT PPAF**

Other long-term loan is a loan not a bank in the form of the issuance of MTN (Medium Term Notes) with a maximum principal amount of MTN amounting Rp200,000 are divided into three series with three years maturities.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**23. Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan
(Lanjutan)**

Berdasarkan akta No. 107 tanggal 19 Juni 2014 yang dibuat dihadapan notaris Arry Supratno, S.H. mengenai penerbitan MTN, sampai dengan 31 Desember 2015, MTN yang sudah cair sebesar Rp140.000. Seri A sebesar Rp50.000 dengan jangka waktu 24 Juni 2014 sampai dengan 24 Juni 2017, Seri B sebesar Rp40.000 dengan jangka waktu 1 September 2014 sampai dengan 1 September 2017 dan Seri C sebesar Rp50.000 dengan jangka waktu 2 Juli 2015 sampai dengan 24 Juni 2017. Dana hasil penerbitan MTN digunakan untuk modal kerja proyek pembiayaan di bidang infrastruktur. Suku bunga MTN 12% efektif per tahun dan fixed selama jangka waktu MTN.

Pada 26 Oktober 2016, telah ditandatangani perjanjian pengakuan hutang dari penerbitan MTN dengan jumlah maksimal pokok MTN setinggi-tingginya adalah sebesar Rp300.000, berdasarkan akta No.88 tanggal 26 Oktober 2016, MTN II seri A tersebut yang sudah cair di 2016 adalah sebesar Rp100.000 Tingkat suku bunga MTN adalah 11,99% efektif per tahun, dan fixed selama jangka waktu MTN.

Saldo awal tahun sebesar Rp240.000. Total pencairan pinjaman di tahun 2017 sebesar Rp200.000. pembayaran selama tahun berjalan sebesar Rp140.000 Saldo pada 31 Desember 2017 sebesar Rp300.000.

PT NK

Pada tanggal 28 Juli 2017, Perusahaan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah dengan nilai Rp300.000.000.000 dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun. Bunga surat utang jangka menengah adalah 10,35% per tahun. Jaminan berupa aset lancar perusahaan sebesar 120% dari nilai surat utang menengah yang diterbitkan. Jangka waktu jatuh tempo surat utang jangka menengah adalah tanggal 28 Juli 2020.

Atas penerbitan MTN tersebut, bertindak selaku Arranger adalah PT BNI Sekuritas. Sedangkan yang bertindak sebagai Agen Pemantau dan Agen Jaminan untuk kepentingan dan atas nama pemegang MTN adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan bisnis perusahaan dan tambahan modal kerja.

**23. Bank and Financial Institution Loans
(Continued)**

Based on Notarial Deed No. 107 dated June 19, 2014 by Notary Arry Supratno, S.H. regarding issuance of MTN, the MTN which has been disbursed until December 31, 2015, amounted to Rp140,000, which are Serie A amounted to Rp50,000 with period from June 24, 2014 to June 24, 2017, Serie B amounted to Rp40,000 with period from September 1, 2014 to September 1, 2017, and Serie C amounted to Rp50,000 with period from July 2, 2015 to June 24, 2017. Proceeds from MTN issuance are used for financing working capitals in infrastructure projects. MTN interest rate is fixed at 12% per year until maturity.

Based on Deed No. 88 dated October 26, 2016, the Company signed agreement of debt recognition from the MTN issuance with maximum MTN principal amounted to Rp300,000. Based on Agreement No: 88 dated October 26, 2016 MTN II Serie A disbursed on 2016 amounted to Rp100,000. MTN interest rate is fixed at 11,99% per year until maturity.

The beginning balance of the year amounting to Rp240,000. Total drawdown of loans in 2017 amounting to Rp200,00. prepayment in the current year amounting to Rp140,000. Balance at December 31, 2017 amounting to Rp300,000.

PT NK

On July 28, 2017 The Company issued Medium Term Notes amounting to Rp300,000,000,000 for 3 (three) years. Interest on Medium Term Notes is 10.35% per year. Guarantee in the form of company's current assets amounting to 120% of the value of medium term notes issued. The due date of the medium-term notes is July 28, 2020.

On the issuance of the MTN, PT BNI Sekuritas is acting as Arranger, while The Monitoring and Collateral Agent on behalf of MTN holders is PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

The fund would be used for bussiness expanding and additional working capital.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

24. Utang Bruto kepada Pihak Ketiga

24. Gross Amount Due to Third Parties

	2017 Rp	2016 Rp	
Utang Bruto kepada Pihak Ketiga			Gross Amount Due to Third Parties
Wilayah I	79,231	23,698	Region I
Wilayah II	49,870	146,516	Region II
Wilayah III	6,308	125,121	Region III
Wilayah IV	132,990	10,950	Region IV
Wilayah V	77,955	10,148	Region V
Wilayah VI	216,575	205,378	Region VI
Wilayah VII	21,952	35,399	Region VII
Kantor Pusat	3,075	57,733	Head Office
Divisi EPC	38,544	--	Division EPC
Divisi Properti	346	37	Division Property
Divisi Restrukturisasi	--	3,224	Division of Restructuring
PT Nindya Beton	1,611	--	PT Nindya Beton
Jumlah	628,457	618,204	Total

25. Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Pendek

25. Short-term Advances from Customers

	2017 Rp	2016 Rp	
Pihak Berelasi:			Related Parties
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	9,832	--	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	7,707	--	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
Ventura Bersama Nindya - Surya	5,367	8,932	Ventura Bersama Nindya - Surya
Ventura Bersama Nindya - PT PPA	4,594	5,275	KSO Nindya - PT PPA
PT Perusahaan Gas Negara (Persero)	4,367	8,431	PT Perusahaan Gas Negara (Persero)
PT Pertamina Gas	--	1,849	PT Pertamina Gas
PT Semen Padang	--	88	PT Semen Padang
Jumlah Pihak Berelasi	31,867	24,575	Total Related Parties
Pihak Ketiga:			Third Parties
Kementerian Pekerjaan Umum	99,644	104,905	Ministry of Public Works
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	22,727	--	Pesisir Barat District Government
Kementerian Pendidikan	21,440	19,975	Ministry of Education
Bank Indonesia	10,631	42,912	Bank of Indonesia
Kementerian Perhubungan	9,050	21,934	Ministry of Transportation
Pemerintah Provinsi Papua	5,168	--	Papua District Government
Kementerian Kesehatan	4,285	--	Ministry of Health
PT Maleo	2,500	2,500	PT Maleo
PT Karya Unggulan Gemilang	1,310	2,274	PT Karya Unggulan Gemilang
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1,310	1,310	Directorate General of Water Resources
Pemerintah Kota Padang	742	5,121	Padang District Government
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	121	7,864	Department of Public Works Highways
RSUD Mamuju	--	17,345	RSUD Mamuju
Pemerintahan Kota Pekanbaru	--	15,557	Government of Pekanbaru
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	--	12,675	Implementing Agency National Road II
PT Sinergi Solusi Utama	--	5,042	PT Sinergi Solusi Utama
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat	--	4,940	Bandung Barat District Health Office
Lainnya (masing-masing dibawah Rp1.000)	--	1,176	Others (each below Rp1,000)
Jumlah Pihak Ketiga	178,928	265,530	Total Third Parties
Jumlah	210,795	290,105	Total

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

26. Beban Akruai dan Utang Lain-lain

26. Accrued Expenses and Other Payables

	2017 Rp	2016 Rp	
Beban Akruai			Accrual Expense
Akrual Biaya Tantiem	20,733	61,106	Accrued Tantiem
Akrual Biaya Apresiasi Karyawan	49,306	20,390	Accrued Employee Appreciation
Akrual Bunga Bank	6,435	3,956	Accrued interest Loan
Akrual Beban Kantor dan Umum	1,318	1,529	Accrued Office and General Expenses
Akrual Gaji dan Upah	909	1,253	Accrued Salaries and Wages
Jumlah Beban Akruai	78,701	88,234	Total Accrual Expense
Utang Lain-lain			Others Payables
Utang Operasional Proyek	54,011	95,801	Projects Operational Payable
Utang Lain-lain	9,043	10,177	Other Payables
Jumlah Utang Lain-lain	63,054	105,978	Total Others Payables
Jumlah	141,755	194,212	Total

Utang operasional proyek merupakan utang atas beban ventura bersama yang terjadi atas pinjaman-pinjaman sementara ke proyek-proyek yang dikerjasamakan. Utang-utang ini akan diperhitungkan dengan laba ataupun kerugian yang dialami oleh masing-masing ventura bersama, setelah proyek dinyatakan selesai dan ventura bersama ditutup.

Projects operational payables are joint venture payable that occurred over the temporary loans to projects that cooperated. These debts will be calculated with a profit or loss occurred by each of the joint venture, after the project was finished and joint venture was closed.

Akrual biaya tantiem dan biaya apresiasi karyawan adalah pencatatan biaya secara akrual berdasarkan anggaran yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Accrued tantiem and employee appreciation were recorded based on accrual basis in accordance with budget approved by the General Meeting of Shareholders (RUPS).

27. Pendapatan Diterima Dimuka

27. Unearned Revenue

	2017 Rp	2016 Rp	
Proyek Jalur Ganda KAI	9,546	--	Proyek Jalur Ganda KAI
Proyek Jaringan Gas Lampung	5,202	--	Proyek Jaringan Gas Lampung
Proyek Gedung Universitas Airlangga	2,838	--	Proyek Gedung Universitas Airlangga
Proyek Gedung Poltek Pariwisata	1,739	--	Proyek Gedung Poltek Pariwisata
Proyek Jembatan KA BNB5	1,694	--	Proyek Jembatan KA BNB5
Retail Readymix	1,019	303	Retail Readymix
Proyek Rusun TNI	--	7,147	Proyek Rusun TNI
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	2,891	1,739	Others (each below Rp1,000)
Jumlah	24,929	9,189	Total

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**28. Hasil Pengelolaan Aset yang Masih Harus
Disetor**

Perjanjian Pengelolaan Aset eks BPPN antara Perusahaan dengan Menteri Keuangan untuk tahun 2017 telah ditandatangani pada tanggal 23 Agustus 2017 ("Perjanjian"). Berdasarkan Perjanjian tersebut, antara lain ditetapkan bahwa Hasil Pengelolaan Aset ("HPA") setelah dikurangi dengan Biaya Aset, Imbalan Pengelolaan Aset ("IPA"), Imbalan Kinerja (jika ada) dan Pajak Pertambahan Nilai merupakan penerimaan Negara yang harus disetorkan ke Negara cq Menteri Keuangan pada setiap akhir bulan Maret, akhir bulan Juni, akhir bulan September dan akhir bulan Desember.

HPA yang belum disetorkan dapat dikelola oleh Perusahaan dan diserahkan beserta bunganya sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Perusahaan berhak atas IPA paling besar 1,5% dari Nilai Aset dan berhak atas Imbalan Kinerja sebesar 5% dari selisih HPA dengan Nilai Aset yang dihitung per satuan aset.

Selama tahun 2017, Perusahaan telah melakukan penyetoran HPA kepada Pemerintah Cq Menteri Keuangan sebesar Rp50.627. Perhitungan penerimaan dan pengurangan kas dana HPA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017 Rp	2016 Rp
Saldo Awal	50,627	4,741
Penerimaan HPA:		
Bunga dari Tuban Petro	--	65,275
Denda dari Tuban Petro	27,080	
Jumlah HPA	27,080	65,275
Bunga dari Dana Hasil Pengelolaan Aset yang Belum Disetor	463	753
Jumlah Penerimaan	27,543	66,028
Pengurangan:		
Penggantian Biaya Aset	30	121
PPN atas Penggantian Biaya Aset	3	12
Imbalan Pengelolaan Aset	13,444	13,879
PPN atas Imbalan Pengelolaan Aset	1,344	1,388
Saldo Minimal Rekening Koran	--	1
Total Pengurangan	14,821	15,401
HPA yang Dapat Disetor kepada Pemerintah	63,349	55,368
HPA yang Telah Disetor kepada Pemerintah	50,627	4,741
Hasil Pengelolaan Aset yang Masih Harus Disetor	12,722	50,627

**28. Proceeds from Asset Management For
Remittance**

Asset Management Agreement ex IBRA between the Company with the Minister of Finance for the year 2017 were signed on August 23, 2017 ("Agreement"). Based on the agreement, among others, determined that the Proceeds from Asset Management ("HPA") after deducting the cost of Assets, Benefits Asset Management ("IPA"), Performance Benefits (if any) and Value Added Tax is a State revenues to be deposited into the State cq the Minister of Finance at the end of March, June, September and December.

HPA which have not been deposited can be managed by the Company and submitted with interest according to the schedule specified. The Company is entitled to the greatest IPA 1.5% of Asset Value and Performance Benefits entitled to 5% of the difference in the HPA with the Asset Value calculated per unit of assets.

For the year 2017, the Company has made deposits the HPA to the Government Cq the Minister of Finance for Rp50,627. Calculation of cash receipts and a reduction in HPA funds for the years ended December 31, 2017 and 2016 are as follows:

Beginning Balance
Proceed from Asset Management:
Interest from Tuban Petro
Total Proceed from Asset Management
Interest Received from Proceed from Asset Management for Remittance
Total Receipts
Deductions:
Reimbursable Cost
VAT on Reimbursable Cost
Assets Management Fee
VAT of Assets Management Fee
Minimum Balance Checking Account
Total Deductions
Proceeds from Asset Management Which Should be Remitted to Government
Proceeds from Asset Management Remitted to Government
Proceeds from Asset Management for Remittance

29. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

29. Employee Benefit Liabilities

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan/ <i>Employee Benefit Liabilities</i>	2017 Rp	2016 Rp
PT PPA	2,728	3,073
PT PPAF	581	382
PT PPAK	405	61
PT NK	24,183	19,040
Jumlah/Total	27,897	22,556

Perusahaan dan Entitas Anak memberikan imbalan pasca kerja minimum kepada karyawan yang berhak berdasarkan Undang-undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan.

The Company and Subsidiaries provide minimum of employment benefits to its eligible employees based on Labor Law No. 13 about Employment.

Perusahaan menyelenggarakan program iuran pasti untuk imbalan pasca kerja karyawan bekerja sama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") BRI, sesuai Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan dengan DPLK BRI Nomor: PPJ-39/PPA/1111 dan No. B.51-DPLK/11/2011 yang ditandatangani pada tanggal 21 November 2011. Untuk beberapa karyawan Perusahaan yang tidak diikutkan dalam program tersebut (sebanyak 3 orang per 31 Desember 2017 dan 4 orang per 31 Desember 2016), Perusahaan telah menghitung liabilitas imbalan pascakerja sebesar Rp2.728 dan Rp3.073 per 31 Desember 2017 dan 2016.

The Company has organized the defined contribution program for post-employment benefits of employees working with Financial Institution Pension Fund ("Pension Fund") BRI, according to the Cooperation Agreement between the Company and Pension Fund BRI Number: PPJ-39/PPA/1111 and No. B.51-DPLK/11/2011 signed on November 21, 2011. For several employees that are not included in this program (3 persons per December 31, 2017 and 4 persons per December 31, 2016), the Company has calculated the post-employment benefit liabilities as of December 31, 2017 and 2016 amounting to Rp2,728 and Rp3,073, respectively.

Penilaian aktuaris atas estimasi manfaat karyawan pasca kerja PT NK, PT PPAF dan PT PPAK 31 Desember 2017 dan 2016 dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuarial PT Katsir Imam Sapto. Penggunaan teknik aktuarial atas imbalan pasca kerja dilakukan dengan cara mendiskontokan imbalan dalam menentukan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini, berdasarkan *Projected Unit Credit Method (PUC Method)* dengan asumsi sebagai berikut:

Actuarial valuation of post employment employee benefits PT NK, PT PPAF and PT PPAK as of December 31, 2017 and 2016 were conducted by the actuarial consulting firm of PT Katsir Imam Sapto. Using of actuarial techniques to calculate the benefits has been done by discounting benefits in determining the present value of defined benefit obligations and current service costs, based on the Projected Unit Credit Method (PUC Method), with assumptions as follows:

Dasar Perhitungan	2017 Rp	2016 Rp	Basic Calculation
Tingkat diskonto	7.1% per tahun/year	7.3% per tahun/year	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	8% per tahun/year	7.7% per tahun/year	Salary increase rate
Usia pensiun	56 tahun/ year		Retirement age
Tabel mortalita	Table Mortalita Indonesia (TMI) III 2011/		Mortality table
Metode perhitungan	Projected Unit Credit		Method of calculation

29. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan (Lanjutan)

29. Employee Benefit Liabilities (Continued)

Rincian beban imbalan kerja yang diakui di tahun berjalan milik Perusahaan adalah sebagai berikut:

The details of the Company's employee benefit expenses for the current year are as follow:

	2017 Rp	2016 Rp	
Biaya Jasa Kini	210	274	Current Service Cost
Beban Bunga	187	781	Interest Cost
Jumlah Beban Imbalan Kerja	397	1,055	Total Post-employment Benefits

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

The details of the Company's employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position are as follow:

	2017 Rp	2016 Rp	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	1,728	2,674	Present Value of Defined Benefit Obligation
Pembentukan Cadangan	1,000	399	Additional of Reserve
Liabilitas Imbalan Kerja	2,728	3,073	Post-employment Benefits Liability

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Movement in the Company's employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position are as follow:

	2017 Rp	2016 Rp	
Kewajiban pada Awal Tahun	3,073	13,201	Beginning Balance of Liabilities
Beban Imbalan Kerja	397	1,055	Employee Benefit Expense
Pembayaran Imbalan Kerja	--	(4,740)	Benefit Payment
Beban (Penghasilan) Komprehensif Lain	(1,343)	(3,778)	Other Comprehensive Loss (Income)
Cadangan Tahun Lalu	--	(3,064)	Reserve of Prior Year
Penambahan Cadangan	601	399	Additional of Reserves
Liabilitas pada Akhir Tahun	2,728	3,073	Ending Balance of Liabilities

Rincian beban imbalan kerja yang diakui di tahun berjalan milik PT NK adalah sebagai berikut:

The details of the employee benefit expenses for PT NK the current year are as follow:

	2017 Rp	2016 Rp	
Biaya Jasa Kini	2,646	1,941	Current Service Cost
Beban Bunga	2,549	2,945	Interest Cost
Hasil Aset Program yang Diharapkan	(1,197)	(1,331)	Expected Return on Plan Assets
Jumlah Beban Imbalan Kerja	3,998	3,555	Total Employee Benefit Expense

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

29. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan (Lanjutan)

29. Employee Benefit Liabilities (Continued)

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT NK adalah sebagai berikut:

The details in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT NK are as follow:

	2017 Rp	2016 Rp	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	41,320	35,895	Present Value of Defined Benefit Obligation
Nilai Wajar Aset Program	(17,137)	(16,855)	Fair Value of Plan Assets
Liabilitas Imbalan Kerja	24,183	19,040	Post-employment Benefits Liability

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT NK adalah sebagai berikut:

Movement in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT NK are as follow:

	2017 Rp	2016 Rp	
Liabilitas pada Awal Tahun	19,040	19,209	Beginning Balance of Liabilities
Beban Imbalan Kerja	3,998	3,555	Employee Benefit Expense
Pembayaran Imbalan Kerja	(2,324)	(5,061)	Benefit Payment
Beban (Penghasilan) Komprehensif Lain	4,162	2,630	Other Comprehensive Loss (Income)
Iuran Dana Pensiun/Premi Asuransi	(693)	(1,294)	Dues Pension Fund / Insurance Premiums
Liabilitas pada Akhir Tahun	24,183	19,040	Ending Balance of Liabilities

Rincian beban imbalan kerja yang diakui di tahun berjalan milik PT PPAF adalah sebagai berikut:

The details of the employee benefit expenses for PT PPAF in the current year are as follow:

	2017 Rp	2016 Rp	
Biaya Jasa Kini	122	86	Current Service Cost
Beban Bunga	28	19	Interest Cost
Jumlah Beban Imbalan Kerja	150	105	Total Employee Benefit Expense

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT PPAF adalah sebagai berikut:

The details in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT PPAF are as follow:

	2017 Rp	2016 Rp	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	581	382	Present Value of Defined Benefit Obligation
Liabilitas Imbalan Kerja	581	382	Post-employment Benefits Liability

29. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan (Lanjutan)

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT PPAF adalah sebagai berikut:

	2017 Rp	2016 Rp
Kewajiban pada Awal Tahun	382	230
Beban Imbalan Kerja	150	105
Beban (Penghasilan) Komprehensif Lain	(49)	--
Penyesuaian	98	48
Liabilitas pada Akhir Tahun	581	382

Rincian beban imbalan kerja yang diakui di tahun berjalan milik PT PPAK adalah sebagai berikut:

	2017 Rp	2016 Rp
Biaya Jasa Kini	279	58
Beban Bunga	4	3
Jumlah Beban Imbalan Kerja	283	61

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT PPAK adalah sebagai berikut:

	2017 Rp	2016 Rp
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	405	61
Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja	405	61

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT PPAK adalah sebagai berikut:

	2017 Rp	2016 Rp
Kewajiban pada Awal Tahun	62	--
Beban Imbalan Kerja	283	40
Beban (Penghasilan) Komprehensif Lain	60	2
Penyesuaian	--	20
Liabilitas pada Akhir Tahun	405	62

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, tingkat suku bunga dan risiko gaji.

29. Employee Benefit Liabilities (Continued)

Movement in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT PPAF are as follow:

		<i>Beginning Balance of Liabilities</i>
		<i>Employee Benefit Expense</i>
		<i>Other Comprehensive Loss (Income)</i>
		<i>Adjustment</i>
		<i>Ending Balance of Liabilities</i>

The details of the employee benefit expenses for PT PPAK in the current year are as follow:

		<i>Current Service Cost</i>
		<i>Interest Cost</i>
		<i>Total Employee Benefit Expense</i>

The details in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT PPAK are as follow:

		<i>Present Value of Defined Benefit Obligation</i>
		<i>Total Post-employment Benefit Expense</i>

Movement in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT PPAK are as follow:

		<i>Beginning Balance of Liabilities</i>
		<i>Employee Benefit Expense</i>
		<i>Other Comprehensive Loss (Income)</i>
		<i>Adjustment</i>
		<i>Ending Balance of Liabilities</i>

The defined benefit pension plan typically provides exposure for the Group to actuarial risks such as investment risk, interest rate risk and salary risk.

29. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan (Lanjutan)

29. Employee Benefit Liabilities (Continued)

Risiko Investasi

Nilai kini kewajiban imbalan pasti pensiun kesehatan dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program. Saat ini program tersebut memiliki investasi yang relatif seimbang pada efek reksadana dan saham, instrumen utang dan lainnya. Karena sifat jangka panjang dari liabilitas program, dewan dana pensiun perlu menetapkan bahwa bagian wajar dari aset program harus diinvestasikan pada efek reksadana dan saham dan obligasi untuk meningkatkan imbal hasil yang dihasilkan oleh dana.

Investment Risk

The present value of the defined benefit health care plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality corporate bond yields; if the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit. Currently, the plan has relatively balanced investment in mutual fund and equity securities, and debt instruments and others. Due to the long-term nature of the plan liabilities, the board of the pension fund considers it appropriate that a reasonable portion of the plan assets should be invested portion of the plan and equity securities and in debt instruments to leverage the return generated by the fund.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan di offset (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Interest Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Salary Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis dibawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi yang lain konstan.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined liabilities are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonable possible changes of the respective assumptions occurring at the of the reporting period, while holding all other assumptions constans.

	2017	
	Rp	
Sensitivitas (-1%) terhadap tingkat bunga		Sensitivity (-1%) to Interest Rate
Nilai Kini Kewajiban	52,007	Present Value of Liabilities
Biaya Jasa Kini	4,960	Current Service Cost
Biaya Bunga	2,616	Interest Cost
Sensitivitas (+1%) terhadap tingkat bunga		Sensitivity (+1%) to Interest Rate
Nilai Kini Kewajiban	45,028	Present Value of Liabilities
Biaya Jasa Kini	4,109	Current Service Cost
Biaya Bunga	3,488	Interest Cost

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

30. Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Panjang

30. Long-term Advances from Customers

	2017 Rp	2016 Rp	
Pihak Berelasi:			Related Parties:
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	--	7,028	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Jumlah Pihak Berelasi	--	7,028	Total Related Parties
Pihak Ketiga:			Third Parties:
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	51,624	84,740	The Ministry of Public Work and Public Housing
Kementerian Perhubungan	55,103	17,303	The Ministry of Transportation
Pemerintah Kabupaten Kapuas	727	1,273	Kapuas District Government
Pemerintah Kota Balikpapan	--	665	Balikpapan District Government
Jumlah Pihak Ketiga	107,454	103,981	Total Third Parties
Jumlah Uang Muka Kontrak Jangka Panjang	107,454	111,009	Total Long-Term Contract Advances

Akun ini merupakan saldo uang muka yang telah diterima dari pemberi pekerjaan yang pembayarannya dipotongkan dengan tagihan atas setiap pekerjaan yang telah diselesaikan.

This account represents the advance balance that has been received from the customers (bowheer), which is deducted with the payment for any work on progress that had been completed.

31. Ekuitas

31. Shareholders' Equity

a. Modal Saham

Perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp2.996.688 yang mewakili 2.996.688 lembar saham.

Modal saham yang ditempatkan per tanggal 31 Desember 2017 seluruhnya berjumlah Rp2.996.688 telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia, terdiri dari:

a. Share Capital

The Company is owned by the Republic of Indonesia. Issued and fully paid shares capital made by the Republic of Indonesia as of December 31, 2017 amounting to Rp2,996,688, representing 2,996,688 shares.

Shares capital issued and fully paid as of December 31, 2017 amounting to Rp2,996,688 have been fully paid by the Republic of Indonesia, consists of:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

31. Ekuitas (Lanjutan)

31. Shareholders' Equity (Continued)

	Lembar Saham/ Shares	
Setoran modal awal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.02/2004 tanggal 27 Februari 2004 dan telah dituangkan dalam akta Nomor 7 tanggal 27 Februari 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak SH yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-05780 HT.01.01.TH.2004 tanggal 9 Maret 2004.	300,000	Initial capital contribution by Government Regulation no. 10 year 2004 juncto Decree of the Minister of Finance No.82/KMK.02/2004 dated February 27, 2004 and has stated under deed No. 7 dated February 27, 2004 in the presence of Notary Lenny Janis Ishak SH have been approved by the Minister of Justice and Human Rights No. C-05780 HT.01.01.TH.2004 on March 9, 2004.
Setoran Modal Pemerintah RI sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 82/KMK.02/2004 tanggal 27 Februari 2004 dalam bentuk aset tetap dan aset tak berwujud eks BPPN yang telah ditetapkan nilainya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.32/KMK.06/2007 tanggal 31 Juli 2007 masing-masing sebesar Rp 1.205 dan Rp 153.	1,358	Capital from the Government of the Republic of Indonesia in accordance with Article 2 Decree of the Minister of Finance No. 82/KMK.02/2004 February 27, 2004 in form of fixed assets and intangible assets of ex-BPPN which were pre determined value based on the Minister of Finance Decree No.32/KMK.06/2007 July 31, 2007 amounted to Rp 1,205 and Rp 153, respectively.
Setoran Modal Pemerintah RI yang dialokasikan dari Laba Bersih Tahun 2007 sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT PPA tentang Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2007 tanggal 8 Mei 2008.	1	Capital from the Government of the Republic of Indonesia were allocated from Net Income year 2007 in accordance with the General Meeting of Shareholders of PT PPA concerning the Approval of Annual Report for Year 2007 dated May 8, 2008.
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2008.	1,500,000	Additional capital from the Government of Republic Indonesia from the 2009 state budget in accordance with the Government Regulation No 78 year 2008.
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2009.	1,000,000	Additional capital from the Government of the Republic of Indonesia from the 2009 state budget in accordance with the Government Regulation No 77 year 2009.
Setoran modal Pemerintah RI yang dialokasikan dari cadangan umum Perusahaan sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PPA Nomor:SK-366/MOU/2012 tanggal 9 Oktober 2012.	1	Deposit the Government the Republic of Indonesia allocated capital of the Company pursuant to the general reserve Minister of SOEs as GMS PT PPA Number: SK-366/MOU/2012 dated October 9, 2012.
Pengurangan penyertaan modal Negara RI berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2012 Tanggal 20 Oktober 2012 terkait dengan pengalihan saham PT PPA pada PT Waskita Karya (99%) kepada Pemerintah RI.	(804,672)	RI State equity reduction in Government the Republic of Indonesia Regulation Number 86 Year 2012 Date October 20, 2012 relating to the transfer of the shares of PT PPA on PT Waskita Karya (99%) to the Government of Indonesia.
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016.	1,000,000	Additional capital from the Government of the Republic of Indonesia from the 2016.
Jumlah Modal Saham per 31 Desember 2017	2,996,688	Total Shares Capital per December 31, 2017

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

31. Ekuitas (Lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 27 dari Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2016 menyatakan persetujuan penambahan modal Perusahaan sebesar Rp1.000.000.000.000 (nilai penuh) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, dengan demikian modal ditempatkan yang semula sebesar Rp1.996.688.000.000 (nilai penuh) menjadi sebesar Rp2.996.688.000.000 (nilai penuh). Perubahan ini telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 08 Maret 2016.

b. Saldo Laba Telah Ditetapkan Penggunaannya

Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No.1/1995 yang diterbitkan di bulan Maret 1995, dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 40/2007 yang diterbitkan pada bulan Agustus 2007, mengharuskan pembentukan cadangan umum dari laba bersih sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut.

c. Saldo Laba Belum Ditetapkan Penggunaannya

	2017 Rp	2016 Rp
Saldo Awal	1,103,641	837,032
Pembagian Dividen	(19,090)	(10,216)
Laba Bersih	324,045	279,466
Penghasilan Komprehensif Lainnya	(4,261)	(2,641)
Saldo Akhir	1,404,335	1,103,641

d. Tambahan Modal Disetor

Tambahan Modal Disetor adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai buku aset bersih dari PT NK (99%) sesuai PSAK No. 38 ("Kombinasi Bisnis pada Entitas Sepengendali"), dengan perhitungan sebagai berikut

	2017 Rp	2016 Rp
Bagian Perusahaan atas Aset Bersih yang Diperoleh	294,228	294,228
Biaya Perolehan	(599,996)	(599,996)
Tambahan Modal Disetor	(305,768)	(305,768)

31. Shareholders' Equity (Continued)

Based on Notarial deed no. 27 of Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notary in Jakarta, on February 15, 2016, declared approval of the capital increase of the Company Rp1,000,000,000,000 (full amount) from the State Budget for Fiscal Year 2015, thus the original issued capital amounted to Rp2,996,688,000,000 (full amount). These changes have been noted by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, Directorate General of Legal Administration on March 8, 2016.

b. Appropriated Retained Earnings

Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No.1/1995 issued in March 1995, and amended by Law. 40/2007 which was published in August 2007, requires the establishment of a general reserve from net income to a minimum of 20% of the number of issued and fully paid. There is no time limit for the allowance.

c. Unappropriated Retained Earnings

Beginning Balance
Dividend Paid
Net Income
Other Comprehensive Income
Ending Balance

d. Additional Paid in Capital

Additional Paid in Capital is the difference between the acquisition price and the book value of net assets of PT NK (99%) in accordance with PSAK No. 38 ("Business Combination under Common Control"), which was calculated as follows:

Company Portion of Net Asset Obtained
Costs
Additional Paid in Capital

31. Ekuitas (Lanjutan)

31. Shareholders' Equity (Continued)

e. Laba (Rugi) Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk Dijual - Bersih

e. Unrealized Gain (Loss) on Available for Sale Securities - Net

Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	Kenaikan (Penurunan) Nilai yang Belum Direalisasi / Unrealized Gain (Loss) on Available for Sale Securities		Available for Sale Financial Assets
	2017 Rp	2016 Rp	
Saham	41,850	55,019	Shares
Investasi melalui Fund Manager Bahana	2,429	(1,576)	Investment through Bahana's Fund Manager
Jumlah	44,279	53,443	Total

Mutasi penghasilan komprehensif lainnya atas penjualan aset keuangan tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut:

Movement of other comprehensive income related to selling available for sale, as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	
Saldo Awal			Beginning Balance
Perubahan Kenaikan (Penurunan) Nilai yang Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk Dijual	53,443	35,026	Change in Unrealized Gain (Loss) on Available for Sale Securities
Penyesuaian Reklasifikasi Efek Tersedia untuk Dijual	(5,512)	39,778	
Jumlah	(3,652)	(21,361)	Reclassification Adjustment on Available for Sale Securities
	44,279	53,443	Total

f. Surplus Revaluasi Aset Tetap

f. Revaluation Surplus of Property Plant and Equipment

Dalam rangka penyajian informasi keuangan yang lebih obyektif terkait dengan kemampuan Perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, dalam tahun 2017 PT NK telah melakukan revaluasi atas aset tanah. Revaluasi aset tanah tersebut dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Jimmy Prasetyo dan Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya yang disampaikan melalui surat No. 17-050A-035/016.2, No 17-050A-005/016.01, No. 17-05-A-035/016 tanggal 15 Desember 2017.

In order to enhance objectivity of the presentation of financial information related with company's capability in performing its activity, in 2017 PT NK has revaluated its land asset. Revaluation of land asset performed by Kantor Jasa Penilai Publik Jimmy Prasetyo dan Rekan as stated in their report which submitted by letter No. 17-050A-035/016.2, No 17-050A-005/016.01, No. 17-05-A-035/016 dated December 15, 2017.

Mutasi surplus revaluasi aset tetap adalah sebagai berikut:

Movement of revaluation surplus of property plant and equipment:

	2017 Rp	2016 Rp	
Saldo Awal	156,166	156,166	Beginning Balance
Surplus revaluasi aset tetap	261,791	--	Property, Plant and Equipment Revaluation Surplus
Jumlah	417,957	156,166	Total

Tidak ada dampak perpajakan dari revaluasi aset tanah tersebut, karena revaluasi ini tidak memenuhi persyaratan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan sehingga secara fiskal, tidak ada perubahan atas nilai buku aset.

There were no tax impact regarding those revaluation, since it does not meet company's fixed asset revaluation criteria for taxation purpose, there were no changes in asset's book value.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

31. Ekuitas (Lanjutan)

31. Shareholders' Equity (Continued)

g. Kepentingan Non Pengendali

g. Non Controlling Interest

	2017 Rp	2016 Rp	
Saldo Awal	5,805	4,031	Beginning Balance
Atribusi Laba Tahun Berjalan	2,440	1,800	Atribution of Income for the Year
Atribusi Pendapatan Komprehensif Lain	2,602	(26)	Atribution of Other Comprehensive Income
Jumlah	10,847	5,805	Total

h. Dividen

Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 18 Mei 2017 dan 31 Mei 2016, para pemegang saham memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp19.090 dan Rp10.216.

h. Dividend

Based on the minutes of the General Meeting of Shareholders dated May 18, 2017 and May 31, 2016, Shareholders have decided to distributing cash dividend amounting to Rp19,090 and Rp10,216.

32. Pendapatan Usaha

32. Revenues

	2017 Rp	2016 Rp	
Pendapatan Jasa Konstruksi	5,863,162	4,658,086	Construction Services Revenues
Pendapatan Bunga dan Provisi atas Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan dan Dana Restruturisasi & Revitalisasi	203,674	175,756	Revenue from Interest and Provision of Bailout Loan Restructuring and/or Revitalitation
Pendapatan Hasil Investasi	133,686	135,232	Revenue from Investment
Penjualan Barang Investasi	62,015	--	Sell Investment Goods
Pemetaan	35,250	--	Revenue from air mapping
Pendapatan Penggantian Biaya	26,667	2,029	Revenue from Reimbursable Cost
Pendapatan Imbalan Jasa Konsultasi	17,859	13,378	Revenue from Consultation Fee
Pendapatan Imbalan Pengelolaan Aset (IPA)	13,444	13,879	Revenue from Asset Management Fee
Pendapatan Imbalan Kinerja	--	--	Revenue from Success Fee of SOEs' Asset Management
Jumlah	6,355,757	5,000,360	Total

a. Pendapatan jasa konstruksi diakui ketika bagian dari pekerjaan telah selesai dikerjakan dan ditentukan berdasarkan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian). Persentase penyelesaian konstruksi ditetapkan berdasarkan survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

a. Revenue from construction services are recognized when part of the work has been completed and are determined based on stage of completion of the contract activity at the end of reporting period (percentage of completion method). Construction percentage of completion is determined based on surveys of work performed.

b. Dari hasil kegiatan investasi, Perusahaan memperoleh hasil sebagai berikut:

b. From the results of investment activities, the Company earns the following:

	2017 Rp	2016 Rp	
Laba Penjualan Saham	9,737	34,694	Gain on Sales of Shares
Bunga Deposito Berjangka	66,034	91,575	Interest on Time Deposits
Dividen Tunai	1,320	1,495	Cash Dividend
Laba (Rugi) Belum Realisasi Saham	(2,765)	(1,555)	Unrealized Gain (Loss) from Shares
Hasil Bunga Pinjaman Investasi	43,260	--	Interest income from investment
Lain-lain	16,100	9,023	Others
Jumlah	133,686	135,232	Total

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

32. Pendapatan Usaha (Lanjutan)

32. Revenues (Continued)

- c. Pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

- c. *Interest revenue on loans in 2017 and 2016, primarily were as follows:*

	2017 Rp	2016 Rp
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	61,598	63,975
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	11,817	3,007
PT Istaka Karya (Persero)	6,504	4,653
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	3,585	5,090
PT Penataran Angkatan Laut Indonesia (Persero)	2,702	2,861
PT Artha Bangun Pratama	1,673	2,529
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	1,350	1,147
PT Boma Bima Indra	--	4,745
Lain-lain (di bawah Rp 1.000)	114,445	87,749
Jumlah	203,674	175,756

PT Dirgantara Indonesia (Persero)
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
PT Kertas Leces (Persero)
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
PT Penataran Angkatan Laut Indonesia (Persero)
PT Artha Bangun Pratama
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
PT Djakarta Lloyd (Persero)
Others (less than Rp 1,000)
Total

- d. Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Aset eks BPPN antara Perusahaan dengan Menteri Keuangan untuk tahun 2017 telah ditandatangani pada tanggal 27 April, Perusahaan berhak atas Imbalan Pengelolaan Aset (IPA) maksimal 1,5% per tahun untuk tahun 2017, dari Nilai Aset atau Nilai Aset Sementara. Berdasarkan Perjanjian, untuk tahun 2017 IPA yang menjadi hak Perusahaan sebesar Rp13.444.

- d. *Based on Asset Management Agreement eks BPPN between the Company with the Minister of Finance for the year 2017 has been signed on April 27 the Company entitles to receive IPA maximum 1.5% per annum for year 2017, from the Value of Assets or Temporary Value of Assets. Under the Agreement, for the year 2017 which became the Company's IPA amounting to Rp13,444.*

	Nilai Aset Awal	Nilai Aset Akhir	Nilai Aset Rata-rata	IPA 2017	
	(a)	(b)	(c)=(a)+(b)/2	(d)=(1,5%×(c))/12	
Januari	896,290	896,290	896,290	1,120	January
Februari	896,290	896,290	896,290	1,120	February
Maret	896,290	896,290	896,290	1,120	March
April	896,290	896,290	896,290	1,120	April
Mei	896,290	896,290	896,290	1,120	May
Juni	896,290	896,290	896,290	1,120	June
Juli	896,290	896,290	896,290	1,120	July
Agustus	896,290	896,290	896,290	1,120	August
September	896,290	896,290	896,290	1,120	September
Oktober	896,290	896,290	896,290	1,120	October
November	896,290	896,290	896,290	1,120	November
Desember	896,290	896,290	896,290	1,120	December
Jumlah				13,444	Total

- e. Pendapatan jasa konsultasi pada tahun 2017 antara lain berasal dari Pupuk Kujang dan Krakatau Steel. Total Pendapatan pada tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp17.859 dan Rp13.378.

- e. *Consulting services revenue in 2017, among others came from Pupuk Kujang and Krakatau Steel. Total Consulting services revenue in 2017 and 2016 amounting to Rp17.859 and Rp13.378 respectively.*

- f. Pendapatan penggantian biaya selama tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp26.667 dan Rp2.029.

- f. *Revenue from reimbursable cost in 2017 and 2016 amounting to Rp26,667 and Rp2,029, respectively.*

- g. Pendapatan Pengelolaan asset BUMN selama tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Nihil dan Rp2.000.

- g. *Revenue from reimbursable cost in 2017 and 2016 amounting to Nil and Rp2,000, respectively.*

32. Pendapatan Usaha (Lanjutan)

h. PT PPA dan PT SIG melakukan kerjasama kegiatan jual beli ikan tuna dimana PT PPA bertindak sebagai penjual dan PT SIG sebagai pembeli. PT PPA membukukan Penjualan ikan Per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 60.863 Juta. PT PPA membeli ikan Tuna GG dari pemasok sesuai dengan kesepakatan harga antara PT PPA dan Pemasok (nelayan). PT PPA menyerahkan ikan tuna tersebut kepada PT SIG dengan jumlah (kg) sesuai dengan jumlah yang tercatat pada Weighting Note. Pembelian kepada pemasok dilakukan setiap hari begitupula dengan penjualan kepada PT SIG.

PT PPA dan PT Berdikari melakukan kegiatan jual beli Sapi dimana PT PPA bertindak sebagai pembeli dan PT Berdikari sebagai penjual. PT PPA membukukan Penjualan Sapi Per 31 Desember 2017 masing- masing sebesar Rp 1.559 Sapi yang dibeli oleh PT PPA dari PT Berdikari akan dijual kepada para peternak sapi. PT PPA bertanggung jawab atas pengelolaan sapi sampai dengan penyerahan kepada pembeli sapi.

i. Pendapatan pemetaan udara merupakan pendapatan yang diperoleh atas proyek pemetaan udara oleh PT PPAi (entitas anak) dari PT Survai Udara Panas Persero dan PT Karvak Nusa Geomatika masing-masing sebesar Rp17.056 dan Rp18.194.

32. Revenues (Continued)

h. PT PPA and PT SIG have a cooperation in tuna fish trading activities in which PT PPA act as a seller and PT SIG as a buyer. PT PPA recorded the sale of dish in 2017 amounted to Rp 60 863 million. PT PPA bought Tuna GG fish from the supplier in accordance with the price agreement between PT PPA and Supplier (fisherman). PT PPA handed over the tuna to PT SIG by the number of kilogram in based on with the amount recorded on the Weighting Note. Purchases to suppliers are made daily as well as it sales to PT SIG.

PT PPA and PT Berdikari conduct sale and purchase activities of Cow where PT PPA acts as buyer and PT Berdikari as seller. PT PPA posted Cow Sales As of December 31, 2017 amounting to Rp 1,559 Cattle purchased by PT PPA from PT Berdikari will be sold to cow farmers. PT PPA is responsible for the management of cattle up to delivery to cow buyers.

i. Air mapping revenue represents revenue earned on an air mapping project by PT PPAi (subsidiary) from PT Survai Air Panas Persero and PT Karvak Nusa Geomatika amounting to Rp17,056 and Rp18,194, respectively.

33. Beban Usaha

	2017 Rp	2016 Rp
Beban Usaha		
Beban Proyek	5,203,415	4,145,503
Pegawai	240,992	247,346
Beban Bunga Bank	89,149	60,456
Harga Pokok Penjualan	58,161	-
Keperluan Kantor	36,287	42,909
Sewa dan Asuransi	35,418	32,640
Perjalanan Dinas	18,442	15,971
Pemasaran dan Penjualan	12,285	11,846
Penyusutan (Catatan 21)	26,096	9,994
Investasi	8,043	24,364
Jasa Konsultan	6,297	12,070
Imbalan Pasca Kerja - Bersih	5,673	5,903
Penyisihan (Pemulihan) Penurunan Nilai Piutang	(19,652)	(23,373)
Lain-lain (di bawah Rp 1 milyar)	62,308	562
Jumlah Beban Usaha	5,782,914	4,586,191

33. Operating Expenses

Operating Expense
Constructions Services
Employee
Interest Expenses
Cost of Good Sold
Office Supplies
Rent and Insurance
Business Travelling
Sales and Marketing
Depreciation (Notes 21)
Investment
Consultant Fees
Employees Benefit - Net
(Recovery) of Receivables
Others (below Rp 1 billion)
Total Operating Expense

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

34. Bagian Laba Ventura Bersama

34. Share of the Profit of Joint Venture

	2017 Rp	2016 Rp	
Nindya - Universal	28,822	13,512	Nindya - Universal
Nindya - Wijaya Karya	17,015	13,112	Nindya - Wijaya Karya
Nindya - Cipuga	13,069	--	Nindya - Cipuga
Nindya - Utama Karya	12,426	10,857	Nindya - Utama Karya
Nindya - Tamiang	9,298	10,058	Nindya - Tamiang
Nindya - Utama Karya - Wijaya Karya	7,849	433	Nindya - Utama Karya - Wijaya Karya
Nindya - MCC - Wika - Waskita	7,084	3,315	Nindya - MCC - Wika - Waskita
Nindya - Bumi Karsa	5,594	3,283	Nindya - Bumi Karsa
Nindya - Pembangunan Perumahan	5,359	4,496	Nindya - Pembangunan Perumahan
Nindya - Adhi Karya	5,343	--	Nindya - Adhi Karya
Nindya - Leo Tunggal Mandiri	5,165	--	Nindya - Leo Tunggal Mandiri
Nindya - Indah Pratama	4,596	83	Nindya - Indah Pratama
Nindya - Jaya Konstruksi	4,187	12,561	Nindya - Jaya Konstruksi
Nindya - PP - Utama Karya	4,121	6,458	Nindya - PP - Utama Karya
Nindya - Sejahtera	1,940	(1,823)	Nindya - Sejahtera
Nindya - Brantas	1,933	(30)	Nindya - Brantas
Nindya - Surya	1,897	5,759	Nindya - Surya
Nindya - Inti	1,415	2,864	Nindya - Inti
Nindya - PDKA	--	5,076	Nindya - PDKA
PPA - Nindya	269	2,661	PPA - Nindya
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Miliar)	(4,344)	(29,393)	Others (Less than Rp 1 Billion each)
Jumlah	133,038	63,283	Total

35. Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain

35. Other Comprehensive Income (Loss)

	2017 Rp	2016 Rp	
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain			Other Comprehensive Income (Loss)
Surplus Revaluasi Aset Tetap	264,436	--	Property, Plant and Equipment Revaluation Surplus
Perubahan Kenaikan (Penurunan) Nilai yang Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk Dijual	(5,512)	39,778	Change in Unrealized Gain (Loss) on Available for Sale Securities
Penyesuaian Reklasifikasi Efek Tersedia untuk Dijual	(3,652)	(21,361)	Reclassification Adjustment on Available for Sale Securities
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Liabilitas Imbalan Pasti	(4,304)	(2,667)	Actuarial Gain (Loss) from Defined Benefit Liabilities
Jumlah	250,968	15,750	Total

Kenaikan (Penurunan) Nilai yang Belum Direalisasi/ Unrealized Gain (Loss) on Available for Sale Securities							
Efek Tersedia untuk Dijual	2017	2016	Perubahan/ Changes	2016	2015	Perubahan/ Changes	Available for Sale
Saham	41,851	55,019	(13,168)	55,019	40,544	14,475	Shares
Investasi melalui fund manager Bahana	2,429	(1,576)	4,004	(1,576)	(5,518)	3,942	Investment through Bahana's Fund Manager
Jumlah	44,280	53,443	(9,164)	53,443	35,026	18,417	Total

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

36. Laba per Saham

36. Earning per Share

	2017 Rp	2016 Rp	
Laba (Rupiah penuh)	324,045,177,512	279,465,307,985	Income (In full of Rupiah)
Jumlah Lembar Saham	2,996,688	2,996,688	Number of Shares
Laba Per Saham (Rupiah Penuh)	108,134	93,258	Earning per Share (In full of Rupiah)

37. Beban Pajak Penghasilan Final

37. Final Income Tax Expenses

	2017 Rp	2016 Rp	
Pendapatan Jasa Konstruksi	5,768,613	4,658,086	Construction Income
Pendapatan Jasa Konstruksi Tidak Dikenakan Pajak	170,608	63,456	Construction Non-taxable Income
Jumlah Pendapatan Jasa Konstruksi	5,598,006	4,594,630	Construction Total Income
Ditambah (Dikurangi):			Added (Less):
Penambahan Beda Waktu Pengenaan Pajak	--	--	Addition of Time Gap of Tax
Pendapatan Jasa Konstruksi Kena pajak	5,598,006	4,594,630	Construction Taxable Income
Pendapatan Non Jasa Konstruksi Kena Pajak	3,982	--	Non - Construction Taxable Income
Jumlah Pendapatan Perusahaan Kena Pajak	5,601,988	4,594,630	Total Taxable Income
Beban Pajak Final			Final Tax Expenses
Pendapatan Jasa Konstruksi			Construction Income
3% x 2017 : Rp 5.598.006	167,940	--	3% x 2017 : Rp 5,598,006
3% x 2016 : Rp 4.594.630	--	137,840	3% x 2016 : Rp 4,594,630
Pendapatan Jasa Non Konstruksi			Non Construction Income
10% x 2017 : Rp3.892	397	--	10% x 2017 : Rp3,892
Jumlah Beban Pajak Final	168,337	137,840	Total Final Income Tax Expenses

38. Transaksi Non Kas

38. Non Cash Transactions

Perusahaan dan Entitas Anak memiliki transaksi non kas sehubungan dengan penambahan aset tetap, Aset Tak berwujud dan properti investasi dengan rincian berikut ini:

The Company and Subsidiaries have non-cash transactions regarding acquisition of Property, Plant and Equipment, intangible Assets and investment property, as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	
Perolehan Aset Tetap melalui Utang Usaha	42,682	13,296	Property, Plant and Equipment Acquisition through Accounts Payable
Perolehan Aset Takberwujud melalui Utang Usaha	140	--	Intangible Assets Acquisition Through Accounts Payable
Perolehan Properti Investasi melalui Dana Restrukturisasi/Revitalisasi	57,675	11,080	Investment Property Acquisition through Restructuring/Revitalization Loan Receivables
Jumlah	100,497	24,376	Total

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

39. Kontinjensi

a. Perusahaan

Sampai dengan tanggal laporan 31 Desember 2017 terdapat 3 (tiga) perkara hukum yang masih dalam proses persidangan, namun atas aset yang menjadi obyek perkara tersebut seluruhnya bukan merupakan aset yang dimiliki Perusahaan. Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa berdasarkan dokumen hukum yang tersedia, perkara-perkara tersebut seharusnya tidak ditujukan kepada Perusahaan. Dengan demikian, manajemen Perusahaan berpendapat tidak perlu dibentuk penyisihan atas kemungkinan timbulnya kerugian akibat perkara hukum tersebut.

b. PT NK

PT NK sedang menghadapi beberapa perkara hukum baik dalam proses mengajukan gugatan maupun yang saat ini sedang menunggu putusan pengadilan atau kasasi. PT NK meyakini bahwa keputusan pengadilan atau kasasi dalam kasus-kasus tersebut tidak akan membawa dampak material terhadap kondisi keuangan dan kinerja PT NK.

c. PT DMR

Pada tanggal 4 Desember 2017, Supplier TBS Yaitu Teddy, Sihol Parhosip dan Kaswadi mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Rengat dengan tergugat PT Duta Mentari Raya (DMR) sebagai Tergugat I bersama dengan PT PPA Kapital (PPAK) sebagai Tergugat II dan PT Karya Kuala Kubu (KKK) sebagai tergugat III. Atas gugatan tersebut PT DMR dan PT PPAK yang diwakili Kantor Hukum Tony Hendarto, pada tanggal 10 Januari 2018 telah hadir memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Rengat. Sampai dengan saat ini belum ada keputusan dari kasus tersebut.

40. Perikatan dan Perjanjian

a. Perjanjian Pengelolaan Aset Negara

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan PP No. 61 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset, pengelolaan aset negara adalah yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setelah pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Aset-aset negara yang diserahkan adalah aset-aset yang tidak terkait dengan perkara.

39. Contingencies

a. The Company

As of the reporting date December 31, 2017, there were three (3) legal cases which were still in the trial process, but all the assets which were the object of the cases were not owned by the Company. Management believes that based on the available legal documents, these cases should not be directed to the Company. Accordingly, Management believes that allowance for possible losses due to these legal proceedings are not necessary.

b. PT NK

PT NK is facing several lawsuits, some of those are in process of being filed, while some others are awaiting for the court decision or appeal. PT NK believes that the court decision or appeal in these cases will not have any material impact on the Company's financial condition and performance.

c. PT DMR

On December 4, 2017, TBS Supplier Named Teddy, Sihol Parhosip and Kaswadi filed a Lawsuit against Legal Agreement to the Rengat District Court with defendant PT Duta Mentari Raya (DMR) as Defendant I together with PT PPA Kapital (PPAK) as Defendant II and PT Karya Kuala Kubu (KKK) as defendant III. On the lawsuit PT DMR and PT PPAK represented by Tony Hendarto's Law Office, on January 10, 2018 has been present to meet the call from Rengat District Court'sl. Until now there has been no decision of the case.

40. Commitments and Agreements

a. State's Asset Management Agreement

In accordance with the Government Regulation No. 10 Year 2004 which has been amended with the PP No. 61 Year 2008 on the Establishment of Limited Liability Company (Persero) in the Asset Management Area, the State's assets management represent assets transferred from Indonesian Banking Restructuring Agency (IBRA) after the IBRA liquidation, for and on behalf of the Minister of Finance. The State's assets transferred are in clear condition/not under litigation.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

Aset negara yang diserahkan/dikelola oleh Menteri Keuangan kepada Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengelolaan Aset tahun 2016 dan 2015 yang masing-masing ditandatangani pada tanggal 25 April 2016 dan 31 Agustus 2015 ("Perjanjian") terdiri atas saham-saham non-bank dan hak tagih. Selanjutnya, sampai dengan akhir tahun, terdapat penambahan maupun pengurangan atas aset negara yang terdapat dalam Perjanjian, baik penambahan aset yang memenuhi kriteria untuk diserahkan/dikelola ataupun pengurangan aset karena dikembalikan kepada Menteri Keuangan karena tidak memenuhi kriteria untuk dikelola.

The State's assets which were transferred by the Minister of Finance to the Company as in the Asset Management Agreement 2016 and 2015 as signed consecutively on April 25, 2016 and August 31, 2015 consisted of shares in non-bank and claim rights. Furthermore, up to the end of the year, there were addition and deduction of State's assets included in the Agreement, i.e. the addition of assets that meet the criteria to be transferred as well as deduction of assets that were returned to the MOF because they did not meet the criteria to be managed.

Beberapa hal penting dalam Perjanjian Pengelolaan Aset adalah sebagai berikut:

Several important clauses in the Asset Management Agreement are as follows:

- Menteri Keuangan menyerahkan aset kepada Perusahaan untuk dilakukan pengelolaan dengan cara: penjualan, pemanfaatan, penyewaan, restrukturisasi dan/atau revitalisasi dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK 92/PMK.06/2009 beserta perubahannya.
- Menteri Keuangan menetapkan nilai aset berdasarkan hasil penilaian yang masih berlaku, yakni satu tahun terhitung sejak tanggal penilaian aset. Dalam hal hasil penilaian aset yang diserahkan/dikelola telah habis masa berlakunya, maka nilai aset menggunakan nilai aset sementara yang didasarkan pada hasil penilaian terakhir. Selanjutnya apabila Perusahaan akan melakukan penilaian dalam rangka realisasi pengelolaan aset, sekaligus dimintakan nilai aset per tanggal serah kelola yang akan dijadikan sebagai dasar bagi Menteri Keuangan melakukan penyesuaian nilai aset.
- Biaya atas aset merupakan pengeluaran tetap yang berkaitan langsung dengan aset yang dikelola oleh Perusahaan yang menjadi beban Menteri Keuangan yang terdiri dari: biaya kustodian saham dan surat berharga, service charge, pajak yang melekat pada Aset, yakni Pajak Bumi dan Bangunan, penyempurnaan hak, listrik, telepon dan air, asuransi, tunggakan biaya aset sebelum diserahkan/dikelola, pemeliharaan lainnya, dan biaya lain yang berkaitan secara langsung dengan aset yang dikelola setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Biaya aset dapat langsung dibayarkan dengan mengurangi Hasil Pengelolaan Aset (HPA).

- *The Minister of Finance transfers the assets to the Company for managing the assets by: selling, utilizing, leasing, restructuring and/or revitalization of assets in accordance with the Minister of Finance Regulation under PMK 92/PMK.06/2009 and its amendment.*
- *The Minister of Finance determines the value of assets based on the results of valid assessment, i.e. one year from the date of valuation of assets. When the result of asset valuation expired, the value of assets is determined using temporary asset value based on the results of latest assessment. Furthermore, if the Company would make an assessment in order to realize the asset management, then the Company is requested to provide asset value as of date of transferred-assets which would serve as the basis for the Minister of Finance to adjust the value of assets.*
- *The cost of assets are fixed expenditures which directly related to assets managed by the Company that shall be paid by the Minister of Finance which consists of: the cost of stock and securities depository, service charge, inherent tax on assets, such as land and building tax, rights improvement, electricity, telephone and water, insurance, asset cost arrears before transferred, other maintenance and other costs directly associated with assets under management after approval of Minister of Finance. The cost of assets could be settled directly by reducing the Asset Management Proceeds.*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

- Imbalan Pengelola Aset (IPA) diberikan paling besar 1,5% per tahun dari nilai aset. Dalam hal nilai aset belum ditetapkan oleh Menteri Keuangan, maka digunakan nilai aset sementara yang didasarkan pada hasil penilaian terakhir.
- Dalam hal realisasi HPA lebih besar dari nilai aset, maka Perusahaan berhak mendapatkan Imbalan Kinerja sebesar 5% dari selisih antara HPA per satuan aset dengan nilai aset per satuan aset. Apabila Imbalan Kinerja per satuan aset lebih besar dari IPA per satuan aset, maka Perusahaan hanya berhak atas Imbalan Kinerja per satuan aset dan apabila IPA per satuan aset lebih besar daripada imbalan kinerja per satuan aset, maka Perusahaan hanya berhak atas IPA per satuan aset;
- Penyerahan realisasi penerimaan negara oleh Perusahaan kepada Menteri Keuangan dilakukan setiap akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember. Dalam keadaan tertentu, Menteri Keuangan dapat meminta agar Perusahaan menyerahkan penerimaan negara di luar jadwal tersebut.
- Perusahaan wajib memelihara, menerapkan prosedur administrasi dan operasi serta menyimpan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan termasuk informasi lainnya yang secara wajar diperlukan dalam rangka pengelolaan aset secara terpisah dari buku-buku dan catatan-catatannya sendiri.

- *Asset Management Fee (IPA) is defined by maximum 1.5% per annum of the asset value. In terms of asset value is not determined by the Minister of Finance, then the temporary asset values based on the results of final assessment are used.*
- *In case of HPA realization is greater than the value of assets, the Company is entitled to a success fee for 5% of the differences between HPA per unit assets by asset value per unit of assets. If the Success Fee per unit of assets is greater than the IPA per unit of assets, the Company only entitled to the success fee per unit of asset and if the IPA per unit of assets is greater than the success fee of per unit of assets, the Company only entitled to the IPA per unit of assets;*
- *Submission of the realization of state revenues by the Company to the Minister of Finance settled quarterly in the end of March, June, September and December. In certain circumstances, the Minister of Finance might request Company to submit revenues beyond these schedules.*
- *The Company shall maintain, implement administrative procedures and its operations and also keep and maintain books and records include other information that is reasonably necessary in order to manage assets separately from the books and records themselves.*

b. Perjanjian Restrukturisasi dan Dana Talangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1. PT Merpati Nusantara Airlines (MNA)

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-716/MBU/2008 tanggal 4 September 2008 perihal Penyelesaian PT MNA dan Surat Menteri Keuangan No. S-478/MK.06/2008 tanggal 5 September 2008 perihal persetujuan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT MNA, Perusahaan memberikan pinjaman dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang berlaku pada awal periode pembayaran bunga. Pinjaman akan jatuh tempo 8 (delapan) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian pinjaman atau selambat-lambatnya tanggal 8 September 2016, sedangkan jatuh tempo pembayaran bunga pertama kali pada tanggal 8 Maret 2010.

b. Restructuring and Fund Advance of State Own Enterprise (SOE's) Agreement

1. PT Merpati Nusantara Airlines (MNA)

In accordance with the Letter Minister of SOE's No.S-716/MBU/2008 dated September 4, 2008 regarding the Restructuring of PT MNA and the letter of MOF No. S-478/MK.06/2008 dated September 5, 2008 regarding the approval of the Restructuring and/or Revitalization PT MNA, the Company approved loans with maximum credit facility amounting to Rp300,000 with the interest based on Bank Indonesia Certificates (SBI) at the beginning of initial interest payment period. The loan will be due 8 (eight) years from date of loan agreement signed or no later than September 8, 2016, while the first interest payment due on March 8, 2010.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

Berdasarkan surat keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP-152/MBU/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi MNA dan surat persetujuan Menteri Keuangan No. S-427/MK.06/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal persetujuan usulan Menteri BUMN terkait tambahan pemberian fasilitas pinjaman oleh Perusahaan kepada MNA sebesar Rp561.000 dalam rangka restrukturisasi dan/atau revitalisasi MNA sebagai dana talangan untuk MNA sementara menunggu pencairan dana tambahan Penyertaan Modal Negara.

Pada tanggal 21 Oktober 2011 dilakukan Addendum IV No. 15 Perjanjian Pinjaman Yang Dapat Dikonversikan Dalam Rangka Penyelamatan Usaha MNA yang diantaranya mengatur tentang penambahan Fasilitas Pinjaman dengan jumlah maksimum Rp861.000 dengan rincian Rp300.000 sebagai Fasilitas Pinjaman CLF (Convertible Loan Facility) dan Rp561.000 sebagai Fasilitas Pinjaman Talangan RR (Restrukturisasi dan Revitalisasi) serta perubahan mekanisme pembayaran bunga, tunggakan kewajiban, denda serta provisi dan biaya administrasi.

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-107/MBU/02/2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang pelaksanaan Restrukturisasi dan /atau Revitalisasi PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan surat persetujuan Menteri Keuangan No. S-21/MK.06/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Permohonan Persetujuan atas Penggunaan Dana RR PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan penanganan RR PT MNA secara keseluruhan.

Pada Tanggal 16 Februari 2016, Perusahaan melalui Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Dalam Rangka Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT Merpati Nusantara Indonesia Airlines (Persero) Nomor 17 memberikan pinjaman dengan plafon sebesar Rp 500.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,5 %per tahun bruto (termasuk pajak atas bunga). Pinjaman akan jatuh tempo 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian pinjaman atau selambat-lambatnya tanggal 15 Februari 2018. Pinjaman akan dialokasikan untuk membayar upah tertunggak dan/atau sebagian pesangon karyawan PT MNA serta biaya proses RR lainnya.

Based on the Minister of State Owned Enterprises decision letter No. KEP-152/MBU/2011 dated June 27, 2011 on the restructuring and / or revitalization of MNA and approval of the Minister of Finance by letter No. S-427/MK.06/2011 dated July 27, 2011, concerning approval of the Minister of SOEs additional related proposal to extend the loan by the Company to MNA for Rp561,000 restructuring and/or revitalization of MNA as a fund advance loan receivables for MNA while waiting for additional disbursement of State Capital.

In Addendum IV No. 15 on October 21, 2011 regarding Convertible Loan Agreement in order to Business Restructuring MNA, that status the addition of maximum amount to Rp861,000 of loan facility with details Rp300,000 as CLF Loan Facility (Convertible Loan Facility) and the Loan Facility bailout of Rp561,000 RR (Restructuring and Revitalization) as well as changes in interest payments mechanism, outstanding liabilities, fines, provisions and administrative costs.

In accordance with the Letter Minister of SOE's No.S-107/MBU/02/2016 dated February 3, 2016 regarding the Restructuring and revitalization of PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) by PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), and Approval Letter of Ministry of Finance No. S-21 / MK.06 / 2016 dated January 20, 2016 on Request for Approval for the Use of RR Funds by PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) and management of PT MNA's overall funds.

On February 16, 2016, based on Deed of Agreement Fund Lending for Restructuring and/or Revitalization Loan PT Merpati Nusantara Indonesia Airlines (Persero) No.17, the Company approved loans with maximum credit facility amounting to Rp500,000 with the interest rate of 10.5% per annum gross (including tax on interest). The loan will due date 2 (two) years from the signing of the loan agreement or at the latest dated February 15, 2018. The loan will be allocated to pay the owed wages and / or some of PT MNA employee severance and other RR process costs.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

Pada tanggal 16 November 2016 dilakukan Addendum V No. 09 Perjanjian Pinjaman Yang Dapat Dikonversikan Dalam Rangka Penyelamatan Usaha MNA yang diantaranya mengatur perpanjangan jangka waktu Fasilitas Pinjaman dengan masa perpanjangan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pinjaman CLF serta penyampaian informasi perubahan outstanding hutang atas Fasilitas Pinjaman CLF.

On November 16, 2016, the Addendum V No. 09 Agreement of Convertible Loans to Redeem MNA was arranged, which included regulations to extend Loan Facility with extension period no later than 10 (ten) years from the date of signing Loan Agreement CLF and submission of information on changes in outstanding debt on Loan Facility CLF.

2. PT PAL Indonesia (Persero) (PAL)

- Fasilitas Pinjaman Tranche A
Jumlah Fasilitas Pinjaman Tranche A yaitu maksimal sebesar setara USD 3,26 juta. Dana Fasilitas Pinjaman Tranche A dipergunakan untuk penyelesaian pembangunan Kapal Hull Nomor W239 (Tranche A1) dan Kapal Hull Nomor W240 (Tranche A2). Sesuai perjanjian, jangka waktu Fasilitas Pinjaman Tranche A2 berakhir pada tanggal 07 Mei 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, tanggal 20 Oktober 2010 telah dilakukan Addendum terhadap Perjanjian Pemberian Pinjaman Dalam Rangka Pembiayaan Proyek Kapal - Tranche A Nomor PP-06/PPA/1010 yang isinya mengenai tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Tranche A2 yaitu terhitung sejak Tanggal Efektif sampai dengan penerimaan pembayaran atas penyelesaian Kapal Hull Nomor W240, selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2011. Untuk Kapal Hull Nomor W239 telah selesai pembangunannya dan telah diserahkan kepada pembeli kapal, maka Fasilitas Pinjaman Tranche A1 yang ditujukan untuk pembiayaan Kapal Hull Nomor W239 tidak akan diperpanjang.

2. PT PAL Indonesia (Persero) (PAL)

- Loan Facility Tranche A
The amount of Loan Facility Tranche A is a maximum equivalent of USD3,26 million. Tranche A Facility funds are used for the completion of construction of Ship Hull No. W239 (Tranche A1) and Ship Hull No. W240 (Tranche A2). As per the agreement, the term of Tranche A2 Facility expires on May 7, 2010. In this regard, on October 20, 2010, Addendum to the Agreement of Loan Facility to Fund Ship Project - Tranche A No. PP-06 / PPA / 1010 has been carried out, which contain the maturity date of Tranche A2 amenities ie as from the Effective Date until the receipt of payment for the settlement of Hull Ship No. W240, no later than March 31, 2011. Since Hull Ship No. W239 has been built and has been handed over to its buyer, the Loan Facility Tranche A1 which is intended to finance Hull Ship No. W239 will not be extended.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

Pada tanggal 26 Oktober 2010, perusahaan mencairkan dana pinjaman sebesar Rp8.301,15 atau setara USD931.353,43 untuk pembiayaan penyelesaian pembangunan Kapal Hull W240. Pada tanggal 21 Maret 2011, Kapal Hull W240 telah diserahkan kepada Pembeli Kapal, namun PT PAL belum dapat mengembalikan dana pinjaman. Hal ini disebabkan Pembeli Kapal belum melunasi sisa pembayaran kapal karena masih belum diperoleh kesepakatan mengenai jumlah tagihan. Sehubungan hal tersebut, tanggal 20 Oktober 2011 kembali dilakukan Addendum II terhadap Perjanjian Pemberian Pinjaman Dalam Rangka Pembiayaan Proyek Kapal - Tranche A Nomor PP-06/PPA/1010 yang isinya mengenai perubahan tanggal jatuh tempo Fasilitas Tranche A2 yaitu terhitung sejak Tanggal Efektif sampai dengan penerimaan pembayaran atas penyelesaian Kapal Hull Nomor W240, selambat-lambatnya tanggal 30 April 2012.

Pada tanggal 20 Januari 2012, PAL telah melunasi bunga dan sebagian hutang pokok setelah PT PAL menerima pembayaran dari Pembeli Kapal, yakni sebesar Rp6.505 (bunga Rp975 dan pokok Rp5.530). Sebagian hutang pokok sebesar Rp2.771 selanjutnya dilunasi pada tanggal 16 Mei 2012.

• **Fasilitas Pinjaman Tranche B dan Tranche C**

Jumlah Fasilitas Pinjaman Tranche B dan C yaitu masing-masing maksimal sebesar setara USD11,99 juta dan USD10,35 juta. Dana Fasilitas Pinjaman Tranche B dan Tranche C yang rencananya akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Kapal Hull Nomor M262, M263, M264, M265, M256, M257, M254 dan M255 tidak jadi digunakan dikarenakan telah dibiayai sendiri oleh Pembeli Kapal.

On October 26, 2010, the company disbursed loans amounting to Rp8.301,15 or equivalent USD931,353.43 to finance the completion of construction of Hull Ship W240. On March 21, 2011, Hull Ship W240 was handed over to its Buyer, but PT PAL could not to refund the loan. This is due to ship buyers who have not pay the remaining payment because there was no agreement made on the amount of the payables. In relation to the matters, on October 20, 2011 Addendum II Agreement of Loan Facility to Fund Ship Project was made, which is regarding changes in maturity date Facility Tranche A2 i.e. as from the Effective Date until the reception payment upon completion of Hull Ship No. W240, not later than April 30, 2012.

On January 20, 2012, PAL paid interest and some principal debt after PT PAL received payments from ship buyers, which amounted to Rp6,505 (Rp975 interest and principal Rp5,530). Most of the principal debt amounting to Rp2,771 was subsequently paid in full on May 16, 2012.

• **Loan Facility Tranche B and C**

Total Loan Facility Tranche B and C are respectively equivalent maximum of USD11.99 million and USD10.35 million. Funds of Loan Facility Tranche B and Tranche C will be used to complete the construction of Hull Ship No. M262, M263, M264, M265, M256, M257, M254 and M255 were not used because the buyer had funded it.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

• **Fasilitas Pinjaman Tranche D**

Jumlah Fasilitas Pinjaman Tranche D yaitu maksimal sebesar Rp193.370. Dana Fasilitas Pinjaman Tranche D dipergunakan untuk pembiayaan korporasi. Tanggal Jatuh Tempo perjanjian yaitu 31 Desember 2018 dengan jadwal pembayaran bunga pertamakali yaitu 31 Maret 2012. Sampai dengan 31 Desember 2011, jumlah pinjaman yang telah dicairkan adalah sebesar Rp170.703.

Tanggal 28 Desember 2012, telah dilakukan Addendum Perjanjian Pemberian Pinjaman untuk Pembiayaan Korporasi – Tranche D Nomor PP-14/PPA/1212 yang isinya mengenai perubahan tingkat suku bunga pinjaman menjadi tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) ditambah 3% (tiga persen). Tanggal 17 Desember 2014, PAL membayar sebagian hutang pokok sebesar Rp18.862. Sehingga outstanding pokok PAL per 31 Desember 2014 menjadi Rp151.841.

• **Fasilitas Dana Talangan**

Pada tanggal 20 Desember 2011, perusahaan memberikan pinjaman dana talangan sebesar Rp89.190 dengan tujuan penggunaan untuk pembayaran tunggakan kewajiban fasilitas KITE yang dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan Nomor PP-15/PPA/1211. Tingkat suku bunga pinjaman adalah sebesar tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI Rate). Tanggal jatuh tempo pinjaman yaitu tanggal terealisasinya realokasi dana restrukturisasi dan/atau revitalisasi PAL menjadi dana pembayaran tunggakan kewajiban fasilitas KITE, selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal efektif. Pinjaman atas dana talangan dijamin dengan Fidusia atas tagihan/piutang PAL senilai Rp112.000 dan tanah serta bangunan senilai Rp9.700.

Oleh karena realokasi dana restrukturisasi dan/atau revitalisasi PAL menjadi dana pembayaran Tunggakan Kewajiban KITE belum terealisasi, maka jangka waktu perjanjian diperpanjang menjadi selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2012 yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian Nomor PP-06/PPA/0812 tanggal 01 Agustus 2012.

Pada bulan Mei, Juli dan Agustus tahun 2014 secara berturut-turut, PAL telah melunasi pinjaman dana talangan tersebut beserta bunganya senilai Rp95.190.

• **Loan Facility Tranche D**

Number of Tranche D Facility is a maximum of Rp193,370. Tranche D Facility funds used for corporate financing. Maturity date is December 31, 2018 agreement with the first interest payment schedule is March 31, 2012. As of December 31, 2011, the amount of loans disbursed amounted to Rp170,703.

On December 28, 2012, Addendum to Agreement of Loan Facility to Finance Corporation - Tranche D No. PP-14 / PPA / 1212 changes in the interest rate of loans into interest rate of Bank Indonesia (BI Rate) plus 3% (three percent). On December 17, 2014, PAL repaid a portion of the principal amounted to Rp18,862. Therefore, the principal outstanding as of December 31, 2014 became Rp151,841.

• **Bailout Facility**

On December 20, 2011, the company provided bailout loans amounting to Rp89,190 to pay arrears of KITE facility as set forth in the Bailout Loan Agreement No. PP-15 / PPA / 1211. The interest rate on the loan is equal to the interest rate of Bank Indonesia (BI Rate). The maturity date of the loan is the date of realization of the reallocation of restructuring and / or revitalization PAL funds into funds of KITE facility arrears payment, no later than 6 months from the effective date. Loans on bailouts are pledged by the Fiduciary billing / receivable worth Rp112,000, and land and buildings worth Rp9,700.

Since reallocation of restructuring and / or revitalization of PAL funds into funds to pay KITE arrears is not realized yet, therefore the term of agreement is extended to not later than on December 31, 2012 as outlined in the Addendum to Agreement No. PP-06 / PPA / 0812 dated August 1, 2012.

On May, July and August 2014 respectively, PAL has paid the bailout loans with its interests valued at Rp95,190.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

• **Restrukturisasi hutang**

Pada tanggal 30 Desember 2015, telah dilakukan restrukturisasi hutang terhadap pemberian pinjaman untuk pembiayaan korporasi – Tranche D yang dituangkan dalam Perjanjian Restrukturisasi Hutang PT PAL Indonesia (Persero) Nomor 47. Tanggal Jatuh Tempo perjanjian menjadi 31 Desember 2030. Hutang pokok sebesar Rp151.841 direstrukturisasi menjadi Fasilitas Tranche A, hutang bunga sebesar Rp88.742 dan denda pokok sebesar Rp4.465 direstrukturisasi menjadi Fasilitas Tranche B.

Dengan dilakukannya restrukturisasi hutang PT PAL kepada Perusahaan, maka seluruh Perjanjian Pemberian Pinjaman Dalam Rangka Pembiayaan Proyek Kapal (Project Financing) tanggal 16 Desember 2009 Nomor 09 (Tranche A), Nomor 10 (Tranche B) dan Nomor 11 (Tranche C) dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. PT Kertas Kraft Aceh (Persero) (KKA)

Berdasarkan surat Menteri Negara BUMN No. S-596/MBU/2009 tanggal 25 Agustus 2009, yang dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan No. 25 tanggal 28 Agustus 2009, Perusahaan memberikan pinjaman dengan jumlah pokok fasilitas maksimum sebesar Rp125.720 dengan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia ("SBI") untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan per tahun (netto). Pemberian pinjaman bertujuan untuk pembayaran kompensasi sehubungan dengan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan KKA.

Jangka waktu pemberian pinjaman selama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak tanggal penarikan pertama pinjaman atau pada tanggal diterimanya uang hasil penjualan (pembayaran) aset KKA, mana yang lebih dulu.

• **Loan Restructuring**

On December 30, 2015, a debt restructuring was made to a loan lent to finance corporation – Tranche D, as outlined in the Debt Restructuring Agreement PT PAL Indonesia (Persero) Number 47. The expiry date of the agreement is on December 31, 2030. Debt principal amounted to Rp151,841 was restructured into Facility Tranche A, interest payable amounted to Rp88,742, and fine charged to loan amounted to Rp4,465 were restructured into Facility Tranche B.

In conjunction with the debt restructuring of PT PAL to the Company, therefore the entire Lending Agreement to Finance Ship Project (Project Financing) dated December 16, 2009 No. 09 (Tranche A), No. 10 (Tranche B), and No. 11 (Tranche C) are no longer valid.

3. PT Kertas Kraft Aceh (Persero) (KKA)

In accordance with the Minister of SOE's Letter No. S-596/MBU/2009 dated August 25, 2009, as outlined in the Bailout Loans Agreement No. 25 dated August 28, 2009, the Company provides loans receivable with a maximum principal amounted to Rp125,720 with interest rate of SBI for the period of 3 (three) months per year (net). The lending objective is regarding payment of compensation in relation with KKA's employees termination.

The term of loan for 12 (twelve) months is starting from the date of first drawdown or the date of receipt of the proceeds (payment) of KKA assets, whichever is earlier.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

Berdasarkan Perjanjian No. PP-05/PPA/0810 tanggal 30 Agustus 2010 dilakukan Addendum I atas Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan No.25 tanggal 28 Agustus 2009. Addendum tersebut mengatur tentang perubahan jangka waktu Fasilitas Pinjaman menjadi 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penarikan pertama sampai dengan diterimanya uang hasil penjualan (pembayaran) aset KKA atau dalam hal penyelesaian permasalahan KKA ditetapkan melalui restrukturisasi dan/atau revitalisasi sampai dengan tanggal pencairan pertama kali atas dana fasilitas pinjaman restrukturisasi dan/atau revitalisasi yang diterima KKA.

Berdasarkan Perjanjian No.PP-03/PPA/0312 tanggal 30 Maret 2012 dilakukan addendum III atas Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan No. 25 tanggal 28 Agustus 2009. Dalam addendum tersebut jangka waktu Fasilitas Pinjaman diperpanjang menjadi 42 (empat puluh dua) bulan terhitung sejak Tanggal Penarikan Pinjaman Pertama, yaitu sampai dengan 28 Februari 2013 atau sampai dengan tanggal diterimanya hasil penjualan aset KKA.

Pada tanggal 26 Juli 2010 dilakukan Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan No. PP-04/PPA/0710 tanggal 26 Juli 2010, jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp1.914 dengan tingkat suku bunga SBI untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan per tahun (netto). Pemberian pinjaman bertujuan untuk pembayaran biaya jasa konsultan keuangan dan konsultan teknik sehubungan dengan pelaksanaan kajian menyeluruh atas opsi-opsi penyelesaian permasalahan KKA dalam upaya pengoperasian kembali KKA. Jangka waktu fasilitas pinjaman adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal efektif/tanggal ditandatangani perjanjian.

Berdasarkan Perjanjian No.PP-07/PPA/0511 tanggal 23 Mei 2011 dilakukan addendum I atas Perjanjian Pinjaman Dana Talangan No. PP-04/PPA/0710 tanggal 26 Juli 2010, addendum tersebut mengatur penambahan jumlah pokok fasilitas pinjaman sebesar Rp125 sehingga total jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum Rp2.039. Perusahaan diposisikan sebagai kreditur yang didahulukan pelunasannya (senior creditor) hingga sejumlah Rp141.730.

Based on the Agreement No. PP-05/PP/0810 dated August 30, 2010, an Addendum I to Bailout Agreement No. 25 dated August 28, 2009. The Addendum regulated on changes in term of Loan Facility to 18 (eighteen) months since the date of first withdrawal until the receipt of revenue (sales) from KKA assets, or in terms of settlement to KKA issues, it is set up through restructuring and/or revitalization until the date of the first disbursement on loan facility of restructuring and/or revitalization received by KKA.

Based on the Agreement No. PP-03/PPA/0312 dated March 30, 2012, Addendum III was carried out to Bailout Agreement No. 25 dated August 28, 2009. In the Addendum the term of Loan Facility is extended to 42 (fourty two) months since the date of first withdrawal until 28 February 2013, or until the date when sales of KKA assets are received.

On July 26, 2010, a Bailout Agreement No. PP-04/PPA/0710 dated July 26, 2010 was done, with the amount of maximum principal facilityis Rp1,914 using SBI rates for 3 (three) months per year (net). The lending was aiming to pay expenses of finance consulting services and engineering consulting services, regarding the implementation of holistic evaluation to settlement of KKA issues in attempt for re-operation of KKA. Term of loan facility is 12 (twelve) months starting from the effective date/signing date.

Based on the Agreement No. PP-07/PPA/0511 dated May 23, 2011, Addendum I to Bailout Agreement No. PP-04/PPA/0710 dated July 26, 2010. The Addendum regulates the increase in principal loan facility amounted to Rp125, therefore the total amount of principal loan facility is a maximum of Rp2,039. The Company as senior creditor is prioritized in its redemption up to Rp141,730.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Dana Talangan No.PP-11/PPA/0711 tanggal 25 Juli 2011 dilakukan addendum II atas Perjanjian Pinjaman Dana Talangan No. PP-04/PPA/0710 tanggal 26 Juli 2010. Dalam addendum tersebut jangka waktu fasilitas pinjaman diubah menjadi 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal efektif atau sampai dengan tanggal diterimanya uang hasil penjualan aset KKA atau dalam hal penyelesaian permasalahan KKA ditetapkan melalui restrukturisasi dan/atau revitalisasi, sampai dengan tanggal pencairan pertama kali atas dana fasilitas pinjaman restrukturisasi dan/atau revitalisasi yang diterima oleh KKA dari Perusahaan sesuai dengan penugasan dari Menteri Negara BUMN dengan persetujuan Menteri Keuangan (tergantung mana yang terjadi lebih dahulu).

Pada tanggal 13 April 2012 dilakukan Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan untuk Biaya Pengamanan dan Pemeliharaan Aset No.PP-04/PPA/0412. Jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp6.600 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak mulai beroperasinya Fasilitas Pembangkit Tenaga Listrik KKA melalui kerjasama dengan PLN.

Berdasarkan Perjanjian No. PP-10/PPA/1012 tanggal 4 Oktober 2012 Perusahaan memberikan Pinjaman Dana Talangan Kepada KKA dengan pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp17.600 dengan rincian :

- Fasilitas Pinjaman Tranche A, dengan pokok fasilitas pinjaman maksimum Rp13.200 yang digunakan untuk biaya pengamanan dan pemeliharaan aset periode Januari sampai dengan Desember 2012.
- Fasilitas Pinjaman Tranche B, dengan pokok fasilitas pinjaman maksimum Rp4.400 yang digunakan untuk biaya konsultan teknis pengoperasian Fasilitas Pembangkit Tenaga Listrik KKA.

Based on the Bailout Agreement No.PP-11/PPA/0711 dated July 25, 2011, Addendum II was done on Bailout Agreement No. PP-04/PPA/0710 dated 26 July 2010. In the Addendum a loan facility term was changed into 24 (twenty four) months starting the effective date or until the date when sales of KKA assets is received, or in terms of settlement of KKA issues set through restructuring and/or revitalization, until the date of first disbursement of loan facility of restructuring and/or revitalization received by KKA through Company according with the assignment from Minister of SOE with approval from Minister of Finance (depends on whichever occurs first).

On April 13, 2012, a Bailout Agreement on Security and Maintenance of Assets No PP-04/PPA/0412 was done. The amount of principal loan facility is maximum Rp6.600 with 12 (twelve) months loan term starting from the initial operation of Power Plant Facilities KKA in cooperation with PLN.

Based on the Agreement No. PP-10/PPA/1012 dated October 4, 2012 the Company provides KKA's Bailout Loan with maximum loan facility principle amounted to Rp17,600 with details as follows:

- *Loan Facility Tranche A, with a maximum amount of loan facility principal of Rp13,200 which is used to fund the security and safeguarding of assets on January until December 2012.*
- *Loan Facility Tranche B, with a maximum of loan facility principal amount of Rp4,400 which is used to pay engineering consultants on KKA Power Generator Facility.*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

Pada tanggal 19 November 2013, ditandatangani Perjanjian No PP-11/PPA/1113 antara Perusahaan dengan PT KKA perihal Perubahan Menyeluruh Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan menjadi Pinjaman Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi. Adapun pokok-pokok dari pinjaman tersebut antara lain:

- Dengan keluarnya Keputusan Menteri Negara BUMN selaku ketua Komite Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN No. KEP-02/MBU/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi Perusahaan PT Kertas Kraft Aceh (Persero). Maka Perusahaan melakukan pengalihan atas pinjaman dana talangan yang termasuk dalam program Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi, menjadi pinjaman Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi.
- Adapun perjanjian awal yang dialihkan status sumber pendanaan dari dana talangan menjadi dana RR adalah:
 1. Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 25 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan dari Perusahaan kepada PT KKA;
 2. Perjanjian No. PP-04/PPA/0710 tanggal 26 Juli 2010 untuk Biaya Jasa Konsultan Keuangan dan Konsultan Teknik;
 3. Perjanjian No. PP-01/PPA/0111 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pemberian Pinjaman Dana Talangan Untuk Biaya Pengamanan dan Pemeliharaan Aset;
 4. Perjanjian No. PP-13/PPA/1111 tanggal 23 November 2011 tentang Pemberian Pinjaman Dana Talangan Untuk Biaya Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Periode April – Juni 2011.

Berdasarkan Perjanjian No. PP-03/PPA/0414 tanggal 14 April 2014, Perusahaan memberikan pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp120.132 dengan rincian:

On November 19, 2013, an agreement was signed, that is the Agreement No PP-11/PPA/1113 between the Company and PT KKA regarding the Comprehensive Amendment of Lending Bailout Loan Agreement to become Restructuring and/or Revitalization Loan. The basic terms of Loan are as follows :

- As with the release of the Decision of State-Owned Enterprises Minister as the Chairman of State-Owned Enterprises Restructuring and Revitalizing Committee No. KEP-02/MBU/2012 on 4 January 2012 about Restructuring and/or Revitalization of PT Kertas Kraft Aceh (Persero). Therefore the Company transferred the bailout loan that was included in Restructuring and Revitalizing Program into Restructuring and/or Revitalization Loan.
- The initial agreement which status of source of funding are transferred from bailouts loan into Restructuring and Revitalization funds are:
 1. Deed of Loan Agreement No. 25 on August 28, 2009 about Bailouts Loan Agreement from the Company to PT KKA;
 2. Agreement No. PP-04/PPA/0710 on July 26, 2010 for Costs of Financial Consultant and Engineering Consultant Services;
 3. Agreement No. PP-01/PPA/0111 on January 31, 2011 about Distribution the Bailout Loan for the Costs of Security and Safeguarding of Assets;
 4. Agreement No. PP-13/PPA/1111 on November 23, 2011 about Distribution of Bailouts Loan for Security and Safeguarding of Assets for the period April until June 2011;

Based on Agreement No. PP - 03 / PPA / 0414 on April 14, 2014, the Company provides a loan facility principal with maximum amount of Rp120,132 with details as follow :

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

- Fasilitas Pinjaman untuk Modal Kerja Pengadaan Gas sebesar Rp112.132 dengan peruntukan; uang jaminan kepada PT PIM selama kerjasama penyaluran gas secara proposional berdasarkan pemakaian volume gas alam, biaya pemakaian gas untuk *start up* dan *shut down*, dan pembayaran kargo gas.

- *Loan Facility of Working Capital for Gas Procurement amounted to Rp112,132 with allocation; bail to PT PIM during the cooperation of proportionate gas distribution based on the volume of natural gas used, gas usage fee to start up and shut down, and the gas cargo payment.*

Tingkat suku bunga yang diberlakukan atas pokok Fasilitas Pinjaman adalah sebesar 13% (tiga belas persen) per tahunan dan wajib dibayarkan kepada Perusahaan pada setiap hari kerja terakhir selama jangka waktu peminjaman

The interest rate imposed on the principal loan facility is amounted to 13% (thirteen percent) per year and must be paid to the Company on every last business days during the loan period.

Addendum I No. PP-04/PPA/0614 tanggal 10 Juni 2014 merupakan perubahan atas Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan Dalam Rangka Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT Kertas Kraft Aceh (Persero) pada pasal Fasilitas Pinjaman Untuk Biaya Pra Operasi dan Fasilitas Pinjaman Untuk Modal Kerja Pengadaan Gas.

Addendum I No. PP-04 / PPA / 0614 dated June 10, 2014 is an amendment to the Bailout Agreement for the Operation and Maintenance of Electric Steam Power Plant (PLTU) PT Kertas Kraft Aceh (Persero), in the article Loan Facility for Pre-Operation Cost and Loan Facility to Gas Procurement Working Capital.

Pada Addendum II PP-01/PPA/0115 tanggal 15 Januari 2015 dilakukan perubahan atas Fasilitas Pinjaman Untuk Biaya Pra Operasi, Tanggal Pembayaran Bunga, Provisi dan Administrasi serta jadwal angsuran pokok.

Addendum II PP-01 / PPA / 0115 dated January 15, 2015 is an amendment to the Loan Facility for Pre-Operating Costs, Interest Payment Date, Provision, Administration and Principal Repayment Schedule.

Addendum III PP-04/PPA/0515 tanggal 28 Mei 2015 dilakukan realokasi Fasilitas Pinjaman Untuk Modal Kerja Pengadaan Gas menjadi Fasilitas Pinjaman Pra Operasi, ketentuan penarikan dana fasilitas pinjaman untuk biaya pra operasi serta jadwal angsuran pokok.

Addendum III-04 PP / PPA / 0515 dated May 28, 2015 is reallocation of Loan Facility for Gas Procurement Working Capital into Loan Facility for Pre-Operation, which include provision of loan facility withdrawal for pre-operating costs and principal payment schedule.

Addendum IV PP-03/PPA/0216 tanggal 4 Februari 2016 dilakukan realokasi Fasilitas Pinjaman Untuk Modal Kerja Pengadaan Gas menjadi Fasilitas Pinjaman Pra Operasi serta jadwal pembayaran angsuran pokok.

Addendum IV PP-03 / PPA / 0216 dated February 4, 2016 is reallocation Working Capital Loan Facility To Supply Gas into Pre Loan Facility Operations and principal installment payment schedule.

Tanggal jatuh tempo pinjaman adalah pada tanggal 31 Desember 2017 atau tanggal pencairan fasilitas pinjaman dana restrukturisasi dan/atau revitalisasi atau tanggal *refinancing* (mana yang lebih dulu)

The maturity date of the loan is on December 31, 2017 or the date of restructuring and/or revitalization loan facility disbursement or refinancing date (whichever is earlier).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

4. PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (ISN)

Berdasarkan surat Menteri Negara BUMN No.S-494/MBU/2009 tanggal 21 Juli 2009 dan dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan No.02 tanggal 5 Agustus 2009, Perusahaan memberikan pinjaman dengan jumlah pokok fasilitas maksimum sebesar Rp25.000 dan tingkat suku bunga sebesar 15% per tahun. Pemberian pinjaman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dana operasional ISN dengan jangka waktu 3 (bulan) terhitung sejak tanggal penarikan pinjaman. Perhitungan bunga atas fasilitas pinjaman dilakukan mulai dari masing-masing tanggal penarikan dana fasilitas pinjaman sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Perjanjian ini dijamin dengan Hak Tanggungan Tingkat I (pertama) atas sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No. 00688/Telukjambe seluas 445.350 m2 dengan nilai sebesar Rp32.500.

Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan No.2 Tanggal 5 Agustus 2009 telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu Addendum I No. 16 Tanggal 14 September 2009 mengenai perubahan penggunaan dana fasilitas pinjaman.

Berdasarkan perjanjian No. PP-07/PPA/0812 tanggal 7 Agustus 2012 telah dilakukan Addendum IV Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan, yaitu mengenai penambahan jaminan atas pinjaman yang diberikan. Tambahan jaminan tersebut diantaranya adalah 2 (dua) bidang tanah Hak Guna Bangunan pada Unit Patal Grati senilai Rp50.000, Gadai atas 60.000 lembar saham PT ISN pada PT Artha Bangun Pratama senilai Rp60.000 dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan pada Unit Patal Karawang.

Pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Perjanjian No. PP-11/PPA/1012 dilakukan Addendum V Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan, yaitu mengenai pelepasan aset PT ISN berupa tanah dan bangunan pada Unit Patal Karawang dengan HGB No. 00688/Telukjambe (sis), sehingga aset bukan lagi menjadi bagian dari jaminan.

4 PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (ISN)

In accordance with the letter of the Minister of SOEs' No. S-494/MBU/2009 dated July 21, 2009 and set forth in the Bailout Lending Agreement No. 02 dated August 5, 2009, the Company provides loan with a maximum principal amounted to Rp25,000 and interest rates of 15% per annum. The objective of loan lending is to meet the needs of ISN's operational funds with a term period of 3 (three) months commencing from the withdrawal date. The calculation of interest on the loan facility made is started from the date of each withdrawal facility until the maturity date.

The agreement is secured by the Mortgage Right Level I (first) for a plot of land and buildings with SHGB No. 00688/Telukjambe cover 445,350 sqm amounted to Rp32,500.

Bailout Agreement No. 2 dated August 5, 2009 has been amended several times, including Addendum I No. 16 dated September 14, 2009 regarding changes in use of loan funds.

Based on Agreement No. PP-07/PPA/0812 dated August 7, 2012 the Addendum IV Fund Advance Loan Receivables Agreement was made, regarding addition of collateral for the loan granted. The additional warrants include 2 (two) plots of land and Building Rights on Patal Grati Unit worth Rp50,000, fiduciary for 60,000 shares of PT ISN to PT Artha Bangun Pratama amounted to Rp60,000 and a piece of land and Building Rights in Uni Patal Karawang.

On October 25, 2012, based on the Agreement No. PP-11/PPA/1012, Addendum V Fund Advance Loan Receivables Agreement was made, which is regarding the transfer of PT ISN assets i.e. land and building in Patal Karawang Unit with HGB No. 00688/Telukjambe (remaining), hence the asset is no longer a part of the warrant.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

Pada tanggal 16 Januari 2013, berdasarkan Perjanjian No. PP-01/PPA/0113 dilakukan Addendum VI Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan, yaitu mengenai Penitipan Uang Sebagai Jaminan Pinjaman Dana Talangan. Terkait hal tersebut, pada tanggal 19 Maret 2013 berdasarkan Perjanjian No. PP-03/PPA/0313 kembali dilakukan Addendum VII, yaitu mengenai penambahan jaminan atas pinjaman yang diberikan. Tambahan jaminan tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan di Pabriteks Tegal dengan SHGB No. 124 senilai Rp250.

On January 16, 2013, under the Agreement No. PP-01 / PPA / 0113 the Addendum VI Bailout Agreement was made, which is regarding Custody of Fund as Bailout Loan Warrants. In relation to this, on March 19, 2013 under Agreement No. PP-03 / PPA / 0313 Addendum VII was added, that is the addition of collateral for loans. The additional warrants is a plot of land and building in Pabriteks Tegal with SHGB No. 124 worth Rp250.

Berdasarkan Perjanjian No. PP-07/PPA/0813 tanggal 29 Agustus 2013 telah dilakukan Addendum VIII Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan, yaitu mengenai perubahan pembayaran bunga yang sebelumnya ditetapkan tanggal 28 setiap bulan menjadi pembayaran bunga selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2013.

Based on the agreement No. PP-07 / PPA / 0813 dated August 29, 2013, the Addendum VIII Fund Advance Loan Receivables Agreement was made, which is regarding changes in interest payments which previously was established on the 28th of each month into no later than December 31, 2013.

Pada tanggal 30 Desember 2013, berdasarkan Perjanjian No. PP-13/PPA/1213 dilakukan Addendum IX Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan, yaitu mengenai perubahan jatuh tempo yang diperpanjang hingga tanggal 31 Desember 2014, perubahan tingkat suku bunga menjadi 14% serta pelepasan jaminan tunai.

On December 30, 2013, under the Agreement No. PP-13 / PPA / 1213, Addendum IX Fund Advance Loan Receivables Agreement was made, which is regarding changes in the maturity to until December 31, 2014, changes in the interest rate to 14% and the release of cash collateral.

Berdasarkan perjanjian No. SU-06/PPA/1014 Tanggal 30 Oktober 2014 Perusahaan melakukan Perjanjian Penerbitan Secured Promissory Notes (SPN) dengan nilai pagu kredit Rp4.106, tingkat suku bunga 14% (gross) per tahun, jatuh tempo SPN tanggal 15 Oktober 2015.

Based on the Agreement No. SU-06 / PPA / 1014 dated October 30, 2014 the Company issued the Secured Promissory Notes (SPN) with a ceiling value of Rp4.106, interest rate of 14% (gross) per annum, and SPN maturity date on October 15, 2015.

Pada tanggal 29 Desember 2014, berdasarkan Perjanjian No. PP-07/PPA/1214 kembali dilakukan Addendum X Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan, yaitu mengenai perpanjangan jatuh tempo hingga tanggal 31 Desember 2015

On December 29, 2014 based on the Agreement No. PP-07/PPA/1214, Addendum X on Bailout Agreement was made, which is regarding the extension of the maturity date to December 31, 2015

Pada tanggal 2 April 2015, PT ISN melakukan pelunasan pada pinjaman SPN, sementara pembayaran sebagian pada Pinjaman Dana Talangan

On April 2, 2015 PT ISN settled the SPN loans, while partially paid the Fund Advance Loan Receivables.

Pada tanggal 4 Januari 2016, berdasarkan Perjanjian No. PP-01/PPA/0116 kembali dilakukan Addendum XI Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan, yaitu mengenai perpanjangan jatuh tempo hingga tanggal 31 Desember 2016.

On Januari 4, 2016 based on the Agreement No. PP-01/PPA/0116 Addendum XI Fund Advance Loan Receivables Agreement was made, which is regarding the extension of maturity date until December 31, 2016

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

Berdasarkan perjanjian No. SU-02/PPA/0216 Tanggal 18 Februari 2016 Perusahaan kembali melakukan Perjanjian Penerbitan *Secured Promissory Notes* (SPN) dengan nilai pagu kredit Rp126.000, tingkat suku bunga 14% (gross) per tahun, jatuh tempo SPN tanggal 31 Maret 2017.

Selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2016, berdasarkan Perjanjian No. SU-09/PPA/1216 telah dilakukan Addendum I Perjanjian Penerbitan *Secured Promissory Notes* (SPN), yaitu mengenai perpanjangan jatuh tempo hingga tanggal 30 September 2017.

Pada tanggal 5 Januari 2017, berdasarkan Perjanjian No. PP-01/PPA/0117 kembali dilakukan Addendum XII Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan, yaitu mengenai perpanjangan jatuh tempo hingga tanggal 31 Desember 2017.

5. PT Dirgantara Indonesia (Persero) (DI)

Berdasarkan surat Menteri Negara BUMN No. S-720/MBU/2010 tanggal 23 Nopember 2010 perihal pinjaman dalam rangka project financing bagi PT DI serta surat No.S-735/MBU/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal penegasan penggunaan dana korporasi Perusahaan yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit/Pinjaman Jangka Pendek Nomor 13 tanggal 2 Desember 2010, Perusahaan memberikan pinjaman dengan jumlah pokok fasilitas maksimum sebesar Rp237.180 dan telah direalisasikan sebesar Rp234.610 dengan tingkat suku bunga sebesar 11% per tahun.

Jatuh tempo pinjaman adalah setiap dibayarkannya tagihan atas proyek Super Puma dan/atau Bell ke rekening PT DI di Bank BNI yang menampung pembayaran Super Puma dan Bell atau tanggal 28 Februari 2010; mana yang lebih dulu.

Perjanjian pinjaman ini dijamin dengan Hak tagih atau piutang PT DI terhadap proyek Super Puma dan proyek Bell yang masing-masing bernilai Rp179.335 dan Rp99.866 yang selain kepada Perusahaan juga dijamin kepada Bank BRI dengan hak klaim secara pari pasu, 2 (dua) unit mesin pesawat helikopter, yaitu NAS332 C1 SPUMA N-20 (Super Puma) dan Bell-412EP berikut komponennya yang masing-masing bernilai Rp179.335 dan Rp99.866.

Based on the agreement No. SU-02 / PPA / 0216 on February 18, 2016 the Company re-entered into an Issuance of Secured Promissory Notes (SPN) with credit ceiling value of Rp126,000, interest rate of 14% (gross) per year, and the SPN maturity date SPN on March 31, 2017.

On December 8, 2016, based on the Agreement No. SU-09 / PPA / 1216 Addendum I Secured Promissory Notes (SPN) Issuance Agreement was made, which is an extension of the maturity date until the date of September 30, 2017.

On 5 January 2017, based on the Agreement No. PP-01 / PPA / 0117 Addendum XII Bailout Borrowing Agreement was made, which is regarding the extension of the maturity date to December 31, 2017.

5. PT Dirgantara Indonesia (Persero) (DI)

In accordance with the letter of the Minister SOEs' No. S-720/MBU/2010 dated November 23, 2010 regarding loan for PT DI project financing, as well as Letter No. S-735/MBU/2010 dated December 1, 2010 regarding the confirmation of the use of corporate funds as set in the Credit/Short Term Loan Agreement No. 13 dated December 2, 2010, the Company provides loans with a maximum of principal amount of Rp237,180, amount which has been realized is Rp234,610, with an interest rate of 11% per annum.

Loan maturity is on any bill-payment on the Super Puma and / or Bell project to the account of PT DI in Bank BNI that holds payment of Super Puma and Bell or on February 28, 2010 whichever is earlier.

The loan agreement is secured with Claim right or receivable of PT DI to the Super Puma and Bell projects, each worths Rp179,335 and Rp99,866 which in addition to the Company, also secured to Bank BRI with rights claims on pari passu, two (2) units of helicopter engines, i.e. C1 NAS332 SPUMA N-20 (Super Puma) and Bell-412EP along with the components, each of which is worth Rp179,335 and Rp99,866.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

Pinjaman tahap II kepada PT DI yang diberikan berdasarkan surat Menteri Negara BUMN No.S-79/MBU/2011 tanggal 23 Februari 2011 perihal Persetujuan Pinjaman Dana dari Perusahaan dan surat No.S-114/MBU/2011 tanggal 14 Maret 2011 perihal Penetapan RUPS Perusahaan untuk memberikan Pinjaman Jangka Pendek Tahap II kepada PT DI. Pinjaman tersebut dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Jangka Pendek No.182 tanggal 25 Maret 2011.

Jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp89.000, pinjaman tersebut akan digunakan untuk keperluan penyelesaian proyek, pembiayaan operasional, modal kerja dan pembiayaan tagihan PT DI lainnya yang dibagi dalam 3 (tiga) jenis pinjaman yaitu:

- Tranche A untuk penyelesaian proyek AD TRADE dan pembayaran gaji bulan Februari 2011, dengan pokok pinjaman maksimal Rp32.800.
- Tranche B untuk pembiayaan modal kerja, pokok pinjaman maksimal Rp54.500.
- Tranche C untuk pembiayaan tagihan PT DI lainnya, dengan pokok pinjaman maksimal Rp1.700.

Bunga pinjaman adalah sebesar 11% per tahun dan denda keterlambatan pembayaran pokok dan bunga sebesar 6% per tahun.

Pada tanggal 7 November 2011, pinjaman dana talangan PT DI lunas bersamaan dengan pencairan kedua Pembiayaan korporasi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Korporasi PT Dirgantara Indonesia (Persero) No.55 tanggal 18 Agustus 2011 Perubahan I (Pertama) Perjanjian Pembiayaan Korporasi PT Dirgantara Indonesia (persero) No.04 tanggal 3 Nopember 2011 dengan tujuan penggunaan dana untuk tambahan modal kerja untuk mengatasi defisit cashflow tahun 2011 dan investasi pembelian mesin untuk penyelesaian proyek-proyek terkontrak.

Phase II credit to PT DI given based on the Letter of the Minister of SOE No. S-79/MBU/2011 dated February 23, 2011 regarding the Approval of Fund Loan from the Company and Letter No. S-114/MBU/2011 dated March 14, 2011 regarding the Stipulation of Company RUPS to provide Short-Term Loans Phase II to PT DI. The loan was set into Short-Term Loan Agreement No. 182 dated March 25, 2011.

The principal amount of the loan facility to a maximum of Rp89,000, the loan will be used for completion of the project, financing operations, working capital and other financing charges of PT DI which are divided into three (3) types of loans as follows:

- *Tranche A for completion of AD TRADE project and payroll of February 2011, with a maximum loan principal of Rp32,800.*
- *Tranche B for the financing of working capital, with a maximum loan principal of Rp54,500.*
- *Tranche C for PT DI other financing charges, with a maximum loan principal of Rp1,700.*

The loan interest is 11% per year and fine for late payment of principal and interest is 6% per year.

On November 7, 2011, the bailout loan of PT DI settled simultaneously with the second disbursement of corporate financing based on Corporate Financing Agreement PT Dirgantara Indonesia (Persero) No.55 dated August 18, 2011 Amendment I (First) Corporate Financing Agreement PT Dirgantara Indonesia (Persero) No.04 dated November 3, 2011 with the purpose of using the funds for additional working capital to overcome the cash flow deficit in 2011, and investment in machinery for the completion of projects contracted.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

Pada tanggal 30 Desember 2014, terdapat perubahan VI (keenam) Perjanjian Pembiayaan Korporasi PT DI mengenai perubahan jatuh tempo dari sisa pagu kredit Rp655.000 menjadi tanggal 31 Desember 2016 atau tanggal pencairan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT DI (yang akan diajukan kembali oleh PT DI) yang mana terlebih dahulu.

Pada tanggal 29 Desember 2016, terdapat perubahan VII (ketujuh) Perjanjian Pembiayaan Korporasi PT DI Nomor 48 yang dibuat oleh Notaris Muhamat Hatta, SH mengenai perubahan jatuh tempo dari sisa pagu kredit Rp605.000 menjadi tanggal 31 Desember 2018 atau tanggal pencairan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT DI (yang akan diajukan kembali oleh PT DI) yang mana terlebih dahulu. Dalam perubahan tersebut, juga dilakukan perubahan pemenuhan kewajiban lanjutan dalam proses sertifikasi atas aset properti yang dimiliki oleh PT DI yaitu seluruh Tanah Gudang MMC dan seluruh Tanah KPTA Paledang wajib diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2017.

6. PT Artha Bangun Pratama

Pada tanggal 14 Desember 2016, dilakukan addendum II atas Perjanjian No. PP-21/PPA/1216 antara PT PPA dengan PT Artha Bangun Pratama perihal Perubahan Menyeluruh Perjanjian Pinjaman Dana Talangan. Addendum II di buat karena ada perpanjangan Jangka waktu Fasilitas Pinjaman selama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian dan Penambahan Plafond Fasilitas pinjaman sebesar Rp1.350 sehingga total jumlah pokok fasilitas pinjaman sebesar Rp. 15.949 dengan suku bunga 15% p.a (termasuk pajak) serta biaya provisi sebesar 0,25% dari nilai fasilitas pinjaman.

Berdasarkan Perjanjian No. PP-19/PPA/1116 Tanggal 3 November 2016 dilakukan Perjanjian Pinjaman Dana Talangan, jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp1.112 dengan tingkat suku bunga 15% p.a (gross) jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Pemberian pinjaman bertujuan untuk pembayaran biaya jasa konsultan pembuatan studi kelayakan rencana pengembangan asset ABP dan menetapkan Owner Estimate serta untuk mendapatkan mitra strategis terbaik.

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

On December 30, 2014, there is a change VI (sixth) Corporate Financing Agreement PT DI regarding changes in the maturity of the remaining credit limit Rp655,000 be dated December 31, 2016 or the date of the disbursement of the State Capital (PMN) at PT DI (to be filed back by PT DI) whichever comes first.

On December 29, 2016, Amendment VII (seventh) Corporate Financing Agreement PT DI No. 48 with Notary Muhamat Hatta, SH regarding changes in the maturity of the remaining credit limit of Rp605,000 to December 31, 2018 or the date of the disbursement of the State Capital Investment (PMN) at PT DI (which will be re-submitted by PT DI) whichever is earlier. In such changes, changes was made in continuing obligations fulfillment in the process of certification of the property assets owned by PT DI, i.e. the entire MMC Land Warehouses and the entire Land Warehouses MMC KPTA Paledang must be completed no later than the date of June 30, 2017.

6. PT Artha Bangun Pratama

On December 14, 2016, Addendum II Agreement No. PP-21 / PPA / 1216 between PT PPA with PT Artha Bangun Pratama concerning Amendment Comprehensive Bailout Loan Agreement. Addendum II created because there is an extension period Loan Facility during the twelve (12) months from the signing of the Agreement and Additions Plafond loan facility amounting to Rp1,350, bringing the total principal amount of the loan facility amounting to Rp15,949 with an interest rate of 15% p.a (including taxes) and the cost of provision of 0.25% of the value of the loan facility.

Agreement No. PP-19 / PPA / 1116 Date November 3, 2016 carried Bailout Loan Agreement, the maximum principal amount of the loan facility amounting to Rp1,112 at the rate of 15% p.a (gross) a period of twelve (12) months. Lending aims to pay-consultants feasibility studies ABP asset development plan and establish Owner Estimate as well as to get the best strategic partner.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

7. PT Industri Kapal Indonesia (Persero) (IKI)

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-415/MK.06/2012 tanggal 11 Juni 2012 perihal Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT Industri Kapal Indonesia (Persero) dan surat Menteri BUMN Nomor S-365/MBU/2012 tanggal 13 Juli 2012 perihal Penugasan Pelaksanaan Restrukturisasi atau Revitalisasi PT Industri Kapal Indonesia (Persero) oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), perusahaan memberikan pinjaman dengan plafond maksimal sebesar Rp191.380 untuk restrukturisasi korporasi yang diberikan dalam 4 (empat) Tranche (Tranche A, B, C dan D). Pinjaman tersebut dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman kepada PT Industri Kapal Indonesia (Persero) tanggal 07 Agustus 2012 Nomor 12.

Tingkat suku bunga pinjaman (Tranche A, B, C dan D) per tahun adalah sebesar tingkat suku bunga Bank Indonesia ("BI rate") ditambah 3% (tiga persen) (netto). Seluruh pinjaman (Tranche A, B, C dan D) dijamin dengan tanah, bangunan dan mesin/peralatan senilai Rp192.796.

Jangka waktu fasilitas pinjaman Tranche A, B dan C dihitung sejak tanggal efektif sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah dana PMN diterima IKI. Sedangkan untuk jangka waktu fasilitas pinjaman Tranche D dihitung sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal 30 Juni 2016.

Pada tanggal 08 Oktober 2012, telah dilakukan Addendum I Perjanjian Pemberian Pinjaman kepada PT IKI yang isinya mengenai perubahan jaminan yaitu dengan mengeluarkan tanah dan bangunan SHGB No. 309/Pateten dari daftar jaminan kepada Perusahaan dan diganti melalui penambahan nilai jaminan fidusia perlengkapan dan peralatan produksi sebesar nilai hak tanggungan yang telah disepakati, yakni sebesar Rp5.000. Dengan demikian, total nilai jaminan fidusia perlengkapan dan peralatan produksi akan menjadi sebesar Rp45.000.

7. PT Industri Kapal Indonesia (Persero) (IKI)

Based on the Ministry of Finance letter No. S-415 / MK.06 / 2012 dated June 11, 2012 regarding the Restructuring and / or revitalization of PT Industri Kapal Indonesia (Persero) and the letter of the Minister of SOE No. S-365 / MBU / 2012 dated July 13, 2012 concerning the Implementation Assignment restructuring or revitalization PT Industri Kapal Indonesia (Persero) by the Asset Management company (Persero), the company provides loans with a maximum limit of Rp191,380 for corporate restructuring given in 4 (four) Tranche (Tranche A, B, C and D), The loans are set forth in the Loan Agreement to the Shipbuilding Industry PT Indonesia (Persero) dated August 7, 2012 No. 12.

The interest rate on the loan (Tranche A, B, C and D) per year is equal to the interest rate of Bank Indonesia ("BI") plus 3% (three percent) (net). The whole loan (Tranche A, B, C and D) are secured by land, buildings and machinery / equipment worth Rp192,796.

The term of the loan facility Tranche A, B and C as from the effective date up to 14 (fourteen) working days after the funds received IKI PMN. As for the term of the loan facility Tranche D commencing from the effective date until the date of June 30, 2016.

On October 8, 2012, Addendum I Loan Lending Agreement to PT IKI which contains change in warrants by excluding land and buildings SHGB No. 309 / Pateten from the list of the Company and replace with addition of fiduciary value of equipments and production equipments amounted to the mortgage right value agreed upon, which is Rp5,000. Thus, the total value of fiduciary equipment and production equipment will be amounting to Rp45,000.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

Sehubungan dengan telah diterimanya dana PMN tahun 2012 oleh IKI, maka pada tanggal 18 Januari 2013, IKI telah melunasi seluruh pinjaman fasilitas Tranche A, B dan C kepada Perusahaan.

In connection with the receipt of PMN funds in 2012 by IKI, then on January 18, 2013, IKI has repaid the entire loan facility Tranche A, B and C to the Company.

Pada tanggal 28 April 2015, telah dilakukan Addendum II Perjanjian Pemberian Pinjaman dalam rangka penjadualan kembali pembayaran pokok fasilitas pinjaman Tranche D. Jangka waktu pinjaman menjadi terhitung sejak tanggal efektif sampai dengan 31 Desember 2020. Dengan dilakukannya Addendum II Perjanjian maka fasilitas pinjaman Tranche A, B dan C dinyatakan tidak berlaku lagi.

On April 28, 2015, has been conducted Addendum II Lending Agreement in order rescheduling of principal payments loan facility Tranche D. The loan term be counted from the effective date until December 31, 2020. The effect of the Agreement Addendum II facility under Tranches A, B and C is no longer valid.

Restrukturisasi Hutang

Pada tanggal 27 Desember 2016, telah dilakukan restrukturisasi hutang terhadap seluruh kewajiban IKI kepada Perusahaan yang dituangkan dalam Perjanjian Restrukturisasi Hutang PT Industri Kapal Indonesia (Persero) No. 42. Tanggal Jatuh Tempo perjanjian menjadi 31 Desember 2022. Hutang pokok sebesar Rp31.639 direstrukturisasi menjadi Tranche A, hutang bunga sebesar Rp2.061 direstrukturisasi menjadi Tranche B.

Debt restructuring

On December 27, 2016, debt restructuring was conducted to the entire IKI obligations to the Company, as outlined in the Debt Restructuring Agreement PT Industri Kapal Indonesia (Persero) No. 42. The maturity date of the agreement became December 31, 2022. The principal amount of debt of Rp31,639 restructured into Tranche A, interest payable amounted to Rp2,061 was restructured to Tranche B.

Fasilitas Dana Talangan

Pada tanggal 11 Juni 2010, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan No. PP-03/PPA/0610 antara perusahaan dan IKI. Perusahaan memberikan pinjaman dana talangan sebesar Rp570 dengan tujuan penggunaan untuk biaya jasa konsultan keuangan dan konsultan hukum dalam rangka proses Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi IKI. Tingkat suku bunga pinjaman adalah sebesar tingkat suku bunga Bank Indonesia 3 bulanan. Jangka waktu pinjaman yaitu 12 bulan terhitung sejak tanggal efektif. Pinjaman atas dana talangan dijamin dengan tanah dan bangunan senilai Rp712.

Bailout Loan Facility

On June 11, 2010, a signing to Agreement of Bailout Loan Facility No. PP-03/PPA/0610 between the company and IKI. The Company lent bailout loan amounted to Rp570 in order to be used for finance consulting costs and law consulting costs in Restructuring and/or Revitalization of IKI. The interest borrowing rate is amounted to 3-months rate of Bank Indonesia. The borrowing term is 12 months started the effective date. The borrowing on bailout loan is secured with land and building amounted to Rp712.

Pada tanggal 29 Maret 2011 telah dilaksanakan penandatanganan Addendum I Perjanjian Pemberian Pinjaman No. PP-05/PPA/0311 dalam rangka penambahan jumlah plafond pinjaman sebesar Rp333, sehingga total plafond seluruhnya menjadi Rp903.

On March 29, 2011 a signing was performed to Addendum I Loan Agreement No. PP-05 / PPA / 0311 in order to increase the amount of the loan limit of Rp333, bringing the total ceiling entirely into Rp903.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2011 telah ditandatangani Addendum II Perjanjian Pemberian Pinjaman No. PP-09/PPA/0611 yang mengatur mengenai perpanjangan jangka waktu perjanjian yaitu selambatnya tanggal 31 Juli 2012.

Subsequently on June 10, 2011. Addendum II Loan Agreement No. PP-09 / PPA / 0611 was signed, concerning the extension of the term of agreement to be no later than July 31, 2012.

Sehubungan dengan telah diterimanya pinjaman dana RR IKI dari Perusahaan maka pada tanggal 20 November 2012 IKI melunasi seluruh pinjaman dana talangan kepada Perusahaan.

In relation with the receipt of loan funds RR IKI from the Company, then on November 20, 2012 IKI pay off the entire loan bailouts to the Company.

8. PT Iglas (Persero)

Pemberian pinjaman dalam rangka restrukturisasi dan atau revitalisasi PT Iglas, berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-15/MBU/2011 tanggal 14 Januari 2011 perihal Penugasan Pelaksanaan Restrukturisasi dan /atau Revitalisasi PT Iglas dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-621/MK.06/2010 tanggal 29 November 2010 perihal persetujuan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT Iglas (Persero). Plafon pinjaman sebesar Rp106.770 untuk pembayaran kekurangan dana atas pembangunan kembali pabrik yang berlokasi di Gresik yang dikenal dengan rebuild G-1 dan pembayaran utang, dengan tingkat bunga sebesar tingkat suku bunga SBI 1 bulan + 3% per tahun (netto). Jangka waktu pinjaman sampai dengan 31 Desember 2017.

8. PT Iglas (Persero)

Loan granted in order to restructure and/or revitalize PT Iglas, is according to the Letter of the Minister of SOEs' No. S-15/MBU/2011 dated January 14, 2011 about Restructuring and/or Revitalization Assignment of PT Iglas and the Letter of Minister of Finance No. S-621/MK.06/2010 dated November 29, 2010 about Restructuring and/or Revitalization approval of PT Iglas (Persero). Maximum credit facility amounted to Rp106,770 is intended to cover the fund shortage of factory rebuilding which located in Gresik known as rebuild G-1, and to the settlement of the debt, bearing interest rate of 1 month SBI + 3% per annum (netto). The Loan will due in December 31, 2017.

9. PT Djakarta Lloyd (Persero)

Pinjaman Dana Talangan kepada PT Djakarta Lloyd diberikan berdasarkan surat Menteri Negara BUMN No.S-975/MBU/2008 tanggal 10 Desember 2008 perihal Program Restrukturisasi PT Djakarta Llyod dan surat No.S-86/MBU/2011 tanggal 24 Februari 2011 perihal Dana Talangan bagi PT Djakarta Llyod. Pinjaman tersebut dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Dana Talangan No.PP/PPA/0311 tanggal 09 Maret 2011.

9. PT Djakarta Lloyd (Persero)

Fund Advance Loan to PT Djakarta Lloyd granted according to the letter of Minister of SOEs' No. S-975/MBU/2008 dated December 10, 2008 about Restructuring Program of PT Djakarta Lloyd and letter No. S-86/MBU/2011 dated February 24, 2011 about Fund Advance for PT Djakarta Lloyd. This loan set forth in Fund Advance Loan Agreement No. PP/PPA/0311 dated March 9, 2011.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

Jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum adalah sebesar Rp5.383. Jangka waktu pinjaman adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal efektif atau tanggal ditandatanganinya perjanjian. Tujuan penggunaan fasilitas pinjaman untuk Dana Talangan Operasional dengan pagu kredit Rp5.000 dan untuk talangan biaya jasa pihak ketiga dalam rangka restrukturisasi dan/ atau revitalisasi. Tingkat suku bunga pinjaman adalah sebesar BI rate yang berlaku pada saat masing-masing pencairan atas pokok fasilitas pinjaman ditambah 0.25% per tahun (netto) dan denda keterlambatan pembayaran pokok maupun bunga sebesar BI rate ditambah 2% per tahun (netto).

Pada tanggal 5 Mei 2011 telah dilakukan addendum I No. PP-06/PPA/0511 atas Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan No.PP-01/PPA/0311 tanggal 9 Maret 2011, dalam addendum tersebut dilakukan penambahan jaminan atas pembayaran kembali semua utang yang harus dibayar PT Djakarta Lloyd dengan klasifikasi, 9 (sembilan) bidang tanah dengan Pembebanan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dan 16 (enam belas) bidang tanah dengan Pembebanan Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua), III (Ketiga) dan seterusnya apabila dipandang perlu oleh PT PPA dengan nilai tanggungan yang dipandang cukup.

Berdasarkan Addendum II Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan yang dituangkan dalam Perjanjian No. PP-09/PPA/0912 tanggal 4 September 2012, diatur beberapa hal yaitu :

- Perpanjangan jangka waktu fasilitas pinjaman menjadi 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal efektif ("Tanggal Jatuh Tempo").
- Pelepasan jaminan yaitu berupa tanah yang terletak di Jalan Karangsari, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan SHGB No. 2024/Kelurahan Sukadamai, sehingga tanah tersebut tidak lagi menjadi jaminan fasilitas pinjaman.

The maximum amount of principal loan facility is Rp5,383. The loan period is 1 (one) year since effective date or the agreement date. The objective of loan facility is for Operational Fund Advance with a maximum limit of Rp5.000 and for advance for third parties in terms of restructuring and/or revitalization. The loan interest rate refers to applicable BI rate at the disbursement of loan facility principal added 0.25% per year (net) and fines for tardy principal payment as well as interest rate refer to BI rate added 2% per annum (net).

On May 5, 2011 an Addendum I No. PP-06/PPA/0511 for Fund Advance Loan Receivable Agreement No.PP-01/PPA/0311 dated March 9, 2011, in which is added warrants for repayment of all debts which should be paid by PT Djakarta Lloyd with classification, 9 (nine) pieces of land and Imposition of Mortgage Rating I (First) and 16 (sixteen) pieces of land with Imposition of Mortgage Grade II (Second), III (Third), and so on if it is deemed necessary by PT PPA with amount deemed sufficient.

Based on Addendum II Fund Advance Loan Receivable Agreement as outlined in the Agreement No. PP-09/PPA/0912 dated September 4, 2012, a few things are regulated as follows:

- *Term extension of loan facilities into 2 (two) years from the effective date ("Maturity Date").*
- *The release of collateral which is the form of land located in Jalan Karangsari, Village Sukadamai, District Medan Polonia, Medan, North Sumatra Province with No. SHGB. 2024/Kelurahan Sukadamai, hence the land is no longer a guarantee of loan facility.*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Djakarta Lloyd telah selesai dengan dilakukannya pengesahan perdamaian (homologasi) dengan Nomor putusan: 36/Pdt.Sus/ PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 19 Desember 2013, dengan demikian maka proposal perdamaian revisi tanggal 27 November 2013 sah untuk dilaksanakan. Proposal perdamaian revisi tanggal 27 November 2013 menyatakan bahwa atas hutang PT Djakarta Lloyd kepada Perusahaan tidak diberlakukan *hair cut* dan dipersilahkan mengeksekusi jaminan.

Process of Debt Payment Suspension (PKPU) PT Djakarta Lloyd was completed along with the peace ratification (homologasi) on No.: 36/Pdt. Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST dated December 19, 2013, therefore the proposal of peace revision dated November 27, 2013 valid to be implemented. Peace proposal revision dated November 27, 2013 stating that the debts PT Djakarta Lloyd to the Company does not apply hair cut policy and is allowed to execute the warrants.

Perusahaan telah melakukan proses eksekusi jaminan melalui mekanisme lelang aset selama periode tahun 2015-2016. Berdasarkan Surat Keterangan Pemenang Lelang No. KET-143/WKN.05/KNL.03.05/2016 tanggal 29 September 2016 menyatakan terdapat pemenang lelang dengan pokok lelang sebesar Rp8.160. Berdasarkan surat No. S-3461/PPA/BAAMD/1016 tanggal 18 Oktober 2016, Perusahaan menyampaikan kepada PT Djakarta Lloyd dokumen Surat Penyelesaian Utang serta bukti transfer sisa dana hasil lelang setelah dikurangi dengan biaya-biaya proses lelang yang telah dilakukan oleh Perusahaan. Berdasarkan surat tersebut, PT Djakarta Lloyd dinyatakan telah melunaskan outstanding pokok dan bunga hutang.

The Company has made the execution of collateral through an auction mechanism assets during the period 2015-2016. Based on the Letter of Winning Bidder No. KET-143 / WKN.05 / KNL.03.05 / 2016 dated 29 September 2016 stated there are winning bidder with bid principal amount of Rp8,160. Based on the letter No. S-3461 / PPA/BAAMD/1016 dated October 18, 2016, the Company submitted the Debt Settlement Letter documents and evidence of the transfer of the remaining proceeds from the auction to the Djakarta Lloyd Company, after deducting the costs of the auction process which has been carried out by the Company. Based on the letter, Djakarta Lloyd Company declared to have paid the outstanding principal and interest on the debt.

10 PT Boma Bisma Indra (Persero) (PT BBI)

Sesuai dengan Akta Perjanjian Penerbitan Secured Promissory Notes No. 71, tanggal 23 Juli 2012, PT BBI bermaksud menerbitkan SPN I dan SPN II, yang kemudian akan dibeli oleh Perusahaan, untuk membiayai proyek Tubafa I dan Azzour dengan nilai penerbitan maksimum sebesar Rp 33.320,- dan Rp 4.450,-. Terkait dengan penerbitan SPN tersebut, PT BBI menjaminkan aset Perusahaan berupa Aset Tebet-Jakarta dan Aset Ampel-Pasuruan dengan nilai Hak Tanggungan peringkat I masing-masing sebesar Rp3.200 dan Rp1.000.

10. PT Boma Bisma Indra (Persero) (PT BBI)

In accordance with the Deed of Secured Promissory Notes Issuance Agreement No. 71, dated July 23, 2012, PT BBI intends to issue SPN I and SPN II, which will then be purchased by the Company, to finance the project Tubafa I and Azzour with a maximum issuance value of Rp33,320 and Rp 4,450. In regards of the SPN issuance, PT BBI pledged the Company's assets i.e. Tebet-Jakarta assets, and Ampel-Pasuruan value with Mortgage Right Rank I each worth Rp3,200 and Rp1,000.

Realisasi pencairan, SPN I hanya sebesar Rp29.700 sementara SPN II batal diterbitkan.

The actual disbursement, SPN I was only Rp29,700, while the SPN II was unpublished/

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

Pada tanggal 27 Desember 2012, dilakukan penandatanganan Akta No.90 yang merupakan Addendum I atas Akta Perjanjian Penerbitan *Secured Promissory Notes* No. 71. Dalam Addendum I tersebut disebutkan bahwa PT BBI dapat menerbitkan SPN tambahan (SPN III) dengan nilai maksimum sebesar Rp32.000 yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan tunggakan pinjaman kepada Bank Mandiri. Jatuh tempo SPN III adalah 31 Januari 2014, dengan tingkat bunga 12%.

Pada tanggal 30 April 2013 PT BBI melakukan pembayaran atas seluruh kewajiban SPN I, sehingga seluruh kewajiban PT BBI terkait SPN I telah selesai. Sementara itu, pada tanggal 30 Agustus 2013 dilakukan penandatanganan Akta No.56 yang merupakan Addendum II atas Akta Perjanjian Penerbitan *Secured Promissory Notes* No. 71. Dalam Addendum II tersebut PT BBI bermaksud meningkatkan batas fasilitas pinjaman, melalui penerbitan SPN IV dengan nilai plafon maksimum sebesar Rp 9.000. Tanggal jatuh tempo fasilitas tersebut adalah pada 31 Januari 2014 dengan tingkat bunga 12%. Jumlah realisasi pencairan SPN IV adalah sebesar Rp8.663. Adapun jaminan yang diberikan PT BBI atas penerbitan SPN III dan SPN IV adalah Aset KH M Mansyur, dengan nilai Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp82.500.

Pada tanggal 9 November 2013 Perusahaan dan PT BBI melakukan penandatanganan Akta No.20 yang merupakan Addendum III atas Akta Perjanjian Penerbitan *Secured Promissory Notes* No. 71. Dalam Addendum III tersebut PT BBI mengajukan kenaikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk, penerbitan SPN V, SPN VI dan SPN VII. Peruntukan SPN V adalah untuk pembiayaan proyek CPO-CBI dengan nilai maksimum sebesar R37.000. Sementara itu, SPN VI dan SPN VII ditujukan untuk membiayai penyelesaian proyek Tubafa II, dengan nilai maksimum masing-masing sebesar Rp16.000 dan Rp3.000. Jatuh tempo atas fasilitas SPN V dan SPN VI masing-masing adalah 8 Februari 2015 dan 8 Juni 2014 dengan tingkat bunga 14%. Dalam perkembangannya SPN VII tidak pernah diterbitkan. Sementara itu, jaminan yang

On December 27, 2012, signing to Deed No.90 that is Addendum I to Agreement Deed of Secured Promissory Notes Issuance No. 71. In the Addendum I it is mentioned that PT BBI may issue additional SPN (SPN III) with maximum value of Rp32.000, which will be used to complete the loan arrears to Bank Mandiri. The SPN III maturity is on 31 January 2014, with interest rate of 12%.

On April 30, 2013 PT BBI paid all the liabilities of SPN I, therefore the entire liabilities PT BBI regarding SPN I has finished. Meanwhile, on August 30, 2013 signing to Deed No. 56 which is the Addendum II for Agreement Deed of Issuance of Secured Promissory Notes No. 71. In the Addendum II PT BBI intends to increase the limit of loan facility, through the issuance of SPN IV with maximum ceiling value of Rp9,000. The maturity date of the facility is January 31, 2014 with interest rate of 12%. The amount of actual disbursement SPN IV is Rp8,663. Meanwhile the warrants provided by PT BBI for the issuance of SPN III and SPN IV are assets KH M Mansyur, with amount of Mortgage Rights Rank I amounted to Rp82,500.

On November 9, 2013, the Company and PT BBI signed Deed No. 20 which is Addendum III for Agreement Deed of Secured Promissory Notes Issuance No. 71. In Addendum III PT BBI proposed raise in financing facility in all forms, issuance of SPN V, SPN VI, and SPN VII. Appropriation of SPN V is to finance CPO-CBI project with maximum amount of Rp37,000. Meanwhile SPN VI and SPN VII are intended to finance completion of Tubafa II Project, with maximum amount of each Rp16,000 and Rp3,000. The maturity dates are each February 8, 2015 and June 8, 2014 with interest rate of 14%. The SPN VII was never published. Meanwhile, warrants for issuance of SPN V and SPN VI is asset Tebet- Jakarta, asset Ampel-Pasuruan, and asset KH M Mansyur. Realization of

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

diberikan atas penerbitan SPN V dan SPN VI adalah Aset Tebet-Jakarta, Aset Ampel-Pasuruan dan Aset KH M Mansyur. Realisasi pencairan SPN V adalah sebesar Rp19.587, sementara realisasi pencairan SPN VI adalah sebesar Rp11.090. Dalam perkembangannya pada tanggal 15 April 2014, PT BBI telah melakukan pembayaran atas sebagian pokok SPN VI dengan nilai Rp3.321.

disbursement of SPN V is Rp19,587, while the realization of SPN VI is Rp11,090. Later on April 15, 2014, PT BBI completed the payment to some principal of SPN VI with amount of Rp3,321.

11. PT Survai Udara Penas (Persero) ("PT Penas")

Berdasarkan Perjanjian No. PP-13/PPA/1112 tanggal 23 November 2012 tentang Perjanjian Penerbitan *Promissory Notes* ("PN") PT Penas akan menerbitkan dan menjual PN kepada Perusahaan dengan jumlah pokok maksimum Rp25.000. jangka waktu PN adalah mana yang lebih terlebih dahulu antara 1 (satu) tahun sejak tanggal efektif perjanjian atau diterimanya PMN oleh PT Penas.

11. PT Survai Udara Penas (Persero) ("PT Penas")

Based on the Agreement No. PP-13/PPA/1112 dated November 23, 2012 on the Issuance Agreement *Promissory Notes* ("PN") PT Penas will issue and sell to the Company with the maximum principal amount of Rp25,000. PN period covers from which is earlier between 1 (one) year since effective date of agreement or PMN acceptance by PT Penas.

Hasil penjualan PN akan digunakan untuk Modal Kerja, Investasi Peralatan Produksi dan Kebutuhan lain-lain. Tingkat suku bunga adalah 12 % per tahun (termasuk pajak) dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan Perusahaan. Sebagai jaminan atas pembayaran kembali semua utang, PT Penas menjaminkan :

The sale proceeds from PN will be used for working capital, Investment and Production Equipment Needs others. The interest rate is 12% per year (excluding taxes) and can be change at any time in accordance with the Company. As warrants for the repayment of the debt, PT Penas pledges the following:

- Paripasu dengan jaminan yang telah diikat untuk menjamin pembayaran utang PT Penas berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan No. PP-08/PPA/0511 tanggal 23 Mei 2011.
- Aset atau kekayaan yang telah dan/atau dimiliki PT Penas dari waktu ke waktu yang belum dijaminkan kepada pihak ketiga.

- *Pari passu* with a guarantee tied to pledge the debt payment of PT Penas based on Fund Advance Loan Receivables Agreement No. PP-08/PPA/0511 dated May 23, 2011.
- Assets that have been owned by PT Penas from time to time but are not pledged to a third party.

Addendum I No. PP-10/PPA/0711 ini dibuat karena ada perubahan pada jumlah nilai jaminan pada perjanjian, yang semula merupakan 1 bidang tanah, menjadi dua bidang tanah.

Addendum I No. PP-10/PPA/0711 was made because there is a change in the amount of the guaranteed value on the agreement, which was originally one plot of land to two plots of land.

Perubahan II nomor PP- 12/PPA/1213 tanggal 18 Desember 2013 dibuat karena ada perubahan pada jangka waktu. Perubahan III nomor PP-02/PPA/0414 tanggal 11 April 2014 dibuat karena adanya perubahan pada syarat & ketentuan pada penggunaan PN. Perubahan terletak pada sisa plafond fasilitas investasi

Amendment II number PP-12 / PPA / 1213 dated December 18, 2013 were made due to changes in the time period. Amendment III-number PP-02/PPA/0414 dated April 11, 2014 was made due to a change in the terms and conditions on the use of PN. Changes lies in the rest of the facility limit

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

peralatan produksi diubah menjadi fasilitas modal kerja dan fasilitas modal kerja diubah menjadi revolving. Perubahan IV nomor SU-08/PPA/0615 tanggal 10 Juni 2015 dibuat karena adanya perubahan jangka waktu. Perubahan V nomor SU-01/PPA/0216 tanggal 10 Februari 2016 dibuat karena adanya perubahan jangka waktu. Perubahan VI nomor SU-06/PPA/1116 tanggal 3 November 2016 dibuat karena adanya perubahan jaminan untuk PN. Perubahan VII nomor SU-07/PPA/1216 tanggal 16 Desember 2016 dibuat karena adanya perubahan jangka waktu.

Pinjaman Dana Talangan diberikan untuk PT Penas berdasarkan surat dari Kementerian BUMN menerbitkan Surat kepada Perusahaan No. S-747/MBU/2010 8 Desember 2010, agar Perusahaan mengusulkan kajian langkah-langkah penyelamatan PT Penas. Pemberian dana talangan ditujukan untuk perbaikan pesawat, peralatan pemetaan, dan modal kerja serta penyelesaian sebagai kewajiban. Perjanjian Pemberian Dana Talangan dibuat tanggal 23 Mei 2011 dengan nomor PP-08/PPA/0511, dengan plafond sebesar Rp15.000 dan bunga sebesar 11%.

Addendum I No. PP-10/PPA/0711 ini dibuat karena ada perubahan pada jumlah nilai jaminan pada perjanjian, yang semula merupakan 1 bidang tanah, menjadi dua bidang tanah.

Addendum II No. PP-14/PPA/1211 dibuat karena ada perubahan pada definisi nilai jaminan pada perjanjian, antara lain: Untuk jaminan berupa pesawat terbang, nilai jaminan ditentukan dari nilai buku atau nilai appraisal dari konsultan independen, untuk jaminan berupa tanah dan bangunan, nilai jaminan adalah sebesar nilai yang diperoleh dari penilai independen atau sebesar nilai jual objek pajak, serta PT Penas berjanji untuk menandatangani SKMHT dan APHT dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp1.180.

Addendum III No. PP-08/PPA/0812 dibuat karena ada perubahan pada Jangka waktu fasilitas pinjaman (tanggal jatuh tempo), Bunga fasilitas pinjaman (tunggalan bunga, tingkat suku bunga, periode pembebanan bunga, jadwal pembayaran bunga, serta cara perhitungan dan pembayaran bunga).

production equipment investment which is converted into working capital and working capital facilities converted into revolving. Amendment IV number SU-08/PPA/ 0615 dated June 10, 2015 was made due to a change period. Changes V number SU-01 / PPA / 0216 dated February 10, 2016 was made due to a change period. Amendment VI number SU-06/PPA/1116 dated November 3, 2016 was made due to the change guarantees for PN. Amendment VII number SU-07/PPA/1216 dated December 16, 2016 was made due to a change in time period.

Bailout Loans granted to PT Penas based on Letter from the Ministry of SOEs issuing Letter to the Company No. S-747 / MBU / 2010 December 8, 2010, so that the Company proposed assessment measures to save PT Penas. The bailout lending was aimed to repair aircrafts, imaging equipment, and working capital as well as the settlement of liabilities. Bailout Agreement made on May 23, 2011 with number PP-08 / PPA / 0511, with a ceiling of Rp15,000 and an interest rate of 11%.

Addendum I No. PP-10/PPA/0711 was made due to changes in the amount of the guaranteed value on the agreement, which was originally a one plot of land, into two parcels.

Addendum II No. PP-14/PPA/1211 was made due to changes in the definition of the value of collateral on the agreement, as follows: aircraft warrants, the guaranteed value is determined from the book value or the appraisal value of an independent consultant, for collateral such as land and buildings, the value of the guarantee is of the value obtained from a independent Assessor or of taxable value, as well as PT Penas promised to sign SKMHT and APHT with encumbrance value of Rp1,180.

Addendum III No. PP-08 / PPA / 0812 was made because there is a change in the term of the loan facility (the maturity date), interest loan facility (interest arrears, interest rate, period of interest charges, interest payment schedule, as well as the calculation and payment of interest).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

Pembayaran kembali pokok fasilitas pinjaman dan Pembayaran dipercepat. Addendum IV No. PP-01/PPA/0414 dibuat karena ada perubahan Jangka waktu fasilitas pinjaman (tanggal jatuh tempo), Bunga fasilitas pinjaman (tingkat suku bunga, periode pembebanan bunga, tanggal pembayaran bunga, serta cara perhitungan dan pembayaran bunga), Pembayaran kembali pokok fasilitas pinjaman dan Sumber pelunasan fasilitas pinjaman. Addendum V No. PP-01/PPA/0414 dibuat karena ada perubahan pada Tanggal jatuh tempo, Susunan anggota Direksi PT Penas, dan Tanggal efektif Addendum V.

Perjanjian Pinjaman Jangka Pendek diberikan untuk pembelian engine pesawat Cessna 4-2B PK-VCD demi menyelesaikan proyek dan operasional perusahaan. Pada tanggal 20 Maret 2015, Perusahaan dan PT Penas mendandatangani Perjanjian pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek kepada PT Penas Nomor: PP-01/PPA/0315. Pinjaman Jangka Pendek memiliki plafond sebesar Rp2.205 dengan bunga sebesar 12%.

Addendum I nomor PP-02/PPA/0415 tanggal 24 April 2015 dilakukan karena PT Penas mengajukan permohonan pinjaman dana yang akan digunakan untuk pembelian extra spare part untuk pengoperasian Cessna 402B. Plafond pinjaman berubah menjadi sebesar Rp3.889. Addendum II nomor PP-02/PPA/0616 tanggal 10 Juni 2016 dilakukan karena adanya perubahan tanggal jatuh tempo pinjaman.

Pada tanggal 20 Agustus 2015, Perusahaan dan PT Penas menandatangani Perjanjian penerbitan promissory notes seri A PT Penas dengan No SU-09/PPA/0815, dengan plafond sebesar Rp4.000 dan bunga sebesar 12% yang akan digunakan untuk modal kerja perusahaan.

Addendum I nomor SU-05/PPA/1116 tanggal 3 November 2016 dilakukan karena adanya perubahan tanggal jatuh tempo menjadi 31 Desember 2017

Sepanjang tahun 2017, terdapat Addendum VIII nomor PP-03/PPA/2017 dan PERJ.02/Penas-PPA/2017 antara Perusahaan dengan PT Penas pada tanggal 9 Februari 2017 dilakukan karena adanya perubahan tanggal jatuh tempo menjadi 2 Februari 2018

Repayment to principal of loan facility is expedited. Addendum IV No. PP-01 / PPA / 0414 was made because there are changes in facility term loan (maturity date), interest of loan facility (the interest rate, the period of interest charges, interest payment dates, as well as the calculation and payment of interest), Repayment of the principal loan facilities and source of repayment of the loan. Addendum V No. PP-01 / PPA / 0414 was made because there is a change in the date of maturity, composition of the Board of Directors of PT Penas, and the effective date of the Addendum V.

Short-Term Loan Agreement was provided to purchase aircraft engine Cessma 4-2B PK-VCD to complete project and operational of the company. On 20 March 2015, the Company and PT Penas signed Agreement for short-term facility lending to PT Penas No: PP-01/PPA/0315. The short-term loan has plafond amounted to Rp2,205 with interest of 12%.

Addendum I number PP-02/PPA/0415 dated April 24, 2015 because PT Penas apply for grant funds to be used to purchase extra sparepart for Cessna 402B operational. Ceiling loan changes to Rp3,889. Addendum II number PP-02/PPA/0616 dated June 10, 2016 was made because there was change in loan maturity date.

On August 20, 2015, the Company and PT Penas signed a Agreement to published Promissory Notes Serie A PT Penas No. SU-09/PPA/0815, with ceiling of Rp4,000 and interest rate of 12% which will be used for working capital.

Addendum I No. SU-05/PPA/1116 dated November 3, 2016 was made because there were changes in maturity date on December 31, 2017.

During 2017, there was Addendum VIII nomor PP-03/PPA/2017 dan PERJ.02/Penas-PPA/2017 between the Company and PT Penas on 9 February 2017 which was made due to changes in maturity date on February 2, 2018

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

12. PT Kertas Leces (Persero)

Berdasarkan surat menteri BUMN No. S-511/MBU/2012 tanggal 18 September 2012 perihal Pemberian Dana Talangan kepada PT Kertas Leces (Persero) untuk *Revolving Working Capital* yang dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan kepada PT Kertas Leces No. 13 tanggal 11 Oktober 2012. Berdasarkan Perjanjian tersebut Perusahaan memberikan Pinjaman Dana Talangan dengan jumlah pokok fasilitas maksimum Rp50.000.

Jangka waktu Fasilitas Pinjaman adalah selama 1 (satu) tahun kalender terhitung sejak tanggal efektif dan dapat dilakukan pelunasan dipercepat baik sebagian maupun seluruhnya tanpa dikenakan penalti. Tingkat suku bunga pinjaman adalah 12% per tahun (*gross*) dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai pemberitahuan dari Perusahaan. Denda keterlambatan pembayaran bunga adalah 6% per tahun.

Sebagai jaminan atas pembayaran kembali semua utang yang harus dibayara oleh PT Kertas Leces kepada Perusahaan maka PT Kertas Leces menyerahkan jaminan-jaminan sebagai berikut:

- Dua bidang tanah dan bangunan berikut turutannya yang terletak di Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, masing-masing seluas 667 m² dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Guna Bangunan ("SHGB") No. 644/Darmo tanggal 22 Agustus 2002 senilai Rp5.200 dan tanah seluas 647 m² dengan SHGB No. 658/Darmo tanggal 30 September 2003 senilai Rp6.300.
- Bidang tanah dan bangunan berikut turutannya yang terletak di Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI seluas 623 M² dengan SHGB No. 227/Kramat tanggal 3 September 1979 senilai Rp9.500.
- Unit Boiler (Pesawat Uap) Batu Bara berikut perlengkapannya yang berada di Pabrik PT Kertas Leces Jl. Raya Leces, Probolinggo senilai Rp87.298.

12. PT Kertas Leces (Persero)

According to Minister of SOE Letters No. S-511/MBU/2012 dated September 18, 2012 concerning provision of PT Kertas Leces (Persero) Loan Receivables for the *Revolving Working Capital* set forth in the Fund Advance Loan Receivables Agreement to PT Kertas Leces No. 13 dated October 11, 2012. Based on the agreement, the Company provides Loans Receivables facility with maximum principal amount Rp50,000.

The period of loan facility is for 1 (one) calendar year starting from the effective date and can be settled early either partially or fully, without penalty. The interest rate of loan is 12% per year (*gross*) and may change at any time in accordance with notice from Company. Fine for late payment interest rate is 6% per year.

To secure repayment of all debts must be paid by PT Kertas Leces to the Company, therefore PT Kertas Leces must provide warrants as follows:

- Two pieces of land and buildings are located in the following turutannya Darmo Village, District Wonokromo, Surabaya, East Java Province, each covering an area of 667 sqm with Certificate (Certificate of Proof of Rights) Building Purpose ("SHGB") No. 644/Darmo dated August 22, 2002 worth Rp5,200 and a land area of 647 sqm with SHGB No. 658/Darmo dated September 30, 2003 in worth to Rp6,300.
- Land and buildings located on Kramat Pela, District of Kebayoran Baru, South Jakarta, DKI, covers 623 sqm with SHGB No. 227/Kramat dated 3 September 1979 valued at Rp9,500.
- Boiler Units (Steam Aircraft) Coal with the following equipment is located in the Factory PT Kertas Leces Jl. Raya Leces, Probolinggo in worth to Rp87,298.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

Merujuk surat PT Kertas Leces kepada Perusahaan Nomor: 64/A-KEU/IX/2013 tanggal 11 September 2013 perihal : Perpanjangan Pokok Pinjaman Kredit KL.

Oleh karena itu telah diterbitkan Addendum I Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan (*Revolving Working Capital*) Kepada PT Kertas Leces (Persero) Nomor: PP-09/PPA/1013 tanggal 10 Oktober 2013.

Perjanjian dilakukan dibawah tangan antara Perusahaan dengan PT Kertas Leces (Persero). Dimana dalam Addendum I menerangkan bahwa para pihak sepakat untuk:

- a. mengubah ketentuan "Tanggal Jatuh Tempo" dalam Pasal 1 Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan kepada PT Kertas Leces No.13 tanggal 11 Oktober 2012 menjadi 2 (dua) tahun kalender terhitung sejak tanggal efektif atau dalam hal penyelesaian permasalahan KL ditetapkan melalui restrukturisasi dan/atau reitalisasi, sampai dengan tanggal pencairan pertama kali atas dana fasilitas pinjaman restrukturisasi dan/atau reitalisasi yang diterima oleh KL dari Perusahaan (tergantung mana yang terjadi terlebih dahulu).
- b. mengubah ketentuan "Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman" dalam ayat 2.2 dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan kepada PT Kertas Leces No.13 tanggal 11 Oktober 2012 menjadi 2 (dua) tahun kalender terhitung sejak tanggal efektif atau dalam hal penyelesaian permasalahan KL ditetapkan melalui restrukturisasi dan/atau reitalisasi, sampai dengan tanggal pencairan pertama kali atas dana fasilitas pinjaman restrukturisasi dan/atau reitalisasi yang diterima oleh KL dari Perusahaan (tergantung mana yang terjadi terlebih dahulu).

PT Kertas Leces dengan surat No. 19/A-UM/jkt/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU). Berdasarkan surat Perusahaan kepada PT Kertas Leces No. S-3586/PPA/PD/2014 tanggal 29 Desember 2014, Perusahaan antara lain menyarankan agar PT Kertas Leces meminta tambahan jangka waktu PKPU selama 150 hari pada sidang PKPU tanggal 19 Januari 2015.

Based on PT Paper Leces letter to the Company Number: 64/A-KEU/IX/2013 dated September 11, 2013 regarding :Extension of Loan Principal KL.

Therefore, Addendum I Bailout Lending Agreement (Revolving Working Capital) to PT Kertas Leces (Persero) Number: PP-09/PPA/1013 was made, dated October 10, 2013.

The agreement was made between the Company with PT Paper Leces (Persero). Where in Addendum I are explained that the parties agree to:

- a. Changing the provisions of "Maturity Date" in Article 1 of Bailout Lending Agreement to PT Kertas Leces No.13 dated October 11, 2012 into 2 (two) years commencing from the effective date or in terms of KL problem solving determined through Restructuring and / or Revitalization, until the date of the first withdrawal of funds loan restructuring and/or Revitalization that received by KL from the Company (whichever occurs first);
- b. Changing the provisions of the "Loan Facility Term" in paragraph 2.2 in Bailout Lending Agreement to PT Kertas Leces No.13 dated October 11, 2012 into 2 (two) years commencing from the effective date or in terms of KL problem solving determined through Restructuring and/or Revitalization, until the date of the first withdrawal of funds loan restructuring and/or Revitalization that received by KL from the Company (whichever occurs first).

PT Kertas Leces through Letter No. 19/A-UM/jkt/XII/2014 dated December 18, 2014 filed a Suspension of Debt Payments (PKPU). Based on the Letters of the Company to PT Kertas Leces No. S - 3586 / PPA / PD / 2014 dated December 29, 2014 , the Company suggests that PT Kertas Leces PKPU should request additional time period of PKPU for 150 days on hearing PKPU dated January 19, 2015 .

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

- Melakukan pendampingan pada PT KL dalam mengimplementasikan program restrukturisasi PT KL sesuai hasil perdamaian PKPU termasuk monitoring pelaksanaannya.

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") PT KL telah selesai dengan disahkannya Perjanjian Perdamaian antara PT KL dengan Para Kreditor PT KL tertanggal 18 Mei 2015 yang tertuang Proposal Perdamaian Perjanjian Perdamaian no.05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby.

Merujuk kepada Perjanjian Perdamaian PKPU yang telah disahkan pada tanggal 18 Mei 2015 adapun kewajiban PT KL adalah sebagai berikut:

a. Kreditur Preferen

- Pajak, Rp10.800, diangsur 12 tahun, *grace period* 2 tahun
- Hutang Gaji dan Pesangon, Rp221.400 miliar, diangsur 12 tahun, *grace period* 2 tahun
- Kementerian Keuangan, Rp515.700 miliar, diangsur 45 tahun, *grace period* 5 tahun

b. Kreditor Separatis

- KAM/Eldorado (haircut 77,5%), Rp218.000 dibayar dalam waktu 9 bulan
- PT Waskita Karya dan Perusahaan, hapus bunga denda, pokok hutang dikonversi menjadi convertible bond zero coupon 10 tahun, diangsur 15 tahun (jaminan tetap melekat).

c. Kreditor Konkuren

- PT PGN dan PT Mega Eltra, hapus bunga denda, *grace period* 3 tahun diangsur 15 tahun
- Kreditor <Rp1.500, tanpa *haircut* *grace period* 2 tahun diangsur 2 tahun
- Kreditor Rp1.500 - Rp7.500, *haircut* 30% *grace period* 3 tahun diangsur 5 tahun
- Kreditor >Rp7.500, *haircut* 50% *grace period* 3 tahun diangsur 8 tahun.

- Conducting advocacy on PT KL in implementing the restructuring program of PT KL according to peace agreement of PKPU including monitoring its implementation.

Suspension of Payment Process ("PKPU") PT KL has been completed with the ratification of the Peace Treaty between PT KL with the Creditor PT KL, dated May 18, 2015 Peace Proposal contained Peace Agreement No.05 / PKPU / 2014 / PN.Niaga.Sby.

Referring to the PKPU Peace Agreement which was passed on May 18, 2015, PT KL liabilities are as follows:

a. Preferred creditors

- Taxes, Rp10,800, paid in installments of 12 years, *grace period* of 2 years
- Salaries and Severance Payables, Rp221,400, paid in installments of 12 years, *grace period* of 2 years
- Ministry of Finance, Rp515,700, paid in installments of 45 years, *grace period* of 5 years

b. Separatists creditors

- KAM / Eldorado (77.5% haircut), Rp218,000 paid within 9 months
- PT Waskita Karya and the Company, remove penalty interest, the loan principal is converted into zero coupon convertible bond of 10 years, in installments of 15 years (guarantees remain attached).

c. Concurrent creditor

- PT PGN and PT Mega Eltra, remove penalty interest, *grace period* of 3 years in installments of 15 years
- Creditors <Rp1,500 without *haircut* *grace period* of 2 years 2 years in installments
- Creditors Rp1,500 - Rp7,500, *haircut* 30% 3-year *grace period* in installments 5 years
- Creditors > Rp7,500, *haircut* of 50% 3-year *grace period* of 8 years in installments

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

d. Kewajiban Imbalan Jasa Pengurus PKPU dan Biaya PKPU (dalam Penetapan tersendiri)

- Imbalan jasa Pengurus PKPU ditetapkan Rp9.500
- Biaya Pengurus PKPU Rp961

Berdasarkan Perjanjian No.C-92.HT.03.02-TH.2003 tentang Perjanjian Penerbitan *Secured Promissory Notes* PT Istaka Karya bahwa Penerbit SPN yaitu PT Istaka Karya dan Pemegang SPN yaitu PT PPA, dimana pada tanggal 9 Maret 2017 Penerbit SPN mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian dan tanggal jatuh tempo penebusan SPN yang diterbitkan sebelum tanggal amandemen ini, serta diberikan penambahan nilai pokok setinggi-tingginya Rp100.000 dengan tingkat suku bunga SPN sebesar 12% per tahun belum termasuk pajak. Bunga atas seluruh SPN wajib dibayarkan oleh penerbit SPN kepada pemegang SPN secara bulanan, yaitu setiap akhir bulan.

Perjanjian pinjaman dana talangan antara PT PPA dan PT Kertas Leces dalam rangka permohonan bantuan dana talangan untuk membayar sebagian utang hak-hak normatif karyawan sebanyak 1.879 eks karyawan, termasuk untuk biaya provisi, biaya peningkatan jaminan dan biaya notaris telah ditanda tangani pada tanggal 16 Juni 2017. Tanggal jatuh tempo atas fasilitas jaminan ini adalah 15 Juni 2018. PT Kertas Leces menyerahkan jaminan berupa; Tanah berikut bangunan di kelurahan Darmo Surabaya seluas 667 m2 dan 647m2. Total pinjaman yang diberikan yang diberikan PT PPA kepada PT PPA kepada PT Leces selama tahun 2017 adalah sebesar Rp5.219 dan pada tahun 2017 PT Leces membayar sebagian dari pokok pinjaman sebesar Rp975.

d. Rewards Liabilities Management Services PKPU and PKPU fee (in separate Stipulation)

- Rewards Management services set PKPU Rp9,500
- Cost Management PKPU Rp961.

Based on Agreement No.C-92.HT.03.02-TH.2003 about SPN Agreement PT Istaka Karya that PT Istaka Karya as a SPN issuer and PT PPA as a SPN holder which on March 9, 2017 PT Istaka Karya proposed extension for the term of agreement and maturity date SPN which issued before the date of this amandement, and granted the addition of the principal amount up to Rp100,000 with interest rate 12% per annum (exc. Tax). Interest for SPN shall be paid by the issuer to holder monthly, on the end of the month.

Bailout loan agreement between PT PPA and PT Kertas Leces is an appeals for bailout assistance to paid off the debt of the employee normative rights totaling 1.879 of ex employee, including provision fee, warranty fee and notary fee have been signed on June 16, 2017. The maturity date of this warranty facility is June 15, 2018. PT Kertas Leces have submit the land following the bulding in Darmo Surabaya which has 667 sqm and 647 sqm width as a warranty. Total loans were given by PT PPA to PT Kertas Leces during 2017 amounted to Rp5.219 and during 2017 PT Kertas Leces paid Rp975 for the loan principle.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

13. PT Istaka Karya (Persero)

Akta Perjanjian Penerbitan Secured Promissory Notes PT Perusahaan Pengelola Aset dan PT Istaka Karya Nomor: 13 tanggal 24 September 2013, dan Akta Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia atas barang bergerak PT Istaka Karya (Persero) dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Nomor: 14 tanggal 24 September 2013. Perjanjian ditandatangani kedua pihak dihadapan Notaris Sita Listiani, SH., MKn.

Adapun isi dari perjanjian tersebut adalah:

- Bahwa PT Istaka Karya akan menerbitkan dan menjual SPN kepada Perusahaan dengan jumlah pokok setinggi-tingginya Rp30.000.
- Penerbitan SPN dilakukan secara bertahap dengan jumlah dan tanggal disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan Istaka.
- Jangka Waktu SPN adalah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal efektif (tanggal ditandatanganinya perjanjian).
- Tujuan penggunaan dana hasil penerbitan dan penjualan SPN akan dipergunakan oleh Istaka untuk membiayai proyek yang menjadi porsi Istaka.
- Tingkat suku bunga periode September 2013 sebesar 12%, setelah periode September 2013 akan disesuaikan oleh Perusahaan, keterlambatan atas pembayaran bunga sebagaimana telah ditentukan akan dikenakan denda sebesar 6%.
- Sebagai Jaminan atas seluruh utang, Istaka menyerahkan jaminan berupa piutang dan barang bergerak yang sekarang dimiliki dan yang akan dimilikinya dikemudian hari dari Proyek Pembangunan Tol Cikampek-Palimanan Seksi 1D, yang diikat secara fidusia dengan nilai objek dan nilai penjaminan masing-masing sebesar 120% dari nilai SPN yang diterbitkan.

13. PT Istaka Karya (Persero)

Deed Agreement of Secured Promissory Notes of PT Perusahaan Pengelola Aset and PT Istaka Karya Number: 13 on September 24, 2013, and Deed Agreement of Fiduciary Imposition for moving goods PT Istaka Karya (Persero) and PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Number: 14 on September 24, 2013. The Agreement is signed by both parties in front of Notary Sita Listiani, S.H., M.Kn.

Contents of the agreement are:

- PT Istaka Karya will issue and sell SPN to the Company with the highest principles Rp30,000.
- Publishing of SPN applied gradually with total and periode of date adjusted with financing requirement of PT Istaka Karya.
- The term of SPN is 18 months since the effective date (date of signing agreement)
- The purpose of using funds from issuance and selling of SPN is to be ussed by Istaka to fund the project that became Istaka's portion.
- Interest rate on September 2013 is 12%, after September 2013 will be adapted by the Company, tardiness in interest payments as set before will be fined 6%.
- As a collateral for the rest of debts, Istaka gives assurance of receivable and chattels which are owned now and will be had in the future from The Cikampek-Palimanan 1D Section toll road building project, that is bound by fiduciary with the object value and the value of the respective guarantee amounting to 120% of the SPN value that is published.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

Atas kewajiban Perjanjian tersebut PT Istaka Karya (Persero) telah melakukan pelunasan pada awal tahun 2015.

Treaty obligations on the PT Istaka Karya (Persero) has been repaid in early 2015.

PT Istaka Karya (Persero) melalui suratnya Nomor DU/2014-34b tanggal 9 Oktober 2014 perihal Permohonan Addendum Perjanjian Penerbitan SPN No. 13 tanggal 24 September 2013 antara lain memohon agar sisa plafond pinjaman dapat digunakan untuk pembiayaan proyek yang dikerjakan oleh PT Istaka Karya (Persero), namun mengingat potensi proyek-proyek yang akan diperoleh PT Istaka Karya (Persero) maka diputuskan untuk dibuatkan Perjanjian Penerbitan *Secured Promissory Notes* untuk proyek-proyek baru PT Istaka Karya (Persero) sebagaimana termaktub dalam Akta Penerbitan *Secured Promissory Notes* nomor 23 tanggal 25 Maret 2015 Perjanjian ditandatangani kedua pihak dihadapan Notaris Sita Listiani, S.H.,MKn.

PT Istaka Karya (Persero) through its Letter No. DU / 2014-34b dated October 9, 2014 regarding Request for Addendum of SPN Publishing Agreement No. 13 dated 24 September 2013 i.e. request for the remainder of loan to be used go finance projects undertaken by PT Istaka Karya (Persero), however given the potential of projects which PT Istaka Karya (Persero) will acquire therefore it was decided to make Secured Promissory Notes Issuance Agreement for new projects of PT Istaka Karya (Persero) as set forth in the Deed of Issuance of Secured Promissory Notes No. 23 dated March 25, 2015. The agreement signed by both parties before the Notary Sita Listiani, S.H., M.Kn.

Adapun isi dari perjanjian tersebut adalah:

The contents of the agreement are:

- a. Bahwa PT Istaka Karya (Persero) akan menerbitkan dan menjual SPN kepada Perusahaan dengan jumlah pokok setinggi-tingginya Rp60.000.
- b. Tujuan dana hasil penerbitan dan penjualan SPN digunakan khusus pembiayaan Proyek yang diperoleh PT Istaka Karya (Persero).
- c. Penerbitan SPN dilakukan secara bertahap dengan jumlah dan tanggal disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan Proyek PT Istaka Karya (Persero).
- d. Jangka Waktu SPN adalah 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal efektif (tanggal ditandatanganinya perjanjian).
- e. Tingkat suku bunga sebesar 14%, keterlambatan atas pembayaran bunga sebagaimana telah ditentukan akan dikenakan denda sebesar 6%.
- f. Sebagai Jaminan atas seluruh utang, PT Istaka Karya (Persero) menyerahkan jaminan berupa:
 - Piutang yang sekarang dimiliki dan yang akan dimilikinya dikemudian hari dari Proyek PT Istaka Karya (Persero) yang dibiaya Perusahaan, yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan masing-masing sebesar 120% dari nilai SPN yang diterbitkan.

- a. *PT Istaka Karya (Persero) will publish and sell SPN to the Company with principal amount as high as Rp60,000.*
- b. *The purpose of the proceeds from the issuance and sale of SPN is used specifically for the Project financing obtained by PT Istaka Karya (Persero).*
- c. *Issuance of SPN are conducted gradually and the amount and date is adjusted with the financing needs of pt Istaka Karya (Persero) projects.*
- d. *SPN term is 24 (twenty four) months from the effective date (the date of signing of the agreement).*
- e. *Interest rate is 14%, tardiness in paying interest will be fined 6% as regulated.*
- f. *As collaterals for the entire debt, PT Istaka Karya (Persero) submit guarantees in the form of:*
 - *Accounts receivable owned now and will be owned in the future of Project PT Istaka Karya (Persero) which was financed by the Company, which is bound by fiduciary with amount of each guarantee value of 120% from the SPN value published.*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

- Bidang tanah dan bangunan berikut turutannya yang terletak di Desa Kedungbunder, Kecamatan Palimanan, Kotamadya Cirebon, Provinsi Jawa Barat seluas 93.450 M2 dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor : 188/Kedungbunder senilai Rp18.690
- Bidang tanah dan bangunan berikut turutannya yang terletak di Desa Nanggela, Kecamatan Beber, Kotamadya Cirebon, Provinsi Jawa Barat seluas 11.195 M2 Sertipikat Hak Pakai nomor : 1/Nanggela senilai Rp190
- Bidang tanah dan bangunan berikut turutannya yang terletak di Desa Sinarancang, Kecamatan Beber, Kotamadya Cirebon, Provinsi Jawa Barat seluas 100.000 M2 Sertipikat Hak Pakai nomor : 2/Sinarancang senilai Rp2.000
- Bidang tanah dan bangunan berikut turutannya yang terletak di Desa Setu Patok, Kecamatan Mundu, Kotamadya Cirebon, Provinsi Jawa Barat seluas 65.490 M2 Sertipikat Hak Pakai nomor : 11/Setu Patok senilai Rp18.690

g. Sehubungan dengan adanya penambahan Proyek baru yang diperoleh PT Istaka Karya (Persero) dan penggunaan Plafond SPN dari beberapa Proyek yang telah dibiayai tidak seluruhnya diterbitkan, maka telah dilakukan beberapa kali Perubahan Perjanjian untuk menambah Proyek baru dan perubahan plafond masing-masing Proyek dengan jumlah total pokok SPN setinggi-tingginya Rp60.000.

Adapun perubahan-perubahan Perjanjian, sebagai berikut:

- Akta 01 Perubahan I Perjanjian Penerbitan Secured Promissory Notes PT Istaka Karya (Persero) tanggal 03 September 2015;
- Akta 05 Perubahan II Perjanjian Penerbitan Secured Promissory Notes PT Istaka Karya (Persero) tanggal 06 Oktober 2015
- Akta 14 Perubahan III Perjanjian Penerbitan Secured Promissory Notes PT Istaka Karya (Persero) tanggal 20 Oktober 2015;

- Plot of land and buildings and their successions located in Village of Kedungbunder, District Palimanan, Municipality of Cirebon, West Java covers 93.450 sqm with SHGB no: 188/Kedungbunder amounted to Rp18,690.
- Plots of land and buildings and their successions located in the Village Nanggela, District Beber, Municipality of Cirebon, West Java Province area of 11 195 sqm Certificate of Use number: 1 / Nanggela worth Rp190
- Plot and the following buildings and its successions located in the village Sinarancang, District Beber, Municipality of Cirebon, West Java province covering 100,000 sqm Certificate of Use number: 2 / Sinarancang worth Rp2,000
- Plot and buildings along with its successions located in the village of stilt Setu, District Mundu, Municipality of Cirebon, West Java Province area of 65 490 sqm Certificate of Use number: 11 / Setu Stakes worth Rp18,690

g. Regarding the addition of new projects acquired by PT Istaka Karya (Persero) and the use of SPN ceilings from some of the projects funded but not fully published, therefore several changes was done to add new projects and change in ceilings of each project with the total amount of SPN principal as much as Rp60,000.

As for changes in the Agreement, are as follows:

- Deed 01 Amendment I Secured Promissory Notes Issuance Agreement PT Istaka Karya (Persero) dated September 3, 2015;
- Deed 05 Amendment II Secured Promissory Notes Issuance Agreement PT Istaka Karya (Persero) dated October 6, 2015
- Deed 14 Amendment III Secured Promissory Notes Issuance Agreement PT Istaka Karya (Persero) dated October 20, 2015;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

- Akta Perubahan IV Perjanjian Penerbitan *Secured Promissory Notes* PT Istaka Karya (Persero) nomor: 04 tanggal 2 Desember 2015; dan
- Akta Perubahan V Perjanjian Penerbitan *Secured Promissory Notes* PT Istaka Karya (Persero) nomor: 08 tanggal 19 Mei 2016.
- Akta Perubahan VI Perjanjian Penerbitan *Secured Promissory Notes* PT Istaka Karya (Persero) nomor: 01 tanggal 01 Agustus 2016.

Berdasarkan Perjanjian No.C-92.HT.03.02-TH.2003 tentang Perjanjian Penerbitan *Secured Promissory Notes* PT Istaka Karya bahwa Penerbit SPN yaitu PT Istaka Karya dan Pemegang SPN yaitu PT PPA, dimana pada tanggal 9 Maret 2017 Penerbit SPN mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian dan tanggal jatuh tempo penebusan SPN yang diterbitkan sebelum tanggal amandemen ini, serta diberikan penambahan nilai pokok setinggi-tingginya Rp100.000 dengan tingkat suku bunga SPN sebesar 12% per tahun belum termasuk pajak. Bunga atas seluruh SPN wajib dibayarkan oleh penerbit SPN kepada pemegang SPN secara bulanan, yaitu setiap akhir bulan.

14. PT Artha Bangun Pratama

Pada tanggal 14 Desember 2016, dilakukan addendum II atas Perjanjian No. PP-21/PPA/1216 antara Perusahaan dengan PT Artha Bangun Pratama perihal Perubahan Menyeluruh Perjanjian Pinjaman Dana Talangan. Addendum II di buat karena ada perpanjangan Jangka waktu Fasilitas Pinjaman selama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian dan Penambahan Plafond Fasilitas pinjaman sebesar Rp1.350 sehingga total jumlah pokok fasilitas pinjaman sebesar Rp15.949 dengan suku bunga 15% p.a (termasuk pajak) serta biaya provisi sebesar 0,25% dari nilai fasilitas pinjaman.

- Deed Amendment IV of the Agreement *Secured Promissory Notes* PT Istaka Karya (Persero) number: 04 dated December 2, 2015; and
- Deed Amendment V Agreement *Secured Promissory Notes* PT Istaka Karya (Persero) number: 08 dated May 19, 2016.
- Deed of Amendment VI *Secured Promissory Notes Issuance Agreement* PT Istaka Karya (Persero) number: 01 dated August 1, 2016.

Based on Agreement No.C-92.HT.03.02-TH.2003 about SPN Agreement PT Istaka Karya that PT Istaka Karya as a SPN issuer and PT PPA as a SPN holder which on March 9, 2017 PT Istaka Karya proposed extension for the term of agreement and maturity date SPN which issued before the date of this amandement, and granted the addition of the principal amount up to Rp100,000 with interest rate 12% per annum (exc. Tax). Interest for SPN shall be paid by the issuer to holder monthly, on the end of the month.

14. PT Artha Bangun Pratama

On December 14, 2016, Addendum II for Agreement No.PP-21/PPA /1216 between the Company with PT Artha Bangun Pratama concerning Comprehensive Amendment of Bailout Loan. Addendum II was created because there was an extension of period for 12 (twelve) months starting from the signing of Agreement and Addition of Ceiling Loan Facility amounted of Rp1,350, bringing the total principal amount of the loan facility amounting to Rp15,949 with an interest rate of 15% per annum (including taxes) and the cost of provision of 0.25% of the value of the loan facility.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

Berdasarkan Perjanjian No. PP-19/PPA/1116 Tanggal 3 November 2016 dilakukan Perjanjian Pinjaman Dana Talangan, jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp1.112 dengan tingkat suku bunga 15% p.a (gross) jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Pemberian pinjaman bertujuan untuk pembayaran biaya jasa konsultan pembuatan studi kelayakan rencana pengembangan asset ABP dan menetapkan Owner Estimate serta untuk mendapatkan mitra strategis terbaik.

Based on Agreement No. PP-19/PPA/1116 dated November 3, 2016, Bailout Loan Agreement was made, with the total of principal lending a maximum amounting to Rp1,112 with interest rate 15% per annum (gross) in a 12 (twelve) months term. The lending aims to pay consultancy fee to create feasibility studies of ABP assets as well as establishing Owner Estimate to get the best strategic partner.

15. PT KNE Global Persada

Transaksi yang dilakukan adalah pengambilalihan piutang (Cessie) PT KNE Persada ("KNE") kepada Bank Mandiri senilai Rp16.000 pada tanggal 30 Juni 2016. Sinergi dilakukan dengan PT PPA Kapital dan PT Nindya Beton dalam penyelesaian pembangunan fisik atas fasilitas produksi milik KNE dengan target pada awal tahun 2017 KNE sudah bisa memproduksi secara komersial.

15. PT KNE Global Persada

Transactions conducted are factoring (Cessie) KNE PT Persada ("KNE") to Bank Mandiri Rp16,000 as of June 30, 2016. Synergies with PT PPA Kapital and PT Nindya Concrete in the completion of physical development on the production facilities belonging to KNE with a target at the beginning of 2017 KNE has been able to produce commercially.

Restrukturisasi pinjaman (eks Bank Mandiri) diperlukan untuk memberikan kelonggaran yang cukup bagi KNE untuk melaksanakan rencana bisnisnya dan kembali mendapatkan kepercayaan dari perbankan, dengan salah satu kondisi antara lain bahwa pembangunan fisik atas fasilitas produksi telah selesai dan telah dilakukan trial production.

Restructuring of loans (ex Bank Mandiri) is required to provide sufficient leeway for KNE to implement its business plan and regain the confidence of the banks, with one of the requirements is that the physical construction of the production facility has completed and trial production has done.

16. PT Pertani

Pada tanggal April 28, 2016 terdapat addendum dan Pernyataan kembali atas Perjanjian Pinjaman Jangka Pendek atas No.PP-09/PPA/1115 tertanggal 10 November 2015 yang telah dilegalisasi oleh Muhamat Hatta, SH, Pinjaman yang diberikan dalam bentuk modal kerja untuk proyek benih terkontrak kepada PT Pertani (Persero). Jumlah pokok fasilitas Pinjaman maksimum sebesar Rp85.000, Jangka waktu selama 1 tahun sejak tanggal addendum perjanjian terakhir yang ditandatangani pada tanggal April 28, 2016 dengan tingkat suku bunga sebesar 13,75 % p.a (gross) dan biaya provisi sebesar 0,5% dari dana fasilitas Pinjaman.

16. PT Pertani

On April 28, 2016 there was Addendum and Statement for Short-Term Loan Agreement for No.PP-09/PPA/1115 dated November 10, 2015, which has been legalized by Muhamat Hatta, SH. The borrowing given is in form of working capital for seed projects contracted to PT Pertani (Persero). The maximum principal facility is amounting to Rp85,000. Time period for 1 year since the last addendum agreement date signed on April 28, 2016 with an interest rate of 13.75% pa (gross) and charges a fee of 0.5% of funds Loan facilities.

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

17. PT Riscon Duta Sarana

Pada tanggal 22 Juli 2016 PT Riscon Duta Sarana dan Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Jual beli Surat Utang Konversi nomor SU-03/PPA/0716 dengan plafon sebesar Rp10.000 yang akan digunakan untuk pembiayaan pengembangan proyek Perumahan Bukit Hijau Ciomas dengan tingkat suku bunga 5% p.a dan IRR 35% pada saat pelunasan atau konversi surat utang dilaksanakan. Surat Utang tersebut memiliki jangka waktu selama 24 bulan sejak tanggal efektif dan dapat dikonversi menjadi saham pada PT Riscon Duta Sarana sewaktu-waktu setelah 90 hari sejak tanggal penerbitan pertama kali surat utang. Surat Utang tersebut telah berlaku efektif pada tanggal 3 Agustus 2016 dan sampai dengan 31 Desember 2016 PT Riscon Duta Sarana sudah menerbitkan dua Surat Utang dengan jumlah nilai pencairan sebesar Rp8.000.

Selain Perjanjian Surat Utang Konversi PT Riscon Duta Sarana dan Perusahaan juga telah menandatangani Perjanjian Pemberian Pinjaman Jangka Pendek nomor PP-12/PPA/0716 tertanggal 22 Juli 2016 dengan plafon sebesar Rp5.000. Perjanjian tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh PPA untuk pembiayaan pembangunan kavling rumah dan ruko pada Proyek Perumahan Bukit Hijau Ciomas. Fasilitas pinjaman jangka pendek tersebut dikenakan suku bunga 13% p.a dengan jangka waktu fasilitas pinjaman selama 24 bulan sejak di tanda tangannya perjanjian.

Sampai dengan 31 Desember 2016 PT Riscon Duta Sarana belum melakukan pencairan atas fasilitas pinjaman ini.

17. PT Riscon Duta Sarana

On July 22, 2016 PT Riscon Duta Sarana and the Company signed the Sale and Purchase Agreement of Bonds Convertible number SU-03 / PPA / 0716 with a ceiling of Rp10,000 which will be used to finance the project development Perumahan Bukit Hijau with an interest rate of 5% p.a and IRR 35% at the redemption date or when the conversion of debentures is held. The debenture has a 24 months term since effective date and can be converted into shares of PT Riscon Duta Sarana at anytime after 90 days 90 days from the date of first issuance of debt securities. Bonds has been effective on August 3, 2016 and until December 31, 2016 PT Duta Sarana Riscon already published two Bonds with the total value of the disbursement of Rp8,000.

In addition to Bonds Conversion Agreement PT Riscon Duta Sarana and the Company have also signed Short Term Loan Agreement number PP-12 / PPA / 0716 dated July 22, 2016 with a ceiling of Rp5,000. The agreement is a facility provided by the company to finance the construction of houses and shop lots in Perumahan Bukit Hijau Ciomas. Short-term loans bear interest of 13% p.a with a term loan facility for 24 months since been signed the agreement.

As of December 31, 2016 PT Riscon Duta Sarana did not withdraw on this credit facility.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

Kedua perjanjian tersebut dijaminan dengan jaminan bersama sebagai berikut:

- Hak Tanggungan Peringkat pertama, kedua, dan seterusnya atas tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, dengan lokasi di Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan:
 - (i) Sertifikat Hak Milik No. 178/Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, NIB:10.10.07.18.0186, tercatat atas nama Endah Sri Untari;
 - (ii) Sertifikat Hak Milik No. 179/Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, NIB:10.10.07.18.0187, tercatat atas nama Endah Sri Untari.
- Jaminan Fidusia atas piutang yang sekarang dimiliki dan/atau dikemudian hari akan dimiliki oleh Penerima Pinjaman;
- Gadai Saham dari seluruh pemegang saham Penerbitan Surat Utang Konversi;
- Jaminan Perusahaan dari PT Riscon Victory selaku pihak pengendali utama.

Dengan ketentuan, nilai jaminan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud diatas secara bersama-sama ditetapkan serendah-rendahnya sebesar 125% dari plafond pinjaman.

18. PT Tropisindo Sumber Energi

Pada tanggal 22 Desember 2016 PT Tropisindo Sumber Energi dan Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Jual beli Surat Utang Konversi nomor SU-10/PPA/1216 dengan plafon sebesar Rp12.000 yang akan digunakan untuk pembiayaan pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro (PLTMh) Sengak 1 dengan tingkat suku bunga 12,5% p.a ditambah dengan insentif bunga yang dibayarkan secara tahunan Surat Utang tersebut memiliki jangka waktu selama 60 bulan sejak tanggal efektif dan dapat dikonversi menjadi saham pada PT Tropisindo Sumber Energi pada tanggal jatuh tempo surat utang. Sampai dengan 31 Desember 2016 PT Tropisindo Sumber Energi belum melakukan penerbitan atas surat utang tersebut.

40. Commitments and Agreements (Continued)

Both of these agreements are secured by collateral together as follows:

- *Mortgage Ranked first, second, and so on land and buildings standing on it, located in Village Sukawening, District Dramaga, West Java Province, by:*
 - (i) *Certificate of Hak No. 178 / Sukawening Village, District Dramaga, Bogor, West Java Province, NIB: 10.10.07.18.0186, registered in the name of Sri Endah Untari;*
 - (ii) *Certificates Hak No. 179 / Sukawening Village, District Dramaga, Bogor, West Java Province, NIB: 10.10.07.18.0187, registered in the name of Sri Endah Untari.*
- *Fiduciary receivables owned now and / or in the future will be owned by the Borrower;*
- *Pledged shares of all shareholders for the Issuance of Debt Conversion;*
- *Corporate Guarantee of PT Riscon Victory as the main controller;*

With the provision, the value of collateral Mortgage and Fiduciary as aforesaid jointly set as low as 125% of the loan ceiling.

18. PT Tropisindo Sumber Energi

On December 22, 2016 PT Tropisindo Energy Sources and the Company signed the sale and purchase of Bonds Convertible number SU-10 / PPA / 1216 with a ceiling of Rp12,000 which will be used to finance development projects Power Plant Mini Hydro (MHP) Sengak 1 with an interest rate of 12.5% pa plus the incentive of interest paid on a yearly basis the debt Securities has a period of 60 months from the effective date and can be converted into shares of PT Tropisindo Source of Energy on the date of maturity bonds. As of December 31, 2016 PT Sumber Energi Tropisindo not make the issuance on debentures.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

Selain Perjanjian Surat Utang Konversi PT Tropisindo Sumber Energi dan Perusahaan juga telah menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman nomor PP-23/PPA/1216

tertanggal 22 Desember 2016 dengan plafon sebesar Rp 1,5 miliar Perjanjian tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan untuk Pembayaran bunga surat utang konversi selama masa konstruksi / *Interest During Construction (IDC)*.

Fasilitas pinjaman tersebut dikenakan suku bunga 12,5% p.a dengan jangka waktu fasilitas pinjaman selama 48 bulan sejak di tanda tangannya perjanjian. Sampai dengan 31 Desember 2016 PT Tropisindo Sumber Energi belum melakukan pencairan atas fasilitas pinjaman ini.

Kedua perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan bersama sebagai berikut:

- Bidang tanah yang terletak di Desa Sukasari, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, berdasarkan:
 - (i) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00002/Desa Sukasari seluas 3.449 m², Surat Ukur tanggal 10 Juni 2016 No. 00175/Sukasari/2016, NIB: 0707060300285 yang tercatat atas nama PT Tropisindo Sumber Energi;
 - (ii) Tanah seluas 945 m² yang merupakan dari SHM No. 224/Desa Sukasari, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 69 tanggal 30 Desember 2015 dibuat dihadapan Muhamad Taufik, SH, Notaris di Kabupaten Kepahiang.
 - (iii) Tanah seluas 1.275 m² yang merupakan bagian dari SHM No. 233/Desa Sukasari, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 69 tanggal 30 Desember 2015 dibuat dihadapan Muhamad Taufik, SH, Notaris di Kabupaten Kepahiang.

In addition to Bonds Conversion Agreement PT Tropisindo Energy Sources and the Company have also signed a Loan Facility Agreement number PP-23/PPA/126.

PPA / 1216 dated December 22, 2016 with a ceiling of Rp 1.5 billion. The agreement is a facility provided by the Company for the interest payment convertible debentures during the construction / Interest During Construction (IDC).

The loan facility bears interest at 12.5% p.a with a term loan facility for up to 48 months since in tangannya sign the agreement. As of December 31, 2016 PT Sumber Energi Tropisindo yet drawdowns on this credit facility.

Both of these agreements are secured by collateral together as follows:

- *A land plot located in the Sukasari Village, District Kabawetan, Kepahiang District, Bengkulu Province, by:*
 - (i) Building Use Rights Certificate No. 00002 / Sukasari Village area of 3,449 awm, Measure Letter dated June 10, 2016 No. 00175 / Sukasari / 2016, NIB: 0707060300285 registered in the name of PT Tropisindo Energy Sources;*
 - (ii) Land area of 945 sqm which is from SHM No. 224 / Sukasari Village, District Kabawetan, Kepahiang District, Bengkulu Province based on the Deed of Sale and Purchase Agreement No. 69 dated December 30, 2015, made before Muhamad Taufik, SH, Notary in Kepahiang District.*
 - (iii) Land area of 1,275 sqm which is part of the SHM No. 233 / Sukasari Village, District Kabawetan, Kepahiang District, Bengkulu Province based on the Deed of Sale and Purchase Agreement No. 69 dated December 30, 2015, made before Muhamad Taufik, SH, Notary in Kepahiang District.*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

- Jaminan fidusia atas seluruh mesin-mesin, antara lain turbin, transformer dan fasilitas pendukung lainnya dalam PLTMh Sengak-1 ;
- Gadai Saham dari seluruh pemegang saham Penerbit Surat Utang;
- Jaminan Perusahaan PT Serumpun Jaya Abadi selaku pemegang saham mayoritas PT Tropisindo Sumber Energi.

19. PT Kelsri

Tanggal 24 November 2016 PPA menyetujui pemberian pinjaman Project Financing dengan menandatangani Akta No. 96 (Perjanjian Pemberian Pinjaman Proyek Financing – Non Revolving kepada PT Kelsri) dan selanjutnya pada tanggal 29 November 2016 dilakukan addendum perjanjian dengan penandatanganan Akta No.117 (Addendum I Perjanjian Pemberian Pinjaman Proyek Financing – Non Revolving kepada PT Kelsri) dan selanjutnya pada tanggal 29 November 2016 dilakukan addendum perjanjian dengan penandatanganan Akta No.117 (Addendum I

Perjanjian Pemberian Pinjaman Proyek Financing – Non Revolving kepada PT Kelsri) dengan plafond senilai Rp28.000. Suku bunga 15% pa. jangka waktu 9 bulan.

Pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai pembelian mesin bor HDD dan Auger yang dibutuhkan oleh PT Kelsri untuk pelaksanaan proyek pembangunan pipa gas yang diperoleh dari Pertagas.

Atas pinjaman tersebut telah dilakukan pencairan sebesar Rp7.000.

20. PT Berdikari

Pada tanggal 18 Agustus 2016 telah ditandatangani Perjanjian Nomor PP-15/PPA/0816 antara Perusahaan dan PT Berdikari (Persero) ("Berdikari") yang merupakan addendum keempat dari Perjanjian Pemberian Pinjaman Jangka Pendek No. 5/PPA/0615 yang sebelumnya ditandatangani pada tanggal 16 Juni 2015, dan telah jatuh tempo pada tanggal 2 Juli 2016. Dengan perpanjangan tersebut, maka jangka waktu pinjaman akan jatuh tempo pada tanggal 2 Juli 2017.

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

- *Fiduciary security of all machinery and equipment, including turbines, transformers and other ancillary facilities in the MHP Sengak-1;*
- *Pledged shares of all shareholders Issuing Debt;*
- *Assurance Company PT Serumpun Jaya Abadi, the majority shareholder of PT Tropisindo Energy Sources.*

19. PT Kelsri

On November 24, 2016 PPA approved a loan to Project Financing by signing the Deed No. 96 (Project Financing Loan Agreement - Non Revolving PT Kelsri) and later, on November 29, 2016 performed the amended agreement with the signing of the Deed 117 (Addendum I Project Financing Loan Agreement - Non Revolving PT Kelsri) and later, on November 29, 2016 performed the amended agreement with the signing of the Deed 117 (Addendum I Lending Project Financing agreement - Non

Revolving PT Kelsri) with a ceiling of Rp28,000. The interest rate of 15% pa. a period of 9 months.

The loan was used to finance the purchase of machinery and Auger drill HDD required by PT Kelsri for the implementation of the gas pipeline project were obtained from Pertagas.

The loan has been disbursed amounting to Rp7,000.

20. PT Berdikari

On August 18, 2016, an Agreement No. PP-15/PPA/0816 between the Company and PT Berdikari (Persero) ("Berdikari") which is the fourth addendum from Short Term Loan Agreement No. 5/PPA/0615 which perviously was signed on June 16, 2015m and was matured on July 2, 2016. With the extension, the lending terms will be mature on July 2, 2017.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

**40. Commitments and Agreements
(Continued)**

PT PPA memberikan pinjaman jangka pendek kepada Berdikari dalam mata uang Rupiah, dengan jumlah total pokok pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp40.000 dan bersifat revolving yaitu atas setiap penurunan pokok pinjaman yang terutang akibat pembayaran yang dilakukan oleh Berdikari maka atas jumlah pokok pinjaman yang telah dilunasi tersebut dapat diajukan untuk digunakan sebagai pembiayaan sesuai tujuan penggunaan dana.

PT PPA provides short-term loans to the Berdikari in Rupiah, with a total principal amount of a maximum of Rp40,000 and is revolving, that is on any declining loan principal outstanding as a result of payments made by Berdikari, then on the principal amount of the loan which has been repaid, it can be submitted to be used as as financing their intended use of the funds.

Dalam addendum ini, tingkat suku bunga telah disesuaikan dari 16,5% menjadi 14,5% per tahun. Tujuan penggunaan dana adalah pembiayaan dalam rangka kegiatan usaha Berdikari yaitu untuk membiayai:

In this addendum, the interest rate was adjusted from 16.5% to 14.5% per year. The aim of the funding is to finance Berdikari activities, that are to fund:

- f. Pembelian sapi hidup dalam rangka pengadaan sapi qurban untuk pemenuhan kebutuhan Idul Adha 2016 ("Sapi Hidup");
- g. Pembelian sapi hidup siap potong secara lokal ("c"); dan;
- h. Pembelian karkas secara lokal maupun impor ("Karkas Sapi").

- a. Purchase of live cattles in order to procurement of sacrificial cattle to meet the needs of Idul Adha 2016 ("Live Cattles");*
- b. Purchase of live cattle ready for slaughter locally ("Cow Ready to Cut"); and;*
- c. Purchasing locally or imported carcasses ("Beef Carcass").*

Pada tanggal 1 November 2016 kembali dilakukan addendum Perjanjian menjadi PP-18/PPA/0116 dengan tujuan menyesuaikan tujuan penggunaan dana butir A. yaitu pembelian sapi hidup yang ditujukan untuk diperjualbelikan.

On November 1, 2016, Addendum to Agreement PP-18 / PPA / 0116 was made, with the aim of adjusting the aim of funds in point A i.e. the purchase of live cattle intended for commercial use.

Penarikan dana dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan Berdikari, dan atas setiap penarikan dana wajib untuk dilunasi selambat-lambatnya pada hari kalender ke 60 (enampuluh). Berdikari tidak dapat melakukan penarikan dana apabila terdapat kewajiban tertunggak dari pokok pinjaman yang telah jatuh tempo

Withdrawal of funds can be carried out in stages according to the needs of Berdikari, and on any withdrawal of funds it is required to pay no later than the calendar 60 (sixty) days. Berdikari can not withdraw funds if there is any duty arrears of principal that was due.

Terhitung sejak 60 (enam puluh) hari kalender sebelum Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman, Berdikari tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan pinjaman dana

As from 60 (sixty) calendar days prior to the Maturity Date Loan, Berdikari is not allowed to withdraw the loan funds.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

41. Manajemen Risiko Keuangan

41. Financial Risks Management

Aset Keuangan

Financial Assets

	2017 Rp	2016 Rp	
Kas dan Setara Kas	1,694,156	1,534,252	Cash and Cash Equivalent
Aset Keuangan untuk Diperdagangkan	83,235	95,890	Securities Held for Trading
Piutang Usaha - Bersih	1,221,166	1,008,109	Accounts Receivable - Net
Piutang Retensi - Bersih	216,966	138,523	Retention Receivables - Net
Dana Talangan - Bersih	207,115	219,215	Loans Receivable Bailout - Net
Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa	1,293,722	1,259,704	Gross Amount Due from Customers
Aset Lancar Lainnya	74,695	97,264	Other Current Assets
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	114,858	125,710	Available for Sale Financial Assets
Investasi Jangka Panjang Lainnya	41,818	42,535	Other Long -Term Investments
Restrukturisasi/Revitalisasi -Bersih	1,356,385	1,351,876	Restructuring/Revitalization SOEs-net
Pinjaman Investasi Jangka Pendek	308,944	49,741	Short-Term Investment Loans
Jumlah Aset Keuangan	6,613,060	5,922,819	Total Financial Assets

Liabilitas Keuangan

Financial Liabilities

	2017 Rp	2016 Rp	
Utang Usaha	1,597,995	1,034,369	Account Payable
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan	1,963,356	1,051,504	Bank and Financial Institution Loans
Utang Bruto kepada Pihak Ketiga	628,457	618,204	Gross Amount Due to Third Parties
Beban Akrua dan Utang Lain-lain	141,755	194,212	Accrued Expense and Other Payables
Jumlah Liabilitas Keuangan	4,331,563	2,898,289	Total Financial Liabilities

Dalam menjalankan dan mengelola aktivitasnya Perusahaan dan entitas anak terekspos terhadap berbagai risiko. Perusahaan dan entitas anak telah memetakan risiko-risiko potensial yang dihadapi oleh Perusahaan dan entitas anak yang digunakan sebagai acuan untuk menetapkan langkah-langkah tindak lanjut penanganan risiko sebagai upaya pencegahan agar risiko-risiko tersebut berada pada level yang diharapkan dan melakukan langkah-langkah mitigasi agar risiko yang dihadapi tidak meningkat ke level yang tidak dapat diterima oleh Perusahaan dan entitas anak.

Various activities undertaken by the Company and subsidiary make it exposed to various risks. The Company and subsidiary has mapped potential risks faced by the Company and subsidiary to be used as a reference to establish measures of risk as a follow-up of prevention efforts for these risks at the expected level and to conduct mitigation measures for the risks faced to avoid increasing to the levels that can not be accepted by the Company and subsidiary.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan manajemen risiko berjalan efektif dan efisien, maka proses manajemen risiko harus mengikuti kaidah, metode, dan sistem yang dibuat bersama antara satuan kerja yang terkait langsung dengan suatu kegiatan bersama dengan satuan kerja manajemen risiko dan kepatuhan.

To ensure that the implementation of risk management runs effectively and efficiently, then the risk management process should comply the rules, methods, and systems that are made between the units of work that are directly related to an activity together with a unit of work risk management and compliance.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

41. Manajemen Risiko Keuangan

Untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen risiko, Perusahaan membentuk satuan kerja manajemen risiko dan kepatuhan yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan manajemen risiko berjalan efektif dan efisien, maka proses manajemen risiko harus mengikuti kaidah, metode, dan sistem yang dibuat bersama antara satuan kerja manajemen risiko dengan satuan kerja terkait

Penerapan manajemen risiko oleh Grup antara lain bertujuan:

- Mendukung pencapaian tujuan Perusahaan dan Entitas Anak melalui penerapan sistem manajemen risiko yang efektif.
- Menyediakan *early warning signal* bagi pengambilan keputusan dengan pengendalian risiko yang baik.
- Mencapai keseimbangan pada tingkat yang dapat diterima antara risiko dan tingkat pengembalian serta meminimalisasi potensi efek memburuknya kinerja keuangan Perusahaan dan Entitas Anak.
- Memastikan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan.

Perusahaan

Risiko-risiko utama yang dihadapi Perusahaan dan aktivitas pengelolaan risiko antara lain sebagai berikut:

(i) Risiko Kredit

Perusahaan terekspos risiko kredit pada kegiatan pencairan dana atau pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN serta kegiatan investasi.

Risiko kredit timbul ketika pihak lawan (*counterparty*) gagal memenuhi memenuhi liabilitasnya sehingga menyebabkan kerugian pada Perusahaan.

Instrumen keuangan Perusahaan yang memiliki potensi risiko kredit terdiri dari akun Piutang Usaha, Pinjaman, dan Piutang Lain-lain.

41. Financial Risks Management

To coordinate and facilitate the Implementation of risk management, the Company formed a unit work of risk management and compliance that are independent and responsible directly to the President Director.

To ensure that the implementation of risk management is effective and efficient, then the risk management process should follow the rules, methods, and systems made jointly between risk management work unit with related work units

The implementation of risk management by the Group, among other aims at:

- Supporting the achievement of goals of the Company and Subsidiaries through the implementation of effective risk management system.
- Provides early warning signal for decision making with good risk control.
- Achieving a balance at an acceptable level of risk and returns and minimize potential adverse effects of the financial performance of the Company and Subsidiaries.
- Ensuring compliance with laws and legislations.

The Company

The primary risks faced by the Company and risk management activities are as follows:

(i) Credit Risk

The Company is exposed to credit risk on the disbursement of funds or financing activities related to restructuring activities and / or revitalization of state-owned enterprises and investment activities.

Credit risk arises when a counterparty failed to meet its liabilities, causing loss to the Company.

The Company's financial instruments that have the potential credit risk consist of Accounts Receivable, Loans Granted and Other Receivables.

41. Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)

Pengelolaan risiko kredit antara lain dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN

Pengelolaan risiko kredit pada kegiatan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN, antara lain dilakukan melalui:

- Pelaksanaan kajian kelayakan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN. Kajian kelayakan dilakukan terhadap seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kinerja usaha dan kemampuan BUMN guna merumuskan dan merekomendasikan opsi restrukturisasi dan/atau revitalisasi terbaik, sehingga BUMN dapat mengembalikan dana yang diterima dari Perusahaan
 - Mensyaratkan adanya jaminan/agunan
 - Memantau pemenuhan persyaratan dan kondisi yang telah ditetapkan antara Perusahaan dan BUMN yang direstrukturisasi dan/atau revitalisasi.
 - Memantau pencapaian target kinerja BUMN yang direstrukturisasi dan/atau revitalisasi dan mengusulkan langkah antisipasi untuk meningkatkan kinerja.
 - Melakukan upaya penagihan yang efektif agar pembayaran kewajiban BUMN yang direstrukturisasi dan/atau revitalisasi (kepada Perusahaan) dapat dilakukan secara teratur sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan.
 - Melakukan langkah-langkah dalam rangka mengupayakan agar program restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN dapat selesai tepat waktu sesuai perencanaan.
- b. Kegiatan investasi**
Pengelolaan risiko kredit berkaitan dengan kegiatan investasi adalah sebagai berikut:
- Pengelolaan risiko atas kegiatan investasi pada surat berharga (surat utang) dilakukan dengan melakukan investasi pada surat berharga yang memiliki peringkat *investment grade* berdasarkan peringkat kredit (*credit rating*) yang diterbitkan oleh Lembaga Pemeringkat. Dalam hal tidak terdapat peringkat kredit maka surat berharga yang menjadi target investasi harus didukung dengan jaminan yang memadai.

41. Financial Risks Management (Continued)

Credit risk management, among others carried out through the following activities:

a. SOE's Restructuring activities and/or revitalization.

Credit risk management on restructuring activities and / or revitalization of enterprises, among others by:

- *Implementation of the feasibility study of restructuring and / or revitalization of SOE. A feasibility study was conducted on all aspects that may affect the business performance and the ability to formulate and recommend SOE restructuring options and / or the best revitalization, so that SOE can return the funds received from the Company*
- *The determination of the requirements of assurance/collateral.*
- *Monitoring of fulfill requirement and conditions that has been agreed between company and state-owned companies that restructured and/or revitalized.*
- *Monitoring of the achievement of the performance of SOEs were restructured and / or revitalized and propose anticipatory steps in order to improve performance.*
- *Conducting effective collection efforts so that the payment obligations of SOE's restructured and / or revitalization (the Company) may be carried out regularly in accordance with the payment schedule has been set.*
- *Perform steps in order to devices for the restructuring and / or revitalization of SOE can be completed on time according to plan.*

b. Investment Activities

Credit risk management that be related with investment activity as follows:

- *Management of risk on investment activity in securities (bonds) is done by investing in securities that are rated investment grade by credit rating (credit rating) issued by rating agencies. In the event that there are no credit ratings of the securities in the investment target must be backed by sufficient collateral.*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

41. Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)

- Pengelolaan risiko pada kegiatan investasi melalui pembiayaan proyek-proyek tertentu dilakukan dengan *due diligence* dan kajian mengenai kelayakan suatu investasi sebelum membuat keputusan investasi
- Memantau dan mengevaluasi kinerja debitur/proyek/penerbit surat utang untuk memastikan pemenuhan persyaratan / kondisi yang diatur dalam perjanjian kredit atau perjanjian penerbitan penerbitan utang.

Entitas Anak (PT NK)

Instrumen keuangan PT NK yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang retensi dan piutang lain-lain. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2017 piutang usaha PT NK tidak terkonsentrasi pada pelanggan tertentu.

PT NK mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan bank dan institusi keuangan, yaitu hanya bank dan institusi keuangan ternama dan berpredikat baik yang dipilih.

(i) Risiko Suku Bunga

Risiko tingkat bunga arus kas adalah risiko dimana arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

Tingkat suku bunga yang cukup tinggi dan terjadi secara tiba-tiba dapat berpengaruh terhadap menurunnya laba NK.

Dampak dari pergerakan suku bunga di pasar tidak signifikan. NK mengelola risiko suku bunga melalui pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap NK. NK akan mengawasi secara ketat pergerakan suku bunga di pasar dan apabila suku bunga mengalami kenaikan yang signifikan maka NK akan menegosiasikan suku bunga tersebut dengan para lender.

41. Financial Risks Management (Continued)

- The management of risk on investment activities through the financing of certain projects conducted with *due diligence* and *feasibility studies* adequate investment before making an investment decision.
- Monitor and evaluate the performance of the debtor / project / issuer of debt securities to ensure compliance with the requirements / conditions set forth in the credit agreement or the agreement issuance of debt issuance.

Subsidiary (PT NK)

PT NK financial instruments which have the potential for credit risk consists of cash and cash equivalents, accounts receivable, retention receivables and other receivables. Total maximum credit risk exposure equal to carrying value of these accounts.

As of December 31, 2017 accounts receivable of PT NK are not concentrated on a certain customer.

PT NK managed credit risk by pre-defined limit of the acceptable risk for each customer and be more selective in election of banks and financial institutions, such well-known reputation banks and financial institutions.

(i) Interest Rate Risk

Interest rate risk is defined as the risk that future cash flows of a financial instrument fluctuate due to movement of market interest rates.

High interest rate which suddenly occurs could affect in declining of NK profit.

The impact of interest rate movements in the market was not significant. NK managed interest rate risk and monitoring the impact of interest rate movements to minimize the negative impact on NK. NK might be closely monitoring interest rate movements in the market and if interest rates increase significantly, NK might negotiate the interest rates with the Creditors.

41. Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)

- (ii) Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas adalah risiko di mana posisi arus kas menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.

Eksposur risiko likuiditas berupa kesulitan NK dalam memenuhi Liabilitas keuangan yang harus dibayar dengan kas atau aset keuangan lainnya. NK diharapkan dapat membayar seluruh Liabilitasnya sesuai dengan jatuh tempo kontraktual. Dalam memenuhi Liabilitas tersebut, maka PT NK harus menghasilkan arus kas masuk yang cukup.

PT NK mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi dalam memenuhi komitmen PT NK untuk operasi normal dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

- (iii) Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah, Kondisi Ekonomi dan Sosial Politik

Kebijakan pemerintah baik yang menyangkut ekonomi dan moneter, serta kondisi sosial dan politik yang kurang kondusif akan berakibat menurunnya investasi dan pembangunan. Hal ini dapat mengakibatkan tertundanya proyek-proyek yang telah maupun akan diperoleh PT NK. Risiko ini merupakan risiko yang bersifat sistemik (*Systematic Risk*) dimana bila risiko ini terjadi maka akan mempengaruhi secara negatif seluruh variabel yang terlibat, sehingga membuat kinerja Perusahaan menurun, bahkan diversifikasi pun belum mampu menghilangkan risiko ini.

Entitas Anak (PT PPA Finance)

Bisnis PPA Finance mencakup aktivitas pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan melakukan pembiayaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko PPA Finance adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur dan mengelola posisi risiko. PPA Finance secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktek pembiayaan terbaik.

PPA Finance mendefinisikan risiko keuangan sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang memberikan efek negatif terhadap pencapaian tujuan PPA Finance.

41. Financial Risks Management (Continued)

- (ii) *Liquidity Risk*
Liquidity risk is defined as the risk in which the positions of cash flows indicate short-term cash inflow is not sufficient to short-term cash outflow.

Liquidity risks exposures are NK difficulties in fulfilling financial liabilities that must be settled by cash or other financial assets. NK is expected to settle all its obligations in accordance with contractual maturities. In fulfilling this obligation, PT NK should generate sufficient cash inflows.

PT NK manages liquidity risk by maintaining cash and cash equivalents that sufficient to meet the commitments of PT NK for normal operation and regularly evaluate cash flow projections and actual cash flows, and the schedule date of maturity of assets and financial liabilities.

- (iii) *Risk of Changes in Government Policy, Economic and Social Politics.*

Government policies concerning economic, monetary, social and political conditions that are less conducive might results in decrease of investment and development. These could lead to delay in projects which have been or might be acquired by PT NK. This risk is systemic risk (Systematic Risk) if its incur then, the risk might negatively affect toward variables involved, thus declining performance of the Company, even diversification risk is unable to eliminate it.

Subsidiary (PT PPA Finance)

Business of PPA Finance covers risk-taking activities with a particular target by operating a professional financing. The primary function of the PPA Finance risk management is to identify all key risks, measure and manage risk. PPA Finance regularly reviews its policies and risk management system to conform with changes in market, product and best financing practices.

PPA Finance defines financial risk as the possibility of loss or lost profit, caused by factors both internal and external factors which have negative effects on the PPA Finance's goals achievement.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

41. Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)

PPAF mendefinisikan risiko keuangan sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang memberikan efek negatif terhadap pencapaian tujuan PPAF.

Tujuan PPAF dalam mengelola risiko keuangan adalah untuk mencapai keseimbangan yang terukur antara risiko dan tingkat pengembalian serta meminimalisasi kemungkinan efek memburuknya kinerja keuangan PPAF.

Risiko keuangan utama yang dihadapi PPAF adalah risiko kredit, risiko pasar di dalamnya terdapat risiko suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang, risiko likuiditas dan risiko perubahan kebijakan Pemerintah, kondisi ekonomi dan sosial politik.

Risiko kredit di Perusahaan merupakan risiko yang timbul atas pembiayaan yang diberikan. Risiko ini muncul apabila terjadi penurunan kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran sehingga tidak dapat melunasi pinjamannya.

Risiko suku bunga merupakan risiko yang terjadi karena fluktuasi suku bunga di pasar sehingga akan berdampak pada kenaikan *cost of fund* dan penurunan laba. Risiko ini muncul apabila terjadi kondisi makro ekonomi tidak kondusif sehingga tingkat suku bunga meningkat.

Entitas Anak (PPA Kapital)

Bisnis PPA Kapital mencakup aktivitas pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan melakukan pembiayaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko PPA Kapital adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur dan mengelola posisi risiko. PPA Kapital secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktek pembiayaan terbaik.

PPA Kapital mendefinisikan risiko keuangan sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang memberikan efek negatif terhadap pencapaian tujuan PPA Kapital.

Tujuan PPA Kapital dalam mengelola risiko keuangan adalah untuk mencapai keseimbangan yang terukur antara risiko dan tingkat pengembalian serta meminimalisasi kemungkinan efek memburuknya kinerja keuangan PPA Kapital.

41. Financial Risks Management (Continued)

PPAF defines financial risk as the possibility of loss or lost profit, caused by factors both internal and external factors which have negative effects on the PPAF goals achievement.

The purpose of PPA Finance in managing financial risks is to achieve balance measurement between risk and returns then minimize the possibility effects of deteriorating PPAF financial performance.

The primary financial risks faced by the PPAF are credit risk, market risk including interest rate and currency exchange rate risk, liquidity risk and the risk of changes in government policy, social and political conditions.

The Company's credit risk is the risk arising from financing. This risk arises when there is a decrease in the ability of borrowers to make payments so it can not repay the loan.

Interest rate risk is the risk that occurs due to fluctuations in market interest rates that will increase the cost of funds and earnings decline. This risk arises in case of macro-economic conditions are not conducive to the interest rate increases.

Subsidiary (PPA Kapital)

Business of PPA Kapital covers risk-taking activities with a particular target by operating a professional financing. The primary function of the PPA Kapital risk management is to identify all key risks, measure and manage risk. PPA Kapital regularly reviews its policies and risk management system to conform with changes in market, product and best financing practices.

PPA Kapital defines financial risk as the possibility of loss or lost profit, caused by factors both internal and external factors which have negative effects on the PPA Kapital's goals achievement.

The purpose of PPA Kapital in managing financial risks is to achieve balance measurement between risk and returns then minimize the possibility effects of deteriorating PPA Kapital's financial performance.

41. Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)

Risiko keuangan utama yang dihadapi PPA Kapital adalah risiko kredit, risiko pasar di dalamnya terdapat risiko suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang, risiko likuiditas dan risiko perubahan kebijakan Pemerintah, kondisi ekonomi dan sosial politik.

41. Financial Risks Management (Continued)

The primary financial risks faced by the PPA Kapital are credit risk, market risk including interest rate and currency exchange rate risk, liquidity risk and the risk of changes in government policy, social and political conditions.

42. Manajemen Permodalan

Tujuan Perusahaan dan entitas anak dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan untuk mengelola struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal secara efektif. Dalam rangka mengelola struktur modal sejalan dengan tujuan pendirian Perusahaan untuk kesejahteraan pekerja maka para pemegang saham memutuskan untuk tidak membagi dividen.

42. Capital Management

The objectives of the Company and Subsidiary in managing capital is to protect the Company's ability to maintain business continuity, therefore the entity can continue to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to manage the optimal capital structure to minimize the cost of capita effectively. In order to manage the capital structure in line with objectives of the Company's establishment to provide welfare for the workers, then the shareholders distribute not to divide the dividend.

43. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Pengungkapan saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

43. Related Parties Balance and Transactions

Disclosure of Related parties significant balance and transaction are as follows:

Pihak-pihak Berelasi / Related Parties	Hubungan/ Relationship	Transaksi/ Transactions
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan/Cash and cash equivalent, Bank and Financial Institution Loans
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Kas dan Setara Kas/Cash and cash equivalent
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan/Cash and cash equivalent, Bank and Financial Institution Loans
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan/Cash and cash equivalent, Bank and Financial Institution Loans
PT Boma Bisma Indra (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Aset Keuangan Diperdagangkan/Financial Assets Held for Trading
PT Survai Udara Panas (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Aset Keuangan Diperdagangkan/Financial Assets Held for Trading
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Aset Keuangan Diperdagangkan/Financial Assets Held for Trading
PT Istaka Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Aset Keuangan Diperdagangkan/Financial Assets Held for Trading
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Dana Talangan, Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi/Fund Advance Loans Receivable, Loans Receivable Restructuring and/or Revitalization
PT Kertas Leces (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan/Fund Advance Loans Receivable
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan/Fund Advance Loans Receivable
PT Boma Bisma Indra (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan/Fund Advance Loans Receivable

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**43. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi
(Lanjutan)**

**43. Related Parties Balance and Transactions
(Continued)**

Pihak-pihak Berelasi / Related Parties	Hubungan/ Relationship	Transaksi/ Transactions
PT Survei Udara Panas (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan/Fund Advance Loans Receivable
PT Artha Bangun Pratama	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan/Fund Advance Loans Receivable
PT Djakarta Lloyd (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan/Fund Advance Loans Receivable
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan, Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi/Loans Receivable Restructuring and/or Revitalization, Fund Advance Loans Receivable
PT Penataran Angkatan Laut Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan, Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi/Loans Receivable Restructuring and/or Revitalization, Fund Advance Loans Receivable
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi/Loans Receivable Restructuring and/or Revitalization
PT Iglas (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi/Loans Receivable Restructuring and/or Revitalization
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi/Loans Receivable Restructuring and/or Revitalization
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan/Bank and Financial Institution Loans
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan/Bank and Financial Institution Loans
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Uang Muka Jk. Pendek/Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha, Piutang Retensi/Accounts Receivable, Retention Receivable
PT Angkasa Pura II (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha, Tagihan Bruto/Accounts Receivable, Gross Amount Due from Customers
PT DOK & Perkapalan Surabaya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha/Accounts Receivable
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Piutang Retensi, Tagihan Bruto/Retention Receivable, Gross Amount Due from Customers
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Uang Muka Jk. Pendek/Accounts Receivable, Gross Amount Due from Customers
PT Pertamina (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Tagihan Bruto/Gross Amount Due from Customers
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Tagihan Bruto/Gross Amount Due from Customers
PT Perusahaan Gas Negara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan/Fund Advance Loans Receivable
PT Berdikari (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan/Fund Advance Loans Receivable
PT Pertani (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Pinjaman Investasi Jangka Pendek/Short-Term Investment Loans

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**43. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi
(Lanjutan)**

**43. Related Parties Balance and Transactions
(Continued)**

Rincian item yang terkait dengan transaksi pihak-pihak berelasi:

Detail of items associated with the related parties transaction:

<u>Aset</u>	2017 Rp	2016 Rp	2017 %	2016 %	<u>Asset</u>
Kas dan Setara Kas	1,029,827	1,268,231	10.86%	16.07%	Cash and Cash Equivalent
Piutang Usaha	358,623	174,564	3.78%	2.21%	Accounts Receivable
Piutang Retensi	90,323	23,052	0.95%	0.29%	Retention Receivable
Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan	207,115	119,475	2.18%	1.51%	Loans Bailout
Tagihan Bruto	1,293,722	617,798	13.65%	7.83%	Gross Amount Due from Customers
Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi	1,356,385	1,062,301	14.31%	13.46%	Loans Receivable Restructuring and/or Revitalization
<u>Liabilitas</u>					<u>Liabilities</u>
	2017 Rp	2016 Rp	2017 %	2016 %	
Utang Usaha	71,476	1,501	0.75%	0.02%	Accounts Payable
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan	691,769	307,694	7.30%	3.90%	Bank and Financial Institution Loans
Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Pendek	24,575	26,109	0.26%	0.33%	Short-Term Advances from Customers
<u>Pendapatan</u>					<u>Revenue</u>
Pendapatan Usaha	121,939	91,039	1.92%	1.82%	Sales Revenue

Persentase diatas merupakan perbandingan dengan total aset.

Above percentage is a comparison with total assets.

44. Standar Akuntansi Baru

44. New Accounting Standards

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian standar baru, serta interpretasi standar, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku 2017. Standar baru, amandemen dan penyesuaian standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018:

DSAK-IAI has issued the following new standards, amendments and adjustments of standards and interpretations, but not yet effective for the financial year 2017. The following are new standard, amendment and improvement of standards effective for period beginning on or after January 1, 2018:

- PSAK No. 16 (Amandemen 2015): "Aset Tetap"
- PSAK No. 69: "Agrikultur"
- PSAK No. 2 (Amandemen 2016): "Laporan Arus Kas"
- PSAK No. 46 (Amandemen 2016): "Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi"
- PSAK No. 13 (Amandemen 2017): "Properti Investasi"
- PSAK No. 53 (Amandemen 2017): "Pembayaran Berbasis Saham."
- *PSAK No. 16 (Amendment 2015): "Property, Plant and Equipment"*
- *PSAK No. 69: "Agriculture"*
- *PSAK No. 2 (Amendment 2016): "Statements of Cash Flows"*
- *PSAK No. 46 (Amendment 2016): "Income Tax regarding Deferred Tax Assets Recognition for Unrealised Loss"*
- *PSAK No. 13 (Amendment 2017): "Investment Property"*
- *PSAK No. 53 (Amendment 2017): "Share Based Payment"*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

44. Standar Akuntansi Baru (Lanjutan)

- PSAK No. 15 (Penyesuaian 2017): "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK No. 67 (Penyesuaian 2017): "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain".

Interpretasi atas standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan:

- ISAK No. 33: "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka".

Standar baru dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan:

- PSAK No. 71: "Instrumen Keuangan"
- PSAK No. 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK No. 73: "Sewa"
- PSAK No. 62 (Amandemen 2017): "Kontrak Asuransi".
- PSAK No. 15 (Amandemen 2017): "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"

Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi, Grup masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru dan amandemen standar tersebut.

44. New Accounting Standards (Continued)

- PSAK No. 15 (Improvement 2017): "Investment in Associates and Joint Ventures"
- PSAK No. 67 (Improvement 2017): "Disclosure of Interests in Other Entities".

The following is interpretation of standard effective for periods beginning on or after January 1, 2019 with early adoption is permitted:

- ISAK No. 33: "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration".

The following are new standard and amendment to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2020 with early adoption is permitted:

- PSAK No. 71: "Financial Instrument"
- PSAK No. 72: "Revenue from Contract with Customer"
- PSAK No. 73: "Lease"
- PSAK No. 62 (Amendment 2017): "Insurance Contract".
- PSAK No. 15 (Amendment 2017): "Investment in Associates and Joint Ventures"

Until the date of the consolidated financial statements being authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards and amendments these standards.

45. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Berdasarkan keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan Nomor: SK-14/MBU/01/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Perubahan Nomenklatur, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset, Menteri BUMN selaku RUPS mengangkat Bapak Nasrizal Nazir sebagai Direktur PT Perusahaan Pengelola Aset.

Susunan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset per tanggal 16 Januari 2018 menjadi sebagai berikut :

Direksi:

Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur

Henry Sihotang
Andi Saddawero
Nasrizal Nazir
Ajar Setiadi

45. Subsequent Event

Based on the decision of the Minister of SOEs as the Company's General Meeting of Shareholders Number SK-14 / MBU / 01/2018 dated January 16, 2018 on the Change of Nomenclature, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company, Nasrizal Nazir as Director of the Company.

The composition of Board Directors the Company as of January 16, 2018 as follows:

Directors:

President Director
Director
Director
Director

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

45. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan (Lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pratama Persada Airborne No. 12 dan Berdasarkan SK Kemenkumham No.AHU-AH.01.03-0022536 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, pada tanggal 16 Januari 2018 terjadi pemindahan hak kepemilikan saham PT PPA Kapital atas PT Pratama Persada Airborne kepada PT Survai Udara Panas sejumlah 9.009 (Sembilan ribu Sembilan) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp9.009.000.000

45. Subsequent Event (Continued)

Based on the Shareholder Resolution Outside of the General Meeting of Shareholders of PT PPAi No 12 Based on SK Kemenkumham No.AHU-AH.01.03-0022536 regarding Receipt of Notification of Data Changes of the Company, on January 16, 2018 a transfer of share ownership of PT PPAK to PT PPAi to PT Survai Air Panas amounting to 9,009 (Nine thousand Nine) shares with a nominal value of Rp9,009,000,000

46. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian telah diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 20 Februari 2018.

46. Management Responsibility on the Consolidated Financial Statements

The Company's management is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statement. The consolidated financial statement were authorized for issue by the Directors on February 20, 2018

47. Informasi Keuangan Tambahan

Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir

47. Supplementary Financial Information

The accompanying financial information of the Company (parent entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2017 and the statement of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements.

LAMPIRAN I

APPENDIX I

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
INDUK PERUSAHAAN

Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
PARENT COMPANY

As of December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	2017 Rp	2016 Rp
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	763,292	1,214,413
Pinjaman Investasi Jangka Pendek		
Pihak Berelasi	190,066	149,664
Pihak Ketiga	298,517	54,556
Aset Keuangan Diperdagangkan		
Pihak Berelasi	80,921	78,329
Pihak Ketiga	2,314	17,561
Piutang Usaha		
Pihak Berelasi	53,292	23,885
Pihak Ketiga	2,077	3,567
Piutang Anak Perusahaan	3,121	1,486
Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan		
Pihak Berelasi	207,115	219,215
Persediaan	24,759	--
Uang Muka dan Biaya Dibayar Di Muka	26,451	4,175
Pajak Dibayar Di Muka	64,403	44,599
Aset Lancar Lainnya	22,194	69,997
Jumlah Aset Lancar	1,738,522	1,881,447
ASET TIDAK LANCAR		
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	114,858	125,710
Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi		
Pihak Berelasi	1,356,385	1,351,876
Pinjaman Investasi Jangka Panjang		
Pihak Berelasi	110,468	8
Properti Investasi	247,080	155,741
Aset Pajak Tangguhan	14,891	15,738
Investasi pada Ventura Bersama	137,188	138,821
Investasi Jangka Panjang - Entitas Anak *)	798,995	673,995
Piutang Lain-lain- Entitas Anak	13,905	12,701
Aset Tetap	4,702	4,843
Aset Tidak Lancar Lainnya	324,766	10,703
Jumlah Aset Tidak Lancar	3,123,238	2,490,136
JUMLAH ASET	4,861,760	4,371,583
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang Usaha		
Pihak Ketiga	3,229	2,342
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan		
Pihak Berelasi	189,145	157,677
Pihak Ketiga	402,970	--
Utang Pajak	4,749	4,836
Beban Akrua dan Utang Lain-lain	244,205	257,813
Hasil Pengelolaan Aset yang Masih Harus Disetor	12,722	50,627
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	857,020	473,295
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan	2,729	3,073
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2,729	3,073
JUMLAH LIABILITAS	859,749	476,368
EKUITAS		
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal Saham-Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham - Modal Dasar 5.000.000 saham		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 31 Desember 2017 dan 2016		
masing-masing 2.996.688 saham	2,996,688	2,996,688
Saldo Laba:		
Telah Ditentukan Penggunaannya	141,353	141,353
Belum Ditentukan Penggunaannya	819,691	703,731
Labas (Rugi) Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk Dijual - Bersih	44,279	53,443
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	4,002,011	3,895,215
Kepentingan Non Pengendali	--	--
JUMLAH EKUITAS	4,002,011	3,895,215
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	4,861,760	4,371,583

*) Investasi pada entitas anak disajikan sebesar biaya Perolehan

ASSETS
CURRENT ASSETS
Cash and Cash Equivalents
Short-term Investment Loans
Related Parties
Third Parties
Held for Trading Financial Assets
Related Parties
Third Parties
Accounts Receivable
Related Parties
Third Parties
Subsidiaries Receivable
Loans Receivable-Bailout
Related Parties
Inventories
Advances and Prepaid Expenses
Prepaid Taxes
Other Current Assets
Total Current Assets
NON-CURRENT ASSETS
Available for Sale Financial Assets
Loans Receivable - Restructuring and/or Revitalization
Related Parties
Short-term Investment Loans
Related Parties
Investment Property
Deferred Tax Assets
Investment in Joint Ventures
Long Term Investments-Subsidiaries *)
Receivables to Subsidiary
Property, Plant and Equipment
Other Non-Current Assets
Total Non-Current Assets
TOTAL ASSETS
LIABILITIES AND EQUITY
CURRENT LIABILITIES
Accounts Payable
Third Parties
Bank and Financial Institution Loans
Related Parties
Third Parties
Taxes Payable
Accrued Expenses and Other Payables
Proceeds from Assets Management for
Remittance
Total Current Liabilities
NON-CURRENT LIABILITIES
Employee Benefit Liabilities
Total Non-Current Liabilities
TOTAL LIABILITIES
EQUITY
Equity Attributable to Owner of the Parent
Share Capital - Rp 1,000,000 par value
per share - Authorized Capital 5,000,000 shares
Issued and Fully Paid
As of December 31, 2017 and 2016
2,996,688 shares respectively
Retained Earnings:
Appropriated
Unappropriated
Unrealized Gain (Loss) on Available for Sale Securities - Net
Total Equity Attributable to Owner of the Parent
Non-Controlling Interest
TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Investment in subsidiaries are presented at its costs

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
INDUK PERUSAHAAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PARENT COMPANY

For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	2017 Rp	2016 Rp	
PENDAPATAN USAHA	392,586	279,626	REVENUES
BEBAH USAHA	(258,614)	(183,116)	OPERATING EXPENSE
LABA USAHA	133,972	96,510	OPERATING INCOME
Pendapatan Bunga	10,785	11,616	Interest Income
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	--	223	Gain on Sale of Property, Plant, and Equipment
Beban Bunga dan Keuangan	(2,147)	(2,369)	Interest Expense and Financial Charge
Bagian Laba Ventura Bersama	(1,633)	1,573	Share of the Profit of Joint Ventures
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(5,081)	(4,552)	Other Income (Expenses)
LABA SEBELUM PAJAK	135,896	103,001	INCOME BEFORE TAX
PAJAK PENGHASILAN			INCOME TAXES
Manfaat (Beban) Pajak Kini	--	--	Current Tax Benefit (Expenses)
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan	(846)	6,473	Deferred Tax Benefit (Expenses)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(846)	6,473	Total Income Tax Expense
LABA TAHUN BERJALAN	135,050	109,474	INCOME FOR THE YEAR
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN			OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			Item that will be reclassified to profit or loss
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	(9,164)	18,417	Available for Sale Financial Assets
Total Penghasilan Komprehensif Lain	(9,164)	18,417	Total Other Comprehensive Income
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	125,886	127,891	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

APPENDIX III

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
PARENT COMPANY**

*For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)*

*) *Retained earnings includes actuarial gain (loss) arising from defined benefit plan*

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS
INDUK PERUSAHAAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
STATEMENTS OF CASH FLOWS
PARENT COMPANY

For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	2017 Rp	2016 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan	9,412	8,350	Cash Receipts from Customers
Penerimaan IPA Eks BPPN	13,444	13,879	Proceeds from SOEs' Asset Management
Penerimaan Restitusi Pajak	--	10,207	Cash Receipts from Tax Refund
Penerimaan Bunga atas Pinjaman yang Diberikan	47,924	86,577	Proceeds from Loan Receivables Interest
Penerimaan Penggantian Biaya Aset	243	1,984	Reimbursable Cost of Assets
Pembayaran Beban Usaha	(266,368)	(207,993)	Payment of Operating Expenses
Pembayaran Beban Bunga	(28,549)	(12,515)	Payment of Interest Expenses
Pembayaran Pajak	(24,683)	(3,484)	Tax Paid
Penerimaan Hasil Investasi	124,900	139,646	Proceeds of Investment
Pencairan Surat Berharga Diperdagangkan	4,341	49,717	Receipt from Trading Securities
Pengelolaan Pinjaman Karyawan	(1,204)	(2,062)	Receipts from (Payment) of Jointly Controlled Loan of Employee
Penerimaan Lainnya	38,716	28,730	Other Income
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(81,824)	113,036	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan Properti Investasi	(3,015)	(2,633)	Acquisition of Investment Properties
Pengeluaran Pinjaman yang Diberikan - Bersih	(411,397)	(439,308)	Disbursement of Loans - Net
Penempatan Deposito yang Dijaminkan	(316,000)	--	Placement for Pledged Time Deposit
Penambahan Setoran Modal pada Entitas Anak	(58,205)	--	Additional Paid Up Capital for Subsidiaries
Pencairan (Penempatan) Surat Berharga Tersedia untuk Dijual	3,970	10,543	Disbursement (Placement) Securities Available for Sale
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(784,647)	(441,398)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan Pinjaman Bank dan Non Bank	1,235,382	172,303	Receipts from Bank and Non Bank Loan
Pembayaran Pinjaman Bank dan Non Bank	(800,944)	(114,626)	Payment for Bank and Non Bank Loan
Pembayaran Dividen	(19,088)	(10,216)	Dividend Payment
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	415,350	65,101	Net Cash Provided by Financing Activities
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(451,121)	(263,261)	NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1,214,413	1,477,674	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	763,292	1,214,413	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
INFORMATION TAMBAHAN
INDUK PERUSAHAAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
ADDITIONAL INFORMATION
PARENT COMPANY

For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

1 Laporan Keuangan Tersendiri

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas terlampir adalah laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian.

1 Separate Financial Statements

The statements of financial position, statements of comprehensive income, statement of changes in equity and the related statements of cash flows are separate financial statements which are additional information on the consolidated financial statements.

2 Investasi Pada Entitas Anak

Investasi pada entitas anak sebagaimana disebutkan dalam laporan keuangan tersendiri dicatat menggunakan metode biaya perolehan.

2 Investment in Subsidiaries

Investments in subsidiaries as stated in separate financial statements are recorded using the cost method.

2017						
Perubahan Selama Tahun Berjalan/ Changes in Current Year						
Entitas Anak	Kepemilikan/ Ownership %	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir	Subsidiaries
		Biaya Perolehan/ Beginning Balance	Penyertaan/ Addition in	Penyertaan/ Reduction in	Biaya Perolehan	
		of Acquisition Cost	Participation	Participation	Ending Balance of Acquisition Cost	
Entitas Anak						Subsidiaries
PT PPA Finance	99.999	99,999	50,000	--	149,999	PT PPA Finance
PT PPA Kapital	99.996	24,999	75,000	--	99,999	PT PPA Kapital
PT Nindya Karya (Persero)	99.000	499,997	--	--	499,997	PT Nindya Karya (Persero)
PT Nindya Beton	100	49,000	--	--	49,000	PT Nindya Beton
Jumlah		<u>673,995</u>			<u>798,995</u>	Total

Optimizing **Strengths** Into **Excellence**, Enhancing Capacity for **Growth**

2017
LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Sampoerna Strategic Square,
North Tower Lantai 9-12
Jl. Jendral Sudirman Kav.45-46
Jakarta - 12930
Telp. 021 - 5798 2222
Fax. 021 - 5798 2233
<https://www.ptppa.com>